BUMN
Hadir untuk negeri

Bank BTN
Sahabat Keluarga Indonesia

Mengokohkan Landasan Pertumbuhan Berkelanjutan, Mendukung Akselerasi Program Sejuta Rumah

2016 LAPORAN TAHUNAN

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN. MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM SEJUTA RUMAH

Di tahun 2016 Bank BTN yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan mencatatkan keberhasilan dalam kinerja, menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara baik dan meraih citra positif di mata publik. Keberhasilan dicapai berkat konsistensi Perseroan dalam menjalankan bisnis berdasarkan kaidah industri dan niaga yang sehat, memiliki sumberdaya yang mampu menghasilkan *value creation, comply* dengan peraturan dan memiliki arah serta strategis yang jelas.

Sejalan dengan implementasi NAWA CITA yang dicanangkan oleh Pemerintah, bahwa transformasi BUMN ditujukan untuk menjadi agen pembangunan dan penciptaan nilai. Program Sejuta Rumah merupakan salah satu agenda dalam transformasi BUMN yaitu perbankan dan jasa keuangan serta ekonomi kerakyatan. Peran Perseroan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut terutama dari sisi perbankan dalam pembiayaan perumahan untuk rakyat.

Berkaitan dengan akselerasi Program Sejuta Rumah, Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan agenda transformasi yang telah Perseroan jalankan dalam rangka mengokohkan landasan pertumbuhan secara berkelanjutan. Perseroan tetap fokus pada penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan *approval* kredit dan optimalisasi *human capital* serta tentu saja terus melakukan pengembangan bisnis melalui penambahan ragam produk layanan *wealth management* maupun pengembangan layanan berbasis *digital banking* seperti tersedianya *Digital Lounge* dalam rangka memuaskan layanan kepada masyarakat.

Perseroan yakin akan semakin unggul dalam persaingan dengan pangsa pasar yang meningkat, menghasilkan *financial return* yang memadai sehingga menjamin pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan nilai Perseroan dalam jangka panjang, serta berkontribusi mensukseskan program nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESINAMBUNGAN TEMA

2012

Dedicated to Indonesian Families

Rumah tidak hanya merupakan kebutuhan pokok (*human basic needs*) bagi keluarga Indonesia, namun lebih dari itu. Sektor properti memiliki peran yang penting bagi perekonomian nasional. Tak kurang dari 175 industri bergantung pada sektor ini. Banyak sekali tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga berdampak pada berkurangnya pengangguran.

2013

Transformasi yang didukung dengan implementasi Tata Kelola yang baik dalam Pencapaian Bisnis Berkualitas

Mengarungi tahun 2013, Perseroan dalam proses menuju level selanjutnya melalui transformasi yang meliputi bidang bisnis, budaya, serta infrastruktur (*foundations*). Sesuai fokus dan visi Perseroan untuk menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan, maka tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai dasar dalam membangun rumah BTN. Seperti seseorang yang mendirikan rumah, maka orang itu akan menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu yang kokoh, sehingga ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Dalam hal ini dasar yang kita bangun bersama melalui proses transformasi adalah implementasi tata kelola yang baik sehingga ketika datang goncangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, Perseroan tidak dapat digoyahkan, bahkan mampu untuk terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai bisnis yang berkualitas secara berkelanjutan di tahun-tahun yang penuh tantangan ke depan menuju *World Class Banking*.

2014

BTN TERDEPAN, GCG RUMAHKOE

Menghadapi tahun 2015 yang sering disebut sebagai era ekonomi baru, era persaingan bebas ASEAN, Perseroan meluncurkan tagline yang sekaligus menjadi budaya perusahaan yang baru yaitu BTN TERDEPAN, GCG RUMAHKOE. Tagline baru ini menunjukkan tekad Perseroan yang besar untuk mewujudkan visi perusahaan "Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan" dengan berlandaskan pada *Good Corporate Governance*. *Tagline* baru ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi yang telah dijalani Perseroan sejak tahun 2013 lalu, dimana Perseroan menjadikan GCG sebagai panglima menuju keberhasilan perusahaan. Untuk itu, Manajemen Perseroan berupaya untuk menjadikan *tagline* tersebut sebagai ruh operasional Perseroan. BTN Terdepan juga menjadi perwujudan sikap dan tekad bahwa Perseroan siap menghadapi era ekonomi baru, dan mempertahankan kepemimpinannya, khususnya di bidang pembiayaan perumahan.

2015

BTN 5IAP Menjadi Pemain Utama Program Sejuta Rumah

Posisi Perseroan di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh. Ditopang sejarah panjang di bidang tersebut, ditambah "Program 5 Siap", maka Perseroan siap menjadi pemain utama program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. 5 Siap itu adalah Siap Sumber Daya Manusia (SDM), Siap Teknologi, Siap Proses Bisnis, Siap Pendanaan dan Siap Suplai Rumah. Dengan bekal itu, Perseroan yakin akan terus dapat meningkatkan kinerjanya kini dan di masa mendatang.

2016

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM SEJUTA RUMAH

Di tahun 2016 Perseroan mencatatkan keberhasilan dalam kinerja, menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara baik dan meraih citra positif di mata publik. keberhasilan dicapai berkat konsistensi Perseroan dalam menjalankan bisnis berdasarkan kaidah industri dan niaga yang sehat, memiliki sumberdaya yang mampu menghasilkan *value creation, comply* dengan peraturan dan memiliki arah serta strategis yang jelas. Sejalan dengan implementasi Nawa Cita yang dicanangkan oleh Pemerintah, bahwa transformasi BUMN ditujukan untuk menjadi agen pembangunan dan penciptaan nilai. Program Sejuta Rumah merupakan salah satu agenda dalam transformasi BUMN yaitu perbankan dan jasa keuangan serta ekonomi kerakyatan. Peran Perseroan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut terutama dari sisi perbankan dalam pembiayaan perumahan untuk rakyat.

Berkaitan dengan akselerasi Program Sejuta Rumah, Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan agenda transformasi yang telah Perseroan jalankan dalam rangka mengokohkan landasan pertumbuhan secara berkelanjutan. Perseroan tetap fokus pada penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan *approval* kredit dan optimalisasi *human capital* dan tentu saja terus melakukan pengembangan bisnis melalui penambahan ragam produk layanan *wealth management* maupun pengembangan layanan berbasis digital banking seperti tersedianya *Digital Lounge* dalam rangka memuaskan layanan kepada masyarakat.

Perseroan yakin akan semakin unggul dalam persaingan dengan pangsa pasar yang meningkat, menghasilkan *financial return* yang memadai sehingga menjamin pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan nilai Perseroan dalam jangka panjang, serta berkontribusi mensukseskan program nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR ISI

3 Tema
4 Kesinambungan Tema
6 Daftar Isi

KILAS KINERJA

10 Kinerja Utama 2016
11 Keunggulan Perseroan
14 Perseroan di Mata Mereka
16 Program Nawa Cita dan *Roadmap* Transformasi
20 Ikhtisar Data Keuangan Penting
31 Peristiwa Penting Selama Tahun 2016
36 Penghargaan dan Sertifikasi

LAPORAN MANAJEMEN

44 Laporan Dewan Komisaris
52 Profil Dewan Komisaris
60 Profil Dewan Pengawas Syariah
64 Laporan Direksi
80 Profil Direksi
92 Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

PROFIL PERUSAHAAN

97 Identitas Perseroan
98 Jejak Langkah Perseroan
100 Riwayat Singkat Perseroan
102 Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan
105 Strategi Mencapai Visi dan Misi Perseroan
106 *Brand* Perusahaan
107 Bidang Usaha
109 Produk dan Jasa
122 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
128 Struktur Organisasi Perusahaan
130 Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi
131 Profil Pejabat Eksekutif dibawah Direktur
134 Profil Pegawai
143 Struktur Grup, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura
147 Peta Wilayah Operasional
148 Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Cabang
155 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
156 Informasi *Website* Perusahaan

INFORMASI BAGI INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM

162 Kondisi Pasar Modal Dan Kinerja Saham Perseroan
166 Ikhtisar Saham
167 Kronologis Pencatatan Saham
- 168 Pencatatan Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO)
- 168 Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue*)
- 169 Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/atau Karyawan

170 Kronologis Pencatatan Efek
- 170 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
- 173 Kronologis Pencatatan Sekuritisasi KPR
- 174 Kronologis Pencatatan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)
- 174 Ikhtisar *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) Telah Jatuh Tempo

176 Kebijakan dan Kronologi Pembayaran Dividen
- 176 Kebijakan *Deviden*
- 176 Pelaksanaan Pembayaran Dividen

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

180 Analisis Industri
- 181 Perekonomian Dunia
- 182 Perekonomian Indonesia
- 183 Kondisi Industri Perbankan
- 185 Posisi Perseroan di Industri Perbankan Indonesia

187 Aspek Pemasaran
- 187 Strategi Pemasaran
- 194 Pangsa Pasar

196 Analisis Operasional
- 196 Kinerja Operasional Per Segmen
  - 197 Perbankan Konsumer
  - 206 Perbankan Komersial
  - 212 Unit Usaha Syariah
  - 217 Jasa dan Layanan Perbankan
- 222 Profitabilitas Per Segmen

224 Prospek Usaha 2017
- 224 Prospek Perekonomian
- 225 Prospek Bisnis Bidang Perumahan dan Program Sejuta Rumah Bagi Perseroan

227 Informasi Kelangsungan Usaha
- 227 Penilaian Kelangsungan Usaha
- 227 Posisi Perseroan

229 Strategi Pengembangan Usaha

231 Analisis Keuangan
- 231 Laporan Posisi Keuangan
  - 232 Aset
  - 235 Liabilitas
  - 238 Ekuitas
- 239 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 244 Laporan Arus Kas

247 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

250 Rasio Keuangan

253 Permodalan dan Penerapan Manajemen Risiko
- 253 Struktur Modal
- 256 Penerapan Manajemen Risiko

312 Kontribusi kepada Negara
- 312 Setoran Pajak
- 312 Pembayaran Dividen

315 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
318 Investasi Barang Modal
319 Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan
320 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
322 Komitmen dan Kontinjensi
323 Dampak Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Perseroan
324 Informasi Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
325 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal
326 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
327 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi
334 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan
339 Perubahan Kebijakan Akuntansi
342 Perbandingan Target,Realisasi dan Proyeksi
436 KPI dan Tingkat Kesehatan Bank
348 Manajemen Sumber Daya Manusia
348 Pengelola Sumber Daya Manusia
351 *Roadmap* Sumber Daya Manusia
353 *Organization Development*
353 *Human Capital Acquisition*
354 *Learning and Development*
356 *Human Capital Engagement*
359 *Human Capital Reward*
359 *Human Capital Information System*
360 Hubungan Industrial
361 *Digital Banking*
363 Tata Kelola Teknologi Informasi

TATA KELOLA PERUSAHAAN

376 Pendahuluan Tata Kelola Perusahaan
379 *Roadmap* Tata Kelola Perseroan
381 Membangun Komitmen Implementasi GCG Perseroan Berkelanjutan
404 Struktur, Mekanisme dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
407 Rapat Umum Pemegang Saham
434 Dewan Komisaris
461 Direksi
488 Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris
523 Komite Di Bawah Direksi
535 Kebijakan Keberagaman dan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi
540 Penerapan Tata Kelola Remunerasi Perseroan
551 Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS)
564 Sekretaris Perusahaan
575 Sistem Pengendalian Internal
580 Fungsi Audit Internal
594 Fungsi Kepatuhan
607 Fungsi Manajemen Risiko
625 Fungsi Audit Eksternal
629 Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)
633 Kebijakan Pengendali Gratifikasi
635 *Whistleblowing System*
642 Permasalahan Hukum
644 Pengadaan Barang dan Jasa
651 Akses Informasi
653 Rencana Strategis Bank
660 Pengungkapan Aspek Lainnya

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

667 Pendahuluan
670 Kaleidoskop CSR Perseroan 2016
672 Kebijakan dan Bidang Kegiatan CSR
675 Anggaran CSR
677 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup
682 Tanggung Jawab Terkait Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
687 Tanggung Jawab Terhadap Sosial dan Kemasyarakatan
699 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TAHUN 2016

KRITERIA OJK

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

KINERJA UTAMA PERSEROAN TAHUN 2016

01 Total Aset meningkat **24,66%**

02 Laba Bersih meningkat **41,49%**

03 Employment Support **9.380**

04 Indeks Kepuasan Nasabah (CSI) **82,61%**

05 Kredit dan pembiayaan meningkat **18,34%**

06 Dana Pihak Ketiga meningkat **25,27%**

07 Alokasi Dana CSR **Rp. 4,37 miliar**

08 NPL menurun **2,84%**

09 CAR meningkat **20,34%**

JUARA 1 ARA 2015
Kategori BUMN Keuangan Listed

Alokasi Kredit Menurut Pembiayaan:
- KPR Bersubsidi sebesar Rp. 15,6 triliun, meningkat 33,21%
- KPR Non Subsidi sebesar Rp, 12,7 triliun, meningkat 4,35%

Posisi kuat sebagai bank di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh di tahun 2016. Didukung 9.380 pegawai yang terdiri dari 8.561 pegawai tetap dan 819 pegawai kontrak, Perseroan terus menorehkan prestasinya. Di tahun 2016, tercatat Aset Perseroan sebesar Rp. 214,17 triliun naik 24,66% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 171,81 triliun, Kredit dan Pembiayaan sebesar Rp. 164,45 triliun naik 18,34% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 138,96 triliun, Laba Bersih Tahun Berjalan mencapai Rp. 2,62 triliun naik 41,49% dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 159,99 triliun naik 25,27% dari tahun sebelumnya. Dari sisi permodalan Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat 20,34% dan Non Performing Loan (NPL) turun menjadi 2,84%. Sementara itu Perseroan telah mengalokasikan kredit menurut pembiayaan yaitu: KPR Subsidi Rp. 15,6triliun; KPR Non Subsidi Rp. 12,7 triliun, dan Kredit Perumahan Lainnya Rp. 1,8 triliun

Implementasi tata kelola perusahaan dimaknai Perseroan sebagai alat sekaligus mekanisme untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kepercayaan *stakeholder*, menumbuhkan integritas perusahaan dan meningkatkan *shareholder value*. Pencapaian sebagai Juara 1 A*nnual Report Award* (ARA) untuk kategori BUMN Keuangan Listed di tahun 2016, semakin mengukuhkan posisi Perseroan dalam keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan implementasi tata kelola dengan praktik terbaik yang dibuktikan dengan pencapaian prestasi predikat *The Best Overall ASEAN Corporate Governance Scorecard* tahun 2016 oleh IICD. Semua catatan prestasi ini, semakin meyakinkan bahwa Perseroan telah mengokohkan landasan untuk mendukung akselerasi Program Sejuta Rumah.

KEUNGGULAN PERSEROAN TAHUN 2016

TERDEPAN DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN NASIONAL

PANGSA PASAR KPR

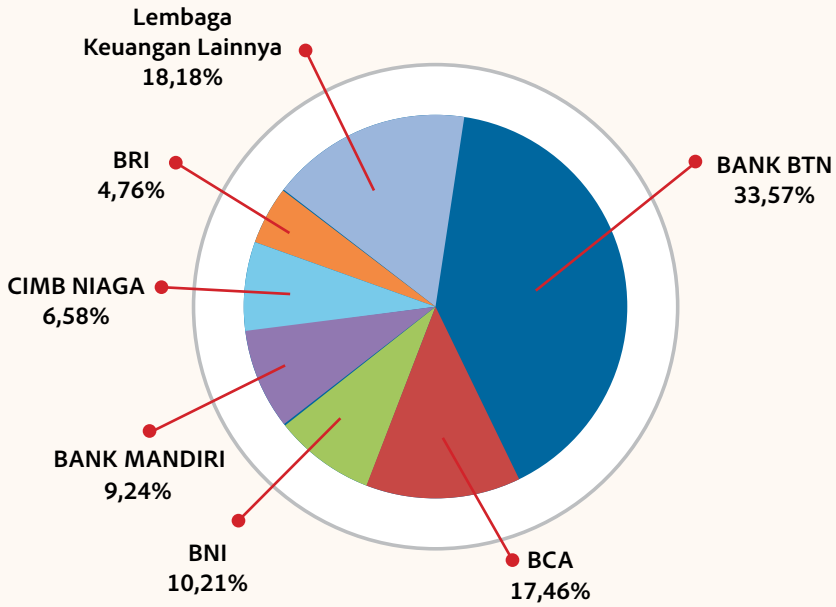

Sumber: Diolah dari berbagai macam sumber

Tahun 2016 Perseroan tetap mendominasi pasar pembiayaan perumahan nasional. Di tahun 2016 ini Perseroan telah memberikan pembiayaan KPR sebesar Rp28 triliun atau sebesar 37,33% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Penguasaan bisnis perumahan mencapai 33,57% per September 2016 dan terbesar di antara perbankan nasional. Pangsa pasar pembiayaan KPR subsidi Perseroan sebesar 96,12%.

KEKUATAN JARINGAN DENGAN PEMAIN BISNIS PERUMAHAN

Sebagai bank dengan pangsa pasar terbesar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia, Perseroan terus melakukan upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat akan hunian yang masih sangat tinggi, seiring dengan pelonggaran aturan uang muka KPR atau *loan to value* . Perseroan memiliki *relationship* yang kuat dengan para *stakeholders* bisnis perumahan yang memungkinkan Perseroan menjadi integrator sisi *supply* dan sisi *demand* bisnis perumahan. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 3000 pengembang perumahan untuk membiayai 595.566 unit rumah KPR di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan dari sisi *demand*, Perseroan aktif menggelar pameran perumahan seperti Indonesia Properti Expo (IPEX) yang merupakan rangkaian dari strategis korporasi dalam menjaring masyarakat yang ingin membeli rumah dengan skim KPR sekaligus dalam rangka pemenuhan program Sejuta Rumah. Tahun 2016 Perseroan telah menggelar 2 kali IPEX yang berlangsung di Jakarta dengan total transaksi Rp5.3 triliun untuk total pengajuan > 11.000 unit rumah. Upaya lain yang telah dilakukan Perseroan untuk meningkatkan *demand* adalah dengan pelaksanaan program akad kredit secara massal, antara lain telah dilaksanakan program akad 1.000 KPR dalam sehari dan memfasilitasi KPR dengan DP 1%.

KECEPATAN DAN KEMUDAHAN DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Seiring dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 13 'Rumah Murah Untuk Rakyat', dimana Pemerintah memberikan kemudahan perijinan untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini memangkas jumlah izin dan waktu pengurusan yang berimbas pada penurunan biaya.

Guna menunjang hal tersebut, Perseroan menyediakan kemudahan akses dalam jasa/layanan bisnis perumahan bagi masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas **Teknologi Informasi** melalui sistem aplikasi kredit yang terintegrasi. Perseroan juga sudah melakukan **percepatan pelayanan dan proses kredit** secara fokus, baik untuk KPR subsidi maupun KPR non subsidi. Termasuk menambah jaringan pelayanan dan proses kredit melalui kantor layanan Perseroan di daerah-daerah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana-dana berbiaya murah dan *fee-based income*, serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia, pada tahun 2016 Perseroan melaksanakan beberapa inisiatif di bidang digital dan *branchless banking*. Beberapa produk dan layanan baru *digital banking* yang dikembangkan adalah *e-banking*, yang terdiri dari *cash management*, EDC *purchase/ payment*, portal BTN *property, eMoney* dan *Smart Kiosk*.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi, Perseroan telah menyiapkan program *eForm* dan *push teller transaction*, dan telah membuka beberapa *digital outlet*. Perseroan juga berpartisipasi dalam program pemerintah LAKU PANDAI. Komitmen Perseroan untuk mendukung inklusi keuangan ini telah dimulai pada tahun 2010, dengan meluncurkan Tabungan BTN Cermat.

Pengembangan produk Tabungan BTN Cermat (Mencerdaskan Masyarakat) kemudian diperluas, melalui peluncuran Tabungan BTN Cermat yang didukung mesin *Electronic Data Captured* atau EDC. Layanan Tabungan BTN Cermat kemudian diperluas dengan teknologi berbasis Ponsel atau *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD). Dengan layanan USSD ini, masyarakat dapat melakukan transaksi Tabungan BTN Cermat melalui komunikasi dari telepon seluler pengguna.

PENCAPAIAN PRESTASI TIADA HENTI

Sejalan dengan pertumbuhan usaha, selama tahun 2016 Perseroan terus meningkatkan standar layanannya menuju layanan kelas dunia dari sisi *operational excellence* (kecepatan dan ketepatan proses KPR), ragam jaringan dan produk yang didukung oleh teknologi informasi yang handal. Atas upaya yang dilakukan, Perseroan menerima berbagai macam penghargaan terkait dengan *service excellence*. Penghargaan tersebut adalah:

TERDEPAN DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Perseroan memiliki SDM yang ahli di bidang pembiayaan perumahan. Perseroan sebagai pelopor pembiayaan perumahan sejak tahun 1976 dan telah membiayai KPR bagi rakyat Indonesia lebih dari 3,8 juta unit rumah dan pada tahun 2015 Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat.

Untuk meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis, Perseroan melakukan revitalisasi aliansi strategis dan mengembangkan *smart branch*. Konsep layanan ini mengintegrasikan dan mengedepankan teknologi digital untuk menciptakan *customer experience* yang memberikan kemudahan dan solusi bagi nasabah.

APA KATA MEREKA TENTANG PERSEROAN

Presiden RI Joko Widodo

1

Presiden RI Joko Widodo

"Saya optimistis program pembangunan Sejuta Rumah bisa cepat kita bangun. Tidak tergantung kepada Kementerian PUPR. Bisa disalurkan ke pengembang swasta lewat BTN misalnya, semua bisa dilakukan."

Sumber : www.setkab.go.id

2

Menteri BUMN - Rini M, Soemarno

"BTN ini ujung tombak, bisa membiayai konstruksinya dan membiayai kreditnya."

Sumber: www.finance.detik.com

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno

3

Menteri PUPR - Basuki Hadimujiono

"Bank BTN telah berperan mewujudkan program pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan selama hampir 40 tahun terakhir semenjak diluncurkannya program pembangunan rumah bersubsidi di Indonesia."

Sumber: www.pu.go.id

4

Prof. Mohan Sawhney

"Bank BTN sangat fokus dalam pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui BTN *Housing Finance Center* yang merupakan terobosan yang dilakukan Bank BTN sebagai salah satu solusi permasalahan perumahan di Indonesia."

Sumber : www.sp.beritasatu.com

PROGRAM NAWA CITA DAN *ROADMAP* TRANSFORMASI

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas sebagai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia yang disebut dengan "NAWA CITA". Agenda tersebut yaitu :

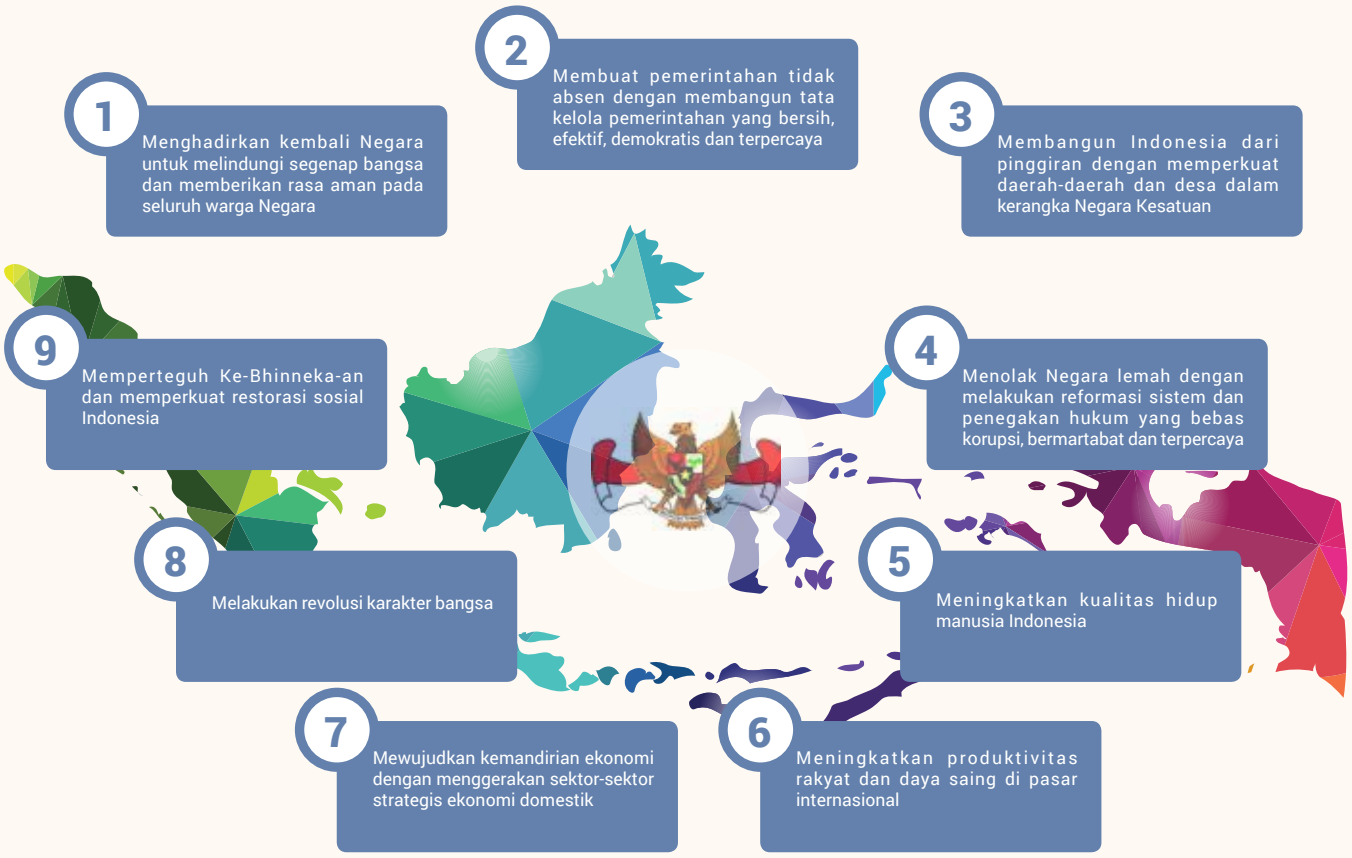

Dari agenda prioritas tersebut, Kementerian BUMN membuat *roadmap* yang selaras dengan Agenda "NAWA CITA" tersebut pada agenda ke-7 yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Sektor strategis tersebut terdiri dari sektor Ekonomi Kerakyatan serta sektor Perbankan dan Jasa Keuangan.

Dukungan pembiayaan untuk mendukung Infrastruktur dan konektivitas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur dan konektivitas	Mendorong Kemandirian keuangan melalui Inklusi Finansial yang bertujuan Meningkatkan akses keuangan formal kepada masyarakat	Meningkatkan daya saing dan efisiensi melalui Sinergi ATM dan EDC Tujuan Efisiensi pengelolaan ATM dan EDC Bank-bank BUMN	Konsolidasi Perbankan Syariah yang bertujuan melakukan penguatan Perbankan Syariah BUMN melalui konsolidasi
• Membentuk *task force* di bawah Kementerian BUMN yang akan mengintegrasikan rencana pembiayaan dan mengawasi pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur BUMN. • Menyusun *roadmap* pembiayaan infrastruktur BUMN (identifikasi proyek strategis BUMN per tahun dari 2015 s.d. 2019)	• Melakukan pemetaan jaringan kantor cabang bank dan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat akses layanan keuangan/ perbankan rendah. • Memberikan kemudahan akses keuangan/ perbankan melalui mekanisme *agent banking* (*branchless banking*) dimana bank tidak perlu membuka jaringan kantor cabang untuk melayani masyarakat khususnya di daerah *remote*. • Sinergi antara operator telekomunikasi dengan lembaga keuangan/ bank khususnya dalam pemanfaatan teknologi *mobile phone*. • Penerapan kebijakan/ peraturan terkait penyaluran dana bantuan/subsidi Pemerintah (G2P) melalui elektronik (*non cash*) untuk mendorong percepatan pemanfaatan layanan perbankan. • Pemberlakuan *unique Financial ID Number* khususnya bagi penerima bantuan/subsidi Pemerintah. • Sinergi penjualan produk asuransi di agen bank.	• Mengintegrasikan pengelolaan ATM dan EDC dalam satu kendali di bawah Bank-bank BUMN • Menyiapkan infrastruktur pengelolaan ATM dan EDC Bank-bank BUMN. • Memperkuat daya saing Bank-bank BUMN melalui pengelolaan ATM dan EDC secara lebih efisien dan kuat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN • Memperluas cakupan ATM dan EDC Bank-bank Himbara secara nasional sekaligus memperkuat akses perbankan masyarakat	• *Timeline* pra konsolidasi (pembentukan tim konsolidasi, penunjukkan konsultan independen, analisis aspek legal, analisis struktur konsolidasi dan struktur transaksi, identifikasi *stakeholder* dan *implementasi stakeholder management*) • *Timeline* paska konsolidasi (pembentukan tim paska konsolidasi, *implementasi business* dan *process model*, penyelarasan infrastruktur, organisasi dan SDM dan penyelarasan budaya perusahaan dan komunikasi)

Peran Perseroan

Menyukseskan Program Sejuta Rumah untuk rakyat yang dapat membantu mengatasi *backlog* rumah untuk masyarakat Indonesia.	Meluncurkan produk Laku Pandai dari Tabungan BTN Cermat sebagai wujud peningkatan akses keuangan formal kepada masyarakat.	Bekerjasama dengan Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) dalam meluncurkan ATM Merah Putih.	Mendukung *roadmap* pengembangan perbankan syariah secara Nasional sebagai wujud penguatan perbankan syariah.

Untuk mencapai hal ini, Perseroan telah menetapkan target jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yaitu menuju *Transformational Enterprise-Global Mindset* dengan target menjadi perusahaan global di bidang perumahan, *property* dan infrastruktur dasar. Untuk mencapai rencana tersebut, Perseroan telah melakukan transformasi sejak tahun 2013 dan dibagi ke dalam tiga tahapan.

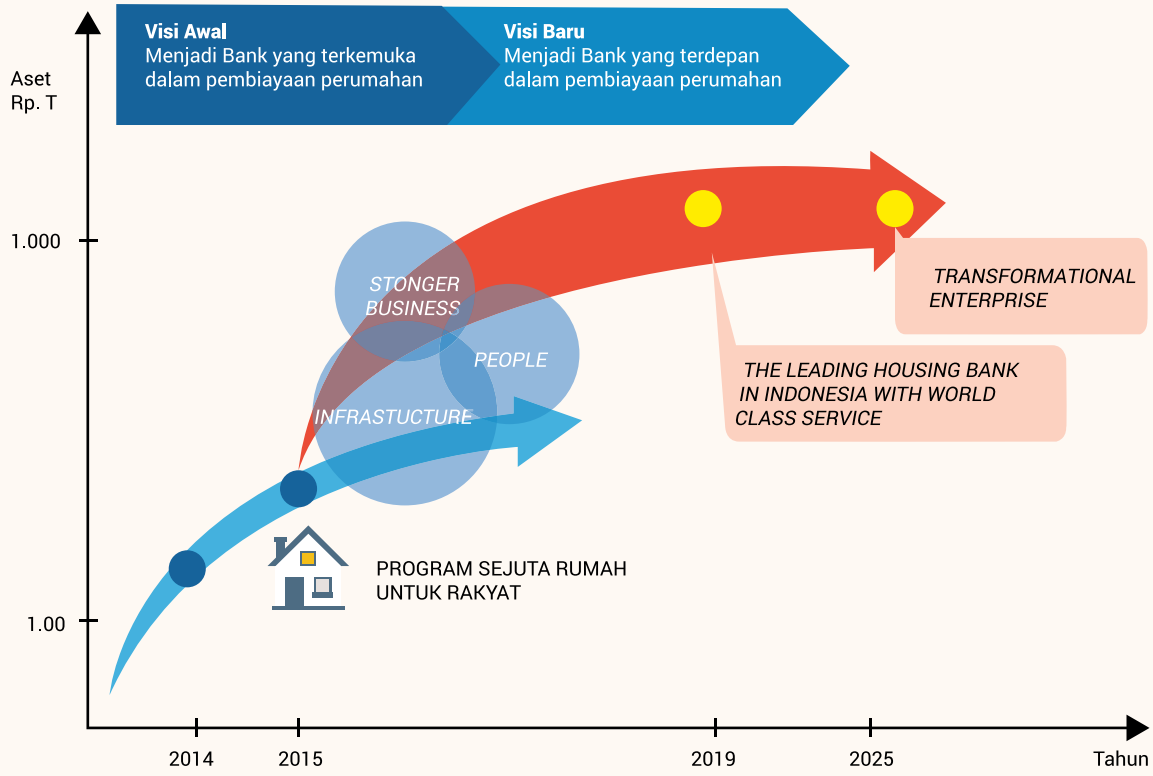

Tahap I
Tahun 2013 – 2015 yaitu tahap *survival period*, dengan tahapan yang dicapai adalah *domination nation wide market leader* yaitu menguasai bisnis perumahan nasional.
Persyaratan yang diperlukan dalam tahapan ini adalah
(a) mendominasi *market share* atas pasar perumahan,
(b) *protected market,*
(c) *predictable change,* dan
(d) *financial capital driven.*

Tahap II
Tahun 2016 – 2019 yaitu tahap *digital banking period,* dengan tahapan yang akan dicapai adalah *the leading housing bank Indonesia with world class service.*
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahapan ini adalah:
(a) *dominace by speed,*
(b) *technology enhance,*
(c) *rapid change* dan
(d) *human capital driven.*

Tahap III
Tahun 2020 – 2025 yaitu tahap *global playership period,* dengan tahapan yang akan dicapai adalah *transformational Enterprise Global Mindset.*
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahap ini adalah:
(a) *size and speed thru network,*
(b) *global free trade,*
(c) *continuous change* dan
(d) *human and finance driven.*

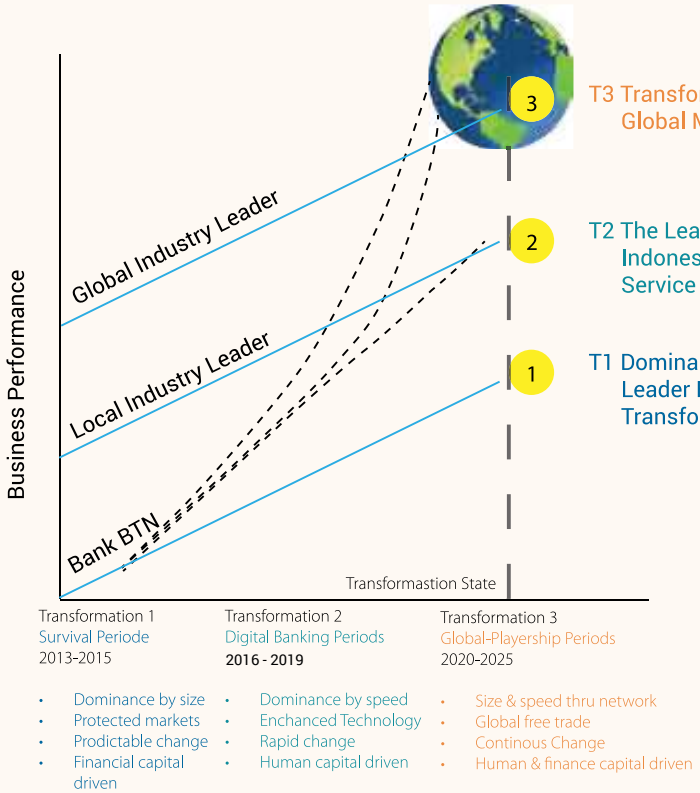

Saat ini transformasi Perseroan telah memasuki *digital banking period*. Lingkup yang dikembangkan pada tataran ini meliputi *Product* & *Channels*, Proses serta Organisasi & *Culture*. Dalam periode *digital banking* ini Perseroan telah mengembangkan berbagai produk dan layanan berbasis digital. Selain A*TM, CDM, CRM, EDC, Smart Kiosk* saat ini juga telah dikembangkan berbagai produk dan fitur layanan berbasis *Mobile/Internet Banking, Web Aplication, QR Code, NFC, Debit Online* (*e-Commerce*), *Prepaid* dan *Close Loop* yang bertujuan untuk optimalisasi layanan nasabah, mendukung pengembangan *smart city*, komunitas dan berbagai program bantuan pemerintah.

Untuk meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis, Perseroan melakukan revitalisasi aliansi strategis dan pengembangkan *smart branch*. Konsep layanan ini mengintegrasikan dan mengedepankan teknologi digital untuk menciptakan *customer experience* yang memberikan kemudahan dan solusi bagi nasabah.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 5 TAHUN TERAKHIR

POSISI KEUANGAN (Rp juta)	
Aktiva Produktif	
Kredit yang Diberikan	
Pembiayaan/Piutang Syariah	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	
Efek-Efek	
Obligasi Pemerintah	
Total Aset	
Simpanan dari Nasabah	
Giro	
Tabungan	
Deposito Berjangka	
Simpanan dari Bank Lain	
Efek-Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	
Surat Berharga yang Diterbitkan	
Pinjaman yang Diterima	
Total Liabilitas	
Total Ekuitas	
LABA RUGI (Rp juta)	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	
Beban Bunga dan Bonus	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	
Pendapatan Operasional Lainnya	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non Keuangan	
Pembalikan (Beban) Estimasi Penyisihan Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi	
Beban Operasional Lainnya	
Laba Operasional	
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	
Laba Sebelum Beban Pajak	
Beban Pajak	
Laba Tahun Berjalan	
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik	
Kepentingan Non Pengendali	
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan-Setelah Pajak	

	2012	2013	2014	2015	2016
	120.328.528	128.161.082	141.561.595	168.035.035	206.477.677
	75.410.705	92.386.308	106.271.277	127.732.158	150.221.960
	6.000.058	8.081.083	9.644.524	11.223.646	14.224.421
	11.472.346	4.839.318	1.496.455	7.839.477	17.581.350
	1.022.565	4.210.440	5.446.372	1.819.562	4.186.141
	7.468.930	8.384.960	8.238.065	8.230.908	9.243.639
	111.748.593	**131.169.730**	**144.582.353**	**171.807.592**	**214.168.479**
	80.667.983	96.207.622	106.470.677	127.708.670	159.987.717
	13.271.227	19.116.196	23.422.618	31.368.443	45.846.055
	21.540.425	24.237.893	26.167.914	30.757.681	34.826.208
	45.856.331	52.853.533	56.880.145	65.582.546	79.315.454
	706.703	275.257	1.179.269	1.721.198	3.652.735
	2.335.000	2.652.730	3.817.603	2.135.091	1.385.000
	7.136.776	8.836.711	8.519.884	12.492.202	14.919.910
	6.737.260	7.073.032	6.998.213	7.726.728	4.999.616
	101.469.722	**119.576.373**	**132.329.458**	**157.947.485**	**195.037.943**
	10.278.871	**11.593.357**	**12.252.895**	**13.860.107**	**19.130.536**
	8.818.579	10.782.877	12.807.328	14.966.209	17.138.819
	(4.091.760)	(5.129.554)	(7.342.747)	(8.155.133)	(8.975.274)
	4.726.819	5.653.323	5.464.581	6.811.076	8.163.545
	571.494	763.983	894.820	1.106.526	1.282.822
	(212.624)	(430.289)	(771.166)	(901.008)	(707.531)
	(1.159)	(2.066)	(729.000)	7.198	-
	(3.213.561)	(3.849.042)	(4.010.139)	(4.490.187)	(5386.604)
	1.870.969	2.135.909	1.577.367	2.533.605	3.352.232
	(7.767)	4.862	1.960	8.281	(22.148)
	1.863.202	2.140.771	1.579.327	2.541.886	3.330.084
	(499.240)	(578.610)	(433.755)	(690.979)	(711.179)
	1.363.962	1.562.161	1.145.572	1.850.907	2.618.905
	-	-	1.145.572	1.850.907	2.618.905
	-	-	-	-	-
	1.357.839	1.443.057	1.120.716	1.811.337	5.631.617

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik
Kepentingan Non Pengendali
Laba per Saham (Nilai Penuh)
RASIO KEUANGAN (%)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Non Performing Loan (NPL) *Gross*
Non Performing Loan (NPL) *Netto*
Return On Asset (ROA)
Return On Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasonal Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Loan to Deposit Ratio (LDR)
KEPATUHAN (%)
Persentase Pelanggaran BMPK
Pihak Terkait
Pihak Tidak Terkait
Persentase Pelampauan BMPK
Pihak Terkait
Pihak Tidak Terkait
Giro Wajib Minimum (GWM)
GWM Utama Rupiah
Konvensional
Syariah
GWM Valuta Asing
Posisi Devisa *Netto*

IKHTISAR INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 5 TAHUN TERAKHIR

Jumlah Kantor Cabang
Jumlah ATM
Jumlah Pegawai
Skor GCG

	2012	2013	2014	2015	2016
	-	-	1.120.716	1.811.337	5.631.617
	-	-	-	-	-
	148	148	108	175	247
	17,69	15,62	14,64	16,97	20,34
	4,09	4,05	4,01	3,42	2,84
	3,12	3,04	2,76	2,11	1,85
	1,94	1,79	1,14	1,61	1,76
	18,23	16,05	10,95	16,84	18,35
	5,83	5,44	4,47	4,87	4,98
	80,74	82,19	88,97	84,83	82,48
	100,90	104,42	108,86	108,78	102,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,15	9,29	8,09	7,95	6,72
	8,00	8,10	5,09	5,04	5,08
	8,03	8,03	8,39	8,08	8,47
	0,70	1,01	1,92	1,74	0,29

Keterangan:
1. Perseroan tidak memiliki investasi pada entitas asosiasi.
2. Perseroan tidak memiliki anak perusahaan sehingga laba dan penghasilan komprehensif lain tidak dikelompokan ke dalam diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali

	2012	2013	2014	2015	2016
	65	65	65	65	65
	1.404	1.504	1.830	1.830	1.830
	7.142	8.011	8.582	9.042	9.380
	3	3	2	2	2

JUMLAH ASET

(dalam Juta)

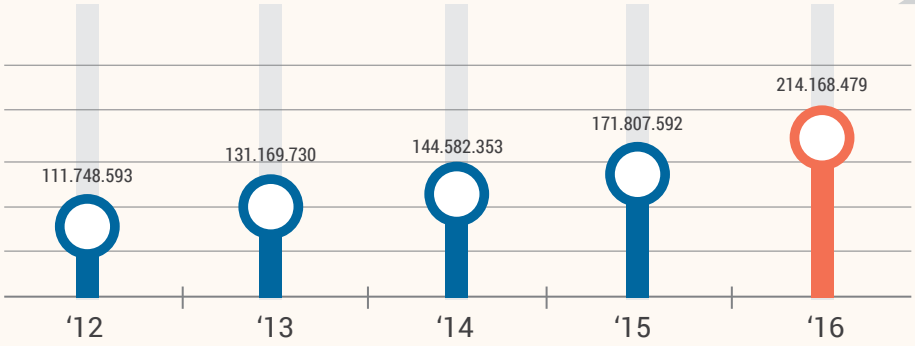

Jumlah Aset tahun 2016 **meningkat** dari Rp171.807.592 juta menjadi Rp214.168.479 juta.

JUMLAH LIABILITAS

(dalam Juta)

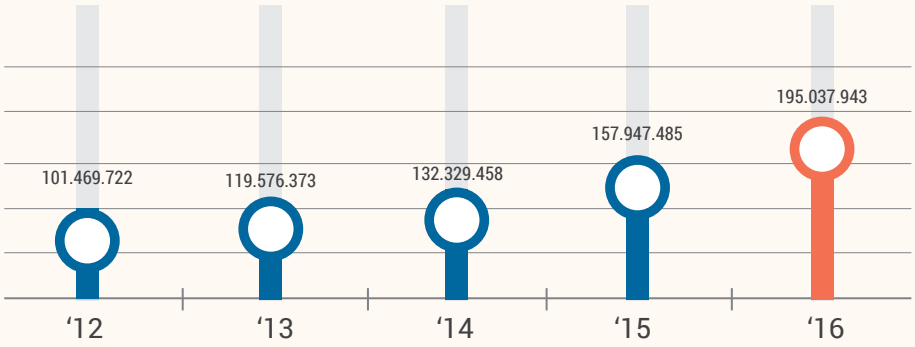

Jumlah Liabilitas tahun 2016 **meningkat** dari Rp157.947.485 juta menjadi Rp195.037.943 juta.

JUMLAH EKUITAS

(dalam Juta)

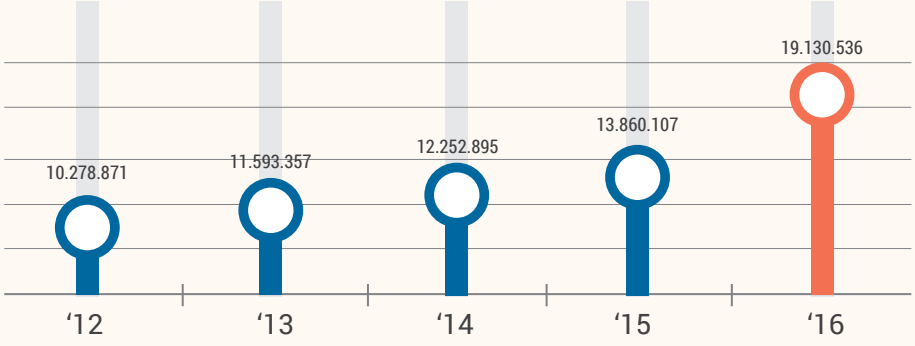

Jumlah Ekuitas tahun 2016 **meningkat** dari Rp13.860.107 juta menjadi Rp19.130.536 juta.

PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

(dalam Juta)

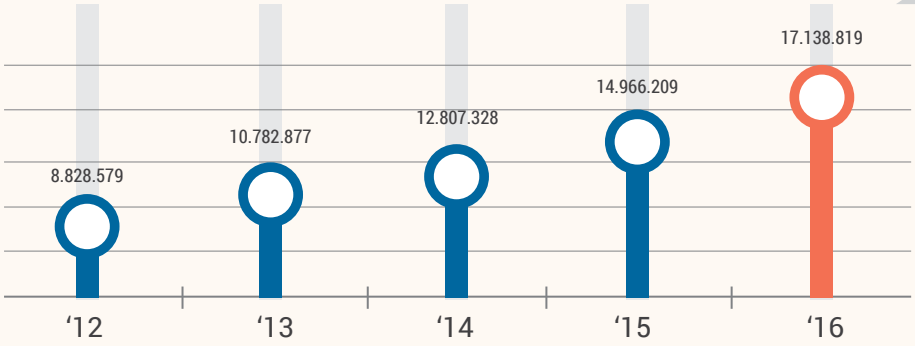

Pendapatan bunga dan bagi hasil tahun 2016 **meningkat** dari Rp14.966.209 juta menjadi Rp17.138.819 juta.

BEBAN BUNGA DAN BONUS

(dalam Juta)

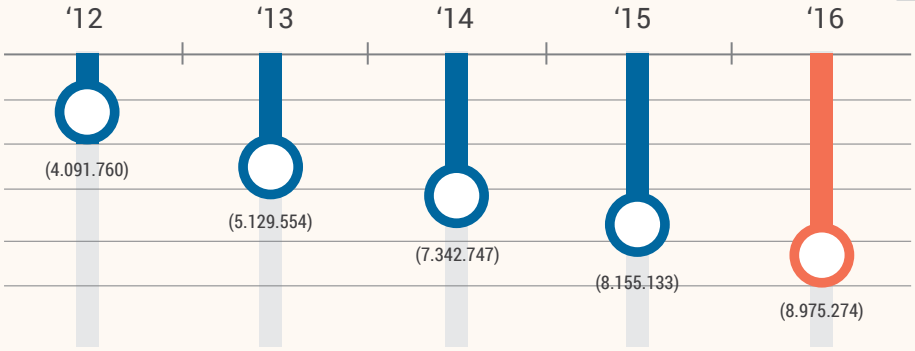

Beban bunga dan bonus tahun 2016 **meningkat** dari Rp(8.155.133) juta menjadi Rp(8.975.274) juta.

LABA OPERASIONAL

(dalam Juta)

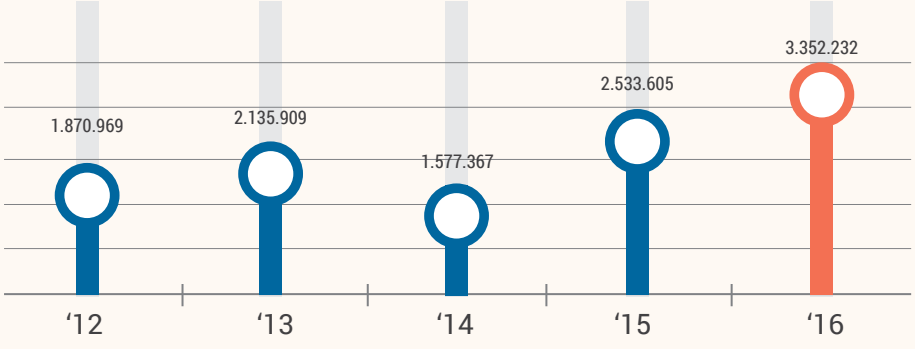

Laba operasional tahun 2016 **meningkat** dari Rp2.533.605 juta menjadi Rp3.352.232 juta.

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

(dalam Juta)

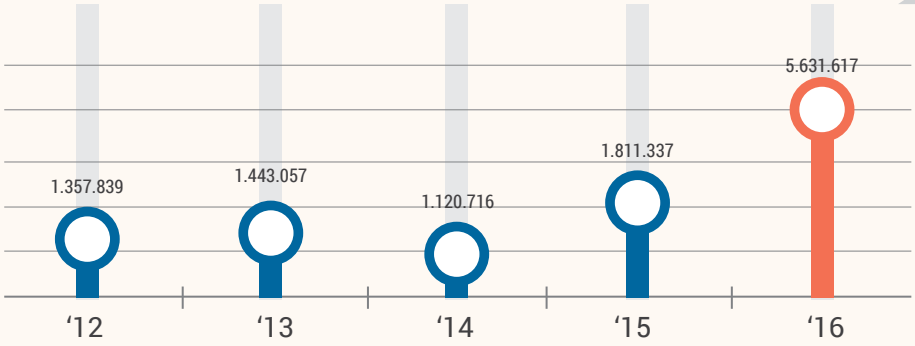

Total laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak tahun 2016 **meningkat** dari Rp1.811.337 juta menjadi Rp5.631.617 juta

RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR)

(dalam %)

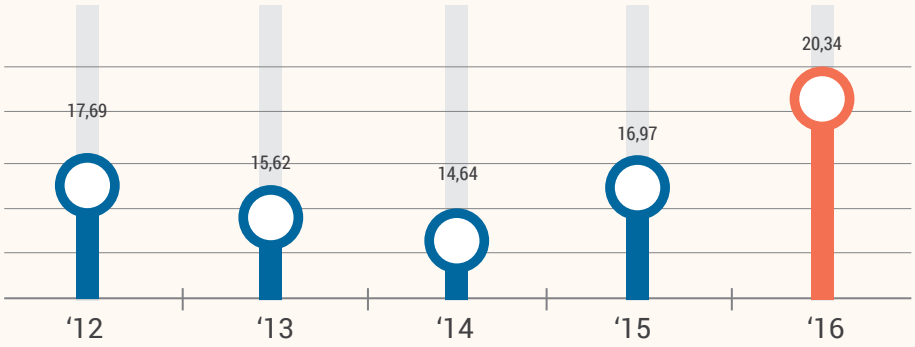

Rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2016 **meningkat** dari 16,97% menjadi 20,34%

NON PERFORMING LOAN (NPL) NETTO

(dalam %)

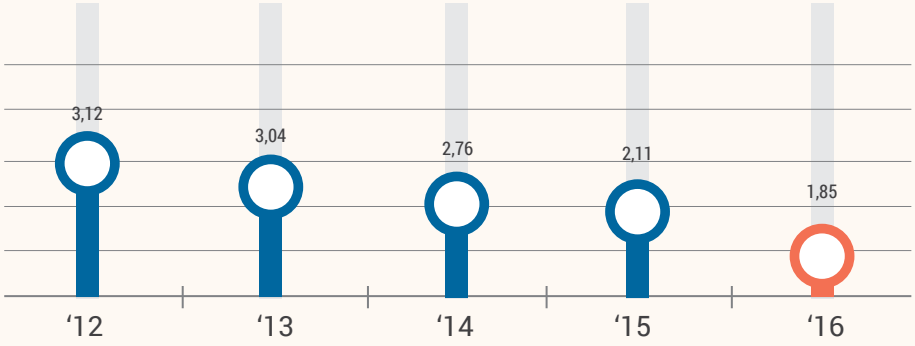

Non Performing Loan (NPL) netto tahun 2016 **turun** dari 2,11% menjadi 1,85%

RETURN ON ASSET (ROA)

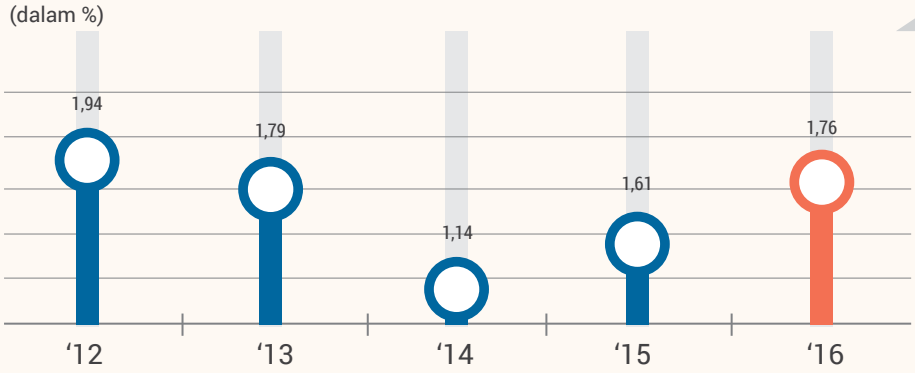

Return On Asset (ROA) tahun 2016 **meningkat** dari 1,61% menjadi 1,76%

RETURN ON EQUITY (ROE)

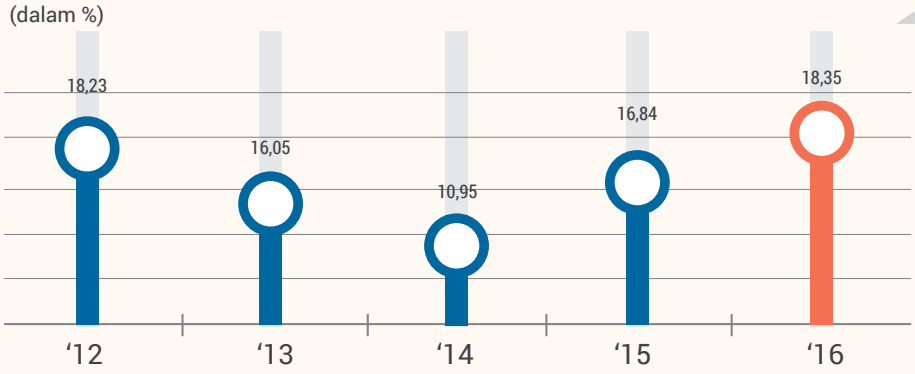

Return On Equity (ROE) tahun 2016 **meningkat** dari 16,84% menjadi 18,35%

NET INTEREST MARGIN (NIM)

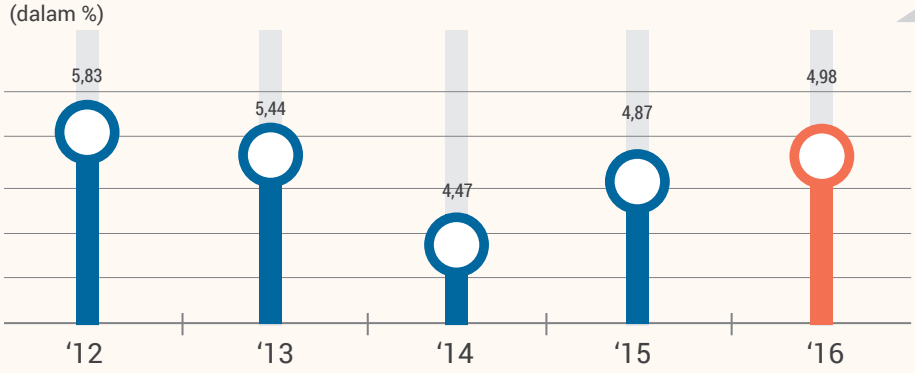

Net Interest Margin (NIM) tahun 2016 **meningkat** dari 4,87% menjadi 4,98%

BIAYA OPERASONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

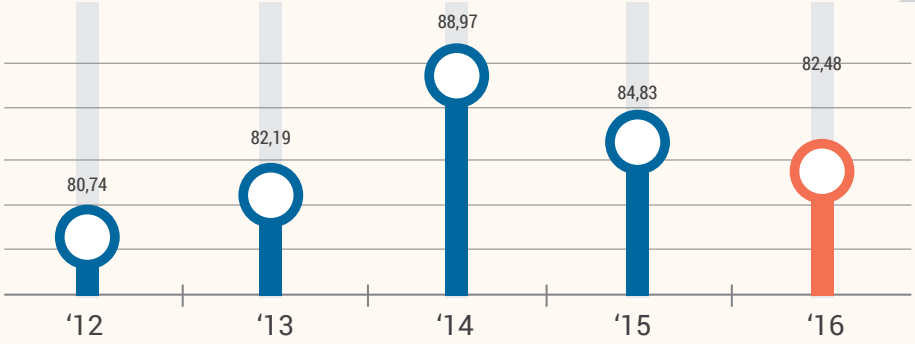

Biaya Operasonal Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tahun 2016 **menurun** dari 84,83% menjadi 82,48%

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)

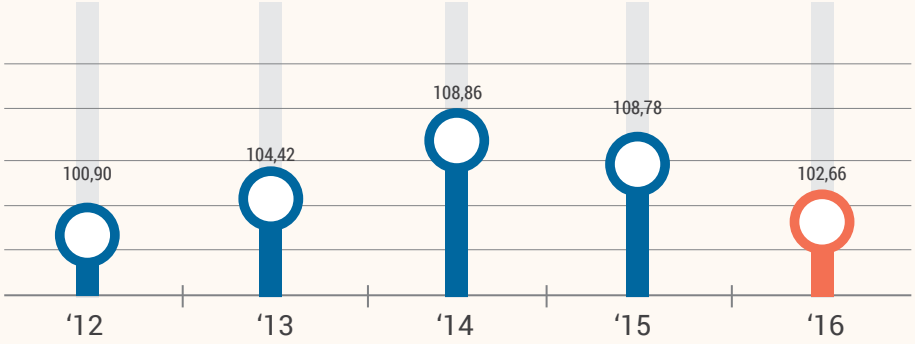

Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2016 **menurun** dari 108,78% menjadi 102,66%

JUMLAH KANTOR CABANG KONVENSIONAL

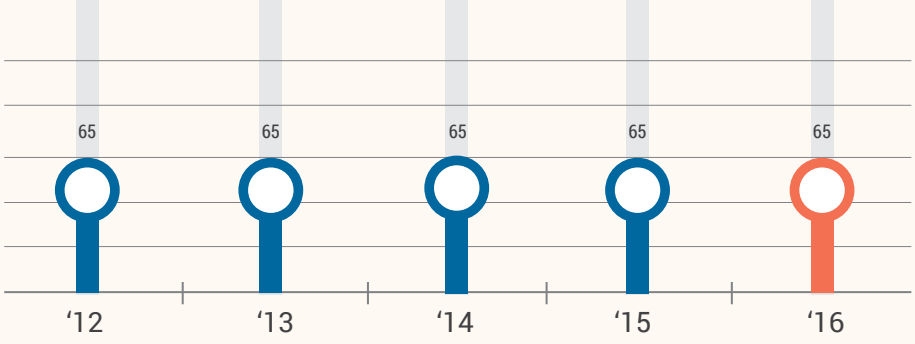

Jumlah kantor cabang konvensional tahun 2016 **tetap** 65 cabang

JUMLAH ATM

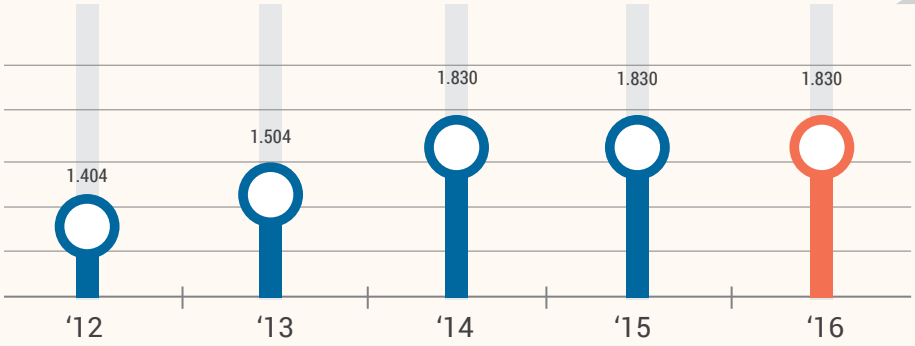

Jumlah ATM tahun 2016 **tetap** 1.830

JUMLAH PEGAWAI

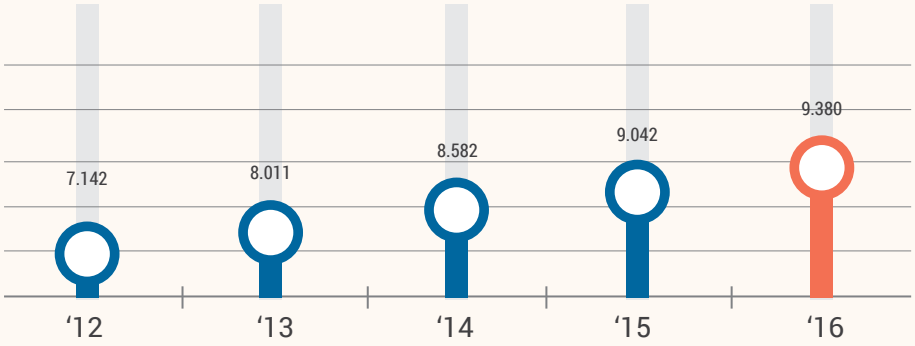

Jumlah Pegawai tahun 2016 **meningkat** dari 9.042 menjadi 9.380.

SELF ASSESSMENT GCG

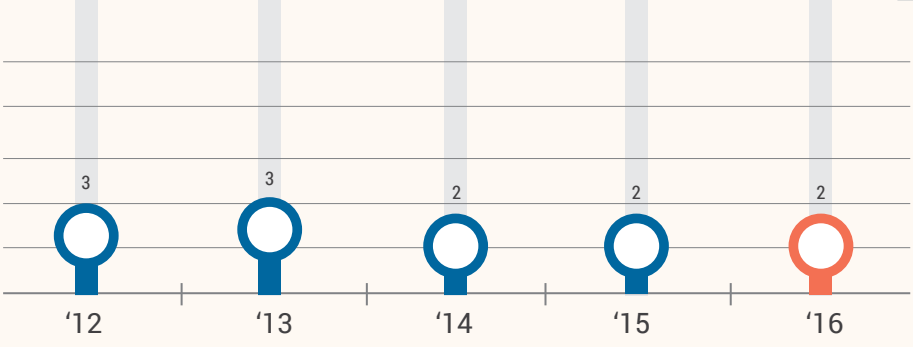

Self Assessment GCG tahun 2016, Perseroan memperoleh nilai komposit 2 (kategori baik) dalam pelaksanaan GCG.

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

PERISTIWA PENTING

7 Februari

Memulai rangkaian HUT Ke-66, Perseroan menyelenggarakan *fun bike* di Kota Semarang disertai pemberian CSR untuk pembangunan taman di Tanah Mas Semarang serta penyerahan secara simbolis persetujuan akad kredit kepada debitur KPR Rusunawa Gedang Anak, Kec. Ungaran Timur.

21 Februari

Dalam rangkaian HUT Ke-66 Perseroan, bersamaan dengan acara *fun-run* yang bertajuk "*Homerun In Harmony*" Perseroan menyerahkan bantuan rehabilitasi gedung Rumah Susun Cipinang Besar Selatan sebesar Rp2 Miliar kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima langsung oleh Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

12 April

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2016. Perubahan susunan pengurus Perseroan bertujuan untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja perseroan.

13-21 Februari

Sebagai acara tahunan, Perseroan menyelenggarakan Indonesia Property Expo 2016 (IPEX 2016) yang dibuka langsung oleh Direktur Utama Perseroan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pameran ini ditutup dengan total penjualan lebih dari Rp.3 Triliun dan tercatat dihadiri oleh lebih dari 300.000 pengunjung serta didukung oleh hampir 250 pengembang dengan lebih dari 650 proyek perumahan di seluruh Indonesia.

14 Maret

Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno bersama Direktur Utama Perseroan beserta ketiga Direktur Utama Bank BUMN lainnya bersinergi bersama Jasa Marga meresmikan Kerjasama Pembayaran *e-Payment* Toll Nasional. Melalui sinergi bank-bank BUMN ini, masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran tol elektronik yang lebih luas lagi dan terintegrasi secara menyeluruh.

29 April

Melanjutkan Program BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Papua Tahun 2015, Perseroan memberikan bayi babi sebanyak 160 ekor kepada perwakilan Suku Haay, Suku Ireuw dan Kelompok Ternak Kabupaten Keerom, Tolikara, Leni Jaya, Wamena dan Puncak Jaya disaksikan Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

PERISTIWA PENTING

23 Mei

Perseroan memberikan apresiasi kepada *stakeholder* dan pengembang dalam BTN *Property Award* 2016 sebagai ucapan terima kasih atas prestasi dan dukungannya dalam membangun negeri melalui pengadaan rumah bagi masyarakat.

24 Mei

Sinergi Perseroan dan Garuda Indonesia melahirkan kartu Debit BTN-GARUDA yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan layanan kepada nasabah Perseroan yang terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

20 Juni

Perseroan meresmikan Kantor Cabang Syariah Banda Aceh yang merupakan kantor cabang syariah ke-23. Pembukaan ini adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan UUS Perseroan.

13 Juli

Perseroan melakukan kerjasama dengan *School of Business and Management* Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dalam pembukaan program MBA Mini Properti yang diharapkan akan melahirkan *entrepreneur* (wirausaha) baru pada industri properti atau perumahan nasional.

17 Juli

Perseroan sebagai *pilot project* dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara non tunai. Penyerahan Bansos disaksikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sekitar Rp40 Triiliun dana bakal dikelola Perseroan melalui tabungan yang didistribusikan via jaringan Kantor Pos di seluruh Indonesia.

6 - 12 Agustus

Melalui program Siswa mengenal Nusantara, Perseroan memberikan kesempatan kepada 20 orang pelajar Ternate kelas XI (2 diantaranya merupakan siswa *difabel*) yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengenal keanekaragaman budaya maupun kekayaan alam provinsi Provinsi Sumatera Selatan.

14 - 17 Agustus

Memperingati HUT Ke-71 RI, Perseroan menyelenggarakan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang diselenggarkan antara lain jalan sehat, upacara peringatan HUT RI, dan berbagai pemberian CSR untuk masyarakat di provinsi Maluku Utara, serta mengembangkan sektor wisata di Morotai, Maluku Utara

19 Agustus

Perseroan mengajak pengembang dan nasabah untuk mendukung Program Amnesti Pajak melalui seminar Tax Amnesty dan Investasi Properti. Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang program amnesti pajak kepada pengembang sebagai mitra kerja Perseroan dan nasabah prioritas.

28 Agustus

Setelah sukses dengan Program Serba Untung (SERBU) 2015, Perseroan *launching* SERBU 2016 Di Makassar. SERBU telah berdampak atas meningkatnya *low cost* yang menjadi strategi bisnis perusahaan dalam memperkuat struktur dana perseroan.

28 Agustus

Perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan senilai Rp. 3 Triliun dengan rating AA+ dari Pefindo sebagai alternatif produk investasi dalam Tax Amnesty. Perseroan turut berperan dalam menyukseskan program pemerintah tersebut dan obligasi Berkelanjutan II Tahap II Bank BTN tahun 2016 adalah salah satu pilihan terbaik yang dapat dimanfaatkan

9 September

Perseroan siap menyukseskan Nasional *Payment Gateway* (NPG) yang akan menjadi wadah bagi sistem pembayaran nasional dan didukung oleh bank-bank milik negara (Himbara). Hal ini akan berdampak baik bagi bank-bank BUMN karena disamping akan tercipta efisiensi biaya yang sangat besar, masyarakat dapat terlayani lebih baik lagi.

10 September

Perseroan mengikuti Indonesia *Business and Development Expo* 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Dalam acara ini Perseroan menunjukkan kesiapan layanan digital untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat memperoleh fasilitas KPR.

1 Oktober

Permudah transaksi pedagang pasar, Perseroan terbitkan e-Retribusi. e-Retribusi pasar di seluruh wilayah Surakarta akan dilakukan secara elektronik untuk mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran retribusi pasar sekaligus mendukung gerakan non tunai

24 Oktober

Dalam Paparan Kinerja Perseroan per 30 September 2016, Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp1,6 Triliun atau tumbuh 32,6% yoy.

31 Oktober

Perseroan mendapatkan Rekor MURI Penabung Terbanyak SIMPEL sebanyak 306.932 pembukaan rekening baru yang dilakukan serentak dalam sehari. Pencatatan Rekor MURI ini sejalan dengan gerakan Ayo Menabung dalam rangka Hari Menabung Sedunia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada *International Conference Financial Inclusion* pada tanggal 31 Oktober 2016.

3 November

Perseroan bekerjasama dengan GO-JEK untuk menjawab permintaan pasar melalui Top Up GO-PAY via layanan *e-banking* Perseroan.

9 November

Perseroan bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mencatatkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) SMF-BTN 02 Kelas A Rp 1 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI)

18 November

Perseroan melakukan peresmian Shelter Kuliner Taman Sriwedari bersama dengan Walikota Surakarta dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di jalur hijau di sekitar Museum Keris Kota Solo, Pemerintah Kota Solo.

13 Desember

Selama 40 tahun Perseroan telah menyalurkan KPR lebih dari 3,77 juta unit rumah dengan dengan nilai kredit sebesar Rp178 Triliun di seluruh Indonesia.

27 Desember

Perseroan meresmikan 10 Rumah Kreatif BUMN (RKB) untuk mendorong ekonomi masyarakat diawali dengan kota Manado. Perseroan akan melakukan pendampingan 10 RKB tersebut terlibat dalam ekonomi *digital* yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

1 **12 CEO PILIHAN**
dari Majalah *Mens Obsession*,
Jenis penghargaan
CEO *Award*,
1 Februari 2016,
Dalam Negeri

2 ***BEST INDIVIDUAL ACHIEVER CEO STATE OWNED COMPANY***
dari Majalah *Mens Obsession*, Jenis penghargaan
CEO *Award*,
2 Maret 2016,
Dalam Negeri

3 **PERINGKAT I *DIGITAL BRAND SHARIA***
dari *Infobank*,
Jenis penghargaan
Digital Bank of The Year,
5 April 2016,
Dalam Negeri

4 **PERBANKAN**
dari Majalah Investor,
Jenis penghargaan
Best Listed Company,
3 Mei 2016,
Dalam Negeri

9 **BANK TERBAIK UNTUK KELOMPOK BANK BUMN**
dari Bisnis Indonesia,
Jenis penghargaan
Bisnis Indonesia
Award 2016,
2 Juni 2016,
Dalam Negeri

10 **BANK DENGAN PERTUMBUHAN LABA TERTINGGI**
dari Majalah Investor,
Jenis penghargaan
Investor *Awards*,
2 Juni 2016,
Dalam Negeri

11 **BUMN PENGELOLA SDM TERBAIK**
dari BUMN *TRACK*,
Jenis penghargaan 5th
Anugerah BUMN 2016,
3 Juni 2016,
Dalam Negeri

12 **CEO BUMN KOLABORASI TERBAIK**
dari BUMN *TRACK*,
Jenis penghargaan 5th
Anugerah BUMN 2016,
3 Juni 2016,
Dalam Negeri

5 **PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BTN TERBANYAK DALAM SEHARI 40.000 REKENING**
dari Museum Rekor Indonesia, Jenis penghargaan MURI, 20 Mei 2016, Dalam Negeri

6 ***THE BIGGEST CONTRIBUTOR FUNDING SHARIA UNIT BANK***
dari *Karim Consulting*, Jenis penghargaan *Islamic Finance Award*, 25 Mei 2016, Dalam Negeri

7 ***THE BEST SHARIA UNIT ASET* >1,5 TRILIUN**
dari *Karim Consulting*, Jenis penghargaan *Islamic Finance Award*, 25 Mei 2016, Dalam Negeri

8 **PORTAL *PROPERTY* PERTAMA KERJASAMA PENGEMBANG SELURUH INDONESIA**
dari Seputar Indonesia, Jenis penghargaan Rekor Bisnis, 26 Mei 2016, Dalam Negeri

13 ***GOLD WINNER WORLDWIDE***
dari LACP (*League of American Communication Professionals*), Jenis penghargaan *Annual Report Award*, 18 Juli 2016, Internasional

14 ***LEADERSHIP FAVOURITE OF THE YEAR* 2016**
dari *Property & Bank Magazine*, Jenis penghargaan *Property & Bank Awards* 2016, 18 Agustus 2016, Dalam Negeri

15 ***PLATINUM TROPHY* (KINERJA SANGAT BAGUS SELAMA 10 TAHUN BERTURUT-TURUT)**
dari *Infobank*, Jenis penghargaan *Infobank Award* 2016, 25 Agustus 2016, Dalam Negeri

16 ***BEST MID CAP (RANKED 1ST)***
dari *Finance Asia*, Jenis penghargaan *Asia Best Companies* 2016, 25 Agustus 2016, Internasional

17 ***THE BEST CONTACT CENTER OPERATIONS (BRONZE)***
dari Indonesia *Contact Center Association* (ICCA), Jenis penghargaan *The Best Contact Center Indonesia* 2016,
25 Agustus 2016,
Dalam Negeri

18 ***THE BEST BUSINESS CONTRIBUTION (BRONZE)***
dari Indonesia *Contact Center Association* (ICCA), Jenis penghargaan The *Best Contact Center* Indonesia 2016,
25 Agustus 2016,
Dalam Negeri

19 **BANK UMUM NON BPD**
dari Tempo Media Group & IBS,
Jenis penghargaan *The Best Sharia Business Unit*,
7 September 2016,
Dalam Negeri

20 **JUARA I *ANNUAL REPORT* BUMN KEUANGAN *LISTED***
dari OJK,BI,IAI,Depkeu, KNKG,IDX,BUMN,
Jenis penghargaan Rekor Bisnis,
27 September 2016,
Dalam Negeri

25 **BUMN *AWARD***
dari BUMN *Track*,
Jenis penghargaan *Best CEO In Strategic Marketing* BUMN,
23 November 2016,
Internasional

26 ***THE BEST BUMN DIGITAL BRANDING AWARD* 2016**
dari BUMN *Track*,
Rumah Perubahan, Arrbey, Jenis penghargaan BUMN *Branding and Marketing Award* 2016,
23 November 2016,
Internasional

27 **PERINGKAT KEENAM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
dari Komisi Informasi Pusat,
Jenis penghargaan Keterbukaan Informasi Publik,
23 November 2016,
Internasional

28 **GCG TERBAIK PERUSAHAAN TBK (PERSERO) DI INDONESIA PREDIKAT : SANGAT BAIK (A) SEKTOR : KEUANGAN-BANK (BUKU III-ASET > 100 T)**
dari *Economic Review*,
Jenis penghargaan *Indonesia Good Corporate Governance Award* – II-2016,
7 Desember 2016,
Internasional

21 **ANUGERAH PERBANKAN INDONESIA *BEST CEO OF THE YEAR***
dari *Economic Review* dan Perbanas,
Jenis penghargaan *Economic Review* dan Perbanas,
13 Oktober 2016,
Dalam Negeri

22 **PERINGKAT 1 ANUGERAH PERBANKAN INDONESIA KELOMPOK BUKU III**
dari *Economic Review* dan Perbanas,
Jenis penghargaan *Economic Review* dan Perbanas,
13 Oktober 2016,
Dalam Negeri

23 **KINERJA KEUANGAN SANGAT BAGUS 2011 - 2015**
dari *Infobank Magazine*,
Jenis penghargaan *INFOBANK Golden Trophy* 2016,
20 Oktober 2016,
Dalam Negeri

24 ***THE BEST OVERALL***
dari IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*),
Jenis penghargaan IICD *Awards* 2016,
7 November 2016,
Dalam Negeri

29 **KATEGORI *TITANIUM 'EXELLENCE IN GOVERNANCE, AND INVESTOR RELATIONS BENCHMARKING"***
dari *The Asset*,
Jenis penghargaan *The Asset Corporate Award* 2016,
15 Desember 2016,
Luar Negeri

30 **IICG AWARD**
dari Majalah SWA dan IICG, Jenis penghargaan *Most Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index*,
19 Desember 2016,
Dalam Negeri

SERTIFIKASI

1 **ISO 9001:2008**
INTERNAL AUDIT SERVICES (GENERAL, SYARIAH AND IT AUDITS)

dari SGS Indonesia,
Divisi penerima *Internal Audit Division*,
Masa berlaku 11 Agustus 2017

2 **ISO 9001:2008**
MORTGAGE PROCESSING (KPR AND KPA NON SUBSIDI READY STOCK) FROM APPLICATION TO LOAN DISBURSEMENT

dari SGS Indonesia,
Divisi penerima *Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division*,
Masa berlaku 15 September 2018

3 **ISO 9001:2008**
RISK MANAGEMENT SERVICES

dari SGS Indonesia,
Divisi penerima *Risk Management Division*,
Masa berlaku 15 September 2018

4 **ISO 9001:2008**
COMPLIANCE ASSURANCE

dari SGS Indonesia,
Divisi penerima *Compliance Division*,
Masa berlaku 15 September 2018

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Soliditas kerjasama antar semua organ serta semangat yang kuat untuk menjadi pemenang telah menghasilkan kinerja Perseroan yang memuaskan di tahun 2016. Percepatan program Pemerintah 'Sejuta Rumah' dijawab secara cepat oleh Perseroan melalui perbaikan proses bisnis serta pengembangan transaksi digital dan *electronic banking*, yang dilakukan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang berstandar internasional.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

DITENGAH KONDISI EKONOMI GLOBAL YANG BELUM KONDUSIF, TERNYATA MANAJEMEN MAMPU MENYUMBANGKAN KINERJA YANG BAIK. DEWAN KOMISARIS MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN SELAMAT KEPADA DIREKSI BERIKUT SELURUH JAJARAN PERSEROAN ATAS KINERJA KEUANGAN BANK YANG BAIK SERTA TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN PADA PERINGKAT KOMPOSIT 2 (PK-2) YANG MENCERMINKAN KONDISI PERSEROAN SECARA UMUM SEHAT SEHINGGA MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dapat menjalankan amanah pengawasan dan penasihatan selama tahun 2016. Perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi selama tahun 2016.

Sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip *good corporate governance*. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian Bank.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk menjaga obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Tugas dan wewenang komite-komite penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha, penilaian atas komite-komite penunjang Dewan Komisaris, dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjalankan operasional Bank selama tahun 2016, Dewan Komisaris selalu menasihati Direksi agar senantiasa fokus pada pembiayaan perumahan khususnya perumahan subsidi dalam rangka menunjang program pemerintah Sejuta Rumah dan sektor-sektor bisnis yang berkaitan dengan industri perumahan. Selain dari itu Dewan Komisaris juga selalu mengawasi dan menasihati Direksi untuk selalu melaksanakan *good corporate governance*, manajemen risiko dan memperkuat pengendalian internal secara persisten dalam rangka mencapai visinya yaitu Menjadi Bank yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TAHUN 2016

Ditengah kondisi ekonomi global dan domestik yang belum begitu kondusif, manajemen telah mampu menghasilkan kinerja keuangan yang sangat baik antara lain sebagai berikut:

Fee based income meningkat sebesar 15,27%, dimana tahun 2015 sebesar Rp1,13 Triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 1,30 Triliun. Laba bersih Perseroan meningkat sebesar 41,49% dari sebesar Rp 1,85 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2,62 Triliun pada tahun 2016. Imbal hasil atas Aktiva (*Return on Asset* / ROA) mencapai 1,76% sedangkan imbal hasil atas ekuitas (*Return on Equity*/ ROE) mencapai sebesar 18,35%. Struktur permodalan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) sebesar 20,34%, jauh diatas ketentuan regulator. Nilai NPL Gross mengalami penurunan dari 3,42% di tahun 2015 menjadi 2,84% di tahun 2016.

Aset Perseroan mencapai Rp214,17 triliun meningkat sebesar 24,66 % dari tahun sebelumnya sebesarRp171,81 triliun. Kredit dan pembiayaan Perseroan mencapai Rp 164,45 triliun atau meningkat 18,34% dari tahun 2015 sebesar Rp 138,96 triliun. Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp 159,99 triliun atau tumbuh 25,28% dari tahun 2015 sebesar Rp 127,71 triliun. Sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan dana berbiaya murah, prosentase pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tertinggi berasal dari Giro yang tumbuh sebesar 46,15%.

Harga saham BBTN per 31 Desember 2016 ditutup pada kisaran Rp1.740 meningkat 34,36 % dari posisi tahun 2015 sebesar Rp 1.295 dan kapitalisasi pasar meningkat dari Rp 13,70 Triliun menjadi Rp 18,43 Triliun. Kinerja positif juga dicapai pada Unit Usaha Syariah. Total Aset tahun 2016 mencapai Rp 18,13 triliun atau tumbuh sebesar 36,60 % dari posisi tahun 2015 sebesar Rp 13,27 triliun. Sementara untuk pembiayaan tercatat sebesar Rp 14,22 triliun atau tumbuh 26,74% dari tahun 2015 sebesar Rp 11,22 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp15,03 triliun atau meningkat sebesar 35,35% dari perolehan tahun 2015 sebesar Rp 11,11 triliun. Sementara laba Unit Usaha Syariah Perseroan mencapai Rp 377,42 milyar atau naik sebesar 44,98% dari perolehan laba periode tahun 2015 sebesar Rp 260,33 milyar.

Atas prestasi kinerja keuangan tersebut di atas Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi dan selamat kepada Direksi berikut seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris berharap agar prestasi kinerja keuangan tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI BANK

Dalam melakukan pengawasan, selama tahun 2016 Dewan Komisaris secara aktif memanfaatkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk mereview secara periodik terhadap rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, kinerja keuangan, laporan-laporan internal audit, eksternal auditor dan/atau

regulator serta laporan-laporan lainnya yang tersedia. Hasil *review* tersebut dilaporkan dan dibahas kembali dalam Rapat Internal Dewan Komisaris. Beberapa isu yang menjadi *concern* Dewan Komisaris kemudian dibahas bersama antara Dewan Komisaris dengan seluruh Direksi dan/atau dengan Direktur Bidang terkait sesuai dengan isu-isu yang dibahas. Hasil pembahasan dengan Direksi atau Direktur Bidang ditindaklanjuti secara formal dengan surat Dewan Komisaris. Dalam tahun 2016 Dewan Komisaris telah melaksanakan 15 kali Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, 16 kali Rapat Konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direktur Bidang terkait, dan 40 kali Rapat Internal Dewan Komisaris. Dalam kaitan dengan hal tersebut selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan dan nasihat sebanyak 68 surat yang terdiri dari 13 surat mengenai Strategi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, 25 surat mengenai perkreditan, 6 surat mengenai pendanaan, 8 surat mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia, 8 surat mengenai Kinerja Keuangan, 7 surat mengenai Pemeriksaan Internal dan Eksternal dan Internal Kontrol serta 1 surat mengenai Teknologi Informasi.

Singkatnya dapat kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris selalu mengarahkan Direksi untuk menyempurnakan proses bisnis *end to end*, meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank, meningkatkan penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko, dengan tujuan agar Perseroan bisa tumbuh dan *profitable* serta sehat, secara berkesinambungan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris meyakini prospek usaha Perseroan ke depan sangat cerah dengan pertumbuhan kredit di atas rata-rata pertumbuhan kredit *industry* perbankan nasional, satu dan lain hal karena terdapat *backlog* perumahan di Indonesia yang sangat besar dan meningkatnya pendapatan masyarakat serta tidak kalah pentingnya karena komitmen pemerintah untuk merealisasikan Program Sejuta Rumah. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki sebagai bank fokus perumahan, serta usaha yang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan proses bisnis, manajemen risiko dan *good corporate governance* yang kuat, teknologi informasi, dan budaya kerja perusahaan perseroan akan mampu tumbuh secara sehat dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai prospek usaha ke depan tersebut dan implementasi transformasi tahap II, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi implementasi pencapaian transformasi tahap II dan meletakkan pondasi yang kuat untuk pencapaian rencana jangka panjang yang telah dirumuskan perseroan sampai tahun 2025.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2016 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG. Hasil *Self Assessment* tahun 2016, Perseroan memperoleh nilai komposit 2 (kategori baik) dalam pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris meyakini struktur tata kelola perusahaan yang telah dikembangkan di perseroan sudah sangat baik dan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan yang *profitable* dan keberlanjutan.

Dewan Komisaris telah dan akan terus mendorong manajemen agar dalam penerapan tata kelola perusahaan mampu mencapai "praktik terbaik". Dengan menjalankan praktik GCG terbaik secara konsisten diyakini akan menjamin terciptanya pertumbuhan Bank yang sehat secara berkesinambungan.

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris berpendapat bahwa struktur penerapan manajemen risiko di Perseroan telah cukup baik. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris senantiasa menasihati Direksi agar secara konsisten menerapkan **praktik** manajemen risiko yang sejalan dengan struktur yang telah disepakati bersama, dan **meningkatkan** Pengendalian Intern Bank. Sistem pengendalian internal Perseroan telah sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dalam rangka mengurangi risiko kerugian finansial, penyimpangan maupun pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Hasil penilaian risiko tahun 2016 menunjukkan **risiko komposit** termasuk dalam peringkat ***low to moderate.***

PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dewan Komisaris memahami bahwa penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *stakeholder* adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perseroan. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya mekanisme *whistleblowing System*. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme ini wajib mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Secara umum Dewan Komisaris telah memastikan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Perseroan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perseroan telah menyusun dan menyempurnakan kebijakan *Whistleblowing System* sebagai dasar pedoman dalam menangani pelaporan pelanggaran. Guna mendorong efektifitas dalam implementasinya, Perseroan menetapkan Tim Anti Fraud sebagai pengelola system ini dan melaksanakan sosialisasi secara berkeinambungan. Implementasi *Whistleblowing System* secara berkala dipantau efektifitasnya dan dilaporkan secara berkala setiap tahun oleh Direksi melalui Laporan Tahunan.

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dewan komisaris menyadari bahwa perseroan sebagai Bank publik yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, mampu berperan banyak melalui CSR dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan antara lain untuk bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan. Namun patut disadari bahwa perseroan karena keterbatasan dana CSR, maka dalam penyalurannya dilakukan secara selektif dan terarah. Kami menilai Direksi di tahun 2016 telah merealisasikan berbagai program CSR dengan baik dan tertib.

Program CSR yang dijalankan diharapkan tidak sekedar meningkatkan reputasi Perseroan, akan tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Melalui program CSR Dewan Komisaris mendukung penuh peran Perseroan untuk berkontribusi pada upaya penyelesaian masalah bangsa seperti masalah ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, penyelesaian masalah keamanan dan keselamatan, perbaikan kualitas kemanusiaan, memperhatikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bertanggung jawab dan mendukung pelestarian lingkungan

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Keputusan penggantian pengurus perseroan merupakan kewenangan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi Perusahaan. Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali perubahan komposisi Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 memutuskan perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Sdri Catherinawati Hadiman sebagai Komisaris Independen.
- Mengangkat Sdr. I Wayan Agus Mertayasa sebagai Komisaris Utama/Independen dan Sdr. Maurin Sitorus sebagai Komisaris.
- Mengalihkan jabatan Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen

2. Rapat Umum Pemegang Sahan Tahunan (RUPST) Tahun 2016 tanggal 12 April 2016 memutuskan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
   - Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris.
   - Mengangkat Sdr. Iman Sugema sebagai Komisaris

Pengangkatan dan pengalihan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menilai seluruh Dewan Komisaris mampu menjalankan fungsinya secara baik dan produktif, masing-masing berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan penasihatan kepada manajemen perseroan sehingga dapat mengantarkan kinerja perseroan sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*), Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang salah satunya dilakukan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh 3 Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam pelaksanaan fungsinya, komite telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite dan program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dalam satu tahun. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris menilai peran, fungsi serta rekomendasi yang diberikan komite telah sangat efektif berkontribusi dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan.

KOMITE AUDIT

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali yang dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah melaksanakan fungsi antara lain :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan Keuangan.
2. Melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, perencanaan, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya
3. Melakukan pembahasan *Annual Audit Plan* dengan IAD.
4. Penelaahan terhadap Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2015 dan laporan publikasi Bank yang diterbitkan setiap triwulan.
5. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan penetapannya oleh RUPS.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dalam setahun dan telah melaksanakan fungsi antara lain :

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
   - Dewan Komisaris dan Direksi
   - Pejabat Eksekutif dan pegawai

2. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
3. Melakukan Koordinasi tentang kebijakan Promosi & Mutasi Pegawai, *Human Capital Development*, Pelatihan Pegawai, dan *carrier path* pegawai.
4. Pembahasan *Strategic Issues* dan *Concern Human Capital Management*

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, yang dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah melaksanakan fungsi antara lain :

1. Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Risiko kredit,Risiko pasar, Risiko likuiditas, risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko stratejik, Risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil untuk unit usaha syariah
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko perseroan.

FREKUENSI ARAHAN DAN NASEHAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan maupun tindak lanjutnya dilakukan dalam forum rapat konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direktur Bidang terkait dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagaimana telah kami laporkan di atas

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemegang saham, dan para pemangku kepentingan, atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap pengelolaan Perseroan.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran pegawai atas kerja keras, komitmen, dan dedikasi serta pengabdiannya selama ini sehingga membawa Perseroan mampu berprestasi dengan baik. Dengan kebersamaan dan dedikasi serta komitmen yang makin kuat, Dewan Komisaris optimis Perseroan mampu menggapai peluang dan menghadapi tantangan di masa depan.

Sekian dan terima kasih.

Atas Nama Dewan Komisaris
Jakarta, Februari 2017

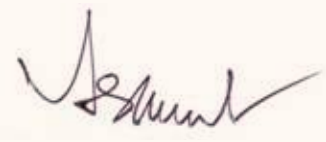

I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Utama

Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Bpk. Kamaruddin Sjam - Bpk. Iman Sugema - Bpk. Lucky Fathul Aziz H -
Bpk. I Wayan Agus Mertayasa - Ibu Sumiyati - Bpk. Arie Coerniadi - Bpk. Maurin Sitorus

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, usia 69 tahun, domisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1973

I Wayan Agus Mertayasa

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris Utama/Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2016 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 7 Januari 2016 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 6 April 2016. Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 25 April 2016 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Memulai karir pada tahun 1973 sebagai Credit Analyst di Kantor Pusat Bank Bumi Daya hingga menempati jabatan-jabatan sebagai General Manager di Bank Bumi Daya Los Angeles Agency (USA) (1991-1992), *Chief Executive* di Bumi Daya Intenational Finance Hongkong (1992-1993), General Manager di Bank Bumi Daya New York (1993-1994), Direktur Bank Pembangunan Indonesia (1994-1999), EVP /& Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005), Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010), *Chairman/Independent Non Executive Director*, Bank Mandiri (Europe) Limited, London UK (2010-2015).

Training yang diikuti antara lain:

Selain telah mengikuti berbagai training dan seminar dalam negeri, Beliau juga mengikuti berbagai *Leadership course* antara lain : London Business School dan SRW & Co di London, UK pada September 2016, *Global Strategic Management* (*Harvard Business School*) di Boston, USA pada bulan Juni 2009, *New Challanges, New Solutions* (*Harvard Business School*) di Boston, USA pada bulan Juli 2008 dan *Changing The Game Negotiation & Competitive Decision (Harvard Business School)* di Boston, USA pada bulan Agustus 2003, serta beberapa *advance management development* dalam bidang *finance* dan *legal* di Hongkong, Singapore, New York dan Champaign Urbana Illinois USA.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 69 tahun, domisili di Jakarta. Meraih gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta pada tahun 1997

Kamaruddin Sjam

Komisaris Independen

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Juni 2015. Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Audit sejak tanggal 9 September 2015 – saat ini dan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 1 November 2016 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (2009-2014) dan Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2002-2007).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Benchmarking and Workshop Enterprise Risk Management* in UK di Londond, UK pada April 2016; *Enhancing the Power of Enterprise Risk Management in Creating a Sound Bank and Financial Risk Integration* di Stockholm, Swedia pada September 2016; ECIIA European Conference Paris France & On Site Learning pada September 2015, Seminar National IIA Conference pada Agustus 2015, Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) oleh BPKP dan LAN pada tahun 2002; Program Studi Banding di Guangzhou dan Shenzhen, China pada tahun 2002; dan Short *Term Training Programme on Auditing Objectives and Methods Applied to public Sector* (*Performance Audit*) di Marseille, Perancis pada tahun 1999.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun, domisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1991

Arie Coerniadi

Komisaris Independen

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Juni 2015. Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 3 Juli 2015 dan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 25 April 2016.

Pengalaman Kerja:

Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Vice President di NISP Sekuritas (2010-2015), Group Head Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2010-2014), dan Vice President di Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000), serta sebagai Chief Finance Officer di Sarana Global Indonesia (2011-2016).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Mobile World Congress*, untuk Solusi *Mobile Payment* dan *Mobile Banking* Termasuk *Mobile Ekyc* pada Februari 2016 di Barcelona, Spanyol; *Enhancing the Power of Enterprise Risk Management in Creating a Sound Bank and Financial Risk Integration* pada September 2016 di Stockholm, Swedia; *Financial Market Operation* oleh New York Institute of Finance pada tahun 1998 di New York; *Securities Lending and Borrowing* di Amsterdam pada tahun 1996; dan *Global Custodian Services* oleh State Street pada tahun 1995 di Sydney.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, domisili di Jakarta. Meraih gelar Master of Art (MA) dalam bidang *Development Economics* dari Boston University, Massachusetts, USA pada tahun 1985. Pada tahun 1991, beliau meraih gelar Master of Science (MS) dari Universitas Hasanuddin, Makassar

* Lulus *Fit & proper Test* OJK dan efektif sebagai Komisaris per 27 Juli 2015, Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 7 Januari 2016 ybs beralih dari Komisaris menjadi Komisaris Independen yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lucky Fathul Aziz H

Komisaris*

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 27 Juli 2015. Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 9 September 2015 – saat ini dan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 9 September 2015 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya sebagai Direktur Utama Dana Pensiun OJK (Periode 2015 - 2016), sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK (2012 -2014). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung (2010-2012), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007-2010).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *The IIA International Conference* 2016 pada Juli 2016 di New York & Washington DC, USA; *International Enterprise Risk Management Benchmarking in Spain* di Barcelona Spanyol pada 2015; *Leading and Managing People: Power and Relationships* oleh Wharton Bussines School University of Pennsylvania pada tahun 2014; A New Era of Conduct Supervision: Consequences, *Challenges,and Opportunities* oleh OJK, AusAID dan *The World Bank* pada tahun 2014 di Bali; *Workshop on Banking Supervisio*n Indonesia FSA–Japan FSA oleh OJK dan Japan FSA pada tahun 2014; dan *Strengthening the Asian Financial Sector Toward Sustainable and Inclusive Growth* oleh ADB Institute pada tahun 2013 di Jepang.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun, domisili di Jakarta. Meraih gelar *Master of Financial Management* (M.F.M) dari Queensland University, Australia pada tahun 1994

Sumiyati

Komisaris

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 2 September 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Februari 2016. Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 25 April 2016 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (periode 2015-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2009-2015 dan Komisaris PT Jiwasraya (Persero), (periode 2012-2015).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya London Business School dan SRW & Co pada September 2016 di London, UK; *Enterprise Risk Management* pada tahun 2015 di Jepang; *Enhancing The Strategy management System Forwards Obtaining Break Through Results* pada tahun 2014 di Jakarta; *High Performance Leadership* pada tahun 2012 di Inggris.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, domisili di Jakarta. Meraih gelar *Ph.D. in Monetary and International Economics dari University of Kentucky*, Lexington, USA pada tahun 1994

Maurin Sitorus

Komisaris

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 7 Januari 2016 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 6 Juni 2016 Beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak tanggal 1 November 2016 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI pada tahun 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Impact Evaluation and Use of Monitoring & Evaluation in Performanced Based Planning Budgeting* pada tahun 2010 di Shanghai, Cina; *Economic Development Strategy and Market* pada tahun 2002 di Jepang dan Korea Selatan; *Macro Economic Modeling* pada tahun 2002 di Denhaag, Netherlands.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun, domisili di Bogor. Meraih gelar *Ph.D in economics* (1996-2000), Department of Economics, Research School of Pacificand Asian Studies, The Australian National University.

* Berdasarkan hasil keputusan RUPS Perseroan tanggal 12 April 2016 ybs menjadi Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iman Sugema

Komisaris*

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 12 April 2016 dan dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja:

Ketua Eksekutif, *Ec-Think* Indonesia (*Ekonomi Think Tank*), Corp (2010 - sekarang), Direktur, Inter-CAFE (*International Center for Applied Finance and Economics*), Bogor *Agriculturalv University* (2005-2013), Ekonom Senior, Inter-CAFE (Pusat Internasional untuk Terapan Keuangan dan Ekonomi), Institut Pertanian Bogor (2005 - sekarang). Ekonom Senior, INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) (2002 - sekarang),Senior *Economist* ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) (2002 - sekarang)

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya ERMA Bali *International Conference On Enterprise Risk Management* pada Desember 2016 di Denpasar, Bali; Pembekalan Uji Manajemen Risiko Level 1 dan 2 pada Tahun 2016 di Jakarta.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Bank BTN

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Warga Negara Indonesia, usia 78 tahun, berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir, dan Fakultas Ushuluddin, IAIN Syarif Hidayatullah, serta sempat belajar di Macquary University, Sydney, Australia

Ahmad Nazri Adlani

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 15 Februari 2005. Sebelumnya beliau aktif di bidang kemiliteran dengan pangkat terakhir Brigjen TNI (purn). Pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Utusan Golongan periode 1999 sampai dengan 2004 setelah sebelumnya menjadi Anggota MPR RI periode 1997 sampai dengan 1998, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia periode 1995 sampai dengan 2000, Ketua komisi Hubungan Luar Negeri MUI periode 2000 sampai dengan 2005, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI periode 2005 sampai dengan 2014 dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015 serta turut mendirikan Dewan Syariah Nasional MUI dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI periode 2016-2021 dan anggota Sidang Pleno Dewan Syariah Nasional-MUI, Ketua Dewan Pengawas Syariah Mega Finance dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Sinar Mas Syariah. Pendidikan kemiliteran diperoleh di SUSBINMINU Departemen Hankam, SUSLAPA IF VII (Sekolah Perwira Infanteri AD) Bandung dan terakhir pada SUSCADOS BINTAL ABRI (Kursus Calon Dosen Pembinaan Mental ABRI) Jakarta, mengikuti Ijtima' Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/ DSN) di Jakarta tanggal 8 – 9 Desember 2016.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, SK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2016.

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun, berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN JAKARTA tahun 1991, meraih MBA dari IPWI Jakarta tahun 2000 dan MH dari STIH IBLAM di bidang Hukum pada tahun 2003, meraih gelar S3 Jurusan *Islamic Economic and Finance* Universitas Trisakti Tahun 2015

DR.H. Mohammad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 15 Februari 2005. Aktif sebagai Dosen Pasca Sarjana di beberapa Perguruan Tinggi: Program Strudi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, *Islamic Economic and Finance* Universitas Trisakti, dan masih aktif di Indonesia Banking School sd saat ini.

Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya Audit Internal Dasar BPKP-PIA tahun 1999, Instructur Islamic Economic Study BI - Universitas Airlangga - BMI tahun 1999, Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, 2015 dan 2016, dan Acara Ijtima' Samawi (Forum Dewan Pengawas Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Jakarta tanggal 8 – 9 Desember 2016.

Saat ini aktif sebagai Instruktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Dewan Pembina pada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI. Beliau dikenal sebagai *mubaligh* dan saat ini tercatat sebagai Khatib tetap di Istana Presiden Republik Indonesia dan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1998 serta di Bank Indonesia sejak tahun 2003.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero), SK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2016.

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun, berdomisili di Jakarta. Menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1989

Muhammad Syakir Sula

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 19 Juli 2010. Saat ini juga sebagai Anggota KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2014-Sekarang, Ketua V MES (2015-Sekarang), Pengurus DSN MUI-Dewan Syariah Nasional MUI (2005-Sekarang) serta Komisaris Jamkrindo Syariah (2015-Sekarang).

Selain itu masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Panin Life Syariah, Central Asia Raya Syariah, Nasional Re Syariah, sejak tahun 2007. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2008-2014, Anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah–Bank Indonesia) tahun 2008-2012, CEO Batasa Tazkia Consulting (2006-2007), Staf Ahli Dewan Direksi Bank Muamalat (2005-2006) serta Direktur Marketing Asuransi Takaful dan Direktur Operasional Asuransi Takaful (1999-2005). Dibidang organisasi profesi pernah menjadi Ketua Umum AASI–Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2003-2007), Ketua Umum IIS-*Islamic Insurance Society* (2007-2012), Wakil Ketua Umum IAEI–Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2005-2010), Ketua PKES - Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (2008-2013), Ketua III IAEI (2010-2015), Pengurus MUI Pusat (2005-2015), Sekjen MES–Masyarakat Ekonomi Syariah (2005-2015).

Beliau merupakan salah satu Ahli Asuransi Syariah di Indonesia dengan gelar profesi AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*), QIP (*Qualified Insurance Practitioner*), dan CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*). Mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, antara lain Workshop Perbankan Syariah, Training Internasional Perbankan and Finance Syariah, Training Bank Insurance, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu–BNSP, Pelatihan Asesor Kompetensi–BNSP, Ijtima' Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan SyariahNasional/ DSN) di Jakarta, 8 - 9 Desember 2016, Executive Training on Islamic Banking (KCI), Sertifikasi DPS Asuransi (OJK/DSN-MUI), Sertifikasi DPS Penjaminan (OJK), dan terakhir Sertifikat Kompetensi – Level 1 Komisaris (LSPP/BNSP), Sertifikat Kompetensi – Level II Komisaris (LSPP/BNSP).

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 379/ DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, SK terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 s.d 31 Desember 2016.

LAPORAN DIREKSI

SOLIDITAS KERJASAMA ANTAR SEMUA UNIT KERJA SERTA SEMANGAT YANG KUAT UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK TELAH MENGHASILKAN KINERJA PERSEROAN YANG MEMUASKAN DI TAHUN 2016. PERTUMBUHAN KREDIT SEBESAR 18,34% DENGAN *NON PERFORMING LOAN* YANG MEMBAIK PADA TINGKAT 2,84% BERHASIL DIRAIH PERSEROAN DI TENGAH PERLAMBATAN PERTUMBUHAN KREDIT DAN TEKANAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH BAGI PERBANKAN NASIONAL. PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM SEJUTA RUMAH TERUS DIJALANKAN MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Perseroan dapat melalui tahun 2016 dengan hasil menggembirakan, walaupun di tengah-tengah kondisi perekenomian yang masih diliputi ketidakpastian.

Tahun 2016 merupakan pencapaian penting Perseroan untuk terus membawa dan mempertahankan pertumbuhan dimasa depan. Peningkatan dan perbaikan banyak dilakukan, baik pada sisi keuangan, bisnis maupun operasional, untuk memastikan tercapainya kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan Direksi atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2016.

Maryono
Direktur Utama

TINJAUAN MAKRO: EKONOMI DOMESTIK YANG SOLID

Sampai dengan akhir tahun 2016, ekonomi global masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Di satu sisi, ekonomi Amerika Serikat sudah menunjukkan perbaikan kondisi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tingkat pengangguran yang stabil dan kenaikan inflasi. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa dan Jepang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 diperkirakan berada di angka 3,1%, atau sedikit lebih rendah dari pencapaian pada tahun 2015 sebesar 3,2%.

Gejolak ekonomi dunia tersebut tentu saja menekan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun demikian, Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan fundamental yang kuat sebagai hasil dari koordinasi kebijakan ekonomi yang baik antara Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya.

Hasilnya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari 4,88% di tahun 2015 menjadi 5,02% di 2016. Pencapaian ini ditopang dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 3,02%, yang merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2010. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp13.473 pada akhir 2016, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.785. Defisit neraca transaksi berjalan juga dapat dikelola dengan baik, turun dari USD17,5 miliar (2,0% dari Produk Domestik Bruto/PDB) pada 2015 menjadi USD16,3 miliar (1,8% dari PDB) di 2016. Walaupun diterpa beberapa kali sentimen negatif yang menimbulkan aliran dana keluar dari pasar modal dalam negeri, secara keseluruhan investor asing masih mengganggap Indonesia sebagai negara yang atraktif untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan angka *foreign direct investment* sebesar Rp396,6 triliun selama tahun 2016, naik dari Rp365,9 triliun pada tahun 2015.

Untuk membuat APBN menjadi lebih kredibel, Pemerintah sukses menjalankan program amnesti pajak. Selama 2 (dua) periode program ini, yaitu periode pertama 1 Juli-30 September 2016 dan periode kedua 1 Oktober-31 Desember 2016, Pemerintah berhasil mendapatkan dana segar berupa pendapatan pajak sebesar Rp103 triliun, yang berasal dari dana repatriasi aset sebesar Rp139 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp3.131 triliun. Keberhasilan penggalangan dana dari amnesti pajak ini tentu membawa angin segar bagi Pemerintah untuk memperkuat anggaran pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Inflasi yang rendah mendorong Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI *rate*) sebesar 150bps sepanjang tahun 2016. Penurunan ini membuat bank-bank di tanah air dapat menekan biaya dananya, yang pada akhirnya berhasil menurunkan suku bunga kredit. Terlebih lagi, pada tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan baru, yaitu BI 7-*day repo rate*. Keputusan ini diambil agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-*day repo rate* memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Untuk semakin menurunkan biaya dana perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Maret 2016 menurunkan batas atas (*cap*) suku bunga dana pihak ketiga. Cap suku bunga dana kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dipatok sebesar 100bps di atas BI *rate*. Sementara itu, bank-bank BUKU IV ditetapkan maksimal sebesar 75bps di atas BI rate.

Namun demikian, meskipun BI dan OJK sudah menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan dan batas atas suku bunga dana, transmisi kebijakan ini pada pertumbuhan kredit masih berjalan lambat. Pertumbuhan kredit perbankan tahun 2016 hanya sebesar 7,87% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,44%. Hal yang berbeda terjadi pada Dana Pihak Ketiga, yang tumbuh sebesar 9,60% di tahun 2016,

lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 7,26%. Ekonomi yang masih lambat serta tekanan terhadap kredit bermasalah membuat permintaan akan kredit masih sangat terbatas di tahun 2016. Namun demikian, kondisi perbankan nasional tetap solid dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan.

Di sektor perumahan yang menjadi fokus bisnis Perseroan, Pemerintah juga banyak melalukan relaksasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII, yang isinya menitikberatkan pada percepatan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lewat paket kebijakan ini, Pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Oleh karena itu, akan terdapat perizinan perumahan yang dihilangkan, digabungkan atau dipercepat, dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan *supply* rumah di masa datang.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kredit perumahan, Bank Indonesia pada Agustus 2016 merelaksasi ketentuan *Loan to Value*(LTV) atau *Financing to Value*. Paket ekonomi Pemerintah dan regulasi LTV dari Bank Indonesia tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan permintaan rumah ke depannya dan menggerakkan perekonomian nasional, mengingat sektor ini mempunyai efek pengganda (*multiplier*) yang besar, yaitu mendorong pertumbuhan lebih dari 170 industri.

KEBIJAKAN STRATEGIS 2016: LOMPATAN BESAR MENDUKUNG PROGRAM SEJUTA RUMAH

Perseroan telah menyelesaikan transformasi tahap pertama, yaitu *survival period*, di tahun 2015 yang menjadikan Perseroan sebagai pemimpin pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia. Saat ini, Perseroan menuju transformasi tahap kedua (tahun 2015 – 2019), yaitu *digital banking period*, yang diharapkan akan membawa Perseroan sebagai *global industry leader,* yaitu *the leading housing bank in Indonesia with world class service*. Berikutnya, pada tahap transformasi ketiga, yaitu *global playership period*, Perseroan berencana untuk meningkatkan posisinya sebagai pelaku bisnis KPR secara global.

Transformasi tahap kedua merupakan 'lompatan besar' Perseroan, yang dimotori oleh penunjukan Perseroan sebagai bank pelaksana Program Sejuta Rumah oleh pemerintah. Transformasi dilakukan melalui penguatan 3 (tiga) pilar bisnis inti, yaitu pra KPR (industri terkait perumahan atau hulu), KPR, dan post KPR (industri terkait perumahan atau hilir). Disini, Perseroan berperan sebagai integrator antara penawaran dan permintaan perumahan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Umum Direksi tahun 2016 yaitu 'Transformasi Bank BTN untuk mewujudkan visi menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan dengan fokus perbaikan kualitas kredit, optimalisasi Program Sejuta Rumah, pengembangan pelayanan *Digital Banking* serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia'.

Adapun strategi yang dijalankan pada masing-masing bidang untuk mengimplementasikan kebijakan Direksi tersebut adalah:

1. Bidang kredit dan kualitas kredit

   Perseroan memutuskan untuk fokus pada sektor perumahan yang telah menjadi keunggulan kompetitif sejak tahun 1976. KPR, baik subsidi

maupun non subsidi, serta kredit konstruksi menjadi produk andalan yang disalurkan untuk mengoptimalkan Program Sejuta Rumah. Kredit pada segmen konsumer lainnya tetap akan ditingkatkan untuk melengkapi produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah KPR. Sementara itu, kredit-kredit pada segmen komersial non perumahan akan diberikan secara selektif, mengingat Perseroan fokus untuk memperbaiki kualitas kredit pada segmen ini.

Pertumbuhan kredit yang tinggi pada sektor perumahan dicapai melalui peningkatan kerjasama dengan lebih dari 3.000 pengembang perumahan yang telah bekerja sama dengan Perseroan, didukung dengan program-program promosi kredit untuk menarik minat masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menjadi pasar terbesar Perseroan. Selain itu, untuk mendukung program sejuta rumah, Perseroan menjalankan aliansi strategis dengan lembaga-lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah, baik untuk penyediaan KPR baik pegawai, maupun kredit konstruksi dan penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.
Meskipun target pertumbuhan kredit cukup tinggi, Perseroan tetap memastikan bahwa kredit-kredit yang disalurkan berkualitas baik. Untuk itu, Perseroan telah memperbaiki proses bisnis kredit secara menyeluruh pada semua lini (*from end-to-end*), dari proses analisa kredit (*front-end*), monitoring kredit (*middle-end*) hingga penagihan kredit (*back-end*).

Khusus untuk proses penagihan kredit untuk memperbaiki kualitas kredit, Perseroan juga meningkatkan efektivitas *collection* dan *asset recovery management*. Beberapa inisiatif telah dilakukan, diantaranya intensifikasi monitoring kredit pada kolektibilitas dalam perhatian khusus dan penjualan agunan kredit bermasalah.

2. Bidang pendanaan
   Penguatan struktur dana pihak ketiga, terutama dana-dana berbiaya murah, menjadi target besar Perseroan setiap tahunnya. Peningkatan dana pihak ketiga murah dilakukan melalui pemanfaatan *customer base* nasabah KPR, optimalisasi jaringan kantor, serta pengembangan layanan dan produk berbasis *digital banking*.

   Khusus untuk dana bagi KPR Subsidi, Perseroan terus mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah dan institusi pemilik dana besar. Selain itu, untuk memperbaiki profil maturity antara kredit dan dana, Perseroan secara rutin meningkatkan pendanaan jangka panjang (*wholesale funding*) melalui penerbitan obligasi, N*egotiable Certificate of Deposit* (NCD), *bilateral loans* dan sekuritisasi KPR.

3. Bidang permodalan
   Untuk mendukung penyaluran kredit dalam rangka Program Sejuta Rumah, Perseroan membutuhkan permodalan yang cukup dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Untuk itu, Perseroan melakukan revaluasi aset sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN dan menerbitkan *subordinated loans*, untuk memperkuat permodalan.

4. Bidang pendapatan operasional lainnya (*fee-based income*)
   Perseroan terus berupaya meningkatkan kontribusi *fee-based income* terhadap total pendapatan. Selain melalui pendapatan administrasi perbankan,

peningkatan *fee-based income* diraih melalui aktivitas *treasury*, layanan perbankan, bisnis kartu (kredit dan debit), *wealth management* dan *payment point*.

5. Bidang *human capital*
   Strategi di bidang *human capital* difokuskan untuk mencapai produktivitas pegawai dengan program kerja sebagai berikut:
   - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas.
   - Pemenuhan dan alokasi *human capital* secara pareto untuk mendukung bisnis.
   - Internalisasi budaya kerja perusahaan untuk menggerakkan perilaku dalam mendukung bisnis.

6. Bidang infrastruktur
   Selain penguatan bidang bisnis dan *human capital*, perbaikan infrastruktur juga menjadi perhatian Perseroan. Perseroan terus berupaya menerapkan tata kelola perusahaan dan kepatuhan (*compliance*) secara konsisten. Penguatan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis diimplementasikan melalui otomatisasi proses bisnis, sentralisasi proses, sistem informasi, inovasi produk dan layanan berbasis *digital banking*. Masih di bidang infrastruktur, peningkatan *produktivitas delivery channel* baik jaringan kantor maupun *e-channel* terus dikembangkan untuk dapat melayani masyarakat secara lebih luas.

Dalam menyusun strategi dan program kerja di atas, Perseroan selalu menyelaraskannya dengan visi dan misi Pemerintah dalam pembangunan nasional. Perseroan bertekad bulat untuk mensukseskan sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan perumahan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga mendukung penuh *roadmap* Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, khususnya terkait inisiatif memeratakan kemakmuran melalui Program Sejuta Rumah serta mendorong kemandirian keuangan melalui program inklusi keuangan lewat pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) dengan peluncuran produk Tabungan BTN Cermat. Perseroan juga turut serta meningkatkan daya saing dan efisiensi bank-bank BUMN melalui sinergi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Electronic Data Capture* (EDC) yang ditandai dengan pengembangan ATM Merah Putih. Tak lupa Perseroan juga berpartisipasi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui program distribusi bantuan sosial, Mekaar dan rumah kreatif BUMN.

KINERJA 2016: PERTUMBUHAN YANG KUAT DAN BERKELANJUTAN

FUNDAMENTAL KEUANGAN SEMAKIN SOLID

Kami sangat mensyukuri bahwa kinerja Perseroan di tahun 2016 sangat memuaskan dan berada jauh di atas angka industri. Bila perbankan domestik masih mengalami perlambatan pertumbuhan dan risiko kenaikan *Non Performing Loan* (NPL), Perseroan justru mencatatkan pertumbuhan yang solid dengan tetap menjaga kualitas pertumbuhan itu sendiri melalui tingkat NPL yang terkendali.

Aset Perseroan di tahun 2016 mencapai Rp214,17 triliun meningkat sebesar 24,66% dari tahun sebelumnya sebesar Rp171,81 triliun. Peningkatan aset ini terutama didorong oleh kenaikan kredit dan pembiayaan serta

dana pihak ketiga. Kredit dan pembiayaan Perseroan mencapai Rp164,45 triliun atau meningkat 18,34% dari tahun 2015 sebesar Rp 138,96 triliun. Sesuai dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan perumahan maka penggerak utama pertumbuhan kredit berasal dari kredit perumahan, yaitu KPR Subsidi, KPR Non Subsidi dan Kredit Konstruksi.

Fokus pada kredit-kredit perumahan ini menjadikan Perseroan sebagai kontributor utama dalam Program Sejuta Rumah. Selama tahun 2016, Perseroan menyalurkan 595.566 unit rumah dengan nilai sebesar Rp63,99 triliun. Jumlah ini terdiri dari KPR sebanyak 209.395 unit dengan nilai Rp31,84 triliun dan dukungan kredit konstruksi kepada sebanyak 386.171 unit rumah dengan nilai Rp32,15 triliun.

Dengan pencapaian ini Perseroan tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin KPR di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 33,57% per September 2016. Sedangkan untuk KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Perseroan tetap mendominasi sebesar 96,12% dari total penyaluran KPR Subsidi sampai dengan tahun 2016.

Dana pihak ketiga Perseroan per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp159,99 triliun atau tumbuh 25,27% dari tahun 2015 yang sebesar Rp 127,71 triliun. Sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan dana berbiaya murah,pertumbuhan dana pihak ketiga tertinggi berasal dari Giro yang tumbuh sebesar 46,15%. Pencapaian ini menjadikan komposisi CASA Perseroan terhadap total dana pihak ketiga sebesar 50,42%, naik dari 48,65% pada tahun 2015.

Selain melalui dana pihak ketiga, Perseroan juga mendapatkan dana-dana jangka panjang dari pasar modal, dengan tujuan memperbaiki profil *maturity* antara kredit dan dana. Selama tahun 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi sebesar Rp 3 triliun dan NCD sebesar Rp3,23 triliun yang *over subscribed*, melakukan pinjaman bilateral sebanyak Rp7,5 triliun serta sekuritisasi KPR sebesar Rp1 triliun.

Untuk menjaga tingkat ekspansi kredit yang tinggi, Perseroan melakukan beberapa inisiatif di tahun 2016 untuk memperkuat permodalan, yaitu melalui revaluasi aset dan penerbitan modal pelengkap (*sub-ordinated loan*). Hasilnya ekuitas Perseroan meningkat sebesar 38,03%, dari Rp13,86 triliun di tahun 2015 menjadi Rp19,13 triliun di tahun 2016. Dengan transaksi-transaksi tersebut, struktur permodalan menjadi lebih kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 20,34%,meningkat dari 16,97% di tahun 2015, dan berada jauh diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 9%.

Laba bersih Perseroan tahun 2016 berhasil tumbuh sebesar 41,49%,dari Rp1,85 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp2,62 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran kredit yang menghasilkan pendapatan bunga, memperbaiki kualitas kredit serta menurunkan biaya dana (*cost of fund*).

Pertumbuhan laba bersih ini mendorong perbaikan beberapa rasio profitabilitas Perseroan. *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) masing-masing mencapai 1,76% dan 18,35%, naik dari 1,61% dan 16,84% di tahun 2015. *Net Interest Income* (NIM) juga meningkat menjadi sebesar 4,98%, dibandingkan 4,87% pada tahun 2015.

Seiring dengan tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan di tahun 2016, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami sedikit perbaikan dari 103,76% menjadi 103,47%. Sementara itu, rasio efisiensi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga mengalami perbaikan dari 84,83% menjadi 82,48%.

Melanjutkan perbaikan kualitas kredit yang telah berhasil dijalankan di tahun sebelumnya, di tahun 2016 Perseroan kembali melakukan beberapa inisiatif untuk terus menurunkan tingkat kredit bermasalah. Fokus perbaikan dilakukan pada kredit-kredit yang berada di kategori kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.

Monitoring kredit yang ketat serta restrukturisasi kredit menjadi kunci keberhasilan perbaikan di segmen ini. Secara perlahan, kredit pada kategori 2 terus menurun dari 12,46% pada tahun 2015 menjadi 10,22% di 2016. Intensifikasi perbaikan juga dilakukan pada kredit di kategori kolektibilitas 5 (macet), dengan melakukan penjualan agunan kredit bermasalah, melalui cessie, novasi dan lelang.

Inisiatif-inisiatif tersebut di atas melengkapi perbaikan proses bisnis kredit pada semua lini yang telah mulai dijalankan pada tahun 2015. Hasilnya, NPL Gross Perseroan membaik dari 3,42% menjadi 2,84%, demikian pula NPL Net yang turun dari 2,11% menjadi 1,85%. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2016 ini lebih baik dari NPL industri sebesar 2,9%.

Demikian juga untuk kinerja Unit Usaha Syariah Perseroan berada pada posisi pertumbuhan yang sangat positif. Total asset tahun 2016 mencapai Rp18,13 triliun atau tumbuh sebesar 36,60% dari posisi tahun 2015 sebesar Rp 13,27 triliun. Sementara untuk pembiayaan tercatat sebesarRp14,22 triliun atau tumbuh 26,74% dari tahun 2015 sebesar Rp 11,22 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp15,03 triliun atau meningkat sebesar 35,35% dari perolehan tahun 2015 sebesar Rp 11,11 triliun. Sementara laba yang dihasilkan Unit Usaha Syariah Perseroan mencapai Rp377,42 miliar atau naik sebesar 44,98% dari perolehan laba periode tahun 2015 sebesar Rp260,33 miliar.

PENCAPAIAN MELEBIHI TARGET

Hampir semua parameter kinerja keuangan Perseroan per 31 Desember 2016 memenuhi bahkan melebih target yang ditetapkan, yang menggambarkan perencanaan yang matang atas potensi bisnis dan kemampuan Perseroan. Aset Perseroan sebesar Rp214,17 triliun mencapai 102,18% dari target. Pencapaian kredit dan pembiayaan juga mencapai 100,19% dari target.

Pencapaian dana pihak ketiga mencapai 99,76% dari target yang ditetapkan, walaupun posisi dana pihak ketiga sebesar Rp160,19 triliun telah tumbuh 25,40% dari posisi tahun sebelumnya.

Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp19,13 triliun mencapai 100,95% dari target. Sementara itu, pencapaian laba bersih sebesar 107,51% dari target 2016.

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN BISNIS

Selain pertumbuhan dan perbaikan secara keuangan, pada tahun 2016 Perseroan juga melakukan berbagai perbaikan di sisi operasional yang mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebagaimana fase transformasi yang saat ini sedang dijalani, yaitu transformasi digital, pengembangan produk serta layanan digital dan elektronik dilakukan secara intensif selama tahun 2016.

Langkah ini diambil mengingat kecenderungan nasabah Perseroan saat ini telah beralih dari aktivitas perbankan konvensional ke penggunaan *e-channel*. Komposisi transaksi perbankan yang menggunakan *e-banking* dibandingkan dengan layanan Teller sampai dengan Desember 2016 mencapai 87%:13%.

Dalam mengembangkan layanan perbankan digital, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dengan mengutamakan kecepatan, akurasi dan interaksi yang berkualitas. Beberapa proyek di bidang *digital banking* telah dikembangkan untuk terus mendukung kinerja Perseroan sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pembangunan *digital outlet* untuk memperkaya pengalaman nasabah dalam melakukan transaksi perbankan digital. Melalui pembangunan *digital outlet* ini, Perseroan berupaya mentransformasi

outlet-outlet yang dimiliki tidak terbatas hanya sebagai kantor cabang, namun juga berfungsi sebagai produk dan fitur display bagi nasabah (*from branch to store*).

2. Pengembangan '*BTN Digital Solution*' yaitu aplikasi terintegrasi Perseroan yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan cukup dalam satu genggaman. Dengan menggunakan telepon seluler melalui BTN Digital Solution, nasabah Perseroan saat ini dapat bertransaksi *e-commerce*, membuka rekening, berhubungan dengan *contact center*, mencari lokasi ATM Perseroan dan membuat kartu ATM suka-suka.

3. Perluasan layanan BTN property, sehingga nasabah dapat membeli rumah semudah berbelanja *online*. Nasabah dapat mengajukan aplikasi KPR secara *online*, memonitor permohonan KPR tersebut hingga mencari rumah-rumah yang dilelang.

APREASIASI PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai wujud tanggung jawab Perseroan dan dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*shareholder's wealth*), Perseroan berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan pasar dan meningkatkan kinerja. Kinerja yang memuaskan selama tahun 2016 diapresiasi oleh pemegang saham, yang tercermin dari peningkatan harga saham Perseroan. Harga saham BBTN per 31 Desember 2016 ditutup sebesar Rp1.740 meningkat 34,36% dari posisi tahun 2015 sebesar Rp 1.295. Angka ini jauh di atas pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 15,32% dari 4.593 menjadi 5.297 pada tahun 2016. Saham Perseroan juga masuk dalam daftar 10 besar saham dengan pertumbuhan tertinggi di indeks LQ45. Dengan *gain* yang sangat tinggi pada tahun 2016, Perseroan dinobatkan sebagai '*The Best Listed Company*' untuk kategori perbankan dari majalah Investor, '*The Best Mid Cap Company in Indonesia*' dari Finance Asia, serta '*Excellence in Governance and Investor Relations Benchmarking*' dari *The Asset Publisher and Research Limited.*

Kuatnya fundamental keuangan Perseroan disertai dengan perbaikan-perbaikan di sisi bisnis dan operasional, juga diapresiasi oleh banyak lembaga dengan menaikkan peringkat atau penilaiannya terhadap Perseroan. Lembaga pemeringkat, PT Pefindo memutuskan untuk menaikkan rating Perseroan beserta Obligasi XII tahun 2006, Obligasi XIV tahun 2010, Obligasi XV tahun 2011, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013, dan Obligasi Berkelanjutan II tahap I tahun 2015, dari idAA menjadi idAA+. Obligasi Berkelanjutan II tahap II tahun 2016 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2016 juga mendapatkan rating idAA+.

Perbaikan nilai dan peringkat juga didapatkan dari penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diselenggarakan Kementerian BUMN. Nilai Perseroan berhasil naik dari 492 (*good performance*) pada 2015 menjadi 579 (*emerging industry leader*) pada 2016.

Perbaikan peringkat serta penghargaan yang diterima Perseroan tersebut membuktikan soliditas kerjasama antara semua organ dan unit kerja dalam Perseroan. Baik Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perseroan bersinergi dan bekerja keras untuk mencapai semua target yang ditetapkan dan membawa Perseroan sejajar dengan bank-bank besar di Indonesia.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN ANTISIPASINYA

Semua hasil luar biasa yang diraih tentu saja dicapai dengan keberhasilan Perseroan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Kendala pertama adalah keterbatasan dana Pemerintah dalam mendukung Program Sejuta Rumah,

khususnya dalam penyaluran KPR Subsidi. Perseroan membutuhkan dukungan dana berbiaya murah dari Pemerintah untuk dapat menyalurkan KPR Subsidi dengan bunga rendah.

Masih di sisi kredit, kendala yang dihadapi Perseroan lainnya adalah persaingan di bisnis KPR yang semakin ketat, terutama di segmen non subsidi. Semua bank komersial di Indonesia saat ini menawarkan produk KPR dengan suku bunga yang sangat menarik. Melihat tantangan ini, Perseroan terus memperbaiki layanannya bagi nasabah KPR, didukung dengan perbaikan biaya dana sehingga dapat menawarkan suku bunga yang menarik.

Kendala lain yang dihadapi Perseroan adalah masih terbatasnya pertumbuhan pendapatan non bunga atau *fee-based income*. Saat ini, kontribusi pendapatan non bunga terhadap total pendapatan adalah sekitar 6%. Perseroan berupaya untuk secara bertahap meningkatkan kontribusi ini, melalui pengembangan bisnis kartu, *wealth management* dan *digital banking*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN BERSTANDAR INTERNASIONAL

Walaupun kinerja keuangan merupakan elemen penting dari keberhasilan, Perseroan senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kinerja usaha dan praktik-praktik tata kelola yang baik.

Perseroan terus berpegang pada standar tata kelola yang tinggi dan meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya membangun dan memelihara kepercayaan dan kredibilitas. Menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten diyakini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna atau menyeluruh. Oleh karenanya Perseroan telah merumuskan dan menerapkan segala perilaku bisnis Perseroan dijiwai oleh nilai-nilai Perseroan, standar etika dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

Konsep tata kelola yang Perseroan kembangkan diharapkan akan mampu mendukung keberlanjutan bisnis. Perseroan akan senantiasa berkomitmen dan konsisten melaksanakan praktik korporasi yang etis, mendukung persaingan usaha yang sehat, menjauhi penguasaan aset sehingga mampu berkontribusi dalam penyelesaian pada masalah ekonomi dan ketimpangan. Selain itu Perseroan menghindari segala praktik korporasi yang diskriminatif, memihak dan tidak memperhatikan aspek kemanusiaan.

Pencapaian kinerja keuangan yang baik diatas, ditopang dengan proses peningkatan implementasi GCG. Perseroan telah mengacu pada berbagai peraturan, antara lain yang diterbitkan oleh OJK serta mengacu pada praktik internasional. Perseroan dinilai telah berhasil dalam menerapkan berbagai parameter *Asean Corporate Governance Scorecard*, yang diwujudkan dengan berhasilnya Perseroan mengukuhkan diri sebagai juara pertama '*Annual Report Award*' kategori BUMN Keuangan Listed, '*The Best Overall*' dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), '*The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index*' pada IICG *Awards*, 'GCG Terbaik Perusahaan Tbk di Indonesia' dari Economic Review dan 'Peringkat Keenam dalam Keterbukaan Informasi Publik' dari Komisi Informasi Pusat. Pada level internasional, Perseroan mendapatkan 5 (lima) penghargaan dari League of American Communication Professionals (LACP) dan '*Excellence in Governance and Investor Relations Benchmarking*' The Asset Hong Kong.

Perseroan juga mendapatkan sertifikasi atas penerapan kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal, yaitu melalui penghargaan dari PT. SGS Indonesia, masing-masing ISO 9001:2008 *Risk Management Services*, ISO 9001:2008 *Compliance Assurance* dan ISO 9001:2008 *Internal Audit Sevices* (*General, Syariah and IT Audits*).

Fokus tata kelola Perseroan di tahun 2016 sesuai dengan *Roadmap* GCG adalah:

a. Evaluasi dan perbaikan penerapan GCG.
b. Evaluasi dan persiapan GCG Award. Evaluasi dilakukan pada keikutsertaan GCG Award pada tahun lalu untuk mempersiapkan keukutsertaan GCG Award pada periode selanjutnya.
c. Evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan training sertifikasi internasional. Evaluasi dilakukan dengan mereview hasil training bersertifikasi internasional yang dilakukan oleh *top management*, pejabat berwenang serta pegawai terpilih.
d. Penyusunan *integrated Governance, Risk, & Compliance* (GRC).
e. Pengembangan kompetensi SDM terkait penerapan GCG. Pengurus dan pegawai yang telah mendapatkan sertifikasi internasional dalam penerapan GCG melakukan *sharing discussion, training*, dan seminar kepada pegawai Perseroan lain.
f. Penerapan ISO *governance dan compliance*. Perseroan mendapatkan ISO *Governance* dan *Compliance* dari lembaga pemberi sertifikasi ISO yang mencerminkan bahwa penerapan *governance* dan *compliance* diakui sesuai dengan mutu standar. Beberapa upaya intensif untuk memperbaiki penerapan GCG Perseroan dipaparkan secara lengkap pada bagian Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.
g. Review dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur. Penyempurnaan kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memperbaiki ketentuan dan kebijakan yang perlu direvisi.
h. Evaluasi dan pembenahan struktur organisasi serta *job description.* Pembenahan struktur serta perbaikan *job description* dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan peran dan beban kerja dalam pelaksanaan GCG.
i. *Sharing GCG practices* dengan perusahaan lain.

Diantaranya dapat Perseroan sampaikan sebagai berikut:

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Perseroan telah memiliki struktur GCG yang kuat dan efektif yang terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ Perseroan tersebut telah menjalankan perannya masing-masing dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban pengawasan Dewan Komisaris dan kepengurusan Direksi atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu yang tidak melewati batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 12 April 2016. Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 Januari 2016 dengan agenda Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain

berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan Nomor01/KOM-BTN/2015 dan DireksiPerseroan Nomor SKB-01/DIR-BTN/2015.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Hasil evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS. Adapun penilaian lainnya dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil *Self Assessment* tahun 2016, Perseroan memperoleh nilai komposit pelaksanaan GCG sebesar 2 atau dalam kategori baik.

PENGUATAN BUDAYA SADAR RISIKO

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa bisnis perbankan terkait erat dengan pengelolaan risiko, dan pengelolaan risiko tidak lepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang menjadi bagian dari sistem tata kelola perusahaan.

Perseroan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat guna tercapainya *risk adjusted return*. Hasil penilaian risiko tahun 2016 menunujukkan risiko komposit termasuk dalam peringkat *low* hingga *low to moderat.*

Di Tahun 2016 Perseroan terus mengembangkan implementasi manajemen risiko berkelanjutan dan terintegrasi. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran Perseroan serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Hal ini membuat kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan beberapa kebijakan dan prosedur manajemen Risiko, antara lain Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaan *stress testing*.
3. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko berupa ICR (*Internal Credit Rating*) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) untuk risiko operasional. Disamping itu juga dilakukan pengembangan aplikasi pengukuran risiko likuiditas serta sistem informasi IRRBB.
4. Pelaksanaan *stress testing* risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mewujudkan komitmen terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPIN) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. SKB-04 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP dan sejalan dengan *internal control framework* yang dikembangkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Perseroan diharapkan mampu menciptakan desain kerangka pengendalian yang memadai sebagai sebuah sistem peringatan dini atas setiap risiko yang di hadapi Perseroan.

Berdasarkan SKB tersebut, komponen pengendalian internal Perseroan meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*control inviroment*), merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian internal yang mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh '*Strong Tone at the Top*'.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*), merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*), meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), merupakan kondisi saluran komunikasi internal dan ekternal yang efektif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap risiko utama yang diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala oleh satuan-satuan kerja operasional maupun *Internal Audit Division* (IAD).

Penilaian aspek internal control dilakukan melalui *Internal Control Assessment* (ICA) yaitu penilaian kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner ICA serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/ frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Pada periode 2016, IAD melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan dan menyempurnakan efektifitas SPIN Perseroan yang memadai dan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk dilakukan kajian lebih mendalam. Kajian atas evaluasi tersebut dilakukan terhadap lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environtment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assesment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information*

and Communication), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya serta penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite, IAD dan beberapa divisi terkait dapat dikatakan bahwa Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System (WBS) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran.

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk:

- Melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran;
- Secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian Laporan Pelanggaran Mekanisme yang dibangun oleh Perseroan dalam menerapkan WBS adalah pelapor membuat pengaduan atau pengungkapan dan mengirimkannya kepada:

- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah pegawai Perseroan, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada Tim SPP/WBS. Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan modus lainnya yang dirasakan nyaman oleh Pelapor.
- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Tim SPP/WBS, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama Perseroan di Kantor Pusat dengan ditandai "*CONFIDENTIAL*" atau "RAHASIA" pada sampul surat.
- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang kemudian akan diteruskan ke Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris.
- Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang akan meneruskannya ke Direktur Utama.

Kepada Pelapor yang beritikad baik, Perseroan memberikan jaminan perlindungan, sebagai berikut:

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, email) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari si Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
   a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
   b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.

c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sepanjang tahun 2016, jumlah pengaduan yang masuk adalah sejumlah 101 pengaduan yang mencakup 20 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 38 pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung dan 43 pengaduan melalui Email. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 93 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 8 pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus).

PENGEMBANGAN SDM MELALUI BUDAYA PERUSAHAAN YANG BARU

Dalam aspek strategi organisasi dan sumber daya manusia (SDM), Perseroan telah melakukan evaluasi atas tata nilai perusahaan dan pembenahan disegala bidang. Perseroan sangat serius dalam mendayagunakan SDM di dalam organisasi dan tetap dalam koridor ketentuan hukum dalam melaksanakan hubungan industrial. Produktivitas dan profesionalisme tinggi senantiasa dicapai melalui optimalisasi fungsi perencanaan SDM, rekruitmen dan seleksi, pengembangan SDM, pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan diraihnya predikat sebagai Bank BUMN terbaik dalam mengelola SDM dilingkungan perbankan pada ajang penghargaan BUMN *Award* 2016, Perseroan dinilai telah memenuhi syarat dalam pengelolaan SDM yang baik sebagai perbankan. Perseroan bersyukur atas apresiasi tersebut dan sekaligus memacu Perseroan untuk lebih semangat dalam mengelola SDM menjadi lebih baik.

Pada tahun 2016, Perseroan mencanangkan budaya perusahaan yang baru, yaitu SIIPS. Budaya perusahaan ini memiliki 5 (lima) nilai yang menjadi pondasi bagi seluruh insan Perseroan dalam berperilaku untuk mencapai visi dan misi.

CSR HINGGA KE PELOSOK NEGERI

Perseroan memaknai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada *stakeholder*, dan atas kesadaran bahwa keberadaan operasi Perseroan tersebar dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Penerapan CSR yang baik diyakini tidak hanya akan meningkatkan laba tetapi juga keuntungan yang bersifat jangka panjang.

Di tahun 2016 Perseroan telah merealisasikan berbagai program CSR. Program dan kegiatan CSR berorientasi jangka panjang yaitu mewujudkan keberlanjutan Perseroan yang berorientasi pada aspek sosial dan lingkungan. Program CSR Perseroan tidak sekedar sebagai *charity*, namun mendukung program pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Program kemanusiaan dan lingkungan yang dijalankan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung upaya penyelesaian masalah bangsa seperti masalah ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, penyelesaian masalah keamanan dan keselamatan maupun perbaikan kualitas kemanusiaan. Cara Perseroan berbisnis senantiasa memperhatikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bertanggung jawab dan mendukung pelestarian lingkungan.

Direksi telah meningkatkan penyaluran dana CSR sebesar 1,92%, dimana tahun 2015 sebesar Rp 14,52

miliar menjadi sebesar Rp 14,8 miliar di tahun 2016. Berbagai program yang telah direalisasikan pada tahun 2016. Salah satunya adalah bantuan rehabilitasi gedung Rumah Susun Cipinang Besar Selatan sebesar Rp. 2 miliar kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Memahami bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bantuan CSR Perseroan tidak saja diberikan di kota-kota besar di Indonesia, namun hingga ke pelosok tanah air. Kegiatan CSR pun tidak dilakukan sendiri, namun dengan menggandeng Kementerian BUMN dan BUMN lainnya, dalam program 'BUMN Hadir Untuk Negeri'. Kegiatan ini merupakan komitmen BUMN untuk menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia sebagai perwujudan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Beberapa kegiatan diantaranya adalah Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN), BUMN Mengajar dan Bedah Rumah Veteran. Perseroan telah ditetapkan sebagai koordinator untuk Provinsi Maluku Utara dan telah melakukan serangkaian kegiatan yang di dedikasikan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Sesuai kebutuhan bisnis dan memenuhi ketentuan yang ada, dalam melaksanakan tugas Direksi didukung oleh 6 (enam) komite di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), Komite Personalia dan Komite Produk. Direksi menilai komite pendukung telah dapat berperan efektif dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite eksekutif yang mendukung Direksi dalam menyusun arah kebijakan dan strategi terkait manajemen risiko, perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko serta penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal. Pada tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah menyusun *self assessment* profil risiko setiap triwulannya, memberikan rekomendasi perbaikan profil risiko serta melakukan review terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Kebijakan Perkreditan berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan dibidang perkreditan. Selama tahun 2016 komite Kredit telah melaksanakan tugas antara lain melakukan review Kebijakan Manajemen Perkreditan dan kewenangan memutus kredit, menyusun strategi pertumbuhan kredit dan perbaikan kualitas kredit serta mengembangkan produk dan layanan kredit yang baru.

Komite ALCO menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar dan strategi pengelolaan *asset* dan *liability* dalam rangkamemaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan. Selama tahun 2016 ALCO telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang *asset* dan *liability* antara lain suku bunga dan likuiditas.

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas antara lain memberikan rekomendasi mengenai rencana strategis Teknologi Informasi (TI), merumuskan kebijakan dan prosedur TI, memantau kesesuaian proyek-proyek TI dengan rencana strategis TIserta memantau kinerja TI. Selama tahun 2016 KPTI telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2016-2018.

Komite Personalia merupakan bertugas merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2016 Komite Personalia telah melaksanakan tugas penilaian kinerja

karyawan, program remunerasi berbasis POJK No.45/POJK.03/2015 dan permasalahan *human capital* lainnya.

Komite Produk memiliki fungsi memastikan kesesuaian antara pengembangan produk dengan kebutuhan serta tujuan Perseroan, melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perkembangan produk dan penerapan dalam jangka panjang sertamenentukan kebijakan-kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan pengembangan produk. Selama tahun 2016 Komite Produk telah menetapkan beberapa kebijakan terkait penerbitan produk dan layanan baru.

PROSPEK USAHA: PERMINTAAN RUMAH TETAP TINGGI

Memasuki tahun 2017, ketidakpastian ekonomi global masih membayangi Indonesia. Sebagai contoh, Federal Reserve Amerika Serikat berencana untuk menaikkan *Fed Funding Rate* (FFR) sekitar 50-75 bps. Namun demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia optimistis bahwa pondasi ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi sentimen negatif ekonomi global. dan pemulihan ekonomi domestikdapat berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,1%, sedikit naik dari 5,02% di tahun sebelumnya. Inflasi pun dipatok dalam rentang sasaran APBN 2017 sebesar 3-5%. Seiring inflasi yang terjaga dan likuiditas yang memadai, suku bunga dana diharapkan tidak meningkat, sehingga suku bunga kredit masih dapat turun. Tahun 2017, BI juga memprediksi pertumbuhan kredit mencapai 10-12%, lebih tinggi dari 7,87% pada tahun 2016. Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh berkisar 9-11%, atau naik dari 9,60%.

Perseroan optimistis industri properti pada 2017 kian membaik, karena pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat suku bunga acuan yang rendah, bonus demografi hingga pembangunan infrastruktur yang terus tumbuh. Ruang bisnis sektor perumahan masih luas untuk dikembangkan. Hingga September 2016, kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 2,5%-2,8%. Beberapa alasan bahwa bisnis perumahan di Indonesia masih memiliki prospek antara lain: (a) Kondisi ekonomi indonesia dalam kondisi sehat dan pasar pembiayaan perumahan yang jauh dari jenuh (b) Penduduk *middle class* tumbuh sangat *significant* (c) *Backlog* penyediaan rumah per tahun masih cukup tinggi dan (d) Penjualan rumah sebagian besar dengan kredit.

Untuk itu, Perseroan dapat berperan mengurangi *backlog* dan sekaligus menangkap peluang dalam mengembangkan bisnis perumahan. Pertumbuhan kredit Perseroan di tahun 2017 akan mencapai 21-23% atau masih tetap diatas pertumbuhan kredit industri perbankan nasional. Potensi pasar dari peningkatan penyaluran kredit tersebut diantaranya berasal dari komitmen untuk melanjutkan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Potensi penyaluran KPR dalam program sejuta rumah diperkirakan dapat terealisasi. Di tahun 2017 potensi semakin meningkat sejalan dengan prasarana pendukung mulai disediakan oleh pihak pemerintah dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Perseroan pun terus meningkatkan kerja sama dengan asosiasi pengembang perumahan di Indonesia, seperti APERSI dan REI, sebagai penyedia *supply* perumahan, serta lembaga-lembaga pemilik dana yang dapat membantu penyediaan dana murah untuk perumahan.

Dengan pengalaman menyalurkan KPR lebih dari 3,8 juta unit rumah dan kompetensi yang dimiliki sebagai bank fokus perumahan, Perseroan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional khususnya dibidang perumahan dan sekaligus peluang bisnis bank kedepan. Selain itu, dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam pembiayaan perumahan (sejak KPR

pertama tahun 1976), secara terus menerus menjadikan Perseroan memiliki *core competency* yang tidak dimiliki oleh bank lain.

Core competency Perseroan diantaranya adalah 1) KPR *supremacy*, yaitu Perseroan dominan dalam penguasaan pasar pembiayaan perumahan nasional, 2) *mortgages industry integrator*, dimana Perseroan memiliki relationships yang kuat dengan para stakeholders bisnis perumahan yang memungkinkan Perseroan menjadi integrator sisi *supply* dan sisi demand bisnis perumahan), 3) *easily accessible services*, yaitu Perseroan menyediakan kemudahan akses dalam jasa/ layanan bisnis perumahan bagi masyarakat, 4) *world class service level*, dimana Perseroan memiliki standar layanan kelas dunia baik dari sisi *operational excellence* (kecepatan dan ketepatan proses KPR), ragam jaringan dan produk yang didukung oleh teknologi informasi yang handal, serta 5) *Housing finance expertise*,yaitu Perseroan memiliki SDM yang ahli di bidang pembiayaan perumahan.

ARAH KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Memperhatikan perkembangan terkini, transformasi berkelanjutan Perseroan akan dikembangkan lagi untuk mencapai *Transformational Enterprise* dengan *Global Mindset* pada tahun 2025. Pada level ini Perseroan akan berperan secara global pada bisnis pembiayaan perumahan yang memungkinkan untuk melakukan bisnis KPR lintas negara (*borderless*).

Perseroan berupaya melakukan lompatan sejalan dengan *roadmap* transformasi dengan fokus pada penguatan bisnis (*stronger business*). Penguatan bisnis dalam transformasi Perseroan adalah penguatan bidang kredit, penguatan bidang dana, penguatan bidang infrastruktur, peningkatan pendapatan operasional non bunga serta penguatan bidang SDM.

Penguatan bidang kredit diarahkan pada penguatan bisnis inti Perseroan yaitu bidang perumahan disertaidengan tahap perluasan bisnis properti dan infrastruktur dasar. Arah kebijakan Perseroan adalah fokus pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah pembiayaan perumahan yang fokus pada pembiayaan perumahan tapak, vertikal dan sarana prasarana. Pilar kedua adalah memperdalam pembiayaan industri terkait dari sisi hulu (*value chain* perumahan seperti pabrik semen, batako, genteng dsb). Sedangkan Pilar ketiga adalah pembiayaan industri terkait dari sisi hilir (terkait pengguna rumah seperti *household operation*, kepemilikan kendaraan, furniture dan sebagainya).

Penguatan bidang dana difokuskan pada pengembangan pendanaan berjangka panjang dan murah. Arah kebijakan Perseroan adalah pendanaan institusional terkait kerjasama kredit, memperkuat segmen dana ritel berbiaya murah serta memperkuat pendanaan jangka panjang seperti *capital market*, pinjaman lembaga, pinjaman luar negeri dan sekuritisasi asset.

Peningkatan pendapatan operasional non bunga diraih melalui peningkatan pendapatan dari layanan transaksi, *digital banking*, *wealth management*, dan bank garansi; pengelolaan kredit-kredit yang sudah dihapus buku(*off balance sheet*); serta membentuk anak usaha yang mendukung bisnis Perseroan.

Penguatan infrastruktur difokuskan pada pengembangan sistem digital banking, peningkatan kualitas proses serta pengembangan *delivery channel*. Adapun penguatan sumberdaya manusia (*people transformation*) difokuskan pada pelaksanaan budaya perusahaan baru dan pengembangan kompetensi SDM.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan komposisi Direksi Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 12 April 2016 telah mengukuhkan pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur Perseroan. Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi serta sumbangan tenaga dan pikirannya kepada Perseroan.

Direksi menyampaikan selamat datang kepada Sdri. Handayani dan Sdr.Catur Budi Harto yang telah diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan pada RUPST tanggal 12 April 2016. Perubahan ini dipandang sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk memenuhi tuntutan bisnis, mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis sebagaimana yang dituangkan dalam program transformasi, termasuk mensukseskan Program Sejuta Rumah. Pengangkatan Direksi yang baru dilakukan berdasarkan evaluasi dan/atau uji kepatutan dari konsultan independen, rekomendasi Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi serta pemegang saham pengendali dan OJK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup, Perseroan mewakili seluruh anggota Direksi, menyampaikan penghargaan sebesar besarnya dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan – para pemegang saham, nasabah, mitra usaha dan semua anggota komunitas Perseroan, atas dukungan penuh yang telah diberikan. Apresiasi juga Perseroan sampaikan kepada Dewan Komisaris atas nasehat dan arahannya bagi Direksi Perseroan sepanjang tahun 2016. Perseroan yakin akan dapat terus berkembang dan tumbuh meraih kesejahteraan bersama.

Dengan implementasi tata kelola yang baik, strategi yang tepat dan pengelolaan risiko secara menyeluruh, Perseroan yakin dapat mencapai kinerja terbaik tidak hanya pada tahun ini tetapi juga ditahun-tahun yang akan datang.

Atas Nama Direksi
Jakarta, Februari 2017

Maryono
Direktur Utama

Keterangan foto (dari kiri ke kanan)
Bpk. Oni Febriarto Rahardjo - Bpk. Iman Nugroho Soeko - Bpk. Catur Budi Harto - Bpk. Maryono - Bpk. Mansyur Syamsuri Nasution - Bpk. Sulis Usdoko - Bpk. Adi Setianto - Ibu Handayani

PROFIL DIREKSI

Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Magister (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 1998

Maryono

Direktur Utama

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012, dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Maret 2013. Saat ini tidak menjabat sebagi Direksi pada perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mutiara mulai November 2008 sampai dengan Desember 2012. Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1982 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 2008, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Mandiri Manajemen Investasi serta pernah menjabat sebagai *Group Head* Jakarta *Network Group* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Saat ini beliau juga menjabat sebagai presiden regional WSBI (*World Saving Bank Institute*) Kawasan Asia Pasifik.

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Regional Conference on Postal Saving System in Asia* 2016 di Tokyo pada tahun 2016, 24th *World Congress of Saving and Retail Banks* di Amera Serikat pada tahun 2015, 21st *Meeeting of the WSBI Asia Regional Group* di Spanyol pada tahun 2015, *Executive International Conference* di Moscow pada tahun 2014, *Refreshment* Sertifikasi Management Risiko di Moscow, Rusia tahun 2014; *Negotiation Dynamics Programme*, INSEAD, Fontainenbleau, Perancis pada tahun 2004 dan *Senior Executive Programme* In Asia, Michigan Business School, Hongkong pada tahun 2004.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar *Master of Science* pada bidang *Resources Economics* tahun 1991 dari Colorado State University

Mansyur Syamsuri Nasution

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 28 Desember 2012 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Maret 2013. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya menjabat sebagai EVP *Coordinator–Consumer Finance,* Bank Mandiri (2008-2012). Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1983 di Bank Bumi Daya sampai dengan tahun 1997. Dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menduduki jabatan beberapa *Group Head* di Bank Mandiri.

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Integrated Risk Management* di Swedia tahun 2016, *Bank Risk Management Program Executives*, IBI dan LSPP di Hong Kong tahun 2014; Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, Boston USA pada tahun 2012; *Competitive Strategy Programme,* INSEAD Business School, Fontainebleau, France pada tahun 2011 dan Creating Growth Opportunities, Wharton Business School, Philadelphia, USA, pada tahun 2010

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar *Master of Social Science* dari Univ. of Birmingham, Inggris pada tahun 1989

Iman Nugroho Soeko

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 25 Februari 2014 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Juni 2014. Saat ini tidak menjabat sebagi Direksi pada perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Departement* (2006), *Group Head* IBCMS *Group* Bank Mandiri (2009–2010) dan *Chief Executive* Bank Mandiri (Europe) Ltd. (2010–2013).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya Risk Governance Master Class Training & Certification di Jakarta tahun 2016, *Real Estate Management Program*; *Finance, Design and Leadership*, di Harvard Business School, HBS Campus, Boston, USA, tahun 2014; *Manager's Certification on the 4th Disciplines of Execution* Jakarta, tahun 2010; *Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance and Directorship*, di Bali tahun 2009.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Drexel University, Pennsylvania, USA pada tahun 1992

Adi Setianto

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 8 Juni 2015. Saat ini tidak menjabat sebagi Direksi pada perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Beliau memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1993, Beliau pernah menjabat berbagai jabatan strategis diantaranya Direktur Jaringan dan Layanan (2014-2015) serta Direktur *Treasury and Financial Institution* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010–2014).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program

pelatihan diantaranya Internasional Risk Management Refreshment Program for Executives – Europe Class 2016 di Milan tahun 2016, *Liquidity Risk Management in Banks* oleh *Fitch Learning* di London pada tahun 2014; *Marketing Financial Solution* oleh Divisi LPN and *Thierry Fuller* (*Blue Mountain Incorporated*) pada tahun 2009; dan M*alcolm Baldridge Criteria for Executive Workshop* pada tahun 2007.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Berdomisili di Bekasi. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003.

Sulis Usdoko

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 1 Juni 2015 – saat ini.

Pengalaman Kerja:

Beliau memiliki pengalaman berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1986. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Retail Funding and Services Division Head* (2013–2015). Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya 2016 Learning & Leadership Development Conference di Massachusetts tahun 2016, program *Asia Regional Group Meeting* oleh *The World Savings Banks Institute* di Hanoi, Vietnam pada tahun 2014; *Fewer, Bigger, Bolder, from Mindless Expansion to Focused Growth* oleh MarkPlus, Inc. pada tahun 2014; *Effective Leadership Through Social Intelligence* oleh Stefan Ciesielski - Jakarta Post pada tahun 2013; dan *The Annual McAfee Executive Summit* oleh McAfee di Melbourne, Australia pada tahun 2010.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun. Berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 1996

Oni Febriarto Rahardjo

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 24 Maret 2015 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Mei 2015. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Beliau mulai berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Small and Medium Lending Division Head* (2013–2015). Saat ini tidak menjabat sebagi Direksi pada perusahaan lain.

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya ASEAN Global Leadership Program di Berkeley tahun 2016, *Certified Risk Management* Level 5 pada tahun 2015; Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 60 oleh LPPI pada tahun 2014; Program Kunjungan Kerja *Housing Development Finance Corporation* di India pada tahun 2010; dan *Smart Merger and Acquisition* oleh Indonesian risk Professional Association (IRPA) pada tahun 2008.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2001

Handayani

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 12 April 2016 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 September 2016. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Director of Commercial of* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2014 - 2016), *Director Marketing & Alternate Distribution*, PT AXA Mandiri *Financial Services* (2013 - 2014), Senior VP *Group Head*, *Consumer Cards Group*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004 - 2013).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5 di Jakarta Tahun 2016, *Sky Team Supervisory Board* pada tahun 2015, IMA Members Board tahun 2015, *Certified Financial Planning Program* (CFP) di Jakarta tahun 2013, *Leadership Senior Training*, di Singapura tahun 2013.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Berdomisili di Tangerang
Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 2002

Catur Budi Harto

Direktur

Dasar Pengangkatan Pertama:

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN tanggal 12 April 2016 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 Agustus 2016. Saat ini tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan lain.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya menjabat sebagai *Senior Executive Vice President* Jaringan dan Layanan Bank BRI (2015 - 2016), Kepala Divisi *Mass Banking* (2014), Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Banjarmasin, Bank BRI (2013).

Training yang diikuti antara lain:

Beliau telah mengikuti sejumlah program pelatihan diantaranya *Payment & Distribution* di London pada tahun 2016, *Payment System & Technology* di Mauritius pada tahun 2012,Training *Trade Finance* di Bandung pada tahun 2008, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat III di Jakarta pada tahun 2007.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2017

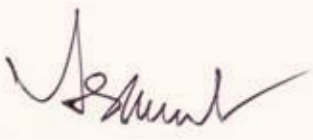

I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Utama /Independen

Lucky Fathul Aziz H
Komisaris

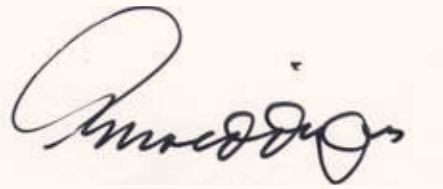

Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen

Arie Coerniadi
Komisaris Independen

Sumiyati
Komisaris

Maurin Sitorus
Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Kami juga menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Perusahaan sudah cukup memadai.

Jakarta, Februari 2017

Maryono
Direktur Utama

Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur

Iman Nugroho Soeko
Direktur

Adi Setianto
Direktur

Sulis Usdoko
Direktur

Oni Febriarto Rahardjo
Direktur

Handayani
Direktur

Catur Budi Harto
Direktur

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

PROFIL PERUSAHAAN

Perseroan melanjutkan agenda transformasi dalam rangka mengokohkan landasan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan tetap fokus pada penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan approval kredit dan optimalisasi *human capital* serta melakukan pengembangan bisnis melalui penambahan ragam produk layanan maupun pengembangan layanan berbasis *digital banking*.

Bank BTN

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Nama Panggilan Perusahaan	Bank BTN
Bidang Usaha	Bank Umum
Status Perusahaan	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kepemilikan Saham	1) Pemerintah Republik Indonesia 60.00% 2) Publik Asing 25.97% 3) Publik Lokal 14.03%
Tanggal Pendirian	9 Februari 1950
Dasar Hukum Pendirian	Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950
Modal Dasar	Rp10.239.216.000.000,- terbagi atas : a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500 (Lima ratus rupiah); dan b. 20.478.431.999 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp5.295.000.000.000,- terbagi atas: a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500 (lima ratus rupiah); dan b. 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).
Bursa Saham	Di catatkan di Bursa Efek Indonesia
Tanggal Pencatatan Saham	17 Desember 2009
Kode Saham	BBTN
Jumlah Pegawai	9.380 orang
Kantor Pusat	Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Indonesia
Telepon	62-21 6336789, 6332666,
Fax	62-21 6346704
Email	csd@btn.co.id

JEJAK LANGKAH PERSEROAN

1897
Perseroan berdiri dengan nama "*Postspaarbank*" pada masa Pemerintahan Belanda

9 Februari 1950
Perubahan nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI

1989
Memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama

1994
Memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa

22 Juni 1963
Berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara

1974
Ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah

1976
Realisasi KPR BTN pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang

2012
Perseroan melakukan *Right Issue*

2013
Perseroan melakukan transformasi menuju *leading housing* bank dan *world class banking*

2015
Perseroan turut serta mensukseskan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

2002

Ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah komersial

2009

Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) pertama di Indonesia

2009

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia

2016

"Perseroan melanjutkan agenda transformasi dalam rangka mengokohkan landasan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan tetap fokus pada penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan *approval* kredit dan optimalisasi *human capital* serta melakukan pengembangan bisnis melalui penambahan ragam produk layanan maupun pengembangan layanan berbasis *digital banking*."

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PERSEROAN FOKUS PADA PEMBIAYAAN SEKTOR PERUMAHAN MELALUI TIGA PRODUK UTAMA, YAKNI PERBANKAN KONSUMER, PERBANKAN KOMERSIAL DAN PERBANKAN SYARIAH.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki sejarah yang sangat panjang di industri perbankan di Indonesia. Perseroan telah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Di era kemerdekaan, tepatnya 9 Februari 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Postspaarbank menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada 22 Juni 1963.

Pada tahun 1974, Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Tahun 1976 Perseroan melakukan realisasi KPR pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Di tahun 1994 Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa. Tahun 2002 Perseroan ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah.

Tahun 2009 merupakan awal Perseroan beroperasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya. Perseroan mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman.

Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama lebih dari enam dekade, dalam menyediakan beragam produk dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui KPR, baik KPR Subsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan juga sukses meningkatkan posisinya menjadi peringkat ke-10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset serta penyaluran kredit. Dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada para pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan, Perseroan bercita-cita menjadi *The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service*. Saat ini, Perseroan fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni perbankan konsumer, perbankan komersial dan perbankan syariah. Pada tahun 2015 Perseroan berperan penting dalam membantu program Pemerintah:

Sejuta Rumah Untuk Rakyat, Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui pembiayaan KPR.

Sebagai upaya mendorong percepatan Program Sejuta Rumah, di tahun 2016 Perseroan terus menggenjot *supply* dan *demand* untuk KPR, diantaranya dengan mempermudah pembiayaan bagi pengembang untuk kredit konstruksi maupun pencairan KPR, memberikan kemudahan pembiayaan kepada para pengembang untuk akselerasi KPR subsidi, KPR non subsidi maupun KPR mikro.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama Perseroan memasuki transfomasi Tahap II, yaitu periode *digital banking*. Perseroan telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital seperti *mobile* BTN, *internet banking* dan *cash management* dengan melaunching pembukaan kantor layanan masa depan "Bank BTN *Digital Lounge*" yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis Perseroan. *Digital lounge* merupakan konsep layanan berbasis teknologi yang mengintegrasikan dan mengedepankan teknologi guna menciptakan *customer experience* yang cepat, *simple* serta memberikan kemudahan sekaligus menjadi solusi bagi nasabah.

VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

VISI

Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan

Penetapan Visi dilakukan secara periodik berdasarkan mekanisme penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank sesuai Surat Edaran Direksi No. 39/DIR/CMO/2012 tentang BTN *Strategic and Performance System* (BTN STORMS). Penetapan Visi terbaru dilakukan pada *workshop Leadership Forum* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 4-5 Desember 2015.

Perseroan menetapkan transformasi perusahaan menuju ***"The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service"*** pada tahun 2019.

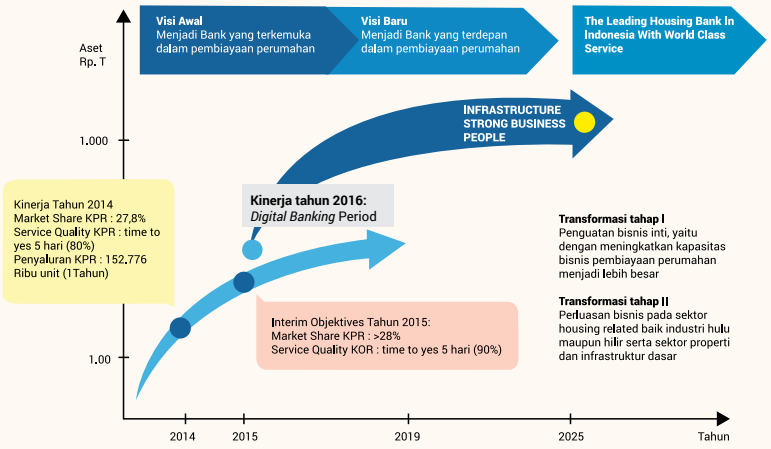

MISI

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. Menyiapkan dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.
5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan dibangun dari nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan pekerjaan serta menjadi pegangan bagi setiap insan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai temuan bersama. Nilai-nilai budaya perusahaan mengarahkan perilaku anggota organisasi dan menjadi landasan dalam penetapan aturan, kebijakan dan system organisasi ("*the way we do things around here*").

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, pada 3 Maret 2016, Perseroan telah melakukan *launching* budaya perusahaan yang disingkat "SIIPS" dan telah mengimplementasikan budaya perusahaan tersebut. Penetapan Nilai Budaya Perusahaan dilakukan secara periodik berdasarkan mekanisme penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank sesuai Surat Edaran Direksi No. 39/DIR/CMO/2012 tentang *BTN Strategic and Performance System* (BTN STORMS).

Budaya Perusahaan Perseroan memiliki Nilai Budaya Perusahaan yang menjadi pondasi bagi seluruh (insan perseroan) dalam berperilaku untuk mencapai visi Perseroan.

Adapun 5 Nilai Budaya Perusahaan Perseroan yaitu:

Sinergi

Membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh *stakeholders* dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

Integritas

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

Inovasi

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.

Profesionalisme

Visioner, kompeten dibidangnya, selalu mengembangkan diri dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik

Spirit Mencapai Keunggulan

Mencapai semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil terbaik serta memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan pentingnya aspek kualitas di setiap kegiatan serta risiko yang telah diperhitungkan.

Setiap Nilai Budaya Perusahaan memiliki 2 (dua) Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Bitniz. Sepuluh perilaku utama tersebut adalah :

1. Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
2. Saling percaya dan menghargai

3. Konsisten dan disiplin
4. Jujur dan berdedikasi

5. Tanggap terhadap perubahan
6. Kreatif & inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah

7. Kompeten, intraprenership dan bertanggung jawab
8. Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil

9. Antusias, Proaktif dan pantang menyerah
10. Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan

INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan yang menunjang transformasi disiapkan dengan tujuan agar nilai budaya perusahaan Perseroan menjadi hidup dalam organisasi dan dijalankan oleh seluruh jajaran pegawai Perseroan. Seluruh jajaran memberikan komitmen waktu dan sumber daya yang dikelola secara efektif dan bertahap. Transformasi budaya perusahaan Perseroan dimulai dari tahap *awarenes, engagement, acceptance* dan *ownership*.

Adapun program kerja yang dilaksanakan, ditujukan untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi *intrapreneurship* (pelayanan dan penjualan), kinerja, inovasi dan efisiensi sehingga terdapat perbaikan kinerja bisnis dan perbaikan proses bisnis. Pelaksanaan program kerja tersebut meliputi:

a. Sosialisasi dan komunikasi nilai budaya perusahaan.
b. Internalisasi nilai budaya perusahaan.
c. Peningkatan efektivitas peran jajaran pimpinan sebagai penggerak transformasi.
d. Penunjukan tim penggerak budaya (*change agent*).
e. Menyelaraskan sistem organisasi dan SDM.
f. Melaksanakan pengukuran efektivitas program.

STRATEGI MENCAPAI VISI DAN MISI PERSEROAN

Sebagai bank yang fokus pada bisnis pembiayaan perumahan, Perseroan telah menetapkan landasan kerja tahun 2016 yang digunakan sebagai usaha mencapai visi dan misi Perseroan dengan menetapkan arah Kebijakan Umum perusahaan sebagai berikut :

"TRANSFORMASI BANK BTN UNTUK MEWUJUDKAN VISI MENJADI BANK YANG TERDEPAN DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DENGAN FOKUS: PERBAIKAN KUALITAS KREDIT, OPTIMALISASI PROGRAM SEJUTA RUMAH, PENGEMBANGAN PELAYANAN DIGITAL BANKING SERTA PENINGKATAN KUALITAS SDM "

Untuk menunjang arah kebijakan umum tersebut telah disusun *Grand Strategy* level korporat sebagai berikut:

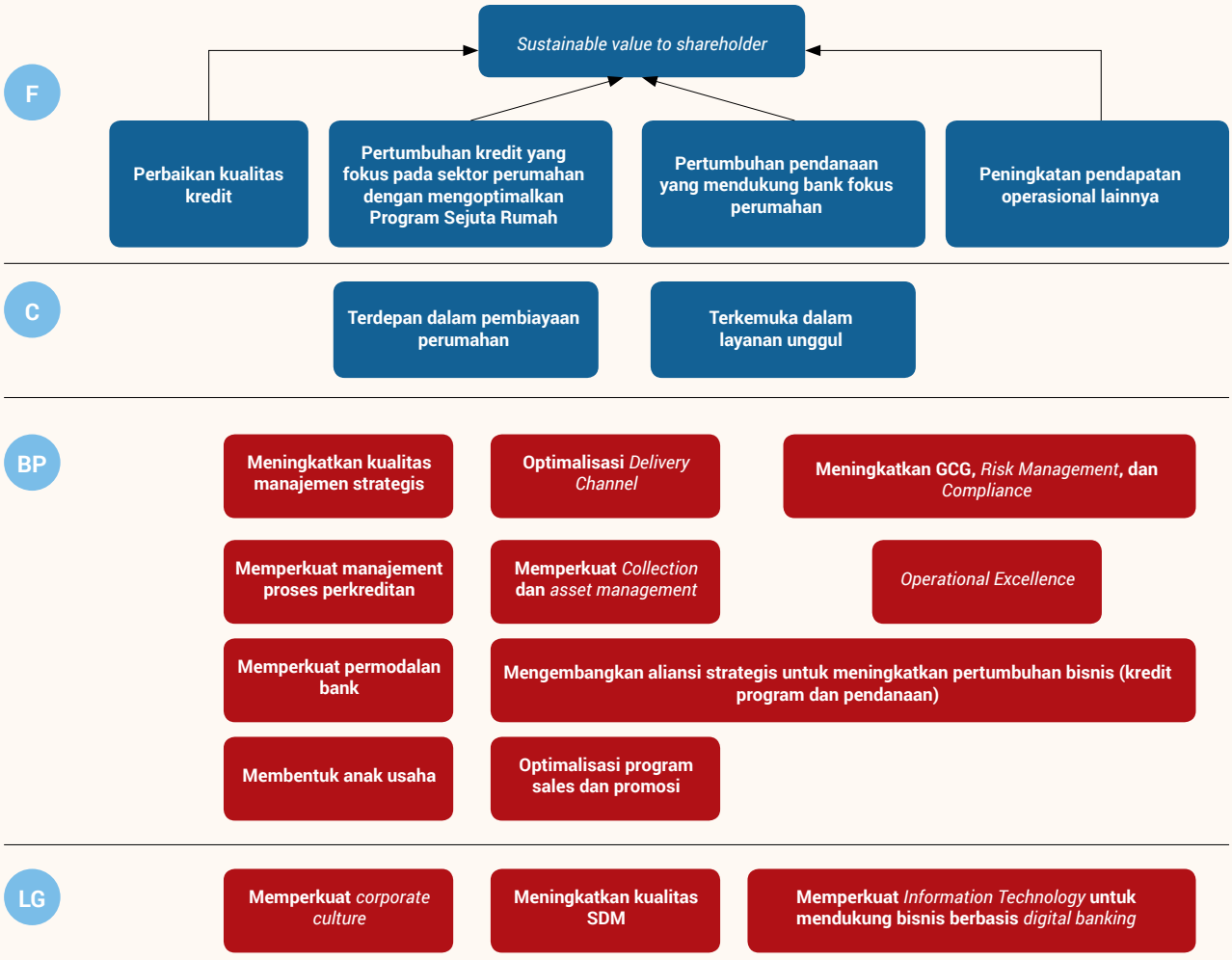

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, Perseroan telah mengimplementasikan budaya perusahaan yang menjadi yang disingkat "SIIPS".

BRAND PERUSAHAAN

Bank BTN

Sahabat Keluarga Indonesia

- Atap rumah menggambarkan visi dan misi utama Perseroan sebagai lembaga pemberi Kredit Pemilikan Rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- Dua pola segi enam besar dan kecil, melambangkan makna "yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil".
- Simbol atap rumah dengan kesan tiga dimensi yang berbentuk ruang, melambangkan keleluasaan Perseroan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.
- Tiga Dimensi yang terbentuk dari 4 Pilar Kokoh berarti menunjukkan keamanan dan keluwesan Perseroan.

Simbol garis merah di bawah kata BTN diartikan sebagai kepercayaan diri.

Warna biru melambangkan kematangan Perseroan yang berpengalaman dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional

Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Warna merah melambangkan kepercayaan diri sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.

BIDANG USAHA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. no. 51 tanggal 24 Maret 2015, kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Obligasi.
6. Surat Dagang Berjangka Waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi aset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan;
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai syarat bahwa Perseroan di kemudian hari harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
p. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
q. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
r. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;
s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PRODUK DAN JASA

A. PERBANKAN KONSUMER

1. PRODUK KREDIT KONSUMER

1.1. Kredit Perumahan

1.1.1.KPR Subsidi

Kredit program kerjasama dengan Pemerintah untuk memudahkan pemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

a) **KPR BTN Sejahtera FLPP Tapak**
Fasilitas kredit pemilikan rumah dengan sumber dana berasal dari sharing dana porsi pemerintah dan porsi bank untuk pembelian rumah tapak dari pengembang dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit dan tambahan Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp 4 juta.

b) **KPR BTN Sejahtera FLPP Susun**
Fasilitas kredit untuk pemilikan rumah dengan sumber dana berasal dari sharing porsi pemerintah dan porsi bank untuk pembelian rumah susun dari pengembang dengan suku bunga tetap sepanjang waktu kredit.

c) **KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) Tapak**
Fasilitas kredit untuk pemilikan rumah dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR SSB Tapak untuk pembelian rumah dari pengembang dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit dan tambahan Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp4 juta.

d) **KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) Susun**
Fasilitas kredit pemilikan rumah dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR SSB Susun untuk pembelian rumah susun dari pengembang dengan suku bunga tetap sepanjang jangka waktu kredit.

1.1.2. KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan Kredit Ruko.

a) **KPR BTN Platinum**
Fasilitas kredit untuk membeli rumah baru atau lama, dalam proses pembangunan (*indent*) maupun memindahkan pembiayaan dari bank lain (*take over*), dengan pelayanan cepat dan mudah.

b) **KPA BTN**
Fasilitas kredit untuk membeli apartemen/ kondominium baru atau lama, dalam proses pembangunan (*indent*) maupun memindahkan pembiayaan dari bank lain (*take over*), dengan pelayanan cepat dan mudah.

c) **Kredit Ruko BTN**
Fasilitas kredit untuk membeli unit rumah toko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

1.1.3. Kredit Perumahan Lainnya

a) **Kredit Agunan Rumah BTN**
Fasilitas kredit multiguna yang dapat digunakan untuk renovasi rumah, pembelian isi rumah, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya, dengan cara agunan rumah/apartemen/ruko.

b) **Kredit Bangun Rumah BTN**
Fasilitas kredit untuk membangun rumah idaman di atas lahan milik sendiri

c) **Bantuan Perumahan PNS**

Fasilitas kemudahan kepada PNS yang mengajukan KPR BTN Subsidi dengan pilihan:

- Bantuan Tabungan perumahan yaitu bantuan dana yang tidak dikembalikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui KPR BTN Subsidi, termasuk untuk digunakan memenuhi biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan kepemilikan rumah; atau
- Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) yang merupakan fasilitas pinjaman uang muka untuk pembelian rumah sejahtera melalui KPR BTN Subsidi, dengan suku bunga sebesar 6 – 7 % dan jangka s.d 15 tahun atau tidak melebihi maksimal jangka waktu KPR BTN Subsidi yang diajukan.

1.2. Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai.

a) **Kredit Ringan BTN (Kring BTN)**

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/ instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.

b) **Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiun)**

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Bank BTN.

c) **Kredit Swadana BTN**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang.

d) **Kredit Pegawai**

Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. PRODUK SIMPANAN KONSUMER

2.1 Tabungan Konsumer

2.1.1. Tabungan Batara

Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah. Tabungan BTN Batara diklasifikasikan lagi berdasarkan segmen yang dituju, antara lain:

a) **Tabungan BTN Batara Payroll**

Tabungan yang tersegmentasi untuk nasabah yang penyaluran gaji atau *salary crediting-nya* melalui Bank BTN.

b) **Tabungan BTN Batara Pensiun**

Tabungan yang diperuntukkan bagi para pensiunan sebagai sarana penerimaan pensiun setiap bulan yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

c) **Tabungan BTN Batara Pendidik**
Tabungan yang tersegmentasi untuk nasabah yang berprofesi sebagai tenaga pendidik kerjasama.

2.1.2. Tabungan Batara Prima

Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik.

2.1.3. Tabungan BTN Junior

Tabungan untuk Edukasi Menabung bagi anak-anak dengan usia sampai dengan 12 tahun.

2.1.4. Tabungan BTN Juara

Tabungan untuk edukasi keuangan dan transaksi sesuai kebutuhan generasi muda.

2.1.5. Tabungan BTN Haji Reguler

Tabungan yang diperuntukan kepada calon jemaah haji Regular yang akan mempersiapkan ibadan haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.

2.1.6. Tabungan BTN Haji Plus

Tabungan yang diperuntukan kepada calon jemaah haji Plus yang akan mempersiapkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.

2.1.7. Tabunganku

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.8. Tabungan BTN Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2.1.9. Tabungan E'Batara Pos

Tabungan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat karena dapat melakukan transaksi di Kantor Pos online seluruh Indonesia.

2.1.10. Tabungan Cermat Laku Pandai

Tabungan yang memberikan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui EDC dan rekening ponsel sampai ke pelosok negeri tanpa harus datang ke kantor Bank.

2.1.11. Tabungan BTN Perumahan

Tabungan yang diperuntukkan dalam rangka membantu lebih banyak masyarakat di Indonesia menabung dengan tujuan membeli rumah, khususnya rumah pertama.

2.1.12. Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

2.2. Deposito

Deposito BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito BTN adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan,2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana)

2.1.2. Deposito BTN

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga yang menarik yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

2.1.2. Deposito BTN Valas

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga yang menarik dalam bentuk mata uang asing.

B. PERBANKAN KOMERSIAL

1. PRODUK KREDIT KOMERSIAL

1.1. Kredit Perumahan

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk Pengembang/ Developer. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dll) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dll) berikut sarana dan prasarananya sepanjang berdasarkan penilaian Bank layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Perseroan memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi. Dalam memutuskan pembiayaan kredit konstruksi, Perseroan mempertimbangkan periode tenor kredit berdasarkan perkiraan waktu pembangunan dan pendapatan yang dihasilkan setelah proyek tersebut selesai dilakukan. Sebagai jaminan, Kredit Konstruksi BTN mengagunkan tanah dan *property* yang dibangun.

1.2. Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, *Linkage* Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. *Linkage* Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja BTN, Kredit Modal Kerja Kontraktor, dan Kredit Sindikasi.

1.2.1. Kredit UMKM

Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Kredit UMKM merupakan kredit yang diperuntukan untuk usaha mikro , kecil, dan menengah. Dalam penyaluran kredit UMKM, Perseroan mengkategorikan nasabah usaha mikro sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dengan penjualan maksimal Rp300 juta per tahun. Untuk segmen ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp100 juta.

Adapun nasabah Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp500 juta atau penjualan maksimal Rp2,5 miliar per tahun. Bagi usaha kecil ini, Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp500 juta.

Sementara, Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp10 miliar atau penjualan maksimal Rp50 miliar per tahun. Perseroan menyalurkan kredit maksimal Rp5 miliar.

1.2.2. Kredit *Linkage* BTN

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruspinjamkan kepada sektor Usaha Kecil dan Mikro (produktif) serta sektor konsumtif. Salah satu mitra Perseroan dalam Kredit Linkage BTN yang terbesar adalah Permodalan Nasional Madani (PNM).

1.2.3. Kredit Korporasi

a) **Kredit Modal Kerja (KMK)**

Kredit yang diperuntukan bagi nasabah untuk Pembiayaan usaha industry perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual dengan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 80% dari kebutuhan modal kerja. Sedangkan untuk jangka waktu kredit dapat mencapai 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang.

b) **Kredit Investasi**

Fasilitas pembiayaan proyek jangka panjang dalam jumlah hingga 70% dari total biaya proyek. Jatuh tempo pinjaman ini didasarkan pada proyeksi tanggal penyelesaian proyek dan proyeksi arus kas, dengan ketentuan seluruh jangka waktu kredit tidak melebihi 15 tahun. Kredit ini biasanya dijamin dengan proyek yang dibiayai dan pencairan kredit ditentukan dari prestasi pembangunan proyek. Apabila dalam investasi diperlukan/ dibutuhkan kredit modal kerja maka kredit modal kerja yang dapat diberikan adalah maksimum 75% dari kebutuhan modal kerja.

c) **Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)**

Fasilitas kredit modal kerja untuk membantu kontraktor menyelesaikan pekerjaan mereka berdasarkan kontrak tertentu dalam jumlah hingga 60% dari nilai kontrak. Jatuh tempo kredit ini biasanya tidak dapat melebihi jangka waktu dalam kontrak dan kredit ini umumnya dijamin dengan nilai kontrak dan agunan aset tetap lainnya. Kredit ini umumnya dikenakan bunga mengambang pada tingkat lebih tinggi dari KPR non subsidi.

d) **Kredit Sindikasi**

Pinjaman atau kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu.

2. PRODUK SIMPANAN

2.1. Giro BTN

Giro BTN merupakan simpanan yang diselenggarakan oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, dan Surat Perintah Pembayaran, pemindahbukuan dan media penarikan lainnya.

A. Jenis Giro BTN berdasarkan kepemilikan

2.1.1. Giro Perorangan

Giro perorangan merupakan rekening atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha.

2.1.2. Giro Lembaga/Badan

Giro lembaga/ badan merupakan rekening atas nama instansi pemerintah/ lembaga Negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha/ atau badan hukum (termasuk didalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat, dan semua badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2.1.3. Giro Gabungan (*Joint Account*)

Giro gabungan (*joint account*) merupakan rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan/ lembaga, perorangan, dan/ atau gabungan dari keduanya.

B. Jenis Giro BTN berdasarkan Jenis Valuta

2.1.4. Giro BTN Rupiah

Giro BTN Rupiah merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, dan Surat Perintah Pembayaran.

2.1.5. Giro BTN Valas

Giro BTN Valas merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan Surat Perintah Pembayaran.

2.2. Deposito Berjangka Lembaga

Merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank. Manfaat Deposito Berjangka Lembaga adalah bunga menarik ; pembayaran bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, dipindahbukukan; jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

2.2.1. Deposito BTN Rupiah

Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

2.2.2. Deposito BTN Valas

Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

2.2.3. Deposito *On Call* Lembaga

Deposito *On Call* BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

C. UNIT USAHA SYARIAH

1. PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi pembiayaan Konsumer dan pembiayaan Komersial. Uraian terkait produk pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

1.1. Pembiayaan Konsumer

1.1.1. KPR BTN Sejahtera iB

Produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan akad “Murabahah” (jual beli) dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Susun, atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

1.1.2. KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” (Jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.

1.1.3. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” (Jual Beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

1.1.4. KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna' (Jual Beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

1.1.5. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

1.1.6 Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

1.1.7. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad "Kafalah bil Ujroh" yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

1.1.8. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad "Murabahah" yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya

1.1.9. Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah BTN iB

Produk simpanan dana dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang berfungsi untuk perencanaan dan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah

1.2. Pembiayaan Komersial

1.2.1. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad "Musyarakah" (Kerjasama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

1.2.2. Pembiayaan KUR BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip Musyarakah (kerjasama) atau Murabahah (jual beli) yang diberikan kepada usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan dan Lembaga Linkage untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan rencana pengembalian sesuai *cash flow* nasabah.

1.2.3. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad "Mudharabah" (Bagi Hasil), atau "Musyarakah" (Kerjasama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

1.2.4. Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip "Murabahah" (Jual beli) atau "Musyarakah" (Kerjasama) yang diberikan kepada

nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

1.2.5. Pembiayaan Sindikasi BTN iB

Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu Nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad "Mudharabah" (Bagi Hasil), "Musyarakah" (Kerjasama), "Murabahah" (Bagi Hasil), atau "Ijarah" (Sewa).

2. PRODUK SIMPANAN SYARIAH

2.1. Giro Syariah

2.1.1. Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip "Wadiah" (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

2.1.2. Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan prinsip "Mudharabah Mutlaqah" (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

2.2. Tabungan Syariah

2.2.1. Tabungan BTN Batara iB

Produk simpanan dana berakad "Wadi'ah" (Titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.

2.2.2. Tabungan BTN Prima iB

Produk simpanan dana berakad "Mudharabah Mutlaqah" (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.

2.2.3. Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB

Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad Mudharabah (Bagi Hasil) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

2.2.4. TabunganKu iB

Produk simpanan dengan akad Wadi'ah (Titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5. Tabungan BTN Qurban iB

Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah qurban dengan akad "Mudharabah Mutlaqah" (Bagi Hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

2.2.6. Tabungan BTN Simpel iB

Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.

2.3. Deposito Syariah

2.3.1. Deposito BTN iB

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip "Mudharabah Mutlaqah" (Bagi Hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.

2.3.2. Deposito On Call iB

Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip "Mudharabah Mutlaqah"(Bagi Hasil).

D. JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Jasa dan Layanan Perbankan yang dimiliki Perseroan diantaranya berupa kartu konsumer, *wealth management, electronic channel,* dan jasa berbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumer berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksa Dana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan KiosK , CDM, *Internet Banking*,*Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa trading, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Adapun jasa dan layanan yang diberikan Perseroan berdasarkan kegiatan usaha Perbankan Konsumer sebagai berikut.

1. KARTU KONSUMER

1.1. Kartu Debit / Kartu ATM

Kartu ATM BTN juga berfungsi sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online*. Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN Visa e'Batarapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN.

1.2. Kartu Kredit BTN

Kartu Kredit BTN membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat.

1.3. Kartu Suka-suka BTN

Kartu Debit Syariah Visa pertama dan satu – satunya dengan desain kartu yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas, serta dapat digunakan di seluruh jaringan VISA diseluruh dunia.

1.4. Debit BTN *Online* VBV (Verified by Visa)

Dengan Debit BTN Online VBV (Verified by Visa), nasabah dan dengan mudah bertransaksi *online* dengan kartu debit BTN Syariah (*e-Commerce*)

2. *WEALTH MANAGEMENT*

Keberadaan bisnis *wealth management* Perseroan yang semakin lengkap mulai memberikan peningkatan pada perolehan *fee based income* khususnya *fee based income* yang didapat melalui penjualan *non banking product*. Dengan pembukaan layanan BTN Prioritas, Perseroan kemudian mengembangkan layanan dan produk yang dapat melengkapi keberadaan bisnis *wealth management*. Hal ini ditandai dengan peluncuran penjualan produk *Bancassurance* dan Reksa Dana yang bekerja sama dengan mitra asuransi dan *Manager* Investasi profesional di bidangnya.

Perseroan bekerja sama dengan PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk penjualan produk *Bancassurance*. Adapun untuk produk Reksa Dana, Perseroan bekerja sama dengan PT Trimegah Aset Manajemen, PT Bahana TCW Investment *Management,* PT Manulife Asset *Management* Indonesia dan PT Schroder Investment *Management* Indonesia. Perseroan menjadi agen penjual produk Surat Utang Negara secara lengkap, dimulai dari produk Sukuk Negara Ritel Seri SR 006, Saving Bonds Ritel Seri SBR 001, Obligasi Negara Ritel Seri ORI 011, Sukuk Negara Ritel Seri SR 007, dan Obligasi Negara Ritel Seri ORI 012. Sukuk Negara Ritel seri SR008, saving Bonds Ritel seri SBF002, Sukuk Tabungan Seri ST001 dan Obligasi Negara Ritel Seri ORI013.

3. *ELECTRONIC CHANNEL* ATM

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi *premium* seperti *Gallery* ATM di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

4. CDM (*CASH DEPOSIT MACHINE*)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai sehingga memudahkan dalam bertransaksi, cepat dan *realtime*. Dapat menerima denominasi uang Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

5. ATM NON TUNAI (KIOSK)

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak *modern*, *touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

6. SMS BANKING

Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer service* di kantor cabang Bank BTN.

7. *MOBILE BANKING*

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial dimana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi *iMobile* BTN dari *Google Play*, *Blackberry World* dan *Apple Store*. Koneksi menggunakan jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

8. *INTERNET BANKING*

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media *internet*. Alamat *website*: *https://internetbanking.btn.co.id* dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN. Tarif data *internet* mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

9. *VIRTUAL ACCOUNT*

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerjasama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

10. *ELECTRONIC DATA CAPTURE* (EDC)

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online.*

11. *CASH MANAGEMENT*

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Alamat *website* : https://cashmanagement.btn.co.id dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

12. *BRANCHLESS BANKING*

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan diluar wilayah jaringan kantor bank melalui kerjasama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan atau kerjasama dengan agen yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disebut LAKU PANDAI.

13. JASA DAN LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumer lainnya untuk meningkatkan *fee based income*, seperti: Pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran *internet* dan TV berlangganan, Pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa.

Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

13.1. Garansi Bank

Merupakan layanan berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

13.2. BTN *Cash Management*

BTN *Cash Management* merupakan layanan *management* keuangan bagi nasabah giro lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan (pemantauan mutasi dan saldo, pencetakan rekening koran, *transfer*, pembayaran biaya operasional, *payroll* pegawai, multi debit, *cash pooling* dan *cash distribution*) melalui koneksi *internet* agar lebih mudah, efektif dan efisien.

13.3. *Virtual Account* BTN

Layanan bagi nasabah giro lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/ mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

13.4. *Transfer Management*

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah lembaga untuk membantu nasabah melakukan *transfer* dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (*transfer* ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). *Transfer* dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

13.5. *Payment Management*

Payment management merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- *Edu Payment* / SPP *Online* BTN
- *Edu Payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dll)
- Pembayaran Pajak
- Pembayaran pembelian produk Pertamina
- Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan
- Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
- Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
- Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
- Bank Operasional I dan II

13.6. *Payroll Service BTN*

Payroll Service merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.

14. JASA DAN LAYANAN UNIT USAHA SYARIAH

14.1.Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan *transfer*, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

14.2. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama rekening Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

14.3. BTN *Cash Management*

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi *web-browser* yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

14.4. *Payment Point* BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.

14.5. *Payroll* BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.

14.6. Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.

14.7. SPP *Online* BTN iB

Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.

14.8. Program Pengembangan Operasional BTN iB

Program yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* (GCG).

14.9. Garansi Bank BTN iB

Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad “Kafalah” (Garansi).

14.10. *Safe Deposit Box* BTN iB

Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi system pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan, dan lainnya. Akad yang digunakan adalah “Ijarah” (Sewa).

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna. Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambil alihan dan pemisahaan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Negara Republik Indonesia memiliki 6.354.000.000 lembar Saham Biasa dan satu lembar Saham seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus, sehingga kepemilikan sahamnya sebesar 60%.

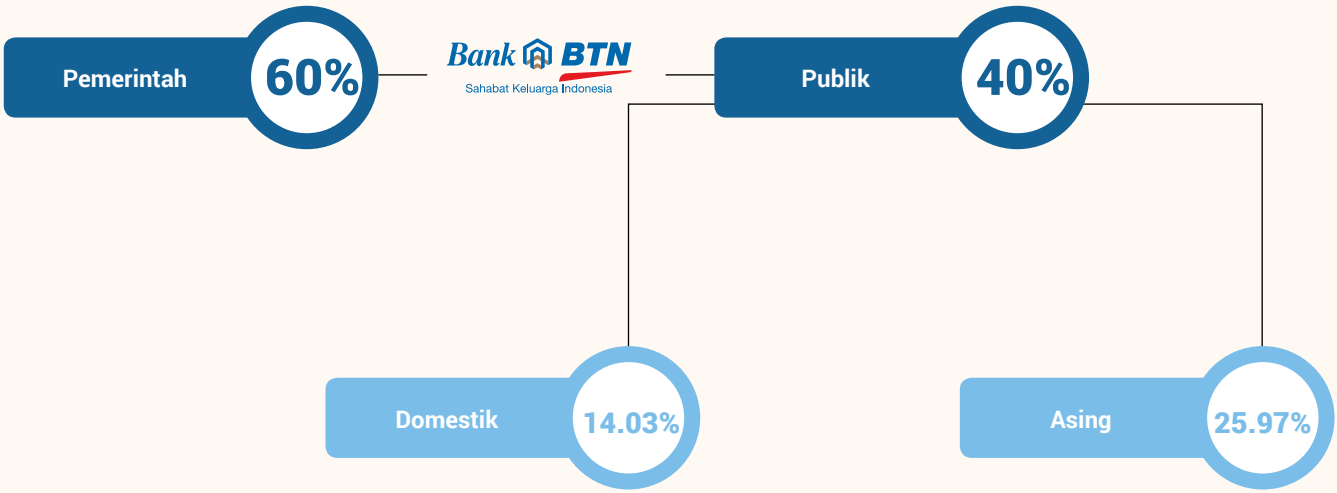

No	Pemegang Saham Publik	31-Dec-16		
		Jumlah	Saham	
			Lembar	%
1	Negara RI	1	6.354.000.000	60,00%
2	Publik			
	Publik Lokal	11.142	1.486.159.283	14,03%
	Publik Asing	437	2.749.840.717	25,97%
	TOTAL	**11.580**	**10.590.000.000**	**100,00%**

Secara rinci, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham Publik	31-Dec-16		
		Jumlah	Saham	
			Lembar	%
1	Negara RI	1	6.354.000.000	60,00%
2	Publik			
	Publik Lokal			
	Perorangan	7.781	284.586.677	2,69%
	Karyawan	2.959	64.804.400	0,61%
	Koperasi	3	2.172.700	0,02%
	Yayasan	18	24.415.133	0,23%
	Dana Pensiun	91	131.146.111	1,24%
	Asuransi	61	404.998.181	3,82%
	Perseroan Terbatas	50	50.964.507	0,48%
	Reksadana	179	523.071.574	4,94%
	Sub Total	11.142	1.486.159.283	14,03%
	Publik Asing			
	Perorangan Asing	33	10.993.640	0,10%
	Badan Usaha Asing	404	2.738.847.077	25,86%
	Sub Total	437	2.749.840.717	25,97%
	TOTAL	**11.580**	**10.590.000.000**	**100,00%**

RINCIAN 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Rincian 20 nama pemegang saham terbesar setelah Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Saham	%	Status
1	NT TST CO S/A THE CARAVEL FUND (INTERNATIONAL) LTD	146.325.000	1,38	Badan Usaha Asing
2	JPMCB NA UCITS CLT RE-HANDELSBANKEN TILLVAXTMARKNAD TEMA	129.500.000	1,22	Badan Usaha Asing
3	PT AIA FINL - UL EQUITY	104.581.100	0,99	Asuransi

No	Nama	Saham	%	Status
4	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND. LP	92.008.000	0,87	Badan Usaha Asing
5	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	91.045.700	0,86	Asuransi
6	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	79.335.127	0,75	Badan Usaha Asing
7	RBC ISB S/A ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	69.451.100	0,66	Badan Usaha Asing
8	BP2S LUXEMBOURG S/A FULLERTON LUX FUNDS/ ASIAN SMALL CAP EQUITIES	68.800.000	0,65	Badan Usaha Asing
9	RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANIES-889064000	64.183.840	0,61	Reksadana
10	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONAL	62.063.835	0,59	Badan Usaha Asing
11	CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA INVESTMENT	62.044.649	0,59	Badan Usaha Asing
12	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	56.223.800	0,53	Asuransi
13	BBH BOSTON S/A BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND. INC	54.826.800	0,52	Badan Usaha Asing
14	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD. SICAV-INDONESIA FD	52.272.500	0,49	Badan Usaha Asing
15	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	50.984.100	0,48	Reksadana
16	UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT-2157234000	46.677.203	0,44	Badan Usaha Asing
17	SG/SGBTLUX/PIO FD GLB	43.320.900	0,41	Badan Usaha Asing
18	SSB EBY5 S/A ACF LORD ABT SEC TR LAIO FD-2144605679	41.822.204	0,39	Badan Usaha Asing
19	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	41.109.797	0,39	Badan Usaha Asing
20	SSB SWUF S/A CALIFORNIA PUBLIC EMP RET SYSTEM-2144614535	39.650.113	0,37	Badan Usaha Asing

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM

Selain Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat pemegang saham yang persentase kepemilikannya lebih dari 5%.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKTUR DAN KOMISARIS

No	Jabatan	Nama	Jumlah Saham (Lembar)	% Kepemilikan Saham
DEWAN KOMISARIS				
1	Komisaris Utama/ Independen	I Wayan Agus Mertayasa	-	0,0000000%
2	Komisaris Independen	Kamaruddin Sjam	-	0,0000000%
3	Komisaris Independen	Arie Coerniadi	-	0,0000000%
4	Komisaris*	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	0,0000000%
5	Komisaris	Sumiyati	-	0,0000000%
6	Komisaris	Maurin Sitorus	-	0,0000000%
7	Komisaris **	Iman Sugema	-	0,0000000%
DIREKSI				
1	Direktur Utama	Maryono	98.500	0,0009301%
2	Direktur***	Mansyur Syamsuri Nasution	375.000	0,0035411%
3	Direktur	Iman Nugroho Soeko	-	0,0000000%
4	Direktur	Adi Setianto	-	0,0000000%
5	Direktur	Sulis Usdoko	-	0,0000000%
6	Direktur	Oni Febriarto Rahardjo	-	0,0000000%
7	Direktur	Handayani	-	0,0000000%
8	Direktur	Catur Budi Harto	-	0,0000000%
	TOTAL		**473.500**	**0,0044712%**

*) Dialihkan menjadi Komisaris Independen dari sebelumnya adalah Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

***) Efektif menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tanggal 27 Juli 2016 sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-136/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (F*it and Proper Test*) atas Peralihan Jabatan Direktur Mortgage & Consumer Lending menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT DENGAN KEPEMILIKAN KURANG DARI 5%

Pemegang Saham	31-Dec-16		
	Jumlah	Saham	
		Lembar	%
Publik Lokal			
Perorangan	7.781	284.586.677	2,69%
Karyawan	2.959	64.804.400	0,61%
Koperasi	3	2.172.700	0,02%
Yayasan	18	24.415.133	0,23%
Dana Pensiun	91	131.146.111	1,24%
Asuransi	61	404.998.181	3,82%
Perseroan Terbatas	50	50.964.507	0,48%
Reksadana	179	523.071.574	4,94%
Sub Total	11.142	1.486.159.283	14,03%
Publik Asing			
Perorangan Asing	33	10.993.640	0,10%
Badan Usaha Asing	404	2.738.847.077	25,86%
Sub Total	437	2.749.840.717	25,97%
TOTAL	**11.579**	**4.236.000.000**	**40,00%**

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

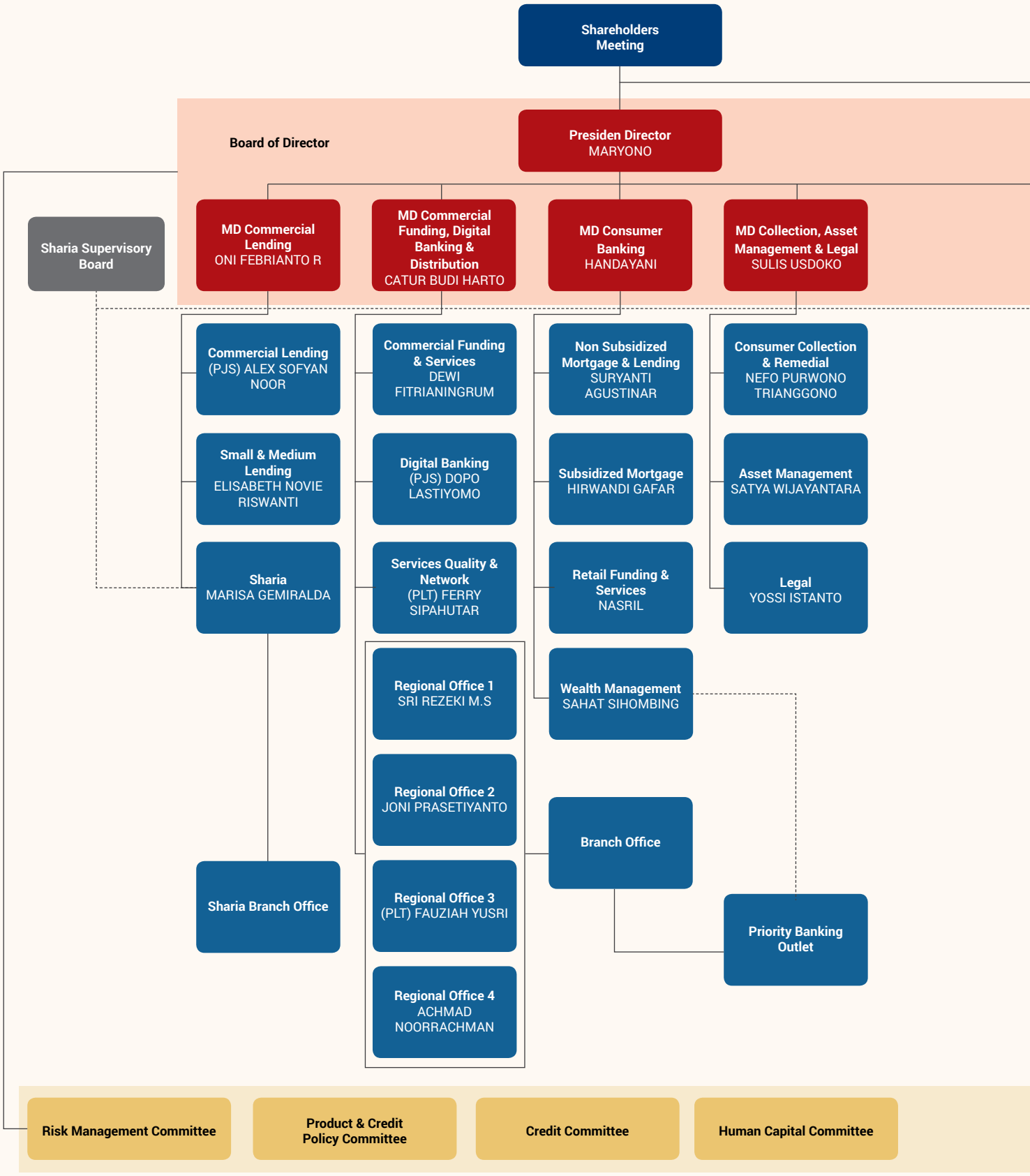

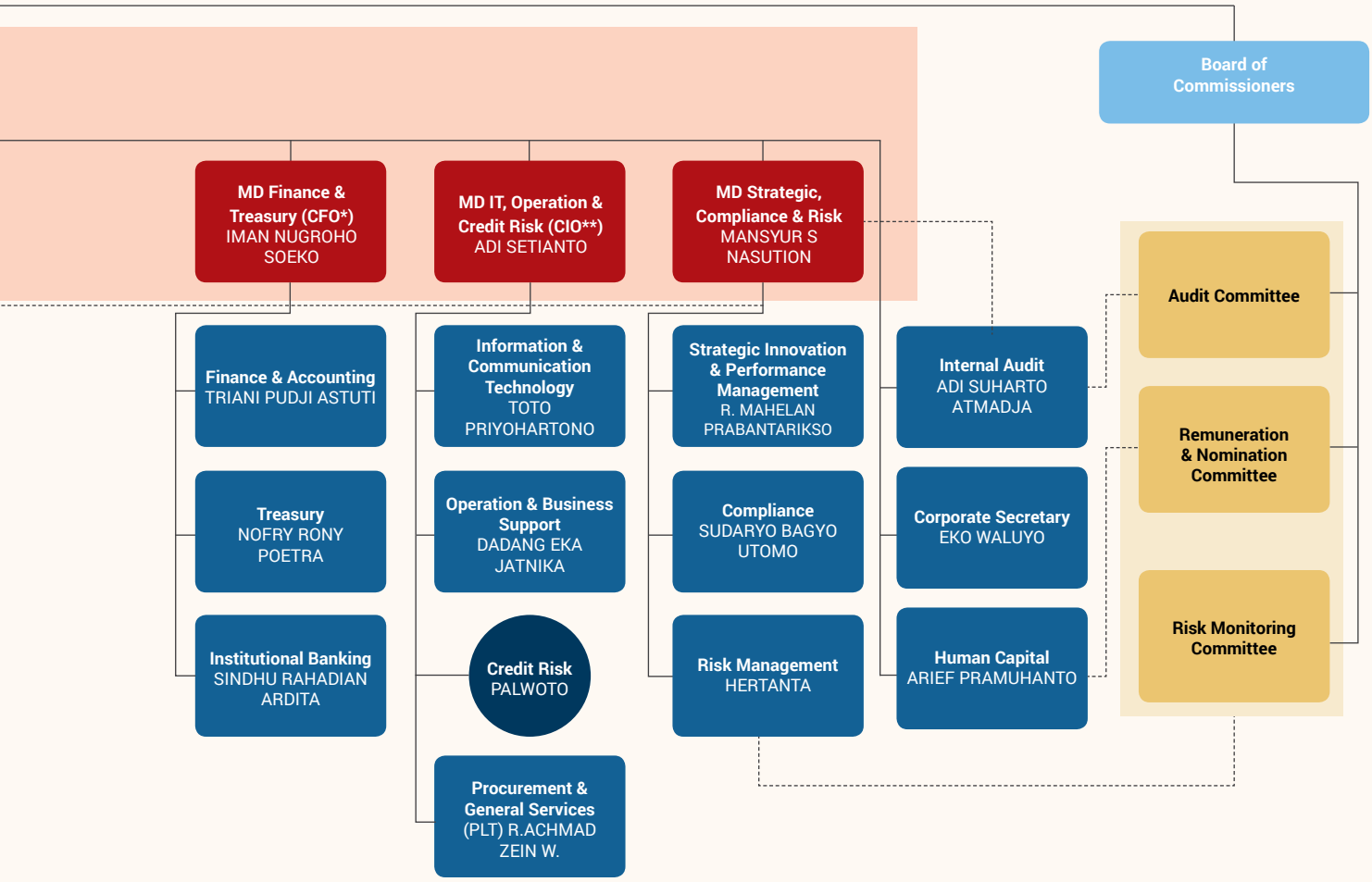
Board of Commissioners
MD Finance & Treasury (CFO*) IMAN NUGROHO SOEKO
MD IT, Operation & Credit Risk (CIO**) ADI SETIANTO
MD Strategic, Compliance & Risk MANSYUR S NASUTION
Finance & Accounting TRIANI PUDJI ASTUTI
Treasury NOFRY RONY POETRA
Institutional Banking SINDHU RAHADIAN ARDITA
Information & Communication Technology TOTO PRIYOHARTONO
Operation & Business Support DADANG EKA JATNIKA
Credit Risk PALWOTO
Procurement & General Services (PLT) R.ACHMAD ZEIN W.
Strategic Innovation & Performance Management R. MAHELAN PRABANTARIKSO
Compliance SUDARYO BAGYO UTOMO
Risk Management HERTANTA
Internal Audit ADI SUHARTO ATMADJA
Corporate Secretary EKO WALUYO
Human Capital ARIEF PRAMUHANTO
Audit Committee
Remuneration & Nomination Committee
Risk Monitoring Committee
IT Steering Committee
Asset Liability Committee

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Eko Waluyo
Sekretaris Perusahaan

Uraian Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan uraian Sekretaris Perusahaan

Adi Suharto Atmamadja
Kepala Audit Internal

Uraian Profil Kepala Audit Internal dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan uraian Kepala Audit Internal

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF DI BAWAH DIREKTUR

Alex Sofyan Noor
50 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Pjs. Kepala Commercial Lending Division. Menjabat sejak 1 September 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 388/ DIR/2016.

Suryanti Agustinar,
51 tahun. S2 Manajemen, Universitas Gajah Mada. Kepala Non Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 150/DIR/2014.

Marisa Gemiralda
56 tahun. S2 bidang Manajemen Pemasaran, Universitas Trisakti. Kepala Sharia Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/ DIR/2015.

Nasril,
51 tahun. Sarjana Ekonomi, STIE KBP, Padang. Kepala Retail Funding and Services Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.257/DIR/2015.

Dopo Lastiyomo,
46 tahun. S1 bidang Sarjana Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Pjs. Kepala Digital Banking Division. Menjabat sejak 1 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 380/ DIR/2016.

Nefo Purwono Trianggono,
53 tahun. Magister Management, Universitas Indonesia. Kepala Consumer Collection and Remedial Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015,berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/ DIR/2015.

Sri Rezeki M. S.,
51 tahun. Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada. Kepala Regional Office I. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.257/ DIR/2015.

Yossi Istanto,
43 tahun. S2 Hukum Bisnis, Unika Parahyangan, Bandung. Kepala Legal Division. Menjabat sejak 1 April 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/ DIR/2014.

Fauziah Yusri,
51 tahun. S1 bidang Teknik Arsitektur, Universitas Hasanudin. Plt. Kepala Regional Office 3. Menjabat sejak 1 September 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 389/ DIR/2016

Nofry Rony Poetro,
48 tahun. Master of Business Administration, The George Washington University, Washington DC, USA. Kepala Treasury Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/ DIR/2015.

Toto Priyohartono,
55 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Kepala Information Commucation and Technologi Division. Menjabat sejak 1 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 381/DIR/2016.

Achmad Noorachman,
53 tahun. S1 bidang Hukum Bisnis, Universitas Diponegoro. Kepala Regional Office 4. Menjabat sejak 1 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138/DIR/2016.

Elisabeth Novie Riswanti,
49 tahun. Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada. Kepala Small and Medium Lending Division. Menjabat sejak 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 559/ DIR/2015.

Hirwandi Gafar,
48 tahun. Sarjana Teknik, Institut Teknologi
Bandung. Kepala Subsidized Mortgage Division. Menjabat sejak 1 Maret 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/ DIR/2014.

Dewi Fitrianingrum,
50 tahun. Magister Management, Universitas Gajah Mada. Kepala Commercial Funding and Services Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 559/ DIR/2015.

Sahat Sihombing,
50 tahun. S3 Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Kepala Wealth Management Division. Menjabat sejak 31 Maret 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138/ DIR/2016.

Ferry Sipahutar,
46 tahun, Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada. Plt. Kepala Service Quality and Network Division. Menjabat sejak 1 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 473/ DIR/2016.

Satya Wijayantara,
48 tahun. S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Kepala Asset Management Division. Menjabat sejak 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.559/DIR/2015.

Joni Prasetyanto,
48 tahun. Magister Hukum Bisnis, Universitas Indonesia. Kepala Regional Office 2. Menjabat sejak 01 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138/ DIR/2016

Triani Pudji Astuti,
54 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada. Kepala Finance and Accounting Division. Menjabat sejak 1 Juli 2011, berdasarkan SuratKeputusan Direksi No. 242/DIR/2011.

Sindhu Rahardian Ardita,
43 tahun. Magister Management, Universitas Gajah Mada. Kepala Institutional Banking Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Hertanta,
51 tahun. Master of Business Administration, University of Arkansas. Kepala Risk Management Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015.

Dadang Eka Jatnika,
47 tahun. Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro. Kepala Operation & Business Support Division. Menjabat sejak 1 November 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 472/DIR/2016.

R. Achmad Zein W.,
50 tahun. Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Nusantara. Plt. Kepala Procurement and General Services Division. Menjabat sejak 1 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138/DIR/2016.

Palwoto,
46 tahun. Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kepala Credit Risk Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 258/DIR/2015.

Sudaryo Bagyo Utomo,
53. Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Kepala Compliance Division. Menjabat sejak 1 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 264/DIR/2013.

R. Mahelan Prabantarikso,
47 tahun. S3 Manajemen SDM, Institut Pertanian Bogor. Kepala Strategic Innovation and Performance Management Division. Menjabat sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 257/DIR/2015

Arief Pramuhanto,
54 tahun. Master of Business Administation, Monash University, Melbourne. Kepala Human Capital Division. Menjabat sejak 1 Maret 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/DIR/2015.

PROFIL PEGAWAI

Pada tahun 2016, Perseroan mempekerjakan 16.108 pegawai, terdiri dari Pegawai Tetap sebanyak 8.561 orang, Pegawai Kontrak 819 orang dan Pegawai Outsource sebanyak 6.728 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 3.6% dari total pegawai sebanyak 15.546 pada tahun 2015. Peningkatan peningkatan pegawai ini sebagai konsekuensi dari upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, selain memperluas jaringan kantor.

Berikut Perkembangan jumlah pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Pegawai			Jumlah Total	
	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Pegawai Outsource	Tidak Termasuk Outsource	Termasuk Outsource
2016	8.561	819	6.728	9.380	16.108
2015	8.186	856	6.504	9.042	15.546
2014	7.513	1.069	6.227	8.582	14.809
2013	6.869	1.142	5.578	8.011	13.589
2012	6.048	1.094	4.945	7.142	12.087

Grafik Perkembangan Jumlah Pegawai 2012 – 2016

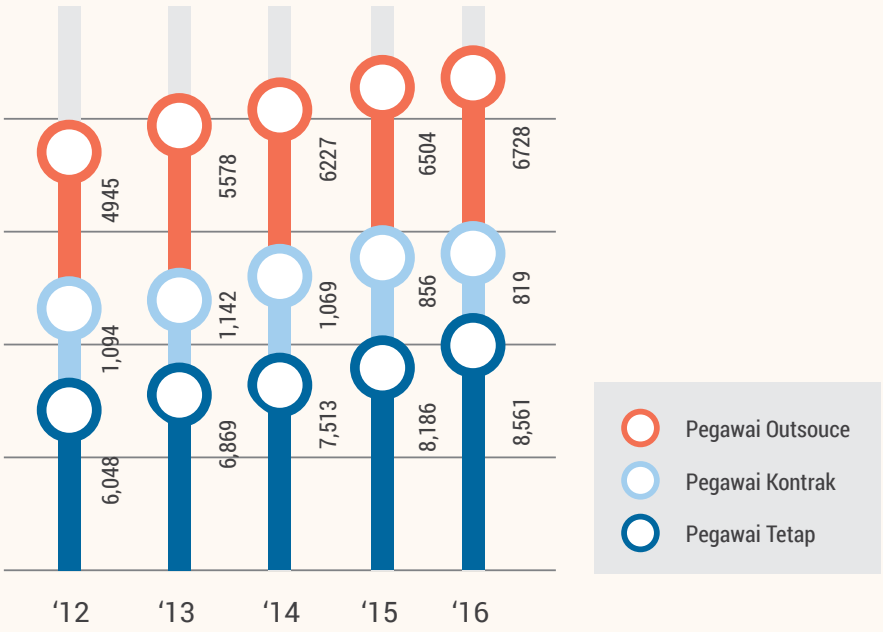

KOMPOSISI JUMLAH KARYAWAN TETAP (PEGAWAI TETAP) BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Pada tahun 2016 pegawai pada level *Grade* 11 sampai dengan 12 mencapai 4.167 pegawai, atau 48,67% dari total pegawai. Hal tersebut disebabkan jabatan-jabatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dan pelaksana operasional di Perseroan berada pada level tersebut.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	Tahun 2016		Tahun 2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%
22	2	0,02%	2	0,02%
19 s/d 21	87	1,02%	77	0,94%
15 s/d 18	911	10,64%	865	10,57%
13 s/d 14	1,695	19,80%	1,665	20,34%
11 s/d 12	4,167	48,67%	4,019	49,01%
8 s/d 10	1,699	19,85%	1,558	19,03%
Jumlah	8,561	100,00%	8,186	100,00%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

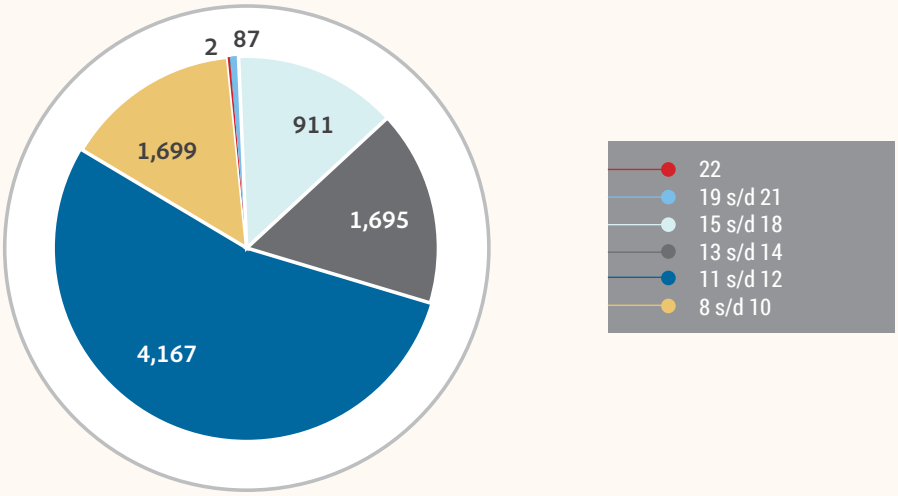

KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI TETAP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Komposisi Pegawai Perseroan di tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015. Dari total pegawai tetap di tahun 2016, Pegawai lulusan Sarjana mengalami peningkatan 64%, pegawai lulusan Sarjana Muda mengalami peningkatan 22%, sementara pegawai lulusan Pasca Sarjana mengalami sedikit penurunan sebesar 3%.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2016		Tahun 2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	284	3%	299	4%
Sarjana	5.454	64%	5.305	65%
Sarjana Muda	1.904	22%	1.663	20%
SLTA	919	11%	919	11%
JUMLAH	8.561	100%	8.186	100%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

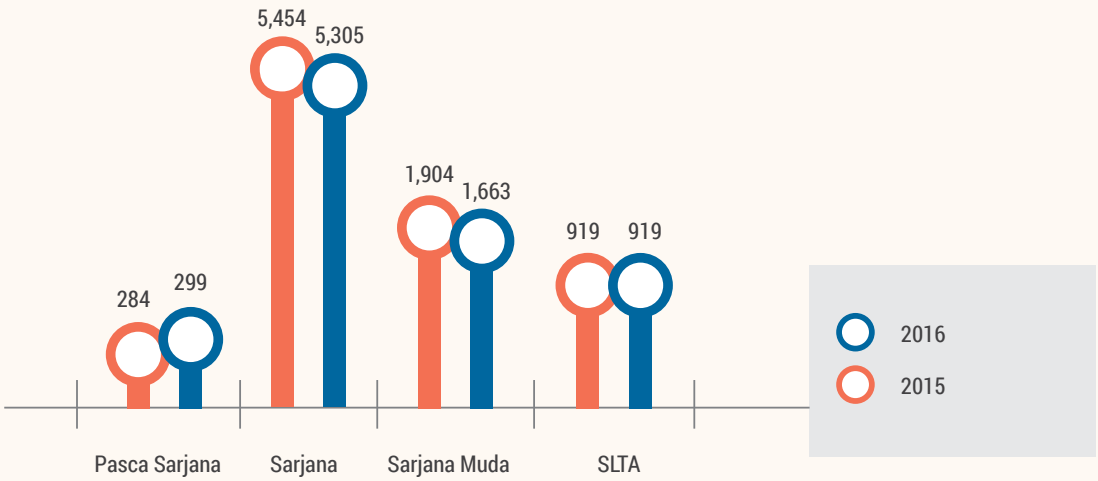

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tahun	Jumlah Pegawai			Jumlah Total	
	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Pegawai Outsource	Tidak Termasuk Outsource	Termasuk Outsource
2016	8.561	819	6.728	9.380	16.108
2015	8.186	856	6.504	9.042	15.546

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

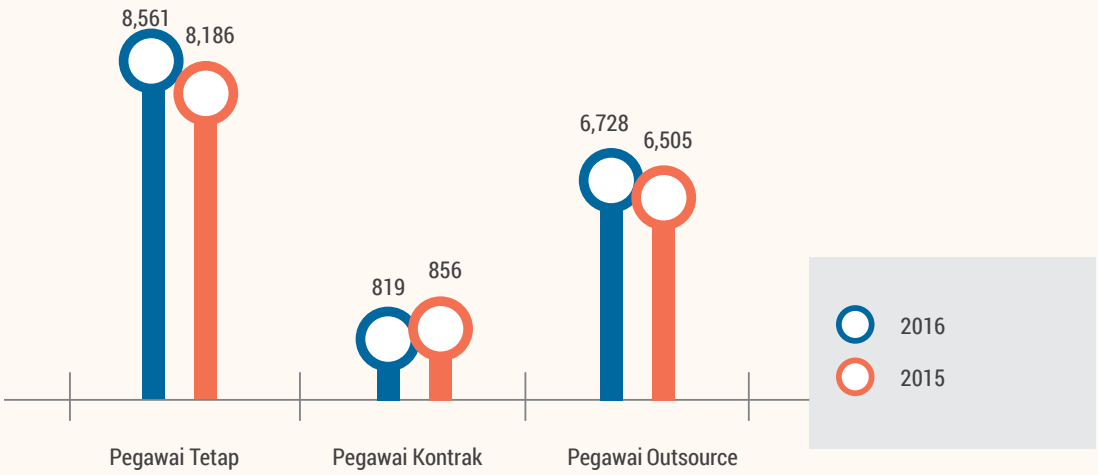

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Komposisi pegawai tahun 2016 mayoritas berada pada usia di bawah 30 tahun, yaitu mencapai 60% dari total pegawai. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 61%. Sedangkan komposisi pegawai pada usia antara 41 – 45 tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 11% berkurang menjadi 8% pada tahun 2016.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	2016	%	2015	%
>55 Tahun	3	0%	4	0%
51 – 55 Tahun	683	8%	637	8%
46 – 50 Tahun	900	11%	795	10%
41 – 45 Tahun	696	8%	941	11%
36 – 40 Tahun	141	2%	115	1%
31 – 35 Tahun	983	11%	722	9%
26 – 30 Tahun	3.802	44%	3.337	41%
< 26 Tahun	1.353	16%	1.635	20%
Jumlah	8.561	100%	8.186	100%

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

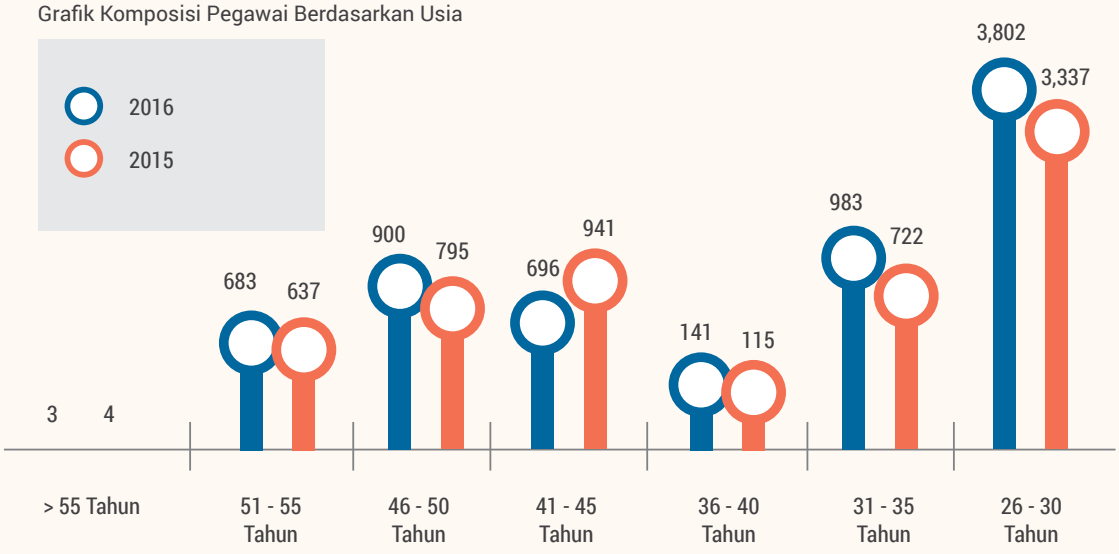

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN *GENDER*

Untuk komposisi pegawai berdasarkan gender, pegawai Laki-laki lebih mendominasi dari pegawai perempuan dengan jumlah sebesar 4.748 orang atau 55% dari total jumlah pegawai di tahun 2016.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Gender	2016	%	2015	%
Laki-laki	4.748	55%	4.454	54%
Perempuan	3.831	45%	3.732	46%
Jumlah	8.561	100%	8.186	100

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

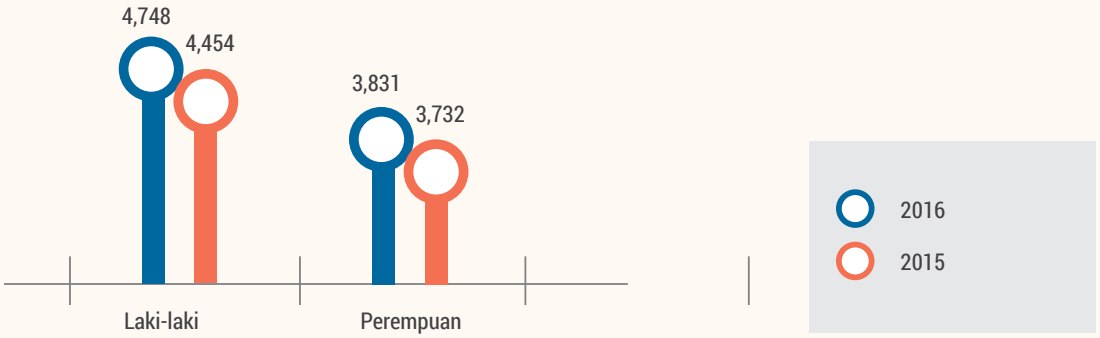

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LOKASI UNIT KERJA

Terdapat peningkatan jumlah pegawai baik yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Peningkatan jumlah pegawai lebih banyak untuk penempatan di Kantor Cabang, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah secara langsung. Komposisi jumlah pegawai untuk Kantor Pusat sebanyak 17% sedangkan penempatan di Kantor Cabang mencapai 7.123 pegawai atau sebesar 83% dari total pegawai.

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Unit Kerja

	2016	%	2015	%
Kantor Pusat	1.438	17%	1.367	17%
Kantor Cabang	7.123	83%	6.819	83%
Jumlah	8.561	100	8.186	100

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Unit Kerja

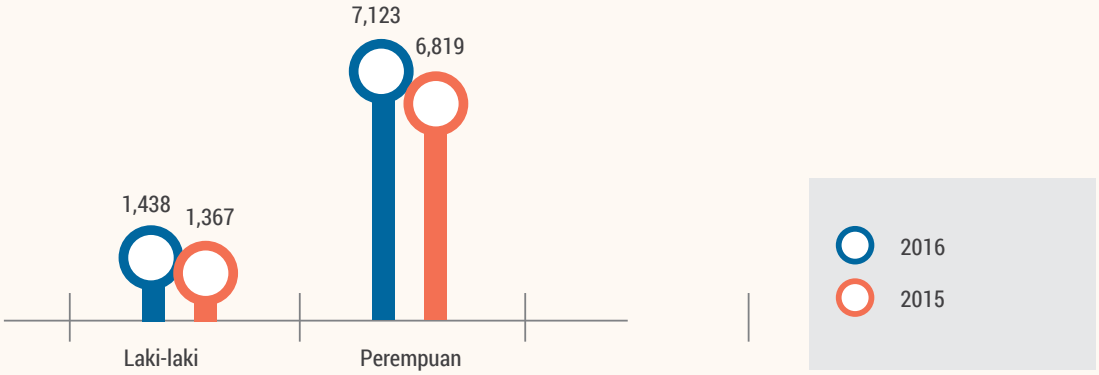

KEBIJAKAN DALAM KESEMPATAN KERJA

Kebijakan dalam hal kesempatan kerja di Perseroan, dilakukan secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender, ras, suku, agama). Untuk pengelolaan karir pegawai termasuk penempatan dan promosi/ rotasi pegawai dengan meperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai baik *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu program utama di tahun 2016 yaitu *people transformation*. Sesuai dengan SE Direksi No. 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pembelajaran dan Pengembangan Pegawai, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan *Human Capital*, ditetapkan bahwa pemberian Pegawai yang berhak mengikuti kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan adalah Pegawai dengan status pegawai tetap dan pegawai dengan status tertentu. Dalam hal ini setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pembelajaran dan pengembangan, baik pegawai laki–laki maupun perempuan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan pengetahuan dan *skill* Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi teknis sehingga diharapkan terdapat integrasi antara kompetensi SDM dengan *job spesification*, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perseroan melakukan program pengembangan pegawai untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, maupun program mutasi dan promosi. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan untuk mendukung pegawai melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan karir.

Sepanjang tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan program pengembangan pegawai sebanyak 473 pelatihan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis pendidikan, dimana jenis pelatihan *Core Banking Academy* mendominasi jenis pelatihan yang diikuti peserta yang mencapai 16.751 peserta atau 91.32% dari total peserta di tahun 2016. Sementara jenis pelatihan *New Entry Academy* diikuti sebanyak 1.144 pegawai dan *Strategic Initiatives* sebanyak 448 peserta.

Pelatihan Pegawai Tahun 2016

LEVEL ORGANISASI	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	JUMLAH
8 s.d. 10	*Service Quality*	Peningkatan Kompetensi dan Pembekalan Untuk *Frontliner* Dalam Bidang *Service Quality*	2452
8 s.d. 10	*Human Capital*	Peningkatan Kompetensi Untuk Aspek *Human Capital*	360
8 s.d. 10	Pelatihan Bidang Dana	Peningkatan Kompetensi, Sosialsisasi dan *Refreshment* Dalam Bidang Marketing dan Produk Dana	182
8 s.d. 10	Pelatihan Bidang Kredit	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi, Pengarahan Dalam Bidang Kredit, Appraisal dan Dokumen Kredit	119
8 s.d. 10	Pelatihan Akunting & Perpajakan	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Akuntansi, Pajak dan Tax Amnesty	238
8 s.d. 10	Pelatihan Bidang IT	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang IT	87
8 s.d. 10	Pelatihan Bidang Manajemen Risiko dan Audit	Peningkatan Kompetensi dDan Sosialisasi Dalam Bidang Manajemen Risiko Dan Audit	744
11 s.d. 12	Bidang *Service Quality*	Peningkatan Kompetensi dan Pembekalan Untuk Frontliner Dalam Bidang *Service Quality*	3123
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang Dana	Peningkatan Kompetensi, Refreshment dan Sosialisasi Bidang Marketing Dana	685
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang Kredit	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi, Pengarahan Dalam Bidang Kredit	1696
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang *Human Capital*	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi, *Workshop* Terkait Budaya Perusahaan dan *Softs Skill*	1421
11 s.d. 12	Pelatihan IT	Peningkatan Kompetensi Terkait IT	122
11 s.d. 12	Pelatihan Akunting dan Pajak	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Akunting dan Perpajakan	764
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang Audit	Peningkatan Kompetensi, Sertifikasi, Sosialisasi Dalam Bidang Audit dan Program *Anti Fraud*	1142
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang Manajemen Risiko	Peningkatan Kompetensi Dan Pembekalan Dalam Bidang *Risk Management*	53
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang *Treasury*	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang *Treasury*	4
11 s.d. 12	Pelatihan Bidang Legal	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Legal Perbankan	127
13 s.d. 14	Pelatihan *Service Quality*	Peningkatan Kompetensi dan Pembekalan Untuk *Frontliner* Dalam Bidang *Service Quality*	610
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang Kredit	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi dan Pengarahan Dalam Bidang Kredit	824
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang *Human Capital*	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi, *Workshop* Dalam Bidang *Leadership*, Budaya Perusahaan dan *Softs Skill*	1080
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang Dana	Peningkatan Kompetensi, *Refreshment* dan Sosialisasi Untuk Bidang Marketing Dana	520
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang IT	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang IT *Human Capital*	24
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang Manajemen Risiko	Peningkatan Kompetensi, Pembekalan, *Refreshment* Dalam Bidang Manajemen Risiko	256

LEVEL ORGANISASI	JENIS PELATIHAN	TUJUAN PELATIHAN	JUMLAH
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang Audit	Peningkatan Kompetensi Dan Sosialisasi Dalam Bidang Audit dan Program *Anti Fraud*	442
13 s.d. 14	Pelatihan Akunting dan Perpajakan	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Akunting dan Perpajakan	247
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang *Treasury*	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang *Treasury*	4
13 s.d. 14	Pelatihan Bidang Syariah	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Perbankan Syariah	6
15 s.d. 18	Pelatihan Manajemen Risiko	Peningkatan Kompetensi, *Refreshment*, Pembekalan dan Sertifikasi di Bidang Manajemen Risiko	148
15 s.d. 18	Pelatihan *Human Capital*	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang *Human Capital* Dan *Leadership*	801
15 s.d. 18	Pelatihan *Service Quality*	Peningkatan Kompetensi Untuk Unit *Head* Dalam Bidang *Service Quality*	393
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang Kredit	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi, Pembekalan, Sertifikasi Dalam Bidang Kredit	619
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang IT	Peningkatan Kompetensi terkait IT	22
15 s.d. 18	Pelatihan Akunting dan Perpajakan	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Akunting dan Perpajakan	126
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang Dana	Peningkatan kompetensi, *refreshment* dan sosialisasi bidang marketing dana	301
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang Audit	Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan sosialisasi dalam bidang audit serta Program *Anti Fraud*	194
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang *Treasury*	Peningkatan kompetensi Dalam Bidang *Treasury*	2
15 s.d. 18	Pelatihan Bidang Syariah	Peningkatan Kompetensi Terkait Perbankan Syariah	27
19 s.d. 21	Pelatihan Bidang *Service Quality*	Peningkatan Kompetensi Untuk Leader Terkait *Service Quality*	27
19 s.d. 21	Pelatihan Bidang Audit	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang Audit dan Program *Anti Fraud*	11
19 s.d. 21	Pelatihan Bidang Kredit	Peningkatan Kompetensi, *Refreshment*, Sosialisasi dan Sertifikasi Dalam Bidang Pengelolaan Kredit	77
19 s.d. 21	Pelatihan Bidang *Human Capital*	Peningkatan Kompetensi, Sosialisasi dan Seminar Terkait *Leadership, Assessor* dan *Softs Skill*	79
19 s.d. 21	Pelatihan Manajemen Risiko	Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Dalam Bidang Manajemen Risiko	12
19 s.d. 21	Pelatihan Bidang Dana	Peningkatan Kompetensi, *Refreshment* Dan Sosialisasi Dalam Bidang Marketing Dana	42
19 s.d. 21	Pelatihan *Tax Amnesty*	Peningkatan Kompetensi Dalam Bidang *Tax Amnesty*	4

Berikut tabel Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perseroan Periode Januari – Desember 2016:

Bulan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
Januari	40	1.478
Februari	29	1.178
Maret	37	1.340
April	19	1.257
Mei	74	2.516
Juni	44	1.144
Juli	19	844
Agustus	30	1.397
September	54	2.555
Oktober	56	2.242
November	55	2.123
Desember	16	269
TOTAL	**473**	**18.343**

Pada tahun 2016 biaya penyelenggaraan pelatihan mencapai Rp128.400.000.000 meningkat 21,14% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp105.993.657.000. Peningkatan biaya tersebut disesuaikan dengan pelatihan yang dibutuhkan pegawai.

STRUKTUR GRUP, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA

Perseroan merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki anak entitas anak, entitas asosiasi dan perusahaan ventura.

ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak Perusahaan.

PERUSAHAAN VENTURA

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi terkait dengan struktur grup Perusahaan dalam bentuk *Joint Venture* maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV).

ENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki Entitas Asosiasi, sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan asosiasi.

PETA WILAYAH OPERASIONAL

1 Sumatera	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	11
Kantor Cabang Pembantu	36
Kantor Layanan Setara KCP	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	700
Kantor Kas	58
Outlet Prioritas	6
Total Jaringan Kantor Konvensional	812
Kantor Syariah	
KC Syariah	5
KCP Syariah	3
Kantor Kas Syariah	2
Total Jaringan Kantor Syariah	10

2 Jawa	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	2
Kantor Cabang	38
Kantor Cabang Pembantu	170
Kantor Layanan Setara KCP	3
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	1,621
Kantor Kas	371
Outlet Prioritas	25
Total Jaringan Kantor Konvensional	2,230
Kantor Syariah	
KC Syariah	15
KCP Syariah	31
Kantor Kas Syariah	3
Total Jaringan Kantor Syariah	49

Kalimantan	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	5
Kantor Cabang Pembantu	14
Kantor Layanan Setara KCP	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	299
Kantor Kas	17
Outlet Prioritas	5
Total Jaringan Kantor Konvensional	340
Kantor Syariah	
KC Syariah	2
KCP Syariah	-
Kantor Kas Syariah	1
Total Jaringan Kantor Syariah	3

Sulawesi	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	1
Kantor Cabang	5
Kantor Cabang Pembantu	14
Kantor Layanan Setara KCP	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	126
Kantor Kas	19
Outlet Prioritas	2
Total Jaringan Kantor Konvensional	167
Kantor Syariah	
KC Syariah	1
KCP Syariah	2
Kantor Kas Syariah	-
Total Jaringan Kantor Syariah	3

5 Bali & Nusa Tenggara	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	6
Kantor Layanan Setara KCP	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	141
Kantor Kas	10
Outlet Prioritas	2
Total Jaringan Kantor Konvensional	162
Kantor Syariah	
KC Syariah	-
KCP Syariah	-
Kantor Kas Syariah	-
Total Jaringan Kantor Syariah	-

6 Papua & Maluku	
Kantor Konvensional	
Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	3
Kantor Cabang Pembantu	3
Kantor Layanan Setara KCP	-
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	61
Kantor Kas	2
Outlet Prioritas	-
Total Jaringan Kantor Konvensional	69
Kantor Syariah	
KC Syariah	-
KCP Syariah	-
Kantor Kas Syariah	-
Total Jaringan Kantor Syariah	-

JARINGAN KANTOR

Kantor Konvensional	2013	2014	2015	2016
Kantor Wilayah	3	3	3	4
Kantor Cabang	65	65	65	65
Kancapem	230	223	223	243
Kantor Layanan Setara KCP	3	3	3	3
Kantor Layanan Setara Kantor Kas	2.948	2.948	2.948	2.948
Kantor Kas	479	479	479	477
Outlet Prioritas	23	34	40	40
Total Jaringan Kantor Konvensional	3.728	3.755	3.761	3.780
Kantor Syariah				
Kantor Cabang Syariah	22	22	22	23
Kantor Cabang Pembantu Syariah	21	21	21	36
Kantor Kas Syariah	4	7	7	6
Total Jaringan Kantor Syariah	47	50	50	65
ATM	1.830	1.830	1.830	1.830
Mobil Kas Keliling	10	10	10	10

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN CABANG

UNIT USAHA KONVENSIONAL

Kantor Wilayah 1
Gedung Bank BTN Bekasi Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman No. 19 Bekasi 17143
Telp. : (021) 88953281, 88953282
Facs. : (021) 8849519
Email : kantorwilayah1@btn.co.id

Kantor Wilayah 2
Jl. Raya Darmo No. 123-125 Surabaya -
Jawa Timur - 60241
Telp. : (031) 5661704 , 5661204
Facs. : (031) 5661696
Email : kantorwilayah2@btn.co.id

Kantor Wilayah 3
Jl. Sudirman Komplek Sudirman City Square
No. A 10 - 11 Pekanbaru - 28115
Telp. : (0761) 571126, 571127, 571208, 571350
Facs. : (0761) 571190
Email : kantorwilayah3@btn.co.id

Kantor Wilayah 4
Jl. Sultan Hassanudin No. 1 Makassar
Telp. : (0411) 5070760
Email : kantorwilayah4@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG JAKARTA KUNINGAN
Wisma Budi Lt. 1 & 2
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C6
Jakarta 12940
Telp. : (021) 52964652
Facs. : (021) 52964974
Email : kc.jakartakuningan@btn.co.id

CABANG SURABAYA
Jl. Pemuda No. 50 Surabaya 60271
Telp. : (031) 5353513-19
Facs. : (031) 5345073, 5458002
Email : kc.surabaya@btn.co.id

CABANG MEDAN
Jl. Pemuda No. 10A Medan 20151
Telp. : (061) 4149777
Facs. : (061) 4158112, 4153203
Email : kc.medan@btn.co.

CABANG MAKASSAR
Jl. Kajaolalido No. 4 Makassar 90111
Telp. :(0411) 316016, 316011
Facs. : (0411) 316388
Email : kc.makassar@btn.co.id

CABANG YOGYAKARTA
Jl. Jend. Sudirman No. 71
Yogyakarta 55223
Telp. : (0274) 589898, 581014,
581016
Facs. : (0274) 561289
Email : kc.yogyakarta@btn.co.id

CABANG BANDUNG
Jl. Jawa No. 7 Bandung 40117
Telp. : (022) 4232112, 4241036,
4241034
Facs. : (022) 4204562
Email : kc.bandung@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG DENPASAR
Jl. Dewi Sartika No. 2
Denpasar 80114
Telp. : (0361) 243811
Facs. : (0361) 243815
Email : kc.denpasar@btn.co.id

CABANG PALEMBANG
Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 125
Palembang 30128
Telp. : (0711) 411175, 410552
Facs. : (0711) 410854
Email : kc.palembang@btn.co.id

CABANG PADANG
Jl. H. R. Rasuna Said No. 3
Padang 25129
Telp. : (0751) 31903, 32094 - 96
Facs. : (0751) 31900, 34938
Email : kc.padang@btn.co.id

CABANG BANJARMASIN
Jl. R. E. Martadinata No. 4
Banjarmasin 70111
Telp. : (0511) 4368133, 4366669 - 70
Facs. : (0511) 4366492, 43363964
Email : kc.banjarmasin@btn.co.id

CABANG MANADO
Jl. Wolter Monginsidi No. 56
Manado 95115
Telp. : (0431) 868095,855504 - 05
Facs. : (0431) 868013, 863416
Email : kc.manado@btn.co.id

CABANG MALANG
Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4
Malang 65119
Telp. : (0341) 323956
Facs. : (0341) 323959, 350050
Email : kc.malang@btn.co.id

CABANG SEMARANG
Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242
Telp. : (024) 312151, 446166
Facs. : (024) 312186
Email : kc.semarang@btn.co.id

CABANG JAKARTA HARMONI
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
Telp. : (021) 6336789, 6332666, 2310490
Facs. : (021) 6386593, 6332676, 6333021
Email : kc.jakartaharmoni@btn.co.id

CABANG BOGOR
Jl. Pengadilan No. 13-15
Bogor 16121
Telp. : (0251) 8311700
Facs. : (0251) 5372238
Email : kc.bogor@btn.co.id

CABANG BEKASI
Jl. Jend. Sudirman No. 19
Bekasi 17143
Telp. : (021) 8840649
Facs. : (021) 8849519
Email : kc.bekasi@btn.co.id

CABANG JAYAPURA
Jl. Koti No. 22 Jayapura 99111
Telp. : (0967) 537970-71
Facs. : (0967) 533373
Email : kc.jayapura@btn.co.id

CABANG BANDARLAMPUNG
Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
Bandar Lampung 35215
Telp. : (0721) 489253 - 55, 484778, 483256
Facs. : (0721) 489252
Email : kc.bandarlampung@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG KENDARI
Jl. A. Yani , Komplek A. Yani Square
Blok. A6-7 Kendari 93117
Telp. : (0401) 322101
Email : kc.kendari@btn.co.id

CABANG SAMARINDA
Jl. RE. Martadinata No. 01
Samarinda 75127
Telp. : (0541) 736930, 731695, 731510
Facs. : (0541) 737698
Email : kc.samarinda@btn.co.id

CABANG MATARAM
Jl. Pejanggik No. 99-101
Cakranegara, Mataram 83121
Telp. : (0370) 631186, 638289
Facs. : (0370) 634542
Email : kc.mataram@btn.co.id

CABANG KUPANG
Jl. Jend. Sudirman No. 87
Kupang 85119
Telp. : (0380) 831004
Facs. : (0380) 833741
Email : kc.kupang@btn.co.id

CABANG AMBON
Jl. Diponegoro No. 75B Ambon
Telp. : (0911) 355882, 354471, 348552, 355882
Facs. : (0911) 348559
Email : kc.ambon@btn.co.id

CABANG PALU
Jl. Jend. Sudirman No. 2,
Palu 94111
Telp. : (0451) 424555, 428555
Facs. : (0451) 425993
Email : kc.palu@btn.co.id

CABANG PALANGKARAYA
Jl. Diponegoro No. 23
Palangkaraya 73111
Telp. : (0536) 3223407, 3222698, 3224136
Facs. : (0536) 3221020
Email : kc.palangkaraya@btn.co.id

CABANG BATAM
Jl. Engku Putri No. 1, Kel. Belian ,
Kec. Nongsa Batam Center
Telp. : (0778) 470630, 470625-28
Facs. : (0778) 457262, 453923
Email : kc.batam@btn.co.id

CABANG BANGKALAN
Jl. Teuku Umar No. 16, Kel.
Kemayoran, Kec. Bangkalan 69116
Telp. : (031) 3098929 / 3098831/ 3098930
Facs. : (031) 3098834
Email : kc.bangkalan@btn.co.id

CABANG MADIUN
Jl. Dr. Sutomo No. 38
Madiun 63116
Telp. :(0351) 451460, 459034, 459034, 457927, 459500
Facs. : (0351) 463510
Email : kc.madiun@btn.co.id

CABANG JEMBER
Jl. A. Yani No. 05 Jember 68118
Telp. : (0331) 484611, 489292, 489266
Facs. : (0331) 484617
Email : kc.jember@btn.co.id

CABANG SOLO
Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo 57141
Telp. : (0271) 726930
Facs. : (0271) 726931
Email : kc.solo@btn.co.id

CABANG PEKALONGAN
Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan 51113
Telp. : (0285) 433883 - 84, 433484, 433917, 413222
Facs. : (0285) 433926 , 413902
Email : kc.pekalongan@btn.co.id

CABANG PURWOKERTO
Jl. Jend. Sudirman No. 431
Purwokerto 53116
Telp. : (0281) 641114
Facs. : (0281) 638386
Email : kc.purwokerto@btn.co.id

CABANG TASIKMALAYA
Jl. Sutisna Senjaya No. 101
Tasikmalaya 46112
Telp. : (0265) 334464 - 65
Facs. : (0265) 330884
Email : kc.tasikmalaya@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG CIREBON
Jl. Siliwangi No. 16 Cirebon 45121
Telp. : (0231) 209143, 209153
Facs. : (0231) 209777
Email : kc.cirebon@btn.co.id

CABANG PURWAKARTA
Jl. RE. Martadinata No. 1
Purwakarta 41114
Telp. : (0264) 201024, 210830 - 31, 206637
Facs. : (0264) 201591
Email : kc.purwakarta@btn.co.id

CABANG BENGKULU
Jl. Soeprapto No. 7 - 8,
Bengkulu 38223
Telp. : (0736) 20875
Facs. : (0736) 20874
Email : kc.bengkulu@btn.co.id

CABANG JAMBI
Jl. H. M. Yusuf Singadikane No. 146
Jambi
Telp. : (0741) 61793, 61792
Facs. : (0741) 62665
Email : kc.jambi@btn.co.id

CABANG PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 393
Pekanbaru 28116
Telp. : (0761) 40494, 40185 - 88
Facs. : (0761) 32271, 44776
Email : kc.pekanbaru@btn.co.id

CABANG PONTIANAK
Jl. Imam Bonjol No. 29
Pontianak 78122
Telp. : (0561) 740163
Facs. : (0561) 740168
Email : kc.pontianak@btn.co.id

CABANG TANGERANG
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01
Tangerang 15118
Telp. : (021) 5539363
Facs. : (021) 5537977, 5581186
Email : kc.tangerang@btn.co.id

CABANG CIPUTAT
Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat
15411
Telp. : (021) 7445145
Facs. : (021) 7490968, 7402731
Email : kc.ciputat@btn.co.id

CABANG BALIKPAPAN
Jl. Jend. Sudirman No. 141
Telp. : (0542) 420333
Facs. : (0542) 420896
Email : kc.balikpapan@btn.co.id

CABANG KEDIRI
Jl. Diponegoro No. 22 - 24
Kediri 64121
Telp. : (0354) 691260 - 62
Facs. : (0354) 691265
Email : kc.kediri@btn.co.id

CABANG CILEGON
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49
Cilegon 42414
Telp. :(0254) 391766, 392681, 393479
Facs. : (0254) 393480
Email : kc.cilegon@btn.co.id

CABANG DEPOK
Jl. Margonda Raya No. 186
Depok 16423
Telp. : (021) 7751236-37
Facs. : (021) 7772927
Email : kc.depok@btn.co.id

CABANG GRESIK
Komp. Pertokoan Multi Sarana Plaza
Blok C 01 No. 1
Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118
Telp. : (031) 3973455
Facs. : (031) 3973456
Email : kc.gresik@btn.co.id

CABANG SIDOARJO
Jl. Ahmad Yani No. 15 – Sidoarjo
Telp. 031 – 8957949 s/d 50 :
(031) 8929211 , 8957949 - 50
Facs. 031 8957951: (031) 8957951
Email : kc.sidoarjo@btn.co.id

CABANG TANJUNG PINANG
Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek
Plaza Bintan Center
Blok Bunga No. 9 - 12
Tanjung Pinang
Telp. : (0771) 7447101 , 7447088
Facs. : (0771) 7447082
Email : kc.tanjungpinang@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG KARAWANG
Jl. Kertabumi No. 29 A-D, Karawang 41311 Jawa Barat
Telp. : (0267) 412282 - 83
Facs. : (0267) 412247
Email : kc.karawang@btn.co.id

CABANG GORONTALO
Jl. Prof. HB. Yasin No. 55, Kel Limba U2, Kota Selatan - Gorontalo
Telp. : (0435) 830490, 829481
Facs. : (0435) 826707, 823943
Email : kc.gorontalo@btn.co.id

CABANG PANGKAL PINANG
Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade Center B11 - B14 - Pangkal Pinang
Telp. : (0717) 423748
Facs. : (0717) 488706
Email : kc.pangkalpinang@btn.co.id

CABANG BANDA ACEH
Jl. Sri Ratu Afiatuddin No. 19 - 23 , Gampong Peunayong, Banda Aceh
Telp. : (0651) 35756, 35757
Facs. : (0651) 35758
Email : kc.bandaaceh@btn.co.id

CABANG TERNATE
JL. Pahlawan Revolusi (Samping Kantor Pos Ternate)
Kel. Gamalama, Ternate Tengah – Maluku Utara
Telp . : 0921 - 3111330
Fax. : 0921 - 3126968
Email : kc.ternate@btn.co.id

CABANG CIBUBUR
Ruko Madison Blok B1 No. 6-8 Cibubur Time Square
Jl. Raya Alternatif transyogi Km. 3 Cibubur - Bekasi 17435
Telp. : 021 - 84300071 - 73
Faks. : 021 -
Email : kc.cibubur@btn.co.id

CABANG KELAPA GADING SQUARE
Gedung Emerald Tower
Jl. Boulevard Barat Blok XB No. 3 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Telp. : 021 - 45866883, 45866884
Fax. : 021 - 45866885
Email : kc.kelapagadingsquare@btn.co.id

CABANG CIMAHI
Jl. Raya Timur Cimahi No. 475 / Jl. Raya Timur Cimahi No. 475 (dahulu) Cimahi 40524
Telp. : 022 - 6651644, 6651645
Fax. : 022 - 6652586
Email : kc.cimahi@btn.co.id

CABANG BUMI SERPONG DAMAI
Komp. BSD, Ruko Sektor VII E Blok K No. 8, Jl. Raya Serpong, Tangerang 15310
Telp. : (021) 5372235 - 37
Facs. : (021) 5372238
Email : kc.bumiserpongdamai@btn.co.id

CABANG JAKARTA KEBON JERUK
Jl. Anggrek No. 01 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
Telp. : (021) 53666345
Facs. : (021) 59666344
Email : kc.jakartakebonjeruk@btn.co.id

CABANG JAKARTA CAWANG
Patria Park Apartment & Office RK 01-02
Jl. DI Panjaitan Kav. 5-7, JakartaTimur 13340
Telp. : (021) 85918467 - 69
Facs. : (021) 85918470
Email : kc.jakartacawang@btn.co.id

CABANG CIKARANG
Ruko Cikarang Commercial Center B1 No. 3-5
Jl. Raya Cikarang - Cibarusah Km. 40 Cikarang 17550
Telp. : (021) 8936275 / 89830014
Facs. : (021) 8936418
Email : kc.cikarang@btn.co.id

CABANG KARAWACI
Perumnas Karawaci I , Jl. Cendrawasih No. 1 Tangerang 15115
Telp. : (021) 5517849 - 50
Facs. : (021) 5524367 , 5511420
Email : kc.karawaci@btn.co.id

CABANG HARAPAN INDAH BEKASI
Ruko Office Park Harapan Indah Blok OP Kavling No. OP1-01 & OP1-02, Harapan Indah - Bekasi 17132
Telp. : (021) 88386971 (hunting) , 88386972 , 88386974
Facs. : (021) 88386974
Email : kc.harapanindahbekasi@btn.co.id

CABANG SURABAYA BUKIT DARMO
Jl. Bukit Darmo Golf Blok 1 No. 07 Surabaya
Telp. : (031) 7323344 , 7322146 , 7322147
Facs. : (031) 7232899
Email : kc.surabayabukitdarmo@btn.co.id

KANTOR CABANG KONVENSIONAL

CABANG BANDUNG TIMUR
Jl. Raya Cinunuk No. 223 A Kec. Cileunyi, kab. Bandung
kode pos 40624
Telp. : (022) 7816883
Facs. : (022) 7838482, 7816876
Email : kc.bandungtimur@btn.co.id

CABANG JAKARTA MELAWAI
Jl. Melawai Raya No. 19 C-D, Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru-Jakarta Selatan kode pos 12130
Telp. : (021) 27517843, 27517840
Facs. : (021) 27517858
Email : kc.jakartamelawai@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH

CABANG JAKARTA HARMONI
Kec. Gambir - Jakarta Pusat 10130
Telp. : (021) 3860617 , 3860620 , 3864265
Facs. : (021) 3447271, (021) 3857706
Email : kcs.jakartaharmoni@btn.co.id

CABANG BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 8, Bandung
Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan - Bandung 40115
Telp. : (022) 4265472 , 4265473 , 4265474
Facs. : (022) 4265385
Email : kcs.bandung@btn.co.id

CABANG SURABAYA
Jl. Diponegoro No. 29
Surabaya 60271
Telp. : (031) 5666363,5610518
Facs. : (031) 5610519
Email : kcs.surabaya@btn.co.id

CABANG YOGYAKARTA
Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru, Gondokusuman Yogyakarta 55224
Telp. : (0274) 551055, 512467
Facs. : (0274) 551056
Email : kcs.yogyakarta@btn.co.id

CABANG MAKASSAR
Jl. Slamet Riyadi No. 7 A
Kel. Bulogading,
Kec. Ujung pandang 90111
Telp. : (0411) 3613399, 3613499
Facs. : (0411) 320785
Email : kcs.makassar@btn.co.id

CABANG MALANG
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 87,
Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen,
Kota Malang 65112
Telp. : (0341) 3012469
Facs. : (0341) 579777
Email : kcs.malang@btn.co.id

CABANG SOLO
Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332
Solo 57141
Telp. :(0271) 712127, 7008978,7008947
Facs. : (0271) 717276
Email : kcs.solo@btn.co.id

CABANG BATAM
Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29 Pelita - Batam 29432
Telp. : (0778) 421921 , 437880
Facs. : (0778) 422126
Email : kcs.batam@btn.co.id

CABANG MEDAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan
Telp. : (061) 4144554
Facs. : (061) 4144546
Email : kcs.medan@btn.co.id

KANTOR CABANG SYARIAH

CABANG TANGERANG
Jl. Serpong Raya, Ruko Villa Melati Mas Blok. SR-1 No. 23-24
Serpong - Tangerang 15320
Telp. : (021) 5370773
Facs. : (021) 5370744
Email : kcs.tangerang@btn.co.id

CABANG BOGOR
Jl. Jendral Sudirman No. 01, Kec. Bogor Tengah, Bogor 16121
Telp. : (0251) 8327171, 8327575
Facs. : (0251) 8324567
Email : kcs.bogor@btn.co.id

CABANG BEKASI
Jl. Jenderal Sudirman , Ruko No. 1 G-H , Kel. Kayu Ringin
Kec. Bekasi Selatan - Kota Bekasi 17144
Telp : (021) 8893333
Facs : (021) 88956655
Email : kcs.bekasi@btn.co.id

CABANG PEKANBARU
Jl Tuanku Tambusi Blok A No. 10 - 11, Labuh Baru Timur
Pekanbaru 28291
Telp : (0761) 7891314
Facs : (0761) 7891313
Email : kcs.pekanbaru@btn.co.id

CABANG SEMARANG
Jl. Achmad Yani No. 195 C
Semarang 50133
Semarang 50258
Telp : (024) 8449918, 8449919
Facs : (024) 8410825
Email : kcs.semarang@btn.co.id

CABANG BANJARMASIN
Jl. Jend. A. Yani Km. 5 Komplek Kencana No. 1
Banjarmasin 70249
Telp : (0511) 3250530 , 3250540 , 3250560
Facs : (0511) 3260900
Email : kcs.banjarmasin@btn.co.id

CABANG CIREBON
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 91 Cirebon
Telp : (0231) 235485 - 86 - 88
Facs : (0231) 205790
Email : kcs.cirebon@btn.co.id

CABANG PALEMBANG
Jl. Veteran No. 325 - 329,
Palembang 30114
Telp : (0711) 355417, 355963
Facs : (0711) 313366
Email : kcs.palembang@btn.co.id

CABANG BALIKPAPAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 565 - 566 , Balikpapan 76114
Telp : (0542) 742260, 742258
Faks : (0542) 742229
Email : kcs.balikpapan@btn.co.id

CABANG CILEGON
Jl. Jend Ahmad Yani No 1B, Cilegon
Telp : (0254)378264,378265
Faks : (0254) 378272
Email : kcs.cilegon@btn.co.id

CABANG JAKARTA PASAR MINGGU
Jl. Ruko Grand Palace Blok G & H, Jl. Raya Ps. Minggu Km 16
Pancoran - Jakarta Selatan
Telp : (021) 799 3662,799 3015
Faks : (021) 799 3174
Email : kcs.pasarminggu@btn.co.id

CABANG TASIKMALAYA
Jl. Yudanegara No. 10 Kel. Yudanegara Kec.Cihideung - Kota Tasikmalaya 46112
Telp : 0265 - 310612, 7296566, 7296567, 7296568
Faks : 0265 - 310613
Email : kcs.tasikmalaya@btn.co.id

CABANG TEGAL
Jl. Gajah Mada No. 107 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat
Kota Tegal - Jawa Tengah 52113
Telp : (0283) 342923 ,342933
Faks : (0283) 342913
Email : kcs.tegal@btn.co.id

CABANG BANDA ACEH
Jl. Teuku Umar No. 21, Seutui, Banda Aceh
Telp : 0651-40330 - 334
Faks : 0651-40335
Email : kcs.aceh@btn.co.id

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Jenis Lembaga	Nama dan Alamat Lembaga	Jasa yang diberikan	Fee	Periode
Akuntan Publik	**Purwantono, Sungkoro & Surja** **(Anggota Ernest & Young Global)** **Gedung Bursa Efek Indonesia** Menara 2 Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 Indonesia Tel : 62-21 5289 5000 Fax : 62-21 5289 4100	Jasa Audit Laporan Keuangan, Audit PKBL	Rp2.175 juta	31 Desember 2016
Pemeringkat Efek	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)** Setiabudi Atrium Suite 809 - 810 Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia Tel : 62-21 5795 7755 Fax : 62-21 5795 7750	Jasa Pemeringkatan Atas Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Transaksi sekuritisasi KPR BTN ke IX tahun 2016 (EBA-SP SMF-BTN 02)	Rp425 juta	2016
	PT Fitch Ratings Indonesia Prudential Tower, 20th Fl Jl. Jenderal Sudiirman Kav. 79, Jakarta 12910 Indonesia Tel : 62-21 5795 7755 Fax : 62-21 5795 7750	Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan/atau Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Bank BTN	Rp742,5 juta	Maret 2016 – Agustus 2021
Biro Administrasi Efek	**PT Datindo Entrycom** Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudiirman Kav. 34 - 35, Jakarta 10220 Indonesia Tel : 62-21 570 9009 Fax : 62-21 570 9026	Jasa Administrasi Saham Pasar Sekunder PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp44.000.000	2016

INFORMASI *WEBSITE* PERUSAHAAN

WEBSITE PERUSAHAAN MEMUAT INFORMASI-INFORMASI YANG DIBUTUHKAN OLEH PEMEGANG SAHAM MAUPUN *STAKEHOLDERS*

Sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka meningkatkan transparansi sekaligus memberikan akses bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Perseroan yang aktual dan terkini, Perseroan telah mengadopsi Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki situs / *website* perusahaan yaitu http://www.btn.co.id yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Informasi Pemegang Saham maupun para *stakehoders*. Tampilan *website* telah memuat antara lain:

1. **Produk & Layanan**
   - Produk Dana (Deposito, Tabungan, Giro)
   - Produk Kredit (Kredit Konsumer, Kredit Komersial)
   - Jasa dan Layanan
   - BTN Prioritas
2. **Unit Usaha Syariah**
3. **BTN Promo (Debit BTN Online, Tabungan)**
4. **Hubungan Investor meliputi:**
   - *Analyst Coverage*
   - Dividen sejak tahun 2009 - 2015
   - BTN *Housing Index* tahun 2015 - 2016
   - *Good Corporate Governance* (GCG) memuat :
     a) Laporan Pelaksanaan GCG s tahun 2007 – 2014
     b) *Cross Reference Asean Corporate Governance Scorecard*-2016
   - Informasi Obligasi tahun 2015 - 2016
   - Konferensi Pers terkait Kinerja Triwulanan Perseroan tahun 2013 - 2015
   - Kebijakan Tata Kelola memuat :
     a) Anggaran Dasar
     b) *Board Manual*
     c) *Code Of Conduct*
     d) Piagam Komite Audit
     e) Piagam Komite Audit Revisi
     f) Komite Pemantau Risiko
     g) Komite Remunerasi dan Nominasi
   - Laporan Tahunan tahun 2002 - 2015
   - Laporan Keuangan (Bulanan dan Triwulanan)
   - Laporan *Leverage Ratio*
   - Laporan *Liquidity Coverage Ratio*
   - Materi Presentasi memuat *Analyst Meeting* tahun 2009 - 2016
   - Struktur kepemilikan tahun 2015 - 2016
   - Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia
   - Pemegang Saham Tertentu
   - Prospektus Penawaran Umum
   - Rapat Umum Pemegang Saham memuat :
     a) Pengumuman RUPS
     b) Pemanggilan RUPS
     c) Keputusan RUPS
     d) Upaya yang dilakukan untuk mengundang Pemegang Saham
   - *Whistle Blowing System* (WBS)
   - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor
5. **CSR (*Corporate Social Responsibility*)**
6. ***E-Channel* (ATM, ATM Non Tunai & CDM BTN, *Branchless Banking* BTN, BTN *Cash Management System, Electronic Data Capture, Internet Banking, Mobile Banking BTN, SMS Banking, Virtual Account* BTN dan *Digital Solution*)**
7. **BTN Info**
   - Info (Berita BTN, Kurs Valuta Asing, Lokasi ATM, Jaringan Kantor, Karir)
   - Link
   - Pengadaan Barang dan Jasa
   - Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
   - FAQ
   - Informasi Atau Fakta Material
   - Tax Amnesty
8. **Informasi Publik yang meliputi:**
   - Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala:
     a) Informasi tentang Profil Bank BTN;
     b) Informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan;
     c) Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Bank BTN;
     d) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Bank BTN;
     e) Ringkasan Laporan Keuangan;
     f) Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

g) Informasi tentang hak dan tata cara pengajuan keberatan;

h) Informasi tentang pengaduan penyalahgunaan wewenang atau oleh Manajemen dan Pegawai Bank BTN;

i) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;

j) Informasi tentang fakta material

k) Maklumat Layanan Informasi Publik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

- Informasi Serta Merta
- Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

a) Daftar Informasi Publik

b) Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

c) Informasi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik

d) Informasi tentang Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

e) Informasi Perkara Penting yang dihadapi Perusahaan

f) Informasi Laporan Layanan Informasi Publik

g) Anggaran Dasar Bank BTN

h) Hasil Penilaian Eksternal Auditor

i) Informasi Regulasi tentang Informasi Publik

j) Informasi mengenai Regulasi Perusahaan

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

INFORMASI BAGI INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan senantiasa membangun hubungan baik dengan investor, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia.

KONDISI PASAR MODAL DAN KINERJA SAHAM PERSEROAN

PERSEROAN SENANTIASA MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK DENGAN INVESTOR, ANALIS MAUPUN MASYARAKAT PASAR MODAL LAINNYA. PERSEROAN JUGA MEMENUHI KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PASAR MODAL INDONESIA.

Kinerja Pasar Modal Indonesia sepanjang tahun 2016 menghadapi banyak tantangan. Meskipun demikian, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan yang positif secara tahunan. Hal ini turut serta mendukung kenaikan harga saham Perseroan yang juga menunjukan tren peningkatan. Peningkatan nilai saham ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari Investor terhadap Perseroan.

Selama periode 2016, beberapa peristiwa domestik maupun global turut serta menimbulkan sentimen pasar yang berpengaruh pada kinerja indeks saham di beberapa negara. Beberapa sentimen yang mempengaruhi kinerja indeks saham selama tahun 2016 di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia termasuk negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan China, fluktuasi harga minyak dunia akibat *excess supply* oleh negara-negara yang tergabung dalam OPEC, Referendum Brexit (*British Exit*), potensi kenaikan *Fed Fund Rate* hingga kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi AS.

Meskipun demikian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan yang positif secara tahunan sebesar 15,32% (yoy) di tingkat 5.296,71 per 31 Desember 2016. Kinerja IHSG ini merupakan kinerja terbaik ke dua di antara indeks saham global terkemuka, setelah indeks saham Thailand (*Stock Exchange of Thailand* – SET Index) yang tercatat naik sebesar 19,79% (yoy).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang 2016 rata-rata nilai transaksi harian mengalami peningkatan 30,03% (yoy). Rata-rata frekuensi dan volume transaksi harian tumbuh masing-masing 18,91% dan 31,36% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kapitalisasi pasar juga mencatatkan peningkatan sebesar 18,18% (yoy).

No	Negara	Indeks	31 Desember 2015	31 Desember 2016	YoY Performance
1	Thailand	Stock Exchange of Thailand SET Index	1.288.02	1.542.94	19,79%
2	Indonesia	Jakarta Stock Exchange Composite Index (IHSG)	4.593.01	5.296.71	15,32%
3	Inggris	FTSE 100 Index	6.242.32	7.142.83	14,43%
4	Amerika Serikat	Dow Jones Industrial Average - DJI	17.425.03	19.762.60	13,42%
		S&P 500 Index	2.043.94	2.238.83	9,54%
		NASDAQ Composite Index	5.007.41	5.383.12	7,50%
5	India	NSE Nifty Bank Index	16.922.20	18.177.20	7,42%
6	Australia	Australian Stock Exchange All Ordinaries Index	5.344.60	5.719.10	7,01%
7	Korea Selatan	Korea Stock Exchange KOSPI Index	1.961.31	2.026.46	3,32%
8	Jepang	Nikkei 225	19.033.71	19.114.37	0,42%
9	Hong Kong	Hong Kong Hang Seng Index	21.914.40	22.000.56	0,39%
10	Singapura	Straits Times Index STI	2.882.73	2.880.76	-0,07%
11	Filipina	Philippines Stock Exchange PSEi Index	6.952.08	6.840.64	-1,60%
12	Malaysia	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - Kuala Lumpur Composite Index	1.692.51	1.641.73	-3,00%
13	China	Shanghai Stock Exchange Composite Index	3.539.18	3.103.64	-12,31%

KINERJA SAHAM PERSEROAN

Grafik Pergerakan Harga Saham Perseroan Tahun 2016

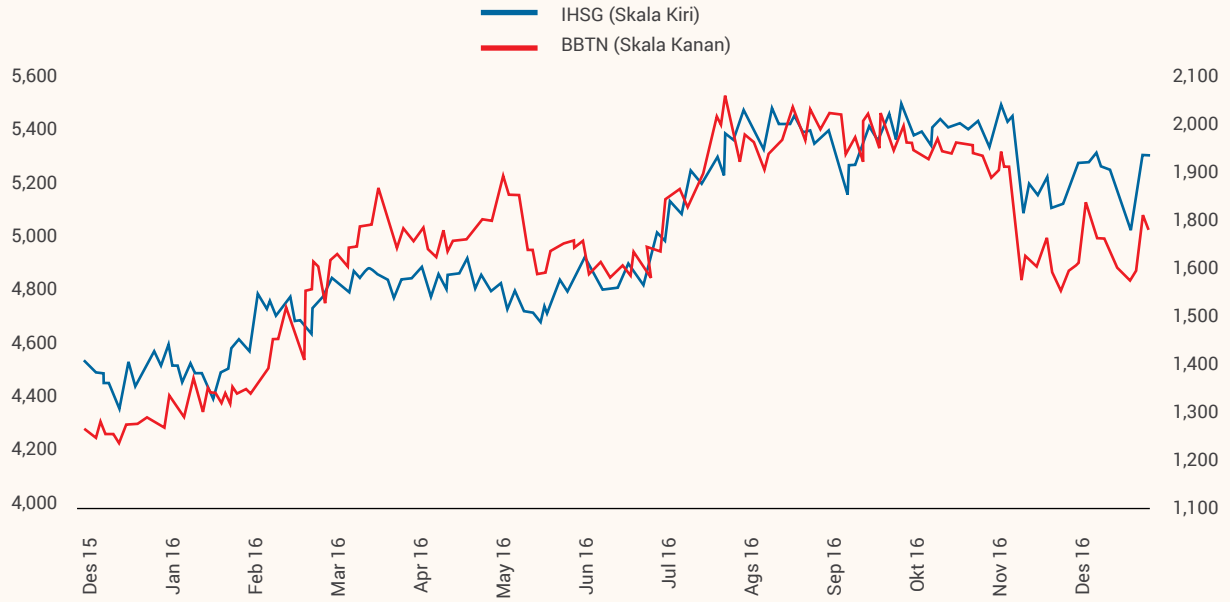

Per 31 Desember 2016 saham BBTN ditutup pada harga Rp1.740 per lembar, meningkat sebesar 34,36% secara tahunan (yoy). Pencapaian ini lebih tinggi dari kenaikan IHSG yang tercatat sebesar 15,32% (yoy).

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, saham BBTN berhasil mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2016 dengan pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

Indikator	2015	2016
Harga Penutupan (Rp)	1.295	1.740
Harga Terendah (Rp)	935	1.280
Harga Tertinggi (Rp)	1.315	2.100
Rata-rata Volume Perdagangan Harian (Lot Saham)	302.217	202.509
PE (x)	7,40	7,04
PBV (x)	0,99	0,96
Laba Bersih per Saham (Rp)	175	247
Kapitalisasi Pasar (Triliun Rp)	13,70	18,43

Per 31 Desember 2016 saham BBTN ditutup pada harga Rp1.740 per lembar, meningkat 34,36% (yoy) dari harga penutupan pada periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp1.295 per lembar saham. Meskipun rata-rata volume perdagangan harian selama periode 2016 mengalami penurunan, dari 302.217 lot saham selama periode 2015 menjadi 202.509 lot saham, kapitalisasi pasar tercatat mengalami kenaikan sebesar 34,46% (yoy) dengan posisi per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp18,43 Triliun.

Peningkatan harga saham BBTN ini didorong oleh fundamental Perseroan yang kuat dan kinerja keuangan tahun 2016 yang memuaskan, yang berada di atas ekspektasi pasar dan konsensus analis. Di tengah perlambatan ekonomi domestik maupun global, serta menurunnya kinerja sektor perbankan nasional, Perseroan mencatatkan peningkatan kinerja, seperti pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 18,34%, peningkatan dana pihak ketiga sebesar 25,40% dan pertumbuhan laba bersih sebesar 41,49% pada tahun 2016. Kualitas aset yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) juga mengalami perbaikan yang signifikan dari 3,42% menjadi 2,84%..

Atas peningkatan harga saham yang signifikan ini, BBTN masuk dalam daftar 10 (sepuluh) saham dengan pertumbuhan tertinggi di indeks LQ45 pada tahun 2016. Perseroan juga dinobatkan sebagai "*The best Mid-Cap Company in Indonesia*" oleh Finance Asia serta "*Exellence in Governance* and Investor Relations Benchmarking" dari The Asset Publishing and Research Limited.

Price to Book Value (PBV) BBTN per 31 Desember 2016 tercatat sebesar 0,96x, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 0,99x. *Price to Earning* (PE) BBTN per 31 Desember 2016 tercatat sebesar 7,04x, turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 7,40x.

Atas kinerja tersebut di atas, BBTN berhasil masuk dalam komponen perhitungan beberapa Indeks Saham terkemuka sebagai berikut:

Indeks	Periode
LQ45	Februari - Juli 2017
Kompas100	Februari - Juli 2017
Infobank15	Januari - Juni 2017
Investor33	Desember 2016 - Mei 2017
MNC36	November 2016 - April 2017

IKHTISAR SAHAM

HARGA, VOLUME DAN KAPITALISASI SAHAM PERSEROAN TAHUN 2015-2016

Ikhtisar saham BBTN secara Triwulanan dapat disampaikan sebagai berikut:

Periode		Jumlah Saham yang Beredar (Lembar)	Harga Penutupan (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Harga Tertinggi (Rp)	Rata-rata Volume Perdagangan Harian (Lot Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp juta)
2015	TW I	10.567.720.500	1.255	980	1.27	597.859	13.262.489
	TW II	10.567.720.500	1.19	1.07	1.25	244.706	12.575.587
	TW III	10.582.345.000	995	935	1.255	181.495	10.529.433
	TW IV	10.582.345.000	1.295	995	1.315	177.983	13.704.137
2016	TW I	10.590.000.000	1.745	1.28	1.865	276.471	18.479.550
	TW II	10.590.000.000	1.715	1.56	1.885	171.332	18.161.850
	TW III	10.590.000.000	1.92	1.69	2.1	225.578	20.332.800
	TW IV	10.590.000.000	1.74	1.59	1.995	140.466	18.426.600

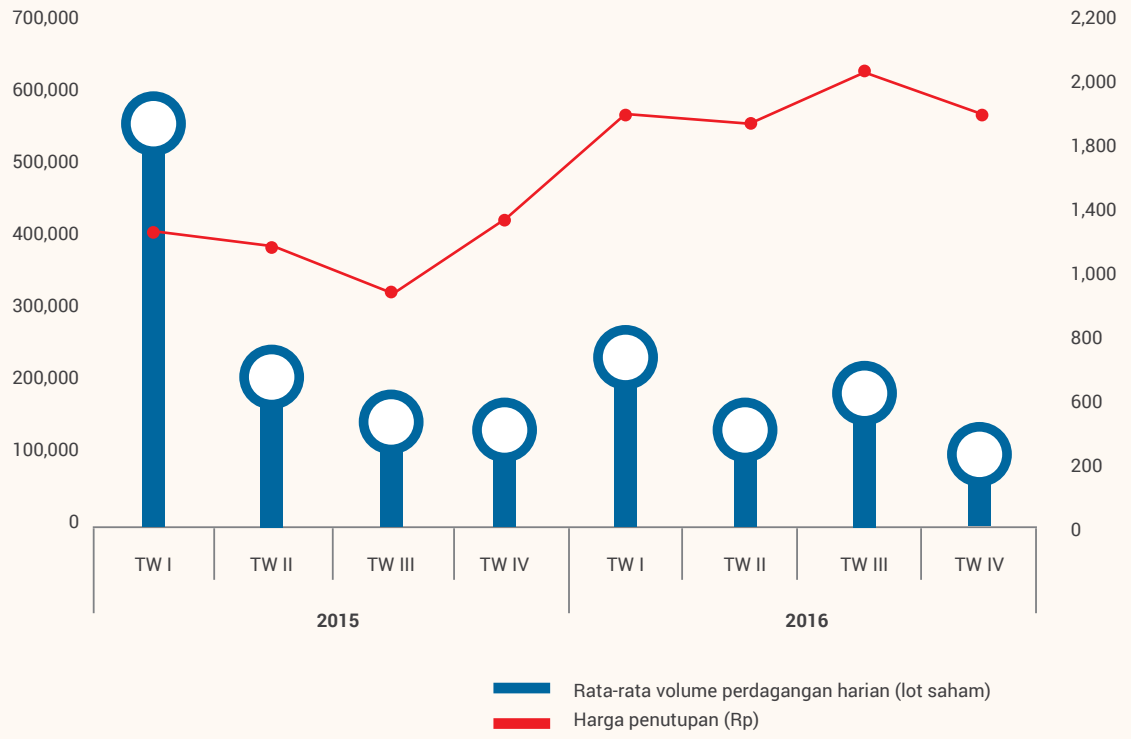

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		Bursa
						Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp juta)	
1.	Sebelum IPO					6.354.000.000	3.177.000	Bursa Efek Indonesia
2.	Setelah IPO							
3.	17 Desember 2009	Penawaran Saham Perdana	Saham Biasa Seri B	500	2.360.057.000	8.714.057.000	4.357.029	
4.	4 Februari - 17 Maret 2011	Realisasi Program MESOP		500	95.015.000	8.809.072.000	4.404.536	
5.	4 Oktober - 14 November 2011	Realisasi Program MESOP		500	26.898.500	8.835.970.500	4.417.985	
6.	1 Februari - 14 Maret 2012	Realisasi Program MESOP		500	2.544.500	8.838.515.000	4.419.258	
7.	1 Mei - 11 Juni 2012	Realisasi Program MESOP		500	5.068.000	8.843.583.000	4.421.792	
8.	23 November - 6 Desember 2012	Penawaran Umum Terbatas I		500	1.512.857.500	10.356.440.500	5.178.220	
9.	1 Februari - 15 Maret 2013	Realisasi Program MESOP		500	206.420.500	10.562.861.000	5.281.431	
10.	1 Juli - 16 Agustus 2013	Realisasi Program MESOP		500	1.992.500	10.564.853.500	5.282.427	
11.	1 Februari - 14 Maret 2014	Realisasi Program MESOP		500	407.000	10.565.260.500	5.282.630	
12.	1 Juli - 19 Agustus 2014	Realisasi Program MESOP		500	2.435.500	10.567.696.000	5.283.848	
13.	2 Februari - 16 Maret 2015	Realisasi Program MESOP		500	24.500	10.567.720.500	5.283.860	
14.	1 Juli - 18 Agustus 2015	Realisasi Program MESOP		500	14.624.500	10.582.345.000	5.291.173	
15.	1 Februari - 15 Maret 2016	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	7.655.000	10.590.000.000	5.295.000	

PENCATATAN SAHAM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*/IPO)

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian IPO tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *over subscribe* sebanyak 2,04 kali dengan nilai *proceed* sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan "*Best IPO in Indonesia* 2009" dari majalah the Asset dan "*Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009*" dari Publisher Alpha South Asia (Hongkong).

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (*RIGHTS ISSUE*)

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN. Adapun ringkasan transaksi *Rights Issue* Perseroan adalah:

Jenis Penawaran	HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal	Rp500 (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	Rp1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima Rupiah)
Jumlah Dana (Proceeds) yang Diterima	Rp1.868.379.012.500 (satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu lima ratus Rupiah)
Rasio Konversi	555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu) Saham Lama berhak atas 94.943 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	14,61% (empat belas koma enam satu persen) sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% (enam belas koma empat puluh sembilan persen) setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	23 November 2012
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*/ MESOP) dalam rangka IPO dijelaskan pada Bagian Tata Kelola Perusahaan sub bab Penerapan Tata Kelola Remunerasi Perseroan pada Laporan Tahunan ini.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI

No.	Nama Obligasi	Nominal (Rp Juta)	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo
1	Obligasi BTN I Th.1989	50.000	25 Juli 1989	25 Juli 1994
2	Obligasi BTN II Th.1990	50.000	01 Juni 1990	01 Juni 1995
3	Obligasi BTN III Th.1991	50.000	11 November 1991	11 November 1996
4	Obligasi BTN IV Th.1992	100.000	23 Januari 1993	23 Januari 1998
5	Obligasi BTN V Th.1993	150.000	31 Juli 1993	31 Juli 1998
6	Obligasi BTN Th.1995 VI-A	150.000	21 Desember 1995	21 Desember 2000
7	Obligasi BTN Th.1995 VI-B	200.000	21 Desember 1995	21 Desember 2000
8	Obligasi BTN Th.1996 VII-A	182.000	22 Juli 1996	22 Juli 2001
9	Obligasi BTN Th.1996 VII-B	18.000	22 Juli 1996	22 Juli 2001
10	Obligasi BTN VIII Th.1997	800.000	18 Juli 1997	18 Juli 2002
11	Obligasi IX BTN Th.2003	750.000	02 Oktober 2003	02 Oktober 2008
12	Obligasi X BTN Th.2004	750.000	25 Mei 2004	25 Mei 2009
13	Obligasi XI BTN Th.2005	750.000	06 Juli 2005	06 Juli 2010
14	Obligasi Subordinasi I Bank BTN Th.2004	250.000	25 Mei 2004	25 Mei 2014, call option 25 Mei 2009
15	BBTN XII 2006	1.000.000.00	19 September 2006	19 September 2016
16	BBTN XIIIA 2009	300.000.00	29 Mei 2009	29 Mei 2012
17	BBTN XIIIB 2009	300.000.00	29 Mei 2009	29 Mei 2013
18	BBTN XIIIC 2009	900.000.00	29 Mei 2009	29 Mei 2014
19	BBTN XIV 2010	1.650.000.00	11 Juni 2010	11 Juni 2020
20	BBTN XV 2011	1.300.000.00	28 Juni 2011	28 Juni 2021
21	BBTN Berkelanjutan I Tahap I 2012	2.000.000.00	05 Juni 2012	05 Juni 2022
22	BBTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	2.000.000.00	27 Maret 2013	27 Maret 2023
23	BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 A	900.000.00	08 Juli 2015	08 Juli 2018
24	BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 B	500.000.00	08 Juli 2015	08 Juli 2020
25	BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 C	800.000.00	08 Juli 2015	08 Juli 2022
26	BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 D	800.000.00	08 Juli 2015	08 Juli 2025
27	BBTN Berkelanjutan II Tahap II 2016 Seri A	1.347.000.00	30 Agustus 2016	30 Agustus 2019
28	BBTN Berkelanjutan II Tahap II 2016 Seri B	1.653.000.00	30 Agustus 2016	30 Agustus 2021

Jangka Waktu	Kupon	Peringkat	Jatuh Tempo/Belum jatuh Tempo	Bursa
5	18,75%	-	Jatuh Tempo	Bursa Efek Indonesia
5	16,25%	-	Jatuh Tempo	
5	20,00%	-	Jatuh Tempo	
5	17,00%	-	Jatuh Tempo	
5	15,25%	-	Jatuh Tempo	
5	17,25% ATD 6 bulan ditambah 1%	-	Jatuh Tempo	
5	17,25%, IRSOR 6 bulan ditambah 1,25% per thn	-	Jatuh Tempo	
5	17,125%, ATD 6 bln ditambah 1% per thn	-	Jatuh Tempo	
5	17,125%, ATD 6 bln ditambah 1% per thn	-	Jatuh Tempo	
5	14,15%	idAA-	Jatuh Tempo	
5	12,50%	idBB	Jatuh Tempo	
5	12,20%	idBB+	Jatuh Tempo	
5	12%	idA-	Jatuh Tempo	
10	12,60% (1- 5 th)	idBBB	Jatuh Tempo	
10	12,75%	idA	Jatuh Tempo	
3	11,75%	idAA-	Jatuh Tempo	
4	12,00%	idAA-	Jatuh Tempo	
5	12,25%	idAA-	Jatuh Tempo	
10	10,25%	idAA-	Belum Jatuh Tempo	
10	9,50%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
10	7,90%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
10	7,90%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
3	9,625%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
5	9,875%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
7	10,000%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
10	10,500%	idAA	Belum Jatuh Tempo	
3	8,200%	idAA+	Belum Jatuh Tempo	
5	8,750%	idAA+	Belum Jatuh Tempo	

Year Plans Successful

KRONOLOGIS PENCATATAN SEKURITISASI KPR

Perseroan telah melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR melalui skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan skema Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dengan rincian sebagai berikut:

Sekuritisasi	Jumlah Penerbitan (Rp juta)		Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	Bursa
Sekuritisasi KPR BTN ke-1 (KIKDSMF01)	Kelas A	100.000	13,00%	11 Februari 2009	10 Januari 2018	idAAA	Bursa Efek Indonesia
	Kelas B	11.111					
Sekuritisasi KPR BTN ke-2 (KIKDSMF02)	Kelas A	360.000	11,00%	10 November 2009	10 Desember 2019	idAAA	
	Kelas B	31.305					
Sekuritisasi KPR BTN ke-3 (KIKDBTN01)	Kelas A	688.500	9,25%	27 Desember 2010	27 Februari 2019	idAAA	
	Kelas B	61.500					
Sekuritisasi KPR BTN ke-4 (KIKDBTN02)	Kelas A	645.000	8,75%	16 November 2011	27 Februari 2021	idAAA	
	Kelas B	58.450					
Sekuritisasi KPR BTN ke-5 (KIKDBTN03)	Kelas A	925.000	7,75%	12 Desember 2012	7 Januari 2023	idAAA	
	Kelas B	75.000					
Sekuritisasi KPR BTN ke-6 (KIKDBTN04)	Kelas A1	403.000	8,90%	20 Desember 2013	26 Februari 2022	idAAA	
	Kelas A2	525.000	9,50%				
	Kelas B	72.000					
Sekuritisasi KPR BTN ke-7 (KIKDBTN05)	Kelas A1	723.500	10,00%	2 Desember 2014	7 September 2015	idAAA	
	Kelas A2	647.500	10,25%				
	Kelas B	129.000					
Sekuritisasi KPR BTN ke-8 (EBA-SP SMF-BTN01)	Kelas A	181.600	8,60%	4 Desember 2015	7 Maret 2022	idAAA	
	Kelas B	18.400					
Sekuritisasi KPR BTN ke-9 (EBA-SP SMF-BTN02)	Kelas A1	400.000	8,15%	1 November 2016	7 Juni 2027	idAAA	
	Kelas A2	513.000	8,75%				
	Kelas B	87.000					

KRONOLOGIS PENCATATAN *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD)

Jenis Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)	Nilai (Rp juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
NCD Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	275.000	6	7,47%	5 Agustus 2016	1 Februari 2017
NCD Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri C	400.000	12	7,80%	5 Agustus 2016	10 Agustus 2017
NCD Bank BTN Tahap III Tahun 2016 Seri A	20.000	3	7,04%	30 November 2016	28 Februari 2017
NCD Bank BTN Tahap III Tahun 2016 Seri B	351.000	6	7,26%	30 November 2016	29 Mei 2017
NCD Bank BTN Tahap IV Tahun 2016 Seri A	315.000	3	7,75%	29 Desember 2016	29 Maret 2017
NCD Bank BTN Tahap IV Tahun 2016 Seri B	185.000	6	7,74%	29 Desember 2016	3 Juli 2017
NCD Bank BTN Tahap V Tahun 2016	500.000	6	7,73%	30 Desember 2016	3 Juli 2017

IKHTISAR *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD) TELAH JATUH TEMPO

Jenis Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)	Nilai (Rp juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri A	280.000	6	9,00%	05 Desember 2014	4 Juni 2015
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri B	45.000	12	9,25%	05 Desember 2014	27 November 2015
NCD I Bank BTN Tahap I Tahun 2014 Seri C	300.000	15	9,50%	05 Desember 2014	26 Februari 2016
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri A	470.000	6	9,00%	26 Februari 2015	26 Agustus 2015
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri B	85.000	12	9,25%	26 Februari 2015	18 Februari 2016
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri C	10.000	15	9,50%	26 Februari 2015	19 Mei 2016

Jenis Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)	Nilai (Rp juta)	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
NCD I Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri D	440.000	18	9,70%	26 Februari 2015	18 Agustus 2016
NCD I Bank BTN Tahap III Tahun 2015	500.000	5	9,00%	17 Februari 2015	15 Juli 2015
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri A	330.000	6	8,75%	30 April 2015	30 Oktober 2015
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri B	620.000	12	9,00%	30 April 2015	30 April 2016
NCD II Bank BTN Tahap II Tahun 2015 Seri B	620.000	12	9,00%	30 April 2015	30 April 2016
NCD Bank BTN Tahap I Tahun 2016	740.000	3	6,85%	9 Juni 2016	9 September 2016
NCD Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	440.000	3	7,19%	5 Agustus 2016	3 November 2016

KEBIJAKAN DAN KRONOLOGI PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran dividen final tahun buku 2015 sebesar 20% dari laba bersih tahun 2015 atau sebesar Rp370.181.460.573,60 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma enam nol Rupiah). Nilai dividen per saham yang dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2016 adalah sebesar Rp34,96 atau naik 65,6% dari nilai pembayaran dividen per saham tahun 2015.

Tabel Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tahun 2011 - 2015

Tahun Buku	Dividen Tunai (Rp miliar)	Laba Bersih (Rp miliar)	*Dividend Payout Ratio*	Dividen Per Saham (Rp)	Tanggal Pembayaran
2015	370	1.851	20%	34.96	12 Mei 2016
2014	223	1.116	20%	21.11	24 April 2014
2013	469	1.562	30%	44.36	7 April 2014
2012	409	1.364	30%	38.74	10 Mei 2013
2011	224	1.119	20%	25.31	30 Mei 2012

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL YANG MAKSIMAL DIPEROLEH MELALUI PEMASARAN YANG TERINTEGRASI DARI SELURUH PRODUK BANK. STRATEGI PEMASARAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF MEMANTAPKAN POSISI TERBAIK PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN YANG KETAT.

ANALISIS INDUSTRI

INDUSTRI KEUANGAN MASIH MENJADI SALAH SATU KONTRIBUTOR TERBESAR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. KONDISI EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL MENJADI FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN OPERASIONAL INDUSTRI KEUANGAN TERUTAMA INDUSTRI PERBANKAN. SENSITIVITAS PERBANKAN TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN KONDISI EKONOMI SANGAT DIBUTUHKAN DEMI KEBERLANJUTAN BISNIS (*SUSTAINABLE BUSINESS*) PERUSAHAAN.

PEREKONOMIAN DUNIA

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2016, pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2016 melemah dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 diprediksi sebesar 3,1% yoy menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 3,2% yoy. Proyeksi tersebut salah satunya didasarkan karena ketidakpastian seputar keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

IMF memperkirakan ekonomi negara-negara maju tumbuh 1,6% yoy pada tahun 2016, namun IMF mempertahankan perkiraannya untuk pertumbuhan negara-negara berkembang, yang diproyeksikan akan tumbuh 4,2% yoy pada tahun 2016.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2013-2016 (% yoy)

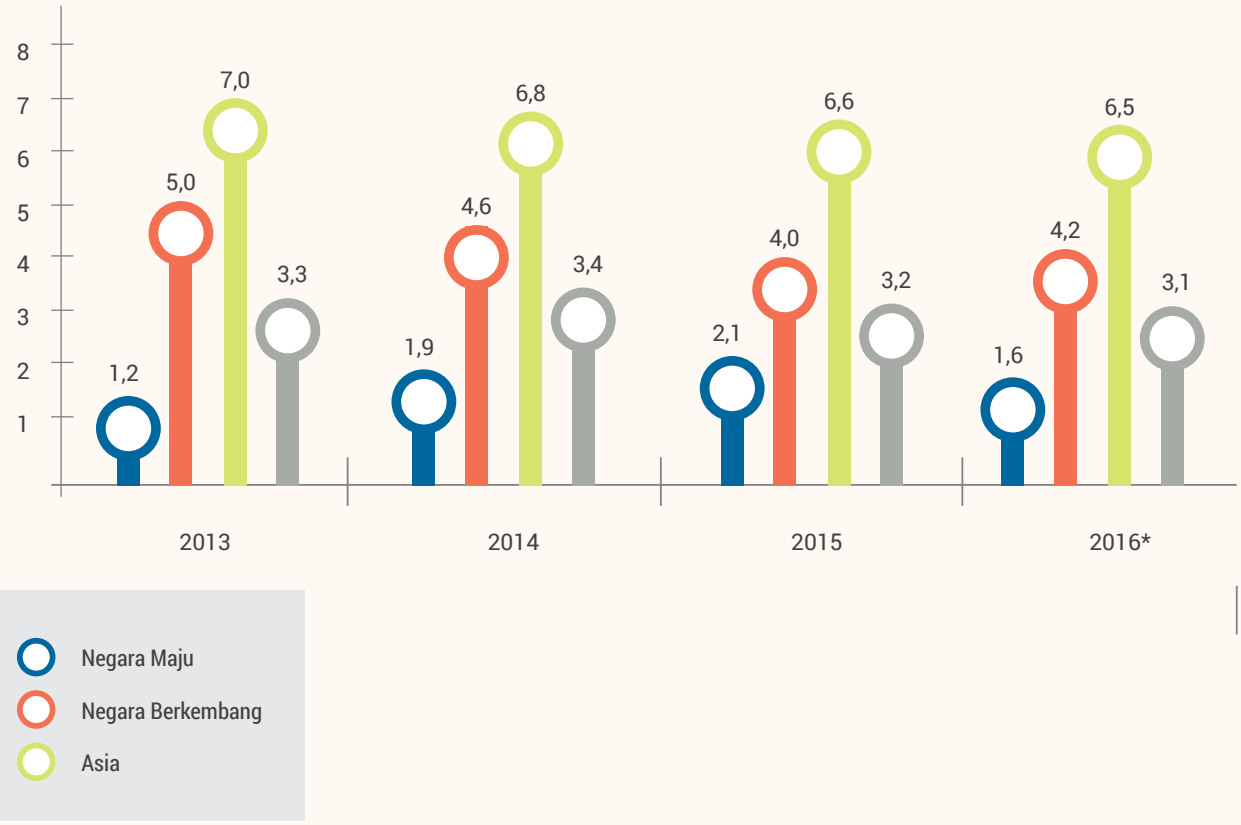

*Proyeksi

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2016

Dalam cakupan regional, Asia masih terus memimpin pertumbuhan ekonomi global dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,5% yoy pada tahun 2016. Pasar saham tetap optimis, dan arus modal terus mengalir ke Asia, walaupun sempat terjadi penyesuaian pada saat referendum.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% yaitu lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62%.

Grafik Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)

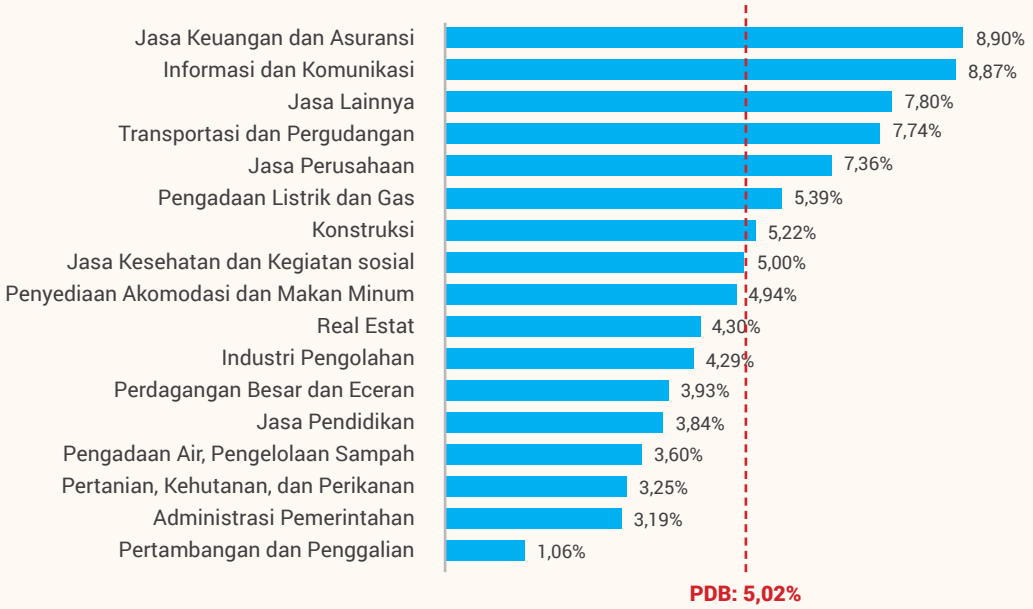

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor usaha tersebut dan terus menunjukkan peran dan kontribusinya dalam memperkuat perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2016 laju inflasi dapat terjaga pada kisaran batas bawah target Bank Indonesia sebesar 4 ± 1%, dan mengakhiri tahun 2016 pada level 3,02% yoy. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan domestik, stabilnya harga-harga yang ditentukan pemerintah (*administered prices*), menurunnya ekspektasi inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Ke depannya Pemerintah dan Bank Indonesia akan meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan inflasi serta memitigasi risiko inflasi yang mungkin timbul terkait rencana penerapan beberapa kebijakan *administrered prices*.

Suku bunga acuan Bank Indonesia selama tahun 2016 mengalami beberapa kali penurunan, seiring dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya tekanan inflasi. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, maka terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menggunakan BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (*7-D RR Rate*) sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI Rate. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia memandang bahwa melalui stabilitas makroekonomi yang terjaga,

khususnya inflasi yang terkendali pada kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar yang relatif stabil, maka ruang bagi pelonggaran moneter masih terbuka.

Grafik Inflasi, BI Rate, dan BI 7-Day Reverse Repo Rate Tahun 2016

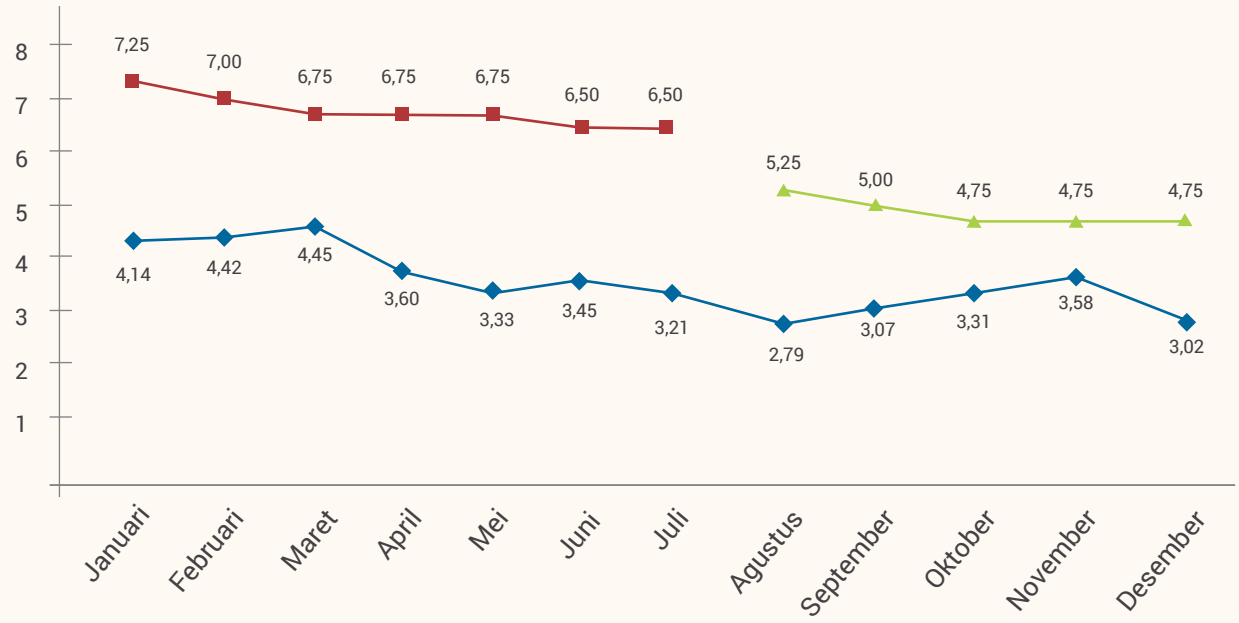

Sumber: www.bi.go.id

KONDISI INDUSTRI PERBANKAN

Kondisi sistem keuangan Indonesia sampai dengan November 2016 masih menunjukkan kondisi yang kuat yang ditandai dengan rasio kecukupan modal (CAR) dan *net interest margin* (NIM) yang terus meningkat. Namun pada saat yang bersamaan industri perbankan menghadapi masalah kualitas aset yang ditandai dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terus naik.

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Namun demikian, transmisi melalui jalur kredit masih belum optimal, terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan yang masih lemah, termasuk permintaan investasi dari korporasi yang belum kuat.

Sepanjang tahun 2016 Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 150bps yang konsisten dengan upaya mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Penurunan ini

diikuti oleh penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga sebesar 131bps (Januari-November), namun suku bunga Kredit hanya turun sebesar 65bps (Januari-November).

Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit masih terbatas yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit di bulan Desember 2016 sebesar 7,9% yoy, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan November dan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 8,5% yoy dan 10,4% yoy. Tampaknya banyak korporasi yang mengambil alternatif pembiayaan di luar sektor perbankan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan melalui pasar modal, seperti penerbitan saham, obligasi, dan *Medium Term Notes* (MTN). Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan Desember 2016 juga meningkat dibandingkan November yaitu dari 8,4% yoy menjadi 9,6% yoy, peningkatan DPK tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,3% yoy.

Kondisi perbankan di Indonesia dapat tergambar dari tabel berikut yang menunjukkan beberapa indikator operasional perbankan di Indonesia.

Tabel Kegiatan Usaha Perbankan Tahun 2013-2016

	Unit	2013	2014	2015	2016
Aset	Rp miliar	4.954.467	5.615.150	6.129.357	6.729.799
	% yoy	16,23%	13,34%	9,16%	9,80%
Kredit	Rp miliar	3.292.874	3.674.308	4.057.904	4.377.195
	% yoy	21,60%	11,58%	10,44%	7,87%
DPK	Rp miliar	3.663.968	4.114.420	4.413.056	4.836.758
	% yoy	13,60%	12,29%	7,26%	9,60%
Kinerja Perbankan					
CAR	%	18,13%	19,57%	21,39%	22,93%
NIM	%	4,89%	4,23%	5,39%	5,63%
BOPO	%	74,08%	76,29%	81,49%	82,22%
LDR	%	89,70%	89,42%	92,11%	90,70%
NPL	%	1,77%	2,16%	2,49%	2,90%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2016

POSISI PERSEROAN DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Dalam industri perbankan nasional, Perseroan senantiasa melakukan berbagai perbaikan untuk ikut berperan dalam mengembangkan industri perbankan nasional. Berikut pertumbuhan kinerja Perseroan terhadap pertumbuhan industri perbankan nasional.

Perseroan	Grafik	Perbankan Indonesia
Pada tahun 2016 Aset Perseroan mencapai Rp214.168 miliar meningkat 24,66% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp171.808 miliar.	**Pertumbuhan Aset** 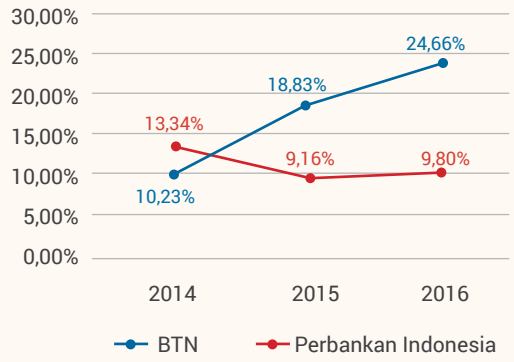	Aset perbankan nasional sampai dengan akhir tahun 2016, mencapai Rp6.729.799 miliar meningkat 9,80% dibandingkan akhir tahun 2015 sebesar Rp6.129.357 miliar
Simpanan nasabah (dana pihak ketiga) Perseroan tahun 2016 mencapai Rp159.988 miliar meningkat 25,28% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp127.709 miliar	**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga** 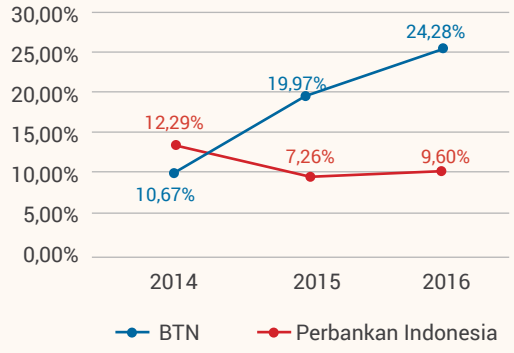	Dana Pihak Ketiga perbankan nasional sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai Rp4.836.758 miliar meningkat 9,60% dibandingkan akhir tahun 2015 sebesar Rp4.413.056 miliar.
Pinjaman yang Diberikan Perseroan tahun 2016 sebesar Rp162.330 miliar meningkat 18,57% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp136.905 miliar.	**Pertumbuhan Pinjaman Yang Diberikan** 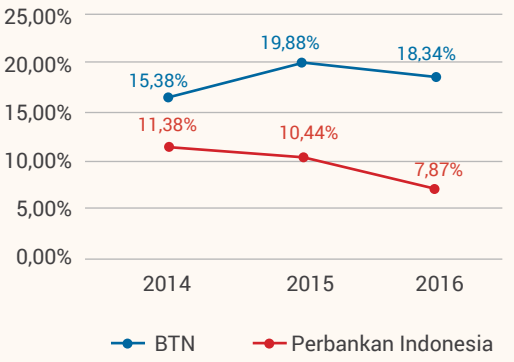	Kredit perbankan nasional sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp4.377.195 miliar meningkat 7,87% dibandingkan akhir tahun 2015 sebesar Rp4.057.904 miliar.

Perseroan	Grafik	Perbankan Indonesia
Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan tahun 2016 sebesar 20,34% meningkat dari tahun 2015 sebesar 16,97%.	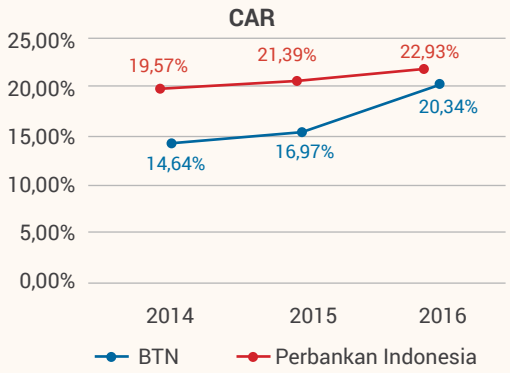	Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan nasional pada Desember tahun 2016 sebesar 22,93% meningkat dari tahun 2015 sebesar 21,39%.
Rasio Pengembalian terhadap Aset (ROA) Perseroan tahun 2016 sebesar 1,76% meningkat dari tahun 2015 sebesar 1,61%	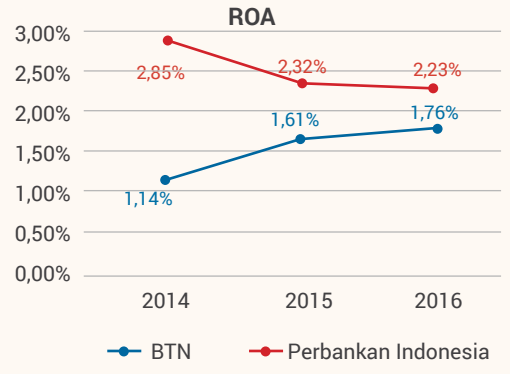	Rasio Pengembalian terhadap Aset (ROA) perbankan nasional per 31 Desember tahun 2016 sebesar 2,23% menurun dari tahun 2015 sebesar 2,32%.
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perseroan tahun 2016 sebesar 82,48% turun dari tahun 2015 sebesar 84,83%.	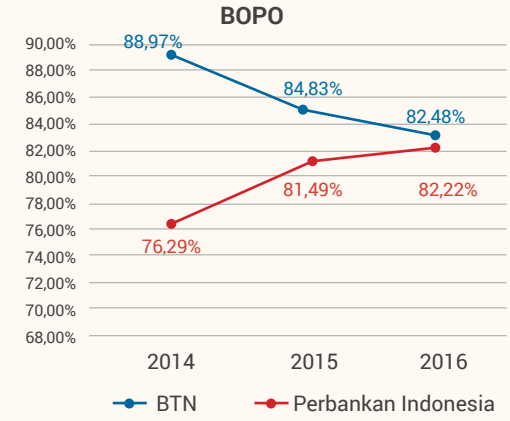	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan nasional Desember tahun 2016 sebesar 82,22% naik dari tahun 2015 sebesar 81,49%.
Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Perseroan tahun 2016 sebesar 2,84% turun dari tahun 2015 sebesar 3,42%.	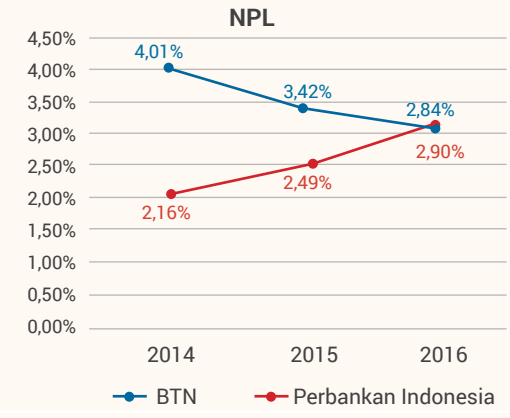	Rasio *Non Performing Loan* (NPL) perbankan nasional Desember tahun 2016 sebesar 2,90% naik dari tahun 2015 sebesar 2,49%.

ASPEK PEMASARAN

PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL YANG MAKSIMAL DIPEROLEH MELALUI PEMASARAN YANG TERINTEGRASI DARI SELURUH PRODUK BANK. STRATEGI PEMASARAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF MEMANTAPKAN POSISI TERBAIK PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN YANG KETAT DAN KONDISI EKONOMI YANG TIDAK MENENTU.

STRATEGI PEMASARAN

Perseroan terus menyempurnakan strategi pemasaran sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis. Penetapan strategi tersebut diarahkan untuk menjadikan Perseroan sebagai Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan. Posisi Perseroan ini menjadi kunci utama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan.

ARAH STRATEGI PEMASARAN

Pengalaman dan kompetensi Perseroan yang ditunjuk Pemerintah sebagai Bank pelaksana utama Program Sejuta Rumah sudah menjadi *brand image* yang sangat kuat. Didukung dengan jumlah penyaluran KPR lebih dari 3,8 juta unit dan kompetensi yang dimiliki sebagai Bank fokus perumahan, menjadikan Perseroan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional khususnya dibidang perumahan dan sekaligus peluang bisnis bank kedepan.

Selain itu, dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun dalam pembiayaan perumahan (sejak KPR pertama tahun 1976), secara terus menerus menjadikan Perseroan memiliki *Core competency* yang tidak dimiliki oleh bank lain. *Core competency* tersebut adalah sebagai berikut:

Core Competency Perseroan

Supremasi KPR Subsidi	*Relationships*	Aksesibilitas	*World Class Service Level*	*Housing Finance Expertise*
Dominan dalam penguasan pasar KPR Subsidi dengan *market share* KPR > 96%	• Bertindak sebagai *Integrator* seluruh *stakeholders* bisnis Perumahan • Mempertemukan dan mengintegrasikan sisi *supply*: pemilik lahan, pengembang, pemasok dan sisi *demand*: masyarakat, investor)	• Memiliki layanan yang dapat dijangkau masyarakat • Jaringan kantor • Jaringan berbasis *digital banking (mobile banking, internet banking, property portal)* • Tim *marketing* KPR yang *mobile* (Griya KPR)	• Memiliki standar layanan berkelas dunia • *Operational excellence* (kecepatan dan ketepatan proses KPR) • Variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat • Kualitas kredit yang baik	• Sumber Daya Manusia memiliki *expertise* di bidang pembiayaan perumahan • Sebagai pusat informasi, keahlian, dan riset tentang pembiayaan perumahan (*Housing Finance Center*)

Langkah strategi Perseroan di tahun 2016 sesuai dengan *core competency* diatas secara umum adalah sebagai berikut:

Penguatan Bisnis : Bidang Kredit

Tahap pertama dari transformasi di bidang kredit adalah fokus pada pembiayaan perumahan untuk mendukung program sejuta rumah yaitu pada produk KPR dan kredit konstruksi. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan pembiayaan sepanjang *value change* perumahan baik ke arah industri terkait penyediaan rumah maupun bisnis terkait pengguna rumah. Tahap terakhir adalah perluasan ke sektor non perumahan. Untuk jangka pendek dan menengah langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

a. Kredit Perumahan Subsidi

Memperkuat kerjasama dengan regulator perumahan (Kemenpera & BLU PPP) dan lembaga/instansi terkait pembiayaan perumahan seperti BPJS, Bapertarum, Pemda, dan lain-lain untuk menjalankan program sejuta rumah.

b. Kredit Perumahan Non Subsidi

Memperkuat basis KPR pada segmen menengah bawah dan mengembangkan segmen menengah atas melalui kerjasama kredit program dengan BUMN/perusahan besar, pengembangan produk, dan peningkatan layanan yang lebih baik.

c. Kredit Konsumer Non KPR

Mengembangkan pembiayaan bagi pengguna rumah baik untuk keperluan renovasi rumah, isi rumah, maupun pendukung aktivitas pengguna rumah. Strategi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi *customer based* debitur KPR baik eksisting maupun yang sudah lunas.

d. Kredit Komersial

- Untuk kredit konstruksi ditujukan untuk mendukung *supply* rumah (KPR) melalui penyediakan modal kerja konstruksi, pembebasan lahan (subsidi) maupun infrastruktur perumahan bagi pengembang/*developer*.
- Pembiayaan komersial diarahkan pada *value chain* perumahan, yaitu untuk industri penyedia rumah seperti pabrik semen, kayu, dan lain-lain.

e. Kualitas Kredit

Memperbaiki kualitas kredit melalui penguatan *collection management system* dan *asset management.*

Penguatan Bisnis: Bidang Dana

Penguatan pendanaan adalah mengembangkan dana berjangka panjang dan murah yang mendukung kegiatan Bank yaitu:

a. Pendanaan Institusional Terkait Kerjasama Kredit

Mengembangkan kerjasama institusional dengan lembaga terkait pembiayaan KPR yaitu penempatan dana dari lembaga/institusi yang terkait kerjasama kredit.

b. Memperkuat Segmen Dana Ritel

Memperkuat pendanaan berbiaya murah terutama tabungan masyarakat yaitu dilakukan adalah:
- Meningkatan dana ritel berbasis nasabah KPR.
- Mendorong realisasi Tapera.

c. Memperkuat Pendanaan Jangka Panjang Berbasis *Capital Market*
- Pinjaman dana lembaga.
- Pinjaman luar negeri.
- Sekuritisasi aset.

Penguatan Infrastruktur (*Infrastructure Transformation*)

Transformasi insfrastruktur (*infrastructure transformation*) baik dari sisi Teknologi Informasi (TI), *Good Corporate Corporation, Risk Management, Compliance,* dan *Delivery Channel,* akan diarahkan untuk mendukung strategi Perseroan sebagai bank fokus perumahan. Strategi tersebut masih relevan untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem *Digital Banking*

Sebagai jantung dari pelayanan bisnis perbankan modern, sistem *digital banking* Perseroan harus dapat menjawab kebutuhan pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat dengan biaya efisien.

b. Peningkatan Kualitas Proses

Untuk menjadi bank dengan standar layanan kelas dunia, peningkatan kualitas proses menuju *operational excellence* dibutuhkan untuk mendukung transformasi Perseroan.

c. *Delivery Channel*

Mengembangkan *delivery channel* melalui pengembangan jaringan kantor, ATM, serta *electronic channel* untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah terhadap *delivery channel* Perseroan.

Penguatan Sumber Daya Manusia (*People Transformation*)

People transformation difokuskan pada pelaksanaan budaya kerja baru dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah strategis yang dilakukan adalah:

a. Pelaksanaan Budaya Perusahaan.

Untuk mendukung lompatan transformasi, Perseroan melakukan penguatan nilai-nilai budaya perusahaan baru hasil penyelarasan nilai-nilai budaya perusahaan sebelumnya. Inisiatif yang dilakukan adalah:

- Internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai baru Perseroan "BTN SIIPS"
- Membangun kebanggaan bersikap laku profesional dan mengurangi pegawai yang menghambat budaya organisasi.

b. Mengembangkan *Human Capital*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengutamakan produktivitas pegawai.

Strategi utama yang dilakukan adalah:

- Mengembangkan *human capital* yang kompeten (*training*, pendidikan, dan lain-lain) agar memiliki kompetensi khusus/*expertise* bidang *housing finance*.
- Pemenuhan dan alokasi *human capital* secara pareto untuk mendukung bisnis.

STRATEGI PEMASARAN PRODUK

Strategi pemasaran diturunkan secara fokus untuk diterapkan pada masing-masing segmen bisnis produk Perseroan, sehingga dapat memberikan layanan yang tepat sesuai dengan pasar sasaran.

Segmen Kredit

KPR Subsidi

Perseroan mendominasi penyaluran KPR Subsidi di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar > 96% per 31 Desember 2016. Tingginya pangsa pasar ini terjadi karena Perseroan memiliki sejarah yang panjang dalam menyalurkan KPR Subsidi, sejak ditunjuk oleh Pemerintah pada tahun 1974.

Perseroan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar ini dari tahun ke tahun. Beberapa strategi pemasaran yang telah dilaksanakan terkait KPR Subsidi di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Perseroan menjadi salah satu dari 25 bank yang ditunjuk (melalui mekanisme penawaran) untuk menyalurkan KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP),
- Perseroan menjadi satu-satunya bank yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).
- Perseroan terus menjalin kerjasama dengan yang baik dengan para pengembang perumahan di Indonesia sebagai upaya penyediaan *supply* rumah,
- Perseroan juga mengembangkan *Housing Finance Center* (HFC), serta bekerjasama dengan *School of Business and Management* Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) untuk mencetak developer muda dalam program Mini MBA
- Meluncurkan kebijakan terbaru yaitu KPR bersubsidi untuk golongan masyarakat sektor informal

KPR Non Subsidi dan Kredit Konsumer Lainnya

1. Menyelenggarakan program *property expo* baik untuk skala nasional maupun regional,
2. Mengadakan gathering dengan developer dan mitra perusahaan/instansi serta mengadakan BTN Property Award sebagai bentuk penghargaan kepada developer dan mitra,
3. Kerjasama dengan BUMN dan Instansi mitra/ nasabah lembaga untuk program HOP, Kring, dan Top Up KAR serta kerjasama dengan Agen Property,
4. Pengembangan portal BTN Poperty untuk memudahkan masyarakat mengakses property seluruh Indonesia.

Segmen Pendanaan

Commercial Funding

Pada segmen pendanaan, strategi pemasaran produk yang diterapkan terbagi menjadi enam fokus diantaranya Aliansi Strategis, *Delivery Channel*, Organisasi dan Personil, Penambahan Fitur dan Layanan, *Promotion* serta *Services*.

a. Aliansi Strategis

Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan skim kerjasama yang bersaing di pasar pada masing-masing segmen, yaitu:

1. Kerjasama B2B (*Business to Business*) untuk Peningkatan Giro
   - *Government & Local Government*
     - Kerjasama pengelolaan rekening operasional Kementerian,

- Kerjasama penerimaan Angsuran Bantuan Pemerintah (LPDB),
- Kerjasama penyaluran dana program pemerintah,
- Kerjasama penyaluran gaji dan tunjangan PNS,
- Kerjasama peneriaam pajak daerah.

• BUMN/BUMD/*Private Corporate*
- Kerjasama penerimaan premi asuransi,
- Kerjasama penerimaan pembayaran (antara lain pembelian produk dan penerimaan tol),
- Kerjasama penerimaan *biller* baru,
- Kerjasama settlement Bank melalui *E-Commerce* untuk transaksi *online shop*,
- Kerjasama *back to back*,
- Kerjasama pengelolaan operasional keuangan Perusahaan,
- Kerjasama PPO (Program Pengembangan Operasional),
- Kerjasama penerimaan pembayaran/*collecting agent* dengan Perusahaan *switching provider* dan gerai modern,
- Kerjasama terkait pemberian kredit komersial.

• *Education & Others*
- Kerjasama penerimaan pembayaran SPP *direct*,
- Kerjasama penerimaan pembayaran SPP melalui *collecting agent*,
- Kerjasama PPO,
- Pengelolaan rekening operasional institusi,
- Kerjasama penyaluran dana program pemerintah untuk bantuan pendidikan.

2. Kerjasama B2B untuk Peningkatan Deposito

• *Government & Local Government*
- Kerjasama pengelolaan rekening BLU Kementerian,
- Kerjasama dana program pemerintah,
- Kerjasama pengelolaan iuran anggota,
- Kerjasama penerimaan pajak daerah.

• BUMN/BUMD/*Private Corporate*
- Kerjasama *back to back*,
- Rekening investasi,
- Kerjasama pengelolaan iuran anggota.

• Education & Others
- Kerjasama pengelolaan rekening investasi institusi,
- Kerjasama PPO Deposito,
- Kerjasama *back to back*.

b. *Delivery Channel*

Strategi optimalilasi *delivery channel* diterapkan melalui beberapa strategi yaitu:
- Pengembangan *channel* pembayaran SPP online melalui *mobile banking*, *internet banking* dan gerai modern/PPOB,
- Kerjasama dengan PPOB untuk penerimaan *biller* PLN, PGN, BPJS TK dan BPJS KS,
- Optimalisasi dan *enhancement delivery channel* lembaga pendidikan yang telah bekerjasama SPP online dengan Perseroan,
- Pembukaan *outlet* Perseroan di kantor nasabah lembaga potensial,
- Kerjasama pembayaran klaim (antara lain BPJS TK, Jasa Raharja)
- Penempatan EDC pada *merchant/outlet* nasabah lembaga.

c. Organisasi dan Personil
- Penyelesaian struktur organisasi di tingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan segmen bisnis nasabah,
- Pemenuhan personil *Commercial Funding Unit* Kantor Cabang,
- Peningkatan kompetensi: *training (product knowledge, selling skill, presentation skill, services, appearance, motivation),*
- Peningkatan produktivitas: *reward* Giro plus bulanan, reward surplus DPK murah Triwulanan, apresiasi DPK murah terbaik tahunan.

d. Penambahan Fitur dan Layanan
- Layanan LPDB,
- Penerimaan pajak daerah,
- Penerimaan SPP,

- *Biller* PDAM,
- Penerimaan iuran lingkungan dan lainnya melalui *switching provider* (kerjasama *developer* antara lain Sinar Mas dan Alam Sutra).

e. *Promotion*

- Optimalisasi program pengembangan operasional untuk peningkatan posisi Giro pada segmen *education & government,* dan program Giro Plus yang fokus pada *private company,*
- Penayangan TVC Giro Perseroan pada stasiun TV skala nasional dan program acara yang sesuai dengan target produk Giro Perseroan,
- Pemasangan iklan Giro Perseroan pada media cetak,
- Pemasangan iklan Giro Perseroan pada *billboard* elektronik,
- Pembuatan dan distribusi banner, brosur, dan *booklet* produk-produk commercial funding,
- Pembuatan *souvenir* nasabah lembaga,
- *Customer event*.

f. *Services*

Dana *Retail*

Strategi di bidang pendanaan ritel difokuskan untuk mendukung fokus bisnis pada perumahan atau kredit khususnya program Sejuta Rumah, adapun strategi yang akan dikembangkan adalah:

- Meningkatkan aliansi strategis untuk peningkatan dana,
- Optimalisasi *delivery channel*,
- Optimalisasi program *sales* dan promosi,
- Mengembangkan produk dan fitur baru yaitu dengan meluncurkan Tabungan Siap! dan Tabungan RDN (Rekening Dana Nasabah),
- Memperkuat *selling* dan komunikasi *marketing*.

Segmen Syariah

Perseroan senantiasa mengembangkan segmen syariah sebagai upaya menunjang bisnis inti dalam Bank dalam rangka mendukung program sejuta rumah. Inisiatif strategi dirancang untuk optimalisasi kinerja produk dan layanan. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan antara lain:

- Optimalisasi Tabungan

  Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan meluncurkan produk baru dalam bentuk Tabungan BTN Emas iB dan memperluas peruntukan Tabungan BTN Haji iB menjadi Tabungan BTN Haji dan Umroh iB
- Program Hadiah Langsung

  Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan memberikan hadiah langsung kepada nasabah yang memiliki tabungan berupa diskon pembelian emas atau *voucher* lain sesuai masa promosi dengan pengendapan dana dalam jangka waktu tertentu.
- Program *Sales Culture*

  Setiap pegawai UUS Perseroan selalu mereferensikan produk dan jasa perbankan syariah Perseroan kepada keluarga maupun rekanannya, agar semakin luas pelayanan yang diberikan UUS Perseroan, termasuk penggunaan kartu debit Visa Syariah yang bekerjasama dengan merchant syariah di seluruh wilayah Indonesia. Selain menjadikan pegawai menjadi konsultan keuangan syariah di masyarakat, UUS Perseroan juga bekerjasama dengan beberapa komunitas penjual maupun portal *online* dalam memperluas layanan perbankan syariah Perseroan.
- *Branchless Banking*

  Mobile Banking BTN Syariah dipromosikan secara intensif untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu bertatap muka.
- Program Optimalisasi Giro

UUS Perseroan meningkatkan kerjasama strategis ke beberapa lembaga baru seperti BUMN, Perusahaan Swasta, Badan Wakaf, BAZIS, dan Pesantren untuk meningkatkan pelayanan ke nasabah.

- Optimalisasi Pembiayaan Perumahan dan Non Perumahan

  Layaknya unit konvensional, sektor usaha perumahan menjadi bisnis inti UUS Perseroan, sehingga kegiatan penjualan kepada pengembang KPR menjadi salah satu fokus yang diperhatikan Perseroan. Selain itu, developer gathering dan partisipasi aktif dalam event pameran juga selalu dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan. Disamping itu, UUS Perseroan juga memperluas pembiayaan pada sektor non perumahan diantaranya melalui kerjasama dengan mitra travel haji & umrah, distributor perabotan rumah, dan distributor kendaraan bermotor.

- Program Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

  Perseroan selalu berupaya mempertahankan kondisi likuiditas dari UUS nya, dengan melakukan langkah diantaranya adalah pencegahan pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sentralisasi *desk call* dan memberikan reward terhadap nasabah yang tergolong lancar sehingga dapat menurunkan kolektibilitas 2. Restrukturisasi proaktif dan perbaikan sistem insentif dilakukan untuk menurunkan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan untuk menyelesaikan kolektibilitas 5, Perseroan melaksanakan *Investor Gathering* dan menyusun katalog Rumah Lelang.

- Peningkatan *Fee Based Income*

  UUS Perseroan senantiasa memaksimalkan realisasi pembiayaan untuk mengoptimalkan pendapatan administrasi pembiayaan (*Fee Based Income*), serta mengoptimalisasi penerimaan pembiayaan pasif.

- Perluasan Jaringan Kantor

  Perseroan berkomitmen terhadap pelayanan nasabah syariah dengan melakukan penambahan jaringan kantor selama tahun 2016 dengan rincian 1 Kantor Cabang Syariah, 15 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 3 Kantor Kas Syariah baru.

Segmen Jasa dan Layanan Perbankan

Selain melalui pendapatan bunga, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan non bunga atau *fee income*, melalui pengembangan jasa dan layanan kepada nasabah.

Bisnis Kartu

1. Sinergi BUMN dengan Garuda Indonesia melahirkan kartu Debit BTN-GARUDA dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah Perseroan yang terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
2. Kemudahan pembayaran transaksi perjalanan menggunakan Grab dan Uber dengan fasiitas Kartu Debit BTN Visa.
3. Melakukan kerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro melalui penyediaan kartu yan dapat berfungsi sebagai kartu Anggota & pre-paid.
4. Kartu e-Retribusi untuk para pedagang di pasar Kota Surakarta yang dapat digunakan untuk membayar retribusi pasar.
5. Sinergi BUMN dengan ketiga Bank BUMN lainnya dan Jasa Marga meresmikan kerjasama pembayaran e-Payment Toll Nasional untuk masyarakat agar dapat menikmati layanan pembayaran tol elektronik yang lebih luas lagi dan terintegrasi secara menyeluruh.

Bisnis Digital dan *Electronic Banking*

1. *Launching* BTN *Digital Solution* sebagai *integrated mobile application* yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses secara online berbagai fitur dan produk Bank BTN.
2. Bekerjasama dengan Go-Jek untuk layanan Top Up Go-Pay sebagai bentuk kemudahan bagi nasabah pengguna transportasi online.
3. Pengembangan fitur-fitur didalam mobile banking, internet banking dan ATM (pembayaran SPP, pembayaran kartu kredit, pembayaran pajak kendaraan bermotor)

Bisnis *Wealth Management*

Perseroan juga mengoptimalkan bisnis *wealth management* dalam memasarkan produk non banking. Mekanisme pemasaran *wealth management* dilakukan melalui:

- Internalisasi karyawan dan eksternalisasi nasabah eksisting,
- Email dan SMS ke seluruh nasabah prioritas,
- Akuisisi nasabah,
- *Print ad magazine* dan *print ad intern*,
- *Small event* nasabah akuisisi,
- *Flyer*.

PANGSA PASAR

Perseroan terus berupaya memperluas pangsa pasar di industri perbankan nasional. Berbagai strategi pemasaran telah diterapkan untuk menunjang pertumbuhan kinerja masing-masing produk melalui bertambahnya nasabah baru dan loyalitas nasabah eksisting dapat dipertahankan. Berikut gambaran pangsa pasar Perseroan di industri perbankan nasional untuk setiap segmen bisnis.

Segmen Pendanaan

Grafik Pangsa Pasar Tabungan Tahun 2014-2016* (%)

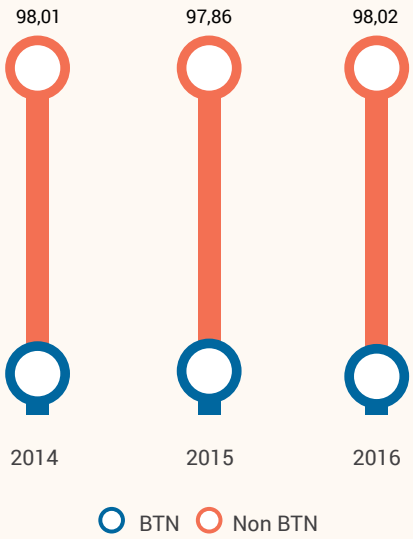

Grafik Pangsa Pasar Deposito Tahun 2014-2016* (%)

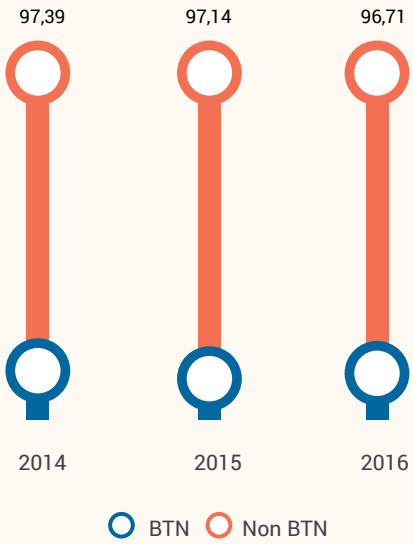

*Data Per Oktober 2016

Segmen Kredit

Grafik Pangsa Pasar KPR/KPA Tahun 2014-2016* (%)

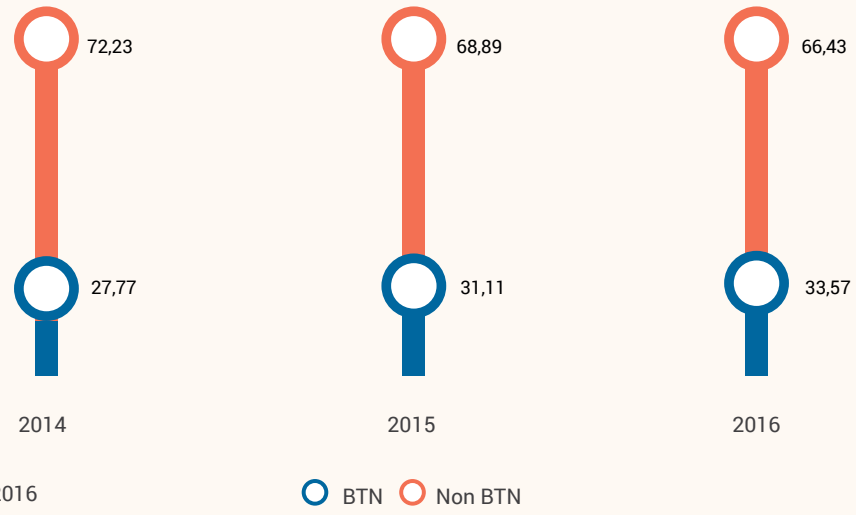

*Data Per September 2016

Segmen Syariah

Grafik Pangsa Pasar Pembiayaan Akad Murabahah BTN Syariah Tahun 2014-2016* (%)

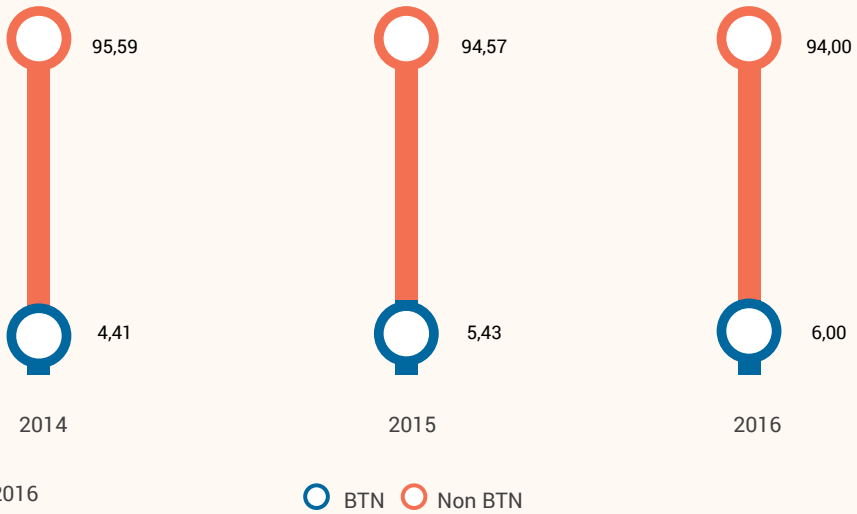

*Data Per September 2016

ANALISIS OPERASIONAL

KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN DI BERBAGAI SEGMEN DI TAHUN 2016 BERHASIL MENCAPAI TARGET SECARA OPTIMAL YANG MENDORONG PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN SECARA SIGNIFIKAN.

KINERJA OPERASIONAL PER SEGMEN

Kinerja operasional Perseroan terbagi menjadi empat segmen bisnis yaitu Perbankan Konsumer, Perbankan Komersial, Unit Usaha Syariah, serta Jasa dan layanan Perbankan. Secara singkat segmen bisnis Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:

Segmen Bisnis Perseroan

PERBANKAN KONSUMER

Produk Kredit Konsumer

Produk Kredit Perseroan terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk kredit perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit konsumer disalurkan dalam mata uang Rupiah. Sepanjang tahun 2016, Perseroan berhasil menyalurkan kredit konsumer sebesar Rp34.777.132 juta meningkat 14,40% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp30.399.375 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penyaluran produk kredit perumahan yaitu KPR Subsidi yang mengalami peningkatan sebesar 32,98% dari tahun sebelumnya.

Tabel Penyaluran Produk Kredit Perbankan Konsumer Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kredit Perumahan	21.738.112	21.298.660	26.295.864	14,49	30.106.340
KPR Subsidi	6.018.584	7.344.542	11.718.433	32,98	15.582.892
KPR Non Subsidi	13.267.190	11.568.776	12.194.611	4,35	12.724.741
Kredit Perumahan Lainnya	2.452.338	2.385.342	2.382.820	(24,51)	1.798.707
Kredit Non Perumahan	2.105.169	2.386.264	4.103.511	13.82	4.670.792
Total	**23.843.281**	**23.684.924**	**30.399.375**	**14,49**	**34.777.132**

Grafik Penyaluran Produk Kredit Perbankan Konsumer Tahun 2013-2016 (Rp juta)

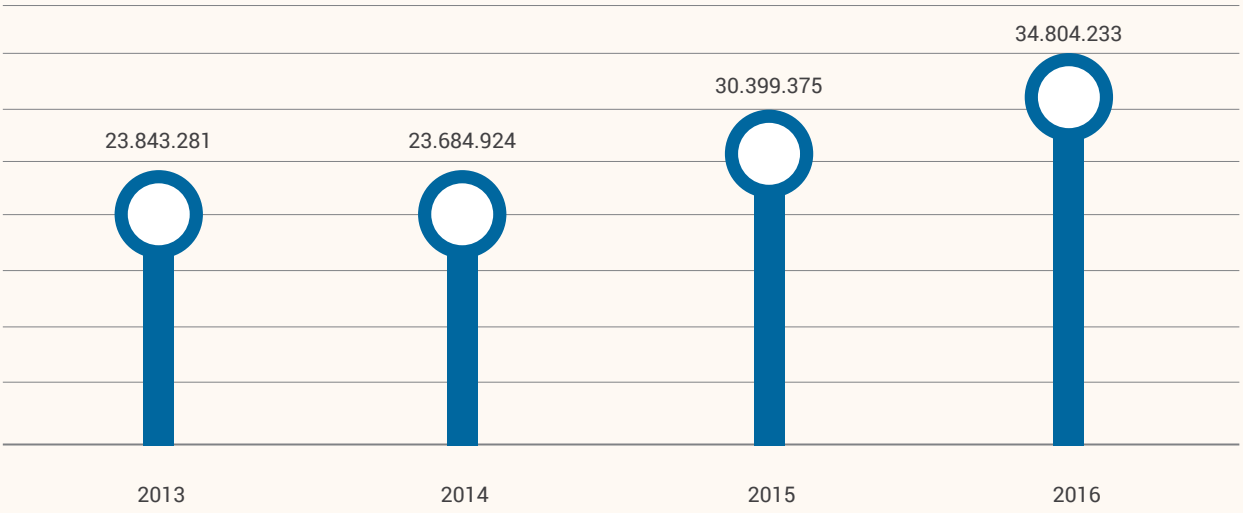

KPR Subsidi

Perseroan pertama kali ditugaskan untuk memberikan pelayanan KPR Subsidi sesuai Surat Menkeu No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, dengan realisasi KPR pertama berlangsung pada tanggal 10 Desember 1976. Penyaluran KPR Subsidi dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, skema penyaluran KPR Subsidi terus berganti, namun demikian Perseroan tetap konsisten menyalurkan KPR Subsidi.

Ketentuan mengenai penyaluran KPR Subsidi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Permen PUPR) No. 21/PRT/M/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permen PUPR No. 26/PRT/M/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

KPR Subsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari Pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan pembeli rumah pertama kali yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh KPR Subsidi dengan bunga rendah dan tetap selama jangka waktu KPR. Berdasarkan program subsidi Pemerintah saat ini, KPR bersubsidi diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp4 juta per bulan untuk membeli rumah tapak dan maksimal penghasilan sebesar Rp7 juta per bulan untuk pembelian rumah susun. Harga rumah terikat pada batas harga tertentu. Nasabah harus menyampaikan KTP dan NPWP pada saat pengajuan kredit.

Saat ini Pemerintah memiliki dua program KPR Subsidi, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPR Subsidi dengan skema FLPP terbagi menjadi 2 (dua) produk, yaitu:

- KPR BTN Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah tapak
- KPR BTN Sejahtera Susun untuk pembelian rumah susun

Adapun ketentuan pemberian KPR BTN Sejahtera Tapak dan KPR BTN Sejahtera Susun adalah sebagai berikut:

(1). Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;

(2). Suku bunga KPR paling tinggi 5% (lima perseratus) per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;

(3). Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (2) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan

(4). Jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana KPR Sejahtera dan kelompok sasaran KPR Sejahtera Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) adalah kredit pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan. KPR Subsidi dengan skema SSB terbagi menjadi 2 (dua) produk, yaitu:

- KPR SSB Tapak untuk pembelian rumah tapak
- KPR SSB Susun untuk pembelian rumah susun

Adapun ketentuan pemberian KPR BTN Sejahtera Tapak dan KPR BTN Sejahtera Susun adalah sebagai berikut:

(1) Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak atau susun dikurangi dengan uang muka;

(2) Suku bunga KPR per tahun paling tinggi BI rate atau acuan lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara Bank Pelaksana dengan Pejabat Perbendaharaan Satker;

(3) Dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud pada butir (2) lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka suku bunga KPR SSB Tapak dan Susun menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana;

(4) Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;

(5) Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (4) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;

(6) Jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR SSB Tapak dan Susun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan

(7) Subsidi bunga kredit perumahan yang dibayar Pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud pada butir (4).

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp15.576.232 juta atau sebanyak 159.430 unit perumahan melalui Bank Konvensional, meningkat 32,92% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp11.718.433 juta. Peningkatan tersebut terjadi akibat tingginya permintaan rumah pada segmen ini terutama

penyaluran KPR SSA/SSB Tapak yang meningkat sebesar 707,80% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga didorong oleh peran Perseroan sebagai anchor dalam Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah.

Tabel Penyaluran KPR Subsidi Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
KP Rusun	-	-	-	-	6.600
KPR BTN Sejahtera Tapak	5.998.565	7.335.717	10.800.393	(24,17)	8.189.550
KPR BTN Sejahtera Susun	939	6.186	877	645,27	6.536
KPR BTN Sejahtera Susun Indent	19.08	2.639	-	-	-
KPR SSA/SSB Tapak	-	-	917.163	707,80	7.408.861
KPR SSA/SSB Susun	-	-	-	-	4.705
Total	**6.018.584**	**7.344.542**	**11.718.433**	**33,21**	**15.609.652**

KPR Non Subsidi

Perseroan memberikan berbagai layanan KPR non-subsidi yang ditargetkan kepada nasabah berpenghasilan menengah keatas dengan suku bunga mengambang. Jangka waktu yang ditawarkan maksimal selama 25 tahun untuk KPR Non Subsidi dan maksimal 15 tahun untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Ruko. Ketentuan uang muka minimal 15% atau sesuai peraturan Bank Indonesia tentang Rasio *Loan to Value.*

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terbatas dan persaingan yang ketat pada segmen KPR Non Subsidi, Perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,35% pada tahun 2016. Akibat kondisi ekonomi, permintaan terhadap rumah menengah ke atas memang mengalami penurunan.

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan KPR Non subsidi sebesar Rp12.724.741 juta, meningkat 4,35% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp12.194.611 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh KPR BTN Platinum yang meningkat sebesar Rp551.463 juta atau 4,79% dari tahun sebelumnya.

Tabel Penyaluran KPR Non Subsidi Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
KPR BTN Platinum	12.547.502	11.062.544	11.722.117	4,79	12.283.670
KPA BTN	522.146	295.86	257.769	17,99	304.134
Kredit Ruko BTN	197.542	210.372	214.725	(36,24)	136.907
Total	**13.267.190**	**11.568.776**	**12.194.611**	**4,35**	**12.724.741**

Kredit Perumahan Lainnya

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis, Perseroan juga menawarkan jenis-jenis kredit perumahan, serta kredit konsumer lainnya, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya sebesar Rp1.800.723 juta, turun 24,49% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp2.384.835 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan yang tidak melakukan penyaluran kredit bangun rumah, PUM-KB BPJS Ketenagkerjaan dan PRR-KB BP Ketenagakerjaan. Penurunan penyaluran juga terjadi akibat pelemahan permintaan kredit pada produk Kredit Agunan Rumah, sebagaimana yang terjadi pada segmen menengah atas.

Tabel Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kredit Agunan Rumah BTN	2.277.335	2.212.131	2.244.276	(21,28)	1.766.754
Kredit Bangun Rumah BTN	35.665	40.734	64.061	(54,77)	28.973
PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan BTN	125.63	37.392	62.837	(100,00)	-
PRR-KB BP Ketenagakerjaan BTN	11.891	92.236	1.503	(100,00)	-
TBUM Bapertarum	1.803	2.829	10.103	(70,70)	2.960
TBM Bapertarum	14	20	40	(50,00)	20
Total	**2.452.338**	**2.385.342**	**2.382.820**	**(24,49)**	**1.800.723**

Kredit Konsumer Non Perumahan

Perseroan memberikan kredit konsumer lainnya, di luar kredit perumahan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah kredit.

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan Kredit Konsumer Non Perumahan sebesar Rp4.670.792 juta, meningkat 13,82% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp4.103.511 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kredit pegawai yang meningkat sebesar 231,90% dari tahun sebelumnya.

Perseroan menyediakan kredit konsumer ini sebagai pelengkap bagi nasabah KPR yang memiliki sejarah kredit yang baik.

Tabel Penyaluran Kredit Konsumer Non Perumahan Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kring BTN	594.737	499.967	628.205	(1,07)	621.456
Kring BTN Pensiunan	37.167	27.132	38.561	(1,77)	37.877
Kredit Swadana BTN	1.154.698	1.817.542	3.046.969	(10,80)	2.717.776
Kredit Pegawai	318.567	41.623	389.776	231,90	1.293.683
Total	**2.105.169**	**2.386.264**	**4.103.511**	**13,82**	**4.670.792**

Produk Simpanan Konsumer

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan nasabahnya, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Produk simpanan tersebut dimanfaatkan Perseroan dalam menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah yang sejalan dengan strategi perusahaan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau. Secara garis besar, kinerja produk simpanan atau Dana Pihak Ketiga pada tahun 2016 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah rekening maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun. Rincian terkait kinerja produk simpanan Perseroan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Produk Simpanan Konsumer Tahun 2013-2016

Jenis Simpanan	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Tabungan	5.466.194	23.383.447	5.852.481	25.230.736	6.118.475	29.402.734	6.748.167	32.776.835
Deposito	53.594	8.653.135	56.401	9.580.829	60.955	9.215.702	67.010	11.612.374
Total	**5.519.788**	**32.036.582**	**5.908.882**	**34.811.565**	**6.179.430**	**38.618.436**	**6.815.177**	**44.389.209**

Grafik Produk Simpanan Konsumer Tahun 2013-2016 (Rp juta)

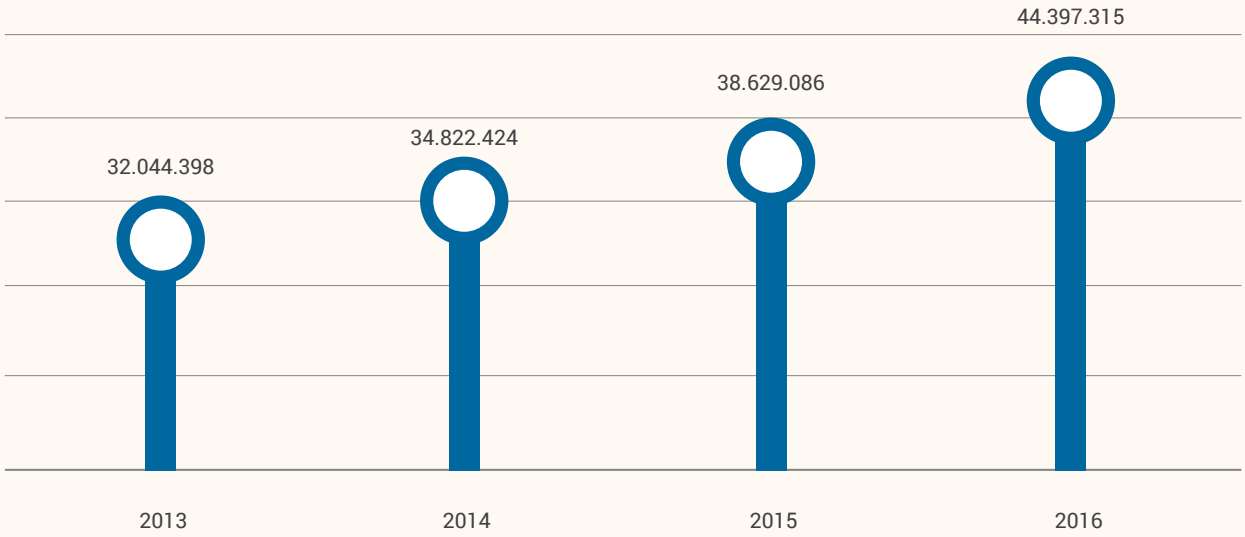

Tabungan Konsumer

Pada tahun 2016 Perseroan menghimpun Tabungan Konsumer sebesar Rp32.776.835 juta, meningkat 11,48% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp29.402.734 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh jumlah Tabungan BTN Batara yang meningkat sebesar 19,17% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah rekening maupun saldo Tabungan BTN Batara ini merupakan hasil kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan Perseroan selama tahun 2016, salah satunya melalui program 'Serbu BTN'. Perseroan juga terus memperbaiki dan meningkatkan fitur produk tabungannya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemakaian tabungan oleh nasabah Perseroan.

Tabel Tabungan Konsumer Tahun 2013-2016

Jenis Tabungan	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Tabungan Batara	1.656.034	8.920.462	1.692.857	9.351.783	1.802.251	10.125.935	1.900.917	12.067.548
Tabungan BTN Pensiunan	5.374	56.712	5.953	55.387	7.094	60.019	8.643	73.084
Tabungan Batara Pendidik	2.314	2.572	10.848	16.494	19.336	54.224	33.203	72.733
Tabungan Batara Prima	46.061	11.274.268	44.567	12.319.038	43.398	14.989.280	41.225	15.898.413
Tabungan Lainnya	2.219.789	1.229.467	2.699.414	1.503.198	3.100.448	1.776.516	3.786.815	2.051.828
. Tabungan BTN Junior	858.905	518.097	932.368	555.127	992.49	635.615	1.033.623	691.882
Tabungan BTN Juara	524.587	333.454	695.027	393.817	850.794	485.786	986.294	533.834
TabunganKu	129.099	240.45	180.568	343.57	234.69	449.485	291.601	585.061
Tabungan BTN Simpel	-	-	-	-	19.371	1.647	457.88	46.704
Tabungan Cermat	661.988	46.168	837.437	102.076	939.755	55.415	951.592	35.198
Tabungan BTN Perumahan	-	-	447	1.469	4.716	36.397	4.329	46.313
Tabungan BTN Haji Reguler	44.814	88.98	53.108	104.565	58.179	109.805	61.084	110.615
Tabungan BTN Haji Plus	396	2.319	459	2.573	453	2.366	412	2.221
Tabungan Pos	1.536.622	1.899.966	1.398.842	1.984.836	1.145.948	2.396.760	977.364	2.613.229
Tabungan Tabanas Batara	360.165	148.221	358.383	122.308	167.338	87.728	77.207	66.673
. Tabungan eBatara Pos	1.176.457	1.751.745	1.040.459	1.862.529	978.61	2.309.031	900.157	2.546.556
Total	**5.466.194**	**23.383.447**	**5.852.481**	**25.230.736**	**6.118.475**	**29.402.734**	**6.748.167**	**32.778.835**

Deposito Berjangka

Pada tahun 2016 Perseroan menghimpun Deposito Berjangka sebesar Rp11.612.374 juta, meningkat 25,99% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp9.215.702 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh jumlah deposito 3 bulan yang meningkat sebesar 65,13% dari tahun sebelumnya.

Tabel Deposito Berjangka Tahun 2013-2016

Jenis Deposito	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
1 bulan	36.173	4.947.765	34.715	5.513.310	36.094	5.784.519	39.654	6.803.407
2 bulan	-	-	-	-	52	100.496	806	74.579
3 bulan	9.472	2.617.512	12.799	3.159.450	15.261	2.452.874	18.993	4.050.550
6 bulan	4.429	588.602	5.635	558.570	6.417	459.640	4.879	378.137
12 bulan	3.142	370.845	2.883	287.238	2.694	191.898	2.352	192.696
24 bulan	350	32.042	332	20.381	335	16.553	281	11.907
Deposito On Call	67	96.369	37	41.88	102	209.722	45	101.098
Total	**53.594**	**8.653.135**	**56.401**	**9.580.829**	**60.955**	**9.215.702**	**67.010**	**11.612.374**

PERBANKAN KOMERSIAL

Produk Kredit Komersial

Produk Kredit Perbankan Komersial mencakup produk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Kredit perumahan berupa kredit konstruksi Perseroan, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari kredit UMKM, dan Kredit Korporasi. Sepanjang tahun 2016, Perseroan berhasil menyalurkan kredit komersial sebesar Rp18.521.042 juta meningkat 11,81% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp16.565.305 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kredit non perumahan terutama kredit korporasi yang meningkat sebesar 71,36% dari tahun sebelumnya.

Tabel Penyaluran Kredit Komersial Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kredit Konstruksi	9.646.701	9.981.296	12.031.753	(2,55)	11.725.314
Kredit UMKM	3.786.906	1.606.102	1.524.466	7,55	1.639.585
Kredit Korporasi	2,537.662	2.220.508	3.009.086	71,36	5.156.323
Total	15.971.269	13.807.906	16.565.305	11,81	18.521.042
Kredit Korporasi	2.537.662	2.220.508	3.009.086	71,36	5.156.323
Total	**15.971.269**	**13.807.906**	**16.565.304**	**11,81**	**18.521.043**

Grafik Penyaluran Kredit Komersial Tahun 2013-2016 (Rp juta)

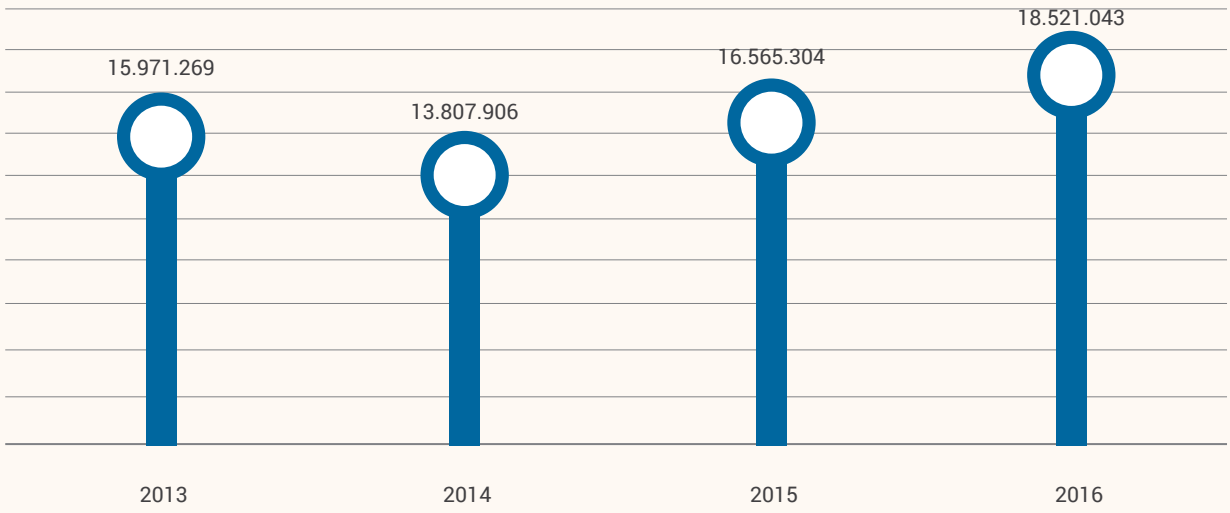

Kredit Konstruksi

Perseroan menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang perumahan untuk tujuan modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan apartemen. Untuk jenis kredit ini, Perseroan memberikan kredit maksimal hingga 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi dengan suku bunga mengambang. Dalam membuat keputusan untuk membiayai kredit konstruksi, Perseroan memperhitungkan periode jatuh tempo berdasarkan perkiraan masa konstruksi dan pendapatan yang diharapkan akan dihasilkan pada saat selesainya proyek. Kredit konstruksi dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah.

Nasabah perbankan komersial yang telah mendapatkan Kredit Konstruksi BTN juga dapat memperoleh Kredit Kepemilikan Lahan, dimana Perseroan menyediakan

kredit untuk tujuan memperoleh lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah-rumah dan apartemen bersubsidi, dalam jumlah sampai dengan 50% dari biaya dan nilai tanah sampai dengan maksimal Rp5 miliar. Kredit ini biasanya memiliki jangka waktu sampai dengan tiga tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai. Kredit ini biasanya dikenakan bunga mengambang pada tingkat lebih tinggi dari kredit KPR non subsidi.

Untuk mendukung Program Sejuta Rumah, Kredit Konstruksi sangatlah strategis bagi Perseroan untuk menciptakan *supply* rumah. Namun demikian, selama tahun 2016, penyaluran Kredit Konstruksi mengalami sedikit penurunan sebesar 2,55%, yaitu dari Rp12.031.753 juta menjadi Rp11.725.134 juta. Penurunan terutama terjadi pada pembangunan rumah segmen menengah atas, sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang masih tumbuh terbatas.

Kredit UMKM

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan Kredit UMKM sebesar Rp1.639.585 juta, meningkat 7,55% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.524.466 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kredit KUMK yang meningkat sebesar 145,70% dari tahun sebelumnya. Mulai pertengahan tahun 2015, Perseroan tidak lagi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena Pemerintah menginginkan Perseroan fokus untuk mendukung pembiayaan perumahan di Indonesia.

Tabel Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
KUR	733.708	217.640	2.042	(100,00)	-
Terkait Perumahan	50.731	-	-	-	-
KUMK	140.135	277.865	695.642	145,70	1.013.545
KMK	1.414.807	598.405	377.944	95,03	359.145
Kredit Investasi UMKM	312.549	47.220	60.266	74,64	44.982
KMK Kontraktor UMKM	588.568	328.381	238.606	53,55	127.776
Linkage Program	546.408	136.591	149.966	62,77	94.137
Total	3.786.906	1.606.102	1.524.466	107,55	1.639.585

Kredit Korporasi

Pada tahun 2016 Perseroan menyalurkan Kredit Korporasi sebesar Rp5.156.323 juta, meningkat 71,36% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp3.009.086 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh KMK Kontraktor yang meningkat sebesar 96,12% dari tahun lalu. Sebagian besar penyaluran baru Kredit Korporasi Non Perumahan di tahun 2016 diberikan kepada BUMN-BUMN karya dan anak-anak usahanya untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masih terkait dengan proyek-proyek perumahan.

Tabel Penyaluran Kredit Korporasi Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Kredit	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
KMK	1.204.470	923.348	1.051.595	53,31	1.612.221
Kredit Investasi	751.352	855.477	917.529	63,98	1.504.564
KMK Kontraktor	547.461	432.437	1.039.962	96,12	2.039.538
Kredit Sindikasi	34.379	9.246	-	-	-
Total	2.537.662	2.220.508	3.009.086	71,36	5.156.323

Produk Simpanan Komersial

Di samping menyalurkan kredit, Perseroan juga menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial. Adapun produk-produk pendanaan komersial yang terdapat di Perseroan antara lain giro dan deposito berjangka lembaga. Kinerja produk simpanan perbankan komersial adalah sebagai berikut.

Tabel Produk Simpanan Komersial Tahun 2013-2016

Jenis Simpanan	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Giro	40.475	17.960.965	46.253	22.001.200	49.775	29.152.160	54.343	42.643.680
Deposito Berjangka Lembaga	5.337	39/617.498	6.738	40.910.455	6.914	48.833.538	6.851	57.924.579
Total	45.812	57.578.465	52.991	62.911.655	56.689	77.985.698	61.194	100.568.259

Sepanjang tahun 2016, Perseroan berhasil menghimpun produk simpanan komersial sebesar Rp100.568.259 juta meningkat 28,96% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp77.985.698 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Giro yang meningkat sebesar 46,28% dari tahun sebelumnya.

Grafik Produk Simpanan Komersial Tahun 2013-2016 (Rp juta)

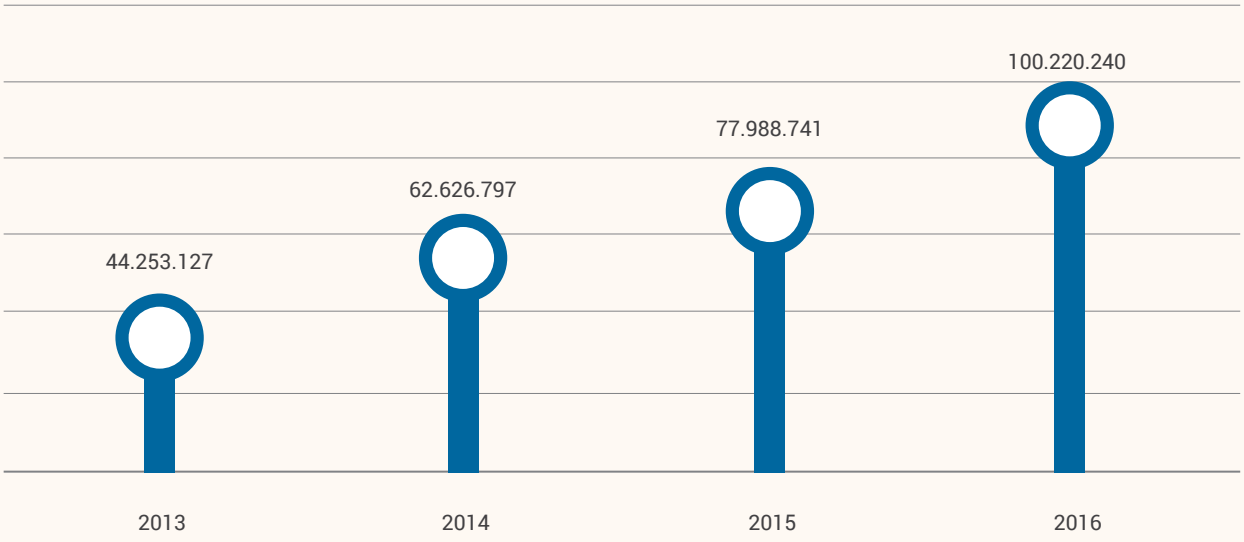

Giro Komersial

Pada tahun 2016 Perseroan menghimpun Giro Komersial sebesar Rp42.643.680 juta, meningkat 46,28% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp29.152.160 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Giro Non FLPP yang meningkat sebesar 93,62% dibandingkan tahun 2015. Giro FLPP merupakan rekening penampungan dana dari Pemerintah untuk pembiayaan KPR Subsidi yang disalurkan Perseroan. Dana tersebut akan tetap berada di rekening dimaksud sepanjang masa KPR atau sampai KPR lunas. Giro FLPP meningkat sebesar 16.52% pada tahun 2016 dari Rp17.900.547 juta menjadi Rp20.858.357 juta.

Giro Non FLPP juga mencatatkan peningkatan selama tahun 2016 sebesar 88,23% dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp11.253.989 juta menjadi Rp21.183.873 uta. Peningkatan Giro Non FLPP merupakan hasil dari kegiatan Perseroan untuk terus meningkatkan kerja sama pengelolaan dana dengan lembaga-lembaga pemilik dana, seperti BUMN lain, perguruan tinggi, *developer*, dan lain-lain. Pengembangan terhadap fitur produk Giro juga terus dilakukan untuk meningkatkan penempatan dana Giro, seperti iCash, SPAN, *Host to Host* dan *virtual account*.

Tabel Giro Komersial Tahun 2013-2016

Jenis Giro	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Giro Non FLPP	40.470	8.165.093	46.247	8.743.545	49.768	11.253.989	54.337	21.183.873
Giro FLPP	5	10.026.961	6	13.469.764	7	17.900.547	6	20.858.357
Total	40.475	18.192.054	46.253	22.204.309	49.775	29.154.536	54.343	42.042.230

Deposito Berjangka Lembaga

Pada tahun 2016 Perseroan menghimpun Deposito Berjangka Lembaga sebesar Rp58.178.010 juta, meningkat 19,13% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp48.834.205 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Deposito Berjangka Lembaga yang meningkat sebesar 20,28% daru tahun sebelumnya.

Tabel Deposito Berjangka Lembaga Tahun 2013-2016

Jenis Deposito	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Deposito Berjangka Lembaga	5.275	25.253.960	6.681	40.099.610	6.839	46.754.128	6.808	56.234.468
Deposito On Call Lembaga	62	807.113	44	322.879	94	2.080.077	79	1.943.542
Total	5.337	26.061.073	6.725	40.422.488	6.933	48.834.205	6.887	58.178.010

UNIT USAHA SYARIAH

Produk Pembiayaan Syariah

Produk Pembiayaan Unit Usaha Syariah diklasifikasikan ke dalam jenis pembiayaan konsumer dan komersial. Adapun uraian terkait kinerja produk pembiayaan Unit Usaha Syariah, dijabarkan sebagai berikut.

Realisasi Pembiayaan berdasarkan segmen perbankan konsumer dan komersial tahun 2016 mencapai Rp5.960.741 juta, meningkat sebesar 39,22% dari tahun 2015. Realisasi pembiayaan didominasi oleh segmen konsumer dengan komposisi sebesar 61,51%, sementara untuk segmen komersial sebesar 38,48%.

Tabel Pembiayan Syariah Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Pembiayaan Konsumer	1.837.796	1.885.120	2.461.823	48,95	3.666.853
Pembiayaan Komersial	2.640.614	2.220.182	1.819.699	26,06	2.293.888
Total	4.478.410	4.105.302	4.281.522	39,22	5.960.741

Grafik Pembiayan Syariah Tahun 2013-2016 (Rp juta)

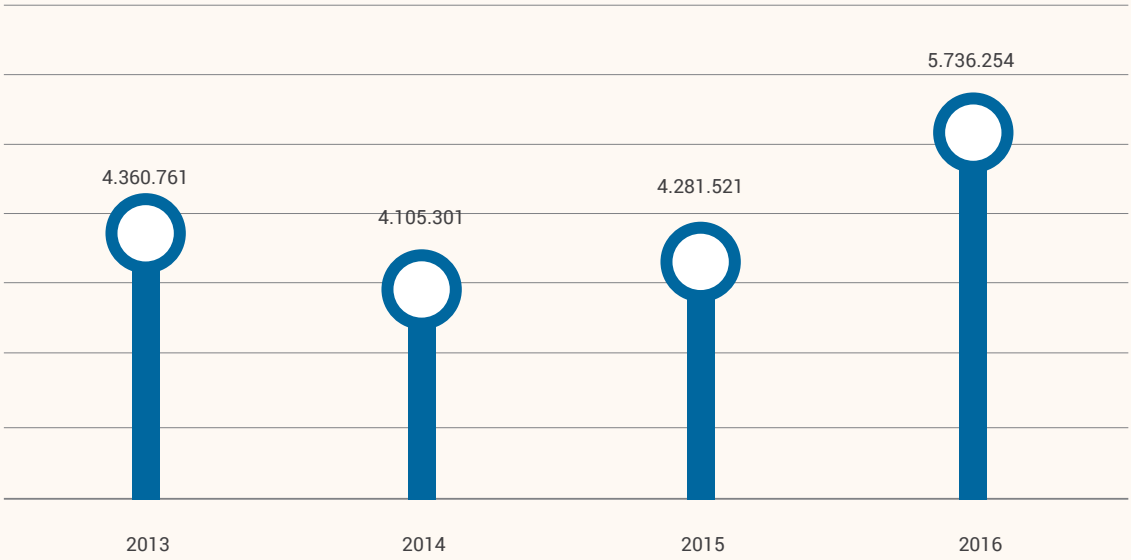

Pembiayaan Konsumer

Sepanjang 2016, Unit Usaha Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan konsumer sebesar Rp3.666.853 juta, meningkat sebesar 48,95% dari realisasi pembiayaan konsumer tahun 2015 sebesar Rp2.461.823 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh KPR BTN Sejahtera iB yang meningkat sebesar 63,38% dari tahun sebelumnya. KPR BTN Sejahtera iB merupakan pembiayaan untuk rumah subsidi yang memiliki permintaan tinggi dari masyarakat berpenghasilan rendah, dan disalurkan untuk mendukung Program Sejuta Rumah Pemerintah.

Tabel Pelimpahan Pembiayaan Konsumer Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
KPR Sejahtera Tapak iB	487.907	615.797	1.052.340	63,38	1.719.354
KPR SSM Tapak iB	-	-	-	-	223.543
KPR SSM Susun iB	-	-	-	-	943
KPR Platinum iB	854.397	914.273	1.026.178	16,58	1.196.310
KPR Indent iB	164.641	146.362	183.041	115,39	394.257
Pembiayaan Bangun Rumah iB	37.265	27.870	32.695	(25,96)	24.209
Pembiayaan PUMP Jamsoste iB	10.140	3.130	2.835	(100,00)	-
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	3.864	3.316	3,480	18,07	4.109
Pembiayaan Gadai iB	44.889	4.611	2.552	(17,24)	2.112
Pembiayaan Multijasa iB	9.987	5.435	12.149	55,01	18.832
Pembiayaan Multimanfaat iB	107.510	106.820	98.301	(15,38)	83.184
Pembiayaan Talangan Haji iB	117.196	57.196	48.252	(100,00)	-
Total	1.837.796	1.885.120	2.461.823	48,95	3.666.853

Pembiayaan Komersial

Produk pembiayaan komersial Unit Usaha Syariah tahun 2016 sebesar Rp2.293.887 juta meningkat 26,06% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.819.700 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Pembiayaan konstruksi BTN iB meningkat sebesar 53,84% dari tahun sebelumnya, terutama untuk konstruksi perumahan subsidi.

Tabel Pelimpahan Pembiayaan Komersial Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Pembiayaan Konstruksi BTN iB	1.016.003	1.041.694	1.187.089	53,84	1.826.163
Pembiayaan SYUKUR BTN iB	311.906	149.713	-	-	108
Pembiayaan Modal Kerja BTN iB	1.011.974	716.835	430.423	(30,38)	299.665
Pembiayaan Investasi BTN iB	300.732	311.939	202.188	(16,93)	167.951
Total	2.640.615	2.220.181	1.819.700	26,06	2.293.887

Produk Simpanan Syariah

Produk simpanan Unit Usaha Syariah terdiri dari produk Giro, Tabungan dan Deposito berjangka. Pada tahun 2016 jumlah produk simpanan Unit Usaha Syariah sebesar Rp15.030.249 juta meningkat sebesar 35,35% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Deposito yang meningkat sebesar Rp2.245.195 juta atau 29,80% dari tahun sebelumnya. Uraian terkait kinerja produk simpanan Unit Usaha Syariah ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel Produk Simpanan Syariah Tahun 2013-2016

Jenis Simpanan	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Giro	3.854	1.155.231	4.344	1.421.418	5.295	2.216.283	6.587	3.202.375
Tabungan	246.605	854.446	299.081	937.178	347.568	1.354.947	443.539	2.049.373
Deposito	5.372	4.582.900	5.457	6.388.861	5.471	7.533.306	5.678	9.778.501
Total	255.831	6.592.577	308.882	8.747.457	358.334	11.104.536	455.804	15.030.249

Grafik Produk Simpanan Syariah Tahun 2013-2016 (Rp juta)

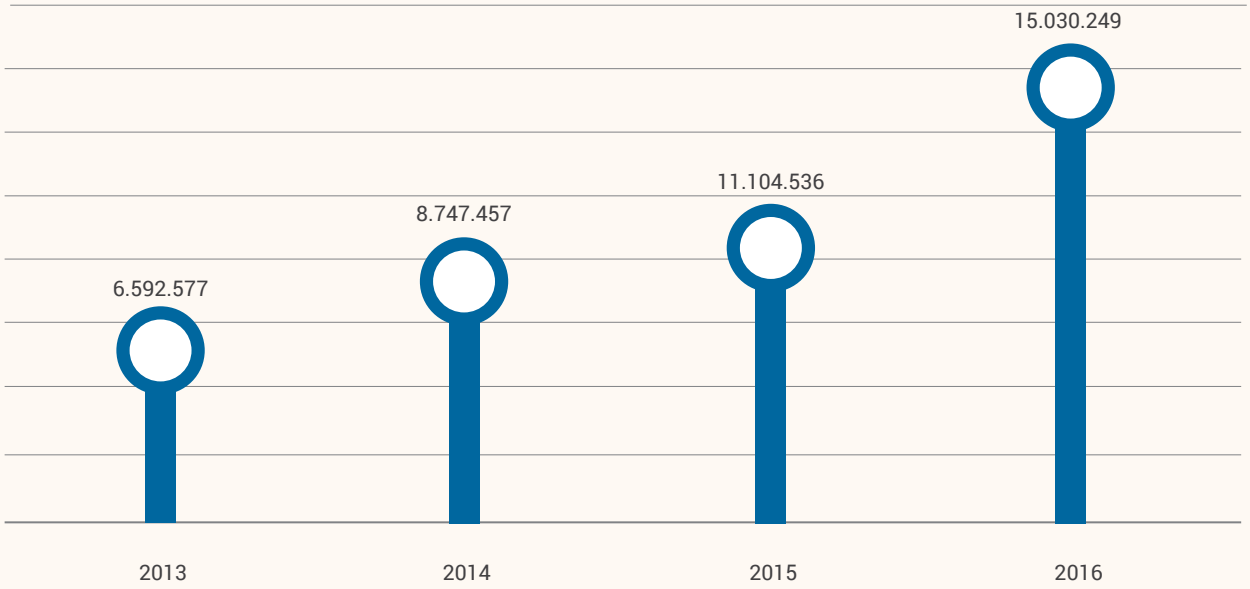

Giro Syariah

Giro Syariah terdiri dari Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB. Pada tahun 2016 jumlah giro syariah sebesar Rp3.202.375 juta meningkat 44,49% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Giro BTN iB yang meningkat sebesar Rp532.579 juta atau 30,79% dari tahun sebelumnya.

Tabel Giro Syariah Tahun 2013-2016

Jenis Giro	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Giro BTN iB	2.914	935.714	3.259	1.230.281	4.019	1.729.780	5.102	2.262.359
Giro BTN Prima iB	940	219.517	1.085	191.137	1.276	486.503	1.485	940.016
Total	3.854	1.155.231	4.344	1.421.418	5.295	2.216.283	6.587	3.202.375

Tabungan Syariah

Produk tabungan Unit Usaha Syariah Perseroan mengalami peningkatan di 2016, baik dari jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening meningkat sebesar 27,61% dan jumlah dana meningkat 51,25%. Peningkatan jumlah dana terutama dipengaruhi oleh Tabungan BTN Prima iB yang meningkat sebesar Rp592.691 juta atau 74,41% dari tahun sebelumnya.

Tabel Tabungan Syariah Tahun 2013-2016

Jenis Tabungan Syariah	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Tabungan BTN Batara iB	155.151	293.301	186.406	311.925	217.345	465.681	269.265	563.695
Tabungan BTN Prima iB	63.71	494.917	78.835	544.185	91.751	796.534	100.413	1.389.226
Tabungan BTN Haji iB	21.001	63.234	24.911	77.137	28.54	88.573	29.719	91.009
TabunganKu iB	6.743	2.994	7.607	3.506	8.042	3.128	8.254	3.430
Tabungan BTN Qurban iB	-	-	1.322	425	1.89	1.031	2.406	1.347
Tabungan Simpel BTN iB	-	-	-	-	-	-	33.482	666
Total	246.605	854.446	299.081	937.178	347.568	1.354.947	443.539	2. 049.373

Deposito Syariah

Produk deposito Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan di 2016, baik jumlah rekening maupun jumlah dana. Jumlah rekening meningkat sebesar 3,78% dan jumlah dana meningkat 29,80%. Peningkatan jumlah dana terutama dipengaruhi oleh Deposito BTN iB (Lembaga) yang meningkat sebesar Rp2.252.624 juta atau 32,09% dari tahun sebelumnya.

Tabel Deposito Syariah Tahun 2013-2016

Jenis Deposito Syariah	2013		2014		2015		2016	
	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)	Rekening (unit)	Jumlah (Rp juta)
Deposito BTN iB (Perorangan)	4.206	621.808	4.276	557.692	4.346	507.775	4.501	484.751
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.160	3.297.885	1.166	5.787.259	1.119	7.019.926	1.169	9.272.550
Deposito On Call iB	6	33.207	15	43.91	6	5.605	8	21.200
Total	5.372	4.582.900	5.457	6.388.861	5.471	7.533.306	5.678	9.778.501

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Jasa dan layanan perbankan terdiri dari jasa trading, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya. Pendapatan administrasi berupa biaya giro, biaya tabungan, biaya administrasi deposito, dan biaya administrasi kredit. Pendapatan layanan berupa *payment point*, kartu dan *E-Banking*, *Servicing Fee* Sekuritisasi aset, Transfer, Bank Garansi, SDB, *Fee Bancassurance*, Administrasi Pembiayaan Syariah, serta *Fee* Jasa Perbankan. Selain itu, pendapatan lainnya berupa penilaian agunan, denda, dan lain lain.

Selama tahun 2016, total penerimaan *fee based income* yang berhasil dihimpun oleh Perseroan sebesar Rp1.304.529 juta meningkat 15,27% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.131.696 juta. Peningkatan ini berasal dari pendapatan *trading* yang meningkat sebesar 60,06% dari tahun 2015.

Tabel Penerimaan *Feebased Income* Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Pendapatan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Pendapatan trading	32.220	112.436	170.363	60,06	272.689
Pendapatan administrasi	270.391	346.588	397.422	9,05	433.407
Biaya Giro	10.319	11.042	13.784	(4,61)	13.149
Biaya Tabungan	204.599	281.109	310.385	(1,64)	305.296
Biaya Adm Deposito	13.755	10.122	15.967	48,49	23.709
Biaya Adm kredit	41.718	44.314	57.286	59,30	91.254
Pendapatan layanan	144.079	159.269	193.076	24,30	239.992
Payment Point	4.127	4.584	5.251	44,70	7.598
Kartu & E-Banking	37.187	49.931	61.942	18,56	73.436
Servicing Fee Sekuritisasi Aset	8.369	10.171	20.002	(12,00)	17.602
Transfer	6.668	6.220	4.297	(42,70)	2.462
Bank Garansi	8.964	22.164	31.328	13,33	35.503
Safe Deposit Box	2.673	3.806	4.617	2,08	4.713
Fee Bancasurance	114	3.003	10.352	188,13	29.827
Adm. Pembiayaan Syariah	70.208	55.855	50.272	25,08	62.88
Fee Jasa Perbankan	5.769	3.533	5.014	19,11	5.972
Pendapatan lainnya	325.732	106.297	152.332	11,69	170.134
Penilaian agunan (LPA, taksasi)	3.054	3.298	6.576	86,94	12.293
Denda	69.520	85.071	94.546	11,74	105.650
Lainnya	253.158	17.928	51.210	1,92	52.191
Total	772.422	724.590	913.193	22,23	1.116.222

Grafik Penerimaan *Feebased Income* Tahun 2013-2016 (Rp juta)

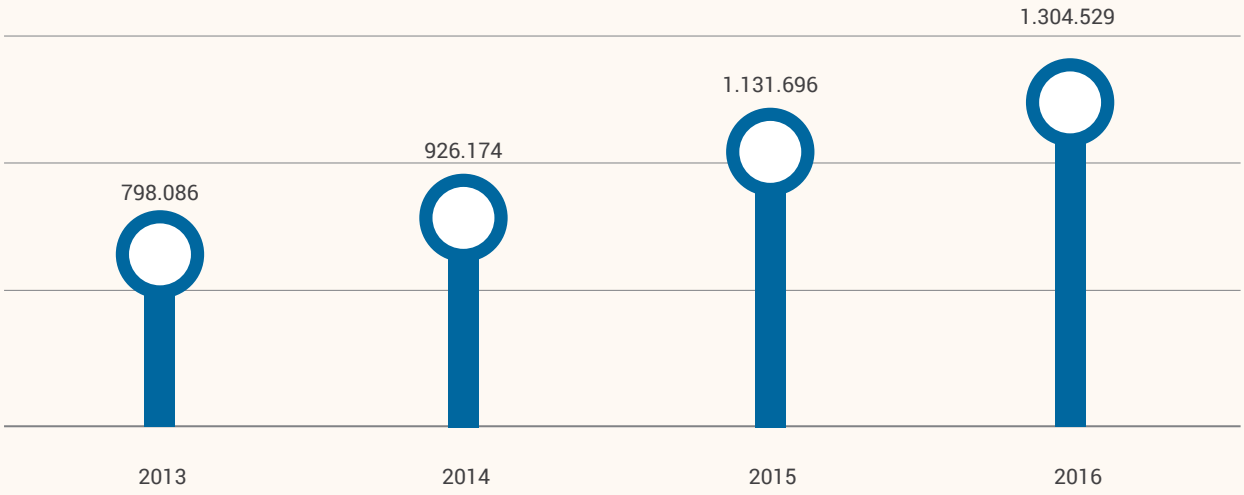

Kartu Konsumer

Pada 2015, jumlah pemegang kartu produk Kartu Konsumer meningkat sebesar 24,97% dari 3.033.178 unit kartu di 2014 menjadi 3.790.477 unit kartu di 2015. Jumlah rekening produk Kartu ATM/Debit yang meningkat sebesar 25,04%, sedangkan jumlah rekening produk Kartu Kredit meningkat sebesar 12,73%.

Tabel Jumlah Pemegang Kartu Konsumer Tahun 2013-2016

Jenis Kartu	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kartu Debit	2.791.012	3.014.573	3.769.503	23,44	4.652.914
Kartu Kredit	13.659	18.605	20.974	3,59	21.727
Total	2.804.671	3.033.178	3.790.477	23,33	4.674.641

Wealth Management

Selama tahun 2016, jumlah nasabah *Wealth Management* sebanyak 36.450 nasabah meningkat 15,68% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh nasabah produk Bancassurance yang meningkat sebesar 5.225 nasabah atau 44,27% dari tahun sebelumnya.

Tabel Jumlah Nasabah *Wealth Management* Tahun 2013-2016

Jenis Produk	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
DPK	6.507	11.317	14.471	7,55	15.564
Outlet	6.507	10.903	14.005	7,62	15.072
Non Outlet	-	414	466	5,58	492
Surat Berharga	210	3.741	4.144	(32,14)	2.812
ORI	210	1.282	2.717	(66,32)	915
SUKUK	-	1.739	1.427	3,43	1.476
SBR	-	720	-	-	421
Reksadana	-	8	1.091	(4,12)	1.046
Bancassurance	-	414	11.803	44,27	17.028
Total	6.717	15.480	31.509	15,68	36.450

Sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah *Wealth Management, Asset Under Management* selama tahun 2016 mencapai Rp23.693.287 juta atau meningkat sebesar 24,78% yang semula hanya Rp18.987.879 juta pada akhir tahun 2015. Rincian terkait *Asset Under Management* diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah *Asset Under Management* Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Produk	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
DPK	7.371.638	12.340.333	16.738.040	20,15	20.111.093
Outlet	7.371.638	11.711.825	16.196.865	20,53	19.522.764
Non Outlet	-	628.508	541.175	8,71	588.328
Surat Berharga	56.825	741.97	1.824.885	(6,05)	1.714.560
ORI	56.825	373.36	1.295.215	55,25	579.575
SUKUK	-	268.61	529.67	93,51	1.024.985
SBR	-	100	-	-	110
Reksadana	-	51	362.381	46,65	531.417
Bancassurance	-	459	62.573	2.035,45	1.336.218
Total	7.428.463	13.082.812	18.987.879	24,78	23.693.287

Electronic Channel

Selama periode tahun 2016 jumlah transaksi produk e-channel sebesar 93.683.253 meningkat 71,45% dibandingkan tahun 2015 sebesar 54.641.941 transaksi. Peningkatan ini terutama berasal dari produk Mobile Banking yang mengalami peningkatan sebesar 8.414.265 transaksi atau 113,50%.

Tabel Jumlah Transaksi E-Channel Tahun 2013-2016

Jenis Produk	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
ATM & KiosK	32.486.381	58.654.273	41.111.139	75,60	72.191.957
CDM	71.537	100.305	124.613	14,81	143.073
Internet Banking	383.78	200.091	251.757	217,58	799.542
Cash Management	351.275	587.432	798.154	(4,32)	763.641
SMS Banking	1.543.233	2.357.032	4.942.511	(19,94)	3.957.008
Mobile Banking	3.482.167	3.535.548	7.413.767	113,50	15.828.032
Total	38.318.372	45.126.924	54.641.941	71,45	93.683.253

PROFITABILITAS PER SEGMEN

Pada tahun 2016 Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp17.138.819 juta yang terdiri pendapatan dari segmen konsumer sebesar Rp12.226.435 juta, segmen komersial sebesar Rp4.257.037 juta, dan segmen syariah sebesar Rp637.347 juta. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.282.822 juta yaitu dari konvensional sebesar Rp1.241.506 juta dan syariah sebesar Rp41.316 juta.

Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan tahun 2016 sebesar Rp2.618.905 juta, meningkat 41,49% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.850.907 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan profitabilitas segmen konvensional sebesar 40,92% dan segmen syariah sebesar 44,98%. Berikut ini Laba Tahun Berjalan Perseroan per segmen dalam dua tahun terkakhir.

Tabel Laba Tahun Berjalan Per Segmen Tahun 2016 (Rp juta)

Uraian	2016			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	16.501.472	637.347	-	17.138.819
Beban Segmen	(8.961.627)	(13.647)	-	(8.975.274)
Pendapatan Segmen-Neto	7.539.845	623.700	-	8.163.545
Pendapatan Operasional Lainnya	1.241.506	41.316	-	1.282.822
Penyisihan Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non aset Keuangan	(598.296)	(109.235)	-	(707.531)
Beban Operasional Lainnya	(5.132.653)	(253.951)	-	(5.386.604)
Laba Operasional	3.050.402	265.656	-	3.352.232
Pendapatan (Beban) bukan operasional – Neto	(97.741)	75.593	-	(22.148)
Beban Pajak	(711.179)	-	-	(711.179)
Laba Tahun berjalan	2.241.482	377.423	-	2.618.905

Pada tahun 2015 Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp14.966.209 juta yang terdiri pendapatan dari segmen konsumer sebesar Rp10.612.227 juta, segmen komersial sebesar Rp3.842.909 juta, dan segmen syariah sebesar Rp511.073 juta. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.106.526 juta yaitu dari konvensional sebesar Rp1.070.040 juta dan syariah sebesar Rp36.486 juta.

Tabel Laba Tahun Berjalan Per Segmen Tahun 2015 (Rp juta)

Uraian	2015			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	14.455.136	511.073	-	14.966.209
Beban Segmen	(8.143.967)	(11.166)	-	(8.155.133)
Pendapatan Segmen-Neto	6.311.169	499.907	-	6.811.076
Pendapatan Operasional Lainnya	1.070.040	36.486	-	1.106.526
Penyajian Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non aset Keuangan	(718.428)	(182.580)	-	(901.008)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	7.198	-	7.198
Beban Operasional Lainnya	(4.278.836)	(211.351)	-	(4.490.187)
Laba Operasional	2.383.945	149.66	-	2.533.605
Pendapatan (Beban) bukan operasional – Neto	(102.389)	110.67	-	8.281
Beban Pajak	(690.979)	-	-	(690.979)
Laba Tahun berjalan	1.590.577	260.33	-	1.850.907

PROSPEK USAHA 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4%, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6%. (Sumber: NK RAPBN 2017)

Berdasarkan proyeksi WEO, yang dirilis oleh IMF pada bulan Januari 2017, pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 diestimasi sebesar 3,1%. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 diproyeksikan akan terus meningkat dengan nilai masing-masing sebesar 3,4% dan 3,6%.

Sumber: *World Economics Outlook* (WEO) Update, 16 Januari 2017

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar proyeksi perekonomian nasional tahun 2017, adalah:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%;
- Inflasi sebesar 4,0%;
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat;
- Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%;

(Sumber: NK RAPBN 2017)

PROSPEK BISNIS BIDANG PERUMAHAN DAN PROGRAM SEJUTA RUMAH BAGI PERSEROAN

Berdasarkan data dan analisis ekonomi, bisnis perumahan di Indonesia masih memiliki prospek untuk tumbuh lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kondisi ekonomi indonesia tahun 2017 diprediksikan lebih baik dari tahun sebelumnya dan mengalami *rebound* menuju pertumbuhan positif sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat;
2. Pasar pembiayaan perumahan yang jauh dari jenuh dan *backlog* penyediaan rumah per tahun masih cukup tinggi;
3. Penduduk *middle class* tumbuh sangat signifikan mendorong permintaan akan rumah meningkat.
4. Penjualan rumah sebagian besar dengan skim kredit (KPR).

Berikut prospek bisnis perumahan dan skim pembiayaan perumahan di Indonesia:

Penyaluran KPR dalam program sejuta rumah di tahun 2017 yang dapat diserap oleh Perseroan diproyeksikan sebesar 263 ribu unit. Sedangkan potensi pasar diluar program pemerintah adalah pemenuhan *backlog* perumahan yang mencapai > 13 juta unit. Berikut target dan realisasi penyediaan rumah di Indonesia:

Grafik Realisasi dan Target Program Sejuta Rumah

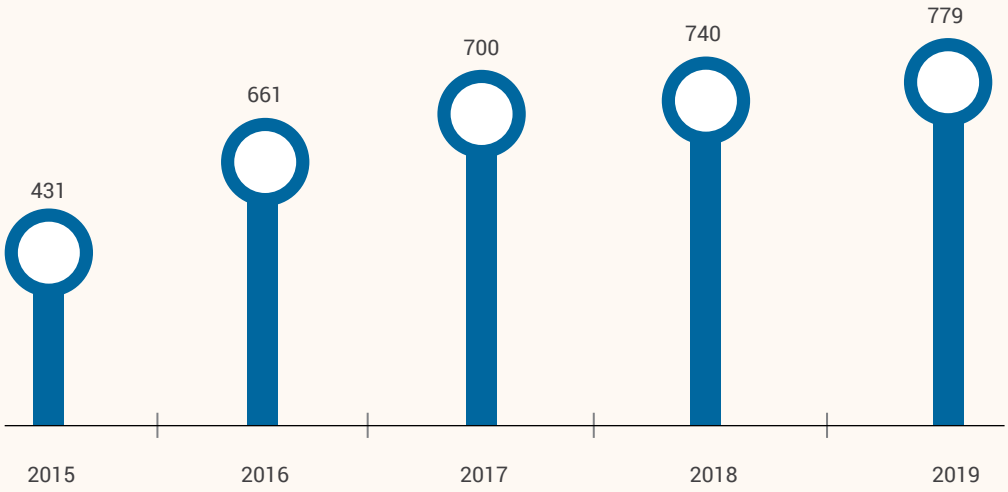

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

KONDISI PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN YANG TIDAK MENENTU MENUNTUT PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERBANKAN UNTUK DAPAT *SURVIVE* DALAM KONDISI APAPUN. ATAS DASAR TERSEBUT, MANAJEMEN MELAKUKAN PENILAIAN DAN ANALISIS POSISI PERSEROAN YANG DIDASARKAN PADA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERSEROAN.

PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Sepanjang tahun 2016, Perseroan tidak menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

***Assessment* Manajemen atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha**

Menurut catatan atas laporan keuangan auditan 2016, manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Manajemen menggunakan asumsi-asumsi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang dianataranya adalah indikator-indikator ekonomi seperti PDB, tingkat inflasi, nilai tukar serta data kinerja internal seperti laporan kinerja keuangan dan indikator pelaksanaan tta kelola Perseroan.

POSISI PERSEROAN

Sebagai bentuk komitmen akan keberlanjutan usaha, Perseroan menganalisis posisi Perseroan dan melakukan upaya-upaya perbaikan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan bisnis. Berikut hasil analisis faktor internal dan eksternal Perseroan dalam analisis SWOT dan TOWS matriks sebagai berikut:

Analisis SWOT Perseroan dan TOWS Matrix Tahun 2017

	***External Opportunities* (O)**	***External Threats* (T)**
	• Kondisi ekonomi global yang mulai membaik mendorong perekonomian Indonesia. • Kebijakan pemerintah: program sejuta rumah, Tapera dan pelonggaran LTV KPR. • Peningkatan jumlah kelas menengah Indonesia • Potensi aliansi strategi (termasuk sinergi dan *holding* BUMN). • Perkembangan teknologi dengan layanan digital sehingga mempercepat proses bisnis.	• Melambatnya pertumbuhan ekonomi Eropa dan China menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. • Likuiditas perbankan makin ketat. • Persaingan bisnis KPR segmen menengah semakin ketat, khususnya penetrasi bank pesaing yang memiliki *cost of fund* rendah. • Keterbatasan dana pemerintah dalam mendukung program sejuta rumah. • Permasalahan sisi *supply* rumah.
***Internal Strength* (S)** • Bank BUMN dan fokus dibidang perumahan. • Produk dan image Perseroan memiliki brand yang kuat sebagai market leader khususnya pada segmen menengah bawah. • Customer base nasabah KPR besar dan masih ada ruang untuk pengembangan produk berbasis KPR. • Relationship dengan *developer* perumahan.	**SO *Strategy*** • Fokus pada pembiayaan perumahan untuk mendukung program sejuta rumah dan perluasan segmentasi ke menengah atas (*emerging affluent*). • Mendukung aliansi strategis, sinergi dan *holding* BUMN untuk menciptakan efisiensi, kapasitas dan profitabilitas. • Memperkuat komunikasi dengan *stakeholders* perumahan.	**ST *Strategy*** • Meningkatkan *low cost funding* dan perluasan pada segmen *emerging affluent*. • Menggunakan *customer base* nasabah KPR untuk memperoleh dana murah yang semakin ketat. • Membangun *construction value chain* untuk mendukung peningkatan *supply* rumah.
***Internal Weakness* (W)** • Pertumbuhan DPK murah (*low cost funding*) belum optimal. • Kontribusi *fee based* masih kecil. • Penyelesaian kredit belum masif. • Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan. • Teknologi digital belum dibangun secara maksimal sebagai pendukung operasional bisnis data.	**WO *Strategy*** • Mengembangkan kerjasama dengan institusi pemilik dana besar untuk pembiayaan KPR program. • Pengembangan Infrastruktur TI dengan layanan/produk berbasis digital meningkatkan *mortgage*, dana dan *fee based income* • Sentralisasi operasi dan otomatisasi proses bisnis untuk percepatan proses dan efisiensi.	**WT *Strategy*** • Meningkatkan kompetensi pegawai melalui program, KMS, dan e learning dan pemenuhan secara pareto bisnis. • Meningkatkan efektivitas manajemen perkreditan dan *collection & recovery management* dengan percepatan penjualan kredit bermasalah/macet. • Selektif pada segmen *commercial non-housing*.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

MENANGGAPI TANTANGAN DAN PELUANG BISNIS DI INDUSTRI PERBANKAN, PERSEROAN MENETAPKAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS YANG MENGACU PADA KEBIJAKAN MANAJEMEN, *CORPORATE PLAN*, DAN ANALISIS SWOT. PENGEMBANGAN USAHA TERFOKUS PADA PENETAPAN STRATEGI DAN PROGRAM YANG TEPAT DEMI TERCAPAINYA KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL PERSEROAN.

Dengan berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi dunia dan nasional serta perbankan di tahun 2017, Perseroan menetapkan landasan kerja tahun 2017 yang disusun guna mencapai visi dan misi Perseroan. Direksi Perseroan menetapkan arah Kebijakan Umum Direksi (KUD) dengan semangat:

"Transformasi Bank BTN berbasis digital banking untuk penguatan dan perluasan bisnis perumahan, perbaikan proses bisnis, serta peningkatan produktivitas SDM "

Dengan menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019 strategi dan program pengembangan usaha terfokus pada beberapa langkah strategis untuk menunjang arah KUD tersebut, serta mencapai strategi utama perusahaan maka telah disusun *Grand Strategy* level korporat.

Strategi Perseroan Tahun 2017

Terdapat 3 pilar bidang utama untuk mencapai visi jangka panjang perusahaan yaitu terdepan dalam pembiayaan perumahan dengan 4 *enabler* pendukungnya. Penjelasan pilar tersebut adalah sebagai berikut:

Memperkuat bisnis *mortgage* dan *construction value chain*

Penguatan bidang kredit adalah penguatan bisnis inti bank, yaitu bidang perumahan disertai dengan perluasan dan membangun *construction value chain* untuk mendukung peningkatan *supply* rumah. Arah kebijakan bank di bidang kredit adalah:

1. Fokus dan memperluas kredit perumahan;
2. Membangun *construction value chain* untuk mendukung peningkatan supply rumah;
3. Selektif dalam pemberian kredit *non housing*;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen *collection & asset recovery.*

Meningkatkan *low cost & sustainable funding*

Penguatan bidang dana difokuskan pada meningkatkan *low cost* dan *sustainable funding* yaitu pendanaan berjangka panjang dan murah. Arah kebijakan bank dibidang dana adalah:

1. Peningkatan *low cost funding* dan perluasan pada segmen *emerging affluent*;
2. Perluasan kerja sama pendanaan institusi;
3. Peningkatan dan perluasan *wholesale funding*;

Memperkuat manajemen perkreditan berbasis Manajemen Risiko

1. Mengembangkan *credit scoring model;*
2. Perbaikan dan *enhancement* proses bisnis kredit;
3. Pembenahan administrasi dan dokumentasi kredit.

Meningkatkan sumber pendapatan non bunga

1. Meningkatkan pendapatan dari layanan transaksi, *digital banking, wealth management,* dan bank garansi;
2. Mengelola kredit-*off balance sheet*.

Organisasi, HC, & *Culture*

1. Alokasi optimal atas SDM dengan pemenuhan SDM secara pareto;
2. Pengembangan kompetensi melalui program pendidikan, KMS, dan e learning;
3. Memperkuat kewenangan *human capital* di Kantor Wilayah;
4. Memperkuat budaya kerja;
5. Membangun organisasi yang memiliki kapabilitas tinggi, efektif dan efisien;
6. Persiapan pembentukan anak usaha yang mendukung bisnis bank.

Digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional & penguatan infrastruktur IT

1. Sentralisasi operasi dan otomatisasi proses;
2. Membangun infrastruktur IT menuju implementasi digital banking;
3. Meningkatkan efisiensi operasinal;
4. Meningkatkan produktivitas *branch* sebagai basis penjualan;

Memperkuat implementasi GRC

1. Memperkuat penerapan manajemen risiko Bank;
2. Penyempurnaan *risk mapping*;
3. Implementasi GCG berdasarkan standar regulator dan regional;
4. Penyelesaian temuan audit eksternal dan temuan berulang.

ANALISIS KEUANGAN

KINERJA OPERASIONAL DI TAHUN 2016, PERSEROAN MAMPU MENCATATKAN KINERJA KEUANGAN YANG OPTIMAL. PERSEROAN BERHASIL MEMBUKUKAN LABA TAHUN BERJALAN SEBESAR RP2.618.905 JUTA. SELAIN ITU PERSEROAN JUGA BERHASIL MENCATATKAN POSISI KEUANGAN YANG KUAT DENGAN TOTAL ASET SEBESAR RP214.168.479 JUTA DAN TOTAL LIABILITAS SEBESAR RP195.037.943 JUTA DAN TOTAL EKUITAS SEBESAR RP19.130.536 JUTA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

POSISI KEUANGAN BANK BTN TAHUN 2016 MENUNJUKKAN

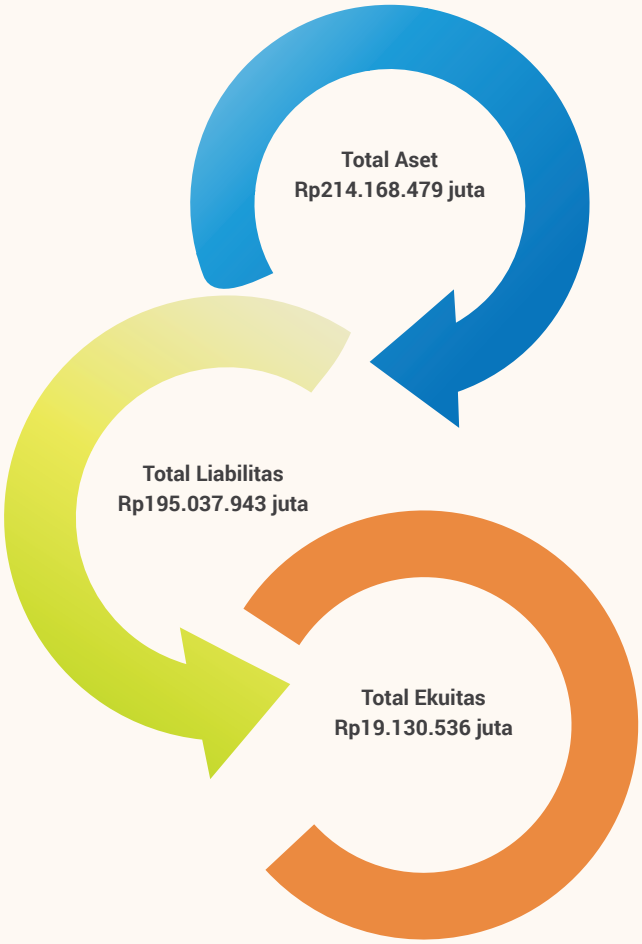

ASET

Total Aset Perseroan meningkat 24,66% menjadi Rp214.168.479 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp171.807.592 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset keuangan terutama pada pos kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp25.425.121 juta. Selain itu peningkatan aset Perseroan di tahun 2016 juga dipengaruhi oleh Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Obligasi Pemerintah yaitu masing-masing sebesar Rp9.741.873 juta, Rp2.364.139 juta, dan Rp1.012.731 juta.

Tabel Aset Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kas	924.451	920.482	1.181.219	(14,78)	1.006.682
Giro pada Bank Indonesia	9.858.758	9.371.509	10.986.351	(2,63)	10.697.378
Giro pada Bank Lain	400.215	1.093.393	201.361	59,57	321.306
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	4.839.268	1.496.455	7.839.477	124,27	17.581.350
Efek-efek	4.201.682	5.436.970	1.807.561	130,79	4.171.951
Obligasi Pemerintah	8.384.960	8.238.065	8.230.908	12,30	9.243.639
Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah	99.330.214	114.345.618	136.905.226	18,57	162.330.347
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	102.791
Aset Tetap	1.522.724	1.488.383	1.553.401	199,95	4.659.379
Bunga yang masih akan diterima	923.688	1.183.489	1.548.489	20,43	1.864.829
Aset Lain-lain	783.770	1.007.989	1.553.599	40,90	2.189.078
Total Aset	131.169.730	144.582.353	171.807.592	24,66	214.001.678

Grafik Aset Tahun 2013-2016 (Rp juta)

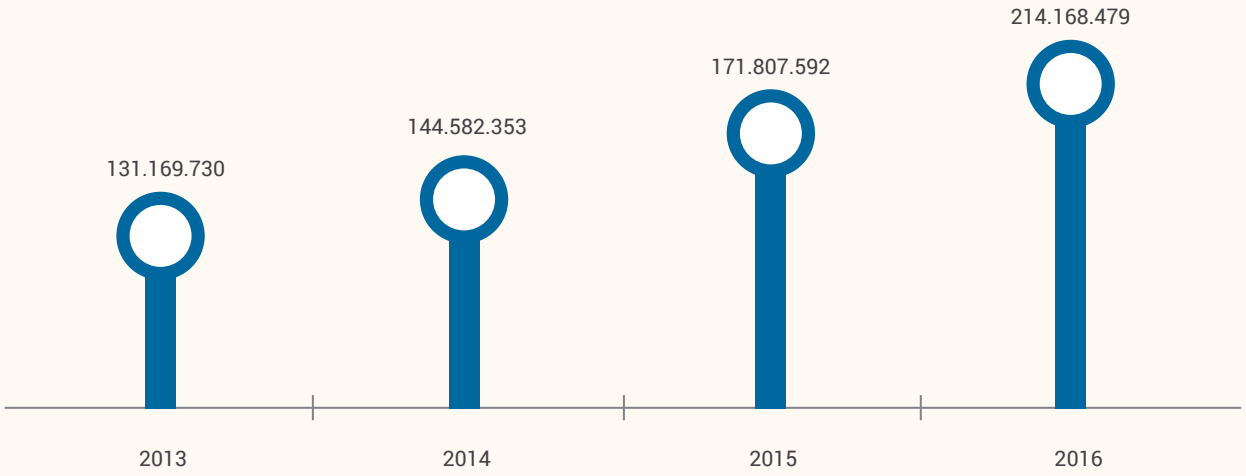

Kas

Total Kas Perseroan menurun 14,78% menjadi Rp1.006.682 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.181.219 juta. Penurunan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas Perseroan secara keseluruhan. Uraian lebih lanjut mengenai arus kas yang terjadi pada tahun 2016 dapat dilihat pada bagian Laporan Arus Kas.

Giro pada Bank Indonesia

Total Giro pada Bank Indonesia Perseroan menurun 2,63% menjadi Rp10.697.378 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp10.986.351 juta. Penurunan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan Giro pada Bank Indonesia,mengingat terdapat penurunan rasio GWM Utama Rupiah pada tahun 2016 menjadi 6,5%, dimana sebelumnya pada tahun 2015 adalah 7,5% sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional". Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional". Perseroan pada tahun 2016 dan 2015 tetap mematuhi ketentuan Giro Wajib Minimum yang telah ditetapkan oleh Regulator dalam hal ini Bank Indonesia.

Giro pada Bank Lain

Total Giro pada Bank Lain Perseroan meningkat 59,57% menjadi Rp321.306 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp201.361 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan Giro pada Bank Lain dalam bentuk Rupiah sebesar Rp40.896 juta. Hal tersebut merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas Perseroan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Total Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Perseroan meningkat 124,27% menjadi Rp17.581.350 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp7.839.477 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya Deposit Facility ke Bank Indonesia dalam rangka investasi dan pengelolaan likuiditas.

Efek-efek

Total Efek-efek Perseroan meningkat 130,79% menjadi Rp4.171.700 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.807.561 juta. Peningkatan portofolio Efek-efek dikontribusi oleh portofolio Diperdagangkan dan Tersedia Untuk Dijual masing-masing sebesar Rp548.521 juta dan Rp1.878.391 juta. Peningkatan portofolio Efek-efek pada tahun 2016 merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan treasury Perseroan.

Obligasi Pemerintah

Total Obligasi Pemerintah Perseroan meningkat 12,30% menjadi Rp9.243.639 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp8.230.908 juta. Peningkatan Obligasi Pemerintah dikontribusi oleh peningkatan pada portofolio Diperdagangan yaitu sebesar Rp1.111.312 juta. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari aktivitas investasi dan pengelolaan likuiditas Perseroan.

Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Total Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah Perseroan meningkat 18,57% menjadi Rp162.330.347 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp136.905.226 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan portofolio khususnya pada sektor perumahan yang merupakan sektor utama kredit dan pembiayaan Perseroan serta dalam rangka dukungan Perseroan terhadap program pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia.

Aset Pajak Tangguhan

Total Aset Pajak Tangguhan Perseroan memiliki saldo sebesar Rp102.791 juta sedangkan tahun 2015 tidak terdapat saldo. Saldo Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2016 memiliki saldo dikarenan pada tahun 2013 dan 2014 terdapat koreksi fiskal beda waktu yang berupa koreksi fiskal negatif yang membentuk Kewajiban Pajak Tangguhan, namun pada tahun 2015 dan 2016 koreksi fiskal, beda waktu, memiliki posisi koreksi fiskal positif yang mengurangi Kewajiban Pajak Tangguhan sehingga berdampak pada timbulnya Aset Pajak Tangguhan. Koreksi fiskal, beda waktu, tersebut disebabkan karena adanya cadangan yang tidak diperkenankan dalam perhitungan perpajakan.

Aset Tetap

Total Aset Tetap Perseroan meningkat 199,95% menjadi Rp4.659.379 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.553.401 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan revaluasi Aset Tetap pada tahun 2016, dimana pada tahun tersebut terdapat Paket Kebijakan Ekonomi salah satunya adanya penurunan pajak revaluasi Aktiva Tetap. Revaluasi Aset Tetap tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Bunga yang masih akan diterima

Total Bunga yang masih akan diterima Perseroan meningkat 20,43% menjadi Rp1.864.829 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.548.489 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Bunga yang masih akan diterima pada portofolio Kredit Yang Diberikan sebesar Rp312.255 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan portofolio Kredit yang Diberikan milik Perseroan di tahun 2016.

Aset Lain-lain

Total Aset Lain-lain Perseroan meningkat 40,90% menjadi Rp2.198.078 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.553.599 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tagihan kepada pihak ketiga sebesar Rp593.824 juta sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas operasional Perseroan seperti tagihan kepada pihak pengelola ATM dan mitra kerja Perseroan lainnya.

LIABILITAS

Total Liabilitas Perseroan meningkat 23,48% menjadi Rp195.037.943 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp157.947.485 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya Simpanan dari Nasabah dalam bentuk Giro dan Giro Wadiah masing-masing sebesar Rp13.491.520 juta dan Rp14.477.612 juta. Peningkatan Simpanan Nasabah merupakan dampak dari aktivitas pemasaran Perseroan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga.

Tabel Liabilitas Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Liabilitas Segera	1.284.306	1.835.807	1.960.789	6,18	2.081,886
Simpanan dari Nasabah	96.207.622	106.470.677	127.708.670	25,28	159.987.717
Simpanan dari Bank Lain	275.257	1.179.269	1.721.198	112,22	3.652.735
Efek-efek yang dijual dengan Janji dibeli kembali	2.652.730	3.817.603	2.135.091	(35,13)	1.385.000
Surat-surat Berharga yang diterbitkan	8.836.711	8.519.884	12.492.202	19,43	14.919.910
Pinjaman yang diterima	7.073.032	6.998.213	7.726.728	(35,29)	4.999.616
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	2.999.118
Bunga yang masih harus dibayar	241.370	308.996	357.364	7,05	382.551
Liabilitas Pajak Tangguhan	121.139	115.260	9.566	(100,00)	-

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	6.469	7.198	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain	2.877.737	3.076.551	3.835.877	20,69	4.629.410
Total Liabilitas	119.576.373	132.329.458	157.947.485	23,48	195.037.943

Grafik Liabilitas Tahun 2013-2016 (Rp juta)

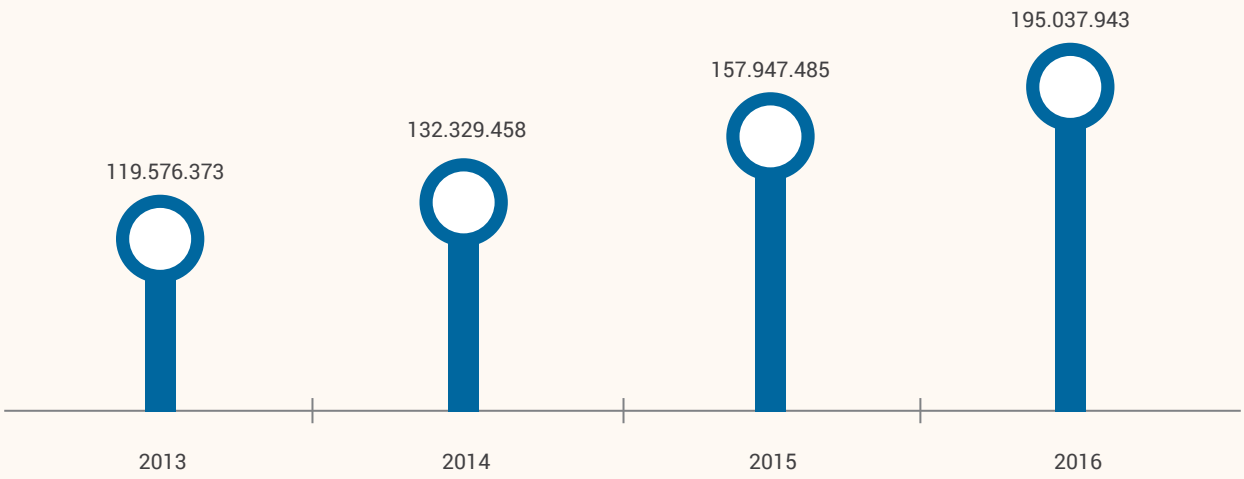

Liabilitas Segera

Total Liabilitas Segera Perseroan meningkat 6,18% menjadi Rp2.081.886 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.960.789 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp206.749 juta.

Simpanan dari Nasabah

Total Simpanan dari Nasabah Perseroan meningkat 25,28% menjadi Rp159.987.717 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp127.708.670 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Simpanan dalam bentuk Giro dan Giro Wadiah yaitu masing-masing sebesar Rp13.491.520 juta dan Rp14.477.612 juta sebagai dampak dari efektifitas pemasaran produk Perseroan.

Efek-efek yang dijual dengan Janji dibeli kembali

Total Efek-efek yang dijual dengan Janji dibeli kembali Perseroan menurun 35,13% menjadi Rp1.385.000 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.135.091 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya Efek-efek yang dijual dengan Janji dibeli kembali yang sudah jatuh tempo kontrak Repo-nya pada tahun 2016 sebesar Rp750.091 juta.

Simpanan dari Bank Lain

Total Simpanan dari Bank Lain Perseroan meningkat 112,22% menjadi Rp3.652.735 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.721.198 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya Simpanan dari Bank Lain dalam bentuk Simpanan Berjangka sebesar Rp1.458.949 juta sebagai dampak dari efektivitas pemasaran produk Perseroan.

Surat-surat Berharga yang diterbitkan

Total Surat-surat Berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat 19,43% menjadi Rp14.919.910 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp12.492.202 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp3.000.000 juta. Penerbitan obligasi tersebut digunakan Perseroan dalam rangka mendukung penyaluran kredit Perseroan.

Pinjaman yang diterima

Total Pinjaman yang diterima Perseroan menurun 35,29% menjadi Rp4.999.616 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp7.726.728 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan Pinjaman yang diterima pada tahun 2016.

Pinjaman subordinasi

Pada tahun 2016 Perseroan memiliki Pinjaman subordinasi sebesar Rp2.999.118 juta sedangkan tahun 2015 tidak terdapat saldo. Saldo pinjaman subordinasi tersebut merupakan pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai dukungan dalam program Sejuta Rumah.

Bunga yang masih harus dibayar

Total Bunga yang masih harus dibayar Perseroan meningkat 7,05% menjadi Rp382.551 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp357.364 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya Bunga yang masih harus dibayar yang bersumber dari kewajiban bunga atas Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17.716 juta, hal ini seiring dengan meningkatnya nilai Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Perseroan.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Total Liabilitas Pajak Tangguhan Perseroan menurun 100% sehingga tidak terdapat saldo di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp9.566 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya koreksi fiskal positif dikarenakan adanya cadangan yang tidak diperhitungkan dalam perpajakan.

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain

Total Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain Perseroan meningkat 20,69% menjadi Rp4.629.410 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp3.835.877 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban dalam bentuk Dana Jaminan Pengembang sebesar Rp445.506 juta seiring dengan meningkatnya penyaluran Kredit dan Pembiayaan pada proyek perumahan baru, dimana Perseroan mensyaratkan debitur untuk menyediakan dana jaminan dalam rangka penyelesaian kewajiban pengembang kepada nasabahnya.

EKUITAS

Total Ekuitas Perseroan meningkat 38,03% menjadi Rp19.130.536 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp13.860.107 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan dan adanya penambahan komponen ekuitas yang berasal dari revaluasi aset tetap di tahun 2016 masing-masing sebesar Rp2.248.724 juta dan Rp2.966.991 juta.

Tabel Ekuitas Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Modal Saham	5.282.427	5.283.848	5.291.173	0,07	5.295.000
Tambahan Modal Disetor	2.025.764	2.028.136	2.046.598	0,38	2.054.454
Opsi Saham	10.600	9.483	2.690	(100,00)	-
Kerugian Neto yang belum direalisasi atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah Pajak Tangguhan	(90.046)	(90.013)	(133.690)	(13,56)	(115.567)
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(85.362)	(110.251)	(106.144)	(26,00)	(78.546)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	2.966.991
Saldo Laba	4.449.974	5.131.692	6.759.480	33,27	9.008.204
	11.593.357	12.252.895	13.860.107	38,03	19.130.536

Grafik Ekuitas Tahun 2013-2016 (Rp juta)

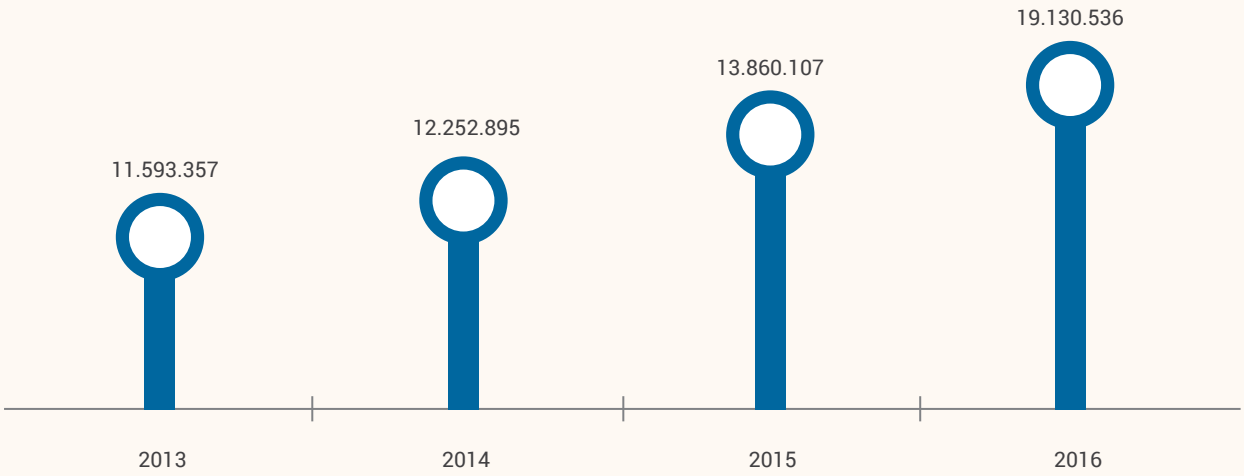

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

DENGAN KINERJA YANG OPTIMAL, PERSEROAN BERHASIL MEMPEROLEH PENDAPATAN OPERASIONAL YANG MENINGKAT DI TAHUN 2016 MENJADI RP18.421.641 JUTA SEHINGGA MAMPU MEMBUKUKAN LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBESAR RP5.631.617 JUTA.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan meningkat 210,91% menjadi Rp5.631.617 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.811.337 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan operasional 19,86% menjadi Rp8.163.545 juta dari Rp6.811.076 juta di tahun 2015. Selain itu, peningkatan laba tahun berjalan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan fee based Perseroan.

Tabel Laporan Laba/Rugi Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Pendapatan dan Beban Operasional	5.653.323	5.464.581	6.811.076	19,68	8.163.545
- Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	10.782.877	12.807.328	14.966.209	14,52	17.138.819
- Beban Bunga dan Bonus	(5.129.554)	(7.342.747)	(8.155.133)	10,06	(8.975.274)
Pendapatan Operasional Lainnya	763.983	894.82	1.106.526	15,93	1.282.822
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(430.289)	(771.166)	(901.008)	(21,47)	(707.531)
Pembalikan (beban) estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	(2.066)	(729)	7.198	-	-
Beban Operasional Lainnya	(3.849.042)	(4.010.139)	(4.490.187)	19,96	(5.386.604)
Laba Operasional	2.135.909	1.577.367	2.533.605	32.21	3.352.232
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	4.862	1.960	8.281	(364,46)	(22.148)
Laba Sebelum Beban Pajak	2.140.771	1.579.327	2.541.886	31,01	3.330.084
Beban Pajak	(578.610)	(433.755)	(690.979)	2,92	(711.179)
Laba Tahun Berjalan	1.562.161	1.145.572	1.850.907	41,49	2.618.905
Pendapatan komprehensif Lain:					
- Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(24.889)	4.107	72.814,27	2.994.589
- Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(119.104)	33	(43.677)	141,49	18.123
Total laba komprehensif tahun berjalan – setelah pajak	1.443.057	1.120.716	1.811.337	210,91	5.631.617
Laba Per Saham:					
- Dasar (nilai penuh)	148	108	175	41,14	247
- Dilusian (nilai penuh)	148	108	175	41,14	247

Grafik Laba Komprehensif Tahun Berjalan Tahun 2013-2016 (Rp juta)

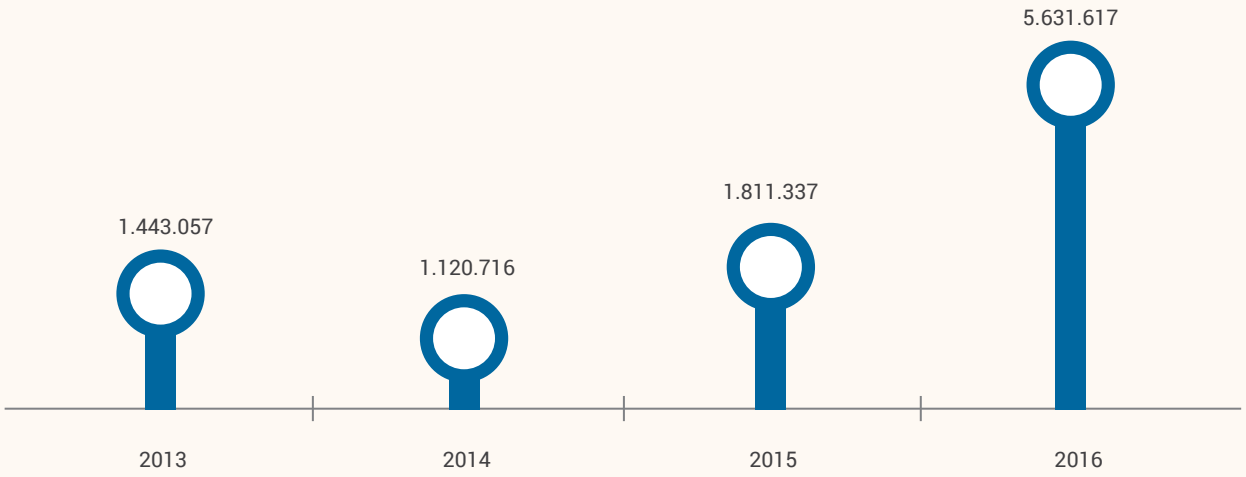

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan bunga dan bagi hasil meningkat 14,52% menjadi Rp17.138.819 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp14.966.209 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan bunga dari Kredit Yang Diberikan sebesar Rp1.935.085 juta sebagai dampak dari peningkatan saldo Kredit Yang Diberikan Perseroan.

Tabel Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Bunga	10.392.786	12.394.564	14.455.136	14,16	16.501.472
Bagi Hasil Secara Syariah	390.091	412.764	511.073	24,71	637.347
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	10.782.877	12.807.328	14.966.209	14,52	17.138.819

Beban Bunga dan Bonus

Beban bunga dan bonus meningkat 10,06% menjadi Rp8.975.274 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp8.155.133 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp510.944 sebagai akibat dari meningkatnya saldo simpanan nasabah yang dikelola Perseroan.

Tabel Beban Bunga dan Bunga Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Bunga	(5.115.187)	(7.295.733)	(8.073.584)	9,87	(8.870.675)
Beban Pendanaan Lainnya	(5.656)	(36.685)	(70.383)	29,22	(90.952)
Bonus	(8.711)	(10.329)	(11.166)	22,22	(13.647)
Beban Bunga dan Bonus	(5.129.554)	(7.342.747)	(8.155.133)	10,06	8.975.274

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya meningkat 15,93% menjadi Rp1.282.822 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.106.526 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan sebesar Rp57.556 juta. Selain itu peningkatan pendapatan operasional lainnya juga dikontribusi oleh peningkatan keuntungan penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp70.533 juta dan Rp34.935 juta. Peningkatan ini merupakan dampak dari meningkatnya transaksi operasional Perseroan.

Beban operasional lainnya meningkat 19,96% menjadi Rp5.384.604 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4.490.187 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp314.440 juta, hal ini khususnya dikontribusi dari biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp154.690 juta dalam rangka mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Laba Operasional

Laba operasional meningkat 32,31% menjadi Rp3.352.232 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.533.605 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan sebesar Rp2.172.610 juta sebagai dampak dari tumbuhnya aktiva produktif Perseroan serta terjaganya kualitas aktiva produktif Perseroan, khususnya kredit yang diberikan / pembiayaan syariah.

Grafik Laba Operasional Tahun 2013-2016 (Rp juta)

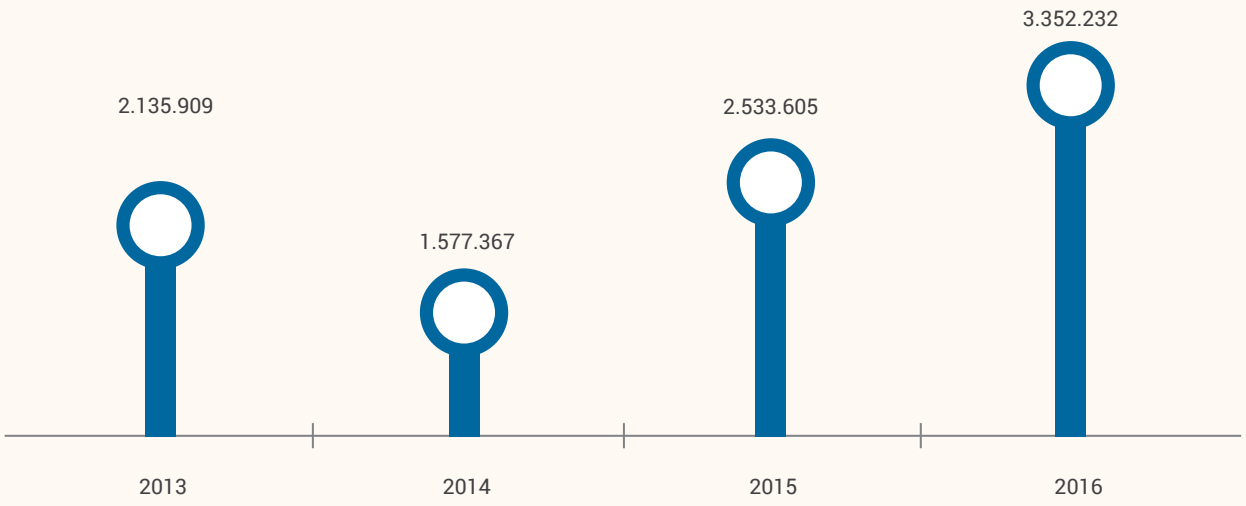

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 31,01% menjadi Rp3.330.084 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.541.886 juta.

Beban Pajak

Beban pajak meningkat 2,92% menjadi Rp711.179 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp690.979 juta. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya perolehan laba sebelum pajak Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat 41,49% menjadi Rp2.618.905 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.850.907 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas bisnis perseroan khususnya penyaluran Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Syariah serta terjaganya kualitas aktiva produktif Perseroan.

Grafik Laba Tahun Berjalan Tahun 2013-2016 (Rp juta)

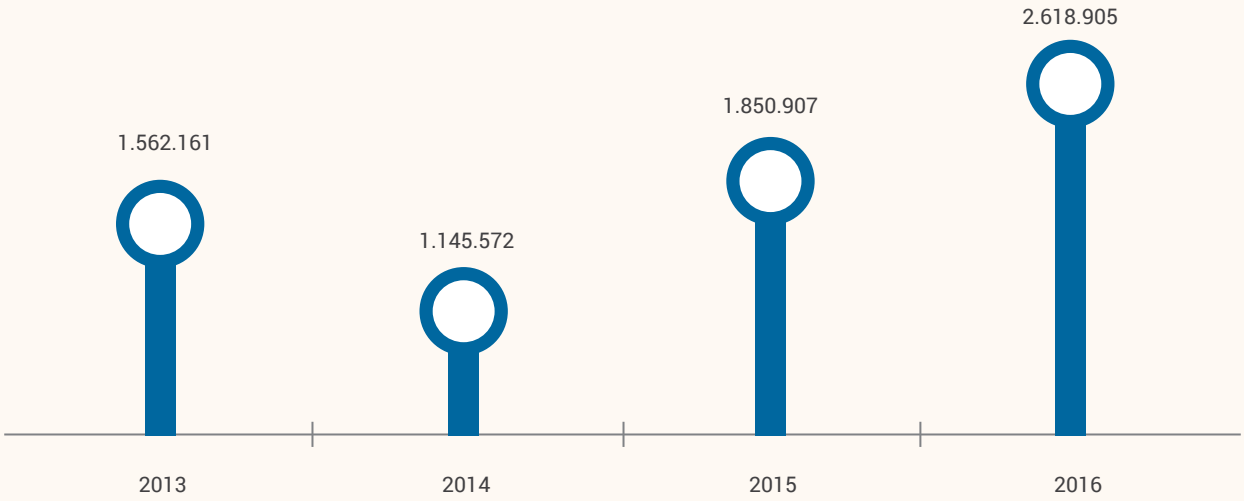

Laba Per Saham

Laba per saham – dasar pada tahun 2016 adalah sebesar Rp247 dan laba per lembar saham – dilusian adalah sebesar Rp247 Jumlah tersebut meningkat 41,14% jika dibandingkan dengan tahun 2015 masing-masing sebesar Rp175.

LAPORAN ARUS KAS

DARI KETIGA AKTIVITAS ARUS KAS, PERSEROAN MEMILIKI SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS SEBESAR RP29.608.198 JUTA DENGAN KENAIKAN BERSIH SEBESAR RP9.398.218 JUTA DARI TAHUN SEBELUMNYA.

Kenaikan kas dan setara kas tahun 2016 adalah sebesar Rp9.368.218 juta sehingga saldo kas dan setara kas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp29.608.198 juta meningkat 46,50% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp20.209.980 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari arus kas operasi khususnya dari penerimaan bunga dan bagi hasil sebagai dampak dari meningkatnya saldo Kredit Yang Diberikan / Pembiayaan Syariah serta terjaganya kualitas aset tersebut.

Tabel Arus Kas Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Keterangan	2013	2014	2015	Naik/turun (%)	2016
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.327.422)	(2.049.009)	1.707.579	472,97	9.783.925
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.227.290)	(3.332.479)	2.643.735	(174,67)	(1.974.142)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.185.910	301.463	2.826.668	(43,81)	1.588.435
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan setara Kas	(1.368.802)	(5.080.025)	7.177.982	30,93	9.398.218
Kas dan setara Kas Awal Tahun	19.480.825	18.112.023	13.031.998	55,08	20.209.980
Kas dan setara Kas Akhir Tahun	18.112.023	13.031.998	20.209.980	46,50	29.608.198

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi meningkat 472,97% menjadi Rp9.783.925 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.707.579 juta. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penerimaan bunga dan bagi hasil yaitu sebesar Rp2.219.042 juta. Selain itu Arus Kas bersih juga berasal dari peningkatan Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain yaitu masing-masing sebesar Rp11.041.054 juta dan Rp1.389.608 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi menurun 174,67% menjadi Arus Kas keluar Rp1.974.142 juta dibandingkan tahun 2015 Arus Kas masuk sebesar Rp2.643.735 juta. Penurunan tersebut terutama didukung oleh penurunan Efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp5.280.045 juta dan penurunan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual sebesar Rp811.475 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan menurun 43,81% menjadi Rp1.588.435 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.826.668 juta. Penurunan tersebut terutama didukung oleh pembayaran atas jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.000.000 juta

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DAPAT DIUKUR MELALUI KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA BAIK DALAM JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG. SELAIN ITU JUGA DAPAT MEMAKSIMALKAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG DENGAN CEPAT YAITU TERUTAMA ATAS KREDIT YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA NASABAH.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajibannya dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio tersebut juga merupakan indikator dalam menghitung kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional Perseroan. Hal ini mendorong Perseroan untuk senantiasa melakukan pengendalian kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Likuiditas Perseroan tercermin dari struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada pihak ketiga dan komitmen kredit kepada debitur. Perseroan membukukan Aset Lancar tahun 2016 sebesar Rp49.857.317 juta meningkat 39,41% dibandingkan tahun 2015 dan jumlah tersebut merupakan 23,28% dari total Aset atau 31,16% dari total simpanan non bank. Kondisi ini mengindikasikan bahwa likuiditas Perseroan yang baik. Selain itu, Perseroan berupaya mengendalikan risiko likuiditas dengan mengukur beberapa indikator, antara lain:

1. *Primary Reserve Ratio* (rasio Giro Wajib Minimum dan Kas)

Sampai dengan 31 Desember 2016, posisi GWM Primer Rupiah konvensional dan unit usaha syariah masing-masing sebesar 6,72% dan 5,08%. Sementara untuk valuta asing, Perseroan memelihara GWM Valas konvensional sebesar 8,47% dari total dana pihak ketiga valuta asing berdasarkan limit yang ditetapkan.

2. *Secondary Reserve* (cadangan likuiditas)

Merupakan pendukung *primary reserve* yang berfungsi sebagai cadangan likuiditas terhadap kebutuhan dana di luar jadwal. Perseroan mengelola *secondary reserve* melalui pembatasan cadangan likuiditas dalam bentuk *limit safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas Perseroan untuk tiga bulan ke depan. Sampai dengan 31 Desember 2016, cadangan likuiditas Perseroan berada di atas *safety level*.

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan cara membandingkan jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga (simpanan nasabah). Melalui pengukuran rasio likuiditas, maka jumlah dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai aset berupa kredit dapat diidentifikasi karena dana tersebut umumnya berjangka pendek sehingga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas bank. Sampai dengan 31 Desember 2016, LDR Perseroan sebesar 102,66%.

Solvabilitas bank diukur menggunakan rasio permodalan. Perseroan senantiasa memastikan kecukupan modal untuk memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* [CAR]). CAR adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk-Weighted Assets* [RWA]). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan

Modal Pelengkap ("Tier II"). Dalam rangka perhitungan Risiko Pasar, bank dapat memasukkan komponen Modal Pelengkap Tambahan ("Tier III") yaitu Pinjaman Subordinasi berjangka pendek yang memenuhi kriteria tertentu sebagai komponen Modal. Sampai dengan tahun 2016, Perseroan membukukan CAR untuk modal inti sebesar 16,54% dan CAR untuk risiko kredit, operasional dan pasar sebesar 20,34%.

Selain hal tersebut, obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan telah mendapatkan peringkat idAA+ dari lembaga pemeringkat PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan rincian sebagai berikut :

Obligasi	Peringkat 2016	Lembaga Pemeringkat
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi BTN XV	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Obligasi BTN XIV	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Adapun pada level perusahaan, Perseroan juga mendapatkan peringkat kredit yang baik oleh lembaga pemeringkat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Jenis Peringkat	Peringkat 2016	Lembaga Pemeringkat
Peringkat Perusahaan	idAA+	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Peringkat Nasional Jangka Panjang	AA(idn)	Fitch Rating
Peringkat Nasional Jangka Pendek	AA(idn)	Fitch Rating

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat Kolektibilitas Piutang bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Pada tahun 2016, NPL *Gross* untuk perbankan konvensional Perseroan adalah sebesar 3,02% dan untuk perbankan syariah adalah sebesar 1,01%. Sedangkan untuk NPL *Net* untuk perbankan konvesional adalah 1,96% dan untuk perbankan syariah adalah sebesar 0,66%. Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2015. Penurunan nilai NPL dikarenakan meningkatnya hasil pembinaan dan penyelesaian debitur *non performing* Perseroan sepanjang tahun 2016.

Tabel NPL tahun 2013-2016

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Konvensional				
Kolektibilitas I (Rp juta)	76.820.498	86.546.281	106.783.859	130.016.727
Kolektibilitas II (Rp juta)	11.593.883	12.273.483	16.381.551	15.672.200
Kolektibilitas III (Rp juta)	437.962	298.237	219.944	223.246
Kolektibilitas IV (Rp juta)	442.35	428.994	338.138	317.326
Kolektibilitas V (Rp juta)	3.091.615	3.724.282	4.008.666	3.992.461
NPL *Gross* (%)	4,30	4,19	3,58	3,02
NPL *Neto* (%)	3,24	2,95	2,26	1,96
Syariah				
Kolektibilitas I (Rp juta)	7.480.182	8.715.436	10.103.098	12.946.389
Kolektibilitas II (Rp juta)	507.086	730.313	934.086	1.134.820
Kolektibilitas III (Rp juta)	20.288	39.516	30.548	36.745
Kolektibilitas IV (Rp juta)	14.608	24.626	20.402	15.56
Kolektibilitas V (Rp juta)	58.919	134.633	135.512	90.907
NPL *Gross* (%)	1,16	2,06	1,66	1,01
NPL *Neto* (%)	0,70	0,67	0,44	0,66

Sebagai upaya untuk meminimalkan jumlah kredit macet di tahun 2016, Perseroan menerapkan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Melakukan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit dan pembiayaan,
2. Melakukan pembinaan dan penagihan atas debitur *non performing*,
3. Melakukan eksekusi agunan atas debitur *non performing* dengan melakukan lelang agunan dan mencari mitra strategis dalam pengelolaan aset Perseroan,

RASIO KEUANGAN

SELAIN KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN DAN KEMAMPUAN DALAM KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN PIUTANG, BEBERAPA RASIO PENTING YAITU RASIO PROFITABILITAS, RASIO SOLVABILITAS, DAN RASIO KEPATUHAN SERTA RASIO KEUANGAN LAINNYA MENJADI INDIKATOR PENTING KINERJA PERSEROAN.

RASIO PROFITABILITAS

Rasio Profitabilitas dapat diukur melalui rasio-rasio diantaranya adalah rasio *Return on Asset* (ROA) menilai seberapa besar kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan laba, *Return on Equity* (ROE) yang menilai kemampuan ekuitas Perseroan dalam menghasilkan laba, dan *Net Interest Margin* (NIM) yang menunjukkan kemampuan pendapatan bunga bersih dalam menghasilkan laba bersih (pendapatan bunga bersih).

Pada tahun 2016, nilai ROA Perseroan meningkat menjadi 1,76% dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,61%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan aset dan perbaikan kualitas aset produktif yang dimiliki Perseroan.

Untuk nilai ROE Perseroan meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2015 sebesar 16,84%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba Perseroan yang stabil seiring dengan bertumbuhnya modal inti Perseroan.

Sedangkan untuk nilai NIM Perseroan menurun menjadi 4,98% dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,87%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan imbal hasil kredit konsumer yang optimal.

Tabel Rasio Profitabilitas tahun 2013-2016 (%)

Keterangan	2013	2014	2015	2016
ROA	1,79	1,14	1,61	1,76
ROE	16,05	10,95	16,84	18,35
NIM	5,44	4,47	4,87	4,98

RASIO SOLVABILITAS

Pengukuran solvabilitas Perseroan menggunakan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) yaitu rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk-Weighted Assets* (RWA)). Dimana sesuai dengan peraturan BI, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan BI untuk bank dengan profil risiko 2 adalah sebesar 9-10%.

Pada tahun 2016, CAR Perseroan meningkat menjadi 20,34% dibandingkan tahun 2015 sebesar 16,97%.

Dengan rasio kecukupan Perseroan berada pada tingkat 20,34%, struktur permodalan Perseroan memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal Perseroan sudah memenuhi Peraturan BI. Hal ini berarti bahwa Perseroan telah mengelola dengan baik modal Perseroan dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Grafik CAR tahun 2013-2016 (%)

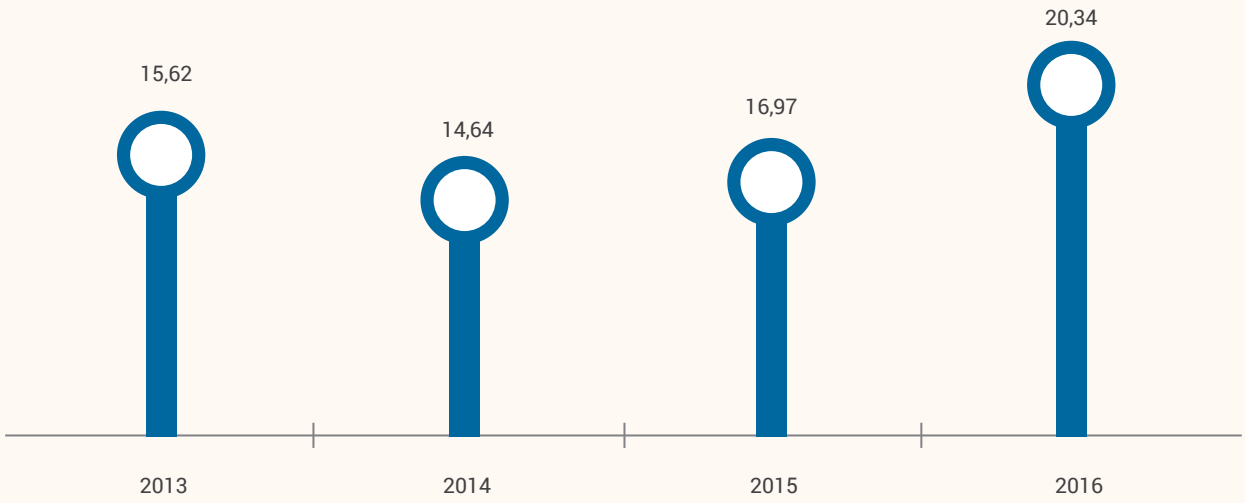

RASIO KEPATUHAN

Rasio kepatuhan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dari regulator yang diantaranya adalah pemenuhan Batas Maksimum Pemberikan Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), dan pemenuhan Posisi Devisa Neto (PDN).

Tabel Rasio Kepatuhan tahun 2013-2016 (%)

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Batas Maksimum Pemberikan Kredit (BMPK)				
Persentase Pelanggaran BMPK				
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK				
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (GWM)				
GWM Utama Rupiah				
Konvensional	9,29	8,09	7,95	6,72
Syariah	8,10	5,09	5,04	5,08
GWM Valuta Asing	8,03	8,39	8,08	8,47
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,01	1,92	1,74	0,29

RASIO KEUANGAN LAINNYA

Selain rasio-rasio diatas, berikut adalah rasio keuangan lain yang diperhitungkan Perseroan dalam menilai kinerja keuangan Perseroan.

Tabel Rasio Keuangan Lain tahun 2013-2016 (%)

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	3,31	3,26	2,91	2,42
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	3,60	3,57	3,20	2,64
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,01	1,21	1,38	1,20
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,19	88,97	84,83	82,48
Loan to Deposit Ratio (LDR)	104,42	108,86	108,78	102,66
NPL Gross	4,05	4,01	3,42	2,84
NPL Nett	3,04	2,76	2,11	1,85

PERMODALAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PENETAPAN RENCANA PERMODALAN PERSEROAN BERDASAR ATAS PENILAIAN KEBUTUHAN PERMODALAN YANG DIPERSYARATKAN DAN TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI. STRUKTUR MODAL YANG KUAT MEMILIKI DAYA DUKUNG TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN YANG TINGGI.

STRUKTUR MODAL

Perseroan telah menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan. Kebutuhan permodalan tersebut mdirencanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal Perseroan terdiri dari:

MODAL INTI

Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* – CET 1) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif).

MODAL PELENGKAP (MAKSIMUM 100% DARI MODAL INTI)

Modal pelengkap meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Pada 2016, Perseroan memiliki jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp20.219.637 juta, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan modal inti dan modal pelengkap tahun 2015 sebesar Rp13.893.026 juta.

Tabel Struktur Modal

(Rp Juta)

No	Komponen Modal	2016	2015
I.	**Modal Inti (Tier 1)**	**16.443.159**	**12.171.623**
1.	Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* - Cet 1)	16.443.159	12.171.623
1.1.	Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)	5.295.000	5.291.173
1.2.	Cadangan Tambahan Modal	11.650.424	7.224.620
1.2.1.	Agio/Disagio	2.054.454	2.046.598
1.2.2.	Modal Sumbangan	-	-
1.2.3.	Cadangan Umum	3.018.884	3.018.884
1.2.4.	Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	2.529.939	1.049.213
1.2.5.	Laba/Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	2.618.905	1.850.907
1.2.6.	Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.7.	Dana setoran modal	-	-
1.2.8.	Waran yang diterbitkan	-	-
1.2.9.	Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)	-	1.345
1.2.10.	Pendapatan komprehensif lain	(115.567)	(133.690)
1.2.11.	Saldo surplus revaluasi aset tetap	2.966.991	-
1.2.12.	Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	1.407.356	(604.430)
1.2.13.	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung	(15.826)	(4.207)
1.2.14.	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
1.3.	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
1.4.	Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(502.265)	(344.170)
1.4.1.	Perhitungan Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)	(102.791)	-
1.4.2.	*Goodwill*	-	-
1.4.3.	Aset tidak berwujud lainnya	-	-
1.4.4.	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
1.4.5.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6.	Eksposur Sekuritisasi	(399.474)	(344.170)
1.4.7.	Faktor Pengurang modal inti lainnya	-	-
1.4.8.	Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-
2.	Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* - AT 1)	-	-
2.1.	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
2.2.	Agio/Disagio	-	-

(Rp Juta)

No	Komponen Modal	2016	2015
2.3.	Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank Lain	-	-
II.	**Modal Pelengkap**	**3.776.478**	**1.721.403**
1.	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan	2.699.118	-
2.	Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrument modal pelengkap	-	-
3.	Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.077.360	880.927
4.	Cadangan Tujuan		840.476
5.	Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-
5.1.	Sinking Fund	-	-
5.2.	Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
	Total Modal	20.219.637	13.893.026
III.	**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**		
1.	ATMR Risiko Kredit	86.188.782	70.474.182
2.	ATMR Risiko Pasar	343.820	222.737
3.	ATMR Risiko Operasional	12.899.251	11.185.168
	Total ATMR	99.431.853	81.882.087
IV.	**Rasio KPMM**		
1.	Rasio CET1	16,54%	14,87%
2.	Rasio Tier 1	16,54%	14,87%
3.	Rasio Tier 2	3,80%	2,10%
	Rasio Total	20,34%	16,97%
V.	**Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko**	**9,00%**	**9,00%**

*Rasio KPMM dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DASAR PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan mengelola permodalan guna menjaga kecukupan modal sesuai profil risiko Bank secara menyeluruh dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Besarnya modal yang dikelola Perseroan harus dapat meng-*cover* risiko yang timbul dari aktivitas Perseroan namun tidak terbatas pada rencana ekspansi bisnis dan aktivitas lain. Perhitungan kecukupan modal mengacu pada Peraturan Regulator yang berlaku.

Perseroan telah dengan konsisten melaporkan kecukupan permodalan kepada *regulator* dan publik melalui laporan KPMM dan mencantumkan rasio KPMM pada Laporan Publikasi Bank. Rasio KPMM menunjukkan bahwa Modal Bank (CAR 16,97%) dapat meng-*cover* risiko (potensi kerugian) yang timbul dari aktivitas Perseroan saat ini dan yang akan datang.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.

3. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan:

   a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan.

   b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan.

   c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Komisaris.

   d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.

4. Direksi telah melakukan pengawasan dengan:

   e. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko.

   f. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui prosedur sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.

   g. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.

   h. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko minimal satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.

   i. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

   j. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh *Risk Management Division* (RMD) termasuk laporan mengenai profil Risiko.

a. Memastikan seluruh Risiko yang material dan menimbulkan dampak yang buruk telah ditindaklanjuti dan pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.

b. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan kegiatan usaha Perseroan yang ditemukan oleh Internal Audit Division (IAD).

c. Mengembangkan budaya peduli risiko termasuk budaya *anti fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

d. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.

e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara RMD dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan *limit* dalam menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang di-*review* dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Dalam menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* Perseroan mempertimbangkan strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta *limit* yang memperhatikan kemampuan modal Perseroan untuk dapat menyerap eksposur risiko. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko, peristiwa Risiko dan dampak Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Pengukuran

Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-*cover* risiko residual. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

Pemantauan

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan *limit internal*, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh RMD.

Pengendalian Risiko

Proses pengendalian Risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives,* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan serta adaptif terhadap perubahan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, dipastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian *intern* yang handal. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perseroan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta IAD. Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Perseroan menerapkan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) antara unit kredit dengan unit manajemen risiko, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di bidang perkreditan dengan adanya unit kerja Credit Risk Desk.
3. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:
    a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan;
    b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
    c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
    d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
    e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
    f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
    g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perseroan;
    h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
    i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perseroan berdasarkan hasil audit;
    j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perseroan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling kurang setiap tahun oleh RMD dan IAD.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

Penerapan manajemen risiko secara khusus difokuskan pada penerapan 7 risiko khusus diantaranya adalah:

Risiko Kredit

Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit Perseroan merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Perseroan. Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Organisasi manajemen risiko kredit dalam proses pemberian kredit telah menerapkan *four eyes principle* dengan *unit credit risk* yang terpisah dengan unit bisnis untuk kredit komersial. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap *limit* risiko kredit, membangun aplikasi *Internal Credit Rating* untuk kredit komersial dan melakukan *review Credit Scoring Model* secara berkala.

Strategi Manajemen Risiko Kredit

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Perseroan adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*) serta melakukan monitoring terhadap debitur inti.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Penurunan Nilai

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.55 dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang perhitungan ATMR dengan menggunakan pendekatan standar, tagihan yang telah jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah Pengakuan Awal dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi Arus kas Masa Datang atas aset keuangan. Kondisi tersebut ditandai dengan nilai tercatat kredit lebih besar jika dibandingkan dengan nilai terpulihkan yang diukur dengan nilai kini dari arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Apabila Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

1. Evaluasi secara Individual

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai individual dan mengukur kerugian penurunan nilai, Perseroan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Discounted cash flow*, Perseroan melakukan pencatatan berdasarkan jumlah yang diskonto yang diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang dan didiskonto berdasarkan suku bunga efektif awal dari setiap kredit.

b. *Fair value of collateral*, Perseroan melakukan pencatatan berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) melalui pengambil alihan agunan kredit.

2. Evaluasi secara kolektif

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kolektif dan mengukur kerugian penurunan nilai, Perseroan menggunakan metode roll rate analysis yang merupakan suatu metode analisis statistik yang menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi, serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera
1	Tagihan Kepada Pemerintah	37.657.046	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	94.634	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.057.921	7.499	852
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	49.064.374	32.348.218	19.090.646
6	Kredit Beragun Properti Komersial	11.000.150	5.042.495	2.256.226
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	407.358	270.936	135.760
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.566.048	1.765.332	675.611
9	Tagihan Kepada Korporasi	11.045.483	2.761.702	616.468
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.051.466	572.200	515.190
11	Aset Lainnya	4.255.619	2.112.084	581.537
	Total	119.200.099	44.880.466	23.872.290

*lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

(Rp Juta)

31 Desember 2016		31 Desember 2015				
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
Lain-lain	Total	Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain	Total
-	37.657.046	27.597.262	-	-	-	27.597.262
-	94.634	85.693	-	-	-	85.693
-	-	-	-	-	-	-
539	2.066.811	1.000.238	1.975	541	1.375	1.004.129
20.856.896	121.360.134	42.780.478	27.928.538	15.696.541	17.624.921	104.030.478
2.542.140	20.841.011	9.408.224	3.660.359	1.903.359	2.141.660	17.113.602
141.196	955.250	339.948	189.283	100.420	103.454	733.105
1.197.645	6.204.636	946.684	1.125.211	511.849	1.049.414	3.633.158
1.020.578	15.444.231	7.304.242	3.324.374	1.100.544	1.430.547	13.159.707
751.906	2.890.762	1.010.796	619.309	511.448	700.913	2.842.466
915.561	7.864.801	2.517.889	957.123	370.569	478.857	4.324.438
27.426.461	215.379.316	92.991.454	37.806.172	20.195.271	23.531.141	174.524.038

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	34.930.945	921.774	1.465.310	339.017	-	37.657.046
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	69.849	-	3.084	21.701	-	94.634
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.669.382	270.853	126.576	-	-	2.066.811
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	211.240	2.148.941	4.993.931	114.006.022	-	121.360.134
6	Kredit Beragun Properti Komersial	5.878.042	10.763.009	4.161.796	38.164	-	20.841.011
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.509	30.326	58.850	864.565	-	955.250
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	808.905	865.207	664.930	3.865.594	-	6.204.636
9	Tagihan Kepada Korporasi	6.617.096	4.407.531	1.325.515	3.094.089	-	15.444.231
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	789.746	256.820	203.897	1.640.299	-	2.890.762
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	7.864.801	7.864.801
	Total	50.976.714	19.664.461	13.003.889	123.869.451	7.864.801	215.379.316

(Rp Juta)

31 Desember 2015					
Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
25.130.083	692.039	1.335.263	439.877	-	27.597.262
54.686	28.007	3.000	-	-	85.693
-	-	-	-	-	-
864.252	89.907	49.970	-	-	1.004.129
1.240.004	2.662.994	4.677.134	95.450.346	-	104.030.478
5.110.033	8.865.428	2.725.384	412.757	-	17.113.602
6.197	31.597	51.308	644.003	-	733.105
640.770	1.108.664	596.175	1.287.549	-	3.633.158
5.606.018	3.953.707	1.428.091	2.171.891	-	13.159.707
752.704	285.797	222.477	1.581.488	-	2.842.466
-	-	-	-	4.324.438	4.324.438
39.404.747	17.718.140	11.088.802	101.987.911	4.324.438	174.524.038

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

31 Desember 2016

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	20.581	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	31.749	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	29.805.016	42.304	-	2.066.811	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang MelayaniRumah Tangga	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	121.360.134
20	Lainnya	7.852.030	-	-	-	-
	Total	37.657.046	94.634	-	2.066.811	121.360.134

(Rp Juta)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	15.048	21.996	19.359	-
-	-	2.299	4.472	2.887	-
-	-	4.218	189.530	12.640	-
-	-	28.531	123.845	31.606	-
-	-	8.142	31.879	16	-
18.365.111	-	345.263	7.407.846	553.402	-
-	-	279.677	1.214.624	146.794	-
-	-	20.753	804.050	79.816	-
-	-	13.821	104.998	22.644	-
-	-	36.321	1.114.002	3.107	-
2.475.900	-	15.009	1.278.096	18.605	-
-	-	-	-	-	-
-	-	12.300	261.628	11.396	-
-	-	23.809	588.884	5.774	-
-	-	148.417	371.907	32.378	-
-	-	1.161	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28.884	167.749	140	-
-	955.250	5.212.417	1.758.725	1.950.198	-
-	-	8.566	-	-	7.864.801
20.841.011	955.250	6.204.636	15.444.231	2.890.762	7.864.801

31 Desember 2015

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	24.686	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	61.007	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	576.829
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	18.515.828	-	-	1.004.129	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang MelayaniRumah Tangga	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	103.453.649
20	Lainnya	9.081.434	-	-	-	-
	Total	27.597.262	85.693	-	1.004.129	104.030.478

(Rp Juta)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	35.578	18.686	26.613	-
-	-	5.134	4.638	2.973	-
-	-	2.648	83.997	16.748	-
-	-	60.447	174.958	33.424	-
-	-	1.890	25.095	-	-
14.876.448	-	393.743	3.668.564	451.443	-
10.010	-	615.552	3.406.784	212.075	-
-	-	22.808	988.030	14.796	-
-	-	21.895	128.106	14.410	-
-	-	28.848	308.265	16.302	-
2.227.144	-	14.740	206.897	18.912	-
-	-	-	-	-	-
-	-	11.224	251.312	2.961	-
-	-	7.187	304.227	6.577	-
-	-	4.980	34.782	2.742	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	733.105	2.298.419	1.730.918	2.022.490	-
-	-	108.065	1.824.448	-	4.324.438
17.113.602	733.105	3.633.158	13.159.707	2.842.466	4.324.438

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

No	Keterangan	31 Desember 2016				
		Tagihan dan Cadangan Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
1	Tagihan	115.276.835	43.251.740	23.660.205	27.160.408	209.349.188
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	312.832	55.294	18.669	183.246	570.041
	a. Belum jatuh tempo	39.554	23.426	9.845	118.772	191.597
	b. Telah jatuh tempo	273.278	31.868	8.824	64.474	378.444
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	174.895	37.782	11.158	154.735	378.570
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	766.811	308.579	271.857	406.140	1.753.387
5	Tagihan yang dihapusbuku	255.149	167.440	134.288	102.344	659.221

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

(Rp Juta)

31 Desember 2015				
Tagihan dan Cadangan Berdasarkan Wilayah				
Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain	Total
90.279.316	36.921.220	20.070.635	23.493.572	170.764.743
366.681	49.537	74.230	122.351	612.799
123.994	20.565	34.984	55.701	235.244
242.687	28.972	39.246	66.650	377.555
194.396	14.352	39.710	51.559	300.017
783.925	326.769	264.029	389.411	1.764.134
210.269	94.673	84.714	44.943	434.599

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	31 Desember 2016			
			Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	84.211	-	26.794	18.160	10.426
2	Perikanan	12.496	-	-	-	2.913
3	Pertambangan dan Penggalian	217.189	-	6.298	2.042	9.023
4	Industri Pengolahan	235.700	-	23.800	16.052	15.421
5	Listrik, Gas dan Air	71.039	-	-	-	20
6	Konstruksi	24.326.680	69.917	134.300	133.946	587.506
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.789.060	5.519	52.305	48.723	142.399
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	987.674	72.040	81.682	78.331	6.230
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	186.807	23.556	5.018	30.574	15.077
10	Perantara Keuangan	33.588.488	-	1.480	1.480	23.868
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.803.051	-	42.178	26.084	17.804
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	291.108	-	-	-	6.956
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	646.737	20.565	4.589	23.178	14.034
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	564.749	-	-	-	71.911
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	1.160	-	-	-	2
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	196.166	-	-	-	4.739
19	Bukan Lapangan Usaha	131.995.304	-	-	-	825.058
20	Lainnya	10.351.569	-	-	-	-
	Total	209.349.188	191.597	378.444	378.570	1.753.387

(Rp Juta)

Tagihan yang Dihapusbuku	Tagihan	31 Desember 2015				
		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
		Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
23.890	113.988	-	26.794	10.884	18.254	14.971
1.723	15.548	-	-	-	2.811	2.515
11.680	136.901	-	10.692	7.531	14.261	991
31.318	307.143	-	19.135	19.135	25.328	7.888
139	88.104	-	-	-	155	182
169.897	19.617.087	108.573	172.250	134.917	538.134	68.718
263.776	3.344.368	9.884	46.092	39.567	280.846	145.618
3.373	1.055.551	66.805	12.488	4.501	6.370	1.235
5.403	210.868	4.938	7.018	7.041	39.820	1.716
6.674	20.596.127	6.108	1.572	2.392	9.979	1000
7.255	3.471.044	18.371	71.665	65.653	41.449	895
-	-	-	-	-	-	-
469	269.441	-	-	-	2.208	238
1.266	324.541	20.565	4.589	3.136	1.255	-
244	220.165	-	5.260	5.260	38.673	24.440
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
132.114	110.980.502	-	-	-	739.609	164.192
-	10.013.365	-	-	-	4.982	-
659.221	170.764.743	235.244	377.555	300.017	1.764.134	434.599

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

No	Keterangan	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	300.017	1.764.134	116.015	1.465.141
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	203.928	523.099	209.027	708.567
2.a.	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	203.928	523.099	209.027	708.567
2.b.	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-
5	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(125.375)	(533.846)	25.025	409.574
6	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-
7	Saldo akhir CKPN	378.570	1.753.387	300.017	1.764.134

Perseroan telah dengan konsisten melaporkan kecukupan permodalan kepada regulator dan publik melalui laporan KPMM dan mencantumkan rasio KPMM pada Laporan Publikasi Bank. Pada tahun 2016 Rasio KPMM menunjukkan bahwa Modal Bank (CAR 20,34%) dapat meng-cover risiko (potensi kerugian) yang timbul dari aktivitas Perseroan saat ini dan yang akan datang.

Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Perseroan menerapkan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar dalam menghitung risiko kredit. Dalam perhitungan risiko kredit, Perseroan telah memperhitungkan peringkat kredit. Penggunaan peringkat kredit dan lembaga pemeringkat dalam perhitungan risiko kredit, mengacu pada aturan penggunaan yang ditetapkan oleh *regulator* (Bank Indonesia).

Sejak tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

Exposure counterparty credit risk Perseroan umumnya adalah transaksi surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan agunan surat berharga yang memiliki nilai lebih tinggi daripada nilai surat berharga yang dibeli Perseroan.

Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

31 Desember 2016

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (IDN)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	37.657.046
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		94.634	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.877.362	-	10.572	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-

(Rp Juta)

Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
idBBZ+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	-	37.657.046
-	-	-	-	-	-	-	-	94.634
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	178.877	2.066.811
-	-	-	-	-	-	-	21.360.134	121.360.134
-	-	-	-	-	-	-	20.841.011	20.841.011
-	-	-	-	-	-	-	955.250	955.250
-	-	-	-	-	-	-	6.204.636	6.204.636
-	-	-	-	-	-	-	15.444.231	15.444.231
-	-	-	-	-	-	-	2.890.762	2.890.762
-	-	-	-	-	-	-	7.864.801	7.864.801

31 Desember 2015

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (IDN)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	26.023.295
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		24.686	61.007	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		252.706	67.766	9.779	366.908
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-

(Rp juta)

Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	1.573.967	27.597.262
-	-	-	-	-	-	-	-	85.693
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	306.970	1.004.129
-	-	-	-	-	-	-	104.030.478	104.030.478
-	-	-	-	-	-	-	17.113.602	17.113.602
-	-	-	-	-	-	-	733.105	733.105
-	-	-	-	-	-	-	3.633.158	3.633.158
-	-	-	-	-	-	-	13.159.707	13.159.707
-	-	-	-	-	-	-	2.842.466	2.842.466
-	-	-	-	-	-	-	4.324.438	4.324.438

Sedangkan untuk Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Transaksi Derivatif

   Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per 31 Desember 2016 dan 2015.

2. Transaksi Repo

   Uraian terkait Transaksi Repo dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Transaksi Repo

(Rp juta)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016				31 Desember 2015			
		Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.532.768	1.385.000	147.768	73.884	2.446.515	2.135.091	311.424	155.712
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.532.768	1.385.000	147.768	73.884	2.446.515	2.135.091	311.424	155.712

3. Transaksi Reverse Repo

   Perseroan tidak memiliki transaksi Reverse Repo per 31 Desember 2016 dan 2015.

Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

1. *Physical collateral,* berupa tanah dan bangunan.
2. *Financial collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
3. Lainnya berupa garansi, asuransi, dan lain-lain

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi. Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral, financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*). Pemberi jaminan atau garansi yang dimiliki oleh Perseroan umumnya merupakan perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan.

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisis dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara legal.

Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit.

Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut:

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

31 Desember 2016

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	
		0%	20%
A	Eksposur Neraca		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	37.657.046	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	94.634
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.884.053
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	44.009.059
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	212.330	185.395
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.432.170	9.209
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	255.216
11	Aset Lainnya	1.006.683	-
	Total Eksposur Neraca	40.308.229	46.437.566
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

(Rp Juta)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit								ATMR	Beban Modal
35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	18.927	1.703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	34.990	-	-	-	-	394.306	35.488
77.351.075	-	-	-	-	-	-	-	35.874.688	3.228.722
-	-	-	-	-	20.724.387	-	-	20.724.387	1.865.195
-	-	-	55.250	-	-	-	-	477.625	42.986
-	-	-	-	5.795.119	-	-	-	4.383.419	394.508
-	-	-	-	-	11.256.465	-	-	11.258.307	1.013.248
-	-	-	-	-	.579.781	1.055.765	-	3.214.471	289.302
-	-	-	-	-	6.780.527	77.591	-	6.896.913	620.722
77.351.075	-	-	90.240	5.795.119	40.341.160	1.133.356	-	83.243.043	7.491.874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	116.624	-	-	116.624	10.496
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.792	-	-	-	8.844	796
-	-	-	-	-	2.746.387	-	-	2.746.387	247.175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.792	2.863.011	-	-	2.871.855	258.467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	47.768	-	-	-	-	73.884	6.650

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	
		0%	20%
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
	Total *Counterparty Credit Risk*	-	-

31 Desember 2015

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	
		0%	20%
A	Eksposur Neraca		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	27.597.262	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	24.686
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	623.430
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	25.943.315
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	122.014	354.245
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.305.017	61.007
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	243.686
11	Aset Lainnya	1.169.123	-
	Total Eksposur Neraca	30.193.416	27.250.369
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-

								ATMR	Beban Modal
35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	47.768	-	-	-	-	73.884	6.650

(Rp juta)

								ATMR	Beban Modal
35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	61.007	-	-	65.944	5.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69.275	-	-	-	-	159.324	14.339
78.087.163	-	-	-	-	-	-	-	32.519.170	2.926.725
-	-	-	-	-	17.013.753	-	-	17.013.753	1.531.238
-	-	-	33.105	-	-	-	-	366.553	32.990
-	-	-	-	2.577.090	330.971	-	244.361	2.542.344	228.811
-	-	-	-	-	9.366.618	-	-	9.378.819	844.094
-	-	-	-	-	1.707.381	891.399	-	3.093.218	278.390
-	-	-	-	-	3.077.727	77.590	-	3.194.112	287.470
78.087.163	-	-	802.380	2.577.090	1.557.457	968.989	244.361	68.333.237	6.149.992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	99.849	-	-	99.849	8.986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.477	-	-	-	3.357	302
-	-	-	-	-	1.479.173	-	947.892	1.882.027	169.382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.477	1.579.022	-	947.892	1.985.233	178.670

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	
		0%	20%
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
	Total *Counterparty Credit Risk*	-	-

Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit

31 Desember 2016

Nz	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
A	Eksposur Neraca	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	37.657.046
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	94.634
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.919.043
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	121.360.134
6	Kredit Beragun Properti Komersial	20.724.387
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	955.250
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.192.844
9	Tagihan Kepada Korporasi	12.697.844
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.890.762
11	Aset Lainnya	7.864.801
	Total Eksposur Neraca	212.356.745
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	-

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit								ATMR	Beban Modal
35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	311.424	-	-	-	-	155.712	14.014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	311.424	-	-	-	-	155.712	14.014

(Rp Juta)

Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
-	-	-	-	37.657.046
-	-	-	-	94.634
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.919.043
-	-	44.009.059	-	77.351.075
-	-	-	-	20.724.387
-	-	-	-	955.250
212.330	-	185.395	-	5.795.119
1.432.170	-	9.209	-	11.256.465
-	-	255.216	-	2.635.546
-	-	-	-	7.864.801
1.644.500	-	44.458.879	-	166.253.366
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	116.624
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	11.792
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.746.387
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-
	Total Eksposur TRA	2.874.803
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	147.768
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-
	Total *Counterparty Credit Risk*	147.768

31 Desember 2015

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
A	Eksposur Neraca	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	27.597.262
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	85.693
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	692.705
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	104.030.478
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.013.753
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	733.105
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.628.681
9	Tagihan Kepada Korporasi	10.732.642
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.842.466
11	Aset Lainnya	4.324.440
	Total Eksposur Neraca	171.681.225

Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	116.624
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.792
-	-	-	-	2.746.387
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.874.803
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	147.768
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	147.768

(Rp juta)

Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
-	-	-	-	27.597.262
-	-	-	-	85.693
-	-	-	-	-
-	-	-	-	692.705
-	-	25.943.314	-	78.087.164
-	-	-	-	17.013.753
-	-	-	-	733.105
113.293	-	354.245	-	3.161.143
1.250.859	-	-	-	9.481.783
-	-	243.686	-	2.598.780
-	-	-	-	4.324.440
1.364.152	-	26.541.245	-	143.775.828

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	99.849
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.477
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.427.065
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-
	Total Eksposur TRA	2.531.391
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4	Tagihan Kepada Bank	311.424
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-
	Total *Counterparty Credit Risk*	311.424

Sekuritisasi Aset

Tujuan Perseroan melakukan sekuritisasi adalah mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/securities yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* – ABS atau Efek Beragun Aset – EBA).

Sekuritisasi Aset KPR dilakukan Perseroan antara lain sebagai upaya untuk mitigasi *maturity mismatch*, alternative sumber pendanaan KPR, dan peningkatan *lending capacity*.

Fungsi yang dijalankan oleh Perseroan dalam transaksi sekuritisasi adalah sebagai:

1. Kreditur awal,
2. *Servicer*,
3. *Investor*.

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan"), Perseroan telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Bagian Yang Dijamin				Bagian Yang Tidak Dijamin
Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	99.849
-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.477
-	-	-	-	2.427.065
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.531.391
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	311.424
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	311.424

Atas sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (efek beragun aset), Perseroan mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Perseroan telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak lawan. Oleh Karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Perseroan menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan KPR termasuk dalam sekuritisasi.

Kebijakan akuntansi atas transaksi sekuritisasi yang dilakukan oleh Perseroan mengacu pada substansi transaksi yang dilakukan. Dalam hal aktivitas sekuritisasi yang dilakukan oleh Perseroan tergolong dalam kategori true sale, maka seluruh hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut dihentikan pengakuannya saat tanggal perpindahan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari pembayaran yang diterima dan keuntungan dan kerugian komulatif diakui di dalam laba rugi.

Uraian terkait aktivitas Sekuritisasi Perseroan dan Peringkat beserta Lembaga Pemeringkat yang telah dilakukan Pereroan.

Tabel Sekuritisasi Aset, Peringkat, dan Lembaga Pemeringkat

Tahun Sekuritisasi	Seri Surat Berharga	Nilai Sekuritisasi	Senior Class
2016	SP BTN 02	1.000.000	913.000
2015	SP BTN 01	200.000	181.600
2014	KIK DBTN 05	1.500.000	1.371.000
2013	KIK DBTN 04	1.000.000	928.000
2012	KIK DBTN 03	1.000.000	925.000
2011	KIK DBTN 02	703.450	645.000
2010	KIK DBTN 01	750.000	688.500
2009	KIK DSMF II	391.305	360.000
2009	KIK DSMF I	111.111	100.000

Uraian Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi – Perseroan bertindak sebagai kreditur asal dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Transaksi Sekuritisasi

No	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2016			
		Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo	
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	6.655.866	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung				
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	6.655.866	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-
	a. Senior tranche				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
	b. Junior tranche				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-

Junior Class	Peringkat - Senior Class	Lembaga Pemeringkat
87.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
18.400	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
129.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
72.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
75.000	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
58.450	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
61.500	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
31.305	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
11.111	AAA	PT Moody's Indonesia

(Rp Juta)

31 Desember 2016		31 Desember 2015					
ATMR	Pengurang Modal	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
-	-	5.655.866	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.655.866	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	399.474	-	-	-	-	-	344.170

Tabel Ringkasan Aktivitas Sekuritisasi - Perseroan Bertindak sebagai Kreditur Asal

No	Underlying Asset
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6	Kredit Beragun Properti Komersial
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
9	Tagihan Kepada Korporasi
10	Aset Lainnya
	Total

Urian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

1. Eksposur Aset di Neraca

Tabel Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6	Kredit Beragun Properti Komersial
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
9	Tagihan Kepada Korporasi
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
	Total

(Rp Juta)

31 Desember 2016		31 Desember 2015	
Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6.655.866	-	5.655.866	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6.655.866	-	5.655.866	-

(Rp Juta)

31 Desember 2016			31 Desember 2015		
Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
37.657.046	-	-	27.597.262	-	-
94.634	18.927	18.927	85.693	65.944	65.944
-	-	-	-	-	-
1.919.043	394.306	394.306	692.705	159.324	159.324
121.360.134	42.476.047	35.874.688	104.030.478	32.519.170	32.519.170
20.724.387	20.724.387	20.724.387	17.013.753	17.013.753	17.013.753
955.250	477.625	477.625	733.105	366.553	366.553
6.192.844	4.644.633	4.383.419	3.628.681	2.542.344	2.542.344
12.697.844	12.697.844	11.258.307	10.732.642	9.378.819	9.378.819
2.890.762	3.428.490	3.214.471	2.842.466	3.093.218	3.093.218
7.864.801	6.896.913	6.896.913	4.324.440	3.194.112	3.194.112
212.356.745	91.759.172	83.243.043	171.681.225	68.333.237	68.333.237

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6	Kredit Beragun Properti Komersial
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
9	Tagihan Kepada Korporasi
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
	Total

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk)*

No	Kategori Portofolio
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(Rp Juta)

31 Desember 2016			31 Desember 2015		
Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
116.624	116.624	116.624	99.849	99.849	99.849
-	-	-	-	-	-
11.792	8.844	8.844	4.477	3.357	3.357
2.746.387	2.746.387	2.746.387	2.427.065	1.882.027	1.882.027
-	-	-	-	-	-
2.874.803	2.871.855	2.871.855	2.531.391	1.985.233	1.985.233

(Rp Juta)

31 Desember 2016			31 Desember 2015		
Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
147.768	73.884	73.884	311.424	155.712	155.712
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
147.768	73.884	73.884	311.424	155.712	155.712

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)
   Perseroan tidak memiliki risiko kredit akibat kegagalan setelmen per 31 Desember 2016 dan 2015.

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

No	Kategori Portofolio
1	*Delivery versus payment*
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
2	*Non-Delivery versus payment*
	Total

31 Desember 2016			31 Desember 2015		
Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5. Eksposur Sekuritisasi

Tabel Eksposur Sekuritisasi

(Rp Juta)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	399.474	-	344.170	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-		-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
	Total	399.474	-	344.170	-

6. Total Pengukuran Risiko Kredit

Tabel Pengukuran Risiko Kredit

(Rp Juta)

No	Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Total ATMR Risiko Kredit	86.188.782	70.474.182
2	Total Faktor Pengurang Modal	399.474	344.170

Risiko Pasar

Dalam pengelolaan portofolio *trading book*, Perseroan memiliki *limit cut loss*, *stop gain* dan *budget loss limit*. Selain itu Perseroan juga memiliki *limit* transaksi untuk masing-masing pelaku transaksi *treasury*. Valuasi portofolio *trading book* dilakukan harian oleh RMD yang independen dari pelaku transaksi *treasury*. Metode valuasi dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. Pemantauan portofolio *trading book* dilakukan rutin secara mingguan dan bulanan.

Pengelolaan portofolio *banking book* dilakukan terpusat oleh ALCO. Dalam upaya pengelolaan, Perseroan memiliki *limit* risiko suku bunga dalam *banking book.* Pengukuran dan pemantauan risiko suku bunga dalam *banking book* dilakukan rutin setiap bulan. Risiko suku bunga dalam *banking book* diukur dengan menggunakan metode *gap report*.

Perhitungan KPMM merujuk kepada metode standar dimana perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga, sedangkan perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing, Perseroan menetapkan *limit internal* untuk Posisi Devisa Netto (PDN). Selain itu terkait pengelolaan risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan *limit* transaksi valas diantaranya adalah *limit cut loss, stop gain, budget loss limit* dan *holding period limit.*

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi *spot*. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat *derivative*. Dalam perhitungan KPMM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, dan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas SE BI No. 9/33/DPNP.

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

(Rp Juta)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
		Bank		Bank	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	6.372	79.654	572	7.150
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	6.372	79.654	572	7.150
2	Risiko Nilai Tukar	21.134	264.166	17.247	215.587
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
	Total	27.506	343.820	17.819	222.737

Risiko Operasional

RMD bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh dan memastikan kebijakan manajemen risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi yang meliputi:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh,
2. Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan,
3. Melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko untuk Risiko Operasional pada seluruh lintas unit kerja,
4. Menyusun laporan profil Risiko Operasional yang akan disampaikan kepada Direktur Strategic, Compliance, and Risk dan Komite Manajemen Risiko,
5. Melakukan kajian kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru untuk risiko operasional.
6. Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen risiko untuk Risiko Operasional dan pelatihan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko, Perseroan mempunyai aplikasi BTN-*Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN-LED terkoneksi dengan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan *data lost event* secara *online* melalui media *web* (*web based*). Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut akan teridentifikasi peta eksposur risiko operasional dari masing-masing Kantor Cabang. Berdasarkan peta eksposur risiko operasional yang diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut. Dalam pemantauan Risiko Operasional dilakukan evaluasi posisi risiko operasional terhadap *limit* risiko operasional. Perseroan telah memulai rencana inisiasi penerapan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) dengan melaksanakan pelatihan RCSA dan persiapan pengembangannya.

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Perseroan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. Risk Management Division memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari sumber daya manusia, kebijakan manajemen risiko operasional Perseroan paling kurang memuat:

1. Kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen SDM antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan kode etik pegawai, peningkatan kompetensi dan integritas SDM, pengaturan dan pengawasan internal yang memadai pada proses rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi, dan cuti,
2. Persyaratan dan kualifikasi jabatan tertentu,
3. Wewenang dan tanggung jawab yang jelas,
4. Penerapan prinsip *Know Your Employee* (KYE),
5. Sistem remunerasi yang jelas dan transparan,
6. Kebijakan evaluasi secara berkala.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan manajemen risiko Perseroan harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan risiko, pengamanan di *dealing room,* dan ruang pemrosesan data.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan manajemen risiko Perseroan didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perseroan, *backup system* dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan manajemen risiko harus dimuat kewajiban melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara

berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD wajib mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk nasabah prioritas. CDD/EDD didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif khususnya pencegahan bank terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

Uraian terkait Risiko Operasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Operasional

(Rp Juta)

Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2016			31 Desember 2015		
	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	6.879.600	1.031.940	12.899.251	5.965.423	894.813	11.185.168

Risiko Likuiditas

Perseroan memiliki komite dibawah Direksi yang mengelola risiko likuiditas yaitu ALCO dengan Direktur Utama sebagai Ketua dan Treasury Division sebagai Sekretaris. Rapat ALCO dilaksanakan secara rutin minimal sekali setiap bulan. Sebagai second line, Perseroan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu Risk Management Division yang memiliki Departemen khusus untuk memantau risiko likuiditas secara periodik yaitu Departemen Market and Other Risk.

Perseroan telah menetapkan indikator untuk mendeteksi lebih dini terjadinya risiko likuiditas Perseroan. Indikator tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan internal tentang *Contingency Funding Plan*. Indikator peringatan dini tersebut antara lain penurunan *secondary reserve* kurang dari minimal berturut-turut selama beberapa hari kerja, peningkatan *limit maturity gap* 1 bulan, penurunan rasio LCR, trend penurunan DPK dalam 1 bulan terakhir, dan penurunan total DPK 50 nasabah terbesar.

Pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas dilakukan secara mingguan dan bulanan oleh RMD. Untuk mengukur ketahanan Perseroan terhadap risiko likuiditas, Perseroan melakukan *stress test* risiko likuiditas secara rutin minimal 3 bulan sekali dengan skenario *Bank Specific Crisis* dan *General Market Crisis.*

Untuk mengendalikan risiko likuiditas, Perseroan memiliki *limit secondary reserve* yang wajib dijaga dan dipantau secara harian. Sebagai pedoman dalam pengendalian risiko likuiditas dalam kondisi stress, Perseroan memiliki kebijakan tentang *Contingency Funding Plan*. Aktivitas pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh ALCO.

Uraian Profil Maturitas Rupiah dan Valas dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Profil Maturitas Rupiah

No	Pos-pos	31 Desember 2016				
		Saldo	Jatuh Tempo			
			≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan
I. Neraca						
A.	Aset					
1	Kas	998.981	998.981	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	28.274.095	28.274.095	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	360.367	360.367	-	-	-
4	Surat Berharga	13.077.579	9.812.231	-	-	28.201
5	Kredit yang diberikan	164.446.381	2.880.401	1.445.806	3.099.012	5.322.567
6	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	6.684.120	-	-	-	-
	Total Aset	213.841.523	42.326.075	1.445.806	3.099.012	5.350.768
B.	Kewajiban					
1	Dana Pihak Ketiga	159.758.668	128.217.067	14.158.242	4.299.991	696.716
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	5.637.230	3.599.117	-	985.329	1.052.784
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	12.935.415	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	7.998.734	-	-	1.999.695	1.000.000
6	Kewajiban lainnya	1.385.000	-	-	-	-
7	Lain-lain	7.084.268	-	-	-	-
	Total Kewajiban	194.799.315	31.816.184	14.158.242	7.285.015	2.749.500
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	19.042.208	(89.490.109)	(12.712.436)	(4.186.003)	2.601.268
II. Rekening Administratif						
A.	Tagihan Rekening Administratif					
1	Komitmen	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	3.889.006	3.889.006	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	3.889.006	3.889.006	-	-	-
B.	Kewajiban Rekening Administratif					
1	Komitmen	16.448.549	16.448.549	-	-	-
2	Kontijensi	2.435.320	2.435.320	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	18.883.869	18.883.869	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(2.435.320)	(2.435.320)	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	4.047.345	104.484.972)	(12.712.436)	(4.186.003)	2.601.268
	Selisih Kumulatif	4.047.345	(104.484.972)	(12.712.436)	(4.186.003)	2.601.268

(Rp Juta)

	31 Desember 2015						
Jatuh Tempo	Saldo	Jatuh Tempo					
> 12 Bulan		≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
-	1.179.438	1.179.438	-	-	-	-	
-	18.511.362	18.511.362	-	-	-	-	
-	486.356	486.356	-	-	-	-	
3.237.147	9.994.383	6.535.512	-	38.002	139.817	3.281.052	
151.698.595	138.955.804	2.858.707	1.564.572	2.618.926	4.151.482	127.762.117	
-	-	-	-	-	-	-	
6.684.120	2.541.338	-	-	-	-	2.541.338	
161.619.862	171.668.681	29.571.375	1.564.572	2.656.928	4.291.299	133.584.507	
12.386.652	127.668.168	102.119.340	10.854.665	4.809.151	7.334.495	2.550.517	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3.277.231	1.173.206	547.342	997.094	559.589	-	
12.935.415	10.936.594	-	-	-	999.617	9.936.977	
4.999.039	7.197.515	-	-	-	-	7.197.515	
1.385.000	2.135.091	-	-	-	750.091	1.385.000	
7.084.268	6.685.318	-	-	-	-	6.685.318	
38.790.374	157.899.917	103.292.546	11.402.007	5.806.245	9.643.792	27.755.327	
122.829.488	13.768.764	(73.721.171)	(9.837.435)	(3.149.317)	(5.352.493)	105.829.180	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2.874.283	2.874.283	-	-	-	-	
-	2.874.283	2.874.283	-	-	-	-	
-	13.210.290	13.210.290	-	-	-	-	
-	1.075.991	1.075.991	-	-	-	-	
-	14.286.281	14.286.281	-	-	-	-	
-	(11.411.998)	(11.411.998)	-	-	-	-	
122.829.488	2.356.766	(85.133.169)	(9.837.435)	(3.149.317)	(5.352.493)	105.829.180	
122.829.488	2.356.766	(85.133.169)	(9.837.435)	(3.149.317)	(5.352.493)	105.829.180	

Tabel Profil Maturitas Valas

No	Pos-pos	31 Desember 2016				
		Saldo	Jatuh Tempo			
			≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan
I. Neraca						
A.	Aset					
1	Kas	7.701	7.701	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4.365	4.365	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	204.817	204.817	-	-	-
4	Surat Berharga	110.073	40.634	13.602	-	-
5	Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-
6	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Aset	326.956	257.517	13.602	-	-
B.	Kewajiban					
1	Dana Pihak Ketiga	238.628	225.958	12.555	-	115
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-
6	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	238.628	225.958	12.555	-	115
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	88.328	31.559	1.047	-	(115)
II. Rekening Administratif						
A.	Tagihan Rekening Administratif					
1	Komitmen	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	475.728	475.728	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	475.728	475.728	-	-	-
B.	Kewajiban Rekening Administratif					
1	Komitmen	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	294.831	294.831	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	294.831	294.831	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	180.897	180.897	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	269.225	212.456	1.047	-	(115)
	Selisih Kumulatif	269.225	212.456	1.047	-	(115)

(Rp Juta)

	31 Desember 2015					
	Saldo	Jatuh Tempo				
> 12 Bulan		≤ 1 Bulan	> 1 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 12 Bulan	> 12 Bulan
-	1.781	1.781	-	-	-	-
-	4.466	4.466	-	-	-	-
-	125.858	125.858	-	-	-	-
55.837	6.806	6.806	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55.837	138.911	138.911	-	-	-	-
-	47.568	46.813	362	393	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	47.568	46.813	362	393	-	-
55.837	91.343	92.098	(362)	(393)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	547.013	547.013	-	-	-	-
-	547.013	547.013	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	384.077	384.077	-	-	-	-
-	384.077	384.077	-	-	-	-
-	162.936	162.936	-	-	-	-
55.837	254.279	255.034	(362)	(393)	-	-
55.837	254.279	255.034	(362)	(393)	-	-

Tabel *Liqudity Coverage Ratio* (LCR)

Nilai LCR (%)							
	2016				2015		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Bank Secara Individu	66,40%	124,12%	169,11	162,25%	65,74%	77,42%	73,70%

Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Risk Management Division bersama-sama Legal Division (LGD) berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Risk Management Division dengan mengevaluasi

efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan *limit* Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Dari 87 Kantor Cabang (Konvensional dan Syariah) 86 Kantor Cabang telah ditempatkan pegawai sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) dan dari 4 Kantor Wilayah 1 Kantor Wilayah telah ditempatkan pegawai sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang berfungsi untuk memberikan pendapat maupun konsultasi hukum kepada Kantor Cabang dalam rangka pengamanan aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dan restrukturisasi kredit, melakukan observasi, penelitian dan memberikan saran terhadap operasional di unit kerja Kantor Cabang yang dinilai memiliki potensi risiko hukum serta mendampingi dan membantu proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum.

Risiko Stratejik

Risk Owner

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan stratejik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.

1. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa:
   a. Praktik manajemen risiko untuk risiko stratejik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten.
   b. Unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik.
2. Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
3. Strategic Innovation dan Performance Management Division (SIPD) bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko Stratejik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
4. Risk Management Division (RMD) dan SIPD bertanggung jawab dalam proses manajemen risiko untuk risiko stratejik dalam berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana stratejik, memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana stratejik, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi

secara berkelanjutan serta Memastikan bahwa seluruh isu stratejik dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan stratejik telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Strategi Manajemen Risiko Stratejik

1. Dalam penyusunan strategi, SIPD wajib mengevaluasi posisi kompetitif Perseroan di industri. Dalam hal ini Perseroan perlu untuk:
   a. Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Perseroan.
   b. Mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perseroan.
   c. Menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan stratejik serta toleransi risiko Bank. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
2. SIPD harus menetapkan rencana stratejik dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Rencana stratejik dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan;
4. Dalam hal Perseroan berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Perseroan wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan
5. Setiap penerapan rencana stratejik harus didukung dengan sumber pendanaan yang cukup yang sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Stratejik dilakukan oleh SIPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan RMD yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM.

Dalam pengendalian Risiko Stratejik SIPD berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilaksanakan oleh Compliance Desk (CMPD) sebagaimana wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko meliputi:

Kepatuhan

1. CMPD membuat rencana kerja kepatuhan yang memadai,
2. CMPD memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan:
   a. Ketetapan penetapan *limit*,
   b. Kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui *limit*,
   c. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala,
   d. Ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi,
   e. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru,
   f. Kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

Untuk setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh *regulator*, Perseroan melakukan evaluasi dan menyesuaikan Peraturan Intern dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh regulator tersebut. Dalam mengidentifikasi Risiko Kepatuhan, Compliance Division (CMPD) melalui BCSO melakukan evaluasi eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat (inheren) pada ketentuan internal. Di samping itu, CMPD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian kepatuhan terhadap produk baru dan konsep peraturan internal yang baru,
2. Melakukan kajian terhadap peraturan internal yang masih berlaku,
3. Melakukan sosialisasi kebijakan regulator baru kepada divisi-divisi dan Kantor Cabang.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk m*ereview* semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Perseroan.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi yaitu CSD (Corporate Secretary Division) yang bertanggung jawab antara lain:

1. Menjalankan fungsi kehumasan dan merespons pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Perseroan dan dapat menyebabkan kerugian Perseroan,
2. Mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, yaitu investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Perseroan memiliki kebijakan untuk mengantisipasi dan menangani adanya Risiko Reputasi perusahaan yang salah satunya disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Direksi No. 01/PD/DHHP/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Reputasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Peraturan Direksi ini bertujuan untuk mengelola Risiko Reputasi atas setiap kejadian terutama dalam bentuk persepsi negatif maupun pemberitaan negatif yang dihadapi Perseroan, agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan tidak mengalami hambatan sehingga mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Dengan Peraturan Direksi ini, dimaksudkan agar segala kegiatan usaha Perseroan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama adanya akuntabilitas Perseroan kepada publik.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah. Perseroan telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Dalam pengendalian Risiko Reputasi, CSD bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR). Kegiatan CSR tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program sosial lainnya yang dapat meningkatkan reputasi Perseroan di tengah masyarakat.

Perseroan mengelola risiko reputasi pada saat krisis melalui jalur komunikasi di Corporate Secretary Division (CSD).

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

PERSEROAN MEMILIKI KEWAJIBAN KEPADA NEGARA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEPADA NEGARA, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. KONTRIBUSI LANGSUNG BERUPA PENERIMAAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN PAJAK DAN SETORAN DIVIDEN. SEDANGKAN KONTRIBUSI TIDAK LANGSUNG BERUPA *MULTIPLIER EFFECT* BAGI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

SETORAN PAJAK

Taat pajak menjadi komitmen Perseroan terutama dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak, yaitu pembayar pajak dan pemotong/pemungut pajak. Jumlah setoran pajak tahun 2016 adalah sebesar Rp1.948.503.394.645 sedangkan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp1.950.525.746.797 Sedangkan sebagai pemotong/pemungut pajak, secara aktif berperan dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan terhadap setiap objek.

Total Pembayaran Pajak Periode Januari-Desember 2016 (Rp)

Pajak	2016
PPh Badan	743.020.000.000
PPh Perorangan	199.643.150.360
PPN	7.931.211.906
PPnBM	-
PBB	8.609.488.033
Pajak Lainnya:	
PPh Pasal 22	3.303.367.804
PPh Pasal 23	44.063.089.281
PPh Pasal 26	16.851.390.731
PPh Pasal 4 ayat 2	886.369.817.725
Lainnya (SKP, STP, Revaluasi)	38.711.878.805
Jumlah Pembayaran Pajak	**1.948.503.394.645**

PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian Dividen dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pembagian Dividen Tahun Buku 2015

Pembagian dividen tahun buku 2015 dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 12 April 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp1,85 triliun,
2. Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih Perseroan yaitu Rp370,18 miliar dan alokasi atas saldo laba sebesar 80% dari laba bersih yaitu Rp 1,48 triliun yang ditetapkan sebagai laba ditahan. Jumlah dividen kas per saham sebesar Rp34,96 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan *payout ratio* sebesar 20%,
3. Pembagian dividen untuk tahun buku 2015 dibayarkan pada 12 Mei 2016 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2016.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2014

Pembagian dividen tahun buku 2014 dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar Rp1,12 triliun,
2. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih Perseroan yaitu Rp223,12 miliar, dan alokasi atas saldo laba sebesar 80% dari laba bersih yaitu Rp892,473 miliar yang ditetapkan sebagai laba ditahan. Jumlah dividen kas per saham sebesar Rp21,11 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang saham Perseroan dengan payout ratio sebesar 20%,
3. Pembagian dividen untuk tahun buku 2014 dibayarkan pada tanggal 24 April 2015 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2015.

Tabel Pembagian Dividen Tahun Buku 2012-2015

Uraian	Tahun Buku 2012	Tahun Buku 2013	Tahun Buku 2014	Tahun Buku 2015
Laba Bersih (Rp miliar)	1,364	1,562	1,116	1,851
Dividen (Rp miliar)	409	469	223	370
Deviden Per Saham (Rp)	38.74	44.36	21.11	34.96
Dividend Pay Out Ratio (%)	30	30	20	20
Tanggal Pengumuman	1 April 2013	27 Februari 2014	26 Maret 2015	13 April 2016
Tanggal Pembayaran	10 Mei 2013	7 April 2014	24 April 2015	12 Mei 2016

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Sepanjang tahun 2016, Perseroan melakukan perikatan material mengenai investasi barang modal dengan berbagai pihak yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

No	Pihak yang Berikatan	Tujuan	Sumber Dana	Denominasi (Rp juta)
1	PT Nagabaling Persada	Penyediaan sarana learning center	RKAP Belanja Modal 2016	1.560
2	PT Nuansa Karya Selaras	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.470
3	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.932
4	PT Integra Daya Cipta Grahatama	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.926
5	PT Binayasa Putra Batara	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.156
6	PT Pawit Jaya Utama	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.150
7	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.910
8	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.666
9	PT Asia Pacific True Trust	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.700
10	PT Aman Putera jaya	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.705
11	PT Aleksa Putra Sejati	Penyediaan fasilitas pendukung kantor	RKAP Belanja Modal 2016	1.110
12	PT Maju Kaya	Pengamanan Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.635
13	PT Casa Prima Indonesia	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.528
14	PT Aleksa Putra Sejati	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.765

No	Pihak yang Berikatan	Tujuan	Sumber Dana	Denominasi (Rp juta)
15	PT Casa Prima Indonesia	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.800
16	PT Aman Putra Jaya	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.835
17	PT Nuanza Karya Selaras	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.506
18	PT Nuanza Karya Selaras	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.941
19	PT Pawit Jaya Utama	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.590
20	PT Elkanusa Sanggadata	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.254
21	PT Casa Prima Indonesia	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.700
22	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	6.475
23	PT Brahmakerta Adiwira	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.825
24	PT Ayu Mustika Rizki	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.985
25	PT Binayasa Putra Batara	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.140
26	PT Brahmakerta Adiwira	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.250
27	PT Binayasa Putra Batara	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.335
28	PT Taruna Bangun Persada	Penyediaan sarana learning center	RKAP Belanja Modal 2016	1.790
29	PT Ayu Mustika Rizki	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.195
30	PT Mitsubishi Jaya Elevator	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.550
31	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	12.875
32	PT Casa Prima Indonesia	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	9.950
33	PT AsiaPacific TrueTrust	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.800

No	Pihak yang Beri-katan	Tujuan	Sumber Dana	Denominasi
34	PT Integra Daya Cipta Grahatama	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	16.000
35	PT Pawit Jaya Utama	Penyediaan fasilitas pejabat Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.430
36	PT Elkanusa Sanggadata	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.593
37	PT Access Micro Sistem	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.320
38	PT Taruna Bangun Perkasa	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.723
39	PT Binayasa Putera Batara	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.699
40	PT Visionet Data Internasional	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	1.068
41	PT Nuanza Karya Selaras,	Keperluan Operasional Bank	RKAP Belanja Modal 2016	3.875

INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan aset yang masih dalam penyesuaian berupa bangunan. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Pada tahun 2016 jumlah penambahan investasi barang modal sebesar Rp3.437.997 juta meningkat 1.186,73% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp267.188 juta.

Tabel Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap Tahun 2013-2016 (Rp juta)

Jenis Aset Tetap	2013	2014	2015	2016
Tanah	1.525	4.583	286	3.042.845
Bangunan	83.019	120.584	60.698	125.856
Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor	153.544	97.149	151.407	180.832
Aset dalam penyelesaian	28.535	16.068	54.797	88.464
Total Penambahan	266.623	238.384	267.188	3.437.997

Grafik Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap Tahun 2013-2016 (Rp juta)

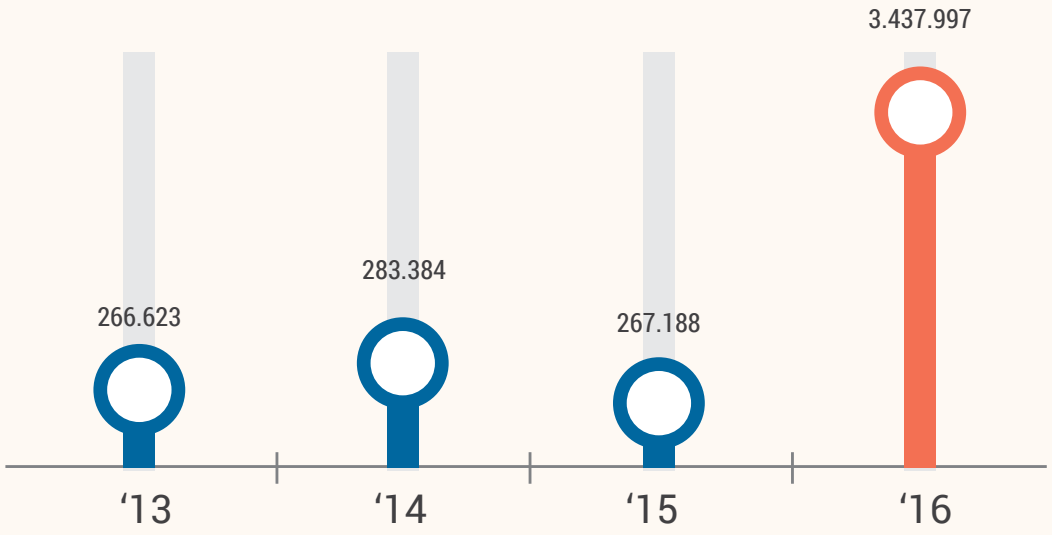

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Uraian program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*) dan/atau karyawan (*Employee Stock Option Program/*ESOP) terkait jumlah saham, realisasi, jangka waktu, persyaratan manajemen/karyawan yang berhak, dan harga *exercise* akan dijelaskan pada Bagian Tata Kelola Perusahaan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Perseroan telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Perseroan di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

Adapun penggunaan dana hasil penawaran umum (*Initial Public Offering*/IPO) di tahun 2009 tersebut telah terealisasi di tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Selain penawaran umum dalam bentuk saham, pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan mencatatkan di Bursa Efek Indonesia Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahun 2015. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II tahap I tahun 2015 telah disampaikan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2015 dan telah dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016. Sementara itu, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II tahap II tahun 2016 juga telah disampaikan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Januari 2017 dan akan dilaporkan pada RUPS Tahunan 2017.

Tabel Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2016

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Realisasi Kredit	Total	Realisasi Kredit	Total	
Penawaran Umum	30 Juni 2015*	3,000,000	2,958.50	2,997,041.50	2,997,041.50	2,997,041.50	2,997,041.50	2,997,041.50	-

* Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahun 2015 efektif tanggal 30 Juni 2015, Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dan Penerimaan Dana Hasil Penawaran Umum Efektif pada tanggal 8 Juli 2015.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

Keterangan	2014	2015	2016
Komitmen			
Liabilitas Komitmen			
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	11.224.658	13.209.613	16.446.763
Jumlah Komitmen	11.224.658	13.209.613	16.446.763
Kontinjensi			
Tagihan Kontinjensi			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.644.444	1.908.418	1.954.131
Liabilitas Kontinjensi			
Garansi yang diterbitkan	(1,354,852)	(1,460,068)	(2.730.151)
Jumlah Kontinjensi	289,592	448,350	(776.020)

DAMPAK PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA PERSEROAN

Pada tahun 2016 Bank Indonesia telah mengubah tingkat suku bunga Bank Indonesia sebanyak tiga kali dari 7,25% pada bulan Januari menjadi 7,0% pada bulan Februari yang selanjutnya diturunkan menjadi 6,75% pada bulan Maret. Kondisi tersebut dipertahankan sampai dengan bulan Mei. Selanjutnya Bank Indonesia menurunkan kembali tingkat suku bunga Bank Indonesia menjadi 6,50% pada bulan Juni dan Juli. Pada bulan Agustus, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-*Day Repo Rate* pada bulan Agustus. Instrumen BI 7-*Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Perubahan tersebut berdampak pada tingkat suku bunga di industri perbankan, yakni tingkat suku bunga tabungan, deposito, dan kredit. Hal ini juga mendorong peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil yang lebih besar dari beban bunga dan bonus Perseroan. Pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan mencapai Rp17.138.819 juta atau meningkat sebesar 14,52% dari Rp14.966.209 juta pada tahun 2015. Beban bunga sebesar Rp8.975.274 juta atau meningkat sebesar 10,06% dari Rp8.155.133 juta pada tahun 2015.

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Setelah tanggal laporan akuntan tahun 2016 yang berakhir 31 Desember 2016, tidak terdapat informasi dan fakta material sehingga tidak terdapat informasi untuk diungkapkan beserta dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

INVESTASI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi berupa penanaman modal pada instansi/ perusahaan sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan investasi.

EKSPANSI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi.

DIVESTASI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan kegiatan restrukturisasi baik restrukturisasi hutang maupun modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan restrukturisasi.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2016 yang telah diaudit dan dilaporkan, selama tahun 2016 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

SELURUH TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN (CATATAN) SEPERTI YANG DIDEFINISIKAN DALAM PSAK 7 (REVISI 2010) "PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI" DAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. IX.E.1 TENTANG "TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU". SELURUH TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2016 TELAH DISETUJUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK DAN BERSIFAT WAJAR.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tahun 2016 telah disetujui oleh kedua belah pihak dan bersifat wajar sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PIHAK-PIHAK BERELASI

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan:

a. suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perseroan;
b. suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Perseroan;
c. suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Perseroan sebagai venturer;
d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan;
e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas terkait Perseroan.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci.

Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain dan Garansi yang diterbitkan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain dan Garansi yang diterbitkan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Giro pada bank lain, efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, dan Pinjaman yang Diterima
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Giro pada bank lain dan Garansi yang diterbitkan
PT BRISyariah	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/
PT Permodalan Nasional Madani	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Pinjaman yang diterima, Obligasi Pemerintah dan Garansi yang diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi
PT PP Pracetak (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT HK Realtindo	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Jasamarga Bali Tol	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Inhutani IV (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Persada Properti	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Amarta Karya	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Hutama Karya	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT PP Properti	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT PPA Finance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Barata Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Sucofindo (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Angkasa Pura (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan

Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Timah (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pindad (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Antam (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI	Garansi yang diterbitkan
Manajemen Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah dan Simpanan dari Nasabah

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah demi kepentingan dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

NILAI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Nilai transaksi dengan pihak berelasi dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2015-2016 (Rp juta)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia

Keterangan	2015	2016
Aset		
Giro pada bank lain	39.918	16.958
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	160.000	268
Efek-efek	101.224	998.812
Obligasi pemerintah	8.230.908	9.243.639
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.355.393	2.037.903
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	9.887.443	12.297.580
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(336)	(877)
Total dari aset pihak-pihak berelasi-neto	9.887.107	12.296.703
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	5,75%	5,74%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	67.378.195	83.630.966
Simpanan dari bank lain	151.484	500.000
Pinjaman yang diterima	5.728.553	1.999.921
Pinjaman subordinasi	-	2,999,118
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	67.378.195	89.130.005
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	42,66%	45,70%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.757	22.332
Efek-efek	17.079	42.454
Obligasi pemerintah	494.136	568.417
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	59.949	69,460
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	576.921	702.663
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	3,85%	4,09%
Beban bunga dan bonus		
Simpanan dari nasabah	2.954.635	3,392,776
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.560	-
Pinjaman yang diterima	392.863	357.222
Pinjaman subordinasi	-	150.750
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	3.354.058	3.900.748

Keterangan	2015	2016
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	41.13%	43.46%
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan	50.041	568.502
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*commited*)	8.350	-
Total Komitmen dan Kontijensi rekening Administratif dari pihak berelasi	58.391	568.502
Presentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	2,81%	16,25%

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2015-2016 (Rp juta)

b. Transaksi dengan manajemen kunci

Keterangan	2015	2016
Aset		
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	48.422	83.535
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	-	-
Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dari manajemen kunci	48.422	83.535
Persentase terhadap total asset	0,03%	0,04%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	46.940	60.402
Kompensasi karyawan kunci	95.304	115.320
Total liabilitas dari manajemen kunci	142.244	175.722
Persentase terhadap total liabilitas	0,09%	0,09%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	3.948	3.757
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,03%	0,02%
Beban bunga dan bonus		
Simpanan dari nasabah	1.548	2.172
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	0,02%	0,02%
Beban gaji dan tunjangan		
Direksi	37.216	52.767

Keterangan	2015	2016
Dewan Komisaris	16.292	20.785
Karyawan Kunci	146.123	86.922
Total	199.631	160.474
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	10,35%	7,56%

KEWAJARAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2010) Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

MEKANISME *REVIEW* DAN PEMENUHAN PERATURAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7 (revisi 2010) Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

SALAH SATU KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN ADALAH SELALU MENAATI PERATURAN YANG BERLAKU DARI *REGULATOR*, YANG RELEVAN PADA BISNIS DAN OPERASI PERUSAHAAN. BENTUK IMPLEMENTASI KOMITMEN TERSEBUT ADALAH MELAKUKAN PENGKAJIAN TERHADAP PERATURAN BARU DAN AMANDEMEN PERATURAN SEHINGGA PERSEROAN SELALU TAAT PADA KETENTUAN TERSEBUT.

Berikut adalah peraturan dan perubahannya yang berlaku efektif sepanjang tahun 2016 serta dampaknya terhadap kinerja Perseroan.

No	Peraturan	Keterangan	Pengaruh terhadap Perseroan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	• Latar Belakang dan Tujuan: Dalam rangka memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena terdapat harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak. • Hal-hal yang Diatur: a. Subjek dan objek pengampunan pajak; b. Tarif dan cara menghitung uang tebusan; c. Tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakan; d. Kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan; e. Perlakuan perpajakan; f. Perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap; g. Upaya hukum; h. Manajemen data dan informasi; i. Ketentuan pidana; j. Ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak.	Perseroan sebagai salah satu institusi yang ditunjuk Pemerintah sebagai penampung dana program Pengampunan Pajak.

No	Peraturan	Keterangan	Pengaruh terhadap Perseroan
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	• ·Latar Belakang dan Tujuan: Mengingat petingnya Laporan Tahunan bagi investor atau Pemegang Saham dan *regulator*, kualitas Laporan Tahunan perlu ditingkatkan baik dan kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan maupun dan segi penyajian Laporan Tahunan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan infonmasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan. • ·Hal-hal yang Diatur: a. Penyusunan, bentuk, dan isi Laporan Tahunan: 1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan dan wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris; 2) Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid serta dapat diperbanyak dalam bentuk cetak dan salinan dokumen elektronik; 3) Memuat informasi secara jelas mengenai Emiten atau Perusahaan Publik. b. Penyampaian Laporan Tahunan c. Ketersediaan Laporan Tahunan Laporan Tahunan wajib tersedia bagi Pemegang Saham saat pemanggilan RUPS Tahunan dan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. d. Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan.	a. Perseroan telah melaksanakan aturan tersebut dengan menyusun Laporan Tahunan yang kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; b. Atas tidak dilaksanakannya aturan tersebut, Perseroan akan dikenai sanksi administratif.
3.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/SEOJK.041 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	• Latar Belakang dan Tujuan: a. Sebagai tindak lanjut dari POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; b. Tujuan regulasi ini adalah untuk mengatur bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. • · Hal-hal yang Diatur: a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat infomasi mengenai: 1) Ikhtisar data keuangan penting; 2) Informasi saham (jika ada); 3) Laporan Direksi; 4) Laporan Dewan Komisaris; 5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik; 6) Analisis dan pembahasan manajemen; 7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 8) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; 9) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit; dan 10) Surat pemyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	SEOJK ini memiliki dampak terhadap Perseroan khususnya dalam bentuk penyusunan Laporan Tahunan yang telah dibuat oleh Perseroan sebagai pertanggungjawaban kepada RUPS.

No	Peraturan	Keterangan	Pengaruh terhadap Perseroan
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/ POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	• Latar Belakang dan Tujuan: Dalam rangka menghadapi perkembangan pesat dari lingkungan ekstenal dan intemal perbankan yang mengakibatkan semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. • Hal-hal yang Diatur: a. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang mencakup: 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris: 2) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 3) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. b. Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif. c. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. d. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan sanksi apabila terlambat dalam menyampaikan laporan tersebut.	Perseroan telah mempunyai Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang dituangkan di dalam peraturan internal dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	• Latar Belakang dan Tujuan: Dalam rangka menciptakan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan pelaksanaan tata kelola dan untuk mewujudkan hal tersebut maka Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. • Hal-hal yang Diatur: Faktor dan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama bagi Bank yaitu: a. Pemegang Saham Pengendali (PSP); b. Anggota Direksi; dan c. Anggota Dewan Komisaris.	Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana yang telah diatur oleh POJK ini.

No	Peraturan	Keterangan	Pengaruh terhadap Perseroan
6.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	• Latar Belakang dan Tujuan: a. Sebagai tindak lanjut dari POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. b. Tujuan regulasi ini adalah untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. • Hal-hal yang Diatur: a. Pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan Penilaian kemampuandan kepatutan bagi Bank dilakukan oleh OJK terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris. b. Faktor penilaian kemampuan dan kepatutan: 1) Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris; 2) Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris; 3) Kelayakan keuangan bagi calon PSP; 4) Kampetensi bagi calon anggota Direksi dan angota Dewan Komisaris. c. Persyaratan administratif bagi calon PSP, calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris, dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif dan penyampaian dokumen persyaratan administratif. d. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan. e. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. f. Pengajuan kembali calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan tidak disetujui. g. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha.	PSP, Direksi dan Dewan Komisaris akan diangkat oleh Perseroan selelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK berdasarkan hal-hal yang telah diatur dalam SEOJK ini.

No	Peraturan	Keterangan	Pengaruh terhadap Perseroan
7.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter	· Latar Belakang dan Tujuan: Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan dengan pengendalian moneter metalui pelaksanaan dan operasi moneter. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi moneter perlu didukung dengan ketersediaan informasi terkait pasar keuangan. · Hal-hal yang Diatur: a. Pelaksanaan operasi moneter, dilakukan dengan: 1) Operasi Pasar Terbuka - Penerbitan SBI dan SDBI; - Transaksi *repurchase agreement* (repo) dan reverse repo; - Transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*; - Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam Rupiah; - Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing; - Jual beli valuta asing terhadap Rupiah; dan - Transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun valuta asing. 2) *Standing Facilities* - Penyediaan dana Rupiah (*lending facility*); dan - Penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) . b. Penyelesaian transaksi Operasi Moneter Dalam rangka penyelesaian transaksi Operasi Moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pendebetan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau dilembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter. c. Pemantauan pasar keuangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan yang mencakup pemantauan pasar uang, pasar valuta asing dan pasar SBN yang dilaksanakan melalui monitoring transaksi secara langsung atau secara tidak langsung.	-

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

SALAH SATU INDIKATOR LAPORAN KEUANGAN YANG BAIK DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ADALAH LAPORAN YANG SESUAI DENGAN SELURUH KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG RELEVAN DENGAN BISNIS PERUSAHAAN. OLEH KARENA ITU PERSEROAN BERKOMITMEN UNTUK *COMPLY* TERHADAP SELURUH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERUTAMA PADA KEBIJAKAN BARU ATAU PERUBAHAN KEBIJAKAN.

PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Perseroan memuat prinsip dasar, peraturan dan praktik akuntansi yang diterapkan bank sehingga pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian, pengawasan serta penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan sesuai dan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulator lainnya.

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan Bank cabang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

PERUBAHAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI, PENGUNGKAPAN, DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

EFEKTIF BERLAKU PADA ATAU SETELAH TANGGAL 1 JANUARI 2016

a. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
b. Amandemen PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
c. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi", menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
d. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
e. PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
f. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
g. PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
h. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55
i. PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk.

DAMPAK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan yang relevan.

EFEKTIF BERLAKU PADA ATAU SETELAH TANGGAL 1 JANUARI 2017

Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan", memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (*consequential amendment*) sebagai berikut: PSAK 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK 5 "Segmen Operasi", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK 62 "Kontrak Asuransi".

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI

PENCAPAIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN PADA TAHUN 2016 TERHADAP TARGET RKAP TAHUN 2016 SANGAT MEMBANGGAKAN. REALISASI TAHUN INI MENJADI LANDASAN PACU DAN SEMANGAT OPTIMIS UNTUK MENCAPAI TARGET DI TAHUN 2017 DENGAN OPTIMISME PENCAPAIAN YANG LEBIH BAIK

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI ASPEK OPERASIONAL

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI POSISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Realisasi posisi kredit pada tahun 2016 adalah sebesar Rp164.446.381 juta, tercapai 100,19% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp164.130.497 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, posisi kredit sesuai RKAP 2017 diproyeksikan tumbuh 21-23%. Proyeksi tersebut berdasakan peluang bisnis Perseroan yang masih tinggi dan dukungan anggaran pemerintah untuk perumahan subsidi yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan posisi pembiayaan syariah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp14.224.421 juta, tercapai 103,57% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp13.734.114 juta. Pada tahun 2017, posisi pembiayaan syariah sesuai RKAP 2017 diproyeksikan sebesar 16-18%. Proyeksi tersebut juga seiring dengan masih besarnya potensi bisnis utama Perseroan di bidang perumahan.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Kredit dan Pembiayaan Syariah (Rp juta)

Keterangan	Target 2016		Realisasi 2016		Pencapaian Terhadap Target RKAP 2016 (%)	Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 2017 (%)
	Rp juta	Pertumbuhan %	Rp juta	Pertumbuhan %		
Kredit Perumahan	138.482.351	19,20	135.840.819	16,93	98,90	23-25
Kredit Non Perumahan	11.914.031	3,11	14.381.141	24,46	120,71	1-Mar
Jumlah Kredit	150.396.383	17,74	150.221.960	17,61	99,88	21-23
Jumlah Pembiayaan Syariah	13.734.114	22,37	14.224.421	26,67	103,57	16-18
Jumlah Kredit dan Pembiayaan Syariah	164.130.497	18,12	164.446.381	18,34	100,19	21-22

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI DANA PIHAK KETIGA

Realisasi dana pihak ketiga pada tahun 2016 adalah sebesar Rp159.987.717 juta, tercapai 99,63% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp160.581.196 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, dana pihak ketiga sesuai RKAP 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 22-24%. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi bahwa Perseroan akan meningkatkan kualitas jaringan dan layanan serta akses perbankan digital yang akan mendorong peningkatan perhimpunan dana pihak ketiga.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Dana Pihak Ketiga (Rp juta)

Keterangan	Target 2016		Realisasi 2016		Pencapaian Terhadap Target RKAP 2016 (%)	Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 2017 (%)
	Rp juta	Pertumbuhan %	Rp juta	Pertumbuhan %		
Giro	47.260.631	50,56	45.846.055	46,15	97,01	26-28
Tabungan	35.268.446	14,67	34.826.208	13,23	98,75	18-20
Deposito	78.052.118	19,00	79.315.454	21,18	101,62	21-23
Jumlah Dana Pihak Ketiga	160.581.196	25,73	159.987.717	25,40	99,63	22-24

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI ASPEK KEUANGAN

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI POSISI KEUANGAN

Berikut adalah uraian terkait pencapaian terhadap RKAP 2016 dan proyeksi tahun 2017 atas posisi keuangan Perseroan:

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan (Rp juta)

Keterangan	Target 2016		Realisasi 2016		Pencapaian Terhadap Target RKAP 2016 (%)	Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 2017 (%)
	Rp juta	Pertumbuhan %	Rp juta	Pertumbuhan %		
Aset	209.589.232	50,66	214.168.479	24,66	102,18	16-18
Liabilitas	190.256.886	14,67	195.037.943	23,48	102,51	15-17
Ekuitas	19.332.346	19,00	19.130.536	38,03	98,96	24-26

Realisasi total aset pada tahun 2016 adalah sebesar Rp214.168.479 juta, tercapai 102,18% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp209.589.235 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total aset sesuai RKAP 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 16-18%. Proyeksi tersebut berdasakan asumsi bahwa posisi kredit dan pembiayaan dapat tercapai sesuai proyeksi.

Realisasi total liabilitas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp195.037.943 juta, tercapai 102,51% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp190.256.886 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total liabilitas sesuai RKAP 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 15-17%. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi terdapat peningkatan penghimpunan dana jangka pendek yaitu dana pihak ketiga dan dana jangka panjang seperti penerbitan obligasi, pinjaman bilateral dan *negotiable certificate of deposits.*

Realisasi total ekuitas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp19.130.536 juta, tercapai 98,96% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp19.332.346 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total ekuitas sesuai RKAP 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 24-26%. Proyeksi tersebut berdasakan asumsi bahwa kenaikan laba di atas 20% dari pencapaian laba tahun 2016 dapat tercapai sesuai proyeksi.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAN LABA

Realisasi pendapatan bunga dan bagi hasil pada tahun 2016 adalah sebesar Rp17.138.819 juta, tercapai 96,15% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp17.825.712 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total pendapatan bunga dan bagi hasil sesuai RKAP 2017 diproyeksikan sebesar Rp20.267.774 juta. Proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan kredit dan pembiayaan serta pendapatan operasional lainnya di tahun 2017 yang sesuai proyeksi.

Realisasi laba tahun berjalan setelah pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.631.617 juta, tercapai 231,18% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.436.078 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total laba tahun berjalan setelah pajak sesuai RKAP 2017 diproyeksikan sebesar Rp2.800.684 juta.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI STRUKTUR MODAL

Berikut adalah uraian terkait pencapaian terhadap RKAP 2016 dan proyeksi tahun 2017 atas struktur modal Perseroan:

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal (Rp Juta)

Keterangan	Target	Realisasi	Pencapaian terhadap RKAP 2016	Proyeksi
	RKAP 2016	2016		RKAP 2017
Modal Inti (Tier 1)	16.107.351	16.443.159	102,08	18.415.176
Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* - Cet 1)	16.107.351	16.443.159	102,08	18.415.176
Modal Inti Tambahan	-	-	-	-
Modal Pelengkap (Tier II)	3.788.569	3.776.478	99,68	3.551.314
Total Modal	19.895.920	20.219.637	101,63	21.996.490

Realisasi total modal pada tahun 2016 adalah sebesar Rp20.219.637 juta, tercapai 101,63% dari target RKAP tahun 2016 yaitu sebesar Rp19.895.920 juta. Selanjutnya pada tahun 2017, total modal inti sesuai RKAP 2017 diproyeksikan sebesar Rp21.996.490 juta

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI RASIO KEUANGAN

Realisasi rasio keuangan terhadap target disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Rasio Keuangan (%)

Keterangan	Target RKAP 2016	Realisasi 2016	Pencapaian terhadap RKAP 2016 (%)	Proyeksi RKAP 2017
ROA	1,69	1,76	104,14	1,6-1,8
ROE	16,92	18,35	108,45	16-18
NIM	4,80	4,98	103,75	4,5-5
LDR	102,21	102,66	100,44	101-103
CAR	22,43	20,34	90,68	17-19
NPL – Gross	2,99	2,84	94,98	<2,5
NPL – Net	1,75	1,85	105,71	<1,5

KPI DAN TINGKAT KESEHATAN BANK

PENCAPAIAN KPI PERSEROAN PADA TAHUN 2016 ADALAH SEBESAR 131,31% DAN MEMPEROLEH HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PERINGKAT "KOMPOSIT 2 (PK-2) POSISI JUNI 2016"

PENCAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* (KPI)

Pencapaian KPI tahun 2016 terbagi menjadi dua aspek pencapaian yaitu KPI aspek keuangan dan aspek non keuangan. Secara lebih jelas, berikut adalah pencapaian KPI Korporat Perseroan pada tahun 2016:

No	Sasaran Strategis	2016		
		Target	Realisasi	Pencapaian
Perspektif *Financial*				
1	*Sustainable to Valuable Shareholder*			
	- % Pertumbuhan Laba	12,00%	34,01%	283.38
	- % Pertumbuhan Aset	11,00%	24,56%	223.26
	- % NIM	4,80%	4,76%	99.25
	- % BOPO	83,16%	82,61%	100.66
	- % LDR (hanya DPK)	102,21%	102,66%	99.57
2	Perbaikan Kualitas Kredit			
	- % NPL gross	2,99%	2,80%	106.33
3	Pertumbuhan kredit yang dengan fokus pada sektor perumahan untuk mendukung program sejuta rumah			
	- % Pertumbuhan Kredit	18,12%	18,34%	101.25
4	Pertumbuhan pendanaan yang mendukung bank fokus perumahan			
	- % Pertumbuhan DPK (exc konversi dana FLPP)	25,71%	25,40%	98.81
	- % CASA (exc konversi dana FLPP)	51,40%	50,36%	97.97
	- Penerbitan *wholesale funding* (inc sekuritisasi) Rp. M	10.260	14.726	143.53
5	Peningkatan pendapatan operasional lainnya			
	- Pertumbuhan *Fee Based Income*	33,44%	13,60%	40.66
Perspektif *Customer*				
6	Terkemuka dalam pembiayaan perumahan			
	- % *Market share* KPR	30,00%	33,57%	111.9
Perspektif *Internal Business Process*				
7	Meningkatkan kualitas manajemen strategis			
	- % Peningkatan Skor KPKU BUMN	10,00%	17,62%	176.23
8	Memperkuat permodalan bank			
	- % *project* penguatan permodalan (konversi dana FLPP/*action* lainnya)	100,00%	100,00%	100
9	Membentuk anak usaha			
	- % *Project* pembentukan anak usaha	100%	100,00%	100

No	Sasaran Strategis	2016		
		Target	Realisasi	Pencapaian
10	Memperkuat *collection & asset management*			
	- % Komposisi kolektibilitas 2	8,00%	10,26%	71.75
	- *Recovery* (Rp. miliar)	1.204	1.574	130.7
	- % DRBM	0,50%	0,24%	152.03
11	Meningkatkan GCG, *Risk Management & Compliance*			
	- Peringkat komposit RBBR (tingkat kesehatan bank)	2.00	2	100
Perspektif *Learning & Growth*				
	Memperkuat *Corporate Culture*			
	- *Culture Asessment Index*	3	3.29	109.67
	- Produktivitas pegawai (laba per pegawai Rp.juta/org)	241	267	110.8
	- % *Project* IT yang terimplementasi	100%	70%	70.2
Jumlah Pencapaian Terbobot				**131.31**

TINGKAT KESEHATAN BANK

Tingkat kesehatan Bank mencerminkan hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk - based bank rating*) yang mencakup empat faktor yaitu:

1. Profil Risiko,
2. *Good Corporate Governance* (GCG),
3. Rentabilitas (*Earnings*),
4. Permodalan (*Capital*).

Pada tahun 2016 (Posisi Juni 2016), Perseroan telah mendapat tingkat kesehatan Bank Peringkat "**Komposit 2 (PK-2)**" yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MERUPAKAN *ENABLER* UTAMA DALAM OPERASIONAL PERSEROAN. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG MATANG DEMI TERCIPTANYA SDM YANG ANDAL DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKESINAMBUNGAN. SDM ANDAL MENJADI KUNCI UTAMA PENCAPAIAN *OPERATIONAL EXCELLENCE* DAN BUSINESS *SUSTAINABILITY*.

PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Ketetapan Direksi No. 07/KD/DIR/SIPD/2016 tanggal 8 September 2015, pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Human Capital Division yang dipimpin oleh Division Head yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Struktur Organisasi Pengelola SDM

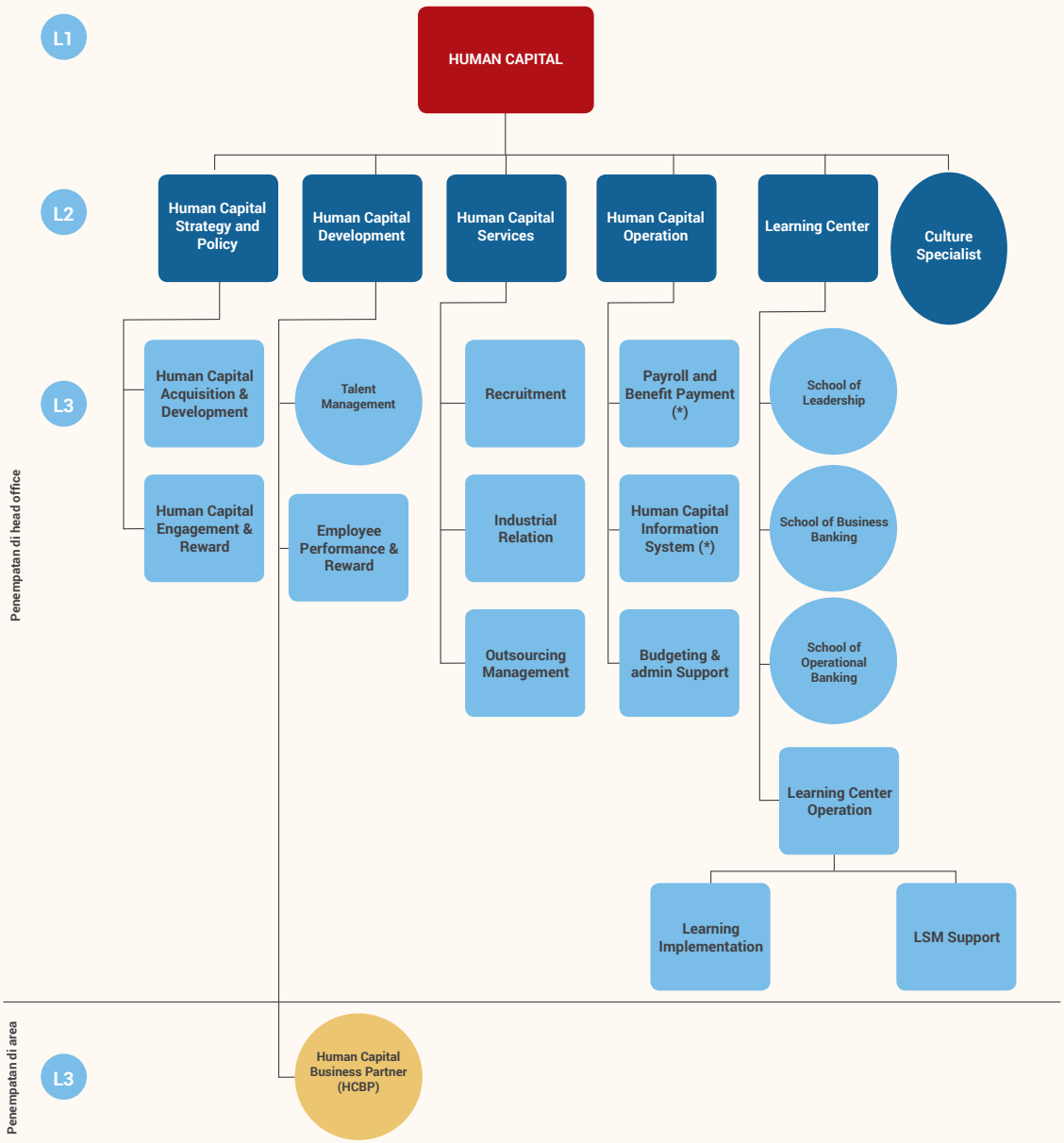

Human Capital Division dibantu oleh lima departemen (*Human Capital Strategy and Policy, Human Capital Development, Human Capital Services, Human Capital Operation, Learning Center*) dan satu unit spesialis (*Culture Specialist*).

PROFIL RINGKAS PENGELOLA SDM

Berikut adalah profil singkat Kepala Human Capital Division.

Arief Pramuhanto

Kepala Divisi Human Capital Division

Lahir di Jakarta, tanggal 13 Juni 1962

Pendidikan:

- Lulusan Ekonomi, Monash University, Melbourne.

Riwayat Pekerjaan:

- General Manager – Human Resources Development PT. Frisian Flag Indonesia (2000 – 2015)
- Training & Development Manager, PT. Thames PAM Jaya, Jakarta (Agustus 1998 – Oktober 2000)
- Human Resources Manager, Koja Container Terminal (Januari 1997 – Agustus 1998)
- Human Resources Specialist, "*Change Management Project" of Standard Chartered Bank-Dev.* Bank of Indonesia, Jakarta (Januari 1996 – Desember 1996)
- Loan Officer, Bank Pembangunan Indonesia (Januari 1991 – Desember 1993)
- Technical Assistance, Andersen Consulting (sekarang Accenture), Jakarta (Januari 1989 – Desember 1990)

Dasar Pengangkatan:

Surat Keputusan Direksi No. 110/DIR/2015.

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SDM

Fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola SDM oleh Human Capital Division dilaksanakan berdasarkan pada departemen dan spesialis dibawahnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Departemen	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Human Capital Strategy and Policy	• Mengkoordinasikan pengkajian dan pengembangan kebijakan tentang budaya kerja pengembangan karir, uraian pekerjaan, remunerasi, manajemen kinerja, evaluasi jabatan, *assessment, training, human capital planning,* hubungan industrial dan aktivitas "*Know Your Employee*" (KYE) secara optimal guna menunjang visi, misi, dan perencanaan bisnis bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Human Capital Development	• Melaksanaan tata kelola kepegawaian melalui proses perencanaan SDM (*Manpower Planning*), manajemen karir, dan penilaian kemampuan pegawai secara akurat untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan selaras dengan tujuan strategis Perseroan.
Human Capital Services	• Mengelola hubungan industrial di bank, baik dengan pihak eskternal seperti lembaga hukum dan serikat pekerja maupun dengan pegawai internal, sehingga mampu tercipta suasana kerja yang kondusif untuk mendukung bisnis Perseroan serta perekrutan dan penempatan pegawai, pengawasan tenaga *outsourcing*
Human Capital Operation	• Mengelola kegiatan operasional terkait kepegawaian yang mencakup pembayaran hak pegawai, pendokumentasian data pegawai, pelaksanaan analisis pegawai, dan dukungan administrasi untuk memastikan hak-hak dan kewajiban pergawai dan bank dapat dilaksanakan secara seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Learning Center	• Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan, analisis dan disain pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Perseroan, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan agar dapat mendorong peningkatan kompetensi seluruh pegawai guna mendukung pencapaian target Perseroan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* .
Culture Specialist	• Menjadi Fasilitator implementasi budaya kerja perusahaan. Melaksanakan program kerja implementasi budaya kerja, menciptakan keselarasan program budaya kerja dan program kerja bisnis Perseroan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program budaya di seluruh Unit Kerja, melaksanakan koordinasi dengan *Change Agent* serta melakukan *review* dan dan survei iklim organisasi melelui penyusunan *Culture Assessment Index*.

Departemen	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
IT Project Management Officer Specialist	• Bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan eksekusi seluruh proyek TI agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga tercapai pelaksanaan proyek yang '*on-schedule*', '*on-budget*', dan '*on-spec*' serta bertanggungjawab untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan aturan-aturan pelaksanaan proyek-proyek TI.
Quality Assurance & Control Specialist	• Bertanggungjawab untuk menjaga kepatuhan proses-proses Operasional TI, Pelaksanaan Proyek, Pengadaan Aset TI, Pengembangan Aplikasi, serta Pengelolaan Informasi terhadap kebijakan, standard dan prosedur serta kualitas yang ditetapkan.

ROADMAP SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM Perseroan bersifat menyeluruh dan terintegrasi antar proses atau tahapan yang disesuaikan dengan Peraturan Direksi No. 29/DIR/CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Human Capital (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam Peraturan Direksi tersebut, cakupan pengelolaan SDM mencakup seluruh aspek pokok diantaranya *Organization Development, Human Capital Acquisition, Human Capital Development, Human Capital Engagement*, *Human Capital Reward, dan Human Capital Information System.* Secara umum, kebijakan tersebut mencakup seluruh aspek pengelolaan SDM dari persiapan kebutuhan SDM sampai dengan pasca kerja.

Kebijakan tersebut diturunkan menjadi *roadmap* SDM tahun 2016-2018 yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank BTN (RBB).

Roadmap SDM Tahun 2016-2018

	2016	2017	2018
Organization Development	• Pengembangan organisasi *Human Capital* dengan menyelaraskan kepentingan bisnis; • Melakukan penguatan nilai-nilai budaya perusahaan sebelumnya perusahaanbaruhasilpenyelarasan	• *Implementasi Strategic Business Partner* dibidang Human Capital sesuai strategi bisnis bank. • Internalisasi budaya perusahaan.	Eksternalisasi Budaya Perusahaan.
HC Acquisition	• Menghubungkan rekrutmen dengan kesempatan belajar formal dan meningkatkan hak pelatihan dengan implementasi *Knowledge* / hasil di pelatihan sebelumnya • Implementasi *Employee Value Proposition* dan *Employeer Branding.*	Penguatan *Employee Value Proposition* dan *Employeer Branding*	*Penguatan Employee Value Proposition* dan *Employeer Branding*
Learning Development	• *Realignment of Learning* Center • Implementasi *Knowledge Management*	Pengembangan Kurikulum dan Program sesuai dengan *Core Competency* Perusahaan	Pelatihan untuk memperdalam praktek *World Class Company.*
HC Engagement	• Talent Pool yang efektif • Pengembangan *Talent Management Program*	Pengembangan Career *Development*.	Implementasi Career *Development*.
HC Reward	Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem remunerasi dan benefit yang mendukung peningkatan produktivitas.	Mengembangkan dan mengimplemen-tasikan sistem remunerasi dan benefit yang mendukung peningkatan produktivitas.	Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem remunerasi dan benefit yang men-dukung peningkatan produktivitas.
HC Information System	Integrasi & implementasi HCIS Fase 3 serta penyempurnaan Fase 1 & 2 ü Integrasi & implementasi HCIS Fase 3 serta penyempurnaan Fase1 &2	*Post implementation review* dan penyempurnaanHCISFase3	Integrasi HCIS dengan teknologi baru (*cloud services, mobile technology*)

ORGANIZATION DEVELOPMENT

Perseroan melaksanakan pengembangan organisasi secara berkala sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan serta mendukung program Pemerintah "Sejuta Rumah Untuk Rakyat". Upaya tersebut dilakukan dengan mengkaji produktivitas dan efektifitas struktur organisasi, memperbaharui *job competencies*, *job description* dan *job requirement*, serta kebijakan untuk promosi pegawai. Pengembangan organisasi kemudian diterapkan dengan perubahan struktur organisasi baru yang lebih fokus pada perbaikan proses bisnis serta optimalisasi wewenang dan fungsi Kantor Wilayah dalam proses bisnis sejak tahun 2015.

HUMAN CAPITAL ACQUISITION

Perseroan senantiasa merencanakan kebutuhan pegawai yang selaras dengan pertumbuhan bisnis. Perencanaan pegawai dilakukan melalui proses *Manpower Planning* untuk mengidentifikasi jumlah dan persyaratan pegawai sesuai dengan standar formasi dalam mendukung pelaksanaan strategi bisnis yang ditetapkan oleh Perseroan. Proses ini melibatkan semua unit kerja yang kemudian menjadi acuan dalam proses *Human Capital Acquisition*.

Setiap fungsi dan jabatan di Perseroan membutuhkan SDM yang potensial sehingga sistem rekrutmen pegawai merupakan salah satu pondasi dalam membangun SDM yang mampu menjawab kebutuhan Persreoan saat ini maupun di masa mendatang. Proses pelaksanaan rekrutmen pegawai Perseroan dibagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan tujuan serta sifat pekerjaan sebagaimana matriks rekrutmen berikut ini:

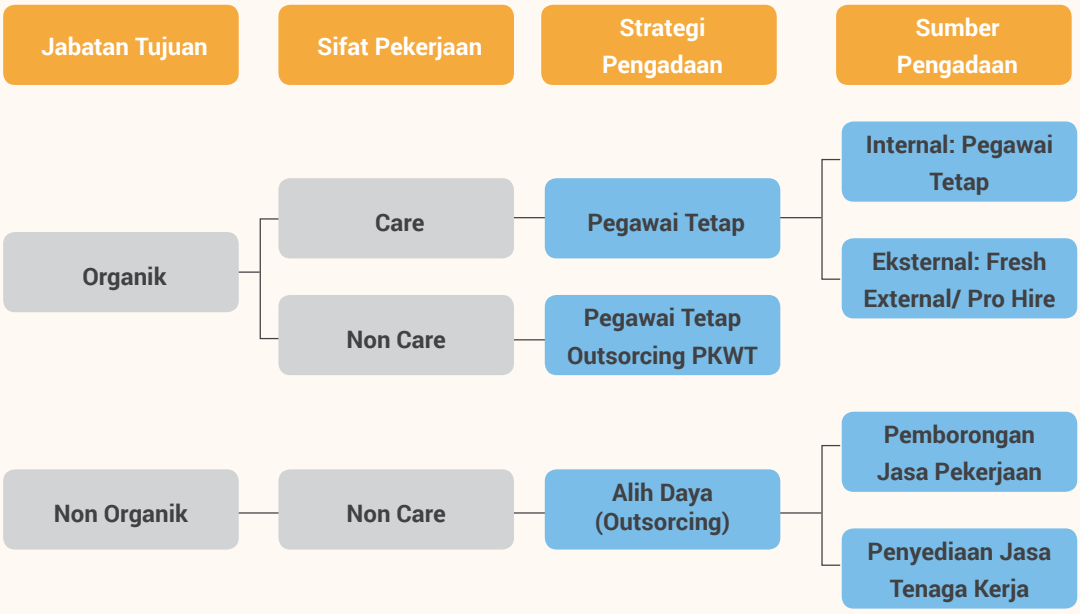

Rekrutmen *internal* dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di suatu unit kerja melalui proses promosi maupun rotasi pegawai. Apabila pemenuhan kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi secara *internal* maka dilaksanakan pemenuhan secara *eksternal*, yang dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu memasang iklan melalui media koran maupun elekronik, *job fair, talent scouting* atau *job searching* melalui universitas/ kampus-kampus.

Adapun metode pelaksanaan rekrutmen eksternal dilakukan dengan *Direct Hire* (rekrutmen dilakukan secara langsung oleh pihak Perseroan) maupun dengan Alih Daya (Rekrutmen pegawai dilakukan menggunakan pihak ketiga). Sejak tahun 2015 Perseroan telah mengembangkan sistem rekrutmen berbasis web (*e-recruitment*). Selain itu, Perseroan telah bekerjasama dengan *Linkedin* terkait dengan program *Employee Branding* sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efisien. Sepanjang tahun 2016 Perseroan melaksanakan rekrutmen pegawai baru sebanyak 1.362 orang meningkat 28,49% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.060 orang.

LEARNING AND DEVELOPMENT

Keberhasilan pencapaian visi misi Perseroan bergantung pada kualitas SDM sebagai pelaksana berbagai inisiatif strategi. Hal ini mendorong Perseroan untuk menerapkan program *learning & development* pegawai secara berkesinambungan untuk memaksimalkan potensi pegawai. Pelaksanaan program *learning* pegawai tidak lagi didasarkan pada proses bisnis melainkan lebih dikembangkan dengan berorientasi pada produk seiring dengan pengembangan *Training Department* menjadi *Training Division*. *Training Division* dikembangkan melalui pembentukan 3 (tiga) *school* yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan *training* mulai dari proses identifikasi, penyusunan materi, delivery sampai dengan evaluasi. Setiap *school* berorientasi pada produk yaitu:

- *School of Leadership*

  Mencakup training yang berkaitan dengan pengembangan *leadership*, antara lain *Staff Development Program, Officer Development Program, Leadership Program, Executive Development Program.*
- *School of Business Banking*

  Mencakup seluruh *training* berkaitan dengan produk dan pelayanan Perseroan yaitu Kredit Perumahan Rakyat, *funding, treasury, collection, sales and servise.*
- *School of Operational Banking*

  Mencakup seluruh kegiatan operasional untuk mendukung unit bisnis, yaitu I*nformation Technology, Finance, Risk, Human Capital, Legal* dan lainnya.

Ketiga *school* tersebut didukung oleh *unit Learning Operation* yang berfungsi sebagai *event organizer* dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan *training*.

Setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Perseroan memastikan pelaksanaan *training* berdasarkan kebijakan atau strategi manajemen dan hasil *training need analysis*. Pasca pelatihan dilaksanakan evaluasi melalui Form Evaluasi Pasca *Training* untuk mengukur *Return of Training Investment* yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan *training*. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk jenjang karir dan tingkat kebutuhan training lanjutan pegawai. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan untuk peserta, namun demikian juga pada Instruktur dan Penyelenggaranya.

Pada tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan 454 pelatihan yang terdiri dari tiga kelompok program, yaitu *Core Banking Academy, New Entry Academy,* dan *Strategic Initiative*. Pelatihan *Core Banking Academy* diantaranya Pelatihan *Anti Fraud*, *Workshop Digital Banking*, dan Pelatihan Pencucian Uang & Pencegahannya. Pelatihan *New Entry Academy* diantaranya pelatihan untuk *Officer Development Program*, *Business Supporting Staff*, dan *Frontliner*. *Pelatihan Strategic Initiative* yaitu Pelatihan Budaya Perusahaan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 18.343 peserta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Pelatihan Tahun 2016

Program Pelatihan	Jumlah Peserta
Core Banking Academy	16.751
New Entry Academy	1.144
Strategic Initiative	*448*
Total	18.343

Pada tahun 2016 biaya penyelenggaraan pelatihan mencapai Rp128.400.000.000 meningkat 21,14% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp105.993.657.000. Peningkatan biaya tersebut disesuaikan dengan pelatihan yang dibutuhkan pegawai.

HUMAN CAPITAL ENGAGEMENT

Keterikatan pegawai menjadi faktor kunci keberhasilan strategi pengembangan bisnis. Perseroan senantiasa melaksanakan *Employee Engagement Survey* (EES) untuk mendorong peningkatan tingkat keterikatan pegawai terhadap Perseroan. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengungkapkan pendapatnya secara jujur mengenai hal-hal yang telah berjalan secara baik dan yang harus ditingkatkan di Perseroan serta menganalisis *gap* antara apa yang dialami oleh pegawai dengan tujuan Perseroan dan meningkatkan *insight* untuk meningkatkan peforma dan produktivitas.

Pelaksanaan EES tahun 2016 dilakukan oleh pihak konsultan independen yaitu Aon Hewitt Consultant. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan survei lebih independen dan riil, sehingga valid untuk dijadikan landasan penyusunan perbaikan dan pengembangan pegawai maupun organisasi di masa mendatang. EES dilakukan dengan membagikan kuesioner ke seluruh pegawai tetap Perseroan secara online. Kuesioner terdiri dari pertanyaan yang mencakup dua aspek yaitu *Engagement Questions* dan *Driver Questions*. Secara umum metode perumusan keterikatan pegawai ditunjukkan dalam skema berikut.

Skema Metode *Employee Engagement Survey*

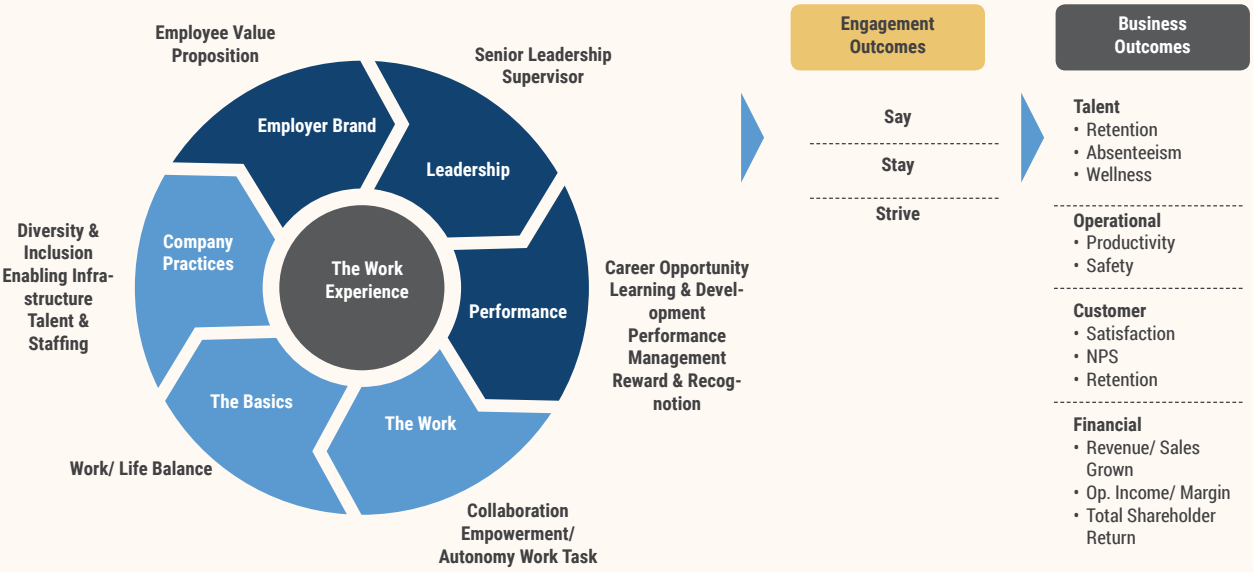

Skor EES Perseroan tahun 2016 sebesar 77% atau melampaui *moderate zone* dan rata-rata benchmark yaitu 60%. Skor tersebut juga menunjukkan keterikatan pegawai Perseroan berada pada level *Top Quartile*.

Hasil EES tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keterikatan pegawai dengan Perseroan cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan pada skema berikut.

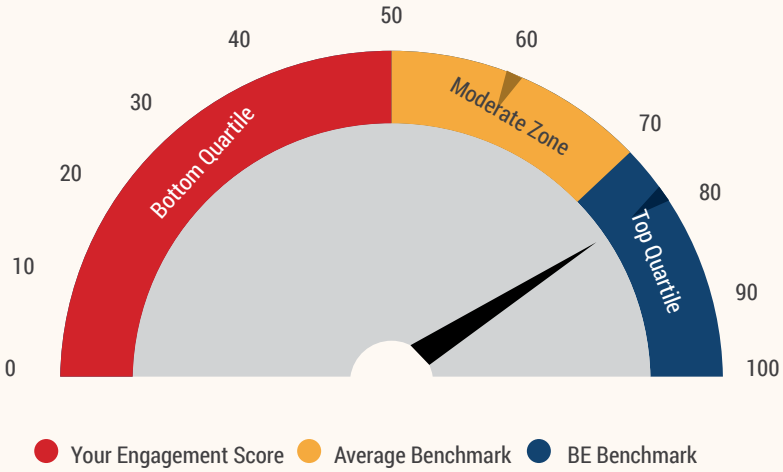

Selain itu, skor EES Perseroan tahun 2016 telah melampaui acuan tingkat keterikatan pegawai lainnya seperti APAC *Banking* sebesar 61%, APAC *Financial Institution* 62%, *Indonesia Banking* (rata-rata industri perbankan di Indonesia) 69%, *Indonesia Financial Institution* 71%, dan Indonesia Norms 62%. Perseroan menindaklanjuti hasil survei tersebut dengan melaksanakan sosialisasi dan *impact plan* untuk merancang perbaikan-perbaikan pada organisasi. Usulan-usulan perbaikan tersebut kemudian dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada periode tahun berikutnya.

Performance Management

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan. Setiap tahun target Perseroan disusun dan didistribusikan ke seluruh Unit Kerja dan selanjutnya diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai. *Key Performance Indicator* (KPI) Pegawai memuat sasaran kerja sebagai turunan dari *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Kerja. Kinerja individu direncanakan, ditetapkan, di-*review* dan dinilai menggunakan Formulir Manajemen Kinerja yang mencakup tiga sasaran penilaian kinerja, yaitu: 1. Sasaran Kerja Individu pada tahun penilaian kinerja berjalan. 2. Kompetensi Teknis yang mencakup Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan pada jabatan individu dan Level Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan serta yang ditunjukkan individu. 3. Kompetensi Perilaku yaitu Level Kompetensi Perilaku yang dipersyaratkan jabatan individu yang dinilai dan yang ditunjukkan. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan 1 (satu) kali setahun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Proses penetapan KPI Individu ditunjukkan oleh skema berikut.

Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga diimplementasikan dengan Metode 4DX (*Four Disciplines of Execution*) sebagai dasar penetapan sasaran/perencanaan kinerja dan pelaksanaan monitoringnya. Dalam penetapan sasaran kinerja, KPI *Corporate* ditetapkan sebagai sasaran terpenting dan menjadi komponen SMK Individu, sedangkan KPI Unit Kerja ditetapkan sebagai *Lag* KPI yang menjadi tanggung jawab jabatan dan mendorong pencapaian KPI *Corporate*, selanjutnya KPI Individu ditetapkan sebagai *Lead* KPI yaitu aktifitas yang merupakan *Lead Measures* untuk mendorong pencapaian KPI Unit Kerja.

Sedangkan untuk pelaksanaan monitoring menggunakan *Scoreboard* dan pelaksanaan *Wig Session* secara kontinyu dan berkesinambungan serta proses *Coaching and Mentoring* untuk memastikan pencapaian sasaran setiap individu.

Penerapan manajemen kinerja tersebut diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas pegawai dan menggerakkan iklim pekerjaan yang terbuka, positif dan progresif.

Career Management

Perseroan telah menerapkan sistem pengelolaan karir bagi pegawai sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pemangku jabatan yang cakap pada posisi-posisi kunci. Penerapan sistem ini telah diatur dalam kebijakan tersendiri yang memuat jenis pola dan jalur pengembangan karir. Perseroan menerapkan tiga jenis pola karir yaitu:

- ***Fast Track***

  Merupakan pola karir yang sangat dipercepat berlaku bagi para pegawai yang memenuhi syarat dan telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan promosi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun setelah penempatan terakhir.

- ***Middle Track***

  Merupakan pola karir yang dipercepat berlaku bagi para pegawai yang memenuhi syarat dan telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan promosi dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah penempatan terakhir.

- ***Normal Track***

  Merupakan pola karir yang mengikuti aturan umum berlaku bagi para Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk mendapatkan kesempatan Promosi dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun setelah penempatan terakhir.

Pola karir tersebut dilakukan melalui beberapa jalur yaitu:

- **Promosi**

  Jalur karir menuju golongan jabatan yang lebih tinggi diatur dengan mekanisme Promosi. Pegawai yang berhak menjadi kandidat untuk dipromosikan adalah mereka yang termasuk dalam kelompok *star, potential* dan *average* berdasarkan hasil Pemetaan Talent, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pemetaan *Talent*. Promosi dilakukan apabila terdapat jabatan yang lowong.

- **Rotasi**

  Jalur karir ke golongan jabatan yang sama diatur dalam mekanisme Rotasi. Rotasi

dilakukan apabila terdapat jabatan lowong akibat dilakukan perputaran atau promosi dari jabatan setara atau pemangku jabatan berhalangan tetap.

- **Jalur Karir ke Jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah**

  Jalur karir ke golongan jabatan yang lebih rendah terjadi karena permintaan pegawai sendiri, dengan beberpa alasan yaitu ingin meniti karir pada bidang pekerjaan atau keluarga jabatan yang berbeda, namun harus memulai dari Golongan Jabatan yang lebih rendah; ingin berpindah ke lokasi kerja yang berbeda dimana posisi yang tersedia atau terpenuhi persyaratan jabatannya merupakan jabatan dengan Golongan Jabatan yang lebih rendah daripada jabatannya saat ini. Pergerakan ke jabatan pada Golongan Jabatan yang lebih rendah yang disebabkan karena sanksi diatur dalam mekanisme Demosi yang diatur dalam Kebijakan mengenai Peraturan dan Sanksi Disiplin.

Penentuan karir pegawai dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan non diskriminatif. Mekanisme promosi menggunakan metode *nine box*, dimana pegawai diukur berdasarkan potensi kemampuan dan kinerjanya. Dari matriks *nine box* akan didapatkan kandidat-kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin perseroan.

Pension

Perseroan menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terdiri dari Program Manfaat Pasti dan Program Iuran Pasti. Pada program Manfaat Pasti pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun. Sedangkan pada Program Iuran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan, 7,5% dari Perseroan, dan hasil pengembangannya. Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Dapen BTN). Sampai dengan 31 Desember 2016, subsidi beban iuran dana pensiun yang dikeluarkan Perseroan sebesar Rp33,9 miliar.

Perseroan juga memberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu selama 12 bulan kepada pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. Selama MPP, Perseroan memberikan peluang kepada pegawai tetap untuk mengikuti berbagai program pelatihan guna mendukung keberlangsungan hidup selepas pensiun. Pada tahun 2016, sebanyak 115 pegawai tetap mengikuti program pelatihan mencakup 4 *batch*.

HUMAN CAPITAL REWARD

Hasil Penilaian Kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward pegawai dengan prinsip *competitiveness* dan *fairness*. *Reward* diberikan kepada pegawai, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan. Setiap tahun, *financial reward* dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan. *Non-financial reward* berupa penghargaan seperti promosi pegawai.

HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM

Perseroan sedang mengembangkan *performance management* dengan menggunakan *Human Capital Information Sistem* (HCIS) secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan proses pelaksanaan penilaian kinerja. Penerapan HCIS diharapkan dapat menjadi sarana (*tools*) yang akurat dan komprehensif untuk mempermudah proses pengambilan keputusan terutama dalam perencanaan bisnis dan proses pengelolaan SDM. Melalui implementasi HCIS, proses tersebut dapat berjalan secara tepat waktu dan terbuka bagi manajemen dan pegawai Perseroan. Saat ini, Implementasi HCIS berada pada fase 3 yaitu fase *Talent Management* sebagai berikut.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Salah satu upaya Perseroan dalam mewujudkannya maka dilaksanakan pengelolaan SDM dengan memperhatikan kepentingan pekerja. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Bank yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN). Perseroan dengan SP-BTN telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditinjau secara berkala seuai dengan kebutuhan pegawai. Manajemen dan SP-BTN juga melaksanakan rapat untuk membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban pegawai maupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin.

DIGITAL BANKING

Saat ini Perseroan telah memasuki tahap kedua dalam proses transformasi dan siap memasuki era *digital banking period*. Transformasi Perseroan berbasis digital menjadi prioritas di tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini disebabkan semakin nyatanya dominasi dari kekuatan digital pada berbagai aspek bisnis, utamanya segmen *emerging affluance* dan *affluance.* Kebutuhan digital banking dengan didukung dengan komposisi demografi Penduduk Indonesia saat ini, rata-rata usianya berada diantara 20-30 tahun, serta dominasi generasi milenial yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk menyeleraskan perkembangan arah bisnis ke arah pemakaian teknologi digital. Pengembangan digital banking ini selain akan memperkokoh *core business* Perseroan di bidang pembiayaan perumahan, juga untuk meningkatkan perolehan CASA dan *fee based income*

Untuk itu, Perseroan melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan utama dalam membangun digital banking yang secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Inkubasi (pematangan) ide dan produk

Kemampuan utama ini dilaksanakan oleh tim pengembangan yang dirancang secara *agile* melalui beberapa aktivitas utama yaitu:

- Menerjemahkan hasil riset ke dalam proses pengembangan produk,
- Menentukan channel yang tepat untuk produk yang dikembangkan,
- Melakukan ujicoba produk.

Sebagai gambaran hasil pematangan ide dan produk dapat diuraikan melalui ilustrasi gambar RSTIK Tahun 2016-2018 yang diuraikan pada bagian Tata Kelola Teknologi Informasi yang dinamakan *digital mortgage bank.*

Selain itu, dilaksanakan oleh tim perencanaan produk sesuai *customer journey* dengan menjalankan kegiatan diantaranya:

- Melakukan riset etnografis,
- Melakukan pemetaaan *customer journey*,
- Mengidentifikasi fitur-fitur yang harus ada dalam produk sesuai hasil riset.

2. Komersialisasi ide dan produk

Kemampuan ini dijalankan oleh tim adhoc dan akuisisi nasabah dengan menjalankan beberapa kegiatan, antara lain:

- Bertanggungjawab atas kegiatan pemasaran dan promosi,
- Menentukan target market berdasarkan riset,
- Menentukan calon partner/ mitra kerja sama yang dibutuhkan

Selain itu, dilaksanakan oleh tim pengelolaan *channel* dan operasional melalui beberapa kegiatan antara lain:

- Bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari dan
- Melakukan dukungan dan hubungan dengan proses back office dari transaksi dan pembukuan.

Untuk mewujudkan berbagai hal di atas Perseroan telah merancang *roadmap* dalam rangka mengembangkan layanan *digital banking* secara optimal yang terdiri dari dua tahapan sebagaimana ilustrasi gambar di bawah ini.

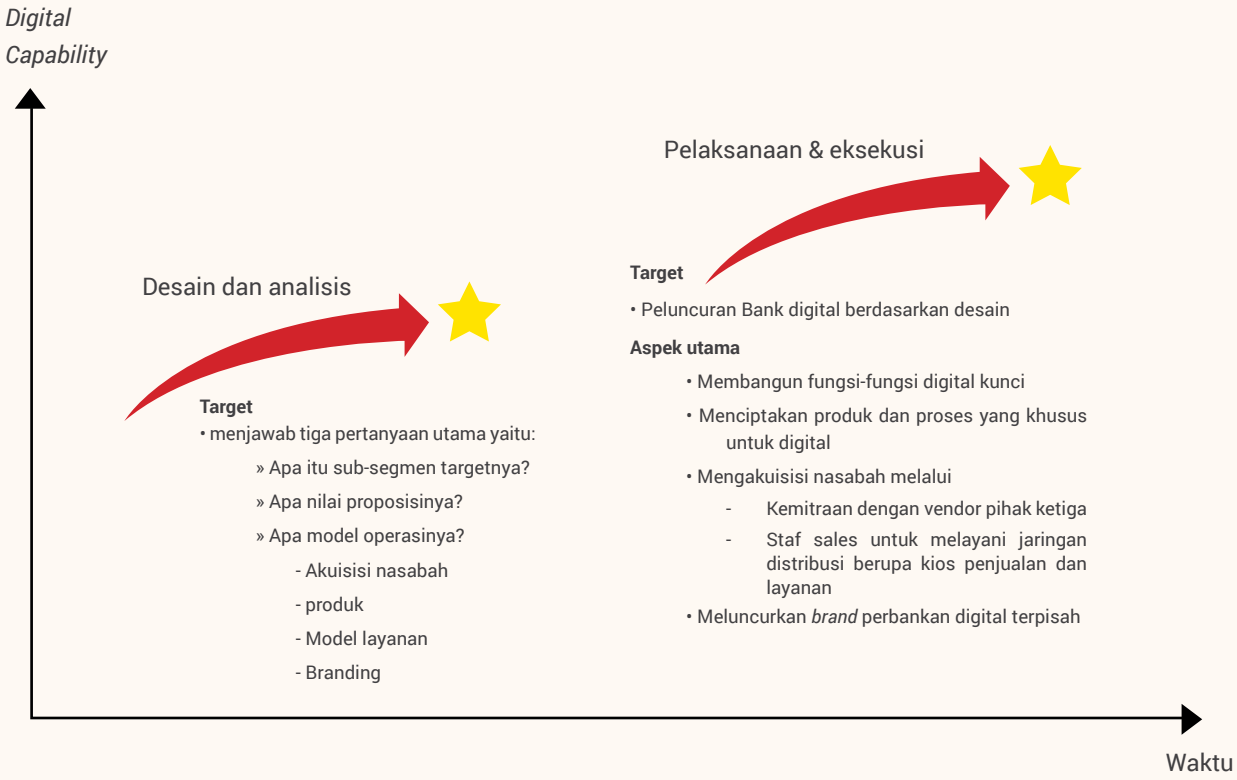
Digital Capability
Desain dan analisis
Target
• menjawab tiga pertanyaan utama yaitu:
» Apa itu sub-segmen targetnya?
» Apa nilai proposisinya?
» Apa model operasinya?
- Akuisisi nasabah
- produk
- Model layanan
- Branding
Pelaksanaan & eksekusi
Target
• Peluncuran Bank digital berdasarkan desain
Aspek utama
• Membangun fungsi-fungsi digital kunci
• Menciptakan produk dan proses yang khusus untuk digital
• Mengakuisisi nasabah melalui
- Kemitraan dengan vendor pihak ketiga
- Staf sales untuk melayani jaringan distribusi berupa kios penjualan dan layanan
• Meluncurkan *brand* perbankan digital terpisah
Waktu

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI MEMEGANG PERANAN STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN KEGIATAN OPERASIONAL DAN KEAMANAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI. PERSEROAN TELAH MENYUSUN DAN MENERAPKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA PERIODIK UNTUK MENUNJANG LAYANAN BERBASIS DIGITAL.

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi dilaksanakan oleh Divisi Information & Communication Technology yang dipimpin oleh Division Head di bawah koordinasi MD Treasury & IT (Chief Information Officer) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama berdasarkan Ketetapan Direksi No. 02/KD/DIR/SPMD/2015 tanggal 5 Mei 2015.

Struktur Organisasi Pengelola Teknologi Informasi

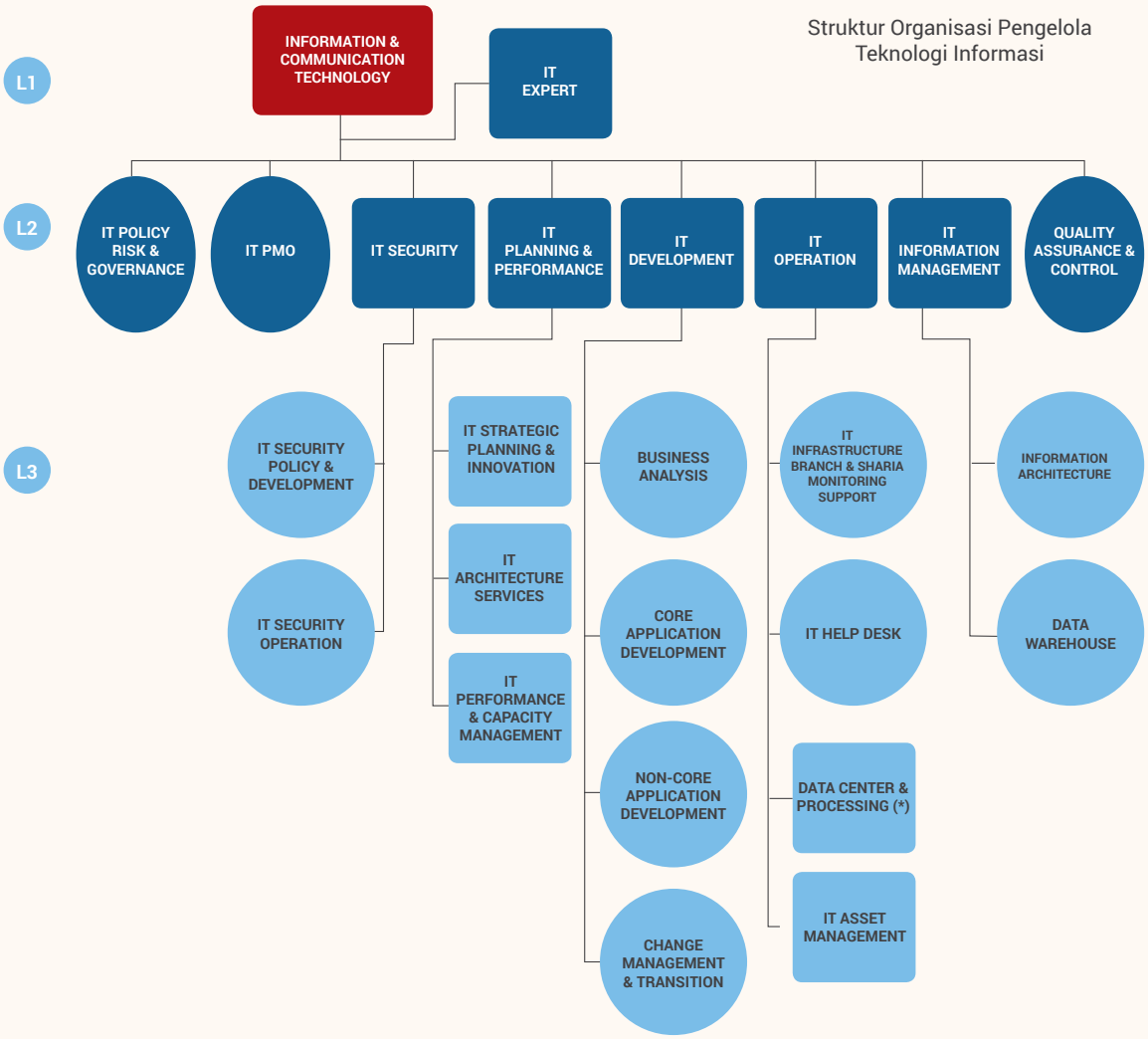

Divisi Information & Communication Technology dibantu oleh lima departemen (IT Security, IT Planning & Performance, IT Development, IT Operation, dan IT Information Management) dan tiga spesialis (IT Policy, Risk & Governance, IT PMO, dan Quality Assurance & Control).

PROFIL RINGKAS PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Berikut adalah profil singkat Kepala Divisi Information & Communication Technology

TOTO PRIYOHARTONO

Division Head Information & Communication Technology

Lahir di Probolinggo tanggal 24 Juli 1961

Pendidikan:

- Lulusan Magister Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran Bandung
- Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung

Riwayat Pekerjaan:

- Division Head Card Business Division (2015-1016)
- Division Head Network Development & E-Banking Division (2013-2015)
- Division Head Information & Communication Technology (2012-2013)
- Division Head Information & Communication Technology (2012)
- Division Head Information & Communication Technology (2011-2012)
- Division Head Commercial Funding Division (2010-2011)
- Division Head Assistant Commercial Funding Division (2010)

Dasar Pengangkatan:
Surat Keputusan Direksi No. 381/DIR/2016

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola teknologi informasi oleh Divisi *Information & Communication Technology* dilaksanakan berdasarkan pada departemen dan unit dibawahnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Departemen	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
IT Security	• Menciptakan sistem IT yang aman melaui koordinasi pengembangan strategi, kebijakan, dan rancangan sistem keamanan yang terpercaya serta operasionalisasi sistem keamanan yang handal dan sesuai dengan prosedur • Memastikan aspek integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta informasi selalu terlindungi sehingga kelangsungan bisnis Perusahaan terjamin.
IT Planning & Performance	• Mengkoordinasikan menganalisis dan mempersiapkan rencana Teknologi Informasi (TI) baik jangka pendek maupun jangka panjang dan mengelola serta mengoptimalkan anggaran dan sumber daya, menganalisis dan mempersiapkan Enterprise Architecture Teknologi Informasi (TI), Performansi, dan Kapasitas TI.
IT Development	• Bertanggungjawab dalam menjaga keselarasan antara strategi bisnis perusahaan dengan strategi teknologi informasi sehingga tercipta business value sesuai tujuan perusahaan.
IT Operation	• Mensupervisi pengadaan IT support kepada Kantor Cabang, penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan opearsional IT, pengelolaan asset IT baik *software* maupun *hardware*, pengelolaan data center, serta memastikan selalu terlindunginya aspek integritas, kerahasiaan dan ketersediaan data serta informasi, sehingga terjaminnya kelangsungan bisnis perusahaan.
IT Information Management	• Mensupervisi perencanaan, pengembangan, dan pengendalian arsitektur informasi serta penyediaan dan pengelolaan data *warehouse* agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan.
IT Policy, Risk & Governance Specialist	• Bertanggungjawab terhadap pembuatan policy dan procedure dalam lingkup IT termasuk kebijakan mengenai IT, manajemen risiko IT, pelaksanaan serta implementasi IT *Governance* pada seluruh proses yang berjalan pada ICTD dan bertanggungjawab atas seluruh kebijakan yang menjadi acuan ICTD.
IT Project Management Officer Specialist	• Bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan eksekusi seluruh proyek TI agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga tercapai pelaksanaan proyek yang *'on-schedule', 'on-budget',* dan *'on-spec'* serta bertanggungjawab untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan aturan-aturan pelaksanaan proyek-proyek TI.
Quality Assurance & Control Specialist	• Bertanggungjawab untuk menjaga kepatuhan proses-proses Operasional TI, Pelaksanaan Proyek, Pengadaan Aset TI, Pengembangan Aplikasi, serta Pengelolaan Informasi terhadap kebijakan, standard dan prosedur serta kualitas yang ditetapkan.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

"Mensinergikan Strategi Bisnis dan Teknologi Informasi Dengan Menyediakan Layanan Teknologi Informasi kelas Dunia Untuk Mencapai Kemenangan Pada Era Digital"

Misi

"Menjadi mitra bisnis yang handal yang menyediakan layanan responsif dan akurat melalui teknologi mutakhir dan sistem integrasi terkemuka."

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan terus berinovasi dan mengembangkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyusunan strategi pengembangan TI jangka panjang dalam bentuk Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTIK) Tahun 2016-2018 yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank 2016-2018. Gambaran RSTIK Tahun 2016-2018 sebagai berikut.

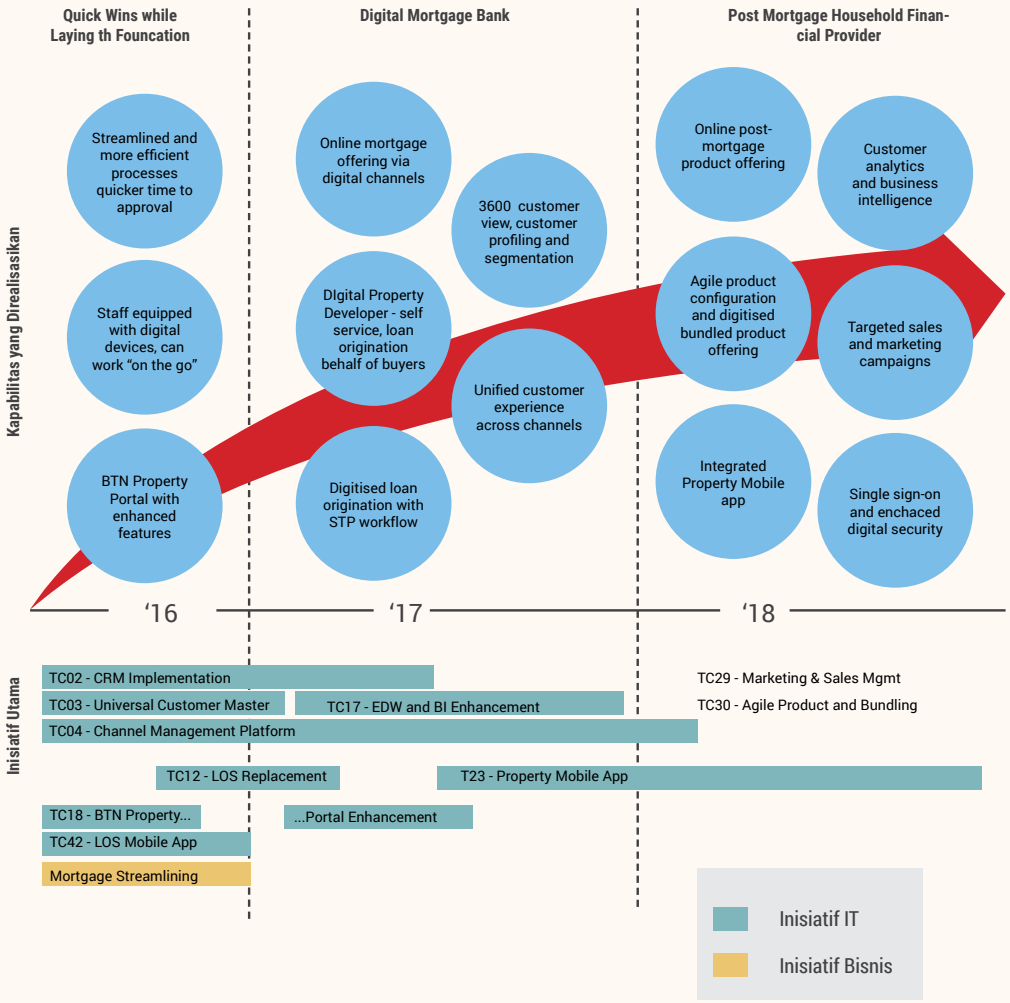

Roadmap tersebut kemudian dijabarkan menjadi strategi teknologi informasi yang disusun selaras dengan strategi bisnis sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja operasional secara optimal. Strategi teknologi informasi tersebut:

1. *Flexible Distribution*
   - Penjualan dan layanan *multi-channel* yang menawarkan tingkat layanan yang konsisten pada seluruh *channel* distribusi
   - *Channel* yang fleksibel yang dapat melayani kerja sama dengan *partner*
   - Memulai transaksi dalam satu *channel* dan menyelesaikannya melalui *channel* yang lain

2. *Automated Processing*
- Proses otomatisasi dan integrasi end to end dengan menggunakan *Enterprise Aplikasi Integration* (EAI) dan *Straight-Through Processing* (STP)
- Mengurangi kebutuhan keterlibatan pengguna
- Mengoptimalkan kecepatan proses transaksi

3. *Resource Empowerment*
   - Pelatihan, pembelajaran dan peningkatan keterampilan karyawan yang bersifat *self-assisted*
   - Percepatan proses dalam peluncuran produk
   - Peningkatan pemberdayaan karyawan dan *customer experience* yang lebih baik

4. *Agile Manufacturing*
   - Pembuatan *agile product* yang memungkinkan adanya modifikasi dalam spesifikasi produk
   - Memungkinkan adanya produk *bundling*
   - Mempercepat waktu distribusi produk baru ke pasar

5. *Integrated Customer Analytics*
   - Ketersediaan informasi nasabah yang lengkap dalam seluruh *channel*, meliputi profil nasabah, segmentasi nasabah, portofolio produk, evaluasi risiko, dan batas kredit saat ini
   - 360º *customer visibility*- pandangan terhadap nasabah secara lengkap
   - *Customer insights* dari sistem analitik

6. *Advanced Security*
   - Platform otentifikasi dan keamanan yang kuat
   - Membentuk lingkungan yang aman dan terpercaya bagi nasabah dan mitra kerja dengan mempertahankan *customer experience* yang baik.

Selanjutnya keseluruhan strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan sebagai acuan implementasi teknologi informasi secara berkelanjutan.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi berperan strategis terhadap kelancaran kegiatan operasional Perseroan terutama dalam mendukung strategi Perseroan sebagai Bank fokus Perumahan. Layanan operasional berbasis teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan akuisisi nasabah melalui otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk. Hal ini mendorong Perseroan untuk menyusun kebijakan teknologi informasi mengenai penerapan pengelolaan teknologi informasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi antara lain:

1. Peraturan Direksi Nomor 35/PD/ICTD/2010 Tentang Pedoman Tata Laksana (*Governance*) Teknologi Informasi Berbasis Manajemen Risiko
2. Peraturan Direksi Nomor 05/PD/ICTD/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No.18/PD/CMO/2011 Tanggal 20 Juli 2011 Tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)
3. Kebijakan *Business Continuity Plan TI* meliputi Surat Edaran Direksi Nomor 01/DIR/DTI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Operating Procedure Disaster Recovery Center* (DRC), Surat Edaran Direksi Nomor 23/DIR/ICTD/2011 tentang Pedoman Penerapan Business Continuity Plan, dan Surat Edaran Direksi Nomor 35/DIR/ICTD/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP)
4. Kebijakan keamanan informasi TI meliputi Surat Edaran Direksi Nomor 17/DIR/DTI/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengamanan *Password/Cryptographic Key*/Karakteristik Personal (Sidik Jari, Retina, Suara)/PIN, Surat Edaran Direksi Nomor 31/DIR/ICTD/2011 tentang Sistem Pengelolaan Pengamanan Informasi (Information Security Management System), dan Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/ICTD/2016 Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 01.DIR.ICTD.2014 perihal Pedoman Keamanan Informasi
5. Kebijakan Operasional meliputi Surat Edaran Direksi Nomor 04/DIR/DTI/1999 tentang Pedoman Operasi Aplikasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Surat Edaran Direksi Nomor 05/DIR/DTI/1999 tentang Pedoman Operasi *Backup Data*, Surat Edaran Direksi Nomor 02/DIR/ICTD/2014 tentang Petunjuk Operasional Penyelesaian Laporan Master Error, dan Surat Edaran Nomor 51/DIR/ICTD/2014 tentang Standarisasi Sistem Teknologi Informasi.
6. Kebijakan Manajemen TI meliputi Surat Edaran Direksi Nomor 41/DIR/ICTD/2011 tentang Pedoman Penerapan IT Risk Management dan Surat Edaran Direksi Nomor 33/DIR/ICTD/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Teknologi Informasi.

PROGRAM KERJA TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2016

Sepanjang tahun 2016 *Information and Communication Technology Division* (ICTD) melaksanakan program-program penerapan di bidang IT baik pengembangan teknologi, *people* dan proses diantaranya adalah sebagai berikut:

Bidang Teknologi

1. Aplikasi *Web Branch* Konvensional

Aplikasi *Front End* dari *corebanking* yang digunakan oleh *frontliner* (CS dan Teller) yang digunakan untuk operasional pembukaan rekening nasabah. Saat ini sedang dilakukan pilot *project* dibeberapa cabang.

2. LSMK Sharia

Aplikasi dikembangkan khusus untuk bisnis sharia. Aplikasi LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) yang digunakan untuk pelaporan terhadap regulasi untuk pelaporan kepada pihak Internal maupun eksternal.

3. Aplikasi *Knowledge Management System (Smart Share)*

Aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk *sharing knowledge* (mengumpulkan, menggunakan, menyebarkan) informasi kepada untuk seluruh insan BTN.

4. Pengembangan Aplikasi lainnya

- Pengembangan *Go pay*
- Pengembangan Fitur-fitur e channel internet banking dan mobil banking
- Pengembangan Aplikasi Host to host dengan beberapa universitas
- Pengembangan Aplikasi BPJK TK
- Pengembangan Aplikasi KSEI
- Pengembangan Aplikasi Bansos
- Pengembangan Project Merah Putih

5. *Co-Location Data Center* baru untuk difungsikan sebagai DC2.

Sesuai dengan rancangan awal yaitu konsep Dual Data Center (DC) Perseroan yaitu memiliki 2 unit DC dan 1 unit operation center. Untuk merealisasikan hal tersebut maka Perseroan membangun DC ke-2 dengan melakukan *Co Location (manage service)* hal ini dilakukan agar kualitas layanan TI dapat mencapai hasil yang lebih handal serta mengindari risiko reputasi dan risiko operasional.

6. Standarisasi Perangkat Keras di Kantor Cabang

Guna mendukung pelayanan kepada cabang dari sisi penyediaan perangkat keras (*hardware*) yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan pelayanan bagi nasabah, maka kami melakukan standarisasi perangkat PC, server di cabang, ruang server serta beberapa aplikasi di dalamnya.

Bidang *People*

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi

1. *Workshop*

- *IT Demand Management & BRD* untuk penyusunan *user requirement*
- *Workshop IT Governance*

2. Pelatihan untuk pelatih dan pengguna

- *Training S-Invest*
- Pengelolaan Risiko Pengelolaan Kartu - PCI DSS
- *Transfer Knowledge iLoan, iColl & iCremo*
- *Training S-Invest*
- *Visual Studio ASP.NET with C#.*

- *IT Asset Management* (ITAM)
- *Legal Drafting & Writing*
- *Strategic IT Architecture Planning*
- CCNAX (*exam not yet*)
- *iSeries System Administration and Contol*
- Pengelolaan Risiko Pengelolaan Kartu - PCI DSS

3. Sertifikasi
   - Sertifikasi PMP untuk Project Management Office (PMO)
   - *Certified Ethical Hacking*
   - Sertifikasi CHFI *Preparation + Exam*

Bidang Proses

Review kebijakan antara lain:

- SE 40 /DIR/ICTD/2016 Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Direksi No.01/DIR/ICTD/2014 perihal Pedoman Keamanan Informasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

MENGOKOHKAN LANDASAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN,
MENDUKUNG AKSELERASI PROGRAM **SEJUTA RUMAH**

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementasi tata kelola perusahaan dimaknai Perseroan sebagai alat sekaligus mekanisme untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kepercayaan *stakeholder*, menumbuhkan integritas perusahaan dan meningkatkan *shareholder* value. Pencapaian sebagai Juara 1 *Annual Report Award* (ARA) untuk kategori Perusahaan BUMN Keuangan Listed di tahun 2016, semakin mengukuhkan posisi Perseroan dalam keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan.

Selain itu, Perseroan terus meningkatkan implementasi tata kelola dengan praktik terbaik yang dibuktikan dengan pencapaian prestasi predikat *The Best Overall* ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2016 oleh IICD.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

- Gold Winner Worldwide
- Top 100 Reports Worldwide (#88)
- Top 10 Reports Indonesia
- Top 50 Reports Asia-Pacific Region (#26)
- Best Report Narrative Asia-Pacific Region

LACP
(League of American Communication Professionals)

PLATINUM TROPHY

(Kinerja Sangat Bagus selama 10 Tahun berturut-turut)

INFO BANK

BEST MID CAP (RANKED 1ST)

KATEGORI
ASIA BEST COMPANIES 2016

FINANCE ASIA

Juara I

Annual Report **BUMN Keuangan *Listed***

ANNUAL REPORT AWARD

OJK,BI,IAI,Depkeu,KNKG,IDX,BUMN

- Top 50 Public *Listed* Companies
- The Best Overall

IICD AWARDS 2016

IICD
(Indonesian Institute for Corporate Directorship)

The Asset Corporate Award 2016

Kategori Titanium 'Exellence in Governance, and Investor Relations Benchmarking"

The Asset - Hongkong

PENDAHULUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan memaknai peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal dalam rangka mendorong peningkatan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Selain itu, semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan. Untuk itulah, Perseroan terus meningkatkan penerapan tata kelola bank dengan perkembangan regulasi terkini diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tata kelola bank yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya berkesinambungan Perseroan untuk meresponsecara proporsional kebutuhan implementasi GCG lebih dari *sekedar compliance driven.* Perseroan meyakini bahwa *tagline Moving Beyond Corporate Governance to True Bussiness Value* menjadi aspirasi dalam penerapan GCG agar Perseroan dapat menjadi bank BUMN yang membanggakan, yang dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2016 membuahkan hasil yang memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diraih. Bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Perseroan tetap mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan. Pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan baik terkait kinerja bank, transparansi informasi dan juga implementasi tata kelola perusahaan telah diperoleh, antara lain adalah:

1. *Platinum Trophy* (Kinerja Sangat Bagus selama 10 Tahun berturut-turut) dari Infobank;
2. *Best Mid Cap* (*Ranked 1st*) Kategori *Asia Best Companies* 2016 *Finance Asia*;
3. Juara I *Annual Report Award* Kategori BUMN Keuangan *Listed*;
4. *The Best Overall* berdasarkan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* oleh IICD;
5. Bank yang Berkinerja Terbaik dari Property & Bank;
6. *4th Best Overall Performance* Bank BTN Syariah dari Infobank & MRI.
7. *The Asset Corporate Award* 2016 mendapatkan kategori *Titanium 'Exellence in Governance, CSR and Investor Relations Benchmarking*" dari The Asset – Hongkong.

Penerapan GCG Perseroan telah mematuhi berbagai ketentuan dan pedoman antara lain Undang-undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Negara BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia, *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dan Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus mendorong peningkatan cakupan implementasi GCG di berbagai aspek dan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank, antara lain dengan terus menyempurnakan GCG *structure* yang dimiliki, sosialisasi GCG *structure* secara berkesinambungan serta melaksanakan penilaian *self assessment* GCG secara berkala untuk mendukung penerapan GCG yang semakin efektif. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha bank dewasa ini. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan

dan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi
   a) Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
   b) Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
   c) Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
   d) Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas
   a) Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
   b) Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
   c) Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance.*
   d) Perseroan menetapkan *check & balance system* dalam pengelolaan Perseroan.
   e) Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system.*
3. Responsibilitas
   a) Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
   b) Perseroan sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi
   a) Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
   b) Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran dan Kesetaraan
   a) Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
   b) Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Secara umum, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG dengan tujuan dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Adapun tujuan penerapan GCG Perseroan secara khusus antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
3. Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

ROADMAP TATA KELOLA BANK BTN

Dengan menerapkan paradigma GCG secara menyeluruh, akan terjadi keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingannya dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Skema Paradigma GCG Perseroan
360 Degree Balance

Paradigma GCG "*360 Degree Balance*" diwujudkan dengan terus melakukan penguatan GCG secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu terhadap 4 (empat) pilar GCG yang terdiri dari *Commitment* on *Governance*, *Governance Structure*, *Governance Mechanism* dan *Governance Outcome*.

Untuk itulah Perseroan menetapkan rangkaian *Roadmap GCG* yang terprogram, dengan sasaran akhir terwujudnya Perseroan sebagai salah satu perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik di masa mendatang, dengan uraian tahapan strategi implementasi, sebagai berikut:

Fase 1
2014
Building the Foundation

Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen kunci dalam implementasi GCG.

Fase 2
2015
Developing the Key Elements

Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen kunci dalam implementasi GCG.

Fase 3
2016
Strengthening the System

Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen kunci dalam implementasi GCG.

Fase 4
2017
Governance Excellence

Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen kunci dalam implementasi GCG.

Setiap tahapan *Roadmap GCG* di atas fokus pada perbaikan dan peningkatan penerapan 4 Pilar GCG. Adapun realisasi untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

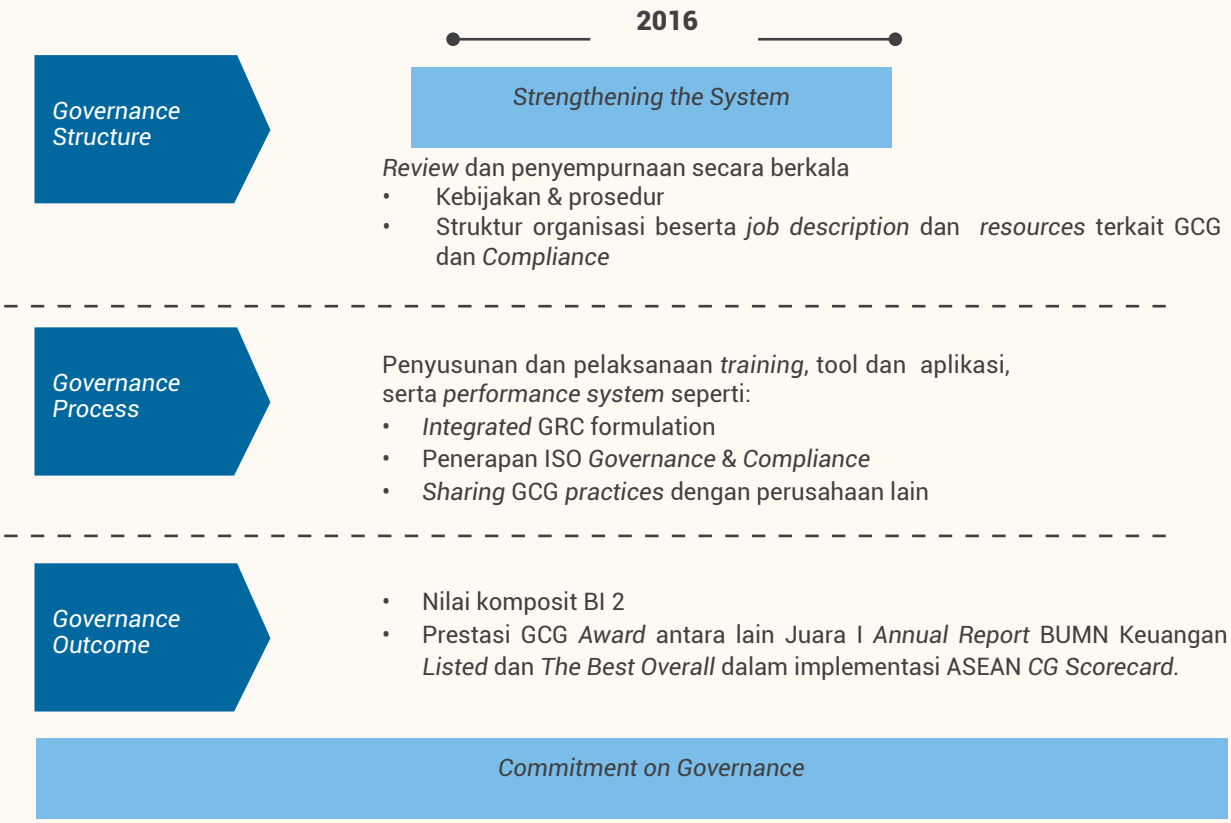

MEMBANGUN KOMITMEN IMPLEMENTASI GCG PERSEROAN BERKELANJUTAN

FOKUS TATA KELOLA PERSEROAN TAHUN 2016

Penerapan tata kelola Perseroan pada tahun 2015 berfokus pada peningkatan pelaksanaan tata kelola yang baik, sehingga menjadikan Perseroan lebih memiliki daya saing tinggi, serta selalu mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Adapun fokus tata kelola Perseroan di tahun 2016 sesuai dengan *Roadmap GCG* adalah:

a) Evaluasi dan perbaikan penerapan GCG
b) Evaluasi dan persiapan GCG *Award*
   Evaluasi dilakukan pada keikutsertaan *GCG Award* pada tahun lalu untuk mempersiapkan keukutsertaan *GCG Award* pada periode selanjutnya.
c) Evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan *training* sertifikasi internasional
   Evaluasi dilakukan dengan mereview hasil *training* bersertifikasi internasional yang dilakukan oleh *top management*, pejabat berwenang serta pegawai terpilih.
d) Penyusunan Governance, Risk & *Compliance* (*GRC)*
e) Pengembangan kompetensi SDM terkait penerapan GCG
   Pengurus dan pegawai yang telah mendapatkan sertifikasi internasional dalam penerapan GCG melakukan *sharing discussion*, *training*, dan seminar kepada pegawai Perseroan lain.
f) Penerapan ISO *governance* dan *compliance*
   Perseroan mendapatkan ISO *Governance* dan *Compliance* dari lembaga pemberi sertifikasi ISO yang mencerminkan bahwa penerapan *governance* dan *compliance* diakui sesuai dengan mutu standar.
g) *Review* dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur
   Penyempurnaan kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memperbaiki ketentuan dan kebijakan yang perlu direvisi.
h) Evaluasi dan pembenahan struktur organisasi serta *job description*
   Pembenahan struktur serta perbaikan *job description* dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan peran dan beban kerja dalam pelaksanaan GCG.
i) *Sharing GCG practices* dengan perusahaan lain

Peningkatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN *CG Scorecard*

Dalam rangka melanjutkan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola sesuai pedoman OJK dan ASEAN *CG Scorecard*, *Perseroan* telah melakukan penyesuaian kebijakan terkait tata kelola antara lain penyempurnaan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi terutama terkait dengan ketentuan pelaksanaan rapat terjadwal Direksi dan Dewan Komisaris termasuk mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat, aspek benturan kepentingan, tugas Komisaris Utama dan pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap implementasi GCG. Selain itu, dilakukan pemutakhiran terhadap Kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Kebijakan Komite Audit.

Selain itu, peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi juga telah dilakukan *Perseroan* antara lain melalui pengungkapan informasi penting dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada *website* perusahaan, sehingga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi tersebut. *Perseroan* juga telah menerapkan kepastian pemenuhan hak dasar pemegang saham berupa penerimaan pembagian dividen tunai tidak melebihi 30 hari kalender sejak diumumkan.

Dalam rangka peningkatan praktik tata kelola perusahaan, *Perseroan* sebagai perusahaan terbuka sebagian besar telah menerapkan 25 rekomendasi dalam 5 aspek dan 8 prinsip tata kelola perusahaan bagi perusahaan terbuka yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak November 2015. Selanjutnya *Perseroan* akan terus meningkatkan penerapan tata kelola sesuai dengan rekomendasi OJK.

Program *Zero Tolerance to Fraud & Zero Defect*

Fraud telah menjadi 'musuh' bersama di setiap perusahaan, terutama perusahaan jasa keuangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian finansial, namun yang terbesar reputasi perusahaan. Oleh karena itulah *Perseroan* terus berupaya secara maksimal memitigasi risiko terjadinya *fraud* di lingkungan perusahaan.

Untuk menjamin setiap upaya yang dilakukan berjalan efektif, maka Perseroan terus meningkatkan kepedulian Insan BITNIZ tentang aspek kepatuhan melalui sosialisasi secara kontinyu program anti fraud dan membentuk Tim Anti Fraud yang menjalankan Strategi Anti Fraud sesuai Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. Strategi Anti Fraud memilik 4 (empat) pilar yaitu (a) Pencegahan; (b) Deteksi; (c) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi; serta (d) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. Lebih jauh lagi, komitmen anti fraud juga ditunjukkan dengan penyampaian surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada seluruh *stakeholders* Perseroan. "Komitmen Bersih" mencakup bersih dari suap, KKN, dan praktek pungutan liar (pungli), *mark up* dan segala perbuatan lain yang mengarah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Semangat untuk menjalankan GCG secara lebih serius mendorong Bank merangkul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam mengendalikan praktik Gratifikasi dan suap di lingkungan Bank. Hal ini merupakan bukti keseriusan untuk mendukung Indonesia bersih dari Korupsi dan menjadikan Perseroan merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK. Sebagai bentuk komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perseroan, maka Perseroan wajib mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan. Sistem ini akan menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG BANK BTN

Perseroan menetapkan dan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *standard* internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN *CG Scorecard*.

Self-Assessment GCG Bank

Acuan regulasi yang dijadikan standar penerapan GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Standar pelaksanaan GCG sesuai regulasi ini minimal meliputi 11 (sebelas) parameter, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2015

Perseroan menggunakan kriteria *Self Assessment* GCG bank yang ditetapkan oleh BI/OJK. Penilaian tersebut mencakup aspek Dewan Komisaris dan Direksi yang diuraikan menjadi *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome.*

Adapun rekomendasi yang terkait aspek Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan indikator penilaian tersebut, antara lain adalah:

a. *Governance Structure*

Faktor Positif:

1) Perseroan telah memiliki governance struktur dan infrastruktur sesuai ketentuan
2) Kepala Unit kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas pesetujuan Dewan Komisaris
3) Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai ketentuan

Faktor Negatif:

Pada tahun buku 2015, terdapat 2 anggota Dewan Komisaris yang belum melakukan fit & proper test serta Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan RUPS LB tanggal 2 September 2015 mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 9 Oktober 2015.

b. *Governance Process*

Faktor Positif:

1) Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi
2) Direksi berkomitmen menjalankan kepengurusan perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini usaha

Faktor Negatif:

Masih terdapat beberapa hal yang perlu dan/ atau dalam proses penyempurnaan terkait supervisi/monitoring aktivitas pengelolaan risiko operasional bank sebagaimana temuan OJK

c. *Governance Outcome.*

Faktor Positif:

1) Perseroan telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
2) Perseroan telah melaksanakan assessment/ audit secara obyektif
3) Perseroan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, Peraturan Pasar Modal, Perpajakan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Peraturan Perundangan lainnya.

Faktor Negatif:

1) Masih terdapat denda, terkait denda laporan Bank kepada BI/OJK
2) Terindentifikasi fraud yang memerlukan perhatian yang cukup untuk penyelesaian secara komprehensif.

Hasil penilaian *Self Assessment* GCG sesuai ketentuan BI/OJK dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	2014	2015	2016
Skor Self-Assesment GCG	2	2	2

HASIL *SELF ASSESSMENT* GCG PERSEROAN TAHUN 2016		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

ANALISIS

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (Governance Structure), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian GCG, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Structur Tata Kelola (*Governance Structure*)
Struktur Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif
   a. Perseroan telah memiliki struktur tata kelola dan infrastruktur yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   b. Struktur tata kelola telah lengkap terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Satuan Kerja dengan jumlah anggota yang sesuai dan kompetensi yang memadai.
   c. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal berada pada organisasi yang terpisah dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
   d. Perseroan memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai penyedian dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan transparansi kondisi keuangan serta non keuangan.
   e. Perseroan telah menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang selaras dengan visi dan misi.
2. Faktor-faktor Negatif
   Dewan Komisaris belum sepenuhnya efektif karena per 31 Desember 2016 masih terdapat:
   a. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2016 belum *Fit and Proper Test* oleh OJK.
   b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang dialihkan dari Komisaris ke Komisaris Independen berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2016 belum *Fit and Proper Test* sebagai Komisaris Independen oleh OJK.
3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
   Terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum *Fit and Proper Test* oleh OJK.
4. Kekuatan
   Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur tata kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas, dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.

ANALISIS

B. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
Proses Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Positif
   a. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi
   b. Direksi berkomitmen menjalankan kepengurusan perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini usaha
   c. Satuan Kerja Audit Intern senantiasa menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku
   d. Audit Ekstern dilaksanakan dengan profesional, tanpa intervensi, dan dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan terlisensi oleh OJK
   e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Faktor-faktor Negatif
   Pengendalian intern belum sepenuhnya efektif, masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait supervisi terhadap aktivitas pengelolaan operasional Perseroan sebagaimana temuan OJK.
3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
   Terdapat temuan OJK, sehingga perlu peningkatan kualitas supervisi terhadap aktivitas pengelolaan operasional Perseroan.
4. Kekuatan
   Bank BTN senantiasa berkomitmen memperbaiki proses bisnis

C. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
Hasil Tata Kelola secara umum Memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif
   a. Perseroan telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
   b. Perseroan telah melaksanakan assessment/audit secara obyektif
   c. Perseroan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, Peraturan Pasar Modal, Perpajakan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Peraturan Perundangan lainnya.
   d. Perseroan telah melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen
   e. Kinerja Bank posisi per 31 Desember 2016 menunjukkan peningkatan, sebagai berikut:
      - Total asset
      - Laba bersih
      - Kualitas kredit
      - Rasio KPMM
2. Faktor-faktor Negatif
   a. Masih terdapat denda, terkait denda laporan Bank kepada BI/OJK, meskipun terjadi penurunan jumlah denda dibandingkan periode sebelumnya.
   b. Terindentifikasi fraud yang memerlukan perhatian yang cukup untuk penyelesaian secara komprehensif.
3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
   Laporan tidak dilakukan tepat waktu disebabkan kendala operasional dan belum efektifnya deteksi, supervisi terhadap sumber *fraud*.
4. Kekuatan
   Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk meningkatkan hasil tata kelola dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha.

Rating GCG – CGPI *Award*

Perseroan telah mengikuti rating dan *survei Corporate Governance Perception Index* (CGPI) setiap tahun. CGPI merupakan Program riset dan pemeringkatan GCG Penilaian kualitas *Corporate Governance*. Hasil penilaian untuk tahun 2016 adalah sebesar 86,59 dengan tahapan penilaian meliputi *Self Assessment*, Sistem Dokumentasi, Makalah dan Observasi.

Pada CGPI 2015/2016 Perseroan kembali memperoleh penilaian GCG cukup tinggi dan menerima penghargaan dengan peringkat penilaian Perusahaan **"Sangat Terpercaya".** Hasil Penilaian CGPI Perseroan tahun 2016 mendapatkan *skor* sebesar **86,59** dengan predikat **"Perusahaan Sangat Terpercaya"** (*The Most Trusted Company*). Hasil penilaian CGPI selama 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel *Skor* CGPI Bank BTN Tahun 2014-2016

Rating CGPI	2014	2015	2016
Skor - Predikat	84,94 Perusahaan Sangat Terpercaya	85,75 Perusahaan Sangat Terpercaya	86,59 Perusahaan Sangat Terpercaya

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Perseroan mengikuti *Assessment* GCG yang dilakukan oleh *the Indonesian Institue for Corporate Directorship* (IICD), yang menilai praktik *corporate governance* (CG) berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*.

Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan 2015 serta situs *web* Perseroan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa total *skor Perseroan* adalah 104,04 dengan predikat "*Leadership in Corporate Governance*". *Skor* rata-rata 100 perusahaan publik atau emiten sebesar 67,99 dan emiten perbankan rata-rata *skor* sebesar 83,33 sehingga total *skor Perseroan* berada di atas *skor* rata-rata. *Skor* masing-masing komponen *Scorecard* sebagai berikut:

Prinsip			
	2014	2015	2016
Basic Shareholder Rights Hak-Hak Pemegang Saham	4,40	7,60	10
Equitable Treatment Of Shareholders Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	9,71	10,00	11,66
Role Of Stakeholders Peran Pemangku Kepentingan	10	8,57	10
Disclosure And Transparency Pengungkapan dan Transparansi	18,75	22,50	23,78
Responsibilities Of The Board Tanggung Jawab Dewan Komisaris	28,80	34,59	35,6
Bonus	7	9	13
Penalti	0	0	0
***Skor* Total**	**78,66**	**92,27**	**104,04**

Adapun uraian Pernyataan Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman *Corporate Governance* berdasarkan Asean CG *Scorecard* adalah sebagai berikut:

Part A. Rights Of Shareholders

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
LEVEL 1			
PART A BAGIAN A	*RIGHTS OF SHAREHOLDERS* HAK-HAK PEMEGANG SAHAM		
A.1	*Basic Shareholder Rights* Hak Dasar Pemegang Saham	*Comply*	-
A.2	*Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes.* Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental.	*Comply*	-
A.3	*Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedure, that govern general shareholder meeting.* Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	*Comply*	-
A.4	*Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.* Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan.	*Comply*	-
A.5	*The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.* Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	*Comply*	-

***Part B. Equitable Treatment Of** Shareholders*

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
LEVEL 1			
PART B BAGIAN B	*EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS* PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM		
B.1	*Shares and voting rights* Hak suara dan kepemilikan saham	*Comply*	-
B.2	*Notice of AGM* Pemberitahuan RUPS	-	- Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; - Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS; Panggilan RUPS tidak mengungkap tentang kebijakan deviden Perusahaan; - Panggilan RUPS tidak mengungkap tentang jumlah deviden yang akan dibagikan.
B.3	*Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.* Menghindari *Insider trading* dan penyalahgunaan.	*Comply*	-
B.4	*Related party transactions by directors and key executives.* Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi.	*Comply*	-
B.5	*Protecting minority shareholders from abusive actions.* Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran.	*Comply*	-

Part C. Role Of Stakeholders

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
LEVEL 1			
PART C BAGIAN C	*ROLE OF STAKEHOLDERS PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN*		
C.1	*The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.* Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	*Comply*	-
C.2	*Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.* Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	*Comply*	-
C.3	*Performance-Enhancing Mechanisms for Employee Participation Should be Permitted to Develop.* Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	*Comply*	-
C.4	*Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the Board and their rights should not be compromised for doing this.* Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	*Comply*	-

Part D. Disclosure And Transparency

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
LEVEL 1			
PART D BAGIAN D	*DISCLOSURE AND TRANSPARENCY* TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN		
D.1	*Transparent Ownership Structure* Transparansi Struktur Kepemilikan	*Comply*	-
D.2	*Quality of Annual Report* Kualitas Laporan Tahunan	*Comply*	-
D.3	*Disclosure of Related Party Transactions (RPT)* Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	-	- Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.4	*Directors and Commissioners Dealings in Shares of The Company* Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	-	- Perseroan belum mengungkapkan kebijakan mengenai proses *review* dan *approval* dari Pihak Berelasi yang bersifat material
D.5	*External Auditor and Auditor Report* Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	*Comply*	-
D.6	*Medium of Communications* Media Komunikasi	*Comply*	-
D.7	*Timely Filing/Release of Annual/Financial Reports* Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	*Comply*	-
D.8	*Company website* Keberadaan *website* Perseroan	*Comply*	-
D.9	*Investor Relations* Hubungan Investor	*Comply*	-

Part E. Responsibilities Of The Board

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
LEVEL 1			
PART E BAGIAN E	*RESPONSIBILITIES OF THE BOARD* TANGGUNG JAWAB DEWAN		
E.1	*Board Duties and Responsibilities* Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	*Comply*	-
E.2	*Board Structure* Struktur Dewan	*Comply*	-
	Code of Ethics or Conduct Pedoman Etika atau Perilaku	-	- Perseroan belum membuat rencana rapat sebelum tahun buku dimulai; - Frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris kurang dari 75% selama tahun buku; - Rincian jumlah remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris belum diungkapkan; - Komisaris Independen Perseroan masih menerima bonus kinerja.
E.3	*Board Processes* Proses Dewan	*Comply*	-
E.4	*People on the Board* Posisi Dewan	-	- Perseroan belum mengungkapkan penilaian, proses penilaian dan kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris secara individual pada tahun berjalan.
E.5	*Board Performance* Kinerja Dewan	*Comply*	-

Adapun pada penilaian Bonus, beberapa item yang dapat dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

Level/ No Item	*Corporate Governance Standard Criteria*	*Comply Status*	*Explain*
(B) D.1.1	*The audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end.* Jangka waktu diumumkannya laporan keuangan yang diaudit dalam waktu 60 hari terhitung dari akhir tahun buku.	*Comply*	-
(B) E.1.1	*The company have at least one female independent director/commissioner.* Pada tahun buku 2015 (ASEAN *CG Scorecard* 2016), Perseroan memiliki satu orang Komisaris perempuan.	*Comply*	-
(B) E.2.2	*the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions.* Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan strategy map yang ada.	*Comply*	-
(B) E.4.1	*Independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/ commissioners.* Pada tahun buku 2015 (ASEAN *CG Scorecard* 2016), Perseroan memiliki 5 Komisaris Independen dari total 7 Komisaris.	*Comply*	-
(B) E.5.1	*The company have a separate level Risk Committee.* Keberadaan Komite Pemantau risiko secara terpisah atau independen.	*Comply*	-

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Pedoman tata kelola perusahaan terbuka diatur berdasarkan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut dibagi menjadi 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kepatuhan Bank BTN terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK Terkait Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	*Comply*	Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan dengan cara pengambilan keputusan dan pengumpulan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK. Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Prosedur tersebut dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik, di antaranya melalui situs *web* Perseroan. 2. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan dua kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengumpulan/ pemungutan suara (*voting*). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
				Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia cukup memberikan suara satu kali saja per keputusan dan suaranya telah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 2. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. 3. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. 4. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 5. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	*Explain*	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2016, anggota Dewan Komisaris sdr. Kamaruddin Sjam, Ketua Komite Audit tidak dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan karena mendapat tugas dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk mengikuti *Benchmarking & Workshop Enterprise Risk Management* in UK di London & Cambridge tanggal 10 s.d 17 April 2016. Melalui surat No. 48B/KOM/BTN/IV/2016 tanggal 8 April 2016, sdr. Kamaruddin Sjam menyampaikan kepada Pimpinan RUPS Tahunan 2016 bahwa yang bersangkutan tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	*Comply*	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs *web* Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (*Investor Relation*). Ringkasan risalah RUPS tersebut disediakan dalam 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS dan tersedia selama lebih dari satu tahun pada situs *web* Perseroan.
	2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	*Comply*	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor dengan tujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Sekretaris Perusahaan, Akses Keterbukaan Informasi pada Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui situs *web* Perseroan (www.btn.co.id).
		2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*.	*Comply*	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs *web* Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.	3. Memperkuat Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	*Comply*	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan dan semua ketentuan Regulator dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementerian BUMN). Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	*Comply*	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
	4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	*Comply*	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs *web* Perseroan (www.btn.co.id) menu *Investor Relation* – GCG – *Crossreference* ASEAN CG *Scorecard* – *Board Manual*
		2. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	*Comply*	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
		3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	*Comply*	Perseroan telah memiliki kebijakan pada *Board Manual* terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
		4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	*Comply*	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
				Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.
3. Fungsi dan Peran Direksi.	5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi pertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	*Comply*	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan dan semua ketentuan Regulator dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementerian BUMN). Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	*Comply*	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.
		3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	*Comply*	Pada periode 2016, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: 1. Pendidikan a. S 1 Teknik Mesin ITB b. S2 *Accounting and Finance* Universitas of Birmingham UK 2. Pengalaman Kerja *a. Loan Officer urusan perkreditan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1982 – 1987)* *b. International Funding Manager PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1991 – 1992)* *c. Treasury Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1992 – 1995)*

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
				d. *Deputy General Manager* Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1995 – 1996) e. General Manager (CE) Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1996 – 1997) f. Wakil kepala urusan keuangan dan jasa Bank PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1998 – 1999) g. General Manager (CEO) Cabang Singapore PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 1999 – 2001) h. *Department Head UP3 Financial Institution & Overseas Network* (FION) group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2001 – 2002) i. *Department Head Correspondent* Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2002 – 2003) j. *Department Head FI Credit Risk and Product Development* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2003 – 2006) k. *Departement Head Credit Recovary II group* dan *Senior Recovary Manager Asset Management and Disposal Department PT* Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2006) l. Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) setingkat *Group Head* untuk I*nternational Banking and Capital Market Services Group* (IBCMS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) m. Group Head IBCMS Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.(tahun 2009 – 2010) n. Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2010 – 2013) Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
	6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	*Comply*	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs *web* Perseroan (www.btn.co.id) menu *Investor Relation-GCG-Crossreference* ASEAN CG *Scorecard-Board Manual.*
		2. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	*Comply*	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.
		3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	*Comply*	Perseroan telah memiliki kebijakan pada *Board Manual* terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	*Comply*	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations sebagaimana yang dapat dilihat di situs *web* Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.
		2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	*Comply*	Pelaksanaan penerapan anti *fraud* di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 22/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang *Standard Operating Procedure Strategi* Anti *Fraud* Perseroan. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi Nomor 45/DIR/CMPD/2015.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
		3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.	*Comply*	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor. Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai database vendor dalam pengadan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur *Standar Operating Procedure* (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
		4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	*Comply*	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: - Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. - Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. - Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Pada periode tahun 2016, Kreditur Perseroan terdiri dari 2, yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.
		5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	*Comply*	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan *Whistleblowing System* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran No. 21/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal *Standard Operating Procedure Whistle Blowing System Perseroan* yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan *Whistleblowing System* dimaksud pada periode 2015 diuraikan pada bagian *Whistleblowing System* Laporan Tahunan ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
		6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	*Comply*	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No. 03/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini. Peraturan Direksi tersebut merupakan ratifikasi dari Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015. Sejak tahun 2010, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian Share Option pada Laporan Tahunan ini.
5. Keterbukaan Informasi.	8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* sebagai media keterbukaan informasi.	*Comply*	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui media teknologi informasi, selain situs *web* Perseroan. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pelayanan dan pengkinian informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu YouTube (dengan alamat: officialbankbtn), Facebook (dengan alamat: socialmedia@btn.co.id), Twitter (dengan alamat: socialmedia@btn.co.id), Instagram (dengan alamat: officialbankbtn) dan LinkedIn (dengan alamat PT. BankTabungan Negara (Persero) Tbk). Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui *email, conference call* dan TV Pasar Modal IBCM *Channel* Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan *site visit* oleh investor ke kantor cabang Perseroan, *Non-Deal Roadshow, one-on-one meeting, Analyst Meeting Public Expose.*

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
		2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	*Comply*	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG TAHUN 2017

Perseroan menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendorong penciptaan nilai perusahaan, meningkatkan pengelolaan terhadap risiko, memperkuat kondisi internal perusahaan, mendorong kinerja bisnis, serta meningkatkan reputasi atau citra positif sebagai perusahaan yang menjaga kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017-2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017, secara umum Perseroan akan memperkuat implementasi *Governance*, *Risk*, dan *Compliance* (GRC) yang akan meningkatkan integrasi tata kelola, manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan bank, meminimalkan kelemahan internal, dan mampu untuk menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Inisiatif untuk peningkatan kualitas GCG di tahun 2017 adalah melakukan kajian dan penyempurnaan secara berkala peraturan dan kebijakan tata kelola dengan mengikuti dinamika perubahan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, dan pedoman/ kerangka tata kelola perusahaan dari lembaga internasional (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*). Penyempurnaan proses dilakukan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti kelemahan yang ditemui pada proses asesmen tata kelola yang dijalankan baik secara penilaian sendiri maupun penilaian oleh pihak ketiga. Hasil implementasi tata kelola akan diarahkan untuk meningkatkan transparansi kondisi perusahaan, perlindungan nasabah, peningkatan fungsi kepatuhan, penyelesaian permasalahan seperti *fraud*, dan peningkatan kinerja Bank.

STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 1, menyebutkan bahwa Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Organ tata kelola perusahaan di Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

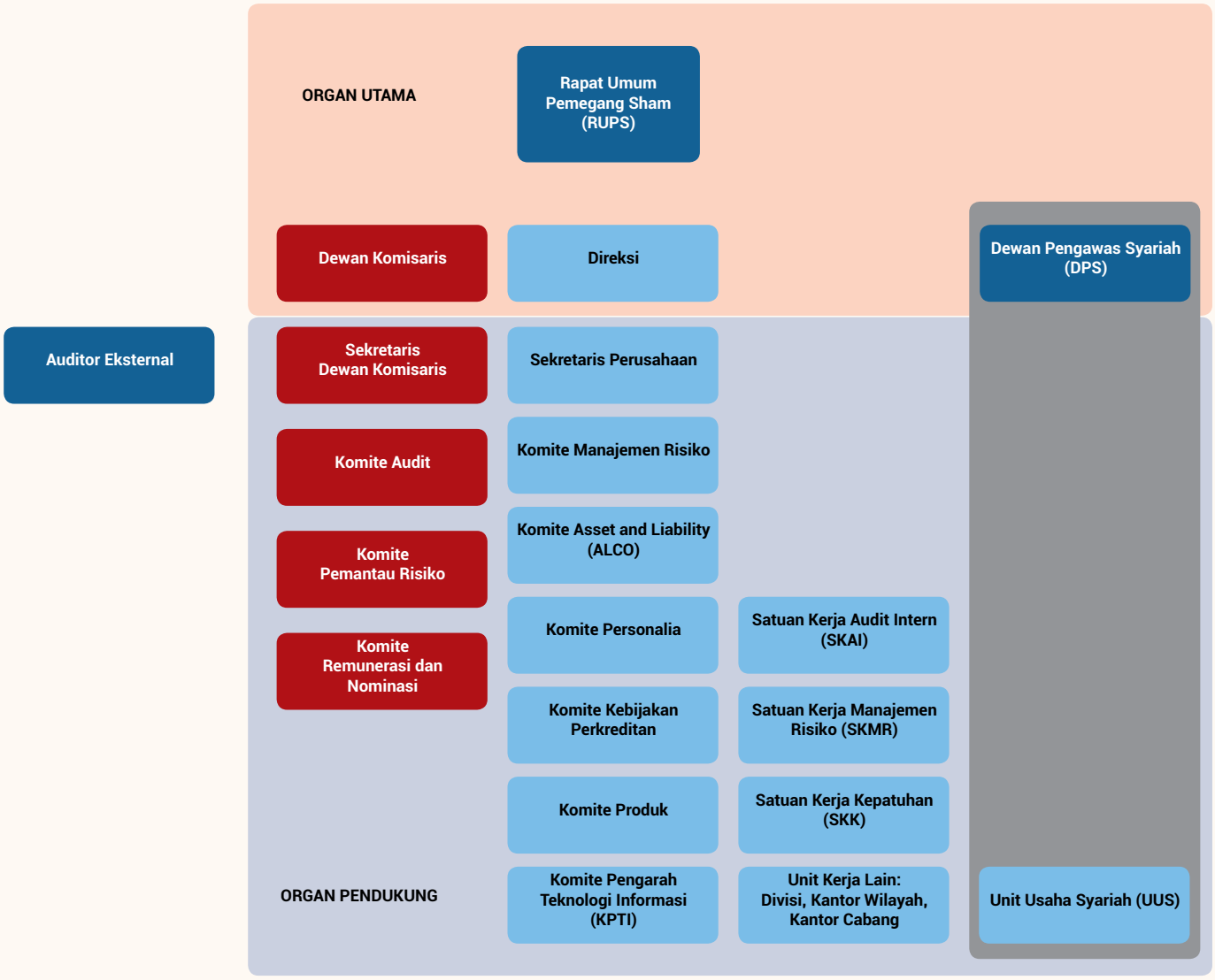

Tata kelola Perseroan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu *structure*, *process*, dan *outcome*. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh Perseroan dalam upaya menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan mendorong terciptanya *outcome* tata kelola yang berkualitas untuk memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERSEROAN

Mekanisme tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawan dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance Mechanism* dapat tercermin dalam berbagai kebijakan pokok GCG (*soft-structure* GCG) yang dimiliki Perseroan dalam implementasi GCG yang akan menjadi *living document* bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi Perseroan.

1. Pedoman GCG Perseroan yang disahkan dalam Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009
2. Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2015 tanggal 18 Juni 2015, dan telah dimutakhirkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2016 dan Direksi No.SKB-01/DIR-BTN/2016 tanggal 18 Juli 2016.
3. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015.
4. Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Edaran No. 45/DIR/CMPD/2015.
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 31/PD/CSD/2010 tanggal 22 Desember 2010.
6. Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistle Blowing System* – WBS) dan Anti *Fraud* yang telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 55/DIR/CSD/2012.

HUBUNGAN STRUKTUR, MEKANISME DAN HASIL TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR TATA KELOLA

- Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi struktur Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite Perseroan memadai dan sesuai kebutuhan Perseroan dan peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan;
- Selain komite-komite yang wajib dibentuk sesuai persyaratan regulasi, Perseroan memiliki Komite Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko Operasional yang menjadi bagian dalam penguatan struktur GCG Perseroan;
- Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi organ-organ Perseroan memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib. Kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Perseroan tersedia dan mendukung kegiatan operasional Perseroan;
- Pedoman Tata Kelola, Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan;
- Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi;
- Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

PROSES TATA KELOLA

- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Perseroan memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite;
- Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui surat pernyataan;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan *arms length*;
- Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola;
- Mentransparansikan informasi keuangan, non keuangan, produk Perseroan, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional;
- Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.

HASIL TATA KELOLA

- Kinerja Perseroan positif yang mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan;
- Kegiatan Perseroan bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan *website* Perseroanyang informatif dan mudah diakses oleh *stakeholders*;
- Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit;
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholder.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham terbesar oleh Negara Republik Indonesia, dengan kepemilikan satu lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya.Yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahaan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Negara Republik Indonesia memiliki 6.353.999.999 Lembar saham biasa, dan 1 lembar seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara khusus sehingga kepemilikan sahamnya sebesar 60,00%. Secara lebih rinci Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk:

1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham.
2) Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
3) Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
4) Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
5) Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
6) Menetapkan auditor eksternal.
7) Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
8) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
9) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.Pengambilan

keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Pemegang Saham memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain untuk:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perbankan;
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2016

Sesuai Pasal 2 POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroaan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir dan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroaan.

Dalam upaya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs *web* Bursa Efek dan situs *web* Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan melakukan pengumuman ringkasan risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs *web* Bursa Efek dan situs *web* Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. Selama tahun 2016, Perseroaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan untuk tahun buku 2015 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan secara wajar dan transparan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan POJK No.32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Berikut tahapan Penyelenggaraan RUPS sesuai POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan:

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Catatan:

- Pemberitahuan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman
- Pengumuman kepada Pemegang Saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan
- Usulan mata acara oleh Pemegang Saham paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS.(apabila ada)
- *Recording date* Pemegang Saham yang berhak hadir pada RUPS 1 hari kerja sebelum pemanggilan
- Pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
- Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS
- Pengumuman ringkasan risalah RUPS paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan
- Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan
- Risalah RUPS paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan
- Recording date Pemegang Saham yang berhak mendapatkan dividen 8 hari Bursa setelah Rapat
- Pembayaran Dividen Tunai paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah

I. RUPS Luar Biasa

A. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada:

Hari / Tanggal: Kamis / 7 Januari 2016
Waktu : Pukul 10.19 WIB s.d 11.03 WIB
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat - 10130

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

B. Tabel Kehadiran RUPS Luar Biasa tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen*		√	*) Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Kamaruddin Sjam	1. Komisaris Independen 2. Ketua Komite Audit	√		
3	Arie Coerniadi	1. Komisaris Independen 2. Ketua Komite Pemantau Risiko	√		
4	Catherinawati Hadiman	1. Komisaris Independen 2. Anggota Komite Audit 3. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	√		
5	Sumiyati	Komisaris	√		

No	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
6	Fajar Harry Sampurno	Komisaris	√		
7	Lucky Fathul Aziz H	Komisaris	√		
8	Maryono	Direktur Utama	√		
9	Irman Alvian Zahiruddin	Direktur	√		
10	Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√		
11	Iman Nugroho Soeko	Direktur	√		
12	Adi Setianto	Direktur	√		
13	Sis Apik Wijayanto	Direktur	√		
14	Sulis Usdoko	Direktur	√		
15	Oni Febriarto Rahardjo	Direktur	√		

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.132.807.985 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,85% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

Hasil pengambilan keputusan dalam setiap mata acara Rapat dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
I	7.102.261.992 suara (87,33%)	1.027.089.493 suara (12,63%)	3.456.500 suara (0,04%)	Nihil
II	Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham menyetujui keputusan mata acara kedua, sehingga keputusan Rapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat.			Nihil

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama	Realisasi
Perubahan Pengurus Perseroan	Sudah direalisasikan
Keputusan: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdri Catherinawati Hadiman sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama me njabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.	
2. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *fit and proper test* untuk: a. Sdr. I Wayan Agus Mertayasa sebagai Komisaris Utama/Independen b. Sdr. Maurin Sitorus sebagai Komisaris Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	
3. Menyetujui mengalihkan jabatan Sdr. Lucky Fathul Aziz H., semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *fit and proper test*, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatannya sebagai Komisaris.	Sdr. Lucky Fathul Aziz H belum menjalani *fit and proper test* sebagai Komisaris Independen oleh OJK
4. Dengan adanya pemberhentian, dan setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *fit and proper test* atas pengangkatan dan pengalihan jabatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Komisaris Utama/Independen : I Wayan Agus Mertayasa Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam Komisaris Independen : Arie Coerniadi Komisaris : Lucky Fathul Aziz H. Komisaris : Fajar Harry Sampurno Komisaris : Sumiyati Komisaris : Maurin Sitorus	
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon-calon Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Mata Acara Kedua	Realisasi
Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Sudah direalisasikan

Keputusan:

Menyetujui menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud, dan akan mulai diberlakukan terhitung pada tahun 2016.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut diatas telah melalui proses tahapan sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Penyampaian Risalah RUPS
Diberitahukan ke OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Diumumkan di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Telah dilakukan pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *web* OJK, BEI dan Perseroan	RUPS Luar Biasa dilaksanakan sesuai jadwal	Ringkasan risalah RUPS Luar Biasa diumumkan di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Risalah RUPS telah disampaikan ke OJK dan BEI
24 November 2015	1 Desember 2015	16 Desember 2015	7 Januari 2016	11 Januari 2016	1 Februari 2016

II. RUPS TAHUNAN 2016

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2016
Waktu : Pukul 14.37 WIB s.d 17.32 WIB
Tempat : Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

B. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	√		
2	Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen		√	Ditugaskan oleh Perseroan untuk mengikuti *Benchmarking & Workshop Enterprise Risk Management* tanggal 10 s.d 17 April 2016 sebagaimana pada surat Dewan Komisaris BTN No. 48/KOM/BTN/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
3	Arie Coerniadi	Komisaris Independen	√		
4	Lucky Fathul Aziz H	Komisaris*	√		
5	Fajar Harry Sampurno	Komisaris		√	Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 8 April 2016.
6	Sumiyati	Komisaris	√		
7	Maurin Sitorus	Komisaris	√		
8	Maryono	Direktur Utama	√		
9	Irman Alvian Zahiruddin	Direktur	√		
10	Mansyur Syamsuri Nasution	Direktur	√		
11	Iman Nugroho Soeko	Direktur	√		
12	Adi Setianto	Direktur	√		
13	Sis Apik Wijayanto	Direktur	√		
14	Sulis Usdoko	Direktur	√		
15	Oni Febriarto Rahardjo	Direktur	√		

keterangan:

*) RUPSLB menyetujui peralihan Sdr.Lucky Fathul Aziz H dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/ Independen	: Bpk. I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	: Bpk. Arie Coerniadi
Komisaris	: Bpk. Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris	: Ibu Sumiyati
Komisaris	: Bpk. Maurin Sitorus

Direksi:

Direktur Utama	: Bpk. Maryono
Direktur	: Bpk. Irman Alvian Zahiruddin
Direktur	: Bpk. Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	: Bpk. Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Bpk. Adi Setianto
Direktur	: Bpk. Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Bpk. Sulis Usdoko
Direktur	: Bpk. Oni Febriarto Rahardjo

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.298.818.210 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,36% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Memberikan Pendapat

Kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dalam setiap mata acara Rapat dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

H. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan 2016

RUPS Tahunan Perseroan tahun 2016 telah menghasilkan keputusan yang telah direalisasikan pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Pertama	Realisasi
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015	Sudah direalisasikan

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 3 (tiga) orang Penanya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Penanya memberikan apresiasi kepada Perseroan karena pencapaian atau peningkatan kinerja yang diraih Perseroan pada tahun 2015 sebagaimana pemaparan Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat. Namun demikian, disayangkan pelaksanaan Rapat tertunda lebih dari 1 jam. Kedepan diharapkan hal ini tidak terjadi lagi.	Perseroan senantiasa memantau perkembangan kehadiran peserta Rapat yang belum bisa dilaksanakan apabila kuorum belum tercapai. Rapat segera dilaksanakan setelah kuorum terpenuhi.
2	Penanya memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai Perseroan. Dari data-data yang yang dipaparkan dalam Rapat, disebutkan bahwa LDR Perseroan sebesar 108,86%, namun bila semua sumber dana dimasukkan menjadi 91,54%. Dalam laporan keuangan, rasio yang dicantumkan apakah sebesar 108,86% atau 91,54%?	Dalam laporan keuangan, LDR per 31 Desember 2015 sebesar 108,86%. Bila seluruh sumber dana dimasukkan, maka rasio total kredit terhadap total dana sebesar 91,54%. Dapat kami jelaskan bahwa secara prinsip likuiditas Perseroan berada dalam level yang aman dan terjaga baik.
3	Disebutkan bahwa terdapat kredit macet untuk penyaluran dana program Kemitraan sebesar Rp. 22,92 miliar sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2015. Kredit macet ini apakah berasal dari perorangan atau lembaga?	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi wadah bagi Perseroan untuk berpartisipasi dan mendorong kegiatan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan tanggung jawab social Perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa kredit macet tersebut berasal dari perorangan.

Mata Acara Pertama	Realisasi

Hasil Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.290.038.910 (99,89%)	0 (0,00%)	8.779.300 (0,11%)

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2015 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-245/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.RPC-126/PSS/2016/DAU tanggal 12 Februari 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
   a) Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
   b) Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015

Mata Acara Kedua	Realisasi
Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015	Sudah direalisasikan

Jumlah Penanya:

Dalam Mata Acara Rapat kedua terdapat 1 (satu) orang penanya.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagaimana pemaparan yang disampaikan pada Rapat bahwa Perseroan mampu mencapai target pembiayaan kredit perumahan meskipun target pemerintah dalam pelaksanaan program perumahan untuk rakyat dengan suku bunga rendah belum tercapai. Penanya menanyakan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Berapa persen suku bunga KPR Subsidi di tahun 2015? 2. Berapa persen bunga KPR non subsidi di tahun 2015? 3. Berapa persen rencana penurunan suku bunga yang akan dilakukan Perseroan pada tahun 2016, baik untuk KPR subsidi maupun non subsidi, terkait rencana program pemerintah untuk menetapkan suku bunga single digit? Mengingat Perseroan berhasil meningkatkan laba yang signifikan, penanya mengusulkan kiranya pemegang saham pengendali dapat meningkatkan laba yang signifikan persentase pembagian dividen pada periode 2015 mengingat pada periode sebelumnya dividen yang dibagikan berkisar antara 20%-30%. Hal ini paling tidak akan meningkatkan harga saham Perseroan.	Perseroan melaksanakan program sejuta rumah untuk masyarakat yang terdiri dari beberapa segmen: 1. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah Perseroan memberikan suku bunga KPR subsidi sebesar 5% dan uang muka maksimal 1%. 2. Sedangkan untuk golongan masyarakat yang mampu, Perseroan memberikan KPR Non subsidi dengan suku bunga yang bervariasi atau berkisar antara 10%-13%. Dapat kami sampaikan pula bahwa periode 2015, Perseroan telah mencapai target, baik penyaluran KPR Subsidi maupun Non Subsidi dalam program Sejuta Rumah. 3. Terkait pertanyaan tentang rencana penurunan suku bunga dapat kami sampaikan bahwa Perseroan tetap akan mempertahankan suku bunga KPR Subsidi sebesar 5%. Sementara untuk KPR Non Subsidi akan diturunkan secara bertahap dengan target sampai dengan bulan November 2016, suku bunga akan dipatok hingga mencapai 9,5%. Sebagaimana yang kami paparkan sebelumnya dalam Rapat bahwa dengan pertimbangan yang intinya demi kelangsungan bisnis Perseroan secara sustainable, untuk menjaga rencana ekspansi bisnis, peningkatan modal dan ekuitas dan peningkatan laba Perseroan maka pembayaran dividen ditetapkan sebesar 20%.

Mata Acara Kedua	Realisasi

Hasil Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.294.990.610 (99,95%)	0 (0,00%)	3.827.600 (0,05%)

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp1.850.907.302.868,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), selanjutnya disebut Laba Bersih Perseroan, untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau senilai Rp370.181.460.573,60 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma enam nol rupiah) sebagai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.
   b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau senilai Rp1.480.725.842.294,40 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma empat nol rupiah) sebagai laba ditahan.

   Alokasi dana Program Bina Lingkungan untuk Tahun 2016 sebesar Rp14.800.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi beban Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga	Realisasi
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.	Sudah direalisasikan

Jumlah Penanya

Tidak terdapat penanya pada Mata Acara Rapat Ketiga.

Hasil Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.913.700.259 (95,58%)	358.338.651 (4,32%)	8.779.300 (0,10%)

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat	Realisasi
Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015. **Jumlah Penanya:** Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 1 (satu) orang penanya.	Sudah direalisasikan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mohon disebutkan peraturan/ perundang-undangan yang menyatakan bahwa honorarium dan tantiem Dewan Komisaris dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau Pihak lain?	RUPS memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham seri A Dwiwarna. Dapat kami sampaikan bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan karena tidak ada Undang-Undang melarang persetujuan tantiem Dewan Komisaris dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Hasil Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.997.137.166 (96,36%)	297.853.444 (3,59%)	3.827.600 (0,05%)

Keputusan Mata Acara Keempat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.

Mata Acara Kelima	Realisasi
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015	Sudah direalisasikan

Jumlah Penanya:

Tidak terdapat Penanya pada Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak dilakukan pemungutan suara pada Mata Acara Kelima

Keputusan Mata Acara Kelima:

Mengingat Mata Acara ini sifatnya adalah laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Keenam	Realisasi
Perubahan Pengurus Perseroan **Jumlah Penanya:** Tidak terdapat penanya pada Mata Acara Rapat Keenam	Seluruh Direksi Perseroan telah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* dan telah Efektif menjabat sebagai Direksi Perseroan. Namun untuk Dewan Komisaris, terdapat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test* dan telah Efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Sdr. Iman Sugema belum menjalani *fit and proper test* menjadi Komisaris oleh OJK

Hasil Perhitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.650.263.866 (80,14%)	1.577.022..538 (19,00%)	71.531.806 (0,86%)

Keputusan Mata Acara Keenam:

I. Dewan Komisaris

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Sdr. Iman Sugema sebagai Komisaris Perseroan. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan Tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara Keenam	Realisasi

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama/Independen	:	Sdr. I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	:	Sdr. Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	:	Sdr. Arie Coerniadi
Komisaris	:	Sdr. Lucky Fathul Aziz H.
Komisaris	:	Sdri. Sumiyati
Komisaris	:	Sdr. Maurin Sitorus
Komisaris	:	Sdr. Iman Sugema

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Direksi

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, selaku Direktur Perseroan terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPS Tahunan 2016 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 23 Maret 2016.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Irman Alvian Zahiruddin selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Direktur Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

   a. Sdri. Handayani sebagai Direktur.

   b. Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur.

   Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan Tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara Keenam	Realisasi

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

   Direktur Utama : Sdr. Maryono
   Direktur : Sdr. Mansyur Syamsuri Nasution
   Direktur : Sdr. Iman Nugroho Soeko
   Direktur : Sdr. Adi Setianto
   Direktur : Sdr. Sulis Usdoko
   Direktur : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
   Direktur : Sdri. Handayani
   Direktur : Sdr. Catur Budi Harto

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon-calon Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut diatas telah melalui proses tahapan sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Ralat Pemanggilan	Ralat Pemanggilan dan Pengumuman	Pelaksanaan	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Penyampaian Risalah RUPS
Diberitahukan ke OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Diumumkan di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Telah dilakukan pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Telah dilakukan ralat Pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Telah dilakukan ralat Pemanggilan dan Pengumuman RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	RUPS Tahunan dilaksanakan sesuai jadwal	Ringkasan risalah RUPS Luar Biasa diumumkan di Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily, *web* OJK, BEI dan Perseroan	Risalah RUPS telah disampaikan ke OJK dan BEI
4 Februari 2016	16 Februari 2016	2 Maret 2016	16 Maret 2016	18 Maret 2016	12 April 2016	13 April 2016	4 Mei 2016

Bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

D. TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada laporan tahunan ini, Perseroan telah merealisasikan hasil putusan pelaksanaan RUPS 2015, dengan *progress* realisasi sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan 2015

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Bank 2014 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota *Ernst &Young Global Limited*.	√	-
	2. Mengesahkan Laporan tahun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota *Ernst &Young Global Limited*.	√	-
Kedua	3. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Bank tahun buku 2014 sebesar Rp 1.115.591.707.713,- (satu triliun seratus lima belas miliar lima ratussembilan puluh satu juta tujuh ratus tuju ribu tujuh ratu tiga belas rupiah) untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut. a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Bankatau Rp 223.118.341.542,60 (dua ratus dua puluh tigamiliar seratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat pulu dua koma enam nol rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku2014. b. Sebesar 80% menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	-
	4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pembayaran dividen tunai tanggal 12 Mei 2016	-
Ketiga	5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepadaDewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya untuk KAP tersebut.	√	-

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Keempat	6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2014 bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2014 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.	√	-
Kelima	7. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komiaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam rangka Pelaksanaan Program Hak Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*).	√	-
Keenam	8. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik. 9. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 10. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan Hak Subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.	√ √ √	- - -

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Ketujuh	11. Menyetujui kenaikan Manfaat Pensiun bagi para Pensiun,Janda/ Duda atau Anak, yang telah berhak atas menfaat pensiun per 31 Desember 2014 tidak termasuk Peserta dengan status pensiun ditunda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1Januari 2015.	√	-
	12. Menyetujui untuk memberikan Manfaat lain 1 (satu) kali pada Tahun 2015 kepada peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat lain dibayarkan dengan jumlah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).	√	-
	13. Menyetujui pelaksanaan peningkatan Manfaat Pensiun dan/ atau pemberian Manfaat Lain dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian dan/atau penambahan Pasal dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√	-
	14. Menyetujui kewenangan untuk memutuskan peningkatan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Pendiri atas dasar dan dengan memperhatikan usulan dari Direksi Pendiri, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut. a) Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain minimal sebesar 109% (seratus sembilan persen). b) Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan beban/ kewajiban akuntansi PSAK No.24 bagi Pendiri.	√	-
	15. Pelaksanaan kenaikan Manfaat Pensiun dan penetapan pemberian Manfaat Lain didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya juncto Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.	√	-
	16. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan peraturan Dana Pensiun Perseroan dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut dan hal-hal lain yang disyaratkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan.	√	-

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Kedelapan	17. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Dewan Komisaris sebagai berikut. a) Sdr. Mardiasmo terhitung sejak diangkatnya sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2015. b) Sdr. Herman Hidayat terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik tanggal 16 Februari 2015.	√	-
	18. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai anggota Dewan Komisaris: a) Sdr. Maulana Ibrahim : Komisaris Independen b) Sdr. Sahala Lumban Gaol : Komisaris Independen Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.	√	-
	19. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris: a. Sdr. Sukardi Rinakit* : Komisaris Utama b. Sdr. Kamaruddin Sjam : Komisaris Independen c. Sdr. Lucky Fathul Aziz H. : Komisaris d. Sdri. Catherinawati Hadiman : Komisaris Independen e. Sdr. Arie Coerniadi : Komisaris Independen Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima pengangkatan mereka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	√ *) Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 24 Maret 2015, Sukardi Rinakit diangkat sebagai Komisaris Utama namun tidak menjalankan keputusan RUPS dimaksud. Pada tanggal 4 Juni 2015, Sdr. Sukardi Rinakit mengundurkan diri.	-

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
	20. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi: a) Hulmansyah: Direktur b) Rico Rizal Budidarmo : Direktur Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi.	√	-
	21. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi: a) Adi Setianto : Direktur b) Sis Apik Wijayanto : Direktur c) Sulis Usdoko : Direktur d) Oni Febriarto R. : Direktur Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturah perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan mereka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut. **Dewan Komisaris** a. Komisaris Utama : Sukardi Rinakit b. Komisaris Independen : Amanah Abdulkadir c. Komisaris : Agung Kuswandono d. Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam e. Komisaris : Lucky Fathul Aziz H. f. Komisaris Independen : Catherinawati Hadiman g. Komisaris Independen : Arie Coerniadi **Direksi** a. Direktur Utama : Maryono b. Direktur : Irman Alvian Zahiruddin c. Direktur : Mansyur Syamsuri Nasution d. Direktur : Iman Nugroho Soeko e. Direktur : Adi Setianto f. Direktur : Sis Apik Wijayanto g. Direktur : Sulis Usdoko h. Direktur : Oni Febriarto R.	√	-

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
	22. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada kementrian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit andProper Test)* terhadap Calon-calon Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	-

II. RUPS Luar Biasa 2015

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Pertama	1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat: a. Sdri. Amanah Abdulkadir sebagai Komisaris Independen b. Sdr. Agung Kuswandono sebagai Komisaris Pemberhentian yang bersangkutan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.	√	-
	2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/ Independen* b. Sdri. Sumiyati sebagai Komisaris c. Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: Komisaris Utama/Independen : Sdr. Chandra M. Hamzah Komisaris Independen : Sdr. Kamaruddin Sjam Komisaris Independen : Sdr. Arie Coerniadi Komisaris Independen : Sdri. Catherinawati Hadiman Komisaris : Sdri. Sumiyati Komisaris : Sdr. Fajar Harry Sampurno Komisaris : Sdr. Lucky Fathul Aziz H	√ *) Sdr. Chandra Hamzah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015 perihal Ketidakbersediaan Menjadi Komisaris Utama/Independen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-

Agenda	Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 2015	Status	
		Selesai	Belum Selesai Dengan Alasan
Kedua	3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	-

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris Bank BTN antara lain diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Menteri BUMN, Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perusahaan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu pada PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) serta POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia/OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Daftar kompetensi dan *fit and proper test* Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan	Kompetensi	Penyelengara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Hasil
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	6 April 2016	Keuangan Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	29 Juni 2015	Audit Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	29 Juni 2015	Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Lucky Fathul Aziz H	Komisaris*	27 Juli 2015	Keuangan Ekonomi Makro Strategi Manajemen	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sumiyati	Komisaris	22 Februari 2016	Audit Keuangan Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Maurin Sitorus	Komisaris	06 Juni 2016	Hukum Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

Nama	Jabatan	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan	Kompetensi	Penyelengara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Hasil
Iman Sugema	Komisaris**	-	Agrobisnis Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	Belum ada keputusan

*) RUPSLB menyetujui peralihan Sdr.Lucky Fathul Aziz H dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
**) Sesuai keputusan RUPST 2016 tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas F&P. (Keterangan lebih lanjut dijelaskan pada Bab RUPS)

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Berdasarkan pasal 14 Anggaran Dasar, pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan adalah apabila Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseoan dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan. Selain alasan diatas, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dengan alasan yang tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat diberhentikan bilamana Bank tidak melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai dengan pasal 71 POJK No.55/POJK.03/2016.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan yaitu dengan adanya pergantian Dewan Komisaris sebagai mana penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ringkasan risalah RUPSLB tanggal 7 Januari 2016, Pemegang Saham telah memberhentikan Sdri. Nyonya Catherinawati Hadiman sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Sdr. I Wayan Agus Mertayasa sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Sdr. Maurin Sitorus sebagai Komisaris Perseroan, serta mengalihkan jabatan Sdr. Lucky Fathul Aziz H., semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *fit and proper test*, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2016, Pemegang Saham telah memberhentikan Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai anggota Dewan Komisaris serta telah mengangkat Iman Sugema sebagai Komisaris Perseroan.

Sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai keputusan RUPS, Perseroan memiliki 7 orang anggota Dewan Komisaris, terdiri dari 4 orang Komisaris Independen dan 3 orang Komisaris. Namun anggota Dewan Komisaris yang telah efektif berjumlah 6 orang, terdiri dari 3 orang Komisaris Independen dan 3 orang Komisaris. Adapun Sdr. Iman Sugema dinyatakan efektif apabila Ybs. sudah memperoleh persetujuan dari OJK atas fit & proper test. Sedangkan Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata beralih dari Komisaris menjadi Komisaris Independen yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar dan Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPSLB) tanggal 7 Januari 2016	6 April 2016
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2015	29 Juni 2015
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan taggal 24 Maret 2015	29 Juni 2015
Lucky Fathul Aziz H	Komisaris*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2015	27 Juli 2015
Sumiyati	Komisaris	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 02 September 2015	22 Februari 2016
Maurin Sitorus	Komisaris	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPSLB) tanggal 7 Januari 2016	6 Juni 2016
Iman Sugema	Komisaris**	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2016	Belum efektif.

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KOMISARIS INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen

Jumlah Komisaris Independen yang telah aktif di Perseroan adalah sebanyak 3 orang dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 orang atau sebesar 50% dari jumlah Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan komposisi minimal 50% sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komisaris Independen Perseroan dijabat oleh Sdr. I Wayan Agus Mertayasa, Sdr. Kamaruddin Sjam, dan Sdr. Arie Coerniadi.

Sdr. Lucky Fathul Aziz Hadibrata berdasarkan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 7 Januari 2016 yang bersangkutan beralih dari Komisaris menjadi Komisaris Independen yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Perseroan, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK, sebagaimana di bawah ini:

Di samping membuat pernyataaan indepensi, Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya. Selain itu, Dewan Komisaris bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Kriteria Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupung tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Komisaris	Hubungan Keuangan Dengan			Hubungan Keluarga Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
I Wayan Agus Mertayasa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kamaruddin Sjam	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Arie Coerniadi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Lucky Fathul Aziz H*	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Sumiyati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Maurin Sitorus	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Iman Sugema**	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perseroan berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap setiap ketentuan yang berlaku dan menjaga independensi setiap Dewan Komisaris yang menjabat salah satunya dengan mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Per 31 Desember 2016, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Komisaris	Kepemilikan Saham dengan			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
I Wayan Agus Mertayasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kamaruddin Sjam	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Arie Coerniadi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Lucky Fathul Aziz H*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sumiyati	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Maurin Sitorus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Iman Sugema**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG, Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Hubungan Kepengurusan (Rangkap Jabatan)	
		Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	Tidak merangkap	Tidak merangkap
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	Tidak merangkap	Tidak merangkap
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	Tidak merangkap	Tidak merangkap

Nama	Jabatan	Hubungan Kepengurusan (Rangkap Jabatan) Pada	
		Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Lucky Fathul Aziz H*	Komisaris*	Tidak merangkap (Mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Dana Pensiun OJK per tanggal 13 Juli 2015.	
Sumiyati	Komisaris	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Kementerian Keuangan
Maurin Sitorus	Komisaris	Dirjen Pembiayaan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Iman Sugema**	Komisaris**	Lektor Utama	Institut Pertanian Bogor

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis Pribadi. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Dalam hal terjadi potensi benturan kepentingan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah di atur dalam Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan adalah sebai berikut:

a. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
b. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
c. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan; dan
d. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS *(BOARD CHARTER)*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No, 01/KOM-BTN/2016 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dokumen tersebut senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Dengan adanya Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

a. Pengertian Umum Dewan Komisaris;
b. Komposisi Dewan Komisaris;
c. Kriteria pengangkatan Dewan Komisaris;
d. Tugas Dewan Komisaris;
e. Kewajiban Dewan Komisaris;
f. Hak Wewenang Dewan Komisaris;
g. Larangan terkait Transaksi Orang Dalam dan Benturan Kepentingan;
h. Tanggung Jawab Dewan Komisaris terkait kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalian anggota Dewan Komisaris;
i. Pembagian Tugas Dewan Komisaris;
j. Perangkapan Jabatan Dewan Komisaris;
k. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
l. Rapat Dewan Komisaris;
m. Kepemimpinan terkait mengarahkan dan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan serta mampu mewujudkan sistem tata kelola yang diterapkan di Perseroan;
n. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris (Kebijakan Umum, Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris);
o. Organ Pendukung Dewan Komisaris; dan
p. Program Induksi dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris.

Secara lengkap pengungkapan *Board Manual* dapat dilihat melalui *website* Perseroan dengan alamat www.BTN.co.id (menu Investor Relation – kebijakan tata kelola).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan OJK, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Komisaris Utama meliputi:

a. Memastikan fungsi Dewan Komisaris berjalan baik
b. Memimpin rapat Dewan Komisaris
c. Mengkoordinasikan dan menetapkan agenda rapat Dewan Komisaris secara efektif termasuk kebijakan dan isu-isu strategis
d. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif
e. Memastikan penyampaian informasii yang benar dan sesuai antara Dewan Komisaris dengan Direksi
f. Memberikan saran dan memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris, meliputi:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan serta melakukan tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.
b. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
c. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
d. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *Stakeholders*.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
f. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen perkreditan yang sehat dan penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
g. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Action Plan* Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan Implementasi GCG.

Wewenang Dewan Komisaris antara lain meliputi:

a. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
b. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
c. Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
d. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi;
e. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
f. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan;
g. Melakukan tindakan Pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentutan Anggaran Dasar Bank;
h. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
i. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas dan pengawasan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Fokus Pengawasan
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama)	Ketua pada Komite Remunerasi dan Nominasi
Kamaruddin Sjam	Anggota pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Arie Coerniadi	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Lucky Fathul Aziz H*	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumiyati	Anggota pada Komite Audit
Maurin Sitorus	Anggota pada Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Iman Sugema**	-

RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris memiliki rencana kerja Dewan Komisaris guna mempurmudah pelaksanaanya. Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2016 diantaranya meliputi:

1. Program Pengenalan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
2. Rapat Dewan Komisaris
3. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris
4. Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris
5. Penilaian Kinerja terhadap Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Adapun bentuk realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut:

Program Pengenalan atau Orientasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Dikarenakan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa pemegang saham, Perseroan selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Dewan Komisaris baru dengan harapan para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif dan sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Perseroansecara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalahmasalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program pengenalan kepada Komisaris baru pada tanggal 22 Januari 2016 dengan materi sebagai berikut:

1. *Overview* peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta *Risk Management*
3. Hasil audit Perseroan
4. Penerapan budaya perusahaan
5. *Overview* bisnis Perseroan

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan Program peningkatan kemampuan/keahlian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan bidang keuangan baik di dalam Negeri maupun diluar negeri.

Program peningkatan kemampuan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2016 adalah:

Nama & Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Materi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Independen)	26-30 September 2016	London, UK	*The Asean Global Leadership Programme Europe* 2016
	8-9 Desember 2016	Bali	*Erma Bali International Conference on Enterprise Risk Management*
Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen)	02 - 03 Maret 2016	Jakarta	*Workshop ASEAN CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	10 – 17 April 2016	London & Cambridge	*Benchmarking and Workshop Enterprise Risk Management in UK*
Arie Coerniadi (Komisaris Independen)	22-25 Februari 2016	Barcelona, Spanyol	*Mobile World Congress*, Untuk Solusi M*obile Payment* dan *Mobile Banking* termasuk *Mobile Ekyc.*
Lucky Fathul Aziz H (Komisaris)	02 - 03 Maret 2016	Jakarta	*Workshop ASEAN CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean* 2016
Sumiyati (Komisaris)	26-30 September 2016	London, UK	*London Business School* dan SRW & Co

Nama & Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Materi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Maurin Sitorus (Komisaris)	8-9 Desember 2016	Bali	*Erma Bali International Conference on Enterprise Risk Management*
Iman Sugema (Komisaris)	8 Agustus 2016	Jakarta	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko *Level* 1 Komisaris
	19 & 23 September 2016	Jakarta	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko *Level* 2 Komisaris
	8 – 9 Desember 2016	Bali	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Disamping program peningkatan kompetensi di atas, Dewan Komisaris juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lulus Sertifikasi	Lembaga/Penyelenggara
Iman Sugema	Komisaris	Lulus	Uji Sertifikasi Kompetensi Managemen Risiko *Level* 1 Komisaris
		Lulus	Uji Sertifikasi Kompetensi Managemen Risiko *Level* 1 Komisaris

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Dewan Komisaris mempunyai Rapat Terjadwal yang wajib diselenggarakan 1 kali dalam 2 bulan dengan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan, akan tetapi apabila perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari (1) Rapat Internal Dewan Komisaris yaitu rapat yang hanya dihadiri oleh Dewan Komisaris dijadwalkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Selasa, (2) Rapat Gabungan yaitu rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh mayoritas Direksi dilaksanakan 1 bulan sekali dengan agenda utama adalah *Performance Review*, dan (3) Rapat Konsultasi yaitu rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat/Divisi. Dalam pengambilan keputusan, Rapat Terjadwal Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 40 kali, Rapat Gabungan sebanyak 15 kali dan Rapat Konsultasi sebanyak 16 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Intenal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris			Rapat Konsultasi Dewan Komisaris		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	6 April-31 Des 2016	29	28	96,55	9	9	100	12	11	91,67
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	1 Jan-31 Des 2016	40	33	82,50	15	14	93,33	16	14	87,50
Lucky Fathul Aziz H.	Komisaris*	1 Jan-31 Des 2016	40	39	97,50	15	14	93,33	16	15	93,75
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	1 Jan-31 Des 2016	40	36	90,00	15	12	80,00	16	16	100
Sumiyati	Komisaris	22 Feb-31 Des 2016	34	20	58,82	12	5	41,67	14	4	28,67
Maurin Sitorus	Komisaris	6 Jun-31 Des 2016	23	14	60,87	7	3	42,86	10	7	70,00
Fajar Harry S.	Komisaris	1 Jan-12 Apr 2016	12	5	41,67	6	0	0	4	1	25,00
Iman Sugema	Komisaris**	Belum efektif									

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris

Berikut penjabaran Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016.

Berikut penjabaran Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016.

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13 Januari 2016	1. Perkenalan Komisaris Utama dan Anggota Independen 2. Komite dan Pembahasan Program Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H dan Arie Coerniadi
20 Januari 2016	1. Koordinasi Internal Dewan Komisaris 2. Pemaparan Komite Audit mengenai Hasil Audit KAP PSS EY 3. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan Komite Pasca RUPSLB 2016	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H dan Arie Coerniadi
27 Januari 2016	Koordinasi Internal Dewan Komisaris	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H dan Arie Coerniadi
3 Februari 2016	1. Presentasi oleh Komite Audit 2. *Progress Report* Pengadaan KAP untuk Tahun Buku 2016 3. Pembahasan Surat Masuk	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H, Arie Coerniadi dan Fajar Harry S
10 Februari 2016	1. Presentasi oleh Komite Pemantau Risiko Mengenai Risiko Operasional Bank BTN 2. Isue-isue terkini	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H dan Arie Coerniadi
17 Februari 2016	1. Presentasi oleh Komite Remunerasi & Nominasi perihal Manajemen Sumber Daya Manusia, KPI Direksi 2015 dan Kajian Usulan KPI Dewan Komisaris dan Direksi 2016 2. Isue-isue terkini	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H, Arie Coerniadi dan Fajar Harry S
24 Februari 2016	1. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II/2016 2. Surat Masuk Direksi mengenai Laporan Perkembangan Pengadaan KAP 3. Permohonan Tambahan Agenda Rapat Dewan Komisaris.	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H dan Fajar Harry S
02 Maret 2016	1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Sebelumnya 2. Pembahasan Surat Masuk	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan, Arie Coerniadi
08 Maret 2016	1. Presentasi Komite Audit2. 2. Presentasi Komite Pemantau Risiko 3. Isu Terkini dan Surat Masuk	Lucky Fathul Aziz H, , Arie Coerniadi dan Fajar Sumiyanti
16 Maret 2016	1. Presentasi Komite Remunerasi & Nominasi : Good Corporate *Governance* 2. Isu Terkini dan Surat Masuk	Lucky Fathul Aziz H, , Arie Coerniadi, Fajar Sumiyanti dan Fajar Harry S
23 Maret 2016	1. Bahasan Substansi Internal Dewan Komisaris 2. Isu Terkini dan Surat Masuk	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti, Fajar Harry S dan Maurin Sitorus

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6 April 2016	1. Presentasi Komite Audit 2. Pembahasan Konsultasi Kredit 3. Isu Terkini dan Surat Masuk	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
20 April 2016	1. Presentasi Komite Audit 2. Presentasi Komite Remunerasi & Nominasi 3. Proses Bisnis DPK dan Kredit 4. Surat masuk dan Isu Penting Terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
27 April 2016	1. Presentasi Komite Audit 2. Presentasi Komite Remunerasi & Nominasi 3. Proses Bisnis DPK dan Kredit 4. Surat masuk dan Isu Penting Terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
4 Mei 2016	1. Penerapan Restrukturisasi Kredit, Termasuk Cessie, Novasi 2. Pencatatan Kolektibilitas Kredit Konsumer & Komersial 3. Strategi Penurunan BOPO ditinjau dari strategi CASA dan Biaya operasional selain bunga 4. Isu Strategis Terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
11 Mei 2016	1. Rencana Komite Pemantau Risiko Melakukan Monitoring *Four Eyes Principle* di Kantor Cabang 2. Pending Matters dan Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dekom s.d April 2016 3. Isu Strategis	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
25 Mei 2016	1. Isu-isu terkini 2. Isu strategis dan pengembangan Perseroan kedepan 3. Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I/2016 kepada Pemegang Saham 4. Surat-surat masuk terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
8 Juni 2016	1. Isu-isu terkini 2. Isu strategis dan pengembangan Perseroan kedepan 3. Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I/2016 kepada Pemegang Saham 4. Surat-surat masuk terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
15 Juni 2016	1. Isu-isu terkini, pengesahan Notula rapat sebelumnya dan surat-surat masuk Dewan Komisaris 2. Pemaparan perencanaan dan realisasi program sejuta rumah s.d. Juni 2016 oleh Bapak Maurin Sitorus 3. Presentasi oleh Komite Pemantau Risiko Perihal *Four Eyes Principle* pada Kantor Cabang yang telah dikunjungi. 4. Presentasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi perihal: - Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris - Budaya Perusahaan	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
20 Juni 2016	1. Isu-isu terkini, pengesahan notulen rapat sebelumnya dan surat-surat masuk ke Dewan Komisaris. 2. Presentasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi perihal KPI Dewan Komisaris.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
27 Juni 2016	Surat-surat masuk Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
25 Juli 2016	Surat-surat masuk ke Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi
1 Agustus 2016	Surat-surat masuk ke Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi
15 Agustus 2016	1. Presentasi Komite atas Resume Hasil Pemeriksaan OJK posisi 31 Desember 2015 2. Pembahasan Draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris RBB 2016-2018 Semester I 2016. 3. Surat-surat masuk ke Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi
22 Agustus 2016	Finalisasi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2016, Surat Masuk ke Dewan Komisaris dan isu-isu Terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi
9 September 2016	Surat-surat masuk ke Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
15 September 2016	Isu terkini dan surat masuk Dewan Komisaris.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi dan Sumiyanti
22 September 2016	Isu terkini dan surat masuk Dewan Komisaris.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
29 September 2016	Isu terkini dan surat masuk Dewan Komisaris.	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus
11 Oktober 2016	Surat-surat masuk ke Dewan Komisaris dan Isu-isu terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti Maurin Sitorus
18 Oktober 2016	Isu terkini dan Surat Masuk Dewan Komisaris	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
25 Oktober 2016	Isu terkini dan Surat Masuk Dewan Komisaris	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti Maurin Sitorus
1 November 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris,Isu-isu Terkini dan Presentasi SIPD (Chief Economic) Tentang Perspektif Kondisi oleh Ekonomi Saat ini	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
8 November 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris dan Isu Terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
15 November 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris, Isu-isu Terkini dan laporan Komite	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Maurin Sitorus
22 November 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris, Isu-isu Terkini dan Draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tw III	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
29 November 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris, Isu-isu Terkini dan Draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tw III	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi
6 Desember 2016	Isu Terkini , Surat Masuk Dewan Komisaris dan Pelaporan *Progress* Report masing-masing Komite	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
8 Desember 2016	Isu Terkini dan Surat Masuk Dewan Komisaris	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti
27 Desember 2016	Surat Masuk ke Dewan Komisaris, Isu-isu Terkini serta Pembahasan Persetujuan *Review* PKMR 2016	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus

Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi

Berikut penjabaran Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sepanjang tahun 2016.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
20 Januari 2016	*Performance Review* Desember 2015 dan Laporan perkembangan pemeriksaan KAP PSS EY	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Irman A. Zahiruddin, Sulis Usdoko dan Adi Setianto
21 Januari 2016	Exit Meeting PSS-EY Atas Audit Tahun Buku 31 Desember 2015	Kamaruddin Sjam dan Lucky Fathul Aziz	Iman Nugroho S, Irman A. Zahiruddin, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto dan Adi Setianto
3 Februari 2016	1. Pembahasan Surat Masuk Direksi mengenai Draft Publikasi Laporan Keuangan 2. Konfirmasi kepada KAP PSS-EY terkait laporan keuangan publikasi	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi	Iman Nugroho S dan Irman A. Zahiruddin,
24 Februari 2016	1. *Performance Review* Januari 2016 2. Pembahasan *Non Performing* Loan 3. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Audit oleh BPKP mengenai Kredit FLPP terkait aspek legal dan kelengkapan administrasi. 4. Isu Terkini	Kamaruddin Sjam dan Lucky Fathul Aziz	Iman Nugroho S, Irman A. Zahiruddin, Sis Apik W, Sulis Usdoko dan Oni Febriarto
2 Maret 2016	1. Tindak Lanjut Rencana Bank Mendirikan Anak Perusahaan Asuransi Jiwa 2. Tindak Lanjut Rencana Bank Mendirikan Anak Perusahaan Asuransi Jiwa 3. Isu Terkini	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi	Maryono, dan Iman Nugroho S
23 Maret 2016	*Performance Review* Februari 2016 dan Isu Penting Terkini	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Irman A. Zahiruddin, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto dan Adi Setianto
20 April 2016	1. *Performance Review* Maret 2016 2. Presentasi oleh Legal Division tentang risiko hukum yang dihadapi Perseroan dan potensi kerugiannya. 3. Isu Penting Terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi,	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
18 Mei 2016	1. *Performance Review* April 2016 2. 50 Debitur Inti Perseroan 3. Complain Handling 4. Proyeksi Likuiditas Perseroan dalam Penyaluran Kredit FLPP 5. Konsultasi Kredit 6. Surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi yang belum ditindaklanjuti	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
27 Juni 2016	1. *Performance Review* bulan Mei 2016. 2. Pembahasan Revisi RBB tahun 2016-2018 dan Revisi RKAP tahun 2016	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
25 Juli 2016	1. Persiapan Perseroan selaku Bank Persepsi dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. 2. *Performance review* bulan Juni 2016. 3. Isu penting terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Sumiyanti	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
29 Agustus 2016	1. *Performance review* bulan Juli 2016. 2. Isu penting terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi dan Sumiyanti	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
11 Oktober 2016	1. *Performance review* bulan Agustus 2016 2. Pembahasan isu penyelesaian Aset Yang Diambil Alih (AYDA) 3. Isu penting terkini.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz H, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus.	Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
18 Oktober 2016	1. *Performance review* bulan September 2016 2. *Action plan* dan target penyelesaian reimbeursement FLPP 3. Isu penting terkini	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Peserta Rapat Direksi
15 November 2016	1. Rancangan RKAP 2017 2. Permohonan Konsultasi Kredit 3. Persetujuan Penghapusbukuan aktiva tetap lahan Kalimalang	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Maurin Sitorus	Maryono, Mansyur S. Nasution, Iman Nugroho S, Oni Febriarto, Adi Setianto, Handayani, dan Catur Budiharto
29 November 2016	1. *Performance Review* Bulan Oktober 2016. 2. Persetujuan RKAP Tahun 2017. 3. RBB Tahun 2017 – 2019	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi	Mansyur S. Nasution, Sulis Usdoko, Oni Febriarto dan Adi Setianto,

Rapat Konsultasi Dewan Komisaris

Berikut penjabaran Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Konsultasi Dewan Komisaris bersama Direksi sepanjang tahun 2016.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Konsultasi Dewan Komisaris bersama Direksi

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
27 Januari 2016	1. Manajemen Risiko 2. Kuesioner Evaluasi Materi *Stress Testing* Perseroan 3. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan KAP Terhadap 65 Debitur	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
10 Februari 2016	1. RBBR Per 31 Desember 2015 2. Kredit Kolektibilitas 2 3. Workflow Proses Kredit dan Dana Pihak Ketiga 4. Perjanjian Kerjasama Direksi dengan Pihak Ketiga Yang Bersifat Strategis 5. *Progress* Report Kerjasama dengan ICBC	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
16 Maret 2016	1. Strategi Penguatan Modal dan Likuiditas 2. Perkembangan Kredit Kolektibiliiitas 2 dan kolektibilitas 5 3. Isu Penting Terkini	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Fajar Harry S
30 Maret 2016	1. Agenda Tambahan : Persiapan RUPST 2016 2. Presentasi Unit Usaha Syariah 3. Isu Penting Terkini.	Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
13 April 2016	1. *Strategi Commercial Lending* dalam rangka pencapaian RBB 2016 serta menyikapi kondisi terkini. 2. Debitur Realisasi Baru Menunggak dan *Non Performing* Loan	I Wayan Agus Mertayasa, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
25 Mei 2016	1. Pembahasan usulan Direksi mengenai perubahan struktur organisasi 2. Pembahasan *complain handling* (sesuai surat OJK No. S-31/PB.312/2016)	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam dan Arie Coerniadi
8 Juni 2016	1. Penjelasan Mengenai Arsitektur Information & Technology Bank BTN serta Pengembangannya 2. Penjelasan Perkembangan Digital Banking Perseroan	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus
20 Juni 2016	1. Presentasi perkembangan kredit kolektibilitas 2 dan NPL Perseroan sampai dengan Mei 2016 dengan pemaparan sesuai dengan undangan terdahulu 2. Pembahasan reimbeurse KPR FLPP 2014/2015 dan rekonsiliasi perencanaan Kementerian PUPERA dan Perseroan dengan realisasinya tahun 2016 serta analisis kebutuhan likuiditas dan distribusi target KR/KC BTN dalam rangka penggunaan sisa FLPP dan SSB 2. 3. Presentasi komite personalia.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
1 Agustus 2016	Strategi untuk Penyelesaian Kolektibilitas 5	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus
15 Agustus 2016	Tindak Lanjut Audit Khusus dan Monitoring Tindak Lanjut Audit External.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi dan Maurin Sitorus
22 Agustus 2016	Pembahasan konsultasi kredit Perum Perumnas.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
29 Agustus 2016	Konsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perseroan (DPP-SP): 1. Kepengurusan DPP-SP yang vakum 2. Perjanjian Kerja Bersama yang sudah kadaluarsa 2 tahun yang lalu dan SE No. 43/DIR/HCD/2011 index 152/P/HC-ENG/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai 3. Hasil pembahasan dengan SP sebagai tindakan keputusan audit khusus (Bipartite) sesuai dengan SE Direksi No. 43/DIR/CMO/2011 index 151/P/HC-ENG/2011.	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz dan Arie Coerniadi
8 November 2016	1. Laporan Kepatuhan Triwulan III 2016 2. Konsultasi Permohonan Penerbitan Bank Garansi Kepada Pihak Terkait	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6 Desember 2016	Konsultasi Kredit	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
21 Desember 2016	1. Konsultasi Kredit 2. Konsultasi *Line Facility* 3. Konsultasi Penambahan *Plafond* Kredit	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus
27 Desember 2016	Pembahasan Persetujuan *Review* PKMR 2016	I Wayan Agus Mertayasa, Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul Aziz, Arie Coerniadi, Sumiyanti dan Maurin Sitorus

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris baik rapat internal dan rapat konsultasi Dewan Komisaris Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Keputusan-Keputusan Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2016 Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan pengawasan dan penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No	Keputusan Dewan Komisaris
1	Program KPR Subisidi FLPP, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan saran-saran sebagai berikut: • Menyarankan Direksi agar menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian PUPR untuk dilakukan pemeriksaan KPR FLPP oleh BPKP dan hasil pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2016. • Agar Direksi mengidentifikasi dampak dan mempersiapkan langkah-langkah strategis ditahun 2017 apabila FLPP tidak dapat dicairkan sampai dengan berakhirnya tahun 2016.

No	Keputusan Dewan Komisaris
2.	Terhadap Kinerja Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan tanggapan dan saran kepada Direksi sebagai berikut: • Tetap fokus dibidang perumahan dan memperhatikan program sinergi antar BUMN dan *Housing Related*. • Direksi mencermati posisi DRBM dan dilakukan analisis secara mendalam untuk mengetahui *root cause* nya dan posisi NPL yang cenderung meningkat, dengan memperbaiki proses kredit *end to end*. • Strategi baru untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga berbasis digital, khususnya CASA. • *Fee based income* yang masih dibawah target dan hanya didukung oleh pencapaian yang baik dari Divisi *Treasury*, sehingga Divisi atau Unit lain perlu menentukan strategi yang komprehensif. • Perhitungan CKPN perlu di *review*, mengingat *coverage ratio* NPL masih jauh dibawah angka industri perbankan pada umumnya. • Setiap Kantor Cabang agar mengantisipasi peluang potensi bisnis Bank Garansi. • Menyusun strategi perbaikan dalam menangani perlambatan *trend* penjualan perumahan Non KPR. • Sinkoronisasi Direksi untuk penyediaan likuiditas sehingga tidak mempengaruhi dalam pembiayaan kegiatan operasional. • Mengevaluasi ulang dan restrukturisasi terhadap SDM AMD sampai dengan 3 *level*. • Tidak menunda-nunda pemberian sanksi yang berefek jera kepada pegawai yang melakukan *fraud* maupun *conflict of interest*. • Meningkatkan kompetensi pegawai dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan SOP yang berlaku untuk menghindarkan kerugian Bank. • Menyempurnakan implementasi *job grading* yang berkeadilan dan transparan, penggunaan personal grade yang berjalan paralel dengan *job grade* agar ditinjau kembali sehingga tidak kontra produktif.
3.	Terkait permasalahan SDM, Dewan Komisaris memberikan nasihat antara lain: • Agar Direksi menerapkan budaya perusahaan yang taat azas *Good Corporate Governance* (aturan, norma dan ketentuan yang berlaku) kepada seluruh jajaran pegawai. • Manajemen agar meningkatkan *volume* pendidikan dan *training* kepada seluruh jajaran pegawai. • Kajian kemungkinan diterapkannya *forced* ranking penilaian kinerja pegawai,serta kurva distribusi normal; • Kajian kemungkinan penerapan *job opening*,untuk posisi-posisi tertentu, sehingga pegawai yang memiliki kinerja yang bagus dan talenta tertentu dapat ikut dipertimbangkan mengikuti seleksi, walaupun *job grade*nya belum mencukupi; • Kajian untuk kemungkinan penghilangan *Person Grade*. • Strategic map dan usulan KPI *Corporate* dan per Direktorat serta targetnya untuk tahun 2016 kepada Dewan Komisaris; • Risalah rapat Direksi dan Komite Human Capital beserta dokumen pendukungnya dan Komite Remunerasi dan Nominasi diminta mempelajari dan me*review* proses nominasi pegawai eksekutif melalui *review* risalah rapat Direksi dan Komite *Human Capital* mengenai promosi dan mutasi pejabat eksekutif dan dokumen proses nominasi dimaksud.
4.	Terkait upaya penurunan NPL, Dewan Komisaris menasihati Direksi untuk melakukan beberapa hal yaitu: • Agar Direksi me*review* kembali proses kredit *end to end* secara *four eyes principle*, yaitu *Front end* (proses inisiasi kredit dan analisa kredit), *middle end* (proses administrasi kredit, pengikatan jaminan, monitoring pencairan dan ketaatan pelaksanaan kredit), *back end* (*collection*, restrukturisasi dan pelunasan kredit). • Meningkatkan ketaatan Manajemen bank terhadap peraturan mengenai kolektibilitas Bank. • Menjadikan penyelesaian 65 debitur temuan EY akan sebagai *pilot project* untuk melihat kinerja unit *collection* Bank • Meminta Direksi agar menguatkan *Asset Management Division*. • Membahas perkembangan penyelesaian *fraud* dan Audit Khusus serta kinerja NPL dengan Direksi setiap 2 minggu sekali

No	Keputusan Dewan Komisaris
5.	Terkait perbaikan proses bisnis secara keseluruhan • Menyarankan kepada Direksi untuk membuat pilot project yang tertib dan taat azas yang mencakup seluruh proses bisnis perbankan di lokasi (*no mistake, no fraud, customer oriented*). • Menyarankan kepada Direksi untuk memperbaiki dan menyelesaikan dokumen kredit Luar Ambang Toleransi.
6.	Me*review* dan memberikan nasihat untuk meningkatkan Manajemen Risiko Operasional Bank antara lain dengan: • Melakukan *review* terhadap *Operational Risk Management Tools*. • Me*review* proses *Loss Event Database* dan kedisiplinan Kantor Cabang dalam pengisiannya. • Me*review Business Contuinity Plan* (BCP) dan bagaimana *Risk Management Division* menetapkan angka *recovery* pada saat terjadi bencana

Rencana Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

Berdasarkan Notulen Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016 telah disepakati bahwa Dewan Komisaris akan melaksanakan rapat 1 kali dalam 1 minggu dan kesepakatan ini akan berlaku seterusnya dengan agenda sebagai berikut:

1. Minggu Pertama dilakukan pembahasan terkait Komite Audit
2. Minggu Ke-Dua pembahasan terkait Komite Pemantau Risiko
3. Minggu Ke-Tiga dilakukan pembahasan terkait Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Minggu Ke-Empat dilakukan rapat gabungan dengan Direksi

Tabel Rencana Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Tanggal	Agenda
1	03 Januari 2017	Pembahasan Komite Audit
2	10 Januari 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
3	17 Januari 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
4	24 Januari 2017	rapat gabungan dengan Direksi
5	31 Januari 2017	Pembahasan Komite Audit
6	07 Februari 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
7	14 Februari 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
8	21 Februari 2017	Rapat gabungan dengan Direksi
9	28 Februari 2017	Pembahasan Komite Audit
10	07 Maret 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
11	14 Maret 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
12	21 Maret 2017	Rapat gabungan dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
13	29 Maret 2017	Pembahasan Komite Audit
14	04 April 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
15	11 April 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
16	18 April 2017	rapat gabungan dengan Direksi
17	25 April 2017	Pembahasan Komite Audit
18	02 Mei 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
19	09 Mei 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
20	16 Mei 2017	rapat gabungan dengan Direksi
21	23 Mei 2017	Pembahasan Komite Audit
22	30 Mei 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
23	06 Juni 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
24	13 Juni 2017	rapat gabungan dengan Direksi
25	20 Juni 2017	Pembahasan Komite Audit
26	27 Juni 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
27	04 Juli 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
28	11 Juli 2017	rapat gabungan dengan Direksi
29	18 Juli 2017	Pembahasan Komite Audit
30	25 Juli 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
31	01 Agustus 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
32	08 Agustus 2017	rapat gabungan dengan Direksi
33	15 Agustus 2017	Pembahasan Komite Audit
34	22 Agustus 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
35	29 Agustus 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
36	05 September 2017	rapat gabungan dengan Direksi
37	12 September 2017	Pembahasan Komite Audit
38	19 September 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
39	26 September 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
40	03 Oktober 2017	rapat gabungan dengan Direksi
41	10 Oktober 2017	Pembahasan Komite Audit
42	17 Oktober 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
43	24 Oktober 2017	pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
44	31 Oktober 2017	Rapat gabungan dengan Direksi
45	07 November 2017	Pembahasan Komite Audit
46	14 November 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
47	21 November 2017	Pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
48	28 November 2017	rapat gabungan dengan Direksi
49	05 Desember 2017	Pembahasan Komite Audit

No	Tanggal	Agenda
50	12 Desember 2017	Pembahasan Komite Pemantau Risiko
51	19 Desember 2017	Pembahasan Komite Remunerasi Dan Nominasi
52	26 Desember 2017	Rapat gabungan dengan Direksi

Namun demikian, rencana rapat tersebut dapat berubah jika dianggap perlu oleh satu atau beberapa Komisaris dan pihak terkait lainnya.

Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2016

Dalam setiap keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi antara lain sebagai berikut:

No	Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris
1	Rekomendasi dan saran atas permohonan kredit yang dikonsultasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris
2	Persetujuan Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
3	Persertujuan Revisi Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi tentang Board Manual, Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi
4	Persetujuan Revisi RBB Tahun 2016-2018 dan Revisi RKAP Tahun 2016
5	Persetujuan Penerbitan Bank Garansi kepada Pihak Terkait
6	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Lahan
7	Persetujuan RKAP Tahun 2017
8	Persetujuan RBB Tahun 2017-2019

Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite.

Adapun dasar penilaian kinerja komite mencakup (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan dan penyampaian laporan kinerja Dewan Komisaris yang selanjutnya akan di evaluasi oleh Pemegang Saham.

Prosedur pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Komisaris dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris, Dewan komisaris atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pelaksanaan penilaian Dewan Komisaris dilakukan dengan beberapa alat ukur diantaranya:

- Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- *Self Assessment* GCG Bank
- ASEAN *CG Scorecard*

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroandan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham pada forum RUPS berdasarkan pertanggung jawaban pelaksanan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2016 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Selain itu Dewan Komisaris memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Penilaian Self Assessment sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 Dewan Komisaris telah merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: aspek pengawasan dan pengarahan, aspek pelaporan serta aspek dinamis (lainnya terkait tugas dan tanggung awab Dewan Komisaris).
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016 dan Third Party Assessment dengan menggunakan standard internasional yaitu ASEAN CG Scorecard. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *self assessment* GCG Bank berdasarkan ketentuan BI/OJK dan ASEAN CG Scorecard diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Perseroan Berkelanjutan pada Laporan Tahunan ini.

DIREKSI

DIREKSI PERSEROAN TERUS MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DENGAN MEMENUHI SETIAP KETENTUAN ATAU STANDAR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI LEVEL NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL KHUSUSNYA DI KAWASAN ASEAN. DIREKSI OPTIMIS BAHWA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAPAT MEMBENTUK FUNDAMENTAL YANG KUAT DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN SEHINGGA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BAKTI PERSEROAN UNTUK NEGERI.

Direksi adalah Organ Utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

Direksi merupakan tokoh sentral sebagai organ eksekutif Perseroan yang memiliki porsi tanggung jawab terbesar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu, Perseroan telah menunjuk satu orang Direktur sebagai penanggung jawab GCG Perseroan yang melekat pada *Managing Director Strategic, Compliance and Risk.*

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Calon anggota Direksi harus melalui tahapan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2010 yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya serta POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Sejak tahun 2013, Uji Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan pengangkatan dan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Hasil *Fit and Proper Test* Direksi Perseroan

Nama	Jabatan	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan	Kompetensi	Penyelengara Uji Kemampuan dan Kepatutan	Hasil
Maryono	Direktur Utama	18 Maret 2013	Perbankan, Leadership, Strategic Management	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Irman A. Zahiruddin*	Direktur	28 Desember 2012	Governance Risk and Compliace (GRC), Marketing, Management Strategic	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Mansyur S. Nasution	Direktur	18 Maret 2013	Strategic Management, Corporate Governance, Risk and Compliance	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Iman Nugroho Soeko	Direktur	16 Juni 2014	Treasury, Accounting and Corporate Finance, Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Adi Setianto	Direktur	8 Juni 2015	Operation, Information and Communication Technology	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sis Apik Wijayanto*	Direktur	1 Juni 2015	Consumer Banking, Marketing and Service Excellent, Network and Services	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sulis Usdoko	Direktur	1 Juni 2015	Collection and Asset Management, Mortgage Banking, Consumer Banking	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Oni Febriarto R	Direktur	19 Mei 2015	Sharia Banking, Commercial Lending, Mortgage Banking	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Handayani*	Direktur	16 September 2016	Marketing, Consumer Banking, Quality Service	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Catur Budi Harto*	Direktur	23 Agustus 2016	Operation, Network and Electronic Channel	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* tanpa catatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.					

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Mengangkat Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS dan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Direksi harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Berdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar, pemberhentian Anggota Direksi dapat dilakukan adalah apabila Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseoan dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan. Selain alasan diatas, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Direksi dengan alasan yang tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi Perseroan berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan.

Selama periode Januari - April 2016, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar dan Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Maryono	Direktur Utama	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 Desember 2012	18 Maret 2013
Irman A. Zahiruddin*	*Managing Director Strategic, Compliance and Risk*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 Desember 2012	28 Desember 2012
Mansyur S. Nasution	*Managing Director Mortgage and Consumer Lending*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 Desember 2012	18 Maret 2013
Iman Nugroho Soeko	*Managing Director Finance and Treasury (CFO)*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 25 Februari 2014	16 Juni 2014
Adi Setianto	*Managing Director Information Technology, Operation and Credit Risk (CIO)*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	8 Juni 2015
Sis Apik Wijayanto*	*Managing Director Funding and Distribution*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	1 Juni 2015
Sulis Usdoko	*Managing Director Collection, Asset Management and Legal*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	1 Juni 2015
Oni Febriarto R	*Managing Director Commercial Lending*	Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	19 Mei 2015

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selama periode April - Desember 2016, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar dan Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Maryono	Direktur Utama	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 Desember 2012	18 Maret 2013
Mansyur S. Nasution	*Managing Director Strategic, Compliance & Risk*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 Desember 2012	18 Maret 2013
Iman Nugroho Soeko	*Managing Director Finance & Treasury (Chief Financial Officer/CFO)*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 25 Februari 2014	16 Juni 2014
Adi Setianto	*Managing Director IT, Operation & Credit Risk (Chief Information Officer/ CIO) (DIR CITO)*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	8 Juni 2015
Sulis Usdoko	*Managing Director Collection, Asset Management & Legal*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	1 Juni 2015
Oni Febriarto R	*Managing Director Commercial Lending*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015	19 Mei 2015
Handayani*	*Managing Director Consumer Banking*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016	16 September 2016
Catur Budi Harto*	*Managing Director Commercial Funding, Digital Banking & Distribution*	Jakarta	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016	23 Agustus 2016

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui Pengangkatan Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk.

PROGRAM PENGENALAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program Pengenalan atau Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Guna membantu dan memudahkan anggota Direktur baru beradaptasi sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai budaya kerja Perusahaan, Perseroan melakukan kegiatan orientasi sesuai ketentuan yang ada pada Perusahaan. Ketentuan tentang program orientasi bagi Direksi baru meliput hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan orientasi atas kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program orientasi adalah Sekretaris Perusahaan.
3. Program Orientasi meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, *Competitive advantage*, risiko pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya yang dinilai perlu.
   c. Penjelasan atas kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Divisi, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tanggal 12 April 2016, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyetujui pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yaitu Ibu Handayani dan Bapak Catur Budi Harto.

Menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, maka Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 16 Mei 2016. Tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut :

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta manajemen risiko
3. Hasil audit Perseroan
4. Penerapan budaya perusahaan
5. *Overview* bisnis Perseroan

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Board Manual menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi dinilai penting agar dapat meningkatkan efektivitas kerja Direksi dengan selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan, mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dikemudian hari bagi keberlanjutan Perseroan. Sepanjang tahun 2016, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi dan seminar sebagai berikut :

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama & Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Materi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Maryono (Direktur Utama)	02 – 03 Maret 2016	Jakarta, Indonesia	*Workshop Asean CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	6 – 8 April 2016	Tokyo, Jepang	*WSBI-ADBI Policy Forum, 22nd Meeting of the WSBI Asia-Pacific Regional Group, The 2016 Asia-Pacific Forum on Financial Inclusion*
	8-13 Mei 2016	Berkeley, USA	*ASEAN Global Leadership Program*
	19 – 21 September 2016	Stockholm, Swedia	*Integrated Risk Management*
Mansyur S. Nasution (Direktur)	02 – 03 Maret 2016	Jakarta, Indonesia	*Workshop Asean CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	19 – 21 September 2016	Stockholm, Swedia	*Integrated Risk Management*
Iman Nugroho Soeko (Direktur)	02 – 03 Maret 2016	Jakarta, Indonesia	*Workshop Asean CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	28 – 29 April 2016	Jakarta, Indonesia	*Risk Governance Master Class Training & Certification*
	25 September – 01 Oktober 2016	Jepang	*Managing Risk in Global Business Environment*
Adi Setianto (Direktur)	15-22 Oktober 2016	Zurich, Basel, Milan	*International Risk Management Refreshment Program for Executives – Europe Class*
Sulis Usdoko (Direktur)	Januari – Mei 2016	Jakarta, Indonesia	Pelatihan Bahasa Inggris
	12 – 13 Mei 2016	Bali, Indonesia	Seminar BUMN Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013
	02 – 03 Maret 2016	Jakarta, Indonesia	*Workshop Asean CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	19-21 September 2016	USA	*2016 Learning & Leadership Development Conference*
Oni Febriarto R (Direktur)	02 – 03 Maret 2016	Jakarta, Indonesia	*Workshop Asean CG Scorecard Implementasi Strategy to Pursue Top 50 Asean 2016*
	6 – 8 April 2016	Tokyo, Jepang	*WSBI-ADBI Policy Forum, 22nd Meeting of the WSBI Asia-Pacific Regional Group, The 2016 Asia-Pacific Forum on Financial Inclusion*
	8-13 Mei 2016	Berkeley, USA	*ASEAN Global Leadership Program*
	01 Juni 2016	Jakarta, Indonesia	Seminar Manajemen Anti Fraud 2016

Nama & Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Materi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Handayani (Direktur)	1 – 2 Juni 2016	Jakarta, Indonesia	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5
	4 Juni 2016	Jakarta, Indonesia	Uji Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5
Catur Budi Harto (Direktur)	16 – 17 Mei 2016	Jakarta, Indonesia	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5
	21 Mei 2016	Jakarta, Indonesia	Uji Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5
	17 – 18 Agustus 2016	Myanmar	Sosialisasi Perekonomian Indonesia

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Direksi yang mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko yag diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) tahun 2016 telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

1. Handayani telah lulus Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5
2. Catur Budi Harto Sertifikasi Kompetensi Manajemen Resiko Level 5

INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki Direksi khususnya terkait pengambilan setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukan agar tetap sesuai dengan tujuan dan semata-mata demi kepentingan Perseroan.

KRITERIA INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi yang menjabat disyaratkan tidak memiliki hubungan afiliasi terkait keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, serta hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan saham sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Selain itu, Direksi yang menjabat tidak diperbolehkan memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, antara lain adalah meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Nama	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Maryono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irman A. Zahiruddin*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mansyur S. Nasution	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iman Nugroho Soeko	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adi Setianto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sis Apik Wijayanto*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sulis Usdoko	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Oni Febriarto R	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Handayani*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Catur Budi Harto*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk dan Mengangkat Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Perseroan berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap setiap ketentuan yang berlaku dan menjaga independensi setiap Direksi yang menjabat, salah satunya dengan mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Per 31 Desember 2016, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang

meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
(kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Komisaris Independen	Kepemilikan Saham			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Maryono	98.500	Nihil	Nihil	Nihil
Irman A. Zahiruddin*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mansyur S. Nasution	375.000	Nihil	Nihil	Nihil
Iman Nugroho Soeko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Adi Setianto	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sis Apik Wijayanto*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sulis Usdoko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Oni Febriarto R	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Handayani*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Catur Budi Harto*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur Perseroan dan Mengangkat Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur Perseroan.

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Rangkap Jabatan

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), diantaranya sebagai berikut :

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus portal politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/ atau
   e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Selain jabatan rangkap sebagai mana dimaksud, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan swasta, kecuali:

a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/ perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan;

b. Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan BUMN (seperti pada PT Bursa Efek Indonesia), Anggota Dewan Komisaris karena kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau Anggota Direksi yang masa jabatannya maksimal tersisa 3 (tiga) bulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperpanjang lagi atau Anggota Direksi yang akan diberhentikan, sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN;

c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud, apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Hubungan Kepengurusan (Rangkap Jabatan)			
	Perusahaan Lain	Lembaga Pemerintah	Partai Politik	Lembaga Legislatif
Maryono	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Irman A. Zahiruddin*	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mansyur S. Nasution	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Iman Nugroho Soeko	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Adi Setianto	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Sis Apik Wijayanto*	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Sulis Usdoko	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Oni Febriarto R	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Handayani*	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Catur Budi Harto*	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur Perseroan dan Mengangkat Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur Perseroan.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan erat kaitannya dengan independensi khususnya dalam pengambilan keputusan Perseroan, sehingga anggota Direksi Perseroan diwajibkan untuk:

1. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/KOM-BTN/2015 dan Direksi No.SKB-01/DIR-BTN/2015 kemudian dimutakhirkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2016 dan Direksi No.SKB-01/DIR-BTN/2016. Adapun isi dari *Board Manual* bagian Direksi antara lain mengatur hal-hal terkait Tugas Direksi, Wewenang Direksi, Kewajiban Direksi, Larangan, Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi, Rapat Direksi, Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, Pengangkatan dan Masa Jabatan Anggota Direksi, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota Direksi, Perangkapan Jabatan Direksi, Etika Jabatan, Kepemimpinan, Evaluasi Kinerja Direksi, Organ Pendukung Direksi, Program Induksi dan Peningkatan Kompetensi Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan aspek-aspek GCG yang dimuat *Board Manual*. *Board Manual* secara khusus mengatur tugas Direksi yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan pelaksanaan RJP, RKAP, dan RBB termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mewujudkan pelaksanaan fungsi pengendalian intern yang meliputi audit internal, audit eksternal, manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.
5. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, seperti RJP, RKAP, dan RBB, Manajemen Informasi Sistem (MIS), suksesi/mutasi/promosi

pejabat eksekutif, program pengembangan *human capital*, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.

7. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS.
8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Intern, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Succession plan* dimana suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya internal yang potensial untuk memenuhi posisi pemimpin kunci.
10. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
11. Mengungkapkan kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang *human capital* kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
12. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
13. Mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.
14. Memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas anggota Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi. Berikut tabel pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi :

Jabatan Direksi	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Direkur Utama	Melakukan supervisi terhadap Internal Audit Division, Corporate Secretary Division dan *Human Capital* Division
Managing Director Strategic, Compliance and Risk	Melakukan supervisi terhadap Strategic Innovation and Performance Division, Compliance Division, Risk Management Division dan Kantor Cabang Syariah.
Managing Director Finance & Treasury (Chief Financial Officer/CFO)	Melakukan supervisi terhadap Finance and Accounting Division, Treasury Division, Institutional Banking Division
Managing Director IT, Operation & Credit Risk (Chief Information Officer/CIO)	Melakukan supervisi terhadap Information and Communication Technology Division, Operation and Business Support Division, Procurement and General Services Division , Credit Risk Division.
Managing Director Collection, Asset Management and Legal	Melakukan supervise terhadap Consumer Collection and Remedial Division, Asset Management Division, Legal Division
Managing Director Commercial Lending	Melakukan supervisi terhadap Commercial Lending Division, Small and Micro Lending Division , Sharia Division.
Managing Director Consumer Banking	Melakukan supervisi terhadap Non Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division, Subsidized Mortgage Division, Retail Funding and Services Division, Wealth Management Division.
Managing Director Commercial Funding, Digital Banking & Distribution	Melakukan supervisi terhadap Commercial Funding and Services Division, Card Business Division/Digital Banking, Service Quality, Network and Electronic Banking Division, Regional Offices.

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tercermin dalam agenda rapat di atas. Pada periode 2016 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 104 (seratus empat) kali yang membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan, diantaranya:

- Strategi Perbaikan Kualitas Kredit
- *Performance Review*
- Kajian legal konversi dana FLPP
- Evaluasi & Pengembangan *Website* BTN *Property*
- Kegiatan Komunikasi Kepada investor
- Program kerja *Housing Finance Center* (HFC)
- Pembahasan *Key Performance Indicator* (KPI)
- Penilaian kinerja (KPI)
- Penggunaan Laba 2015
- Perkembangan *Road Map* BUMN
- Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
- Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
- Transformasi Perseroan
- Persiapan RUPS Tahunan
- Publikasi Laporan Keuangan
- Laporan Dana Pensiun Perseroan
- Evaluasi Aset Yang Diambil Alih (AYDA)
- Pendirian Anak Usaha Asuransi Jiwa
- Rencana Kerja Unit Usaha Syariah
- Pembahasan Hasil Temuan OJK
- Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2016-2018
- Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional
- Tindak Lanjut Temuan Audit OJK
- Pembahasan RKAP 2017 & RBB
- Evaluasi APU-PPT
- Profil Produk Perseroan
- Prognosa dan Laporan Kinerja Keuangan 2016 Restrukturisasi Kredit
- Laporan Kinerja Keuangan 2016

RAPAT DIREKSI

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Rapat Direksi mengacu pada Panduan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Direksi mempunyai Rapat Terjadwal yang wajib diselenggarakan 1 kali dalam setiap bulan dengan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan. Apabila dipandang perlu, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.

Rapat Direksi terdiri dari Rapat Internal Direksi dan Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris. Rapat Internal Direksi yaitu rapat yang hanya dihadiri oleh Direksi. Rapat Gabungan yaitu rapat yang dihadiri oleh mayoritas Direksi bersama Dewan Komisaris. Dalam pengambilan keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Direksi Perseroan melaksanakan rapat internal sebanyak 104 kali dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 15 kali di tahun 2016. Informasi terkait agenda rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dijelaskan padabagian Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat internal dan rapat konsultasi bersama Dewan Komisaris dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Periode	Kehadiran Rapat Internal			Kehadiran Rapat Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Maryono / Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2016	100	97	97%	15	11	73
Irman Alvian Z / Direktur*	1 Januari - 12 April 2016	28	23	82%	6	6	100
Mansyur Nasution / Direktur	1 Januari - 31 Desember 2016	104	90	87%	15	12	80
Iman Nugroho S / Direktur	1 Januari - 31 Desember 2016	104	88	85%	15	13	86
Adi Setianto / Direktur	1 Januari - 31 Desember 2016	104	89	86%	15	12	80
Sis Apik W / Direktur*	1 Januari - 12 April 2016	26	20	77%	6	3	50
Sulis Usdoko / Direktur	1 Januari - 31 Desember 2016	104	88	85%	15	12	80
Oni Febriarto R / Direktur	1 Januari - 31 Desember 2016	104	98	94%	15	11	73
Catur Budi Harto / Direktur**	23 Agustus - 31 Desember 2016	76	62	82%	9	8	89
Handayani / Direktur**	16 September -31 Desember 2016	76	61	80%	9	8	89

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Menyetujui pemberhentian Sdr. Sis Apik Wijayanto, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

**) Berdasarkan hasil keputusan RUPST perseroan tanggal 12 April 2016, Mengangkat Sdri Handayani dan Sdr Catur Budi Harto sebagai Direktur PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Berikut penjabaran tanggal, agenda dan peserta rapat internal Direksi sepanjang tahun 2016

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5 Januari 2016	Strategi Perbaikan Kualitas Kredit	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
12 Januari 2016	Permohonan Kredit Komersial	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
13 Januari 2016	Persiapan Hari Ulang Tahun Perseroan Pinjaman pegawai OJK	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
19 Januari 2016	*Performance Review* Kajian legal konversi dana FLPP	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19 Januari 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
20 Januari 2016	Strategi Perbaikan Kualitas Kredit Evaluasi & Pengembangan *Website* BTN *Property*	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
20 Januari 2016	Rapat Komite Manajemen Risiko	Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R
26 Januari 2016	Penilaian Kinerja 2016 Rencana RUPS Tahunan 2016 Kegiatan Komunikasi Kepada investor	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
2 Februari 2016	Penilaian Kinerja 2016 Kredit Pegawai Eksekusi MESOP	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko
3 Februari 2016	Penilaian Kinerja 2016	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
3 Februari 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
9 Februari 2016	Program kerja *Housing Finance Center* (HFC) Pembahasan *Key Performance Indicator* (KPI)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
16 Februari 2016	Permohonan Kredit Komersial Penilaian kinerja (KPI) Pembentukan Anak Usaha Organisasi Commercial Funding	Maryono, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sis Apik W, Oni Febriarto R
18 Februari 2016	Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN	Maryono, Adi Setianto, Sis Apik W, Oni Febriarto R
18 Februari 2016	*Performance Review* Permohonan Kredit Komersial	Maryono, Irman Alvian Z, Adi Setianto, Sis Apik W, Oni Febriarto R
18 Februari 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sis Apik W, Oni Febriarto R
23 Februari 2016	Pembentukan Anak Usaha Penggunaan Laba 2015 Kebijakan Manajemen Perkreditan	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
29 Februari 2016	Pembahasan Laporan Tahunan	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1 Maret 2016	Pembentukan Anak Usaha Perkembangan Road Map BUMN Permohonan Kredit Komersial Crash Program NPL Struktur Organisasi SNED	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
1 Maret 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
4 Maret 2016	Permohonan Kredit Komersial	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sis Apik W, Oni Febriarto R
7 Maret 2016	Crash Program NPL Usulan Kewenangan Memutus Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
11 Maret 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Irman Alvian Z, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
15 Maret 2016	Permohonan Kredit Komersial	Maryono, Irman Alvian Z, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
16 Maret 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
22 Maret 2016	*Performance Review*	Maryono, Irman Alvian Z, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sis Apik W, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
24 Maret 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
29 Maret 2016	Struktur Organisasi Digital Banking Konsultan Transformasi Perseroan Program Sejuta Rumah Persiapan RUPS Tahunan	Maryono, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
19 April 2016	Supervisi Direksi Publikasi Laporan Keuangan Pembahasan FLPP *Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
19 April 2016	Rapat Komite Manajemen Risiko	Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
22 April 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
26 April 2016	Permohonan Kredit Komersial Penyelesaian Dokumen LAT Direktur Wilayah	Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
3 Mei 2016	*Crash Program* Penyelesaian NPL	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
4 Mei 2016	Supervisi Direksi	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
12 Mei 2016	*Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto
12 Mei 2016	Laporan Dana Pensiun Perseroan	Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R
19 Mei 2016	KPR Sektor Informal Evaluasi Proses Bisnis Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
19 Mei 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
24 Mei 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Strategi Pertumbuhan Kredit Pinjaman Subordinasi	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
26 Mei 2016	Penyesuaian Suku Bunga Relaksasi Kebijakan Kredit Komersial KPR untuk Berpenghasilan Tidak Tetap - Sektor Informal	Maryono, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
1 Juni 2016	Rencana Bisnis Consumer Banking Evaluasi Aset Yang Diambil Alih (AYDA) Profil Risiko Kredit Struktur Organisasi	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
7 Juni 2016	Pendirian Anak Usaha Asuransi Jiwa Rencana Bisnis Consumer Banking	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
7 Juni 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
7 Juni 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani
8 Juni 2016	Aset Yang Diambil Alih (AYDA) Rencana Kerja Unit Usaha Syariah Pembahasan Hasil Temuan OJK	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
14 Juni 2016	Pembentukan Anak Usaha Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2016-2018 Rencana Kerja Commercial Lending	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani
21 Juni 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit *Write Off* (WO)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
22 Juni 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO) *Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
29 Juni 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
13 Juli 2016	*Key Performance Indicator* (KPI) Korporat 2016	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Catur Budi Harto, Handayani
19 Juli 2016	*Tax Amnesty* *Portal* BTN *Property* Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Jaringan Kantor	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
20 Juli 2016	Rapat Komite Manajemen Risiko	Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
25 Juli 2016	*Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
26 Juli 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO) Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
02 Agustus 2016	Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional *Tax Amnesty* Permasalahan Hukum *Digital Loan Document*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R
15 Agustus 2016	Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
18 Agustus 2016	*Performance Review*	Maryono, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani
19 Agustus 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
23 Agustus 2016	Laporan Konsultan Transformasi Perseroan	Maryono, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
23 Agustus 2016	Pembahasan tentang Human Capital Division (HCD)	Maryono, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
30 Agustus 2016	Rencana Kegiatan Peluncuran Hari Menabung Nasional *Progres Digital Banking*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
5 September 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
6 September 2016	Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional Proses Bisnis KPR Pendapatan Tidak Tetap	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
16 September 2016	*Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto
16 September 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto
26 September 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional	Maryono, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
27 September 2016	*Board of Director Workshop*	Maryono, Mansyur Nasution, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
3 Oktober 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
4 Oktober 2016	Kegiatan Komunitas Pasar Modal Struktur Organisasi Komite Kredit Produk dan Kebijakan Kredit Rapat Komite Kredit Persiapan Hari Menabung Nasional dan Konfrensi *World Savings Banks Institute* (WSBI)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
12 Oktober 2016	Rencana Pendirian Anak Usaha Rapat Komite Kredit Restrukturisasi Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
12 Oktober 2016	Usulan *Line Facility*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
12 Oktober 2016	Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
13 Oktober 2016	*Performance Review*	Maryono, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto
13 Oktober 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto
17 Oktober 2016	Remunerasi berbasis POJK No.45/POJK.03/2015	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
17 Oktober 2016	Tindak Lanjut Temuan Audit OJK Pembahasan RKAP 2017 & RBB Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
24 Oktober 2016	*Analyst Meeting & Press Conference* Kredit Konsumer Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
24 Oktober 2016	Rapat Komite Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Handayani
25 Oktober 2016	Persiapan Acara Hari Menabung Nasional dan NPL	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
1 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
3 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Strategi Pencapaian Target 2016	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
14 November 2016	*Performance Review* KPR Mikro	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Catur Budi Harto, Handayani
15 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Holding Perbankan dan Lembaga Keuangan	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
16 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
16 November 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Iman Nugroho S, Adi Setianto, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
21 November 2016	Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional Prognosa Kinerja Keuangan Prognosa Anggaran Promosi Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
22 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit Pembahasan Kinerja Bisnis dan Operasional	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
22 November 2016	Permasalahan Hukum	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
29 November 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
2 Desember 2016	Overview Konsultan Hukum Prognosa Keuangan 2016	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
4 Desember 2016	*Holding Statement* Perseroan kepada Nasabah Media dan Regulator serta Penunjukan Konsultan Hukum	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
6 Desember 2016	Permasalahan Hukum Evaluasi APU-PPT	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
7 Desember 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
7 Desember 2016	Rapat Komite Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
13 Desember 2016	Rencana Investasi Dana Pensiun Tahun 2017	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
13 Desember 2016	Rapat Komite Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani

Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13 Desember 2016	Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit *Review* atas Permintaan OJK	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
14 Desember 2016	*Performance Review*	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Catur Budi Harto, Handayani
14 Desember 2016	*Asset and Liability Committee* (ALCO)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
14 Desember 2016	Rapat Komite Manajemen Risiko	Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
19 Desember 2016	KPR Subsidi 2017 Profil Produk BTN	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Catur Budi Harto, Handayani
21 Desember 2016	Prognosa dan Laporan Kinerja Keuangan 2016 Restrukturisasi Kredit	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani
22 Desember 2016	Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R
29 Desember 2016	Laporan Kinerja Keuangan 2016	Maryono, Mansyur Nasution, Iman Nugroho S, Adi Setianto, Sulis Usdoko, Oni Febriarto R, Catur Budi Harto, Handayani

Hasil rapat Direksi Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi termasuk dissenting *opinion* yang memuat pernyataan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat (jika ada). Risalah rapat ditandangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui.

Adapun tanggal rapat, agenda dan peserta rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas serta Tindak Lanjut Keputusan Rapat Direksi

Guna mencapai efektivitas pelaksanaan tugas serta terlaksananya keputusan rapat sebelumnya, Direksi senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan tidak lanjut keputusan rapat secara rutin pada rapat internal Direksi.

Rencana Rapat Direksi

Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan bahwa Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Apabila dipandang perlu Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris.

Rencana rapat Direksi tahun 2017 telah diprogramkan yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali, yang akan dilaksanakan setiap hari senin dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris yang diadakan rutin setiap 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan bagian Dewan Komisaris. Adapun tabel rencana rapat Direksi terjadwal untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Rapat Direksi Terjadwal Tahun 2017

No	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2017	ALCO dan *Performance Review*
2	13 Februari 2017	ALCO dan *Performance Review*
3	13 Maret 2017	ALCO dan *Performance Review*
4	17 April 2017	ALCO dan *Performance Review*
5	15 Mei 2017	ALCO dan *Performance Review*
6	12 Juni 2017	ALCO dan *Performance Review*
7	17 Juli 2017	ALCO dan *Performance Review*
8	14 Agustus 2017	ALCO dan *Performance Review*
9	18 September 2017	ALCO dan *Performance Review*
10	16 Oktober 2017	ALCO dan *Performance Review*
11	13 November 2017	ALCO dan *Performance Review*
12	11 Desember 2017	ALCO dan *Performance Review*

Pemantauan dan Evaluasi Strategi Bank

Direksi senantiasa mencapai dan menjaga efektivitas strategi Perseroan dengan melakukan pemantauan pelaksanaan strategi Perseroan. Direksi telah melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan strategi Perseroan pada rapat internal Direksi tanggal 17 Oktober 2016 dengan agenda pembahasan RKAP 2017 dan Rencana Bisnis Bank.

Penilaian Kinerja terhadap Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Direksi

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Direksi ditentukan berdasarkan rencana kerja komite yang terkait dengan rencana kerja Perseroan. Pelaksanaan kerja Komite tercermin dalam rapat kerja Komite dan hasil keputusan rapat komite. Uraian mengenai Komite di Bawah Direksi dijelaskan tersendiri pada bagian Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi Perseroan mengacu pada *Board Manual* Perusahaan. Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan penyampaian laporan kinerja Direksi yang selanjutnya akan di evaluasi oleh Pemegang Saham.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi. Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa alat ukur diantaranya:

- *Key Performance Indicator*
- Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN
- *Self -Assessment* GCG Bank
- ASEAN CG *Scorecard*

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

***Key Performance Indicator* (KPI) Direksi**

Penilaian kinerja Direksi menggunakan KPI dengan menggunakan KPI Korporat (Kolegial) dan individual yang dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kriteria KPI Kolegial dan Individual Direksi

KPI	PRESDIR	DIR ConB	DIR ComL	DIR CF, DB & D	DIR CAML	DIR CFO	DIR CITO	DIR SCR
Financial Perspective								
% Pertumbuhan laba	●	●	●	●	●	●	●	●
% Pertumbuhan asset	√							√
% NIM	●	●	●	●	●	●	●	●
% BOPO	●	●	●	●	●	●	●	●
% LDR	√							√

KPI	PRESDIR	DIR ConB	DIR ComL	DIR CF, DB & D	DIR CAML	DIR CFO	DIR CITO	DIR SCR
% NPL	●	●	●	●	●	●	●	●
% Pertumbuhan kredit		√	√				√	
% Pertumbuhan DPK & rasio CASA		√		√				
Penerbitan Wholesale funding (obligasi, pinjaman, sekuritisasi)						√		
Pertumbuhan POL		√	√	√	√	√		
ROA syariah			√					
Customer Perspective								
Δ Market share KPR	●	●	●	●	●	●	●	●
Business Process Perspective								
Peningkatan skor KPKU BUMN	●	●	●	●	●	●	●	●
% project penguatan permodalan						√		
% pembentukan anak usaha	√					√		√
% *project digital banking*		√		√				
% penyempurnaan proses operasional bisnis							√	
Efektivitas collection & asset management			√		√			
Peringkat Komposit RBBR	●	●	●	●	●	●	●	●
Peningkatan kualitas penanganan permasalahan hukum					√			
Learning & Growth Perspective								
Culture Assessment Index	●	●	●	●	●	●	●	●
Supervisi Divisi & Wilayah	√	√	√	√	√	√	√	√
% Project IT yang terimplementasi							√	

Keterangan :
1. ● Adalah KPI Kolegial Level Direktorat
2. √ Adalah KPI Individual

PRESDIR (Direktur Utama)
DIR ConB (Managing Director Consumer Banking)
DIR ComL (Managing Director Commercial Lending)
DIR CF, DB & D (Managing Director Commercial Funding, Digital Banking & Distribution)
DIR CAML (Managing Director Collection, Asset Management & Legal)
DIR CFO (Managing Director Finance & Treasury)
DIR CITO (Managing Director IT Operation & Credit Risk)
DIR SCR (Managing Director Strategic, Compliance & Risk)

Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya direview oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya remunerasi masing-masing Anggota Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi Dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Penilaian Kinerja Direksi juga dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian BUMN secara khusus melalui Surat No.S-153/S-MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* KPKU dijelaskan sebagai berikut :

a. Kementerian BUMN membentuk Forum Ekselen BUMN (FEB) yang bertugas untuk melaksanakan *Assessment*.
b. Kementerian BUMN menyampaikan kepada Perseroan Tim FEB sebagai personil yang melaksanakan *Assessment* di Perseroan.
c. Direksi menunjuk unit kerja Strategic Innovation and Performance Division (SIPD) sebagai Liason Officer dan sekaligus mengkoordinir semua unit kerja untuk melaksanakan *Assessment*.
d. Tim FEB melakukan *Assessment* dan membuat kesimpulan atau hasil *Assessment*.
e. Tim FEB menyampaikan hasil *Assessment* kepada Kementerian BUMN untuk dapat disetujui.
f. Kementerian BUMN menetapkan hasil *Assessment*.

Kriteria penilaian menggunakan KPKU terdiri atas 7 (tujuh) kategori yang terdiri dari Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Operasi dan Hasil. Sementara pihak yang melakukan penilaian menggunakan KPKU adalah Tim FEB dan Kementerian BUMN.

Berdasarkan *Assessment* KPKU Perseroan telah mengukur dan mengendalikan 500 indikator kinerja meliputi kinerja produk dan proses (155 indikator), kinerja fokus pelanggan (37 indikator), kinerja fokus tenaga kerja (122 indikator), kinerja kepemimpinan dan tata kelola (97 indikator) dan kinerja keuangan dan pasar (89 indikator); dengan hasil:

A. 290 indikator (58 %) level Baik (*Good*),
B. 370 indikator (74%) trend Meningkat (*Beneficial*),
C. 88 indikator (17.60%) level unggul dari Pesaing/ pembanding (*Leading*)

Skor KPKU Perseroan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 17.62% dari tahun 2015 (target kenaikan skor 5%). Dari skor 492.25 dengan predikat *Good Performance* pada tahun 2015 menjadi skor 579 dengan predikat *Emerging Industry Leader*.

Pencapaian Skor KPKU Perseroan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Skor dan Band KPKU Perseroan

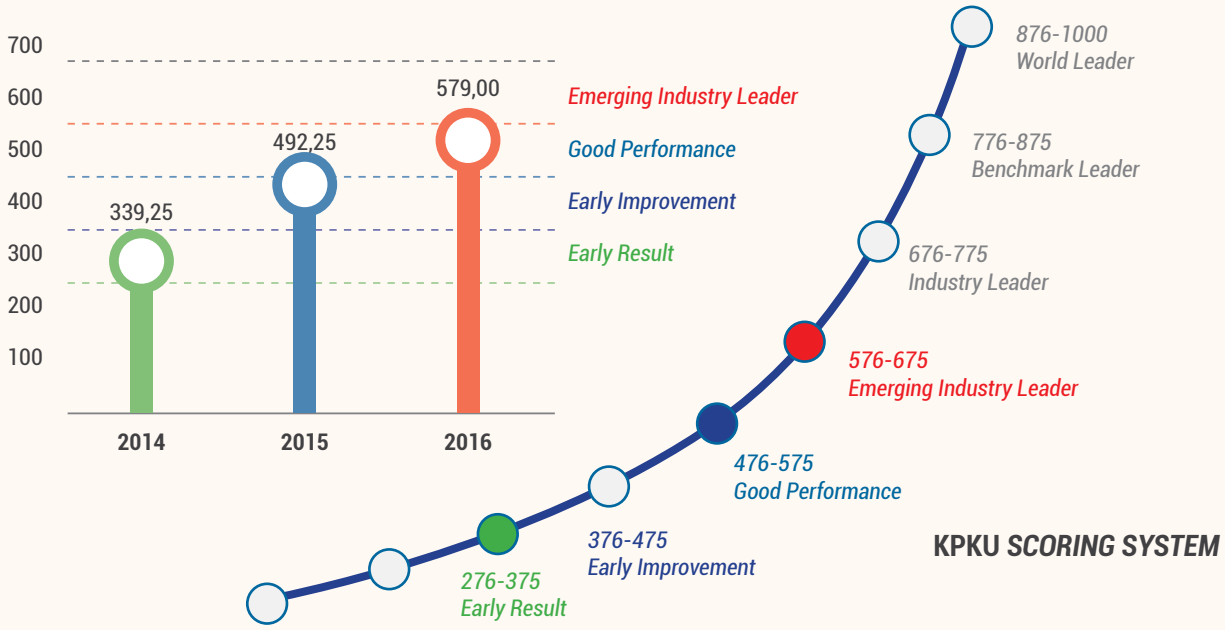

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja Direksi mengacu pada target-target RKAP yang telah ditetapkan di awal periode dan dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*/ KPI) Direksi yang berdasarkan pertanggung jawabannya pada aspek pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja tahun buku 2016 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Selain penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui RUPS, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan BI/OJK, KPKU dan Third Party Assessment dengan menggunakan standard internasional yaitu ASEAN CG *Scorecard*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Bank berdasarkan ketentuan BI/OJK dan ASEAN CG *Scorecard* diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Bank

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Organ pendukung Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Sampai dengan tahun 2016, Perseroan telah memiliki Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mendukung kinerja Dewan Komisaris, tidak hanya menjalankan fungsi administratif namun mempunyai fungsi dan nilai yang strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris secara optimal. Oleh karenanya, Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris. Pengangkatan Sekretaris Dewan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.382/DIR/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang di jabat oleh Sdri Sandra Firmania, SE, MH.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pada aspek pengetahuan yang mencukupi di bidang undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris, administrasi, komunikasi serta *managerial skill* yang dibutuhkan.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris

Sandra Firmania

Warga Indonesia Lahir di Padang Panjang, Usia 46 tahun. Lulusan Pendidikan Gelar Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 31 Agustus 2014.

Riwayat pekerjaan sebelumnya, diantaranya adalah Kepala Subbidang Perencanaan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha

Jasa Lain (Kementerian BUMN) tahun 2006-2010; Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ic (Kementerian BUMN) tahun 2010-2012; Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa tahun 2012-2014; Kepala Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain II tahun 2014-2015 serta menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II B sejak tahun 2015.

Training dan seminar yang pernah diikuti diantaranya adalah *Corporate Valuation Workshop* yang diselenggarakan oleh *Price Waterhouse Coopers* (PWC) di Jakarta tahun 2002; Legal Drafting dan Kontrak yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia PATAMA di Jakarta tahun 2011; Metode dan Teknik Penyusunan SOP dengan Penerapan KPI yang diselenggarakan oleh PT Tempo Inti Media di Batam-Singapura tahun 2011

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan dibantu oleh 1 (satu) tenaga Sekretariat Dewan Komisaris.

PEDOMAN KERJA DAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris telah dilengkapi Pedoman Kerja yang mengacu pada *Board Manual*. Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur tugas dalam membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris melaksanakan Pengawasan.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris di-*review* minimal 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan atau regulasi terkait lain yang berlaku. Pedoman kerja Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2015 sudah dikaji ulang dan tidak berubah mengingat masih *relevan* dengan kondisi Perseroan saat ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diantaranya meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan dilingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk: Penyiapan undangan rapat, Penyiapan bahan-bahan rapat,Pendokumentasian surat-surat dan Penyusunan notulen rapat.
3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui sekretaris perusahaan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Pengumpulan data atau informasi yang *relevan* dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, kegiatan-kegiatan Sekretaris Dewan

Komisaris telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan dilingkungan Dewan Komisaris seperti administrasi surat masuk dan surat keluar serta risalah rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya menyiapkan undangan rapat, materi rapat, pembuatan surat-surat keluar berdasarkan keputusan rapat.
3. Menyusun risalah rapat internal Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan dan konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui sekretaris perusahaan.
5. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
7. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
8. Pengumpulan data atau informasi yang *relevan* dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
9. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris
10. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan efektifitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal.

Dasar Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Komite Audit Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 7 Desember 2016
3. PT Bursa Efek Jakarta (BEI) Keputusan Direksi No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan IA pada Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Pembentukan Komite Audit bagi Perseroan bertujuan untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS tentang Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan kualitas, cakupan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan terkait, terutama aspek independensi, memastikan kewajarannya sesuai dengan cakupan dan tingkat kualitas yang ditawarkan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris walaupun penetapannya dilakukan oleh Direksi. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan dan Komite Audit berkewajiban melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Dalam pengangkatan Komite Audit Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.02/DEKOM-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Komite Audit pasal 7 tentang Persyaratan Keanggotaan Komite Audit ayat 1, yaitu "Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, serta mampu berkomunikasi dengan baik", sebagaimana penjelesan sebagai berikut:

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Audit
 Kamaruddin Sjam (Ketua)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Ketua Komite Audit**: SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.507/DIR/2015 tanggal 9 September 2016. **Periode Jabatan**: 3 Juli 2015 s.d 2 Juli 2018 **Keahlian** : Audit & Keuangan.
 I Wayan Agus Mertayasa (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.161/DIR/2016 tanggal 25 April 2016. **Periode Jabatan:** 25 April 2016 s.d 24 April 2019 **Keahlian**: Keuangan & Perbankan.
 Sumiyati (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.161/DIR/2016 tanggal 25 April 2016. **Periode Jabatan:** 25 April 2016 s.d 24 April 2019 **Keahlian**: Audit, Keuangan Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Audit
 Maurin Sitorus (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 474/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 **Periode Jabatan:** 1 November 2016 s.d 31 Oktober 2019 **Keahlian**: Hukum, Ekonomi
 Waldy Gutama (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Jakarta, Usia 61 tahun, memperoleh gelar Magister Management dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 2000. Riwayat pekerjaan (Pengalaman Kerja) sejak 1989 s.d 2011 sebagai Pemeriksa dan Pengawas Bank di Bank Indonesia Training yang pernah diikuti antara lain Regulation and Supervision of Cooperatives Insurance Companies and Other Non Bank Financial Institution (SEACEN Center) di Kuala Lumpur Malaysia pada 1983. Pada tahun 1999 mengikuti kursus In The Specialized Course in Bank Supervision di Federal Reserve Bank of NYC, USA di New York Amerika Serikat sebagai Pengawas Bank tingkat ahli pada tahun 2006 dari Bank Indonesia dan Basel 2 Implementation in Bank Indonesia dan Bank of Thailand pada 2010. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 736/DIR/2015 tanggal 2 Oktober 2013 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan SK Perpanjangan No.390/DIR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. Waldy Gutama dan Sdri. Sondang Gayatri Sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Periode Jabatan:** - Diangkat pertama kali: 26 September 2013 s.d 25 September 2016 - Perpanjangan: 15 September 2016 s.d 26 September 2017 **Keahlian**: Perbankan dan Audit Bank.

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Audit
 Sondang Gayatri (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Tarutung, Usia 58 tahun, Lulusan Lembaga Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen pada tahun 1983. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 26 September 2013. Sebelumnya beliau aktif di BNI sejak 1982 sampai Maret 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Wilayah. Training yang pernah diikuti meliputi: Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV pada 2012, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 serta Sertifikasi 4st Internasional (CWMA and IBI) pada 2011. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 736/DIR/2015 tanggal 2 Oktober 2013 tentang pengangkatan anggota komite audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan SK Perpanjangan No.390/DIR/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. Waldy Gutama dan Sdri. Sondang Gayatri Sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Periode Jabatan:** - Diangkat pertama kali: 26 September 2013 s.d 25 September 2016 - Perpanjangan: 15 September 2016 s.d .26 September 2017 **Keahlian**: Keuangan & Perbankan
 Rachmat Supratman (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Surabaya, Usia 60 tahun, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1981 dan Pendidikan dari Fakultas Ekonomi Boston University pada tahun 1987. Riwayat pekerjaan (Pengalaman Kerja) sebelumnya diantaranya Ketua Tim Audit intern Bank Indonesia (2008-2012), Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Audit intern Bank Indonesia (2004-2008), Kepala Bagian di satuan-satuan kerja Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (2002-2004). Training yang pernah diikuti antara lain: Asian Conference On Internal Audit 2007 di Beijing, Cina; Interntaional Statistics Conference pada tahun 2008 di Malaysia; Money and Bank pada tahun 2004 di Washington, USA. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Audit**: Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 474/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 **Periode Jabatan:** 8 November 2016 s.d 7 November 2019 **Keahlian**: Audit, Perbankan, Pengawasan

Sampai dengan 31 Desember 2016, susunan rangkap jabatan Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua Komite pada lebih dari dua 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

Pemberhentian Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Piagam Komite Audit dalam pasal 6 yang menyebutkan Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

JUMLAH, KOMPOSISI, PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Sampai dengan tahun 2016, Komite Audit berjumlah 7 orang. Komposisi Komite Audit terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 anggota dari pihak Komisaris Independen, 2 Anggota dari pihak Komisaris, dan 3 Anggota dari Pihak Independen.

Selama tahun 2016, komposisi Komite Audit Perseroan mengalami perubahan yaitu dengan adanya pergantian Komite Audit sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi No. 161/DIR/2016 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 25 April 2016. Telah mengangkat Sdr. I Wayan Agus Mertayasa, Sdri. Sumiyati, Sdr. Deddy Effendi Ridwan dan memberhentikan Sdri. Catherinawati Hadiman sebagai Anggota Komite Audit.
2. Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi No.474/DIR/2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 25 Oktober 2016, telah mengangkat Sdr. Rachmat Supratman dan memberhentikan Sdr. Deddy Effendi Ridwan.

Sehingga Struktur dan keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris No.124/KOM/BTN/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 481/DIR/2016 tanggal 01 November 2016 menjadi sebagai berikut:

Tabel Komposisi Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Masa Jabatan
Kamaruddin Sjam	Ketua/ Komisaris Independen	09/09/2015 - 02/07/2018	3 Tahun
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota/Komisaris Independen	25/04/2016 – 24/04/2019	3 Tahun
Sumiyati	Anggota/Komisaris	25/04/2016 – 24/04/2019	3 Tahun
Maurin Sitorus	Anggota/Komisaris	01/11/2016 – 30/09/2019	3 Tahun
Waldy Gutama	Anggota/Pihak Independen	26/09/2013 – 25/09/2017	4 Tahun
Sondang Gayatri	Anggota/Pihak Independen	26/09/2013 – 25/09/2017	4 Tahun
Rachmat Supratman	Anggota/Pihak Independen	08/11/2016 – 07/11/2019	3 Tahun

Berdasarkan table komposisi Anggota Komite Audit tersebut, komposisi anggota Komite Audit telah lebih dari 51% yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. yaitu 2 orang Komisaris Independen dan 3 dari Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan atau akuntansi, bidang hukum atau perbankan.

Saat ini Dewan Komisaris akan memenuhi Ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, khususnya Pasal 7 butir g bahwa Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Komite Audit telah besifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyatanaan (*in fact*).

Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam tabel dengan aspek sebagai berikut.

Tabel Komposisi Komite Audit

Aspek Independensi	Kamaruddin Sjam	I Wayan Agus Mertayasa	Sumiyati	Maurin Sitorus	Waldy Gutama	Sondang Gayatri	Rachmat Supratman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√

Seluruh Anggota Komite Audit memenuhi kriteria independensi sebagaimana tercermin dalam aspek independensi

Rangkap Jabatan Komite Audit

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan di Perseroan	Rangkap Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain
Kamaruddin Sjam	Ketua Komite Audit	- Komisaris Independen - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite pemantau risiko	-
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	- Komisaris Utama / Independen - Ketua Komite Remunerasi dan Nominas - Anggota Komite Pemantau Risiko	-
Sumiyati	Anggota	- Komisaris	- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
Maurin Sitorus	Anggota	- Komisaris - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	- Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit telah dilengkapi Pedoman Kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Hal tersebut menunjukkan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap efektivitas tata kelola perusahaan, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Piagam Komite Audit berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, struktur, uraian mengenai aktivitas serta kewenangan dari Komite Audit dengan sistematika sebagai berikut: berisi: I : Ketentuan Umum; II : Maksud dan tujuan; III : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang komite audit; IV : Kewajiban komite; V : Akses dan Kerahasiaan Informasi; VI : Struktur, Pengangkatan dan Pemberhentian Komite; VII : Persyaratan Anggota Komite; VIII : Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite; IX : Rapat Komite Audit; X : Pelaporan Komite; XI : Masa Tugas; XII : Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang; XIII : Anggaran Komite; XIV : Penghasilan Anggota Komite; XV : Penutup.

Piagam Komite Audit tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/DEKOM-BTN/2016 dan Keputusan Direksi Nomor SKB-02/DIR-BTN/2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 02/DEKOM-BTN/2013 dan Direksi Nomor SKB-02/DIR-BTN/2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan

Komisaris, antara lain meliputi :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, penunjukan kembali dan pemberhentian Akunan yang disasarkan pada independensi, ruang lingkup dan *fee audit*.
10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

1. Komite berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Komite berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite.
3. Komite berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Komite berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Secara lengkap, Piagam Komite Audit dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

PROGRAM DAN REALISASI KERJA KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki rencana kerja guna mempurmudah pelaksanaan kerjanya. Rencana Kerja Komite Audit tahun 2016 diantaranya meliputi:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit
2. Rapat Komite Audit
3. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Adapun bentuk realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka

melaksanakan tugas dan tanggung jawab diantaranya meliputi:

1. memantau dan rnengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan Keuangan.
2. melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, perencanaan, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya
3. membahas *Annual Audit Plan* dengan IAD.
4. melangsungkan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, diantaranya adalah sbb:
   - Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik.
   - Koordinasi Komite Audit dengan IAD.
   - Pembahasan *IT Internal Control* di Perseroan.
   - Pembahasan .Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2015
   - Tindak lanjut temuan audit khusus pada beberapa Kantor Cabang.
   - melakukan rapat Monitoring Temuan IAD dan Eksternal.
   - melakukan rapat Persiapan *Kick Off Meeting* KAP.
   - melakukan Presentasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
   - Melakukan Koordinasi antara Komite Audit dengan IAD terkait Tindak lanjut Temuan Eksternal.
   - melakukan pembahasan terkait Program Kerja Komite Audit 2016.
   - Tindak lanjut temuan audit khusus pada beberapa Kantor Cabang
   - Monitoring Debitur Inti Perseroan Konvensional dan Syariah
5. memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
   - Dalam rapat komite Audit tanggal 27 November 2015, Komite Audit telah menyampaikan beberapa pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajemen perihal pengadaan KAP.
   - Dalam rapat Komisaris tanggal 3 Februari 2016, Komite Audit telah merekomendasikan KAP yang telah lulus tahap awal pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan (yang diketuai oleh PGSD).
   - Dalam rapat tanggal 24 Februari 2016, Komite Audit merekomendasikan KAP kepada Dewan Komisaris sesuai dengan hasil evaluasi panitia pengadaan.
   - Dewan Komisaris telah membahas pengadaan KAP dimana Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit telah menyampaikan requirement kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kerangka Kerja Acuan pengadaan KAP.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali rapat, dan 17 (tujuh belas) diantaranya selalu dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Audit, sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Kamaruddin Sjam	Ketua	17	15	88,24%
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	5	2	40,00%
Sumiyati	Anggota	5	1	20,00%
Maurin Sitorus	Anggota	3	1	33,33%
Waldy Gutama	Anggota	17	17	100,00%
Sondang Gayatri	Anggota	17	16	94,12%
Rachmat Supratman	Anggota	2	2	100,00%

* Rapat Yang dihadiri oleh dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Program Pelatihan dan Pengembangan Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengikuti pengembangan kemampuan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Materi
Kamaruddin Sjam	Ketua	Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
		September 2016	*Enhancing the Power of Enterprise Risk Management in Creaing a Sound Bank and Financial Risk Integration*
		April 2016	*Benchmarking and Workshop Enterprise Risk Management in UK*
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
		September 2016	*London Business School dan SRW & Co*
Sumiyati	Anggota	Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
		September 2016	*London Business School dan SRW & Co*
Maurin Sitorus	Anggota	Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*

RENCANA RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2017

Tahun 2017 telah diprogramkan untuk dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak minimal 12 kali dalam 1 tahun dengan agenda sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dengan Internal Audit Division, yang membahas:
   - Membahas permasalahan-permasalahan yang ditemukan IAD dalam proses audit.
   - Melakukan *review* atas pelaksanaan Audit IAD.
   - Memantau bahwa hambatan-hambatan IAD dapat diselesaikan
   - Memantau bahwa temuan-temuan dan rekomendasi dari pemeriksaaan internal & eksternal telah ditindak lanjuti *Auditee*
2. Membahas *Annual audit plan* IAD Tahun 2017
3. Memantau pelaksanaan Audit oleh KAP, dan mendiskusikan hasil pemeriksaan dan hal-hal penting dengan pelaksanaan audit tahun buku 2016.
4. Mengadakan Rapat Internal Komite Audit, dengan agenda:
   - Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Komite Auidt
   - Laporan dari Komite Audit kepada Ketua Komite Audit atas hal-hal yang telah dilakukan sejak pertemuan terakhir.
   - Membahas permasalahan yang perlu segera ditindak lanjuti

5. Monitor bahwa Perseroan telah menindaklanjuti temuan pihak eksternal sesuai kesepakatan.
6. Melakukan rapat dengan unit terkait berkenaan dengan pengadaan KAP
7. Memantau manajemen telah melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
2. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); jo Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris oleh karenanya Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris walaupun penetapannya dilakukan oleh Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan dan Komite Remunerasi dan Nominasi berkewajiban melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan dan mempertimbangkan pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Perseroan, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Tabel Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 I Wayan Agus Mertayasa (Ketua)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.163/DIR/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian:** Keuangan, Perbankan
 Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.503/DIR/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian:** Keuangan, Ekonomi Makro, Strategi Manajemen
 Arie Coerniadi (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.163/DIR/2015 tanggal 25 April 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Keuangan
 Kamaruddin Sjam (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.476/DIR/2016 tanggal 01 November 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian:** Audit, Keuangan

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 Maurin Sitorus (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.476/DIR/2016 tanggal 01 November 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Hukum, Ekonomi
 I Nengah Rentaya (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Tabanan Bali, Usia 58 Tahun. Beliau menamatkan Program Strata 1 (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1987 dan Master of International Affairs in Economic Policy & Management di Columbia University, USA pada tahun 1994. Pengalaman Kerja sebelumnya diantaranya sebagai Senior Vice President – Group Head of Learning Center PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2014); sebagai Senior Vice President – Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007); sebagai Senior Vice President – Deputy Group Head of Human Capital Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003-2006). Training yang pernah diikuti anntara lain: *Train the Trainer Methodology and Tool Delivery Program Bank Mandiri* (2013); *Training Certificate Coaching Program 60 hours*, by ICF, USA (2013); *Service Excelllence for Senior Manager Program*, by SQC, Singapura (2012); *The 4 Disciplines of Execution* (4DX), *Manager Certification Program – Gold Certificate, by Franklin Covey and Dunamis Indonesia*, 2012; *Human Resources Management in ASIA PASIFIC*, by INSEAD, Singapore, 2000; *Achieving Performance*, by INSEAD France, 2002. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.476/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Perbankan, Sumber Daya Manusia

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 Arief Pramuhanto (Anggota *ex officio*)	Warga Negara Indonesia Lahir di Jakarta, Usia 54 Tahun. Lulusan Pendidikan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Ekonomi Monash University, Melbourne. Pengalaman Kerja sebelumnya diantaranya Technical Assesstance at "Change Management" Division - Andersen Consulting (Currently Accenture) (1989-1990); Loan Officer - Development Bank Of Indonesia (1991-1993); Human Resources Specialist - Change Management Project of Standard Chartered Bank-Dev Bank of Indonesia (1996); Human Resources Manager – Koja Container Terminal (1997-1998); Training & Development Manager – PT.Thames Pam Jaya (1998-2000); General Manager Human Resources Development – PT. Frisian Flag Indonesia (2000-2015) Training yang pernah diikuti meliputi: *Overview The 4 Discipline of Execution* – Dunamis Organization (2015); Pembekalan Managemen Risiko Perbankan Level 4 – *Banker Associations For Risk Managemen*, Bara (2015); Forum Eksekutif II/2015 – Forum Human Capital Perbankan Indonesia (2015); *Bara Risk Forum* (2016); Outbound HCD – Human Capital Division (2016); SOS. Implementasi Perkreditam Kebijakan – Consumer Collection & Remedial Division (2016); Mega Seminar dengan Prof. Dave Ulrich – GML Performance Consulting (2016; Sosialisasi AFI KPKU BTN Senior Leadrer – Bank Tabungan Negara (2016); *Workshop* Penyusunan SMK Pegawai – Muamalat Institut (2016). **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:** SKB Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.03/Dekom-BTN/XII/2013 dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.03/Direksi-BTN/XII/2013 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk **Keahlian**: *Strategic Plan/Corporate Plan, Performance Management System, Job Analysis, Evaluation & Grading System, Remuneration System, Competency Model, Career Management, Corporate Value, Organizational Design; Training Architecture, dan Bussines Process Improvement.*

Sampai dengan 31 Desember 2016, susunan rangkap jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Komite lebih dari dua 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

Pemberhentian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat berhenti atau diberhentikan berdasarkan Piagam Komite Pasal 8 yang menyatakan Ketua dan Anggota Komite diangkat untuk masa 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

JUMLAH, KOMPOSISI, PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sampai dengan tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 7 orang. Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, 1 (satu) orang pihak independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Selama tahun 2016, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yaitu dengan adanya pergantian Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.163/DIR/2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 25 April 2016 telah mengangkat Sdr. I Wayan Agus Mertayasa sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Sdr. Arie Coerniadi sebagai Anggota Komite remunerasi & Nominasi.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.476/DIR/2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 1 November 2016 telah mengangkat Sdr. Kamaruddin Sjam, Sdr. Maurin Sitorus, Sdr. Heru Ratna Azimada dan Sdr. I Nengah Rentaya sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Surat Keputusan Direksi No.483/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 telah memberhentikan Sdr. Rudolf Tulus Pandapotan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sehingga komposisi Komite Remunerasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No.124/KOM/BTN/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 477/DIR/2016 tanggal 01 November 2016 menjadi sebagai berikut:

Tabel Komposi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
I Wayan Agus Mertayasa	Ketua	25/04/2016 – 24/04/2019	3 Tahun	Komisaris Independen
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	09/09/2015 – 22/07/2018	3 Tahun	Komisaris
Arie Coerniadi	Anggota	25/04/2016 – 24/04/2019	3 Tahun	Komisaris Independen
Kamaruddin Sjam	Anggota	01/11/2016 – 30/09/2019	3 Tahun	Komisaris Independen
Maurin Sitorus	Anggota	01/11/2016 – 30/09/2019	3 Tahun	Komisaris
I Nengah Rentaya	Anggota	08/11/2016 – 07/11/2019	3 Tahun	Pihak Independen
Arief Pramuhanto	Anggota *ex-officio*	01/03/2015 – 28/02/2017	2 Tahun	Pejabat Eksekutif SDM

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah besifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyatanaan (*in fact*). Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam tabel dengan aspek sebagai berikut.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	I Wayan Agus Mertayasa	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Arie Coerniadi	Kamaruddin Sjam	Maurin Sitorus	Arief Pramuhanto	I Nengah Rentaya
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	√	√	√	√
Seluruh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi kriteria independensi sebagaimana tercermin dalam aspek independensi							

Rangkap Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan di Perseroan	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Instansi lain
I Wayan Agus Mertayasa	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	- Komisaris Utama / Independen - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko	Tidak Merangkap
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	- Komisaris - Anggota Komite Pemantau Risiko	Tidak Merangkap
Arie Coerniadi	Anggota	- Komisaris Independen - Ketua Pemantau Risiko	Tidak Merangkap
Kamaruddin Sjam	Anggota	- Komisaris Independen - Ketua Komite Audit	Tidak Merangkap
Maurin Sitorus	Anggota	- Komisaris - Anggota Komite Audit	Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
I Nengah Rentaya	Anggota	Tidak Merangkap	Tidak Merangkap
Arief Pramuhanto	Anggota	Kepala Divisi Human Capital	Tidak Merangkap

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. SKB – 03/DEKOMBTN/2016 dan Direksi No. SKB-03/DIR-BTN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor SKB – 03/DEKOMBTN/ XII/2013 dan Direksi No. SKB-03/DIR-BTN/ XII/2013.

Pedoman Pelaksanaan Kerja, Sistem dan Prosedur Komite Remunerasi dan Nominasi berisi Bab tentang Pengertian; Maksud dan Tujuan; Struktur; Persyaratan Keanggotaan untuk Pihak Independen; Tugas dan Tanggung Jawab; Kewajiban dan Etika Kerja; Hak dan Kewenangan; Rapat; Peningkatan Profesionalisme dan Penggunaan Tenaga Penunjang; Pelaporan; Masa Tugas; dan Penutup.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunrasi dan Nominasi terkait Remunerasi, antara lain meliputi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai 1)Struktur Remunerasi; 2)Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa gaji, honorarium, insentif, *dam*/ atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
   c. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, wajib melakukan prosedur menyusun Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Menyusun besaran atas anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris.
   d. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang
   e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan komisaris
   f. Memastikan kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   g. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (sati) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penerapan kebijakan Remunerasi
   h. Melakukan *review* terhadap sistem manajemen *human capital* dan kebijakan pengembangan *human capital* mulai dari *rekrutmen*, *assessment*, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi dan lain-lain.
   i. Menyusun menganalisa dan memberikan rekomensai kriteria serta prosedur pemilihan, pengangkatan, dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi
   j. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris/Direksi
   k. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan direksi serta memberikan rekomendasi.
   l. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Remunerasi dan Nominasi.
2. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan Nominasi, yaitu:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 1)Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan; 2) Komposisi jabatan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris; 3)Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan 4)Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris
   b. Membentu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris
   d. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan e, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur menyusun komposisi dan proses Nominasi, membentu komposisi dan proses nominasi, menyusun program pengembangan kemampuan dan menelaah serta mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

HAK DAN WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki hak dan wewenang, sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi berhak untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan haknya Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia, *Desk* Kepatuhan, atau dengan Satuan Kerja Lainnya.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak Independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.

Secara lengkap, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan rencana kerja yang telah disusunnya. Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2016 diantaranya meliputi:

1. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Pelatihan dan Pengembangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pengembangan kemapuan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Materi
I Wayan Agus Mertayasa	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	September 2016	*London Business School dan SRW & Co*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
Arie Coerniadi	Anggota	Februari 2016	*Mobile Word Congress, untuk Solusi Mobile Payment dan Mobile Banking Termasuk Mobile Ekyc.*
		September 2016	*Enhancing the Power of Enterprise Risk Management in Creaing a Sound Bank and Financial Risk Integration*
		Oktober 2016	*The 8th Batch CGLP & Asean CG Score Card*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*

Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Materi
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	Juli 2016	*The IIA International Conference 2016*
		Agustus 2016	*The 7th Batch CGLP & Asean CG Score Card*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
Kamaruddin Sjam	Anggota	April 2016	*Benchmarking and Workshop Enterprise Risk Management in UK*
		September 2016	*London Business School dan SRW & Co*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan *Board Manual* dan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dipimpin oleh ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, dan 10 (sepuluh) diantaranya selalu dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
I Wayan Agus Mertayasa	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	8	8	100%
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	10	10	100%
Arie Coerniadi	Anggota	3	3	100%
Kamaruddin Sjam	Anggota	2	2	100%
Maurin Sitorus	Anggota	2	1	50%
I Nengah Rentaya	Anggota	1	1	100%
Arief Pramuhanto	Anggota *ex-officio*	10	7	70%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya meliputi:

1. Menyelenggarakan total 12 kali rapat.
2. Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
   - Dewan Komisaris dan Direksi serta telah disampaikan kepada RUPS
   - Pejabat Eksekutif dan pegawai telah disampaikan kepada Direksi
3. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS diantaranya didasarkan kepada hasil koordinasi dengan SIPD dan HCD dalam *Talent of Pool* Program, Faktor-faktor yang dinilai dalam proses Pemetaan *Talent* terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek Kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (KPI Korporat, KPI Unit Kerja, KPI Individu) dan aspek Potensi (Kognitif dan Kepribadian, Pengetahuan dan Ketrampilan Teknis, Pendidikan Terakhir dan Pengalaman Kerja) sebagaimana diatur dalam SE No.13/DIR/HCD/2016 tanggal 22 Maret 2016 Perihal Pemetaan *Talent*.
4. Kebijakan Remunerasi dan nominasi telah dilakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan Gaji bagi Direksi Tahun 2016 dan pembagaian Tantiem Tahun Buku 2015.

   Kajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan *best practise* pasar gaji profesional di industri perbankan lainnya yang memiliki ukuran (*size*) setara dengan Perseroan.

   Terhadap hasil kajian tersebut telah diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham Bank guna dimintakan persetujuan. Untuk memperoleh kajian yang komprehensif dan mendapatkan informasi pasar gaji profesional, menggunakan konsultan independen yang kompeten di bidang remunerasi dibidangnya (*top executive remuneration*)
5. Melakukan diskusi *Carier Path* Pegawai sejak *rekrutmen* sampai dengan jenjang satu *level* dibawah Direksi.
6. Melakukan diskusi Kebutuhan pegawai untuk menunjang kebutuhan RBB dan lima tahun mendatang.
7. Melakukan Koordinasi tentang kebijakan Promosi & Mutasi Pegawai, *Human Capital Development*, Pelatihan Pegawai.
8. Pembahasan *Strategic Issues* dan *Concern* Dewan Komisaris terhadap *Human Capital Management*
   - Meningkatkan eksekusi penerapan nilai-nilai budaya perusahaan dan manajemen Risiko dengan lebih persistent pada seluruh jenjang organisasi dengan akuntabilitas setiap jenjang dengan menyusun program internalisasi yang terarah dan terukur, sehingga tercapai:
     - *Risk Awareness* (pentingnya mengelola risiko) di seluruh jenjang organisasi
     - Kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang terciptanya GCG
     - Penerapan KYC (*Know Your Customer*), program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) secara bersungguh-sungguh dan tertib sehingga Perseroan kita terhindar dari kemungkinan kerugian material dan risiko reputasi.
   - Merencanakan dan menerapkan program *Talent Management* dan Akselerasi kesempatan promosi secara selektif, berdasarkan sistem SDM yang sudah ada secara konsisten, terbuka dan *fairness*.
   - Memberikan kepastian *grade* kepada pegawai yang telah menempati *job grade* yang lebih tinggi dibanding *personal grade* nya.
   - Melaksanakan Program pemenuhan Jabatan Strategis Bank, terutama untuk dua (2) *levels* dibawah Direksi;

- Me*review* kemungkinan menyatukan struktur Fungsi *Organization Development* (OD) yang saat ini berada di Divisi SIPD, dengan HCD agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- Memperkuat keterkaitan (*alignment*) antara Strategis Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan *Strategic Goals*-nya melalui Penguatan *School of Business*, *School of Operational Banking* dan *School of Leadership*.
- Menyelaraskan Remunerasi yang bersifat *Variables Pay* i.e: *Sales Incentives*, *Performance* Bonus, dan *Long Term Incentives* (LTI) untuk mendukung Program *Performance Culture* sehingga mengurangi dampak perilaku "Silo-Silo" dalam Organisasi.
- Melaksanakan Penilaian Kinerja Bank dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai (KPI), mengacu pada Distribusi Normal dan untuk penilaian individu pegawai secara bertahap mengacu pada sistem multiraters 360º.
- Meningkatkan fungsi *Human Capital Information System* dalam rangka mendukung Program Strategis *Human Capital* jangka menengah dan panjang.

RENCANA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI TAHUN 2017

Komite Remunerasi dan Nominasi telah merencanakan rapat untuk tahun 2017 sebanyak 10 kali Rapat dengan cakupan agenda materi sebagai berikut:

No	Aktivitas/ Kegiatan	Output	Rencana Kegiatan	Keterangan
1.	Melakukan Pendampingan dalam penyusunan KPI Korporat & Direksi.	Rekomendasi	Januari, Juli 2017	Bekerjasama dengan SIPD
2.	Bekerjasama dengan HCD untuk merumuskan program *Talent Pool* yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Bank.	Program/ Kriteria Talent Pool	Januari – September 2017	Khususnya yang terkait dengan Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi.
3.	Melakukan Pendampingan dalam pelaksanaan program Seleksi dan *Assessment* Pegawai calon *Talent Pool*.	Rekomendasi	Januari, September 2017	Secara selektif untuk Jabatan2 strategis Bank.
4.	Melakukan kajian terhadap penerapan Budaya Perusahaan dan Program *Engagement* yang telah berjalan hingga tahun 2016, serta merekomendasikan program untuk tahun 2017	Rekomendasi	Januari – Juni 2017	Kajian terhadap Kebijakan dan Implementasinya.
5.	Melakukan review terhadap Usulan Kebijakan KPI dan Remunerasi (Jasa Produksi Direksi dan Dewan Komisaris)	Rekomendasi	Januari – Maret 2017	Bekerjasama dengan HCD
6.	Melakukan *review* terhadap Program Pelatihan Pegawai dan *Program School* – School yang ada, khususnya yang terkait dengan bidang kompetensi *mortgage*.	Rekomendasi	Januari - September 2017	Bekerjasama dengan HCD dan Dept Learning Center.

No	Aktivitas/ Kegiatan	Output	Rencana Kegiatan	Keterangan
7.	Memberikan pendapat terhadap usulan promosi, mutasi dan tour of duty pegawai.	Rekomendasi	Januari-Desember 2017	Bekerjasama dengan HCD
8.	Melakukan *review* terhadap ketentuan, kebijakan Strategic *Human Capital* dan GCG di Bank.	Rekomendasi	April, Oktober 2017	Bekerjasama dengan HCD dan CMPD
9.	Bersama dengan HCD melakukan kunjungan kerja ke unit kerja Bisnis maupun Operasional Bank secara selektif.	Laporan	Januari – Desember 2017	Catur Wulanan Est. Biaya Rp 50 juta.
10.	Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris	Laporan	Januari – Desember 2017	-
11.	Melakukan pengembangan kompetensi anggota melalui kegiatan pelatihan, seminar dan *workshop* serta sertifikasi.	Laporan	Januari – Desember 2017	Kebutuhan Biaya Rp 75 juta.

REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Paket Remunerasi selama setahun yang diterima oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari pihak independen (diluar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif), dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Nama Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen	Periode	Jumlah Remunerasi
Rudolf Tulus P.S	1 Januari 2016-31 Oktober 2016	
Heru Ratna Azimada	1 September 2016-30 November 2016	
I Nengah Rentaya	1 November 2016-31 Desember 2106	
Total Remunerasi		**Rp. 364.217.910**

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan yang berkaitan dengan manajemen risko.

Dasar Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016
2. Peraturan Menteri Negara BUMN PER-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris oleh karenanya Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris walaupun penetapannya dilakukan oleh Direksi. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan dan Komite Pemantau Risiko berkewajiban melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Dalam pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan mengacu pada keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak dan moral serta memiliki independensi sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko
 Arie Coerniadi (Ketua)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.400/DIR/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Keuangan

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko
 Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.508/DIR/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Keuangan, Ekonomi Makro dan Strategi Manajemen
 I Wayan Agus Mertayasa (Anggota)	Untuk terkait nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.162/DIR/2015 tanggal 25 April 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Keuangan, Perbankan
 Heru Ratna Azimada (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Magelang, Usia 67 Tahun. Lulusan Sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Ekonomi Jurusan Perusahaan. Pengalaman Kerja sebelumnya diantaranya sebagai EVP/Staf Ahli Direksi Bidang Human Resources di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003); sebagai Executive Vice President Training Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001-2003); EVP Coordinator (SEVP) Bidang Corporate, Government, Commercial dan Restructuring di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000-2001); Executive Vice President Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999); Direktur di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (1998-1999). Training yang pernah diikuti antara lain : *Senior Executives Forum* IV tahun 2002 di Australia; *Asia Pacific Economic Summit* tahun 2000 di Australia; *Asian Banker Summit* tahun 200 di Singapore; *Asian Pacific Non Performing Loan* tahun 2000 di Korea Selatan; *The Asian Banker Summit* tahun 2000 di Australia; *Treasury Management* tahun 1996 di Singapura; *Asset Liability Management* tahun 1996 di Singapura **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.517/DIR/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Perbankan, Risk Management

Nama / Foto	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko
 Yuki Noviani Kohar (Anggota)	Warga Negara Indonesia Lahir di Bandung, Usia 55 Tahun. Lulus pendidikan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran pada tahun 1986. Pengalaman Kerja sebelumnya diantaranya sebagai Vice President – Deputy GM Commercial Credit Division PT Bank BNI (Persero) Tbk (2010-2015); Sebagai Vice President, Group Head of Commercial Business Development Bank Niaga (2007-2009); Special Assignment sebagai Team Merger CIMB Niaga Represntative Commercial Banking (2007-2009) Training yang pernah diikuti meliputi: Pelatihan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta pada tahun 2014; *Account Management & Relationship by Michigan University Ross Scholl of Business* di Hongkong pada tahun 2005; F*inancial for senior Management- London Business School* di London, UK pada tahun 2015. **Dasar Hukum Penunjukan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko:** SK Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.475/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. **Keahlian**: Perbankan, Credit

Sampai dengan 31 Desember 2016, susunan rangkap jabatan Ketua Komite Pematau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Komite lebih dari dua 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berhenti atau diberhentikan berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dalam Pasal 6 yang menyatakan Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Jumlah, Komposisi, Periode dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebanyak 5 orang, dengan komposisi terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 anggota dari pihak Komisaris Independen, 1 anggota dari pihak Komisaris dan 2 Anggota dari Pihak Independen.

Selama tahun 2016, komposisi Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan yaitu dengan adanya pergantian Komite Pemantau Risiko sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 479/DIR/2016 tanggal 1 November 2016 telah mengangkat Sdri. Yuki Noviani Kohar sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
2. Surat Keputusan Direksi No. 162/DIR/2016 tanggal 25 April 2016 telah I Wayan Agus Mertayasa sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sehingga komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris No.124/KOM/BTN/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016

Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 479/DIR/2016 tanggal 01 November 2016 menjadi sebagai berikut:

Tabel Komposisi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Masa Jabatan	Keterangan
Arie Coerniadi	Ketua	03-07-2015 – 02-07-2018	3 Tahun	Komisaris Independen
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	09-09-2015 – 02-07-2018	3 Tahun	Komisaris*
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	25-04-2016 – 24-04-2019	3 Tahun	Komisaris Independen
Heru Ratna Azimada	Anggota	01-12-2016 – 30-11-2019	3 Tahun	Pihak Indpenden
Yuki Noviani Kohar	Anggota	08-11-2016 - 07-11-2019	3 Tahun	Pihak Indpenden

Berdasarkan table komposisi Komite Pemantau Risiko tersebut, komposisi anggota Komite Pemantau Risiko telah lebih dari 51% yang berasal dari Komisaris Independen 2 orang, Komisaris 1 orang dan pihak independen 2 yang ahli dalam bidang keuangan, manajemen risiko, Ekonomi Makro, Strategi Manajemen, Perbankan dan credit.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah besifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyatanaan (*in fact*). Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam tabel dengan aspek sebagai berikut

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Arie Coerniadi	Lucky Fathul Aziz Hadibrata	I Wayan Agus Mertayasa	Heru Ratna Azimada	Yuki Noviani Kohar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√

Rangkap Jabatan Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan di Perseroan	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Instansi lain
Arie Coerniadi	Ketua Komite Pemantau Risiko	- Komisaris Independen - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Tidak Merangkap
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	- Komisaris - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Tidak Merangkap
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	- Komisaris Utama/ Independen - Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite audit	Tidak Merangkap
Heru Ratna Azimada	Anggota	Tidak Merangkap	Tidak Merangkap
Yuki Noviani Kohar	Anggota	Tidak Merangkap	Technical Advisor di Crowe Horwath

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. SKB-01/DEKOM-BTN/XII/2013 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/XII/2013 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Adapun muatan Piagam Komite Pemantau Risiko terdiri dari Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite; Kewajiban Komite; Akses dan Kerahasiaan Informasi; Struktur, Pengangkatan dan Pemberhentian Komite; Persyaratan Keanggotaan Komite; Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite; Rapat-Rapat Komite; Pelaporan Komite; Masa Tugas; Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite dan Penggunaan Tenaga Penunjang; Anggaran Komite; Penghasilan Anggota Komite dan Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tangung jawab sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Risiko kredit,Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko stratejik, Risiko kepatuhan
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Mendorong pemberdayaan fungsi di manajemen risiko Bank.
5. Melaporkan Kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
6. Komite dapat melakukan kegiatan pemantauan risiko di unit kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko.
7. Mengundang manajemen dan pihak intern lainnya untuk hadir dalam rapat Komite sepanjang dianggap penting dan diperlukan.
8. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Secara lengkap, Piagam Komite Pemantau Risiko dapat dilihat melalui *website* Perseroan (www. btn.co.id) pada menu *Investor Relation* pada Kebijakan Tata Kelola.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko sesuai dengan rencana kerja yang telah disusunnya. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2016 diantaranya meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melakukan monitoring dan menganalisis risiko dan informasi bank, ketentuan regulator dan media massa, agar hasil analisis berupa rekomendasi untuk Dewan Komisaris menjadi lebih tajam dan komprehensif.
2. Melakukan evaluasi terhadap pengembangkan kebijakan dan tools sehingga memudahkan Perseroan dalam pengukuran risiko dan mendorong kecepatan dalam penyelesaian analisisnya, sehingga Dewan Komisaris mampu melakukan *early advisory* lebih awal.
3. Meningkatkan tata kelola proses pemberian kredit, sejak permintaan informasi terkait keuangan nasabah, pengolahan informasi, persetujuan pemberian kredit sampai dengan monitoring perkembangan kredit tersebut, sehingga fungsi manajemen risiko Perseroan mampu mendorong kepatuhan bank dan mengurangi kerugian bank sampai sekecil-kecilnya.Mendukung program pengembangan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang terintegrasi (*Enterprise Risk Management*)
4. Dalam rangka mempertajam fungsi Komite Pemantau Risiko dan menghindari tumpang tindih pekerjaan dengan komite lainnya, maka Komite Pemantau Risiko perlu meningkatkan sinergi dengan Komite Audit sehingga tercipta fungsi komite yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari SDM Komite Pemantau Risiko sesuai dengan nilai dan budaya kerja Perseroan serta menjalankan fungsi tersebut berdasarkan dengan standar international (*international best practices*), sehingga dapat mendorong fungsi Manajemen Risiko yang disegani.

Program Pelatihan dan Pengembangan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti pengembangan kemapuan sebagai penunjang

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Materi
Arie Coerniadi	Ketua	Februari 2016	*Mobile Word Congress, untuk Solusi Mobile Payment dan Mobile Banking Termasuk Mobile Ekyc.*
		September 2016	*Enhancing the Power of Enterprise Risk Management in Creaing a Sound Bank and Financial Risk Integration*
		Oktober 2016	*The 8th Batch CGLP & Asean CG Score Card*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	Juli 2016	*The IIA International Conference 2016*
		Agustus 2016	*The 7th Batch CGLP & Asean CG Score Card*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	September 2016	*London Business School dan SRW & Co*
		Desember 2016	*Erma Bali International Conference On Enterprise Risk Management*

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan *Board Manual* dan Piagam Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat 27 (dua puluh tujuh) kali rapat, dan 12 (dua belas) diantaranya selalu dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arie Coerniadi	Ketua	12	7	58,33%
Lucky Fathul Aziz Hadibrata	Anggota	12	11	91,67%
I Wayan Agus Mertayasa	Anggota	9	7	77,78%
Yuki Noviani Kohar	Anggota	3	3	100,00%
Heru Ratna Azimada	Anggota	2	0	0%

* Rapat Yang dihadiri oleh dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Pemantau Risiko yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya meliputi:

1. Melakukan rapat dengan RMD mengenai Penjelasan Mengenai Risiko Utama (Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas) pada Masing-masing Wilayah.
2. Melaksanakan Rapat dengan Unit terkait mengenai Pengelolaan Giro FLPP di Peseroan
3. Melakukan *review* terhadap draft Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan Tahun 2015
4. Melakukan *review* terhadap draft Laporan Pengawasan Semester II – 2015.
5. Melakukan diskusi dengan RMD pada Tgl. 2 Feb 2016 mengenai Pengelolaan Risiko Operasional di Perseroan. Tindak lanjut adalah:
   - Menyempurnakan laporan 10 LED tertinggi dengan memperhatikan *Operational Risk Management* sesuai peraturan regulator dan Basel serta menyampaikan pengaruh LED dimaksud ke *financial* atau *non financial*.
   - Mencari referensi dari bank lain terkait RCSA untuk memperoleh masukan sebelum diarahkan oleh konsultan.
   - Menetapkan ruang lingkup RCSA dan KRI, sebagai bahan TOR konsultan.
   - Melakukan *review*/uji banding dengan bank lain.
6. Anggota KOPAR membahas 4 *eyes principles* dan posisi dengan Unit AMD, CCRD dan CRD.
7. Membahas laporan *assessment* GCG smester I-16, ketentuan Bank terkait Risk Profile dan perbaikan NPL di Perseroan.
8. Membahas tindak lanjut yang harus dilakukan Perseroan terkait hasil Pemeriksaan OJK posisi 31 Des 2015 dan membahas draft laporan pengawasan Dekom per smester I-2016.
9. Membahas *performance review* Perseroan posisi Juli 2016 dan membuat usulan surat kepada Direksi terkait Hasil Telaah Terhadap *Performance Review* Bulan Juli 2016.
10. bersama CMLD dan AMD, membahas progress Tindak Lanjut Hasil temuan OJK terkait penetapan Kolektibilitas kredit yang belum sesuai ketentuan POJK dan
11. Bersama RMD, membahas progress proyek *Tools* Risiko Operasional (RCSA dan LED).

RENCANA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2017

Komite Pemantau Risiko telah merencanakan rapat untuk tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut:

a. Rapat Gabungan Komite Pemantau Resiko (KOPAR) bersama Komite Manajemen Resiko (KOMAR) sebagai berikut :

No.	Hari	Tanggal	Agenda
1.	Rabu	25 Januari 2017	Pembahasan laporan ke OJK Profil Risiko Tw IV 2016
2.	Rabu	26 April 2017	Pembahasan laporan ke OJK Profil Risiko Tw I 2017
3.	Rabu	26 Juli 2017	Pembahasan laporan ke OJK Profil Risiko Tw II 2017
4.	Rabu	23 Agustus 2017	Pembahasan Review Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko
5.	Rabu	25 Oktober 2017	Pembahasan laporan ke OJK Profil Risiko Tw III 2017

b. Rapat Rutin

Rapat Komite Pemantau Risiko akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena terkait dengan : permintaan konsultasi kredit oleh Direksi kepada Dewan komisaris, agenda rapat Dewan komisaris yang harus dibahas oleh Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu dan rapat-rapat lainnya yang terkait dengan pemantauan resiko sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan rapat-rapat terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI DIBENTUK DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI AGAR DAPAT MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL BISNIS YANG DIJALANKAN PERSEROAN. KOMITE-KOMITE DIREKSI TERSEBUT DIBENTUK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN BISNIS PERSEROAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite di bawah Direksi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Perkreditan
3. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)
5. Komite Personalia
6. Komite Produk

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Perseroan. Selain itu, Komite Manajemen Risiko berperan dalam membantu perumusan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No.8/PD/RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) Perseroan. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling kurang terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko	
Ketua	Managing Director Strategic, Compliance and Risk
Sekretaris	Risk Management Division Head
Anggota Tetap	Direksi • Managing Director Mortgage and Consumer Lending • Managing Director Treasury and Information Technology • Managing Director Finance, Operation and Credit Risk, dan • Managing Director Commercial Lending Division Head • Internal Audit Division • Compliance Division
Anggota Tidak Tetap	Direksi • Managing Director Collection, Asset Management and Legal • Managing Director Funding and Distribution Division Head • Seluruh Division dan Desk Head kecuali Risk Management Division Head, Compliance Division Head dan Audit Internal Division Head.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contigency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Tanggal	Agenda
20 Januari 2016	• Hasil *Self Assessment* Laporan Profil Risiko TW IV/2015 • Rekomendasi untuk perbaikan Profil Risiko
19 April 2016	• Hasil *Self Assessment* Laporan Profil Risiko TW I/2016 • Rekomendasi untuk perbaikan Profil Risiko
20 Juli 2016	• Hasil *Self Assessment* Laporan Profil Risiko TW II/2016
14 Desember 2016	• Review Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Tahun 2016

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan dibidang perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No.12/PD/CMLD/2015 tanggal 16 Oktober 2015 juncto PD No.27/DIR/CMO/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Komite Kebijakan Perkreditan dengan struktur dan keanggotaan Komite sebagai berikut:

Komite Kebijakan Perkreditan	
Koordinator Bank	Direktur yang mensupervisi Divisi pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan
Sekretaris	Divisi Pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan Bank
Anggota Tatap	1. Division Head pengelola pengembangan dan kebijakan perkreditan Bank 2. Risk Management Division Head 3. Internal Audit Division Head 4. Compliance Division Head
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya dan Divisi lain yang diundangan berdasarkan keperluan

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas terlaksananya peraturan dan ketentuan mengenai pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Perseroan dengan baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan masalah apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
3. Memberikan konsultasi atas pemberian kredit yang mengandung tingkat risiko tinggi dan kredit yang perlu dihindari. Konsultasi harus dibuat sebelum komitmen dibuat.
4. Memantau dan mengevaluasi aspek yang mencakup: Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan; Perkembangan penghimpunan dana masyarakat; Perkembangan pemberian jasa layanan nasabah; Kepatuhan pelaksanaan wewenang memutuskan kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit; Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu; Kepatuhan terhadap pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit; Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit; Penyelesaian kredit bermasalah; dan Upaya dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

PELAKSANAAN TUGAS

Sepanjang tahun 2016, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 24 kali dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Tanggal	Agenda
5 Januari 2016	• Strategi Perbaikan Kualitas Kredit
20 Januari 2016	• Strategi Perbaikan Kualitas Kredit
23 Februari 2016	• Kebijakan Manajemen Perkreditan
7 Maret 2016	• *Crash Program NPL* • Usulan Kewenangan Memutus Kredit
24 Maret 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
19 Mei 2016	• KPR Sektor Informal • Evaluasi Proses Bisnis Kredit
24 Mei 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit • Strategi Pertumbuhan Kredit

Tanggal	Agenda
21 Juni 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit • *Write Off* (WO)
19 Juil 2016	• Portal BTN *Property* • Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
5 September 2016	• Portal BTN *Property* • Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
26 September 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
3 Oktober 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
4 Oktober 2016	• Struktur Organisasi Komite Kredit Produk dan Kebijakan Kredit
17 Oktober 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
24 Oktober 2016	• Kredit Konsumer • Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
1 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
3 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
15 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
16 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
21 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
22 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
29 November 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
7 Desember 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit
13 Desember 2016	• Laporan dan Evaluasi Kualitas Kredit

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan asset and liabilities dan pengambilan keputusan dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka *Asset Liability Management* (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan *Asset and Liability Committee* (ALCO) terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap diatur dalam Peraturan Direksi No.2/PD/TRSD/2015 tentang Asset Liability Committe (ALCO) Bank tanggal 5 Februari 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Asset and Liability Management Committee (ALCO)	
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Direktur yang mensupervisi Treasury
Anggota Tetap	1. Direktur yang mensupervisi Bidang Bisnis 2. Seluruh Kepala Divisi Bidang Bisnis 3. Kepala Divisi Finance and Accounting 4. Kepala Divisi Strategy and Performance Management 5. Kepala Divisi Consumer Collection and Remedial 6. Kepaka Divisi Risk Management 7. Kepala Divisi Compliance 8. Koordinator Change Management Office
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan dan Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Asset and Liability Committee (ALCO) bertugas menyusun strategi pengelolaan asset dan liability dalam rangka memaksimalkan *profitabilitas* Bank dan menjaga struktur neraca Perseroan melalui manajemen aktiva produktif, pengurangan biaya dana dan pengelolaan risiko suku serta risiko likuiditas.

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2016, *Asset and Liability Committee* (ALCO) telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 12 kali dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Tanggal	Agenda
19 Januari 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
18 Februari 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
11 Maret 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
22 April 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
19 Mei 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
22 Juni 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
26 Juli 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
19 Agustus 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
16 September 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
13 Oktober 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
16 November 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)
14 Desember 2016	• *Asset and Liability Committee* (ALCO)

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI

Komite Pengarah Teknologi Infomasi berfungsi sebagai wadah analisa dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang Teknologi Informasi..

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Infomasi terdiri dari anggota tetap dan anggotan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 05/PD/ICTD/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 18/PD/CMO/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committe) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, susunan struktur Organisasi Komite Pengarah Teknologi Infomasi adalah sebagai berikut:

Komite Pengarah Teknologi Infomasi	
Ketua	Information and Technology Director (ex-officio) Dalam hal Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi maka Direktur Utama bertindak sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi
Sekretaris	Informastion and Communication Technology Division Head (ex-officio)

Komite Pengarah Teknologi Infomasi	
Anggota Tetap	1. Managing Direkctor Risk, Compliance and Strategy (ex-officio) 2. Managing Director Retail Funding and Distribution (ex-officio) 3. Managing Direktor Mortgage and Consumer Lending (ex-officio) 4. Risk Management Division Head (ex-officio) 5. Operation and Business Support Division Head (ex-officio) 6. Sharia Division Head (ex-officio) 7. Regional Office I Head (ex-officio)
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya dan Divisi yang diundang berdasarkan keperluan

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Infomasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut.
   A. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Roadmap terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
   B. Sumber data yang dibutuhkan;
   C. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core banking application*, *server* production dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.

9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur.
10. Komite bertanggungjawab atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud yang selanjutkan akan diputus melalui mekanisme rapat Direksi

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Infomasi telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kalidengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pengarah Teknologi Infomasi

Tanggal	Agenda
10 Agustus 2016	• Penyusunan RSTIK 2016-2018 • *Project Charter*

KOMITE PERSONALIA

Komite Personalia berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Bank dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Personalia terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang tetapkan dalam PD No.04/PD/HCD/2014 tentang Komite Personalia, dengan susunan keanggotaan Komite sebagai berikut:

Komite Personalia	
Koordinator	Direktur Utama
Sekretaris	HCD Head
Anggota Tatap	Direktur yang melakukan supervisi HCD dan Direksi lain terkait SDM pada unit yang supervisinya sedang dibahas
Anggota Tidak Tetap	Division Head lain yang diundang berdasarkan keperluan
Supporting Group	Department Head HCD bersama dengan Unit Human Capital Management pada HCD

Keanggotaan *Divison Head* dalam Komite Personalia Pusat tidak dapat diwakilkan sehingga dalam hal yang bersangkutan berhalangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Komite Personalia, maka perannya tidak dapat didelegasikan kepada pemangku jabatan lain di unit kerjanya.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Personalia adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program SDM agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan SDM.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite Personalia, Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang independent bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite Personalia, Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/penugasan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait *Human Capital* di luar Nomor 1 s/d Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/ kebijakan manajemen *Human Capital*.

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2016, Komite Personalia telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 14 kali dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pengarah Teknologi Infomasi

Tanggal	Agenda
26 Januari 2016	• Penilaian Kinerja 2016
2 Februari 2016	• Penilaian Kinerja 2016 • Kredit Pegawai
3 Februari 2016	• Penilaian Kinerja 2016
3 Februari 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)

Tanggal	Agenda
18 Februari 2016	• Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN
1 Maret 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
16 Maret 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
12 Mei 2016	• Laporan Dana Pensiun Perseroan
7 Juni 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
7 Juni 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
29 Juni 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
23 Agustus 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
12 Oktober 2016	• Pembahasan tentang *Human Capital Division* (HCD)
17 Oktober 2016	• Remunerasi berbasis POJK No.45/POJK.03/2015

KOMITE PRODUK

Komite Produk berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan produk Perseroan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Produk terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No.20/PD/CMO/2011 tentang Komite Produk Perseroan, dengan keanggotaan komite sebagai berikut:

Komite Produk	
Koordinator	Direktur yang melakukan supervisi Divisi pengelola pengembangan produk/jasa Bank
Sekretaris	Divisi pengelola pengembangan produk dan jasa Perseroan
Anggota Tatap	1. Information Technology and Communication Division Head 2. Legal Division Head 3. Compliance Division Head 4. Risk Management Division Head
Anggota Tidak Tetap	Direktur lainnya dan Divisi lain yang diundang berdasarkan keperluan

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Produk adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memastikan kesesuaian antara pengembangan produk dengan kebutuhan serta tujuan Perseroan;
2. Melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perkembangan produk dan penerapan dalam jangka panjang;
3. Menentukan kebijakan-kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan pengembangan produk;
4. Memantau dan membahas :
   A. Kemajuan dalam pelaksanaan produk sesuai dengan RKAP yang terkait dengan pengembangan produk.
   B. Rencana-rencana pengembangan dan penerapan produk
   C. Masalah-masalah strategis yang ditemui dalam pengembangan dan penerapan produk
   D. Teknologi dan standar yang perlu dipertimbangkan, kemungkinan-kemungkinan penerapannya di lingkungan Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS

Sepanjang tahun 2016, Komite Produk telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan rapat sebanyak 5 kali dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Produk

Tanggal	Agenda
2 Agustus 2016	• *Tax Amnesty* • *Digital Loan Document*
30 Agustus 2016	• Rencana Kegiatan Peluncuran Hari Menabung Nasional • *Progress Digital Banking*
6 September 2016	• Proses Bisnis KPR Pendapatan Tidak Tetap
14 November 2016	• KPR Mikro
19 Desember 2016	• KPR Subsidi 2017 • Profil Produk BTN

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sejalan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menjadi rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperhatikan keberagaman komposisi. Kebijakan keberagaman yang ditetapkan dalam *Board Manual* Perseroan merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang optimal. Selain itu, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman juga menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi komposisi yang optimal pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian juga dengan komposisi Direksi saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi anggota Direksi Perseroan.

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris Perseroan per Posisi 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
I Wayan Agus Mertayasa	Komisaris Utama/ Independen	69 tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1973	- General Manager di Bank Bumi Daya Los Angeles Agency (USA) - Chief Executive di Bumi Daya Finance Hongkong - General Manager di Bank Bumi Daya New York - Direktur Bank Pembangunan Indonesia - EVP /& Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Chairman Non Executive Director, Bank Mandiri (Europe) Limited, London UK	Keuangan Perbankan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Kamaruddin Sjam	Komisaris Independen	69 tahun	Laki-laki	Magister Manajemen (MM), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta (1997)	- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat - Direktur Pengawasan Instansi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Komisaris Utama PT Lanang Bersatu.	Keahlian audit keuangan,
Arie Coerniadi	Komisaris Independen	49 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1991)	- Vice President di NISP Sekuritas Group - Head Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Nasional - Vice President di Kustodian Sentral Efek Indonesia - Chief Finance Officer di Sarana Global Indonesia	Keahlian keuangan
Lucky Fathul Aziz H	Komisaris*	60 tahun	Laki-laki	- Master of Art (MA) bidang Development Economics dari Boston University, Massachusetts, USA (1985) dan - Master of Science (MS) Universitas Hasanudd, Makassar (1991)	- Direktur Utama Dana Pensiun OJK - Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B di OJK - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI di Bandung - Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York	Keahlian Keuangan Ekonomi Makro Strategi Manajemen,
Sumiyati	Komisaris	55 tahun	Perempuan	- Master of Financial - Management (M.F.M), Queensland University, Australia	- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan - Komisaris PT Jiwasraya (Persero), - Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Audit Keuangan Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Maurin Sitorus	Komisaris	60 tahun	Laki-laki	Ph.D. in Monetary and International Economics, *University of Kentucky*, Lexington, USA	- Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum - Sekretaris Ditjen Pengelolaan Utang, - Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI.	Hukum
Iman Sugema	Komisaris**	52 tahun	Laki-laki	Ph.D in economics Department of Economics, Research School of Pacificand Asian Studies, The Australian National University.	- KomisarisUtama/ Independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Ekonomi Senior di Megawati Institute, - Lektor Fakultas Ekonomi & Manajemen, IPB.	Agrobisnis Ekonomi

Tabel Keberagaman Direksi Perseroan per Posisi 31 Desember 2016

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Maryono	Direktur Utama	61 tahun	Laki-laki	- Magister (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1998)	- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2008) - Group Head Jakarta Network Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Direktur Utama Bank Mutiara (2008-2012) - Presiden Regional WSBI (World Saving Bank Institute) Asia Pasifik.	- Perbankan - Leadership - Strategic Management
Mansyur S. Nasution	Managing Director Mortgage and Consumer Lending	58 tahun	Laki-laki	- Master of Science bidang Resources Economics, Colorado State University (1991)	- EVP Coordinator–Consumer Finance, Bank Mandiri (2008-2012 - Group Head di Bank Mandiri (2005- 2008)	- Strategic Management - Corporate Governance - Risk and Compliance
Iman Nugroho Soeko	Managing Director *Finance* and Treasury (CFO)	61 tahun	Laki-laki	- Master of Social - Science Univ. of Birmingham, Inggris (1989)	- Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Departement (2006) Bank Mandiri - Group Head IBCMS Group Bank Mandiri (2009–2010) - Chief Executive Bank Mandiri (Europe) Ltd. (2010–2013).	- Treasury - Accounting and Corporate *Finance* - Corporate Banking
Adi Setianto	Managing Director Information Technology,	55 tahun	Laki-laki	- Master of Business Administration (MBA), Drexel University, Pennsylvania, USA (1992)	- Direktur Jaringan dan Layanan (2014-2015) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Direktur Treasury and Financial Institution PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010–2014)	- Operation - Information and Communication Technology
Sulis Usdoko	Managing Director Collection, Asset Management and Legal	56 tahun	Laki-laki	- Magister Manajemen Universitas Brawijaya (2003)	- Retail Funding and Services Division Head Perseroan (2013–2015)	- Collection and Asset Management - Mortgage Banking - Consumer Banking
Oni Febriarto R	Managing Director Commercial Lending	46 tahun	Laki-laki	- Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM (1996)	- Small andMedium Lending Division Head Perseroan (2013–2015)	- Sharia Banking - Commercial Lending - Mortgage Banking

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Handayani	Direktur	51 tahun	Perempuan	- Magister Manajemen, Universitas Padjajaran Bandung (2001)	- Director of Commercial PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - Director Marketing & Alternate Distribution AXA Mandiri - Senior VP Group Head, Consumer Cards Group Bank Mandiri	- Marketing - Consumer Banking - Quality Service
Catur Budi Harto	Direktur	52 tahun	Laki-laki	- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, (2002)	- Senior Executive Vice President Jaringan dan Layanan Bank BRI - Kepala Divisi Mass Banking Bank BRI - Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Banjarmasin, Bank BRI	- Operation - Network and Electronic Channel

KEBIJAKAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kebijakan suksesi Direksi diantaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Adapun suksesi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisari Emiten atau Perusahaan Publik.

Penunjukan calon anggota Direksi dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu penetapan Bakal Calon, penjaringan dan pengujian kompetensi. Bakal Calon Direksi harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Bakal Calon Direksi Perseroan dapat berasal dari Direksi BUMN, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, talenta BUMN yang berprestasi, talenta Kementerian BUMN, pejabat BUMN lain dan sumber lainnya. Bakal Calon Direksi Perseroan diusulkan melalui Dewan Komisaris, setelah dilakukan penilaian dengan *assessment scoring system* yang dimiliki Perseroan termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi.

Bakal Calon Anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan menjadi Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh Lembaga Profesional. Pengangkatan kembali Anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN dapat dilakukan tanpa UKK apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Untuk mendapatkan kandidat terbaik, Perseroan selalu mengedepankan aspek profesionalisme dan *governance*, baik untuk kandidat yang berasal dari internal Perseroan (*talent management system*) maupun dari pihak eksternal. Kandidat yang terpilih melalui mekanisme tersebut kemudian diajukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk dimintai persetujuannya, dan kemudian diajukan kepada OJK untuk dinilai kepatutan dan kelayakannya.

Demikian juga yang terjadi dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris.

PENERAPAN TATA KELOLA REMUNERASI PERSEROAN

PROSEDUR DAN MEKANISME PENETAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Dalam rangka mendorong implementasi prudential risk taking dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Selain itu, Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan standar internasional mengenai transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Prosedur Pengusulan Sampai Dengan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015. Kebijakan tersebut telah mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Adapun cakupan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Perseroan antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat *variable*, *material risk takers*.

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut.

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan serta Tantiem/Insentif kerja, dimana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term insentif*/ LTI).

Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Kebijakan Remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang bersangkutan.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong material risk takers (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bank menerapkan implementasi *Malus* dalam penerapan remunerasi bersifat *variable*, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
   - Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi bank
   - Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan

2) Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Menyebabkan kerusakan reputasi bank yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial bank maupun kesempatan bisnis bank.
   - Menyebabkan kerugian keuangan bank yang signifikan.
   - Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
   - Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
   - Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan dan prosedur bank secara sengaja.
   - Menyebakan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
   - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tiadk disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
   - Melakukan pengungkapan informasi rahasia bank kepada pihak eksternal secara sengaja.
   - Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

1) **Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja**

   Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.

2) **Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu**

   Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran

kinerja yang meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing.

3) **Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi**

Metode kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparation*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan.

Sedangkan kenaikan gaji pokok berkala Pegawai Tetap setiap tahun ditetapkan sesuai prosentase yang tercantum dalam matrik kenaikan gaji pokok yang akan ditinjau setiap tahun. Besarnya prosentase untuk menghitung kenaikan gaji pokok Pegawai Tetap yang terdapat dalam matriks kenaikan Gaji Pokok dapat berubah setiap tahunnya, perubahan tersebut didasarkan atas hasil Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan posisi *comparatio* seluruh Pegawai Tetap, *survey* pasar (pasar eksternal) dan kemampuan Perseroan.

Konsultan Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi

Nama Konsultan : PT Mercer Indonesia

Lingkup Pekerjaan :

- Melakukan *review* terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang berlaku saat ini;
- Melakukan analisa *GAP* terhadap kebijakan remunerasi internal Perseroan dengan remunerasi yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015;
- Melakukan *review* dan menetapkan jabatan di Perseroan yang termasuk dalam kategori *Material Risk taker* (MRT);
- Menetapkan skema remunerasi berbasi POJK No. 45/POJK.03/2015 kepada pihak yang jabatannya tergolong MRT bedasarkan kajian dan best practice yang berlaku di perbankan;
- Menetapkan skeam penangguhan pemberian remunerasi (*deferral*) terhadap pihak-pihak yang tergolong MRT;
- Menetapkan kebijakan *Malus* dan *Clawback*;
- Menghitung dampak biaya yang ditimbulkan dari implementasi remunerasi berbasis POJK No.45/POJK.03/2015;
- Mengkomunikasikan dengan Dewan Komisaris dan Direksi (Komite Remunerasi) terkait kebijakan remunerasi internal Perseroan yang telah disusun berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Untuk presentasi penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah 50% dari Direktur Utama untuk Komisaris Utama dan 45% dari Direktur Utama untuk anggota Komisaris.

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Mencakup Struktur Remunerasi dan Rincian Jumlah Nominal

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah:

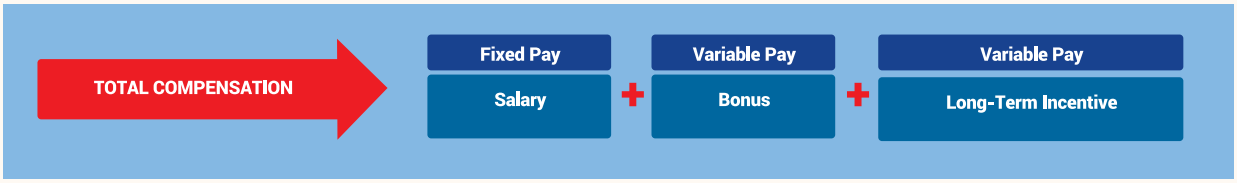

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No.57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat tetap dan *variable*, yaitu:

a) Remunerasi yang bersifat tetap
   Diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk tunai.
b) Remunerasi yang bersifat tidak tetap
   Diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2015, serta menetapkan gaji/*honorarium*, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2016)

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam tahun 2016	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi		
Honorarium	15***	6.777
Tunjangan rutin *	15***	4.429
Tantiem	15***	9.579
**Fasilitas lain dalam bentuk natura ** **		
Fasilitas dapat dimiliki	15***	-
Fasilitas tidak dapat dimiliki	15***	1.264
Total		**22.049**

Keterangan:
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
*) Tunjangan cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi santunan Purna Jabatan;
**) Komisaris mendapatkan fasilitas transportasi, komunikasi.
***) Dewan Komisaris terdiri dari beberapa periode efektif diuraikan sebagai berikut:
- Dewan Komisaris yang masih menjabat efektif sebanyak 6 orang,
- Dewan Komisaris yang belum efektif sebanyak 1 orang;
- Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2015 sebanyak 4 orang;
- Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2015 sebanyak 2 orang;
- Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2016 sebanyak 1 orang;
- Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2016 sebanyak 1 orang.

Tabel Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam tahun 2016	
	Direksi	
	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi		
Gaji	12***	15.381
Tunjangan rutin *	12***	11.751
Tantiem	12***	25.636
Fasilitas lain dalam bentuk natura**		
Fasilitas dapat dimiliki	12***	2.630
Fasilitas tidak dapat dimiliki	12***	3.896
TOTAL		**59.294**

Keterangan:
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
*) Tunjangan cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi santunan Purna Jabatan;
**) Direksi mendapatkan fasilitas transportasi, komunikasi, perumahan.
***) Direksi terdiri dari beberapa periode efektif yang diuraikan sebagai berikut:
- Direksi yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Tahunan tanggal 24 Maret 2015 sebanyak 2 orang;
- Direksi yang berakhir masa jabatan efektifnya sejak penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2015 sebanyak 2 orang;
- 2 dari 8 Direksi yang efektif menjabat, baru diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 12 April 2016 dan efektif pada tanggal 16 September 2016

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai*	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	12	25.365	15	9.579	9.380	297.008

Catatan:
*)terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi dan Individual Insentif

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Per Orang Dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
> Rp2 miliar	10	4
> Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	10	10
> Rp500 juta s.d Rp1 miliar	2	1
< Rp500 juta	0	4

keterangan: *) yang diterima secara tunai

Hubungan antara Remunerasi dengan Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam PD No.03/PD/HDC/2015 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris menyebutkan bahwa jenis remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah tantiem/insentif kinerja, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada keduanya apabila terjadi peningkatan kinerja perusahaan dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan

Kebijakan dalam pemberian *shares option*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan*/MESOP).

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak;

Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota *Komite Audit*.

Jumlah *shares option* yang diberikan

Tabel Kepemilikan Saham Berdasarkan *shares option*

MESOP Tahap I

No	Keterangan/Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
				Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	**Komisaris**	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2		Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3		Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4		Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5		Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6		Sumiyati	-	-	-	-	-
1	**Direksi**	Maryono	3.991.000	1.354.000	1.354.000	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
2		Irman Alvian Zahiruddin	-	-	-	-	-

MESOP Tahap I

No	Keterangan/Nama	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-				
7	Sulis Usdoko	-	138.500	138.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
8	Oni Febriarto R.	-	65.000	65.000	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
1	**Pejabat Eksekutif**	7.430.600	6.925.500	6.925.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014
2	**Pegawai**	-	136.751.500	136.751.500	855,00	Feb 2011 - Ags 2014

MESOP Tahap II

No	Keterangan/Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
				Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	**Komisaris**	Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
2		Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
3		Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
4		Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
5		Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
6		Sumiyati	-	-	-	-	-
1	**Direksi**	Maryono					
2		Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	855,500	855,500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
3		Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-

MESOP Tahap II

No	Keterangan/Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
				Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
4		Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5		Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6		Adi Setianto	-				
7		Sulis Usdoko	-	109.000	109.000	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
8		Oni Febriarto R.	-	51.000	51.000	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
1	**Pejabat Eksekutif**		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
2	**Pegawai**		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015

MESOP Tahap III

No	Keterangan/Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
				Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	**Komisaris**	I Wayan Agus Mertayasa	-	-	-	-	-
2		Arie Coerniadi	-	-	-	-	-
3		Kamaruddin Sjam	-	-	-	-	-
4		Lucky Fathul Aziz Hadibrata	-	-	-	-	-
5		Catherinawati Hadiman	-	-	-	-	-
6		Fajar Harry Sampurno	-	-	-	-	-
7		Sumiyati	-	-	-	-	-
8		Imam Sugena	-	-	-	-	-
1	**Direksi**	Maryono					
2		Irman Alvian Zahiruddin	3.991.000	828,500	828,500	1.098,36	Feb 2013 - Ags 2016

MESOP Tahap III

No	Keterangan/Nama	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
3	Mansyur Syamsuri Nasution	-	-	-	-	-
4	Iman Nugroho Soeko	-	-	-	-	-
5	Sis Apik Wijayanto	-	-	-	-	-
6	Adi Setianto	-				
7	Sulis Usdoko	-	108.500	108.500	1.098,36	Feb 2013 - Ags 2016
8	Oni Febriarto R.	-	54.500	54.500	1.098,36	Feb 2013 - Ags 2016
9	Handayani	-	-	-	-	-
10	Catur Budi Harto	-	-	-	-	-
1	**Pejabat Eksekutif**	7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2013 - Ags 2016
2	**Pegawai**	-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, Perseroan berupaya agar tidak terjadi *gap* yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2016

URAIAN	Rasio 2014	Rasio 2015	Rasio 2016
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah .	19,82 : 1	17,15 ; 1	18.85 ; 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,1 : 1	1.11 ; 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,1 : 1	1.11 ; 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,86 : 1	2 : 1	2,70 ; 1

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;

No.	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
1.	Di atas Rp1 miliar	0
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 milliar	9
3.	Rp500 juta ke bawah	7

Jumlah Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Remunerasi Yang Bersifat *Variable* yang Ditangguhkan	
Tunai	Saham/instrument yang berbasis saham
Nihil	Nihil

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun

Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun belum diimplementasikan sehubungan Perseroan baru memiliki kebijakan tata kelola remunerasi bank sesuai POJK No.45 tahun 2015 pada akhir Desember 2016.

Tabel Informasi Kuantitatif Remunerasi Lainnya

Belum terdapat informasi kuantitatif remunerasi lainnya mengingat Kebijakan remunerasi bagi MRT belum diimplementasikan dan peraturan remunerasi sesuai POJK 45 terbit pada akhir Desember 2016.

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Perseroan belum memiliki kebijakan pemberian remunerasi yang bersifat *variable* dan tanpa syarat karena pemberian remunerasi yang bersifat *variable* diberikan melalui persyaratan pengukuran kinerja berdasarkan kebijakan Perseroan tentang sistem manajemen kinerja.

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

PELAKSAAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UUS PERSEROAN TIDAK HANYA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGELOLAAN PERSEROAN YANG SESUAI DENGAN LIMA PRINSIP DASAR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH, AKAN TETAPI JUGA DI TUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN YANG LEBIH LUAS. KEPETINGAN INI ANTARA LAIN ADALAH UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN *STAKEHOLDERS* DAN MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA NILAI-NILAI ETIKA YANG BERLAKU SECARA UMUM PADA PERSEROAN.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar. yaitu:

1. Transparansi (*transparency*)
   Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan *relevan* serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*)
   Kejelasan fungsi dan paksanaan petanggung jawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
   Kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsi-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*)
   Memiliki kompetensi, mampu bentindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairness*)
   Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksaaan *Good Corporate Governance* UUS Perseroan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga di tujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepetingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

STRUKTUR UNIT USAHA SYARIAH

Pengelolaan UUS Perseroan diimplementasikan dalam struktur organisasi Perseroan bentuk *Sharia Division*, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

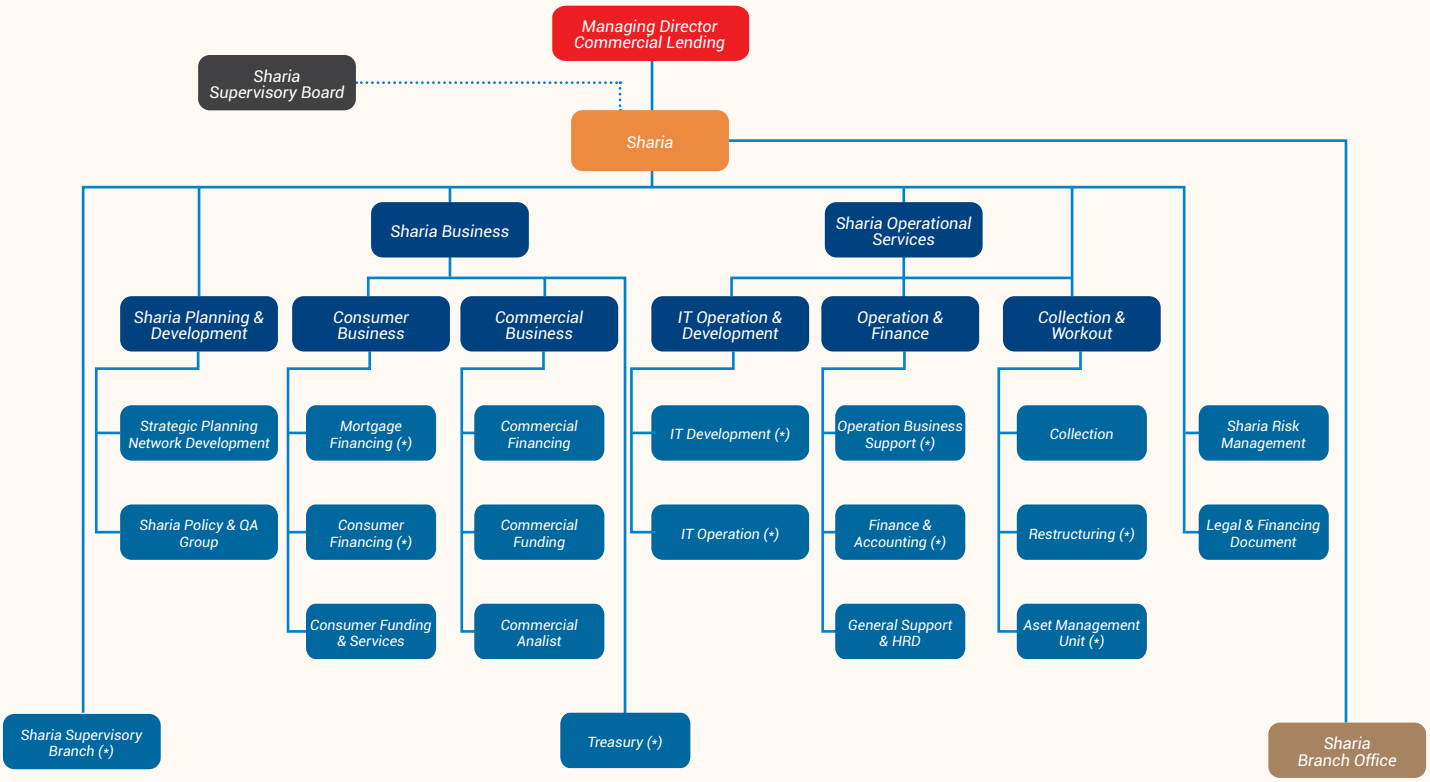

DIREKTUR BIDANG UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Peranan Direktur Bidang UUS

Direktur bidang UUS bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha UUS Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip GCG antara lain dilakukan melalui perencanaan manajemen risiko syariah, menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, temuan *audit internal* dan *auditor* eksternal.

Direktur bidang UUS Perseroan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Pasal 44 menyebutkan bahwa Direktur bidang UUS wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS. Sedangkan Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa Calon Direktur UUS wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

Tanggung jawab Direktur UUS fokus pada pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan, Direktur bidang UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah diantaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan
4. Memastikan fungsi kesekertariatan dari Dewan Pengawas Syariah
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Perseroan dalam menjalankan usaha UUS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah. Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Perseroan harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Ketentuan mengenai DPS Perseroan antara lain diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009

Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Ketetapan Direksi Nomor 02/KD/DIR/SPMD/2015 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.
- Anggaran Dasar Perseroan

PERSYARATAN DPS

Persyaratan DPS berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013, diantaranya adalah :

a. integritas, yang paling kurang mencakup memiliki akhlak dan moral yang baik dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fitand proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup tidak termasuk dalam daftar kredit macet tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DPS

Proses pengangkatan DPS berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013, diantaranya adalah :

a. Calon anggota DPS harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
b. Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
c. Calon Anggota DPS yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diangkat oleh perseroan dalam RUPS;
d. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS dilaporkan oleh UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan

JUMLAH DAN KOMPOSISI DPS

DPS Perseroan berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 2 (dua) orang anggota DPS, dengan demikian komposisi DSP UUS Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Drs. H. A. Nazri Adlani	**Ketua**
Dr.H.Mohamad Hidayat, MBA, MH	**Anggota**
Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	**Anggota**

PROFIL DPS

Profil ringkas Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dijelaskan pada bab Profil Dewan Pengawas Syariah dalam laporan tahunan ini.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya DPS mengacu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain adalah:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sepanjang tahun 2016, DPS UUS Perseroan telah mengeluarkan pendapat sebanyak sepuluh (10) kali yaitu terkait pelaksanaan kepatuhan syariah dengan daftar pendapat, berdasarkan hasil notula rapat DPS bersama UUS Perseroan selama 2016, sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal	Kegiatan Operasional Bank
1	7 Januari 2016	Peninjauan kembali pengenaan denda (ta'zir dan ta'widh) dalam PKS dengan PT Anugrah Laskar Pratama	Penyaluran Dana
2	17 Februari 2016	Pembahasan Kebijakan Umum Syariah Terkait Tata Kelola Perusahaan dari Risk Manajemen Division agar sesuai dengan prinsip syariah	Supporting
3	3 Maret 2016	Pembahasan Produk Giro BTN iB dengan Program Pengembangan Operasional dan *Virtual Account* UUS BTN, baik akad yang digunakan dan mekanisme pelaksanaan.	Penghimpunan Dana
4	23 Maret 2016	Pembahasan mengenai Pembiayaan Lunak untuk Pegawai BTN dan Draft Akad Pembiayaan Konstruksi BTN iB	Penyaluran Dana
5	20 April 2016	Fitur dan layanan dari Tabungan Emas BTN iB dan Tabungan BTN Perumahan iB	Penghimpunan Dana
6	27 April 2016	Pembahasan Pembiayaan Kavling Makam Al-Azhar Memorial Garden dimana kesimpulannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah	Penyaluran Dana
7	29 Juni 2016	Finalisasi Opini DPS mengenai produk Tabungan BTN Emas iB	Penghimpunan Dana

No	Tanggal	Perihal	Kegiatan Operasional Bank
8	28 September 2016	Pembahasan terkait Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	Penyaluran Dana
9	6 Oktober 2016	1. Pola Pengelolaan Jasa Penagihan dan Klarifikasi atas Permasalahan Nasabah Jasa Penagihan 2. Pelaksanaan *Income Smoothing* bagi Nasabah Dana Pihak Ketiga 3. Terkait penerimaan *fee* dari kerjasama dengan mitra bisnis UUS Perseroan.	Penyaluran Dana, Penghimpunan Dana, Operasional penagihan pembiayaan bermasalah.
10	9 November 2016	1. Penggunaaan Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Penghimpunan Dana Investasi Terikat ; 2. Penambahan jenis akad dan pemberian fitur tambahan *line facility* pada pembiayaan Investasi BTN iB; 3. Rencana Implementasi *Income Smoothing* atas Bagi Hasil Nasabah Dana Pihak Ketiga	Penyaluran Dana, Penghimpunan Dana

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah

DPS Perseroan telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Perseoan dilakukan terhadap produk yang telah ada, sebagai berikut:

No	AKTIVITAS PENGAWASAN DPS	MEKANISME PENGAWASAN	FREKUENSI
1	Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas Pedoman Operasional dan produk yang dikeluarkan Bank	Memberikan opini atas draft Kebijakan dan SOP produk baru, melalui rapat DPS	Optional tergantung pengajuan produk dari UUS Realisasi 2016: 2 produk (Tabungan BTN Emas iB dan Pembiayaan Properti BTN iB)
2	Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Memberikan opini atas draft kebijakan dan SOP produk baru melalui rapat DPS	Optional tergantung pengajuan produk dari UUS Realisasi 2016: 2 Produk (Tabungan BTN Emas iB dan Pembiayaan Properti BTN iB)
3	Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank	Melakukan uji petik pelaksanaan prisnsip syariah di KCS dan menyampaikan Laporan Hasil Uji Petik kepada Direktur Bidang Syariah dan Direktur Bidang Kepatuhan.	Minimal 6 KCS, realisasi sampai dengan Desember 2016: 8 KCS

No	AKTIVITAS PENGAWASAN DPS	MEKANISME PENGAWASAN	FREKUENSI
4	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.	Melakukan rapat rutin DPS	Jadwal rapat setahun 24 kali, realisasi sampai dengan Desember 2016, 19 kali.
5	Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada regulator (dhi. OJK)	Menyusun Laporan Pengawasan DPS Semesteran kepada OJK yang ditembuskan kepada Direktur Bidang Syariah dan Direktur Bidang Kepatuhan.	2 kali setahun, realisasi 2016 1 kali (Laporan Semester 2 tahun 2015 dan laporan semester 1 tahun 2016)

RAPAT DPS

Kebijakan Rapat DPS

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Rapat DPS mengacu Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam pelaksanaanya Rapat DPS dijadwalkan dilakukan secara berkala 2 kali pada dalam sebulan. Seluruh keputusan dalam rapat DPS Perseroan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS Perseroan diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Perseroan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang Tahun 2015, DPS telah melaksanakan 19 (sembilan belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran DPS, sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
1	Drs. H. A. Nazri Adlani	19	18
2	Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MBL	19	19
3	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ. FIIS. QIP	19	18

Rapat DPS ini dilakukan sebagai salah satu media implementasi fungsi dan tanggung jawab DPS untuk pemberian opini syariah terhadap produk baru, untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DPS

Perseroan senantiasa melakukan pengembangan kompetensi bagi seluruh jajarannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPS, sepanjang tahun 2016, anggota DPS Perseroan telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

Nama	Jabatan	Program Pengembangan
Drs. H. Ahmad Nazri Adlani	Ketua	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Jakarta, tanggal 8 - 9 Desember 2016
Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MBL	Anggota	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Jakarta, tanggal 8 - 9 Desember 2016
Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	Anggota	Ijtima Samawi (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN) di Jakarta, tanggal 8 - 9 Desember 2016

RANGKAP JABATAN DPS

Rincian rangkap jabatan anggota DPS adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rangkap Jabatan
1	Ketua, Drs. H. Ahmad Nazri Adlani	1. DPS UUS Perseroan 2. DPS Mega *Finance* 3. DPS UUS Asuransi Sinar Mas
2	Anggota, Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MBL	1. DPS UUS Perseroan 2. DPS Bank Syariah Mandiri 3. DPS PT. Allianz Life Indonesia 4. DPS UUS Bringin Life
3	Anggota, Ir. H Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	1. DPS UUS Perseroan 2. DPS Panin Life Syariah 3. DPS Asuransi Central Asia Raya Syariah 4. DPS Asuransi Nasional Re Syariah

STRATEGI DAN KEBIJAKAN UUS TAHUN 2016

Dalam rangka menjaga stabilitas kinerja keuangan UUS, Perseroan menerapkan beberapa pengembangan strategi bisnis Syariah, yaitu :

1. Mempertimbangkan faktor historis, kompetensi yang dimiliki, potensi bisnis yang ada, regulasi, serta peran Perseroan selama ini dalam pembangunan nasional, maka UUS Perseroan sebagai Unit Usaha Syariah Bank yang fokus perumahan memiliki *goal* pada tahun 2020 sebagai *menjadi Bank Syariah yang terdepan dalam produk dan layanan industry perumahan dengan jaringan ritel berbasis teknologi* dengan program transformasi sebagai berikut :

Roadmap transformasi UUS Perseroan

2. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank

   2.1 Transformasi Fase 1 Persiapan *Spin Off* dan Intensifikasi Bisnis Perumahan (2016 – 2018) adalah sebagai berikut:

   a. Pembentukan tim yang *fully dedicated* untuk mempersiapkan langkah-langkah menujun *spin off* dengan pendampingan konsultan
   b. *Complete offering* untuk *end-to-end value chain* perumahan
   c. Penguatan strategi CASA, *cross-selling* dan aktivasi kerja sama institusi
   d. Intensifikasi jaringan melalui KLS dengan penempatan SDI khusus syariah
   e. *Spin off* menjadi BUS, dengan kesiapan permodalan, *risk management*, dan *legal compliance*
   f. Restrukturisasi organisasi dan SDI, transformasi budaya kerja menuju BUS
   g. Penguatan dengan melakukan *review* atas *business process*, SOP & IT
   h. Mirrorring kelengkapan fitur produk dan layanan, operasional dan infrastruktur bank induk
   i. *Big data management* sebagai *competitive advantage*

2.2 Transformasi Fase 2 Percepatan pertumbuhan Melalui Jaringan Ritel Berbasis Teknologi (2018 – 2020) adalah sebagai berikut:

a. Produk dan layanan berbasis teknologi untuk segmen konsumer maupun komersial
b. Peningkatan *coverage* nasional dan produktivitas cabang
c. Peningkatan modal melalui *strategic investor* atau penerbitan instrumen pasar modal Syariah
d. *Capacity & capability building* SDI
e. Peningkatan aplikasi teknologi (IT, MIS, digitalisasi) untuk produk dan layanan *customized*
f. Penguatan jaringan alternatif, *branchless banking* dan *e-channel*

Selain itu, UUS Perseroan juga mimiliki kebijakan-kebijakan UUS yang mengatur bisnis UUS Perseroan yaitu :

1. Pemberian Nisbah khusus untuk Nasabah Giro Perseroan iB dengan nominal tertentu No. 30/M/SHAD/CMBD/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.
2. Pemberian Izin Prinsip Pelaksanaan Petunjuk Teknis Administrasi (Pengelolaan Dokumen) Pembiayaan Komersial) No. 75/M/SHAD/CMBD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
3. Pemberian Izin Prinsip Pelaksanaan Petunjuk Teknis *Monitoring* Usaha, Agunan dan Legalitas Pembiayaan Komersial No. 104/M/SHAD/CMBD/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
4. Perubahan *Design* Cek dan *Bilyet* Giro untuk meningkatkan keamanan penarikan giro melalui Cek dan *Bilyet* Giro No. 174/M/SHAD/CMBD/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.
5. Pemberian Reward Pencapaian Target Dana Pihak Ketiga Tahun 2016 No. 2278/M/SHAD/CNBD/III/2016 tanggal 21 Juli 2016.
6. Pemberian wewenang memutus margin pembiayaan No. 262/M/SHAD/CMBD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
7. Persetujuan wewenang Memutus Giro PPO (Program Pengembangan Operasional) BTN iB No. 309/M/SHAD/FOPD/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
8. Pelaksanaan KPR BTN Sejahtera iB tahun 2016 No. 23/M/SHAD/CNBD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
9. Kebijakan Top Up untuk Nasabah Eksisting KPR BTN iB No. 116/M/SHAD/CNBD/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
10. Kebijakan Pembelian Mobil Second Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB No. 652/M/SHAD/CNBD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
11. Kebijakan Margin Promo KPR BTN iB khusus karyawan BUMN No. 1704/M/SHAD/CNBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
12. Kebijakan *Fee* Marketing KPR BTN iB No. 1232/M/SHAD/CNBD/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
13. Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga Ritel per Semester No. 2043/M/SHAD/CNBD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
14. Pemberian Incentive Program untuk Peningkatan Dana Pihak Ketiga Ritel per Semester No. 1691/M/SHAD/CNBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

DAFTAR KONSULTAN DAN PENASIHAT UUS

Sepanjang Tahun 2016 pada UUS Perseroan tidak melakukan kerjasama dengan konsultan

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Sumber dana pendapatan non halal Perseroan untuk tahun 2016 berasal dari pendapatan bunga atas rekening bank di Bank Konvensional uraian tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut:

No	Keterangan	Dana
1	Saldo Awal Periode (Posisi Januari 2016)	5
2	Sumber Dana :	
	- Pend. Non halal	245
	- Lain-lain	
	Jumlah	245
3	Penggunaan	
	- Penyaluran Pinj. Qardhul Hasan	
	- Penyaluran Lainnya untuk Kepentingan Umum	239
	Jumlah	239
Saldo Akhir Periode (Desember 2016)		11

PERMASALAHAN HUKUM UUS

Sepanjang tahun 2015, Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Perseroan dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	-
Dalam proses penyelesaian	8	-
Jumlah	13	-

LAPORAN PENYIMPANGAN INTERNAL UUS

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS Perseroan, selalu mengutamakan Musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Perseroan dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

LAPORAN PENYIMPANGAN INTERNAL UUS

Dalam rangka menguragi penyimpangan internal (Internal Fraud) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perseroan yang mempengaruhi kondisi kinerja Perseroan secara signifikan, Perseroan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya internal fraud yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2016, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah internal fraud	-	-	1	2	-	
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	-	-	-

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi DPS adalah sebagai berikut:

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota DPS yang ditetapkan RUPS Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota DPS, jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Pengawas Syariah

No	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	850
2	Fasilitas Lainnya	-	-
	Yang dapat dimiliki	-	-
	Yang tida dapat dimiliki	-	-

Jumlah anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran penghasilan, adalah sebagai berikut:

Tabel kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp2 miliar	-
Diatas Rp1 miliar – Rp2 miliar	-
Diatas Rp500 juta – 1 miliar	3 Orang
Rp500 juta kebawah	-

PELAKSANAAN KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, Perseroan melalui Direktur Kepatuhan telah melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 kali pada bulan juni dan Desember tahun 2016, guna memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN MEMASTIKAN TERSELENGGARANYA PENYAMPAIAN INFORMASI MATERIAL PERSEROAN SECARA TEPAT WAKTU DAN AKURAT KEPADA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN. SEKRETARIS PERUSAHAAN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MENCIPTAKAN KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Perseroan saat ini dijabat oleh Eko Waluyo sejak 1 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan No.233/ DIR/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan Pejabat sebagai *Corporate Secretary* Perseroan. Berikut profil ringkas Sekretaris Perusahaan:

Eko Waluyo

Lahir di Temanggung, Usia 45 tahun. Berdomisili di Bekasi. Menamatkan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada tahun 1995 serta meraih gelar Magister Manajemen (MM) di bidang *finance* dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Kentucky USA tahun 2004. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau pernah menduduki berbagai posisi di Perseroan, antara lain sebagai Departement Head Investor Relation (2013-2015), Manager Investor Relation (2011-2013), Manager Investor Communication (2010-2011), dan Kepala Seksi Tim Sekuritas KPR (2006-2010). Sebelumnya beliau Dep. Manager Risk Management PT Sarana Multigriya Finansial (2006) dan Auditor Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006-2007).

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti antara lain: Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan *Level* 1, 2, 3 dan 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2011, 2012 dan 2014), *Workshop* ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), Jakarta (2015), *Workshop* Peran dan Fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Kementerian BUMN, Bandung, Indonesia (2015), *The First Asean Marketing Summit*, *Markplus Institute*, Jakart (2015), *Investor Relations Masterclass*, *Executive Workshop*, *the Investor Relations Society*, United Kingdom (UK) (2013), *The 1st Corporate Secretary Leadership* Forum, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Bangkok, Thailand (2015) serta *The Workshop Making Small-Scale Savings Work for Everyone in a Digitised World*, *The World Savings Bank Institute* (WSBI), Washington DC, USA (2015).

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2016

Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan/seminar/*workshop* dalam mendukung pelaksanaan fungsinya antara lain:

Tabel Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat dan Waktu
SESPIBANK Angkatan 64 Tahun 2016	LPPI	Jakarta dan Jerman, 18 Maret – 13 Mei 2016
Sosialisasi AFI KPKU BTN *Senior Leader*	Perseroan	Jakarta, 3 Juni 2016
Training to be Top 50 Team Asean CG Scorecard 2016	IICD	Batam, 18 – 20 Agustus 2016
The International Certificate in Investor Relations (ICIR)	*Investor Relations Professionals Association Singapore (IRPAS)*	Jakarta & Singapura, 20 September 2016

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary dibantu oleh Manager/Senior Manager yang membawahi unit kerja Investor Relations, Corporate Communication dan Planning, Budgeting and Protocol. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Berikut struktur organisasi Corporate Secretary Perseroan:

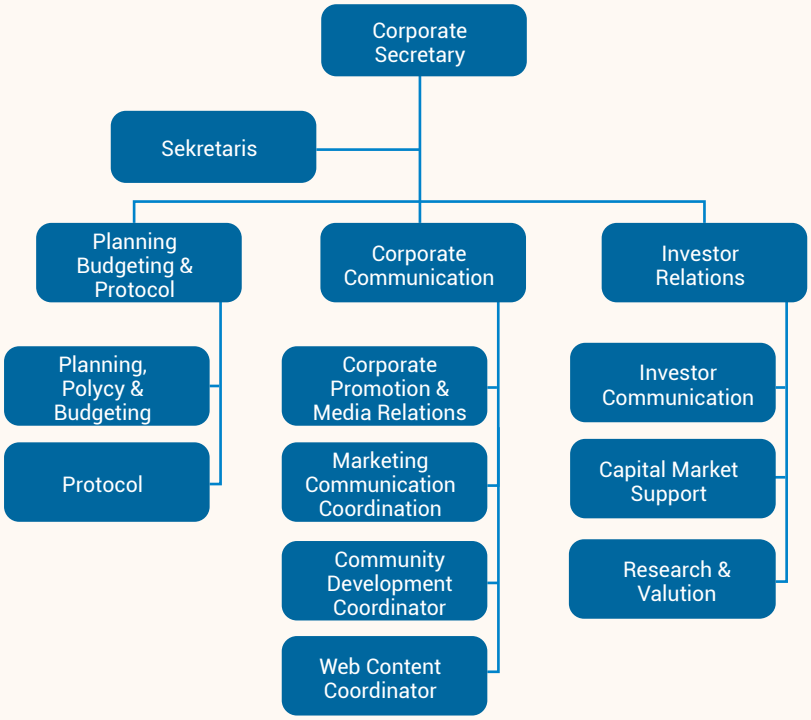

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengacu pada Peraturan OJK No.35/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi hal sebagai berikut.

1. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup aspek:
    a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
    b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    f. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2016

Realisasi pelaksanaan tugas dan tangung jawab Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyampaian perkembangan pasar modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari:
    a. Adanya beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau peraturan yang dimutakhirkan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain:

Peraturan	Sosialisasi kepada Direksi
Sosialisasi POJK No. 30, 31, 55 dan 60 Tahun 2015	Memo No. 113/M/CSD/IR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016
Sosialiasi POJK No. 45/POJK.03/2015	Memo No. 493/M/CSD/IR/IV/2016 tanggal 4 April 2016
Perubahan Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas	Memo No. 668/M/CSD/IR/V/2016 tanggal 13 Mei 2016
Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti	Memo No. 692/M/CSD/IR/V/2016 tanggal 19 Mei 2016
Kajian Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/06/2016 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No Per-04/MBU/2014 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	Memo No. 1179/M/CSD/IR/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016

Peraturan	Sosialisasi kepada Direksi
Review Peraturan Terbaru OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	Memo No. 1267/M/CSD/IR/IX/2016 tanggal 20 September 2016
Sosialisasi POJK No. 27/POJK.03/2016 dan SE OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	Memo No. 1814/M/CSD/IR/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016

b. Perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa *(unusual market activities)*. Selama tahun 2016 laporan perkembangan saham Perseroan diantaranya:

Laporan	Penyampaian kepada Direksi
Laporan Kinerja Saham BBTN Tahun 2015	Memo No. 170/M/CSD/IR/I/2016 tanggal 28 Januari 2016
Volatilitas Pergerakan Saham BBTN pada Pekan ke-3 dan ke-4 Februari 2016	Memo No. 325/M/CSD/IR/II/2016 tanggal 26 Februari 2016
BBTN Tetap Bertahan dalam 5 Indeks Perdagangan Bursa	Memo No. 361/M/CSD/IR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016
Penyampaian *Research Report* dengan Peningkatan Target *Price* untuk Saham BBTN	Memo No. 515/M/CSD/IR/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Laporan Kinerja Saham BBTN Triwulan I Tahun 2016	Memo No. 610/M/CSD/IR/IV/2016 tanggal 29 April 2016
Analisa Dampak *Referendum Brexit*	Memo No. 934/M/CSD/IR/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016
Laporan Kinerja Saham BBTN Triwulan II Tahun 2016	Memo No. 1053/M/CSD/IR/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016
Saham BBTN Tetap Bertahan dalam Indeks Bursa Efek Indonesia	Memo No. 1361/M/CSD/IR/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
Laporan Kinerja Saham BBTN Triwulan III Tahun 2016	Memo No. 1516A/M/CSD/IR/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016
Perkembangan Harga Saham Periode 11-14 November 2016	Memo No. 1612A/M/CSD/IR/XI/2016 tanggal 15 November 2016

c. Masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan, melalui forum *Investor Conference* dan *Non-Deal Roadshow* diantaranya:

Laporan Kegiatan	Penyampaian kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Laporan Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri Dalam Rangka Kegiatan Komunikasi Kepada Investor	Surat No. 203/DIR/CSD/IV/2016 tanggal 4 April 2016
Laporan Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri Dalam Rangka Kegiatan Komunikasi kepada Investor	Surat No. 247/DIR/CSD/IV/2016 tanggal 28 April 2016
Laporan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dalam Rangka *Macquarie* ASEAN *Conference* 2016	Surat No. 698/DIR/CSD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Summary dan *Feedback* Analis atas Kinerja Perseroan Triwulan III Tahun 2016	Memo No. 1563/M/CSD/IR/XI/2016 tangggal 9 November 2016
Laporan Perjalanan Direksi ke Luar Negeri Dalam Rangka Kegiatan Komunikasi kepada Investor	Surat No. 1050/DIR/CSD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016

2. Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan, yaitu secara:
   a. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Road Show*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.
   b. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, *Press Release*, *Website*, *Broadcast* Media (TV, Surat Kabar, Media Online), Social Media, dan Emails.

Berikut adalah program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Perseroan selama tahun 2016 :

Tanggal	Kegiatan	Tempat
7 Januari 2016	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Jakarta
4 Februari 2016	*Analyst Meeting* Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Konferensi Pers	Jakarta
10 & 12 Feb 2016	*Non Deal Roadshow*	Jakarta
15-16 Februari 2016	*Non Deal Roadshow*	Singapore
17-18 Februari 2016	*Non Deal Roadshow*	Hong Kong
7-8 Maret 2016	UBS Indonesia *Conference*	Jakarta
10 Maret 2016	CLSA ASEAN Forum	Bangkok
14-18 Maret 2016	*Non Deal Roadshow*	USA
7-8 April 2016	*Non Deal Roadshow*	Tokyo
12 April 2016	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Jakarta

Tanggal	Kegiatan	Tempat
13-14 April 2016	Indonesia *Investment Day* 2016	London & Edinburgh
25 April 2016	*Analyst Meeting* Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2016 dan Konferensi Pers	Jakarta
10 Mei 2016	Citi Indonesia *Investor Conference*	Jakarta
19 Mei 2016	RHB Indonesia *Corporate Day*	Jakarta
25 Juli 2016	*Analyst Meeting* Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2016 dan Konferensi Pers	Jakarta
4 Agustus 2016	*Public Expose* (*Investor Summit* 2016)	Jakarta
12 Agustus 2016	CIMB 10th Annual Indonesia *Conference*	Denpasar
23-24 Agustus 2016	*Macquarie* ASEAN *Conference*	Singapore
24 Oktober 2016	*Analyst Meeting* Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2016 dan Konferensi Pers	Jakarta
27-28 Oktober 2016	*Non Deal Roadshow*	Jakarta
1-2 November 2016	dbAccess Indonesia *Conference*	Jakarta
7-11 November 2016	*Non Deal Roadshow*	Eropa
17-18 November 2016	*Morgan Stanley Asia Pacific Summit*	Singapore
29 November-1 Desember 2016	Citi ASEAN *Stars of the Next Decade* 2016	Hong Kong &

Selain menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2016 Perseroan juga melayani permintaan meeting, *conference call* dan *site visit* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit *Investor Relations*. Adapun rincian kegiatan dimaksud sebagai berikut:

	Analis	Investor		Rating Agency	Site Visit	Total
		Lokal	Asing			
Jumlah	58	11	60	5	4	138

3. Keterbukaan Informasi Kepada Publik

   Selama tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) laporan (rincian pada lampiran 1). Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

   Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinir penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan atau transaksi saham Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Namun, Selama tahun 2016 Perseroan tidak mendapatkan permintaan penjelasan dari Bursa.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik

   Komunikasi dengan *stakeholders* Perseroan menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*), yaitu dikoordinir melalui Sekretaris Perusahaan. Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi. Selain publikasi melalui media massa, publik juga mendapatkan informasi mengenai Perseroan melalui *website* Perseroan (www.btn.co.id), serta media sosial yang terdiri dari facebook (BankBTNcoid), twitter (@BankBTNcoid), youtube (officialBankBTN) dan instagram (officialBankBTN).

   Perseroan konsisten untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik yaitu dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada *website* Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
   b. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
   c. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

   Hasilnya, **Perseroan berhasil mendapatkan peringkat 6 kategori Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.** Peringkat ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu peringkat 9.

5. Hubungan dengan Media Massa

   Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) press release mengenai perkembangan kinerja, bisnis dan operasional Perseroan, antara lain:

Daftar Press Release Tahun 2016

NO.	TEMPAT	TANGGAL	PRESS RELEASE
1	Jakarta	7-Jan-16	Perseroan Akan Tembus Posisi 7 Bank Terbesar Indonesia
2	Jakarta	1-Feb-16	Perseroan Akan Kelola Dana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
3	Jakarta	4-Feb-16	Transformasi Perseroan Mendorong Laba Bersih Tumbuh 62%
4	Semarang	7-Feb-16	Perseroan Napak Tilas KPR di Kota Semarang
5	Jakarta	9-Feb-16	HUT ke-66 Perseroan *Launching* Layanan *Digital Lounge*
6	Jakarta	13-Feb-16	Perseroan Lampaui Target Kucuran Kredit Baru Dalam IPEX 2016
7	Jakarta	13-Feb-16	Perseroan Bakal Dapat Kucuran Kredit Baru Rp 1,5 Triliun dari IPEX 2016
8	Jakarta	15-Feb-16	*Homerun in Harmony* Perseroan akan segera Digelar
9	Pontianak	16-Feb-16	Pontianak Menjadi Sasaran Program Tabungan BTN eBATARAPOS
10	Jakarta	21-Feb-16	Lebih dari 10.000 Masyarakat Padati *Homerun in Harmony* Perseroan
11	Jakarta	14-Mar-16	Perkuat Sinergi Bisnis Bank BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan Perseroan Resmikan Kerjasama Pembayaran *e-Payment* Toll Nasional
12	Jakarta	21-Mar-16	Pefindo Meningkatkan Rating Perseroan
13	Jakarta	23-Mar-16	Perseroan Akan Kelola Dana Kementerian Perhubungan RI
14	Jakarta	12-Apr-16	Optimis Bisnis 2016 Tumbuh Lebih Baik
15	Jakarta	25-Apr-16	Kinerja Triwulan I 2016 Kredit Perseroan Tumbuh 18,9%
16	Jakarta	25-Apr-16	Perseroan Kejar Aset Diatas Rp 500 Triliun pada Tahun 2019
17	Jakarta	28-Apr-16	Dukung Pariwisata Indonesia, Perseroan Siapkan 100.000 *Homestay*
18	Jakarta	2-May-16	Sinergi Perseroan-Taspen Permudah PNS & Pensiunan Peroleh KPR
19	Jakarta	13-May-16	Perseroan Mulai Mengundi Hadiah Reguler Tabungan Serba Untung
20	Jakarta	19-May-16	Kerjasama Perseroan-BPJS TK Berpotensi Menambah DPK Perseroan
21	Jakarta	21-May-16	Perseroan Undi Hadiah *Grandprize* Tabungan Serba Untung
22	Jakarta	23-May-16	Perseroan Berikan Apresiasi Kepada *Stakeholder* dan Pengembang
23	Jakarta	24-May-16	Sinergi BUMN Melahirkan Kartu Debit BTN-Garuda
24	Surabaya	31-May-16	Perseroan *Lauching* Gerakan Sejuta Wakaf Nahdliyin
25	Jakarta	6-Jun-16	Perseroan Didapuk Sebagai Bank BUMN Terbaik Dalam Pengelolaan SDM
26	Aceh	20-Jun-16	Perseroan Buka Kantor Cabang Syariah ke-23 di Banda Aceh
27	Jakarta	28-Jun-16	Perseroan Berangkatkan 500 Pekerja Bangunan Mudik
28	Jakarta	30-Jun-16	Antisipasi Kebutuhan uang Selama Libur Lebaran, Perseroan Siapkan Rp. 29,5 Triliun
29	Jakarta	13-Jul-16	Perseroan-ITB akan Cetak 500 Entrepreneur Muda Bidang Properti
30	Jakarta	15-Jul-16	Tantangan Perbankan Nasional
31	Jakarta	15-Jul-16	Penyaluran Kredit Perumahan
32	Jakarta	15-Jul-16	Teknologi Bantu Kinerja Bisnis Bank
33	Sidoarjo	17-Jul-16	Perseroan jadi Pilot *Project* Penyaluran Dana Program Keluarga Harmoni
34	Jakarta	20-Jul-16	Jelang IPEX 2016 Perseroan Undang Lebih Dari 200 Pengembang

NO.	TEMPAT	TANGGAL	PRESS RELEASE
35	Jakarta	20-Jul-16	Perseroan Tetap Mendapat Peran Dalam Program Amnesti Pajak
36	Jakarta	25-Jul-16	Semester I 2016 Laba Perseroan Meningkat 25,40% menjadi Rp 1,042 Triliun
37	Jakarta	26-Jul-16	Perseroan akan Menawarkan Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp 3 Triliun
38	Jakarta	2-Aug-16	Sukseskan Program SMN, Perseroan Ajak Siswa Mengenal Ternate
39	Bandung	8-Aug-16	Perseroan Resmi jadi Gateway dalam Program Amnesty Pajak
40	Jakarta	9-Aug-16	Perseroan Berburu Dana Repatriasi
41	Jakarta	13-Aug-16	Gelar IPEX 2016 Perseroan Targetkan Kredit Baru Rp 4 Triliun
42	Ternate	14-Aug-16	BUMN Hadir Untuk Negeri, Perseroan Hadir di Ternate
43	Jakarta	19-Aug-16	Perseroan Siap Mendukung Pengembangan Sektor Wisata di Murotai
44	Jakarta	19-Aug-16	Perseroan Ajak Pengembang dan Nasabah Dukung Amnesti Pajak
45	Jakarta	21-Aug-16	Wujud Cinta Negeri, Ikatan Alumni PTN Gelar Budaya
46	Makassar	28-Aug-16	Sukses Program Serbu 2015, Perseroan Launching Serbu 2016 di Makassar
47	Belitung	2-Sep-16	Perseroan Dukung Pengembangan Homestay KEK Pariwisata Indonesia
48	Jakarta	9-Sep-16	Perseroan Siap Sukseskan Nasional Payment Gateway (NPG)
49	Bandung	15-Sep-16	Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi ke-13, Perseroan Optimis Bisa Percepat Realisasi KPR
50	Jakarta	19-Sep-16	Gandeng Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
51	Jakarta	27-Sep-16	Manjakan Nasabah, Perseroan Gandeng GO-JEK
52	Jakarta	28-Sep-16	Perseroan Raih Peringkat I *Annual Report* **Award** 2015
53	Solo	1-Oct-16	Permudah Transaksi Pedagang Pasar Perseroan Terbitkan eRetribusi
54	Jakarta	4-Oct-16	Dukung Pariwisata, Perseroan Sponsori Tour de Borobudur
55	Jakarta	14-Oct-16	Perseroan Peroleh Anugerah Perbankan Indonesia Award 2016
56	Jakarta	17-Oct-16	Maryono Ditetapkan Sebagai CEO of the Year 2016
57	Jakarta	20-Oct-16	Serbu Perseroan Menawarkan Hadiah Rumah dan Mobil Mewah
58	Samarinda	23-Oct-16	Perseroan Menyasar Samarinda untuk Pengembangan eBATARAPOS
59	Jakarta	24-Oct-16	Perseroan Mencetak Pertumbuhan Laba Bersih 32,6%
60	Jakarta	31-Oct-16	Perseroan Bersama WSBI Mendukung Gerakan Masyarakat Gemar Menabung
61	Jakarta	3-Nov-16	Gandeng GO-JEK, Perseroan berikan *cashback* 20%
62	Jakarta	9-Nov-16	Perseroan Catatkan EBA-SP Rp 1 Triliun di Bursa Efek
63	Surabaya	10-Nov-16	Perseroan Kucurkan Kredit Konstruksi ke PP Properti Tbk Rp. 325 Miliar
64	Surakarta	18-Nov-16	Perseroan Resmikan Shelter Pedagang Kaki Lima di Solo
65	Jakarta	18-Nov-16	Perseroan Dukung Tour de Borobudur Untuk Pengembangan Pariwisata Indonesia
66	Jawa Tengah	21-Nov-16	Perseroan Tingkatkan Potensi Pariwisata dengan Tour de Borobudur
67	Jakarta	30-Nov-16	SERBU Sukses Tingkatkan Dana Murah Perseroan
68	Jakarta	13-Dec-16	40 Tahun Perseroan Salurkan KPR untuk 3,77 juta Rumah

NO.	TEMPAT	TANGGAL	PRESS RELEASE
69	Jakarta	14-Dec-16	Prospek Properti Cerah pada 2017, Perseroan Siapkan Amunisi
70	Medan	17-Dec-16	Pacu Penghimpunan Dana Murah, Perseroan Rambah Medan
71	Jakarta	18-Dec-16	Catatkan Kinerja Keuangan yang Baik dan Berkelanjutan, Perseroan Kembali Sabet Penghargaan
72	Jakarta	22-Dec-16	2016, Perseroan kembali Disematkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah RI
73	Surabaya	27-Dec-16	Lanjutkan Apresiasi Nasabah, Perseroan Gelar Penarikan Undian Serbu Perseroan 2016 di Surabaya
74	Bitung	27-Dec-16	10 Rumah Kreatif Disiapkan Perseroan untuk Dorong Ekonomi Masyarakat
75	Jakarta	29-Dec-16	Gandeng 7 BUMN, Perseroan Optimis Bisnis Tumbuh Lebih Baik

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sekretaris Perusahaan mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, serta 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yaitu:

a. RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2016
b. RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 Januari 2016

Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk didalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.

Kegiatan	RUPS Luar Biasa 7 Januari 2016	RUPS Tahunan
Pemberitahuan ke OJK, BEI dan KSEI	24 November 2015	4 Februari 2016
Pengumuman RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *Investor Daily*, web OJK, BEI dan Perseroan	1 Desember 2015	16 Februari 2016
Pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, web OJK, BEI dan Perseroan	16 Desember 2015	2 Maret 2016
Ralat Pemanggilan RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *Investor Daily*, web OJK, BEI dan Perseroan	Nihil	16 Maret 2016
Ralat Pemanggilan dan Pengumuman RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *Investor Daily*, web OJK, BEI dan Perseroan	Nihil	18 Maret 2016
RUPS	7 Januari 2016	12 April 2016
Pengumuman ringkasan risalah RUPS di Surat Kabar Bisnis Indonesia, *Investor Daily*, web OJK, BEI dan Perseroan	11 Januari 2016	13 April 2016
Penyampaian Risalah RUPS ke OJK dan BEI	1 Februari 2016	4 Mei 2016

7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
   Selama tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan 104 (seratus sebelas) kali Rapat Direksi dan 15 (lima belas) kali Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun rincian penyelenggaraan Rapat Direksi telah diuraikan pada Bab Direksi Laporan tahunan ini. Sedangkan Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris telah diuraikan pada Bab Dewan Komisaris Laporan tahunan ini.

8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada tanggal 16 Mei 2016.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi sekretaris perusahaan adalah:

a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
   2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka memenuhi POJK tersebut diatas, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI), yang disusun berdasarkan prinsip *Balanced Scorecard*. KPI dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *Financial*, *Customer*, *Business Process* dan *Learning and Growth.*

Berikut KPI Sekretaris Perusahaan Perseroan tahun 2016 dan pencapaiannya pada masing-masing perspektif:

No	KPI	Perspektif	Pencapaian
1	Kapitalisasi Pasar	*Financial*	130%
2	Persepsi Publik terhadap Perusahaan	*Customer*	130%
3	Perluasan Hubungan dengan media	*Business Process*	126,67%
4	Komunikasi kepada Analis dan Investor	*Business Process*	129,17%
5	Keterbukaan Informasi kepada Publik	*Business Process*	129,24%
6	*Culture Assessment Index*	*Learning and Growth*	112%

Menindaklanjuti pasal 11 POJK No 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melalui:

1. Memo No. 1841/M/CSD/IR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2016
2. Surat No. 581/CSD/IR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2016 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MEWUJUDKAN KOMITMEN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) NO. SKB-04 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENGACU PADA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.5/22/ DPNP DAN SEJALAN DENGAN ***INTERNAL CONTROL FRAMEWORK*** YANG DIKEMBANGKAN COSO (***COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION***). SEHINGGA, DIHARAPKAN PERSEROAN MAMPU MENCIPTAKAN DESAIN KERANGKA PENGENDALIAN YANG MEMADAI SEBAGAI SEBUAH SISTEM PERINGATAN DINI ATAS SETIAP RISIKO YANG DI HADAPI PERSEROAN.

Surat Edaran Bank Indonesia menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPIN) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Unsur pengendalian intern yang dikembangkan COSO sejalan dengan elemen Sistem Pengendalian Intern Bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/ DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang menjadi acuan bagi sistem pengendalian Intern Perseroan yang dituangkan dalam SKB No.SKB-04. Berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No.SKB-04 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern, komponen pengendalian intern Perseroan sejalan dengan yang COSO meliputi :

1. **Lingkungan Pengendalian (*control enviroment*)**
   Merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern yang mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top.*
2. **Penilaian Risiko (*risk assessment*)**
   Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. **Kegiatan Pengendalian (*control activities*)**
   Meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnnya.
4. **Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)**
   Merupakan kondisi saluran komunikasi internal dan ekternal yang efektif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. **Pemantauan (*Monitoring*)**
   Merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi

struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaanya.

Sementara elemen Sistem Pengendalian Intern Bank sebagai mana disebutkan dalam SKB No.SKB-04 yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP meliputi sebagai berikut :

1. **Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian**
   Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.
2. **Identifikasi dan Penilaian Risiko**
   Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
3. **Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional**
   Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Perseroan dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
4. **Sistem Akuntansi/Keuangan, Informasi dan Komunikasi**
   Sistem Akuntansi/Keuangan meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Bank, *auditor* ekstern, pemegang saham dan nasabah Perseroan.
5. **Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan**
   Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit intern.

KEGIATAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi beserta seluruh pegawai dan pejabat Perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap kegiatan Perseroan sehari-hari khususnya terkait dengan operasional dan keuangan. Sistem Pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perseroan yang kegiatannya sekurang-kurangnya meliputi:

Kaji Ulang Manajemen (*Top Level* Reviews)

Direksi Bank secara berkala melakukan rapat koordinasi guna memperoleh informasi atas kinerja Perusahaan dari pejabat dan pegawai. Sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian terhadap realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seperti laporan keuangan atau laporan manajemen yang dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Internal Audit Division dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan yang diantaranya :

1. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
2. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko dan
3. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
   a. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
   b. Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

Pengendalian sistem informasi dan teknologi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan interen. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria sebagai berikut :

1. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, ser ta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan *internal– eksternal.*
2. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

Dokumentasi (*Documentation*)

Perseroan sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan *auditor* interen, akuntan publik dan otoritas pengawasan Perseroan. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh *auditor* intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Pemisahan fungsi merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut :

1. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*".
2. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
3. Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen.
4. Perseroan melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, antara lain:
   a. Menetapkan fungsi dan tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadi manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Perseroan;
   b. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
      1) Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;
      2) Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;
      3) Transaksi dalam pembukuan Bank;
      4) Pemberian informasi kepada nasabah Bank;
      5) Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit;
      6) Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan;
      7) Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap risiko utama Bank yang diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala oleh satuan-satuan kerja operasional maupun *Internal Audit Division*.

Penilaian aspek internal control dilakukan melalui *Internal Control Assessment* (ICA) yaitu penilaian kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA)

serta professional judgment *auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/ frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management *review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Evaluasi atas pengendalian internal Perseroan juga dilakukan terhadap 65 Kantor Cabang dan 23 Kantor Cabang Syariah dengan kriteria cukup dan klasifikasi *Risk Contol* berada pada kategori *fair* untuk 57 Kantor Cabang dan 21 Kantor Cabang Syariah serta kriteria baik dan klasifikasi *Risk Contol* berada pada kategori *Satisfactory* untuk 8 Kantor Cabang dan 1 Kantor Cabang Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang telah dibentuk.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Internal Audit Division (IAD) pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank yang memadai dan disampaika kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau *Komite Audit* untuk dilakukan kajian lebih mendalam. Kajian atas evaluasi tersebut dilakukan terhadap lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environtment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assesment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan evaluasi sebagai mana dijelaskan sebelumnya serta penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite, Internal Audit Division dan beberapa divisi terkait dapat dikatakan bahwa Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

FUNGSI AUDIT INTERNAL

FUNGSI ***AUDIT INTERNAL*** MERUPAKAN KOMPONEN PENTING DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PESEROAN. FUNGSI ***AUDIT INTERNAL*** BERPERAN MEMBERIKAN ***ASSURANCE*** SECARA INDEPENDEN DAN OBYEKTIF SERTA MASUKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI. SELAIN ITU, FUNGSI ***AUDIT INTERNAL*** MERUPAKAN MITRA MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI GCG DI LINGKUNGAN PERSEROAN AGAR MAMPU MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PERSEROAN.

Perseroan mengamanatkan pelaksanaan fungsi *audit internal* kepada Internal Audit Division (IAD). Internal Audit Division (IAD) berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara obyektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, controll* dan *governance processes*. Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

KEDUDUKAN *AUDIT INTERNAL* DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan fungsi internal audit pada Perseroan yang selanjutnya disebut dengan Internal Audit Division (IAD) telah diatur melalui Ketetapan Direksi No.04/KD/DIR/SPMD/2014 dan dimutakhirkan dengan Ketetapan Direksi No.02/KD/DIR/ SPMD/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Ketetapan Direksi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Internal Audit Division (IAD) berada di bawah supervisi Direktur Utama. Kedudukan Internal Audit yang berada langsung pada supervisi Direktur Utama dan bukan berada pada supervisi Direktur operasional lain menunjukkan bahwa SKAI pada Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki independensi yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi *Audit Intern* Bank.

Selain itu, Kedudukan fungsi internal audit juga dijelaskan pada Piagam *Audit Intern* No. 03- SKB/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 pada Bab II Struktur dan Kedudukan pasal 3 sebagai berukut :

1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja *Audit Intern* (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Pasal 3 Ayat (6) disebutkan bahwa *Auditor* yang duduk dalam IAD bertanggung jawab langsung kepada Kepala IAD.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KETUA AUDIT INTERNAL

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan/pemberhentian Ketua *Audit Internal* adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan/ pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak di maksud, adalah sebagai berikut :

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon kepala satuan kerja audit internal.
2. Direksi menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/ pemberhentian kepala satuan kerja *audit internal* kepada dewan komisaris.
3. Dewan komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/ pemberhentian ketua SKAI.
4. Dewan komisaris dan Direksi menyampaikan laporan pengangkatan/ pemberhentian ketua SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

PROFIL KETUA AUDIT INTERNAL

Adi Suharto Atmadja

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 1987.

Menjabat sebagai Kepala *Audit Intern Division* sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 253/DIR/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang Promosi / Mutasi Pegawai.

Sebelum menjabat sebagai Kepala *Audit Intern Division*, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang (2007-2009), Kepala Cabang Kelas II (2009-2010), *Housing Dept. Head* (2010-2011), *Branch Manager* (2011-2013), *Asset Management Division Head* (2013-2015), *Regional Office Head* (2015-2016) *Audit Intern Division Head* (2016-sekarang)

Beliau pernah mengikuti beberapa *workshop* dan pelatihan antara lain Manajemen Dana Perbankan & Dasar Analisa Kredit (1994), Manajemen Pemasaran & Tehnik Menjual Persuasif (1994), Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah (1999), KYC & Anti *Money Laundering* (2005), Sertifikasi Manajemen Risiko (2006, 2008, 2010 & 2014), *Strategic Business Analysis* (2008), *Profesional Business Appearance* (2009), *Competency Based Assessment Center* (2010), *Workshop Legal Action* Dalam Penyelamatan Kredit Bank Yang Efektif (2013), *Workshop* Penyelesaian Kredit (2015), Kegiatan Ikatan *Internal Audit* (IIA) *International Conference* tahun 2016 di New York & Washington DC Amerika Serikat.

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL

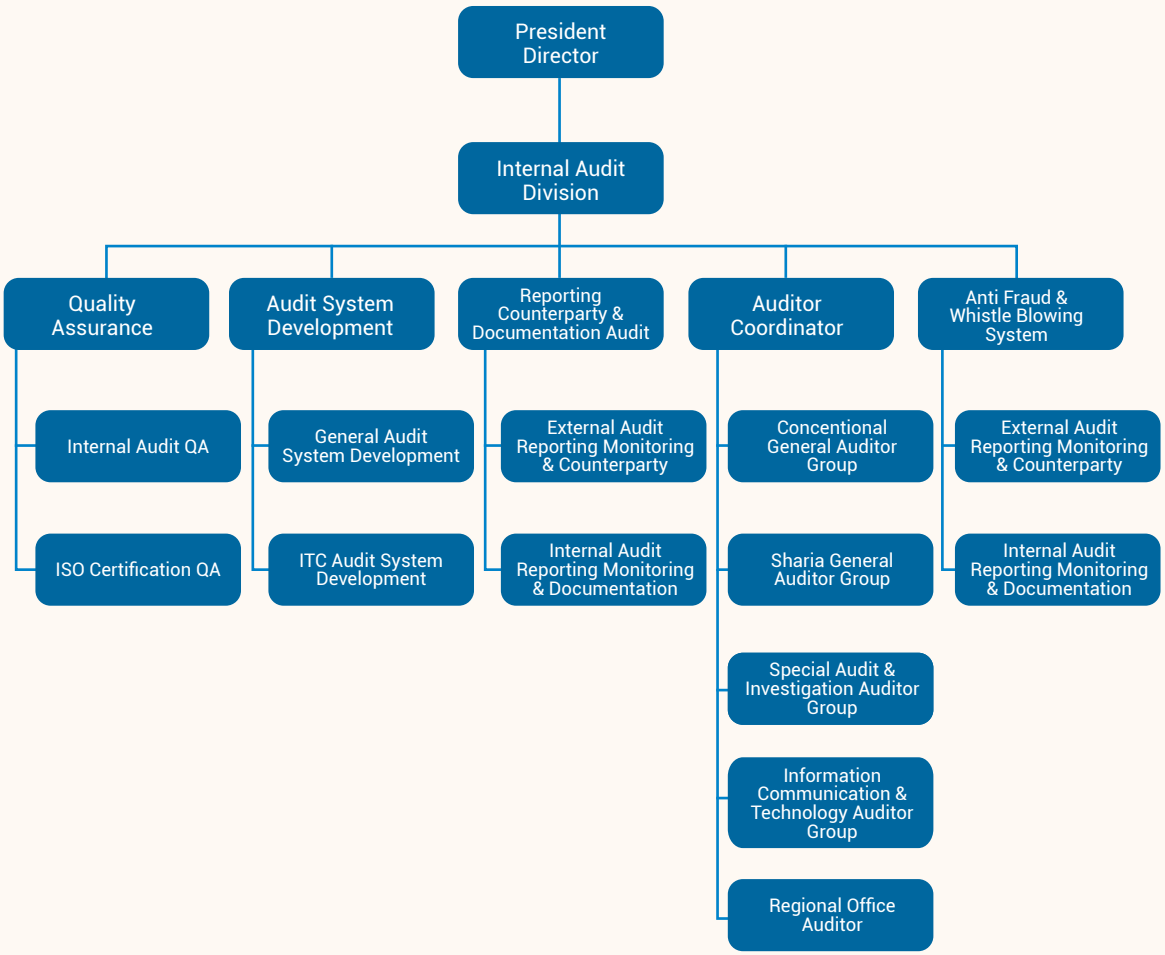

PROFIL PERSONIL AUDIT INTERNAL

Fungsi *Audit Internal* yang dijalankan oleh Internal Audit Division dirancang untuk mampu membantu Direksi mengelola pengendalian internal Perseroan, oleh karena itu Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division baik dari segi jumlah hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division berjumlah 75 orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Audit Coordination Head, 4 (empat) orang Quality Assurance, 4 (empat) orang Audit System Development Departement, 6 (enam) orang Reporting Counterparty Documentation Audit Departement, 31 orang Conventional General Auditor, 7 (tujuh) orang Sharia General Auditor, 5 (lima) orang Special & Investigation Auditor, 6 (enam) orang Information Communication Technology Auditor, 4 (empat) orang Regional Office Auditor, 3 (tiga) orang Strategi Anti Fraud & Whistleblowing System dan 2 (dua) orang Penugasan Khusus (Komite Audit).

Komposisi Personil Internal Audit Division

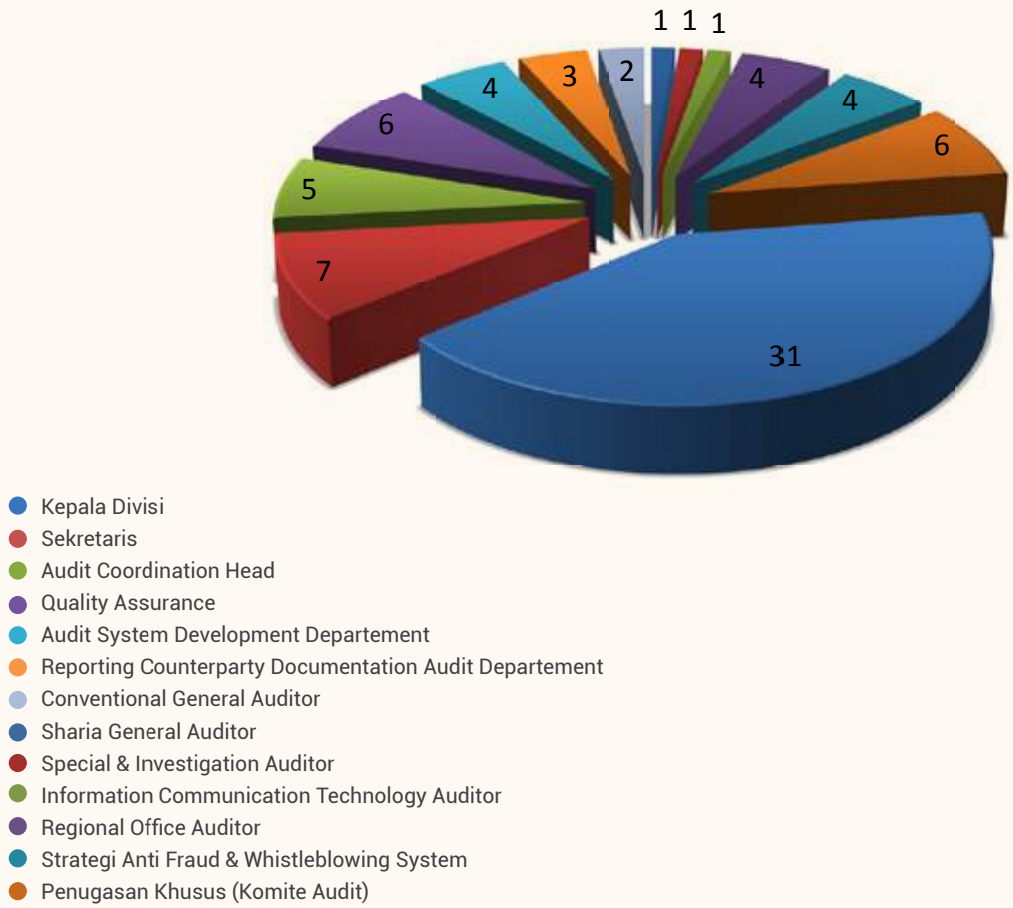

Komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan latar belakang pendidikan formal dapat dilihat pada grafik berikut :

Komposisi Personil Internal Audit Division Berdasarkan Pendidikan

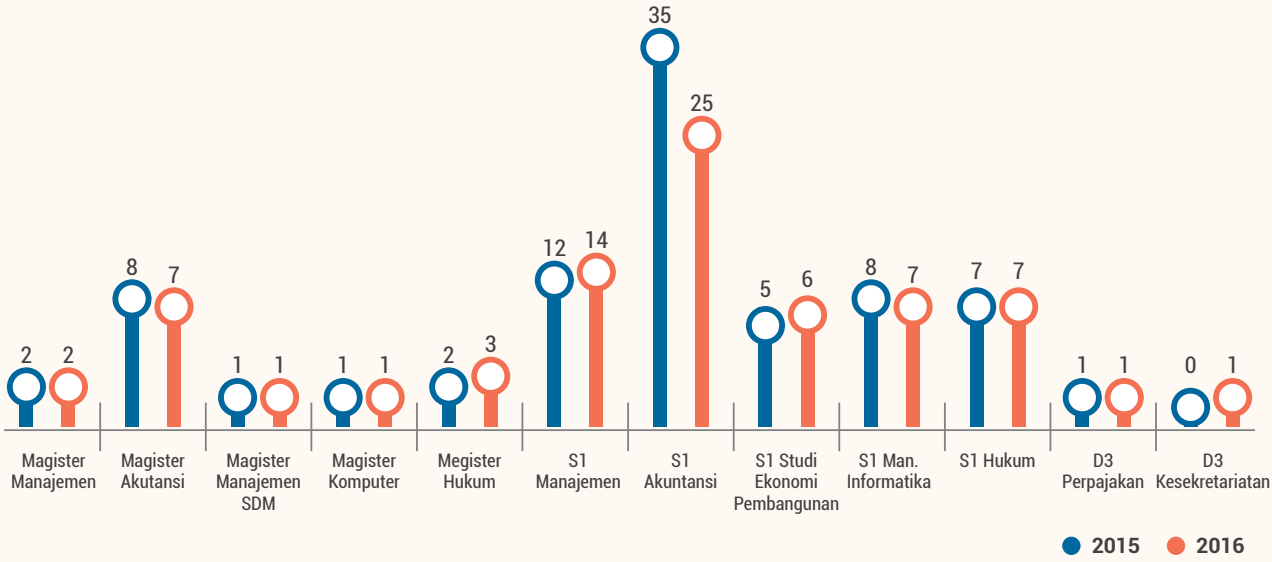

Sementara itu, secara keseluhuran jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division dapat dilihat pada diagram berikut :

Sertifikasi Personil Audit Internal

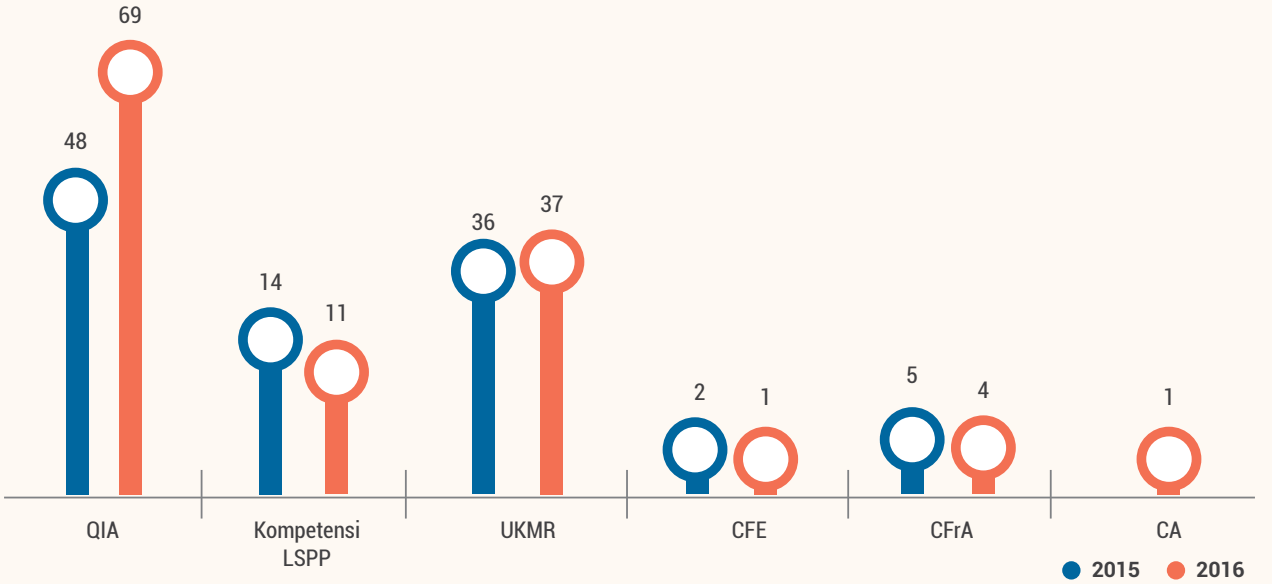

Keterangan : QIA (Qualified Internal Audit), LSPP/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (mensertifikasi kompetensi *auditor* untuk *level auditor* sd assessor), UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko), CFE (*Certified Fraud Examiner*), CFrA (*Certified Forensic Auditor*), *CA (Certified Accountant*).

Komposisi tim audit yang ditugaskan untuk masing-masing unit bisnis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Tim Audit

Unit Bisnis	Ketua Tim			Anggota Tim		
	AS	SAA	AA	SA	AG-14	AG-13
Audit Umum						
Kantor Pusat – Divisi		1		2	2	
Kantor Wilayah		1		2	2	
Kantor Cabang						
a. Kelas Utama	1			2	2	
b. Kelas I		1		2	1	1
c. Kelas II			1	2	1	
d. Kelas III			1	1	1	1
Unit Syariah			1	1	1	1
Audit ICT						
Aplikasi : Divisi/Desk Kantor dan DT I		1		2	2	
Aplikasi : Sampling Kantor Cabang			1	1	1	
Audit Khusus						
Fraud Investigation	1	1		1	1	
Special Review			1	1	2	

Catatan: SAA = Senior Associate Auditor (Set. Department Head - Grade 17), AA = Associate Auditor (Set. Manager - Grade 16), SA = Senior auditor (Set.Manager G.15), A = Auditor (Set. Assistant Manager G.14 atau Assistant Manager G.13)

Selain itu dapat dapat disampaikan pula bahwa dalam penyusunan dan penetapan jumlah personil setiap tim audit dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian risiko (*risk assessment*) atas 14 proses bisnis dan aktivitas pengelolaan ICT, kualifikasi *Auditor* (jabatan dan fokus kompetensi), serta kelas Cabang/Divisi/Desk. Penetapan dan kecukupan jumlah personil juga akan mempunyai dampak pada hari audit dan penyusunan anggaran biaya audit IAD.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI IAD TAHUN 2016

Dalam pengembangan karyawan IAD, selama tahun 2016 telah dilakukan peningkatan kualitas kerja tim audit dengan melaksanakan *training* dan pelatihan baik internal maupun eksternal. *Training* dan pelatihan internal tersebut dilakukan dengan cara diskusi diantara Kepala IAD, Direksi dan para *auditor* terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal Bank. Sedangkan *training*, pelatihan dan *workshop* periode januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil IAD

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah
Sertifikasi			
1	Pelatihan Sertifikasi QIA Tingkat Dasar 1 dan 2	YPIA	6
2	Pelatihan Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan 1 dan 2	YPIA	8
3	Pelatihan Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial	YPIA	18
4	Sertifikasi CFE *Preparation Examination*	ACFE	2
5	Sertifikasi CIA *Preparation Examination*	IIA	2
Pendidikan & Pelatihan			
1	Pendidikan *Fraud* 1 dan 2	LPFA	23
2	Pendidikan *Software quality assurance & software foundation*	Braninmatic	7
3	Pendidikan Anti *Fraud*, *Audit Invetigasi*, Perhitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset	LPFA	24
4	Pendidikan *Could Computing*	Branmatics	7
5	Pendidikan *Leadership*	Prasetya Mulya	1
6	Pendidikan MDP	Prasetya Mulya	7
7	Pendidikan Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Efisiensi Kantor	Bank BTN	2
8	*Training Awarness* Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Bank BTN	1
9	*Training Delivery Batch* 2 & 3	Bank BTN	2
10	*Training* Penyusunan Kebijakan dan Prosedur RCSA	RMD dan PT Daya Makara UI	1
11	Pelatihan Budaya Kerja untuk MVP Batch 1 dan 2	Bank BTN	1
12	*Training* the 7th *batch* CGLP & ASEAN CG *Scorecard*	IICD	2
Seminar / *Workshop*			
1	*Internal Audit Excellence Workshop*	Bankok	2
2	Konferensi SOPAC 2016	IIA International	3
3	*Workshop* Kearsipan oleh ANRI	ANRI	1
4	*Workshop Awarness in Banking*	Edaward Kristianto, MBA	1
5	BARA *Risk Forum*	BARA	1
6	BARA Risiko Operasional	BARA	1

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah
7	*Workshop Fraud Prevention*	ACFE	2
8	SNIA	YPIA	2
9	*International Conference* 2016 New York & Washington DC On *Site Learning*	IIA	1
10	*Workshop* Penyusunan kebijakan dan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bank BTN	1
11	Sosialisasi Perpajakan dan Administrasi SPM	Bank BTN	1
12	*Workshop* BTN Smart KM - Session 1	Bank BTN	1
13	*Workshop Investigative Interview Skill*	ACFE	2
14	*Workshop Sustainability Performance*	Bank BTN	1

PEDOMAN *AUDIT INTERNAL* (PIAGAM AUDIT)

Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit Division (IAD) telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor:SKB-03/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011. Selain sebagai pedoman kerja, *Internal Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan. Isi dari *Internal Audit Charter* sebagai berikut :

1. Visi dan Misi
2. Struktur dan Kedudukan
3. Ruang Lingkup
4. Wewenang, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
5. Pernyataan Dukungan Independensi
6. Tanggung Jawab Audit
7. Kode Etik dan Persyaratan *Auditor* Internal
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
9. Tindak Lanjut
10. Lain-lain

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Fungsi dan tugas Internal Audit Division adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank dalam kerangka penerapan tata kelola bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut.

1. Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit
2. Membuat analis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit menajemen terhadap seluruh unit kerja Perseroan.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
4. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang

keuangan, akuntansi, operasional, pengggunaan sumber daya, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan operasional dan bisnis bank berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/ menyempurnakan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses pengelolaan (*governance processes*).

CAKUPAN PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Internal Audit Charter Perseroan tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 yang kemudian direvisi menjadi Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB-03/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Piagam *Audit Intern* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., pada Bab III Ruang Lingkup:

1. Pasal 4 ayat (2) : "Ruang lingkup pekerjaan audit oleh IAD mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Bank. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan risk-based audit dengan melihat minimal 8 risiko yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan"
2. Pasal 4 ayat (3) : "Berdasarkan arahan Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris, ruang lingkup pekerjaan audit oleh DAI/IAD juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank"
3. Pasal 4 ayat (4): "Ruang lingkup pekerjaan IAD mencakup audit dan penilaian atas efektivitas *risk management*, kecukupan & efektivitas sistem pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas *governance processes* dengan melakukan:Audit ketaatan (*compliance audit*), Audit keuangan (*financial audit*), Audit operasional (*operational/ management audit*), *Audit rating*, *Audit* TSI (**information and technology system audit**), Audit khusus dan investigasi (*special* dan *investigation audit*), Pemantauan secara *off-site* atau *monitoring* (*desk audit*), Penilaian atas sistem pengamanan harta kekayaan Bank termasuk sumber daya dan dana, memastikan eksistensi harta kekayaan Bank.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN *AUDIT INTERNAL* 2016

Kegiatan Internal Audit Division (IAD) diantaranya menyusun rencana kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program Kerja tersebut mencakup sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi perosnil IAD, penilaian risiko, pengembangan personil IAD.

Program Kerja IAD

Program Kerja Internal Audit Division tertuang dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Pada tahun 2016, perencanaan *audit* umum (konvensional dan syariah), *audit* ICT, *audit* khusus & investigasi serta pelaksanaan *audit* ISO 9001:2008 yang terjadwal sebagai berikut :

Objek Audit	Ketua Tim		Anggota Tim		Keterangan
	2015	2016	+/-	%	
A. Audit Umum (AU)	113	121	8	7%	
A1 . AU Konvensional	89	94	5	6 %	
A2. AU. Syariah	24	27	3	13 %	
B. Audit ICT	24	22	-2	-8%	Berbeda dengan obyek audit ICT pada tahun 2014 yaitu audit aplikasi, obyek audit ICT tahun 2015 akan difokuskan pada area 1. *Information Security* 2. *Electronic Banking* yang terdiri dari audit atas produk ATM, *SMS, Mobile, Internet Banking, Virtual Account, i Cash* 3. Efisiensi Bisnis yang terdiri dari audit atas *Voip, Vicon, iFlow, Email* 4. Manajemen IT Syariah
Objek Audit Umum & ICT	137	143	6	4%	
C. Audit Khusus & Investigasi	1	1	-	0%	
C.1. Audit Tematik	1	1	-	0%	Tema : Operasional Bisnis
C.2. Penugasan Khusus Audit Kanwil	2	2	-	0%	1. Kantor Wilayah I 2. Kantor Wilayah IV
C.3. Audit Khusus/ Investigasi	0	0	-	0%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk periode 2016, akan mengikuti penugasan dari *stakeholders* dan whistleblowing system.
D. Audit Sertifikasi Iso 9001:2008	21	17	-4	-19%	
Total Audit ISO	21	17	-4	-19%	Obyek Audit
Jumlah Objek Audit	161	163	2	1%	Obyek Audit

Obyek audit terjadwal atas audit umum, audit ICT, audit khusus & investigasi serta audit sertifikasi ISO 9001:2008 untuk audit plan tahun 2016 adalah sejumlah 163 obyek audit yang naik sebanyak 2 (dua) obyek audit dari target audit plan pada tahun 2015 sejumlah 161 obyek audit.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT 2016

Pada tahun 2016, *Audit Internal* melaksanakan kegiatan audit dengan obyek audit mencakup Audit General (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Tematik, Audit ISO dan Audit Khusus dengan rincian obyek audit sebagai berikut :

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
I	Audit Umum (*General Audit*)	96	96	
I.1	Konvensional	22	21	95,45%
	Kantor Pusat-Divisi	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (SKN - BI)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (BI - RTGS)	6	7	116,67%
	Kantor Pusat - Divisi ((APU PPT, KUR, PKBL & FLPP)	2	2	100,00%
	Kantor Wilayah	64	64	100,00%
	Kantor Cabang Konvensional			
I.2	Syariah	1	1	100,00%
	Kantor Pusat-Divisi Syariah	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (SKN – BI Syariah)	1	1	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (BI – RTGS Syariah)	3	3	100,00%
	Kantor Pusat - Divisi (KUR (SHAD) & FLPP (SHAD))	21	21	100,00%
	Kantor Cabang Syariah	123	123	100,00%
	Total Audit Umum (*General Audit*)			
II	Audit ICT (*Information & Communication Technology Audit*)			
	Kantor Pusat Divisi - Obyek audit	6	6	100,00%
	Kantor Cabang Konvensional	16	16	100,00%
	Total Audit ICT (*Information & Communication*			
	Technology Audit)	22	22	100,00%
III	Audit Mutu Internal (AMI)			
	Surveillance Grup Audit	10	11	110,00%
	Surveillance KP IAD	3	3	100,00%
	Audit ISO Layanan Kredit 1 5 1	4	4	100,00%
	Total Audit Mutu Internal (AMI)	17	18	105,88%
Sub Total		**162**	**163**	**100,62%**
IV	Audit Khusus			
	Fraud Audit	0	24	NA

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
	Audit Klarifikasi	0	0	NA
	Audit Reviu	0	0	NA
	Audit Tematik	1	1	NA
	Total Audit Khusus	1	24	100,00%
Total		**163**	**187**	**114,72%**

Catatan : Terdapat reorganisasi struktur organisasi Kantor Pusat sehingga terdapat Kantor Divisi yang dimerge

Dari hasil audit tersebut diperoleh beberapa temuan untuk tahun 2016 sebanyak 2662 temuan. Hasil tersebut menunjukan jumlah yang semakain menurun selama dua tahun terakhir sebagaimana disajikan pada grafik berikut :

Grafik Temuan Audit Internal

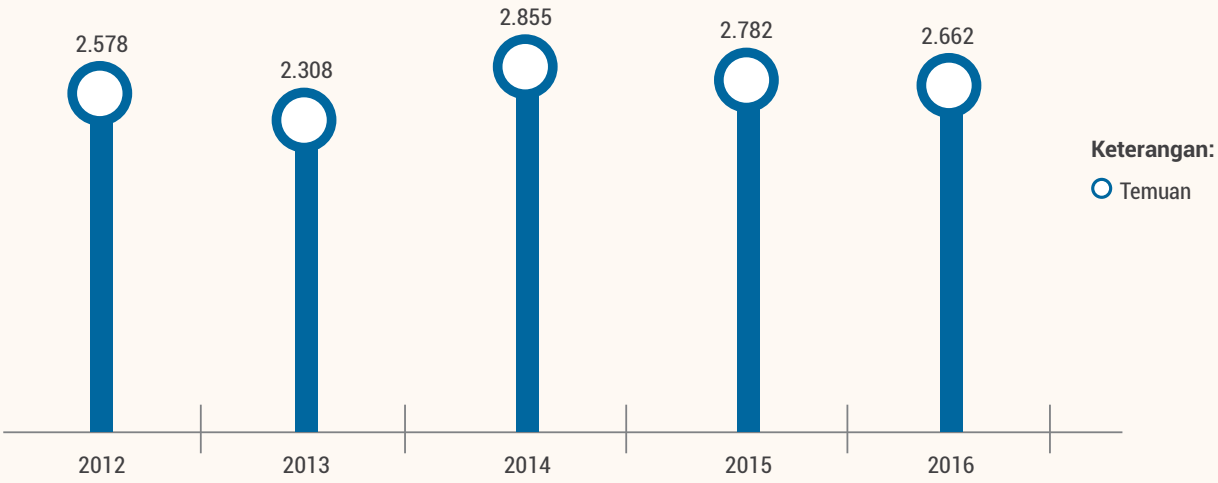

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT 2016

Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan oleh auditee kepada Kepala IAD, yang kemudian dievaluasi untuk menetapkan, apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada auditee dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "*pending item*" diminta untuk diselesaikan oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, tindak lanjut temuan *audit internal* yang telah dilakukan oleh Perseroan selama 5 (lima) terakhir dapat dilihat pada diagram berikut:

Sesuai dengan program kerja tahun 2016, telah dilakukan audit dengan resume tindak lanjut audit sepanjang tahun 2016 disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Selesai	Belum Selesai	Keterangan
Audit Internal					
1.	*General Audit* – Kantor Cabang	1779	1420	359	-
2.	*General Audit* – Kantor Cabang Syariah	403	339	64	-
3.	*General Audit* – Kantor Pusat	186	148	38	-
4.	Audit Teknologi Sistem Informasi	294	242	52	-

ASSURANCE REVIEW TERHADAP INTERNAL AUDIT

IAD Perseroan telah di-*review* secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar muti ISO 9001: 2008 terhadap fungsi Internal Audit setiap tahun, sebagai berikut:

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2014	Pelaksanaan *surveillance* audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2015	Pelaksanaan *surveillance* audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2016	Pelaksanaan *surveillance* audit untuk sertifikasi ISO 9001:2008 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun *review* (*assessment*) untuk menilai kepatuhan terhadap *charter audit internal*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari fungsi Audit intenal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya yang dilakukan oleh assessor independen dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali, yaitu pada tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT PWC	2014	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh *Auditor* Eksternal

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Kebijakan *Audit Intern* Perseroan telah diimplementasikan sejak tahun 2004 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Kebijakan *Audit Intern* Perseroan dengan perubahan terakhir pada PD No 08/PD/IAD/2013 tanggal 5 Desember 2013, pada Bab 1. Pendahuluan bagian 1.3 Pengendalian Intern sub bagian 1.3.3 IAD dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern menjelaskan bahwa IAD merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. IAD dalam kegiatan audit dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar, serta terpenuhinya kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana secara baik. Efektivitas dapat ditunjukan dengan nilai tambah yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan bank yang dibuktikan dengan semakin menurunnya temuan audit dalam dua tahun terakhir, berbagai capaian kinerja Perseroan dan penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2016.

INTERNAL FRAUD

Selama tahun 2016, terdapat penyimpangan internal sebanyak 24 kasus dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyimpangan internal (*internal fraud*) selama tahun 2016

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai *Tetap*		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah *internal fraud*	-	-	31	24	-	-
Telah diselesaikan	-	-	31	1	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	23	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	2	-	-

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perseroan berada di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan bersama-sama dengan Compliance Division.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

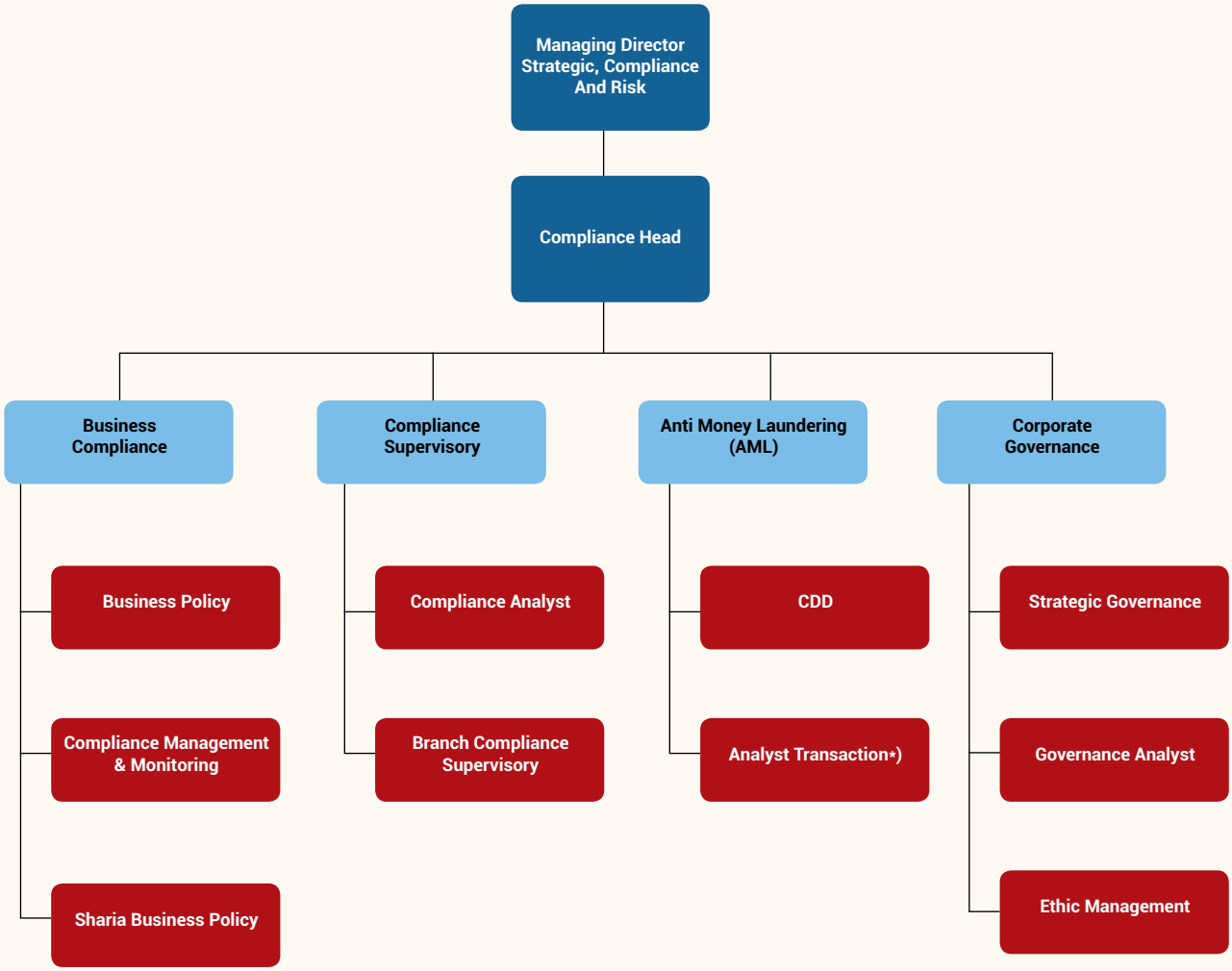

Struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Bank mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas:

1. Compliance Director yaitu anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank.
2. Compliance Division adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan dilaksanakan oleh Compliance Director. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umumdan telah melalui Fit and Proper Test sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama dan atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi

Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda/ dissenting opinion apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroam terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang serta memastikan bahwa Satuan Kerja Kepatuhan yang dibentuk oleh Bank telah memahami mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
9. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Bank untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan di Bank dilaksanakan oleh Compliance Division. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan dipimpin oleh Kepala Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia;
2. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

PROFIL KEPALA FUNGSI KEPATUHAN

Sudaryo Bagyo Utomo

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1987.

Menjabat sebagai Kepala Compliance Division (CMPD) sejak 1 November 2012. Sebelum menjadi kepala CMPD telah menduduki berbagai posisi kunci di Perseroan, yaitu Kepala Cabang KC Gresik (2002-2008), Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (2008-2010), Senior Manager Compliance Policy & Monitoring (2010-2011), Compliance Policy & Monitoring Dept Head (2011) dan System Development Audit Dept Head (2011 - 2012).

Telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 4 (2014), Sertifikasi Kepatuhan dan AML *Level* 1 (2015). Selain itu, mengikuti pelatihan dan *workshop* di dalam negeri, antara lain: Implementasi *Internal Control* (*Coso - Based*) (2012), Mengintegrasikan 11 (Sebelas) Faktor *Self Assesment* GCG Sebagai Elemen Memperkuat Tingkat Kesehatan Bank (2013), Training For Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan *Risk Management Competetency For Banking Profession Level* 4 (2014), Seminar Strategi Industri Perbankan (2015), Bara Risk Forum (2016) dan SESPIBANK Angkatan 65 (2016) serta pelatihan di luar negeri yaitu *Intergrated Governance*, *Risk Management And Compliance* (2014).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN COMPLIANCE DIVISION

Dalam mendukung kegiatan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
   b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
   c. Bertindak sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhanPerseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2016

Fungsi kepatuhan senantiasa berupaya mewujudkan pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana strategis Perseroan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu fungsi kepatuhan telah menusun program kerja dan memberikan laporan realisasi program kerja tersebut secara berkala.

Rencana Kerja Fungsi Kepatuhan

Sebagaimana diatur dalam pasal 16 PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 mengenai kewajiban pelaporan Rencana Kerja Kepatuhan (RKK) program kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2016 yang meliputi serangkaian aktifitas sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2016 Bank akan melaksanakan serangkaian aktifitas yang meliputi:
   a. Melakukan sosialisasi ketentuan baru yang diterbitkan oleh regulator kepada unit kerja terkait, khususnya regulasi yang berkaitan dengan aktivitas dan produk perbankan baik Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah.
   b. *Review*, evaluasi dan revisi terhadap ketentuan internal Bank yang saat ini sedang berlaku sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan ketentuan internal tersebut sesuai dengan ketentuan eksternal yang mengaturnya.

c. Berkordinasi dengan unit kerja pengelola Sumber Daya Manusia dalam memberikan edukasi tentang *Compliance Awareness* kepada pegawai baru selama masa orientasi sebelum melaksanakan tugas sesuai penempatan.

d. Memastikan setiap rancangan peraturan internal tidak bertentangan dan/atau sesuai dengan ketentuan regulator yang ada, hal ini diatur dalam ketentuan Bank

   KD No. 13/DIR/DSP/2009 tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana diubah melalui KD No. 03/DIR/LLDD/2011 tentang Tata Urutan Peraturan Intern Bank, yang mengatur bahwa setiap rancangan peraturan internal wajib disampaikan kepada satuan kerja kepatuhan untuk mendapatkan kajian aspek kepatuhan. Selain rancangan ketentuan baru, Unit Kerja Kepatuhan juga akan memastikan aspek kepatuhan atas produk baru dan aktifitas baru yang akan diluncurkan Perseroan.

e. Melakukan *monitoring* terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada pihak regulator terkait dengan tindak lanjut temuan pemeriksaan, penyampaian laporan serta kewajiban-kewajiban lainnya.

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Compliance Division sebagai unit yang mengelola fungsi kepatuhan di Perseroan melalui kegiatan sertifikasi kepatuhan, pendidikan, seminar baik dalam maupun luar negri.

g. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja yang terkait dalam melakukan pengelolaan risiko, pengendalian internal serta fungsi kepatuhan yaitu Internal Audit Division, Risk Management Division dan Compliance Division.

h. Melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan relokasi maupun pembukaan kantor (*outlet*) baru melalui *Compliance Check List.*

2. Dalam rangka pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berdasarkan PBI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012, Perseroan akan melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang meliputi:

   a. Melakukan sinkronisasi atas ketentuan internal tentang pengelolaan APU dan PPT di Perseroan untuk senantiasa sesuai dengan ketentuan regulator, khususnya ketentuan-ketentuan baru yang akan diterbitkan oleh regulator sepanjang tahun.

   b. Melakukan *refreshment* dan sosialisasi ketentuan operasional APU dan PPT secara berkelanjutan kepada pegawai dan calon pegawai baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung terkait dengan operasional APU dan PPT.

   c. Melakukan proses analisa terhadap transaksi keuangan secara tepat waktu sesuai komitmen kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

   d. Melaporkan transaksi keuangan tunai (*Cash Transaction Report*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) kepada lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

   e. Penyediaan dan penyampaian permintaan data dari pihak penegak hukum dan perpajakan terkait transaksi keuangan untuk mendukung keperluan penyelidikan dan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

3. Pada tahun 2016 Bank berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan *Compliance Division* untuk melakukan *review* dan evaluasi tingkat kepatuhan pada operasional Kantor Cabang melalui organ *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO). Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah:

a. Meningkatkan sinergi dengan Internal Audit Division terutama dengan Regional *Office Audit* (organ Internal Audit Division) dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap operasional di Kantor Cabang dalam upaya mendukung tercapainya *Zero Tolerance To Fraud*.
b. Melakukan evaluasi terhadap data hasil monitor yang telah dilaksanakan (*historical data*) serta data terkait lainnya yang berasal dari unit kerja lain dalam menghasilkan Peta Kepatuhan yang akan digunakan sebagai *feedback* pelaksanaan *monitoring* berikutnya.
c. Mengoptimalkan penggunaan sistem *monitoring* kepatuhan (*Compliance Control Application*) oleh petugas BCSO dalam melakukan proses evaluasi di Kantor Cabang.

4. Rencana kerja peningkatan GCG pada tahun 2016 adalah sesuai tahapan pada Roadmap GCG 2014 - 2017 di mana tahun 2016 telah memasuki fase III Strengthening the System yaitu fokus dalam melakukan *continuous improvement* terhadap sistem pelaksanaan GCG yang sudah berjalan, dengan tahapan:
   a. Evaluasi dan/atau penyempurnaan secara berkala kebijakan dan prosedur.
   b. Evaluasi dan/atau penyempurnaan secara berkala sruktur organisasi dan/atau organ pendukung.
   c. Optimalisasi dan tindak lanjut rekomendasi *third party assessment event* (berkala).
   d. Evaluasi dan atau penyempurnaan penerapan *ASEAN Scorecard* (berkala).
   e. Pelaksanaan kurikulum GCG *development* untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait penerapan GCG (berkala).
   f. Implementasi pengendalian Gratifikasi dengan mengoptimalkan kegiatan pelaporan atas gratifikasi yang diterima serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan.
   g. Implementasi ISO 9001:2008 pada Risk Management Division dan Compliance Division guna meningkatkan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan dalam mendukung terciptanya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.
   h. Partisipasi dalam GCG *Award* dengan target menjadi lima besar dalam *event Annual Report Award* (ARA) dan *ASEAN Scorecard*.

REALISASI PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan telah melakuka beberapa kegiatan guna merealisasikan program kerja yang telah disusun, realisasi kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah berikut :

1. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, selama Periode 2016 Perseroan telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang meliputi:
   a. Mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan langkah untuk mengharmonisasikan antara kepentingan komersial Perseroan dengan ketaatan terhadap ketentuan eksternal yang antara lain meliputi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Dalam

rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Ketentuan Eksternal Kepada Unit Kerja Terkait. Ketentuan eksternal baru terbit yang telah disosialisasikan oleh Compliance Division kepada unit kerja operasional, diantaranya adalah Ketentuan Peraturan Perundangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan ketentuan regulator bank lainnya.
2) Memastikan kesesuaian rancangan peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan regulator lainnya yang berlaku dengan melakukan kajian aspek kepatuhan. Kajian aspek kepatuhan yang telah disampaikan kepada unit-unit kerja terkait selama periode 2016 diantaranya adalah kajian aspek kepatuhan atas Kebijakan dan Prosedure Penerapan Budaya Risiko, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), Petunjuk Pelaksanaan Penetapan *Loan to Value* (LTV), Peraturan Internal tentang Tabungan Khusus *Tax Amnesty*, Petunjuk Pelaksanaan *Bancassurance*, Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Credit Line kepada Lembaga Non Keuangan, Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Perseroan, Petunjuk Pelaksanaan tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, *User Requirement* Pengembangan Aplikasi Laku Pandai dengan MKM, Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), Penerimaan Dana Tebusan Amnesti Pajak di UUS Perseroan, Usulan Program Bagi Agen dan Nasabah Tabungan BTN Cermat Laku Pandai, Petunjuk Pelaksanaan Proses Bisnis *Asset Management*, Petunjuk Pelaksanaan KPR BTN Bersubsidi & Subsidi Bantuan Uang Muka, Pengembangan Produk Rekening Dana Nasabah (RDN), Ketentuan Internal mengenai *High Quality Liquid Asset* (HQLA).
3) Perseroan juga melakukan *review* terhadap ketentuan internal eksisting dalam rangka memastikan konsistensi kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Selama Periode 2016 antara lain: *review* atas Manajamen Teknologi Sistem Informasi (MTSI) Syariah, *review* atas SOP Alih Daya, *review* atas ketentuan Bank tentang *Bancassurance*, *review* atas ketentuan tentang Pensiun, Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Program Penawaran Pensiunan Sukarela Terbatas (PPST), *review* atas Kebijakan Ketentuan Priority Banking, *review* atas Petunjuk Pelaksanaan Penetapan LTV untuk Kredit Kepemilikan Properti & Kredit Konsumsi Beragunan Properti dan pelaksanaan Pemberian Fasilitas Indent untuk KPR/ Apartemen, *review* atas ketentuan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, *review* atas ketentuan tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank (PKPB) Unit Usaha Syariah.

2. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Bank melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU dan PPT.
3. Peningkatan Efektifitas Kepatuhan Kantor Cabang. Bank berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan Compliance Division melalui organ *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO)

dalam melakukan *review* dan evaluasi tingkat kepatuhan pada operasional Kantor Cabang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCSO telah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan operasional Kantor Cabang dengan menggunakan sistem *Compliance Control Application* (CCA); *monitoring* terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan Perseroan di Kantor Cabang yang dibuat oleh Kantor Pusat dan sosialisasi kepada pejabat dan pegawai Kantor Cabang sebagai *refreshment* terhadap ketentuan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Terkait aktivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan selama tahun 2016, fungsi kepatuhan telah melakukan implementasi pengendalian Gratifikasi; Penerapan ASEAN CG *Scorecard* Sebagai Tolok Ukur Penerapan Tata Kelola (CG); Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank yang hasilnya telah dilaporkan kepada OJK dalam laporan RBBR adalah Peringkat Komposit 2 (Baik) dan mengikuti GCG *Third Party assessment*.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis, dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan Bank dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Risiko Kepatuhan yang dihadapi adalah pengenaan denda baik pada unit Konvensional maupun Syariah dengan komposisi jenis pelanggaran secara frekuensi sebagian besar merupakan sanksi kesalahan dalam pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), Laporan Bank Umum (LBU). Tingkat pengenaan denda tahun 2016 lebih rendah dibandingkan periode tahun 2015.
2. Potensi Risiko Kepatuhan yang siginifikan di periode yang akan datang masih pada aktifitas pelaporan SID dan LBU, karena masih signifikannya pengenaan denda pada aktifitas SID dan LBU selama beberapa periode *crash program data cleansing* SID oleh Bank Indonesia.
3. Sehubungan potensi denda sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan telah menetapkan langkah-langkah *preventif* dan *korektif* yang efektif dalam rangka memitigasi potensi risiko kepatuhan yaitu pengenaan denda SID dan LBU yang signifikan dari Bank Indonesia pada periode berikutnya , antara lain :
   a. Melakukan perubahan sistem pelaporan SID menjadi secara sentralisasi, saat ini masih desentralisasi. Setelah diubah menjadi sentralisasi, nantinya masing-masing Kantor Cabang pelapor SID terlebih dahulu melaporkan data SID kepada Kantor Pusat, selanjutnya Kantor Pusat akan melakukan verifikasi data lalu kemudian dikirim apabila sudah tidak terdapat kesalahan akan dilaporkan kepada BI.
   b. Melakukan kajian dan usulan perubahan struktur organisasi Kantor cabang/Kantor Pusat maupun perubahan *Job Description* terkait proses pelaporan SID serta aplikasi *monitoring* kelengkapan pelaporan SID oleh Divisi terkait.
   c. Mengoptimalkan *internal control* dalam proses pembinaan petugas yang dapat dilakukan dalam bentuk teguran, *coaching* dan pendampingan kepada Kantor Cabang baik konvensional maupun syariah yang masih terdapat kesalahan dalam pembuatan pelaporan SID/LBU/LSMK.
   d. Melakukan Mapping data kelengkapan persyaratan mandatory kredit dalam pelaporan SID/LBU oleh unit bisnis dan dikoordinasikan oleh unit supporting.

4. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian diwujudkan dengan mematuhi beberapa ketentuan terkait penerapan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada rasio-rasio sebagai berikut:
   a. Hasil *self assessment* perhitungan KPMM Bank sesuai profil risiko untuk posisi

      31 Desember 2016 adalah sebesar 9,16% sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 adalah sebesar 9.17%. Rasio KPMM (tingkat permodalan) yang dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2016 adalah 20,30%, sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 Rasio KPMM Bank adalah sebesar 16,58%, sehingga dengan demikian Rasio KPMM Bank masih memadai untuk menyerap risiko.
   b. Selama periode laporan, tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.
   c. Rasio PDN terhadap Modal posisi 31 Desember 2016 adalah sebesar 1,35%, sehingga Perseroan masih berada di bawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20%. Sedangkan rasio PDN Bank pada periode yang sama tahun 2015 sebesar 1,63% atau mengalami penurunan sebesar 0,28%.

PELAKSANAAN AKTIVITAS KEPATUHAN LAINNYA

Unit Kerja Managemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan standarisasi proses bisnis mengacu pada standar internasional dalam rangka melakukan penyempurnaan dan perubahan pada proses bisnis. Proses standarisasi internasional yang dilakukan oleh Unit Kerja Managemen Risiko dan Kepatuhan adalah mengikuti sertifikasi ISO 9001:2008. Pada tanggal 30 Desember 2015 Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mengikuti sertifikasi ISO 9001:2008 dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001:2008.

Selain itu, Perseroan telah memulai implementasi penerapan *Combine Assurance* yang diinisiasi Control Unit (*Risk Management Division, Compliance Division* dan *Internal Audit Division*) serta unit kerja lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi *internal control* di seluruh aspek operasional Bank melalui program *Zero Tolerance to Fraud and Zero Defect.*

Program *Zero Tolerance to Fraud and Defect* berpedoman pada Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Fokus implementasi program pada tahun 2016 adalah yang pilar Pencegahan melalui kegiatan *awareness* atau sosialisasi program *Zero Tolerance to Fraud and Defect* di Cabang dan Kantor Wilayah. Kegiatan *awareness* atau sosialisasi program *Zero Tolerance to Fraud and Defect* pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada beberapa Cabang dengan prioritas urutan pelaksanaan berdasarkan pertimbangan potensial risiko opersional dan risiko fraud (berdasarkan data historis). Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun 2017 dengan target seluruh Kantor Cabang dan Kantor Wilayah akan dilakukan *awareness Zero Tolerance to Fraud and Defect.*

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Selama periode 2016, pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan fungsi kepatuhan Perseroan diantaranya *Workshop* hukum property dan transaksi; Pelatihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan; Pelatihan analisa Kredit Komersial; Pendidikan Interpretasi dan Evaluator KPKU BUMN 2016; Pendidikan dan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan *Level* 3; *Workshop IT Security Master Plan; Training Leadership; Workshop* ASEAN

CG *Scorecard* tahun 2016; *Workshop* Risk *Awareness* Banking; *Workshop* Manajemen Risiko Operasional; *Workshop Envisioning* Penyusunan RSTIK (Rencana Strategis Tekhnologi Informasi & Komunikasi); *Workshop* Program Budaya Perusahaan; *Workshop Preview Requirement Malcolm Balridge* 2016; Pelatihan FKDKP Angkatan Ke 1 Tahun 2016; *Workshop* Digital Banking; Pelatihan Pembiayaan Komersial Syariah Tahun 2016; Pelatihan *Business English Conversation for Executive; Strategy Development and Alignment Workshop* terkait penyusunan cetak biru transformasi Bank; *Workshop* Demand Management; *Workshop Sustinability Performance;* Pendidikan SESPIBANK (Sekolah Staf dan Pimpinan Bank) angkatan 65 tahun 2015; *Training the 7th batch* CGLP ASEAN CG *Scorecard; Workshop TIM btn Branch Award BBA Based on malcolm baldrige* PKU; *Workshop* persiapan *spin-off* USS BTN; Pelatihan khusus bagi pejabat analis TKM dan Auditor oleh FKDKP; *Training to be top 50 team ASEAN CG Scorecard* 2016 dan *Training* penyusunan kebijakan dan prosedur RSCA.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Perseroan senantiasa melaksanakan penerapan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2016, Kegiatan terkait pelaksanaan program APU-PPT yang telah dilaksanakan Perseroan:

1. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Selama Periode Januari s.d. Desember 2016 tercatat 6.157 transaksi (terdiri atas 6.002 laporan LTKT dan 155 laporan LTKM) yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

No.	Bulan Laporan	Jenis Laporan		Total
		Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	
1.	Januari	519	11	530
2.	Februari	404	17	421
3.	Maret	420	13	433
4.	April	457	08	465
5.	Mei	435	11	446
6.	Juni	603	27	630
7.	Juli	389	9	398
8.	Agustus	446	7	453
9.	September	470	13	483
10.	Oktober	490	11	501
11.	Nopember	508	13	521
12.	Desember	861	15	876
Jumlah		**6.002**	**155**	**6.157**

2. Pelaporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL) / *International Fund Transfer Instruction Report* (IFTI). Selama Periode Januari s.d. Desember 2016 tercatat 1.086 transaksi dana dari dan ke luar negeri yang telah disampaikan kepada PPATK.

No.	Bulan Laporan	Laporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL)
1.	Januari	102
2.	Februari	94
3.	Maret	95
4.	April	99
5.	Mei	88
6.	Juni	81
7.	Juli	70
8.	Agustus	82
9.	September	94
10.	Oktober	97
11.	Nopember	80
12.	Desember	104
Jumlah		**1.086**

3. Pelaporan Kepada Aparat Penegak Hukum dan Regulator dalam rangka koordinasi dan pelaporan Bank kepada Aparat Penegak Hukum ataupun regulator. Fungsi kepatuhan telah dilakukan pemantauan terhadap data nasabah sesuai permintaan. Selama Periode Januari s.d. Desember 2016 ini terdapat tindak lanjut penyampaian informasi (laporan) sebagai berikut:

No.	Bulan Laporan	Jumlah Laporan					Total
		Kantor Pajak	KPK	PPATK	BNN	Lainnya	
1.	Januari	60	1	7	0	0	68
2.	Februari	51	1	7	1	0	60
3.	Maret	86	5	18	0	1	99
4.	April	66	16	12	0	0	94
5.	Mei	105	8	11	0	0	124
6.	Juni	89	11	21	0	0	121
7.	Juli	109	86	8	0	0	203
8.	Agustus	114	5	8	0	1	128
9.	September	176	25	23	0	1	225
10.	Oktober	160	6	6	0	0	172
11.	Nopember	200	32	9	0	0	241
12.	Desember	240	45	7	0	0	292
Jumlah		**1.456**	**241**	**137**	**1**	**3**	**1.827**

4. Sosialisasi *Refreshment* Ketentuan APU dan PPT serta Sosialisasi *Enhancement* Aplikasi APU dan PPT. Dalam mendorong penerapan APU dan PPT yang patuh dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya Perseroan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem aplikasi APU dan PPT dan akan secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan sistem sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan penyempurnaan terhadap sistem aplikasi serta dalam rangka melakukan *Refreshment* terhadap ketentuan APU dan PPT, pada tahun 2016 telah dilakukan sosialiasi aplikasi APU dan PPT secara bertahap kepada seluruh Kantor Cabang (Konvensional dan Syariah) serta pengedaran buku saku (*handbook*) untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas sekaligus pedoman praktis/ringkas dalam menangani hal-hal yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan diterbitkannya POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Risk Management Division (RMD) sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko terus mendorong kualitas pengelolaan risiko Bank dan melakukan *review* secara berkala guna memastikan efektifitas dan kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perseroan sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menciptakan Perseroan yang sehat.

Penerapan sistem Manajemen Risiko Perseroan Didasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/ PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Sepanjan tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang juga menjadi acuan manajemen risiko Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. *Review* terhadap PKMR telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyempurnakan panduan kebijakan manajemen risiko. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

Penerapan manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Perseroan secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang paling kurang mencakup :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Penerapan strategi manajemen risiko Perseroan sejalan dan disesuaikan dengan strategi Bisnis Perseroan. Strategi Manajemen Risiko ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depan, seperti melalui:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Perseroan serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap *level*.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa ICR (*Internal Credit Rating*) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) untuk risiko operasional.
4. Pelaksanaan *stress testing* untuk Risiko Kredit telah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, *stress testing* Risiko Pasar 2 (dua) kali dalam setahun dan *stress testing* Risiko Likuiditas dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario stress/krisis.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank, baik Komisaris dan Komite Pemantau Risiko maupun Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal. Bahasan mengenai Komite Pemantau Risiko dijelaskan secara rinci pada bagian Komite di Bawah Dewan Komiaris.

Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko sesuai Ketetapan Direksi No. 02/KD/DIR/SPMD/2015 dapat dilihat pada bagan berikut :

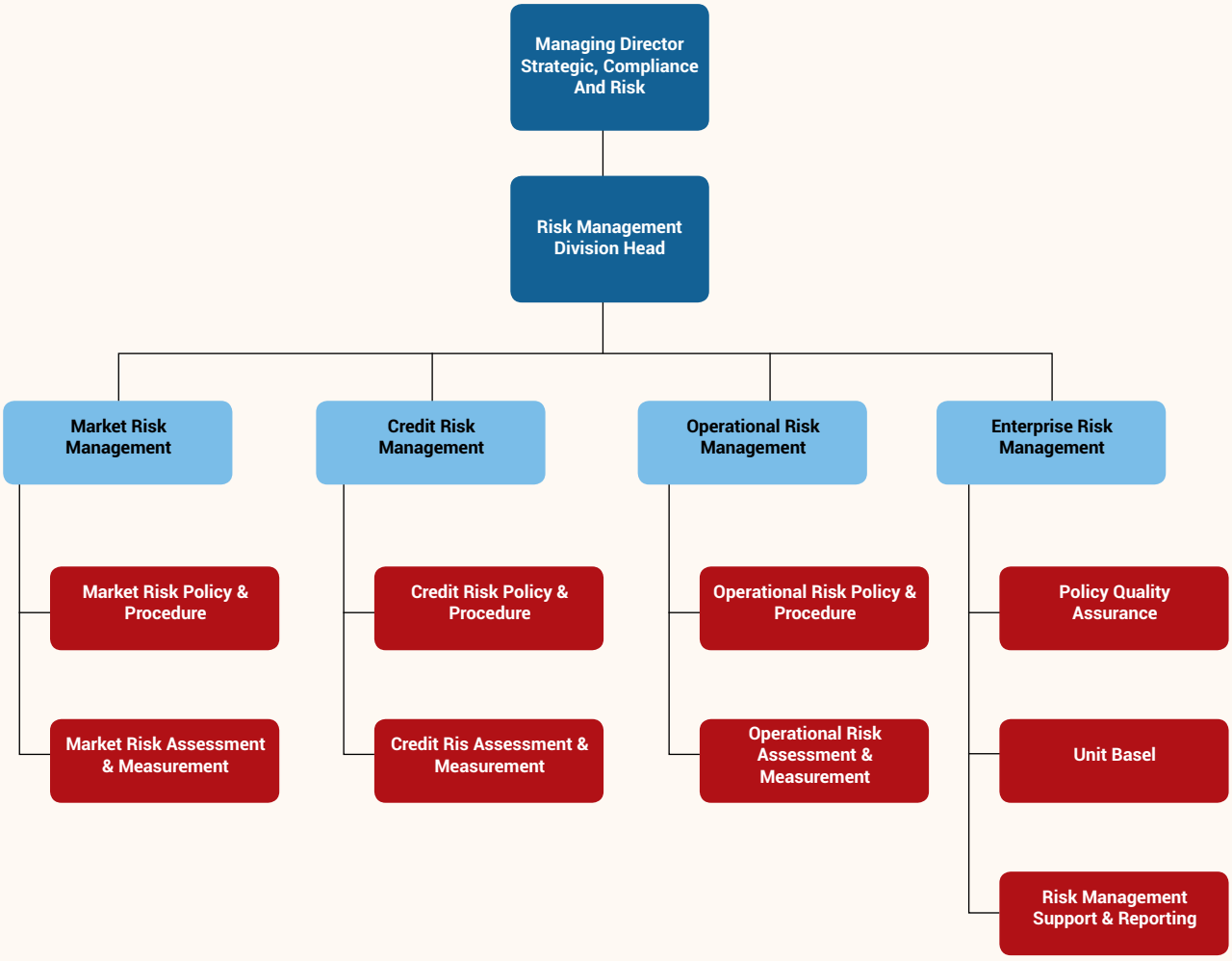

Credit Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit, Fungsi Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Setiap Departement Head dibantu oleh Unit kerja *Policy and Procedure* dan Unit kerja *Assessment and Measurement.*

Enterprise Risk Management Department berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Managing Director Strategy, Compliance and Risk. Struktur Organisasi Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department dan Enterprise Risk Management Department.

Unit Kerja Manajemen Risiko telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008

Risk Management Division (RMD) dalam pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 berkomitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROFIL *RISK MANAGEMENT DIVISION HEAD*

Hertanta

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, meraih gelar Sarjana Pertanian/ Agribisnis dari Institus Pertanian Bogor tahun 1988 dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran tahun 2005.

Menjabat sebagai Kepala Risk Management Division sekaligus sekretaris Komite Manajemen Risiko sejak 5 Mei 2015 berdasarkan SK Direksi Nomor : 257/DIR/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan diperbaharui dengan SK Direksi Nomor : 439/DIR/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Sebelum menjadi kepala RMD telah menduduki berbagai posisi kunci di Perseroan, yaitu Kepala Cabang BTN KC Mataram (Juli 2006 s/d Februari 2009), Kepala Cabang BTN KC Sidoarjo (Maret 2009 s/d April 2010), Kepala Cabang BTN KC Yogyakarta (Mei 2010 s/d Juni 2011), Kepala Cabang BTN KC Malang (Juli 2011 s/d Juni 2013), Kepala Departemen Performance - SPMD BTN Kantor Pusat (Juli 2013 s/d 4 Mei 2015) dan Kepala Risk Management Division (RMD) BTN Kantor Pusat (5 Mei 2015-sekarang).

Pada tahun 2016, Beliau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan "Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 65 dan meraih nilai tertinggi ke 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada tanggal 2 September s.d 29 Oktober 2016 dan telah menyelesaikan General Banking *level* 3 pada tanggal 11 Oktober 2016 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) .

PROGRAM SERTIFIKASI SDM RISK MANAGEMENT DIVISION

Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko salah satunya dengan meningkatkan kompetensi SDM Risk Management Division melalui program pelatihan atau sertifikasi dibidang manajemen risiko. Berikut table program pelatihan atau sertifikasi SDM Risk Management Division sepanjang tahun 2016 :

Table Program Sertifikasi SDM Risk Management Division Tahun 2016

Serifikasi	Penyelenggara	Tempat & Waktu	Jumlah Peserta
UKMR Level 1	LSPP	Jakarta, 20 Agustus 2016	3 orang
		Jakarta, 10 September 2016	3 orang
General Banking Level 3	LSPP	Jakarta, 11 Oktober 2016	1 orang

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

Terdapat 8 jenis risiko yang dihadapi Perseroan dan harus dikelola dengan baik. Kedelapan jenis risiko tersebut disebut *inherent risk* yang dijabarkan sebagai berikut :

Jenis Risiko	Uraian
Risiko Kredit	Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk.*
Risiko Pasar	Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Sesuai dengan regulasi dan mengingat bank tidak memiliki konsolidasi dengan anak perusahaan, maka pengelolaan risiko pasar hanya mencakup pengelolaan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko suku bunga yang dikelola oleh Bank sebagian besar berasal dari posisi banking book dan sebagian kecil berasal dari posisi trading book. Sedangkan risiko nilai tukar yang dikelola oleh bank hampir secara keseluruhan berasal dari posisi banking book.
Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid dan/atau Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima.
Risiko Operasional	Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Risiko Hukum	Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Bank.
Risiko Stratejik	Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan.
Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Perseroan, perilaku karyawan Perseroan dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Perseroan.

UPAYA MENGELOLA RISIKO

Perseroan berupaya meminimalkan dampak negatif dari bisnis yang dijalankan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan Perseroan, mencegah Perseroan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sehat dan berkesinambungan.

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit, membangun aplikasi *Internal Credit Rating* untuk kredit komersial dan Menerapkan *four eyes principle* dengan membentuk *Credit Risk Desk* untuk menganalisa dari segi risiko kredit termasuk restrukturisas LCRD terdiri dari CRD di Kantor Pusat, RCRH (*Regional Credit Risk Head*) di Kantor Wilayah dan BCRH (*Branch Credit Risk Head*) di Kantor 2 Cabang. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada Commercial Lending Division (CMID) yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti). Pengendalian risiko kredit untuk kredit konsumer dilakukan melalui sistem *iloan Konsumer* yaitu melengkapi aplikasi tersebut dengan *Credit Scoring Model* (CSM).

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar pada Bank secara umum ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commmite* atau AlCO) yang secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Risk Management Division.

Perseroan melakukan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan metode standar sebagaimana yang diatur oleh regulator dan analisis sensitivitas. Pengukuran risiko pasar dengan metode standar ditujukan untuk menghitung Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar. Analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Perseroan ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan analisis sensitivitas dilakukan oleh Perseroan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal Perseroan. Untuk skenario internal Bank, setiap awal tahun Risk Management Division berkoordinasi dengan *Working Group Stress Test* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Perseroan mengendalikan atau membatasi eksposur risiko pasar dengan menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury, limit dealer, budget loss limit* dan *stop loss/stop gain limit*. Perseroan juga telah menetapkan batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang

sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam PBI 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PB1/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBII2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum untuk mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Sebagai bagian pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commmite* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh Treasury Division (TRSD) dan Risk Management Division (RMD). Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur gap likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun trend kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing* menggunakan skenario *Bank specific crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress test*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Setiap awal tahun Risk Management Division berkoordinasi dengan *Working Group Stress Test* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur risiko likuiditas, Perseroan telah menetapkan limit-limit yang mencakup batasan minimal *Secondary Reserves* (SR) dan *limit maturity gap*.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko, Bank mempunyai aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED) yang bertujuan sebagai *operational risk data collection* pada Kantor Cabang (KC) dengan menggunakan kriteria *risk event* berdasarkan Basel II (7 *risk event types*). Output dari data BTN-LED ini adalah data LED secara keseluruhan dan dapat ditampilkan data LED untuk Top 10 *Risk*. Selanjutnya, data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional dari masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eksposur risiko operasional ini menjadi acuan perbaikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa dengan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap kejadian risiko yang teridentifikasi. Saat ini Perseroan sedang melakukan finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur *Risk Control Self Assessment* (RCSA). Penyusunan Kebijakan dan Prosedur RCSA yang akan dikembangkan Perseroan adalah RCSA berbasis ISO 31000:2009 yang mencakup pengembangan RCSA yang akan diselaraskan dengan KPI (*Key Performance Indicator*) pada setiap unit kerja Perseroan. Kebijakan dan prosedur RCSA nantinya akan didukung oleh Aplikasi RCSA.

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Perseroan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. Risk Management Division memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Perseroan telah menempatkan Branch Compliance Supervisory Officer (BCSO) di Kantor Cabang untuk mengelola permasalahan terkait kepatuhan yang ada di Kantor Cabang. Untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah, Bank sedang menyusun kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Aktivitas penyusunan kebijakan BCM dimulai dengan melakukan *Risk Assessment* (RA) untuk penyusunan *Business Impact Analysis* (BIA) di seluruh Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang sampel. Hasil dari BIA akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan BCM.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Risk Management Division (RMD) bersama-sama Legal Division (LGD) berdasarkan laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Perseroan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Risk Management Division dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterparty. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Report Information System* (LRIS) yang dirancang dalam bentuk website dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya. Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) untuk mengelola permasalahan hukum yang dihadapi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

PENGELOLAAN RISIKO STRATEJIK

Identifikasi Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Strategic Innovation & Performance Management Division (SIPD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan Risiko Stratejik dilakukan oleh Strategic Innovation & Performance Management Division (SIPD) secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Perfomance Indicator* (KPI) dan Risk Management Division (RMD) yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi me*review* strategi dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan SDM. Selanjutnya, Risk Management Division memantau Risiko Stratejik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (target objective). Dalam pengendalian Risiko Stratejik, Strategic Innovation and Performance Management Division (SIPD) berfungsi menganalisis gap antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Perseroan melalui Legal Divison (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan internal Perseroan. Perseroan telah menempatkan Branch Compliance Supervisory Officer (BCSO) di Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Bank apakah sesuai dengan peraturan, ketentuan maupun SOP yang berlaku. Dalam mengidentifikasi dan memantau risiko kepatuhan, Compliance Division (CMPD) membuat daftar kewajiban-kewajiban Bank kepada pihak eksternal dan me*review* ketentuan internal secara berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Di samping itu, CMPD melakukan *monitoring* terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Risk Management Division (RMD). CMPD akan memantau dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perseroan baik sewaktu-waktu maupun secara berkala padasaat terjadinya Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah terjadinya Risiko Reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi menggunakan aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Perseroan, perilaku karyawan Perseroan dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank serta melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Service Quality & Network Division (SQND) sebagai pengelola SPN akan menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Selain itu, identifikasi dilakukan melalui kajian oleh RMD atas penerbitan produk dan aktivitas baru. Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan.

Risiko Reputasi Perseroan dikelola oleh unit kerja Corporate Secretary Division (CSD) yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di

dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Service Quality & Network Division (SQND) yang menge/ola pengaduan nasabah. Untuk pelaporan ke Bank Indonesia, dilakukan oleh Service Quality & Network Division (SQND). Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) Perseroan berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara online antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Risk Management Division (RMD) dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dhi. CSD dan SQND berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi . Dalam pengendalian Risiko Reputasi, Corporate Secretary Division bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan charity saja, tetapi juga dalam bentuk program sosial lainnya. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah SQND segera menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Perseroan didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI Rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut perlu dilakukan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk memastikan proses bisnis mencapai tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan serta risiko yang dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai pencapaian tujuan perusahaan, maka perlu berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan budaya manajemen Risiko, Bank telah melakukan sosialisasi budaya risiko ke Kantor Wilayah I, II, III dan IV dengan mengundang Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah yang dihadiri oleh Kepala Cabang.

TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2016

Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2016, sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap Jajaran di Perseroan serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap *level*.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2016, sebagai berikut :
   a. Peraturan Direksi No. 04/PD/RMD/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor 08.PD.RMD.2015 tentang Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)
   b. Surat Edaran Direksi No. 03/DIR/RMD/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*
   c. Surat Edaran Direksi No. 48/DIR/RMD/2016

tanggal 04 November 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 30/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi BTN-*Loss Event Database* (BTN-LED *Tool*)

d. Peraturan Direksi Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang mengatur tentang *risk appetite* dan *risk tolerance* manajemen Perseroan yaitu yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/RMD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

e. *On Progress Review* Surat Edaran Direksi No. 33/DIR/RMD/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Profil Risiko Bank

f. *On Progress Review* Peraturan Direksi No. 06/PD/RMD/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang *self assessment* tingkat kesehatan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

g. *On Progress Review* Surat Edaran Direksi No. 41/DIR/RMD/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas.

h. *On Progress* penyusunan Kebijakan *Bussiness Continuity Management* (BCM) yang mengatur BCP,DRP,ERP dan lainnya sebagai upaya meningkatkan kesiapan Bank dalam menghadapi disaster.

i. *On Progress* dalam penyusunan kebijakan *Risk & Control Self Asessment* (RCSA).

j. *On Progress Review* kebijakan *Risk Culture*

k. *On Progress Review* ICAAP

3. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa ICR (*Internal Credit Rating*) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) untuk risiko operasional. Disamping itu juga dilakukan pengembangan aplikasi pengukuran risiko likuiditas serta sistem informasi IRRBB.

4. Pelaksanaan *stress testing*:

   a. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu disampaikan melalui Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2015, Triwulan 1/2016, Triwulan 11/2016, Triwulan 111/2016 dan pada Maret 2016 bersamaan dengan *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Kredit serta disampaikan juga kepada OJK.

   b. *Stress Testing* Risiko Kredit dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun, telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Maret 2016 dan September 2016 bersamaan dengan *Stress Testing* Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar serta disampaikan juga kepada OJK.

   c. *Stress Testing* Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun, telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Maret 2016 dan September 2016 bersamaan dengan *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas serta disampaikan juga kepada OJK guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario stresslkrisis.

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Peran Dewan Komisaris dalam pengawasan terhadap pengelolaan risiko Perseroan sepanjang tahun 2016 dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
2. Mengevaluasi dan menyetujui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko melalui Surat Komisaris kepada Direksi No. 149/KOM/BTN/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Persetujuan Hasil *Review*

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Rapat Dewan Komisaris tangga/27 Desember 2016 atas usulan Direksi me/a/ui Surat Direksi No. 1073/DIR/RMD/XI1/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Permohonan Persetujuan *Review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

3. Mengevaluasi profil risiko yang disampaikan kepada Komisaris dan Komite Pemantau Risiko secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko, serta melalui Rapat Komite Pemantau Risiko sebagai mana dijelaskan pada bagian komite di bawah Dewan Komisaris.

Peran Direksi dalam pengelolaan risiko Perseroan sepanjang tahun 2016 dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya:Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif diantaranya SE Direksi No. 03/DIRlRMD/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Surat Edaran Direksi No. 48/DIR/RMD/2016 tanggal 04 November 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Direksi No. 30/DIR/RMD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi BTN-*Loss Event Database* (BTN-LED *Tool*), Surat Edaran Direksi No. 03/DIR/RMD/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* untuk risiko kredit yang ada di dalam PO No. 11/PD/RMD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Laporan Hasil Pemantauan Eksposur Risiko Kredit secara bulanan dari RMD dilaporkan kepada Direksi, Laporan Pemantauan Risiko Likuiditas secara pekanan dari RMD dilaporkan kepada Direksi, Laporan Risiko Operasional (LED/Loss Event Database) dilaporkan dari RMD kepada Direksi.
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; Indikator ini diatur dalam ketentuan internal, yaitu : PD 11/PD/RMD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
3. Menyusun dan menetapkan limit risiko dan maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia/OJK, dan praktek prudential banking yang baik, menetapkan limit risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan di mohonkan keputusan kepada Direksi, klasifikasi limit kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per *level* jabatan, klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan transaksi *treasury* per *level* jabatan, klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per *level* jabatan.
4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan menetapkan PD No. 11/PD/RMD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan ketentuan Aset Likudit Berkualitas Tinggi yaitu Surat Edaran Direksi No. 56/DIRlTRSD/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Assets*). Selain itu telah dilakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris yang dicantumkan dalam Memo Nomor 184/M/RMD/CRMD/Ix/2016

tanggal 20 September 2016 perihal Penyampaian Keputusan Direksi Penyesuaian BWMK Kredit Komersial (Konvensional dan Syariah). Dimana dalam memo ini termasuk diatur mengenai transaksi yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.

5. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Peraturan Direksi mengenai organisasi manajemen risiko 13 yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko dan Divisi-Divisi yang mendukung penerapan manajemen risiko yaitu RMD sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, fungsi pengendalian intern oleh IAD, *Credit Risk Desk* sebagai upaya perbaikan proses bisnis kredit komersial melalui penerapan *four eyes principle* dan fungsi kepatuhan dilakukan oleh CMPD sebagai Satuan Kerja Kepatuhan termasuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja tersebut.
6. Sebagai bagian dari tanggung jawab, Direksi memberikan arahan antara lain pada laporan-laporan yang disampaikan oleh RMD, yaitu :
   a. Profil Risiko Bank yang disampaikan secara triwulanan.
   b. Laporan Pemantauan Posisi Risiko Likuiditas disampaikan secara pekanan.
   c. Laporan Hasil Pemantauan Eksposur Risiko Kredit yang disampaikan bulanan.
   d. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu disampaikan melalui Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2015, Triwulan I/2016, Triwulan II/2016, Triwulan III/2016 dan pada Maret dan September 22016 bersamaan dengan *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Kredit yang disampaikan kepada OJK.
   e. *Stress Testing* Risiko Kredit telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Maret dan September 2016.
   f. *Stress Testing* Risiko Pasar telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Maret dan September 2016.
   g. Laporan dan evaluasi implementasi *monitoring* risiko operasional Kantor Cabang (BTNLED) disampaikan ke Direksi.
7. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI melalui pemberian arahan pada Laporan *monitoring* tindak lanjut temuan pemeriksaan ekstern/intern yang disampaikan IAD secara periodik kepada Direksi, mengevaluasi hasil tindak lanjut audit tahun sebelumnya pada exit meeting audit dan Rapat Komite Audit
9. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan melakukan :
   a. Sosialisasi budaya risiko (*risk culture*) kepada MVP budaya perusahaan di Kantor Pusat dan 4 (empat) Kantor Wilayah yang dimulai sejak April 2016.
   b. Validasi laporan *Loss Event Database* (LED) dan sosialisasi budaya risiko (*risk culture*) di KC dan KCS Batam pada tanggal 12 Mei 2016, di KC dan KCS Makasar pada tanggal 17 Mei 2016, di KC dan KCS Surabaya pada tanggal 20 Mei 2016.
   c. Validasi Laporan *Loss Event Database* (LED &Sosialisasi Budaya Risiko di KC dan KCS

Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2016 dan di KC Ambon pada tanggal 02 Juni 2016.

d. Sosialisasi Budaya Risiko (*risk culture*) pada seluruh pegawai Kantor Pusat oleh Direktur Supervisi Kepada Divisi yang di supervisi pada tanggal 2 Juni 2016, 3 Juni 2016, 6 Juni 2016, 9 Juni 2016 dan 10 Juni 2016.

e. Sosialisasi program *Zero Tolerance to Fraud* dan Zero Deffect yang didalamnya terdapat sosialisasi *Risk Culture* di KC & KCS Medan tanggal 17 September 2016, KC & KCS Cilegon tanggal 24 September 2016, KC & KCS Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2016, KCS Surabaya & KC Bangkalan tanggal 05 November 2016 serta KC & KCS Cirebon tanggal 26 November 2016.

f. mengembangkan budaya manajemen risiko dengan memastikan adanya sertifikasi manajemen risiko dan program *refreshment* sertifikasi kepada pegawai dan pejabat Perseroan dan Pemberian pelatihan manajemen risiko pada pegawai baru.

10. Memastikan kecukupan dukungan keuangan/ anggaran dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko pada RKAP 2016.
11. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan mengantisipasi penerapan Basel II khususnya pilar 1, Bank telah mengimplementasikan :

1. Pengukuran risiko kredit menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pengukuran Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI NO.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/ DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Untuk implementasi Basel III Perseroan telah menerapkan LCR dan Bank telah melaporkan uji coba perhitungan Leverage Ratio (LR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) per triwulanan kepada regulator.

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Berdasarkan hasil penilaian Perseroan sendiri (Self Assessment) atas tingkat kesehatan bank, maka Profil Risiko Perseroan sebagai berikut:

Tabel *Self Assessment* Profil Risiko Posisi Desember 2015 dan Desember 2016

NO	PROFIL RISIKO	Desember 2015		
		PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1	RISIKO KREDIT	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
2	RISIKO PASAR	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
3	RISIKO LIKUIDITAS	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
4	RISIKO OPERASIONAL	MODERATE (3)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
5	RISIKO HUKUM	LOW (1)	SATISFACTORY (2)	LOW (1)
6	RISIKO STRATEJIK	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
7	RISIKO KEPATUHAN	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
8	RISIKO REPUTASI	LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
PERINGKAT KOMPOSIT		LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)

ANALISIS

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun tedapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Desember 2016		
PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT RISIKO
LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
LOW (1)	SATISFACTORY (2)	LOW (1)
LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
MODERATE (3)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
LOW (1)	SATISFACTORY (2)	LOW (1)
LOW (1)	SATISFACTORY (2)	LOW (1)
LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)
LOW (1)	SATISFACTORY (2)	LOW (1)
LOW TO MODERATE (2)	SATISFACTORY (2)	LOW TO MODERATE (2)

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Division (RMD) sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko secara rutin/harian melakukan kajian terhadap draft kebijakan, revisi kebijakan dan produk/aktivitas baru dari satuan kerja operasional. Secara mingguan melakukan pemantauan terhadap posisi Risiko Likuiditas melalui Laporan Pemantauan Posisi dan Risiko Likuiditas Pekanan. Secara bulanan RMD melakukan pemantauan terhadap eksposur Risiko Kredit dan pergerakan profil risiko pasar dan likuiditas melalui Laporan Pemantauan Eksposur Risiko Kredit dan *Monitoring* Profil Risiko Pasar dan Likuiditas. Secara triwulanan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank. Selain profil risiko, RMD melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Kredit. Untuk Risiko Operasional RMD melaporkan hasil evaluasi BTN-*Loss Event Database* dari seluruh Kantor Cabang. Secara semesteran, RMD mengevaluasi dan melaporkan tingkat kesehatan Perseroan secara bankwide (*Risk Based Bank Rating*) dan evaluasi atas kecukupan permodalan Bank dengan melaporkan Laporan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Secara tahunan, RMD mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Bank melakukan evaluasi atas aplikasi *Credit Scoring Model* (CSM) untuk proses kredit konsumer. Perseroan juga mengevaluasi dan me*review* Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas database risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu. Saat ini Perseroan sedang mengembangkan *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dan *enhancement Loss Event Database* (LED) yang membantu mengumpulkan informasi loss event yang terjadi di Kantor Cabang sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi di KC dan dapat ditindaklanjuti dengan memitigasinya.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini RMD yang memiliki unit kerja *assessment and measurement* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek baik keuangan, kinerja operasional dan kepatuhan. Hal tersebut penting agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis bank.

Auditor eksternal membantu Perseroan dalam melakukan pengawasan khususnya atas aspek keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuagan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016, telah menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender terbatas pengadaan jasa audit umum, dengan peserta tender sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memiliki afiliasi internasional;
3. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap bank berstatus perusahaan terbuka;
4. Pengalaman mengaudit Bank Umum Devisa dan PKBL;
5. Pengalaman mengaudit Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah;
6. Pengalaman menyusun laporan hasil evaluasi kinerja (LHEK).

Mengacu pada kriteria tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2016.

AKUNTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN *FEE* AUDIT

Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit serta *Fee* Audit selama 5 tahun terakhir termasuk di dalamnya Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dapat dilihat pada table berikut:

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Ruang Lingkup Audit	Opini Audit	Fee Audit
2016	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	• Audit Laporan Keuangan • Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 2.175.000.000
2015	Danil Setiadi Handaja Izin No. AP.1008	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015	• Audit Laporan Keuangan • Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.967.000.000
2014	Benyanto Suherman Izin No. AP. 0685	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 381/ KM.1.2010	• Audit Laporan Keuangan • Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.769.000.000
2013	Benyanto Suherman Izin No. AP. 0685	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 381/ KM.1.2010	• Audit Laporan Keuangan • Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.650.000.000
2012	Benyanto Suherman Izin No. AP. 0685	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 381/ KM.1.2010	• Audit Laporan Keuangan • Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.650.000.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Pada periode 2016, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan dan PKBL pada tahun buku 2016, sehingga tidak terdapat informasi *fee* jasa audit lainnya.

AUDITOR EKSTERNAL LAINNYA DAN JASA YANG DIBERIKAN

Selain Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdapat auditor eksternal lain yang melakukan audit di Perseroan pada tahun buku 2016 yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan PT SGS terkait pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2008.

TEMUAN DAN TIDAK LANJUT REKOMENDASI AUDITOR EKSTERNAL

Perseroan menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit eksternal dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Perseroan. Tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit senantiasa dimonitoring dan dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Direksi secara konsisten melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir temuan-temuan yang mungkin muncul. Tindak lanjut temuan audit eksternal yang telah dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Temuan dan Tindak Lanjut Audit Eksternal Tahun 2016

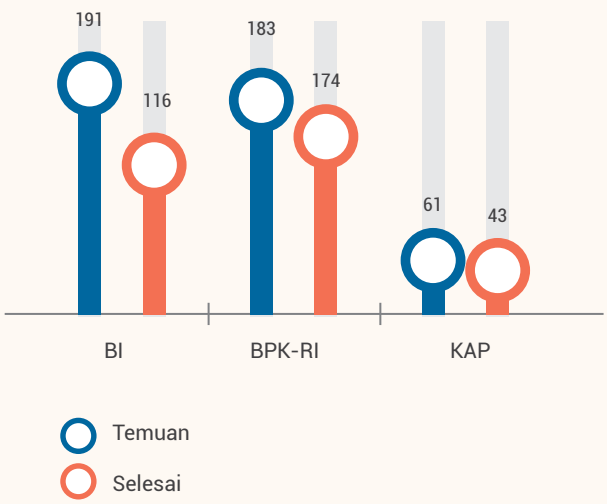

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL DAN KEPATUHAN BANK TERHADAP KETENTUAN HUBUNGAN ANTARA PERSEROAN, AKUNTAN PUBLIK DAN BANK INDONESIA

Perseroan senantiasa menjaga komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk agar pelaksanaan audit berjalan efektif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Perseroan. Komite Audit secara rutin melakukan koordinasi dengan Internal Audit Division (IAD) untuk melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti.

Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2016 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah sebagian melalui PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan terakhir diubah sebagian melalui PBI No. 14/14/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
2. SE BI No.3/31/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan tahunan Bank Umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
3. PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Ruang Lingkup pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. General audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Unit Usaha Syariah.
2. General audit atas laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Audit kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Pengendalian Internal per 31 Desember 2016 termasuk Unit Usaha Syariah.
4. Audit atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun 2016 termasuk Unit Usaha Syariah.

Adapun strategi audit adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan
   a. Komunikasi dengan regulator
   b. Berkoordinasi dengan BTN untuk mengembangkan perencanaan audit
   c. Penyusunan strategi dan perencanaan audit yang rinci
   d. Melakukan pelatihan internal untuk tim penugasan
2. Audit Interim
   a. Memahami proses bisnis, risiko dan pengendalian internal
   b. Review proses tutup buku
   c. Identifikasi dan menyelesaikan isu akunting dan auditing
   d. Pengujian pengendalian interna di Kantor Pusat dan di cabang-cabang
   e. Review kolektiilitas dan kecukupan CKPN dan KYD
3. Tindak lanjut hasil interim
   a. Update pemahaman atas pengendalian internal
   b. Tindak lanjut hasil interim
   c. Presentasi hasil interim audit
4. Audit akhir tahun
   a. *Review subsequent event*
   b. *Roll forward prosedur substantif*
   c. *Review* tutup buku 31 Desember 2016
   d. Finalisasi penyesuaian audit
   e. Menerbitkan laporan hasil penugasan
5. Laporan
   Penyelesaian PKBL, *management letter*, laporan evaluasi kinerja dan PSA 62

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Bank sebagaimana tercantum dalam *Code of Conduct*.

KEBERADAAN *CODE OF CONDUCT*

Dalam konteks tersebut, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika dan perilaku bisnis. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*. *Code of Conduct* merupakan pedoman tertulis nilai-nilai etika/moral dan perilaku yang dituntut dari segenap individu yang berhubungan dengan bisnis dan pola perilaku sesuai dengan budaya perusahaan.

PERNYATAAN PEMBERLAKUKAN *CODE OF CONDUCT* BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEGAWAI

Code of Conduct mencakup standar etika dan perilaku yang berlaku bagi Pengurus (dhi. Dewan Komisaris, Direksi) dan Pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis serta mengatur etika dalam melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pelaksanaan *Code of Conduct* membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen serta konsistensi dari segenap Pengurus dan Pegawai. Dalam rangka membangun komitmen tersebut, seluruh insan Perseroan wajib menandatangani Pernyataan sikap Insan Perseroan tentang *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

MUATAN *CODE OF CONDUCT*

Code of Conduct berisikan komitmen perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan yang merupakan perwujudan dari etika bisnis dan etika kerja bagi Insan Perseroan. Sebagai sebuah etika perilaku, diharapkan tercipta perilaku yang ideal yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan sehingga menjadi budaya kerja. *Code of Conduct* terdiri dari 4 Bab sebagai berikut:

Tabel Muatan *Code of Conduct*

Bab	Keterangan
1	**Pendahuluan** *Code of Conduct* ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Bank dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis. Implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, *Code of Conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Bank. Penerapan *Code of Conduct* yang konsisten akan menunjukan bahwa Perseroan adalah Bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip GCG.
2	**Standar Etika Bisnis** • **Etika Perseroan dengan Pegawai** Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Perseroan. • **Etika Perseroan dengan Nasabah** Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Perseroan dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah. • **Etika Perseroan dengan penyedia barang dan jasa** Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok. • **Etika Perseroan dengan Pesaing** Perseroan menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan. • **Etika Perseroan dengan Mitra Kerja** Perseroan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. • **Etika Perseroan dengan Pemerintah** Perseroan berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. • **Etika Perseroan dengan Masyarakat** Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. • **Etika Perseroan dengan Media Massa** Perseroan menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik. • **Etika Perseroan dengan Organisasi Profesi** Perseroan membina hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.

Bab	Keterangan
3	**Kebijakan Standar Prilaku** • Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. • Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan • Organ perusahaan dan pegawai Perseroan harus melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Bank.
4	**Penerapan dan Penegakan** Setiap pegawai Perseroan harus melaporkan setiap fakta penyimpangan *Corporate Code of Conduct* kepada Human Capital Division dan identitas pelapor dilindungi. Human Capital Division menindaklanjuti setiap kaporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

PENGUNGKAPAN BUDAYA PERUSAHAAN *(CORPORATE CULTURE)*

Penjabaran tentang Budaya perusahaan telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

PENYEBARLUASAN *CODE OF CONDUCT*

Pengungkapan *Code of Conduct* yang berlaku bagi seluruh *level* organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 30/PD/CSD/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedoman etika bisnis dan perilaku PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan diubah sebagaimana Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. *Code of Conduct* disebarkan kepada seluruh insan BTN dan *Stakeholders* melalui website Perseroan dan media internet yang dinamakan *Access Internal Management Standrad* (AIMS) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat.

Selain itu, agar pengungkapan dan penyebarluasan *Code of Conduct* ini dapat terlaksana dengan baik maka pada periode 2016 Bank juga telah melaksanakan sosialisasi kepada perwakilan Most Valuable Player (MVP) dari seluruh unit kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Disamping itu sejalan dengan komitmen bersih Perseroan dari gratifikasi, suap, pungutan liar, mark up dan segala perbuatan lain yang mengarah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Perseroan menyampaikan Surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada *Stakeholder* Perseroan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN *CODE OF CONDUCT*

Setiap insan Perseroan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan adalah menyangkut kesediaan insan Perseroan untuk melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya.

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Sedangkan bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain:

1. Menjadikan sosialisasi *Code of Conduct* dan Pengendalian Gratifikasi sebagai program kerja MVP;
2. Pengisian Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
3. Bekerjasama dengan KPK melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan *Code of Conduct*;
4. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
5. Penyampaian Surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada *Stakeholder* Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
6. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS);
7. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.

JENIS SANKSI DAN JUMLAH PELANGGARAN *CODE OF CONDUCT*

Jenis Sanksi

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administratif
   a. Sanksi Kategori Ringan
      - Teguran lisan
      - Teguran Tertulis
      - Pernyataan Tidak Puas

      Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah 3 (tiga) bulan.

   b. Sanksi Kategori Sedang
      - Tidak mendapatkan uang cuti
      - Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala
      - Penurunan Person Grade sebanyak 1 (satu) grade (gaji dasar menyesuaikan)
      - Masa berlakunya sanksi pembinaan pegawai adalah selama 1 (satu) tahun

   c. Sanksi Kategori Berat
      - Penurunan person grade sebanyak minimal 2 grade (gaji dasar menyesuaikan)
      - Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah selama 2 (dua) tahun.
      - Pemutusan hubungan kerja
      - Pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Sanksi Finansial

   Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran *Code of Conduct*. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka sanksi pelanggaran berpedoman pada Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2016, jumlah pelanggaran *Code of Conduct* sebanyak 108 kasus dan pengenaan sanksi, yaitu: pemutusan hubungan kerja sebanyak 9 kasus, sanksi teguran (ringan) sebanyak 74 kasus dan 25 kasus masih dalam proses pengenaan sanksi.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru) Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang memiliki peredaran luas kepada masyarakat luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/*vendor*/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya. Selain itu meminta seluruh nasabah, debitur, rekanan/ *vendor*/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI PERIODE 2016

Selama periode tahun 2016, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 34 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi Suap, kedinasan maupun gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan.

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja
Periode Januari – Desember 2016

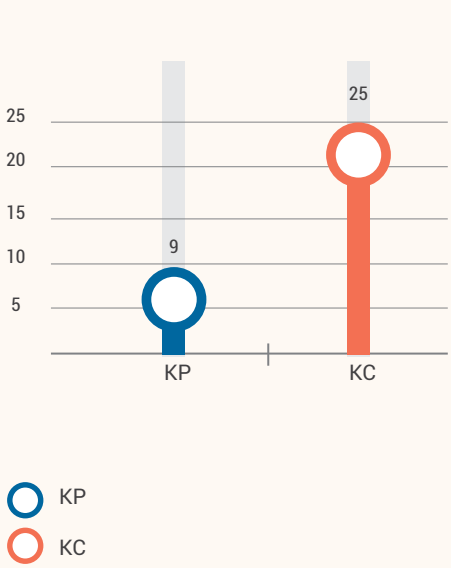

KP
KC

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis Gratifikasi
Periode Januari – Desember 2016

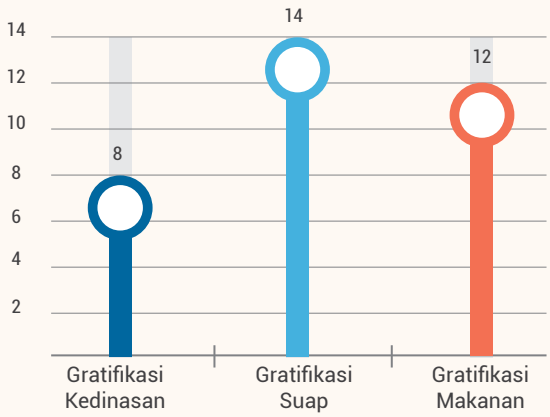

Gratifikasi Kedinasan
Gratifikasi Suap
Gratifikasi Makanan

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Status Kepemilikan
Periode Januari – Desember 2016

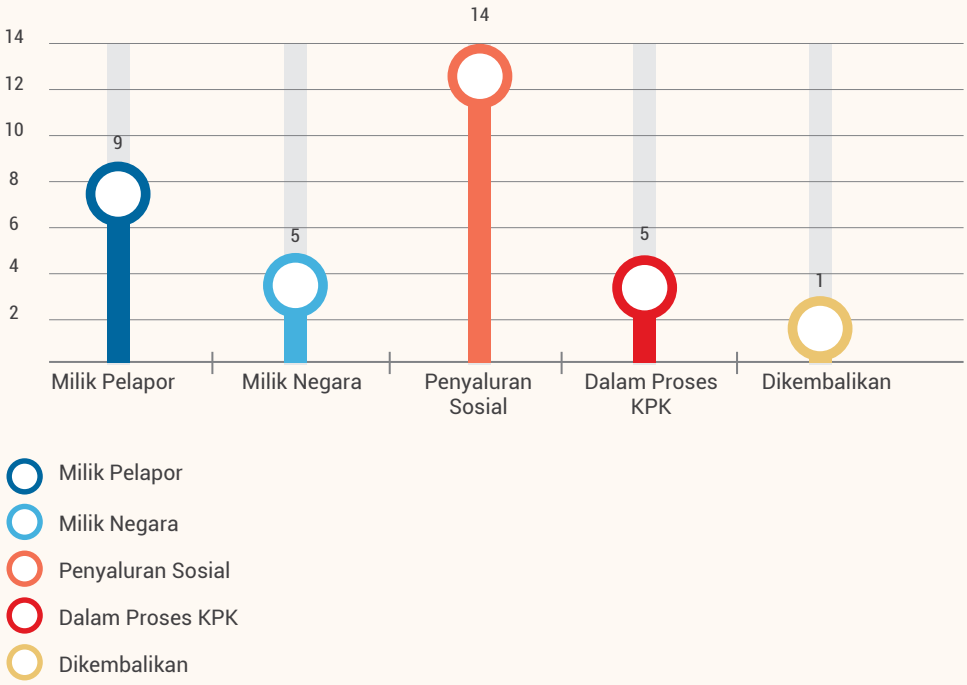

PROGRAM *AWARENESS* PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2016

- PIN Tolak Gratifikasi yang digunakan oleh seluruh insan Perseroan;
- Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi kepada perwakilan MVP seluruh unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang;
- Penerbitan Buku Saku Program Pengendalian Gratifikasi;
- Penyampaian Surat kepada Mitra Kerja/*Stakeholder* Perseroan kantor Pusat maupun kantor cabang.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran.

Kebijakan Whistleblowing Sytem (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI Nomor 11/23/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP mengenai Kebijakan Anti Fraud. WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk:

a) Melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran;
b) Secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran dan penyimpangan meliputi banyak hal dan masalah, akan tetapi dibatasi dengan apa yang dilakukan, terjadi atau terkait dengan Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Semua tindakan melanggar hukum pidana, (misalnya pencurian, penipuan, penggunaan narkoba, korupsi dan lain sebagainya)
2. Penyalahgunaan wewenang dalam melayani nasabah ataupun vendor atau pemasok lainnya (misalnya penundaan pembayaran tidak beralasan, pemerasan dan lain sebagainya)
3. Pelanggaran peraturan perpajakan, atau aturan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK
4. Perbuatan yang memabahayakan keselamatan dan kesehatan kerja
5. Perbuatan yang dapat merugikan Perseroan, baik finansial maupun non-finansial, termasuk menciderai citra Perseroan
6. Perbuatan pelanggaran berat terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Pegawai
7. Pelanggaran peraturan Perbankan yang diatur dalam No. UU No. 10/1998 jo UU No.7/1992, antara lain tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, membuka rahasia nasabah kepada yang tidak berhak, melakukan pencatatan yang tidak benar, meminta uang atas jasa pelayanan perbankan yang dilakukan , dll
8. Pelanggaran aturan internal (SOP), yang dapat menciderai integritas pelapor perusahaan, baik dibidang keuangan ataupun bidang lainnya

SOSIALISASI WBS

Sosialisasi WBS di internal Perseroan disampaikan kepada seluruh karyawan pada melalui Surat Edaran Direksi perihal Penerapan Kebijakan System Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System* – WBS). Selain itu, untuk dapat menjangkau seluruh *stakeholder* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui website Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika dan kebijakan WBS maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN WBS

Penyampaian laporan pelanggaran WBS yang dibangun oleh Perseroan adalah pelapor membuat pengaduan/ pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah pegawai, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada Tim SPP/WBS. Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan modus lainnya yang dirasakan nyaman oleh Pelapor.
2. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Tim SPP/WBS, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama Perseroan di Kantor Pusat dengan ditandai "*CONFIDENTIAL*" atau "RAHASIA" pada sampul surat.
3. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang kemudian akan diteruskan ke Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris.
4. Bila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung ke Tim SPP/WBS yang akan meneruskannya ke Direktur Utama.

TIM PENGELOLA DAN SALURAN WBS

WBS Perseroan dikelola oleh Tim WBS, meliputi: (1) Kepala Internal Audit Division (Ketua merangkap Anggota), (2) Unit Pengelola WBS (Sekretaris), (3) Kepala Compliance Division (Anggota), (4) Kepala Human Capital Division (Anggota) dan (5) Kepala Risk Management Division (Anggota)

Perseroan menerapkan mekanisme WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media:

1. Melalui kotak surat yang dikirim ditujukan kepada Tim SPP/WBS atau Direktur Utama
   PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menara BTN Lt. 20 Jl Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat-10130
2. Melalui email resmi yang ditujukan kepada Tim *Whistle blowing System* dengan alamat: wbs.btn@btn.co.id; dan
3. Melalui saluran:
   P0 Box *Whistleblowing System* (WBS) BTN Jakarta 10000
   E-mail : wbs.btn@btn.co.id
   Telepon / SMS : 0811-92-45678

MEKANISME DAN PENANGANAN PENGADUAN WBS

1. WBS Team menerima pengaduan/ pengungkapan, mencatat dan menuangkan dalam format standar yang menghasilkan:
   a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/ pengungkapan.
   b. Laporan pengungkapan (*disclosure report*).
2. WBS Team menyampaikan laporan pengungkapan

(*disclosure report*) kepada Dewan Komisaris/ Direksi (sesuai dengan kategori terlapor).

3. WBS Team melakukan penelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/ pengungkapan tersebut dan membuat resumenya, kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Direksi (sesuai dengan kategori terlapor). Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan tindak lanjut, sebagai berikut.
   a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
   b. Bekerja sama dengan Internal Auditor sesuai dengan substansi pengaduan/pengungkapan.
   c. Bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/pengungkapan terkait dengan citra/reputasi Perseroan dan/ atau menimbulkan kerugian yang besar dan/ atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Internal Auditor.
4. Tim Investigasi melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris/ Direksi. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan:
   a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti.
   b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif.
   c. Meneruskan tindak pidana kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini, WBS Team melakukan koordinasi dengan *Legal and Loan Document* Desk guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka direkomendasikan
5. Proses penelahaan awal/klarifikasi dan investigasi dimaksud dibuatkan dalam Berita Acara.
6. WBS Team melaporkan hasil investigasi kepada Dewan Komisaris/Direksi.
7. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor. Bentuk dan jenis penghargaan dimaksud ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Bagan Alur *Whistle Blowing System* (WBS)

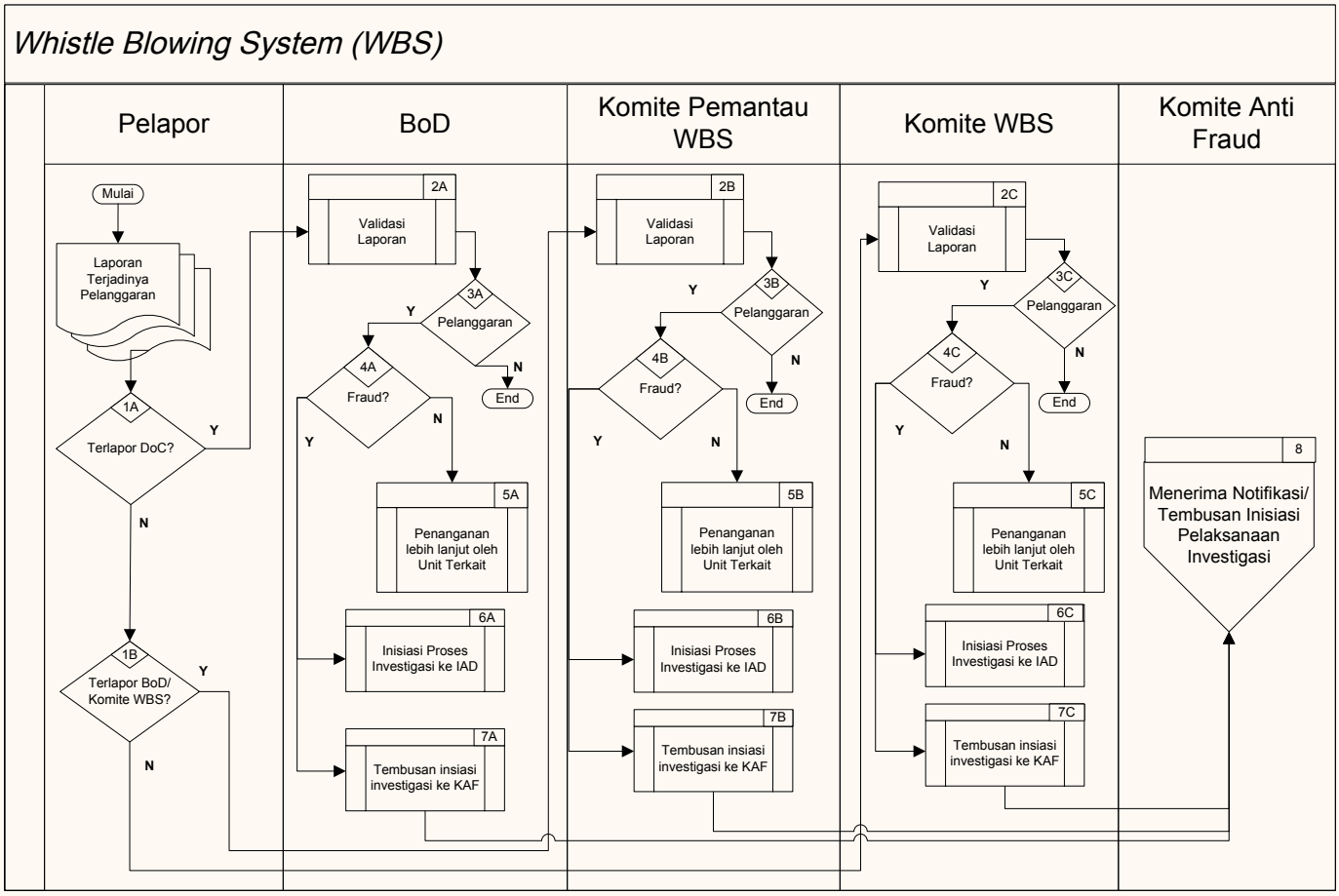

Bagan Alur Proses Sanksi-Jalur Hukum

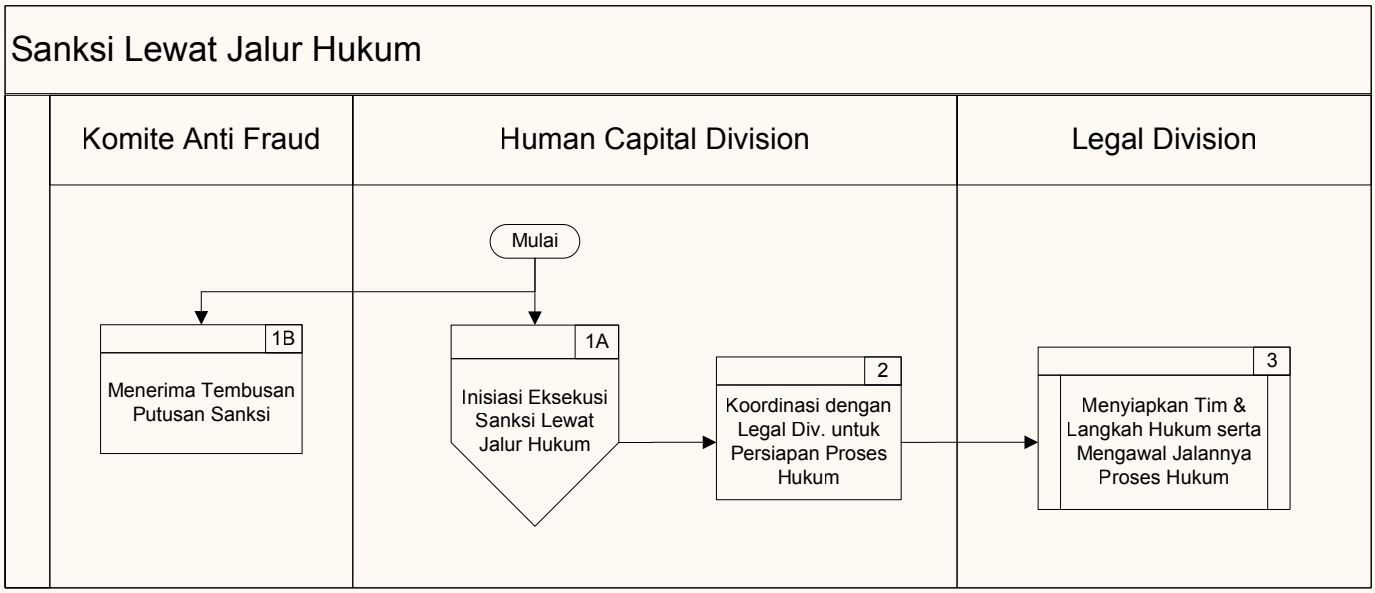

Bagan Alur Proses Sanksi-Jalur Hukum

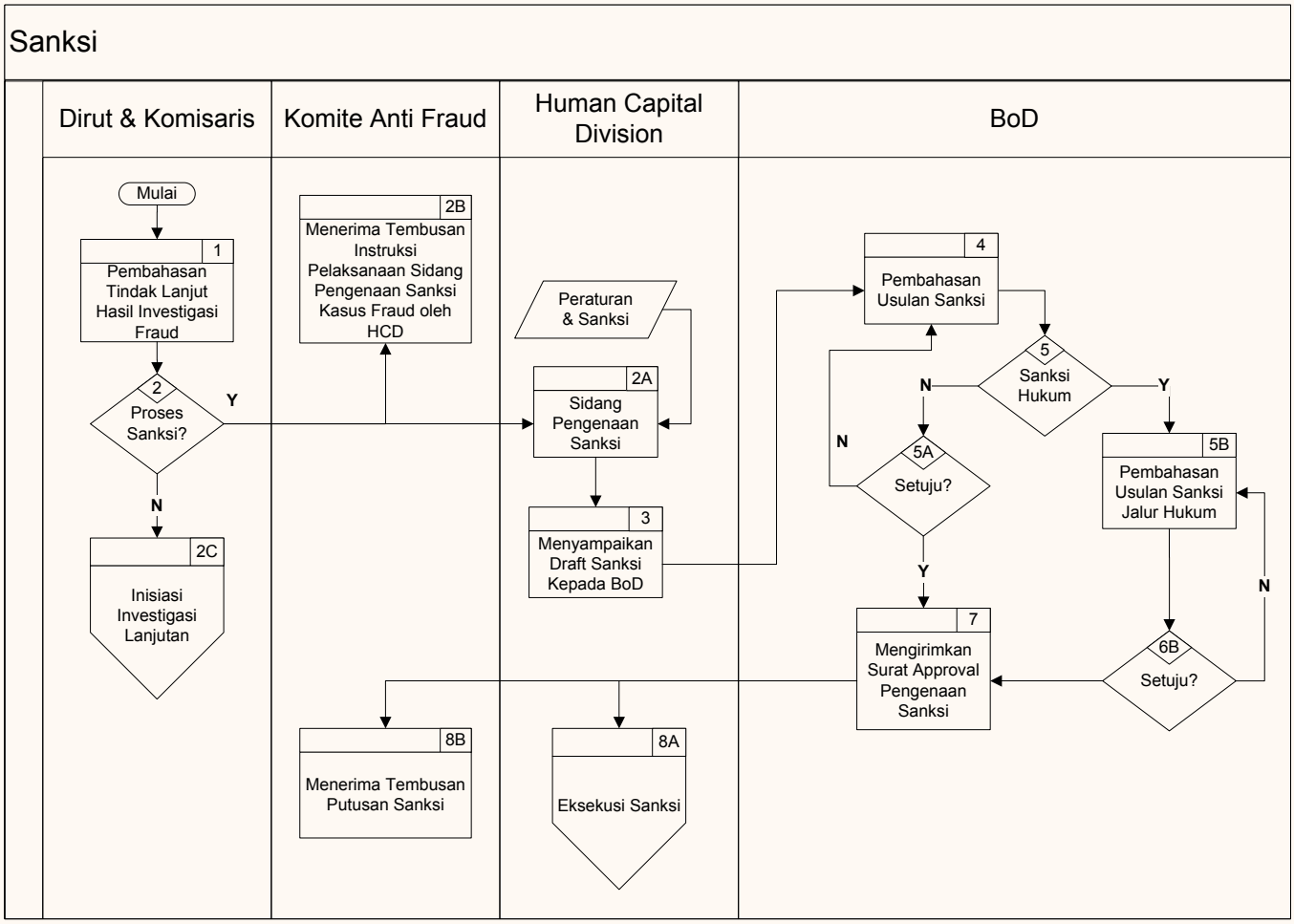

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kepada Pelapor yang beritikad baik, Perseroan memberikan jaminan perlindungan, sebagai berikut.

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, *email*) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari si Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
    a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
    b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
    c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
    d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

HASIL PENANGANAN WBS

Jumlah pengaduan dan tindak lanjutnya sepanjang tahun 2016, jumlah pengaduan yang masuk adalah sejumlah 101 pengaduan yang mencakup 20 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 38 pengaduan melalui *SMS*/*Handphone*/Datang Langsung dan 43 pengaduan melalui *Email*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk , 93 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 8 pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus). Berdasarkan 8 pengaduan yang diteruskan proses audit dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit Tahun 2014-2016

Tahun	Media Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	*SMS/ HP/* Datang langsung	*Email*	Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah diberikan sanksi (termasuk sanksi *administrative*)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2014	0	1	2	1	0	2	0
2015	6	3	9	1	14	2	1
2016	5	2	1	0	7	0	1

Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian WBS Tahun 2016

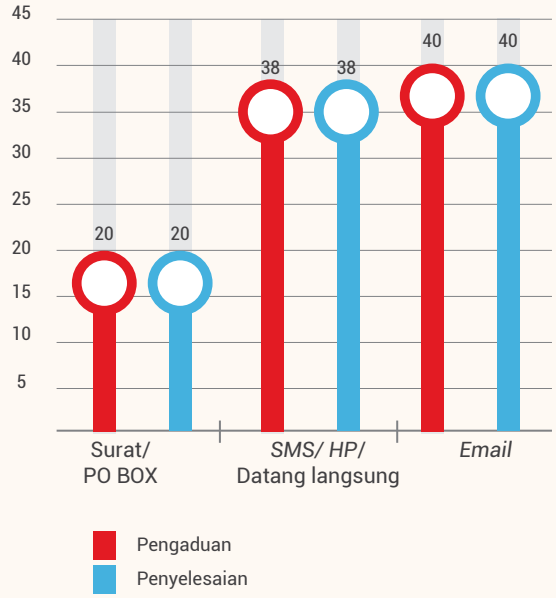

PERMASALAHAN HUKUM

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Selama periode tahun 2016, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki entitas Anak Perusahaan.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tahun 2016 Perseroan menghadapi permasalahan hukum berupa perkara/ gugatan penting dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel Permasalahan Hukum Tahun 2015 - 2016

Permasalahan Hukum	Jumlah Tahun 2015			Jumlah Tahun 2016		
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	91	10	0	42	112*	1
Dalam proses penyelesaian	127	170	1	185	31	-
Total	**218**	**180**	**1**	**227**	**143**	**1**

*dari 112 permasalahan hukum pidana, Perseroan bertindak sebagai saksi sebanyak 110 kasus.

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2015

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Posisi Terakhir
1.	Gugatan atas Proses Penerbitan Sertifikat Rumah			
	Developer rekanan BTN Unit Usaha Syariah telah Lunas dengan agunan Sertifikat Induk SHM. Lalu diberikan KPR atas 25 unit rumah dilokasi tersebut dan telah dilakukan pemecahan sertifikat atas agunan KPR nasabah(diikat SKMHT). Dalam masa tahun 2009 sampai 2013 terjadi gugatan atas proses penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan Warga Perumahan maupun Pihak Bank. Pada tanggal 13 mei 2013 putusan MA memutuskan SHM tersebut Cacat Hukum. Pada tanggal 21 Februari 2014 Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi atas objek pekara dimana dalam hamparan tersebut terdapat agunan atas 21 unit rumah nasabah KPR BTN yang dibangun Developer rekanan BTN.	Saat ini dalam proses Banding di Pengadilan tinggi	Potensi Kerugian materiil Rp758 juta	Proses Kasasi

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Posisi Terakhir
2.	Gugatan Debitur dalam Proses Pelelangan			
	Penggugat adalah debitur yang telah diserahkan Perseroan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan proses litigasi di Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dimana Penggugat menyatakan Perseroan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi.	Perkara dalam proses Kasasi, menunggu putusan MA, dimana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Perseroan Menang.	Kerugian materiil sebesar Rp5,9 miliar.	Inkracht (berkekuatan hukum tetap)
3.	Sengketa Rumah Dinas			
	Sengketa salah satu rumah dinas Perseroan, dimana Perseroan belum memperoleh pengembalian haknya atas rumah dinas tersebut karena ahli waris tidak mau mengosongkan dan merasa sudah membeli rumah tersebut.	Saat ini masih dalam proses kasasi yang diajukan oleh Perseroan ke Mahkamah Agung.	Kehilangan Asset sebesar Rp40 miliar.	Inkracht (berkekuatan hukum tetap)

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2016

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap kondisi Perusahaan
1.	Permohonan Pailit		
	Permohonan pailit yang diajukan oleh Lembaga Perkreditan Desa kepada Debitur Perseroan, dimana Perseroan turut sebagai kreditor lain yang memiliki piutang kepada termohon pailit.	Termohon dinyatakan pailit, dan tanggal 8 Desember 2016 dilakukan rapat kreditor	Potensi kerugian materiil Rp78,5 miliar
2.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)		
	Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan seluas 3.236 M2 di Desa Curug Wetan yang saat ini sedang dibangun proyek perumahan dengan menggunakan Kredit Konstruksi BTN.	Saat ini sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri	Potensi kerugian materiil Rp8 miliar
3.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)		
	Upaya perlawanan yang dilakukan developer terhadap sengketa tanah perumahan yang dimilikinya.	Saat ini penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	potensi kerugian materiil Rp5 miliar

PENGADAAN BARANG DAN JASA (*PROCUREMENT*)

Pengadaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa Perseroan dengan cara membeli atau sewa dan/atau kerja sama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya dilakukan melalui rekanan atau pihak lain yang ditunjuk atau yang dilakukan sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan perlu melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak menjadi kendala dalam operasional bisnis yang dapat menimbulkan kerugian.

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis maupun non-strategis untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta menerapkan prinsip manajemen pengendalian risiko.

Untuk mewujudkan kegiatan pengadaan dengan prinsip yang efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, tanggung jawab, serta independen, maka Perseroan mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemisahan fungsi pada Unit Pelaksana Pengadaan yaitu, unit yang melakukan seleksi calon rekanan/vendor, unit yang melakukan proses pengadaan, unit yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri; dan Unit Kerja Kepatuhan;
2. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi internal dan eksternal;
3. Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan serta pengukuran risiko operasional;
4. Berpedoman pada Budaya Kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai perusahaan, GCG, dan mematuhi *Code of Conduct* serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Pejabat pelaksana Pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan proses pengadaan, Bank mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan meliputi :

Efektif	Kegiatan *Procurement* harus sesuai dengan kebutuhan/ rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank.
Efisien	kegiatan *Procurement* dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan, dengan waktu yang telah disepakati pada tingkat harga yang terbaik
Terbuka dan Bersaing	Pelaksanaan *Procurement* harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
Transparan	Semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan *Procurement*, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa bersifat terbuka
Adil dan Tidak Diskriminatif	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun
Akuntabel	Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Tanggung jawab	Proses procurement dilaksanakan secara hati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Independen	Keputusan procurement diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan sebagai berikut:

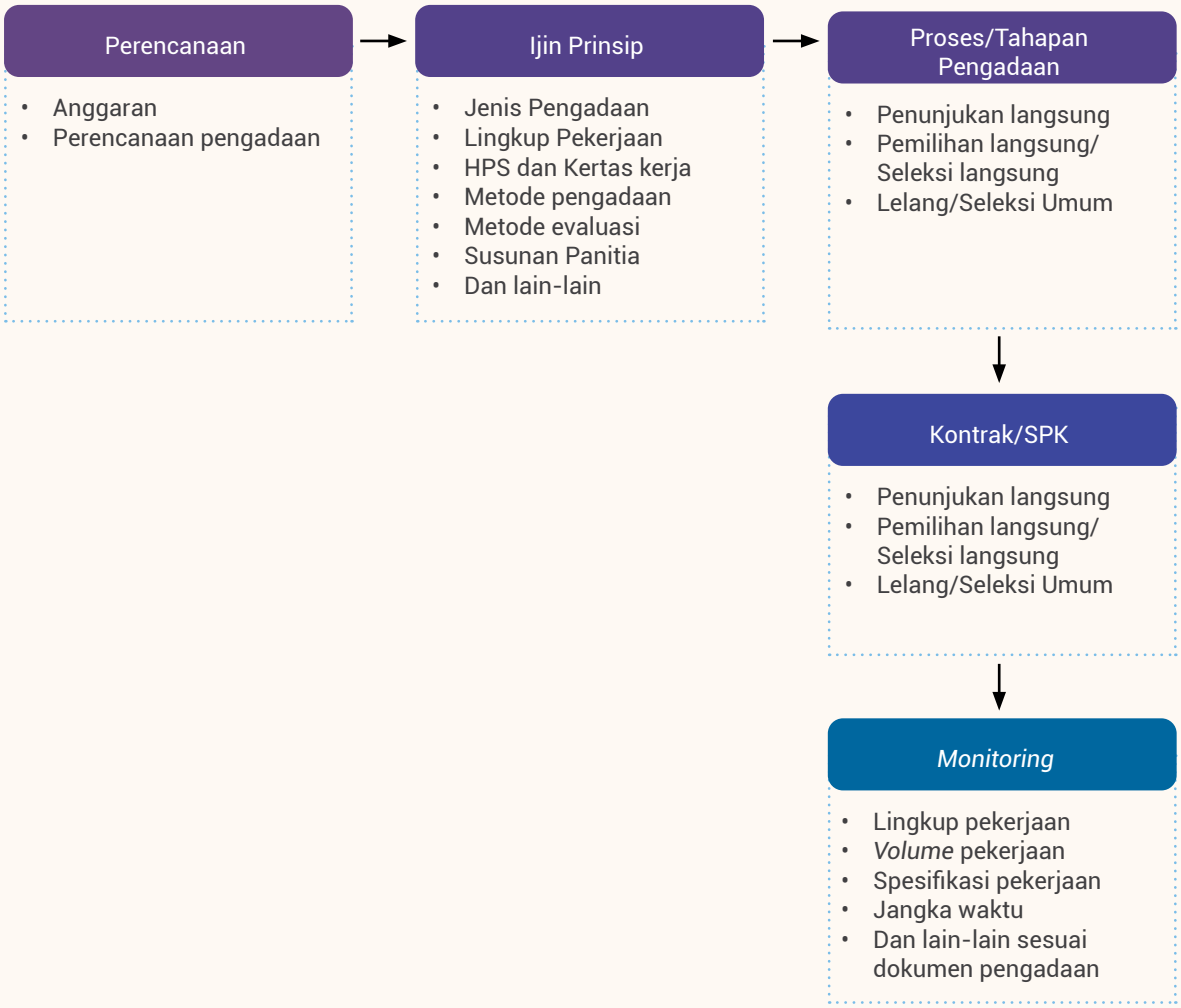

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui :

1. Pelelangan, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Alur Proses Pemilihan Pelelangan

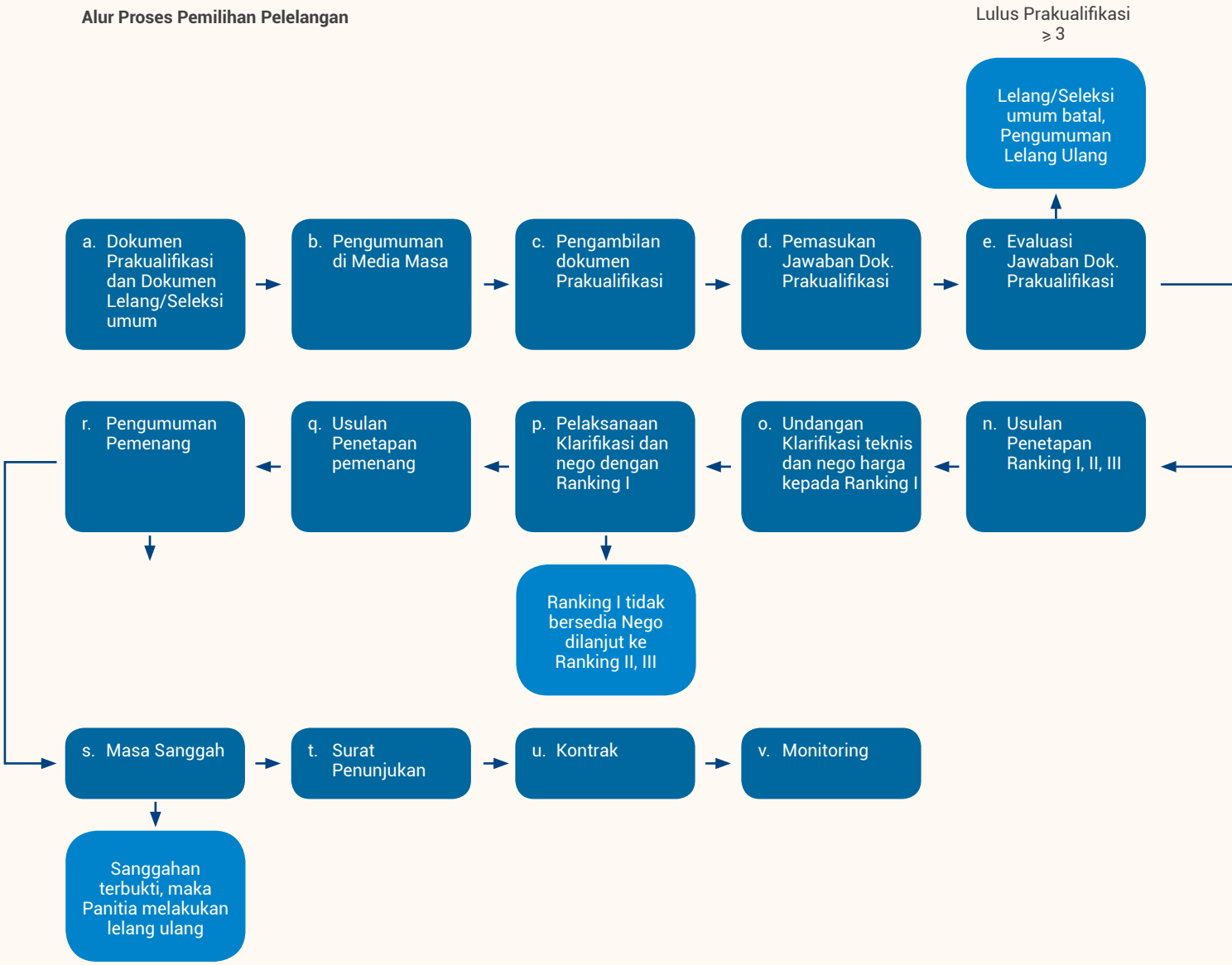

Sanggahan harus di selesaikan Panitia
f. Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi
g. Masa Sanggah
h. Undangan kepada Peserta untuk Pengambilan Dokumen Lelang/ Seleksi Umum
i. Pengambilan Dokumen Lelang/Seleksi Umum
j. Aanwiizing Dokumen Lelang/Seleksi Umum
k. Pengambilan Berita Aanwiizing
l. Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran Harga (DPH)
m. Evaluasi DPH

2. Pemilihan Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) s.d. Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)

Alur Proses Pemilihan Langsung

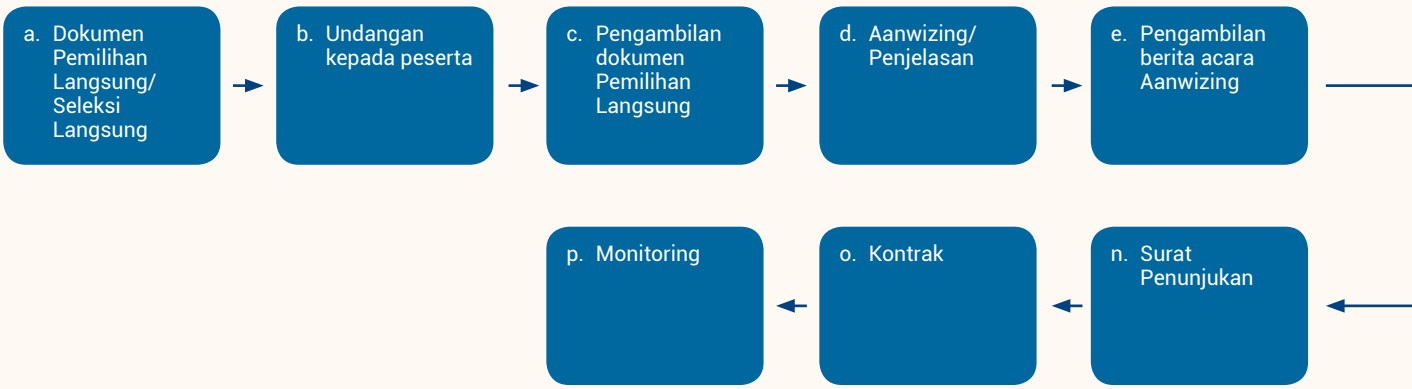

3. Penunjukkan Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Alur Proses Penunjukkan Langsung

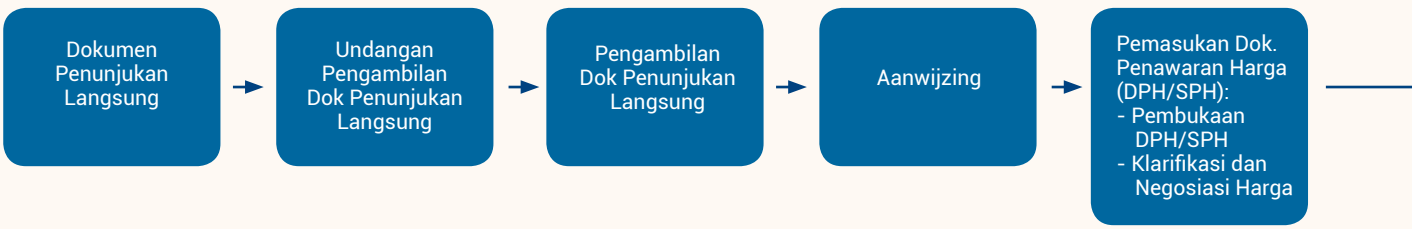

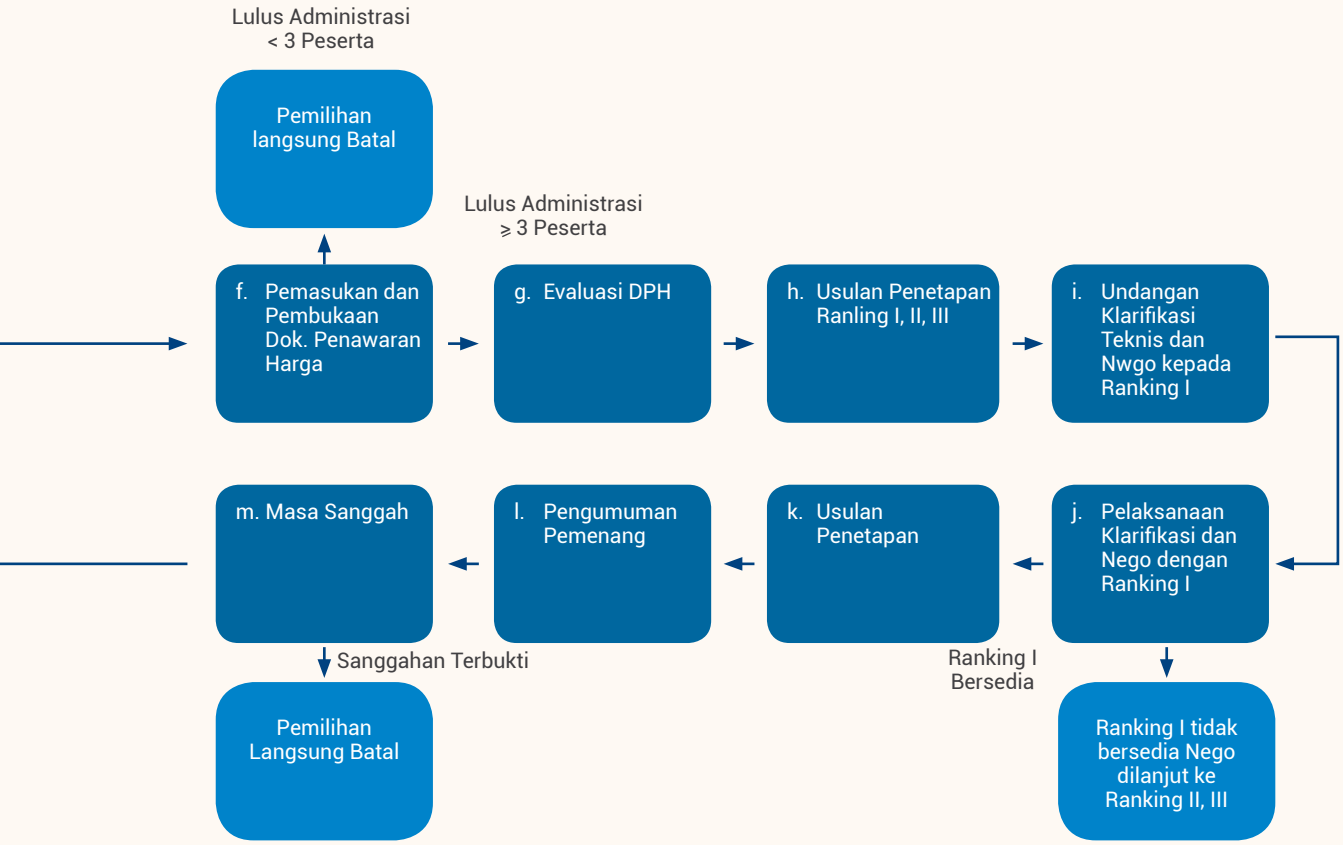
Lulus Administrasi
< 3 Peserta
Pemilihan langsung Batal
Lulus Administrasi
≥ 3 Peserta
f. Pemasukan dan Pembukaan Dok. Penawaran Harga
g. Evaluasi DPH
h. Usulan Penetapan Ranling I, II, III
i. Undangan Klarifikasi Teknis dan Nwgo kepada Ranking I
m. Masa Sanggah
l. Pengumuman Pemenang
k. Usulan Penetapan
j. Pelaksanaan Klarifikasi dan Nego dengan Ranking I
Sanggahan Terbukti
Pemilihan Langsung Batal
Ranking I Bersedia
Ranking I tidak bersedia Nego dilanjut ke Ranking II, III

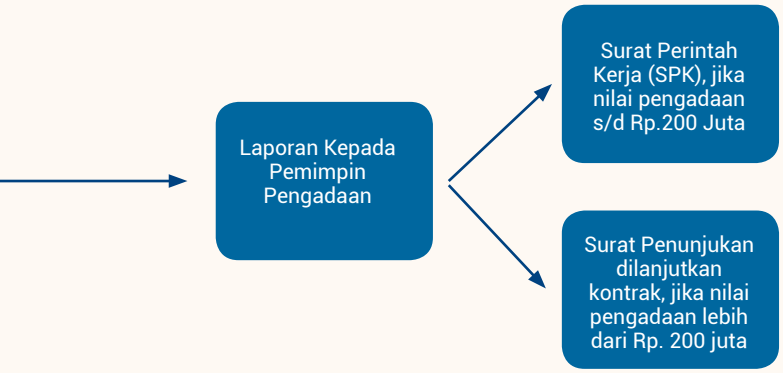
Laporan Kepada Pemimpin Pengadaan
Surat Perintah Kerja (SPK), jika nilai pengadaan s/d Rp.200 Juta
Surat Penunjukan dilanjutkan kontrak, jika nilai pengadaan lebih dari Rp. 200 juta

PENGELOLAAN REKANAN BARANG DAN JASA DI PERSEROAN

Rekanan Perseroan merupakan penyedia barang dan/atau jasa yang telah terdaftar yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing unit pengguna jasa dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan.

1. *Assessment* terhadap Rekanan
   Assesment dilakukan terhadap rekanan dengan variabel penilaian meliputi quality, delivery, flexibility, responsiveness, price dan pelanggaran. Dari vendor yang dikelola PGSD didapat kriteria sbb :
   - *Vendor Excellence* : 24%
   - *Good Vendor* : 73%
   - *Need Improvement* : 3%

2.. *Vendor Meeting*
   Selama tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan 1 kali *vendor meeting workshop* dengan agenda *Brainstorming* antara Perseroan dengan *vendor* serta mendengarkan masukan dan opini dari *vendor* terkait dengan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perseroan. Rincian *vendor meeting* adalah sebagai berikut :

   Tanggal Pelaksanaan: 19 Mei 2016
   Tempat : Menara BTN Lantai 6
   Rekanan : Konsultan Perencana dan Pengawas, Kontraktor

PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2016

Sampai Bulan Desember 2016, nilai total pengadaan khusus untuk pekerjaan renovasi dan/atau pembangunan gedung yang dilakukan oleh Perseroan pada Kantor Pusat (PGSD) sebesar Rp.103.966.784.849,- (seratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Untuk memastikan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perseroan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka Perseroan senantiasa melakukan audit secara berkala maupun sewaktu-waktu, baik melalui pelaksanaan audit internal maupun eksternal.

Selama tahun 2016, tidak ada temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Perseroan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang dan jasa.

AKSES INFORMASI

Perseroan telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Perseroan antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui website www.btn.co.id yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center 500 286 atau email csd@btn.co.id.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Investor Relations Perusahaan dengan mengirim *email* ke investor_relations@btn.co.id atau telepon ke (62-21) 638 70142.
4. Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan Electronic Reporting kepada Bursa Efek Indonesia (www. idx.co.id).
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
6. Perseroan juga menyampaikan informasi melalui upaya transparansi penyampaian palaporan, laporan kepada regulator, analist meeting, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Pada website Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai:

1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
2. Analisis kinerja keuangan.
3. Laporan keuangan tahun selama 5 tahun terakhir
4. Profil Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Nama : Eko Waluyo

Alamat : Menara BTN Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta Pusat 10130

Telepon : (021) 6336789 ext.2003

Fax : (021) 6336719

E-mail : eko.waluyo@btn.co.id

Website : www.btn.co.id

KEGIATAN INVESTOR RELATIONS TAHUN 2016

Perseroan senantiasa membangun hubungan baik dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya melalui penyelenggaraan secara berkala kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal Indonesia seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Perseroan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi melalui situs Perseroan www.btn.co.id. Situs ini memuat informasi terkini seperti aksi korporasi, laporan keuangan, bahan presentasi Perseroan ke publik dan informasi lainnya mengenai Perseroan. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai komunikasi kepada investor sebagaimana tabel dibawah ini.

Tanggal	Kegiatan	Tempat
7 Januari 2016	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Jakarta
4 Februari 2016	*Analyst Meeting* laporan keuangan tahun 2015 dan Konferensi Pers	Jakarta
10 & 12 Februari 2016	*Non Deal Roadshow*	Jakarta
15 & 16 Februari 2016	*Non Deal Roadshow*	Singapore
17 & 18 Februari 2016	*Non Deal Roadshow*	Hong Kong
7 & 8 Maret 2016	*UBS Indonesia Conference*	Jakarta
10-Mar-16	*CLSA ASEAN Forum*	Bangkok
14 – 18 Maret 2016	*Non Deal Roadshow*	USA
7 & 8 April 2016	*Non Deal Roadshow*	Tokyo
12 April 2016	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Jakarta
25 April 2016	Analyst Meeting laporan keuangan triwulan I tahun 2016 dan Konferensi Pers	Jakarta
10 Mei 2016	Citi Indonesia Investor Conference	Jakarta
19 Mei 2016	RHB Indonesia *Conference*	Jakarta
25 Juli 2016	*Analyst Meeting* laporan keuangan triwulan II tahun 2016 dan Konferensi Pers	Jakarta
4 Agustus 2016	*Public Expose (Investor Summit 2016)*	Jakarta
11 & 12 Agustus 2016	*CIMB 10th Annual Indonesia Conference*	Denpasar
23 & 24 Agustus 2016	*Macquarie ASEAN Conference*	Singapore
24 Oktober 2016	*Analyst Meeting* laporan keuangan triwulan III dan Konferensi Pers	Jakarta
27 – 28 Oktober 2016	*Non Deal Roadshow*	Jakarta
1-2 November 2016	*dbAccess Indonesia Conference*	Jakarta
7 – 11 November 2016	*Non Deal Roadshow*	Eropa
17 – 18 November 2016	*Morgan Stanley Asia Pacific Summit*	Singapore
29 November – 2 Desember 2016	*Citi ASEAN Stars of the Next Decade 2016*	Hong Kong & Kuala Lumpur

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Perseroan secara aktif menyelenggarakan kegiatan lain seperti pertemuan media, ulasan media dan promosi melalui media.

RENCANA STRATEGIS BANK

Perseroan memiliki peran strategis dalam program pembangunan perumahan nasional. Sejak ditunjuk pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/1/1974 sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, Perseroan secara konsisten menjadi bank fokus untuk pembiayaan perumahan rakyat dengan jumlah akumulasi penyaluran KPR lebih dari 3,5 juta unit.

Sebagaimana ketentuan Bank Indonesia bahwa kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi Perseroan yang fokus pada kegiatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat dengan jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan Perseroan. Hal tersebut dipertegas melalui surat Perseroan kepada Bank Indonesia No. 450/S/DIR/SPMD-NSLD/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Permohonan Sebagai Bank Fokus Perumahan.

Sebagian besar debitur KPR Perseroan berada pada segmen yang sangat spesifik, terdiri dari masyarakat menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah sehingga memiliki *repayment capacity* yang rentan terhadap perubahan kondisi makro ekonomi. Mempertimbangkan faktor historis, kompetensi yang dimiliki, potensi bisnis yang ada, regulasi, serta peran Perseroan selama ini dalam pembangunan nasional, maka program transformasi menjadi *leading housing bank in Indonesia with world class service quality* pada tahun 2019 masih relevan sebagaimana dijelaskan dalam Roadmap transformasi. Upaya dalam mewujudkan program transformasi tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bank.

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi diwujudkan dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi perencanaan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun, sementara Rencana Bisnis diwujudkan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berjangka waktu 3 tahun.

Penyusunan RJP dan RBB dilakukan oleh Direksi dengan mekanisme *top down* dan *bottom up*. Mekanisme *top down* merupakan arahan Direksi mengenai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, sedangkan *bottom up* merupakan usulan, saran, dan/atau pandangan yang berasal dari unit kerja, baik Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.

Usulan RJP dan RBB diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, RJP dan RBB disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Dewan Komisaris, dan RBB disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pencapaian sasaran kerja tahunan pada RKAP dimonitor setiap bulan oleh Direksi melalui rapat *Performance Review*, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan sekali setiap bulan.

Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan setiap triwulan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dengan melakukan pembahasan dengan Direksi dan membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dari proses monitoring bulanan, hasil kinerja di-review dan dievaluasi, apabila dirasa perlu untuk perubahan strategi manajemen dan rencana kerja, Direksi mengajukan usulan revisi RBB pada pertengahan tahun buku kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

RENCANA JANGKA PANJANG

TUJUAN PERUSAHAAN

Tujuan perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan (tahun 2025) menuju *transformational enterprise - global mindset*, yaitu menjadi perusahaan global di bidang perumahan, property dan infrastruktur dasar adalah dengan menjalankan program transformasi sejak tahun 2013 yang terdiri dari 3 tahapan sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan laporan tahunan ini.

Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan fokus pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Penguatan bidang kredit

   Penguatan bidang kredit adalah penguatan bisnis inti bank yaitu bidang perumahan disertai dengan tahap perluasan bisnis properti dan infrastruktur dasar. Arah kebijakan bank adalah fokus pada 3 pilar utama yaitu:

   a. Pilar pertama adalah pembiayaan perumahan yang fokus pada pembiayaan perumahan tapak, vertikal dan sarana prasarana.
   b. Pilar kedua adalah memperdalam pembiayaan industri terkait dari sisi hulu (*value chain* perumahan seperti pabrik semen, batako, genteng dsb).
   c. Pilar ketiga adalah pembiayaan industri terkait dari sisi hilir (terkait pengguna rumah seperti household operation, kepemilikan kendaraan, furniture dsb).

2. Penguatan bidang dana

   Penguatan bidang dana difokuskan pada pegembangan pendanaan berjangka panjang dan murah. Arah kebijakan Perseroan adalah:

   a. Pendanaan institusional terkait kerjasama kredit.
   b. Memperkuat segmen dana ritel berbiaya murah.
   c. Memperkuat pendanaan jangka panjang seperti capital market, pinjaman lembaga, pinjaman luar negeri dan sekuritisasi asset.

3. Penguatan Infrastruktur

   Penguatan Infrastruktur difokuskan pada:

   a. Mengembangkan sistem *digital banking*.
   b. Peningkatan kualitas proses.
   c. Mengembangkan delivery channel.

4. Penguatan sumberdaya manusia (*people transformation*)

   Penguatan sumberdaya manusia difokuskan pada:

   a. Pelaksanaan budaya perusahaan baru.
   b. Pengembangan kompetensi SDM.

RENCANA JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan telah melakukan revisi untuk Tahun 2016-2018 yang mengacu padaPeraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010. Indikator keuangan utama dalam penyusunan RBB 2016-2018 tersebut didasarkan pada aspirasi shareholder, asumsi makro ekonomi dan pertimbangan para ekonom dengan garis besar pada perlambatan ekonomi, yang menyebabkan pertumbuhan bisnis adalah moderat dan penekanan pada kualitas kredit.

RBB disusun oleh Direksi malalui Strategic Innovation & Performance Management Division (SIPD) dengan memperhatikan masukan dari berbagai unit dan cabang, untuk selanjutnya RBB tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris yang dibahas dalam rapat sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. RBB disampaikan kepada segenap unit kerja, Bank Indonesia dan OJK oleh SIPD.

Target perusahaan dalam jangka pendek dan jangka menengah adalah fokus pada pembiayaan perumahan dengan mendukung program sejuta rumah dari

pemerintah dan penyediaan dana pendukungnya. Selain itu dilakukan perbaikan atas kualitas kredit, pengembangan teknologi dalam mendukung digital banking dan layanan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Evaluasi secara berkala dilakukan Direksi terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Strategi Tahunan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan-RKAP) dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan melalui mekanisme agenda Rapat Direksi yang disebut dengan Performance Review, hasilnya disusun dalam suatu Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank. Sepanjang tahun 2016, telah disusun Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan Tahun 2016 yang seluruhnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BIDANG PERKREDITAN

Fokus utama bidang kredit adalah mencapai pertumbuhan tahun 2016 sebesar 18 – 19% dan terus meningkat dalam 3 tahun kedepan, dengan strategi sbb :

1. Optimalisasi Program Sejuta Rumah
   Penyaluran kredit dalam rangka program sejuta rumah meliputi pembiayaan KPR dan kredit konstruksi bagi pengembang. Pada tahun 2016 – 2018 diproyeksikan jumlah penyaluran KPR tidak sebesar target yang dicanangkan pemerintah karena diperkirakan ketersediaan *supply* rumah tidak dapat ditingkat secara drastis. Namun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk mendukung target program sejuta rumah dan apabila terdapat ketersediaan supply dan skim pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), akan dilakukan revisi atas target tersebut.
2. Peningkatan homeequity loan
   Pembiayaan kredit *home equity* bertujuan meningkatkan margin. Pertumbuhan kredit home equity tahun 2016 direncanakan hanya sebesar 6.58% karena prospek pasar saat ini yang belum terlalu baik.
3. Pemberian kredit non housing secara selektif
4. Pembiayaan sektor non housing, akan lebih diarahkan pada pemanfaatan value chain perumahan baik segmen konsumer, korporasi, dan UMKM. Pembiayaan tersebut juga akan diupayakan agar memiliki margin yang lebih tinggi dari KPR, untuk memperbaiki profitabilitas Perseroan.

BIDANG KUALITAS KREDIT

Perbaikan kualitas kredit sebagai tolok ukur keberhasilan kredit yang diberikan dan sumber pembiayaan kembali, merupakan hal yang krusial yang menjadi prioritas untuk dibenahi. Inisiatif strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kualitas kredit tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap kebijakan perkreditan secara menyeluruh
2. Program collection terhadap debitur kredit kolektibilitas 1 dan 2 (*early bucket*) menggunakan teknologi (SMS, call collection, dll), restrukturisasi kredit bagi debitur DPK 3, serta meningkatkan jumlah *collection* via kolektif.
3. Program *asset recovery* melalui kerja sama dengan debt collector, law firm, dan Balai Lelang Swasta dalam penagihan dan penjualan aset. Selain itu melalukan penawaran aset kepada calon investor melalui investor gathering, agen property, dan property expo.
4. Eksekusi cessie dan penjualan aset AYDA.

BIDANG PENDANAAN

Untuk mendukung bank fokus perumahan, pendanaan berjangka panjang dan murah akan terus dikembangkan

baik berasal dari penempatan dana terkait kredit program, pendanaan *wholesale* (*capital market* dan pinjaman), serta dana pihak ketiga. Kredit program dilakukan dengan pendekatan kepada institusi yang memiliki pendanaan besar dimana penempatan dana dilakukan dengan tujuan sebagai penyaluran KPR kepada anggota atau karyawannya. Pola penempatan dapat dilakukan seperti FLPP ataupun kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan yang tengah dirintis.

strategi yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut adalah :

1. Memperbaiki struktur pendanaan ke arah peningkatan DPK murah :
   a. Giro lembaga melalui kerjasama system B to B (dengan fitur : SPAN, H2H, *iCash*, *virtual account*, *EduPayment*, *Payroll*, *Billing payment)*.
   b. Meningkatkan DPK ritel melalui marketing communication, program gimmick, customer gathering, serta peningkatan produktivitas outlet.
2. Aliansi strategis dengan BUMN dan lembaga dalam penempatan dana untuk KPR program.
3. Optimalisasi Tapera sebagai salah satu sumber pembiayaan KPR
4. Meningkatkan dana wholessale seperti penerbitan surat berharga (*corporate bond* dan *mortgage bond*), pinjaman lainnya (MTN, pinjaman beragunan aset) serta *off shore loan* dengan melakukan swap sebagai mitigasi risiko nilai tukar.

Terkait rencana pemberlakukan *tax amnesty*, dapat memberikan dampak yang positi bagi bisnis Perseroan sehingga perlu menerbitkan kebijakan untuk merespon upaya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah agar sebagian dana repatriasi tersebut dapat ditempatkan di Perseroan melalui penerbitan obligasi.

BIDANG *FEE BASED INCOME* DAN PEMBENTUKAN ANAK USAHA

Mengingat *share fee based income* terhadap pendapatan operasional yang masih relatif kecil, manajemen memutuskan untuk menambah *fee base income* dari sumber lain yaitu melalui pembentukan anak usaha. Ada 4 anak usaha yang direncanakan pada tahun 2016 yaitu bidang asuransi sejumlah 2 lembaga, multifinance 1 lembaga dan 1 lembaga manajemen investasi. Hal ini sangat mendukung bisnis utama Bank dan dapat menambah *fee base income* dalam jangka 3 tahun kedepan. Strategi utama yang dilakukan untuk menambah *fee based income* adalah :

1. Meningkatkan jumlah *account* baru untuk menambah pendapatan administrasi baik kredit maupun dana.
2. Mengembangkan produk SKBDN dan *Letter of Credit* (L/C)
3. Meningkatkan aktivitas *treasury*, *transaction services* , *card business* dan *payment point*.
4. Mengembangkan *digital banking*
5. Meningkatkan bisnis bank garansi pada kantor cabang potensial.
6. Membentuk anak usaha melalui penyertaan pada perusahaan asuransi (asuransi jiwa dan asuransi kerugian), perusahaan pembiayaan/multifinance, perusahaan manajemen investasi, perusahaan pengelola ATM Bank BUMN (ATM Merah Putih), serta perusahaan pengelola IT dan asset management unit.

BIDANG BISNIS SYARIAH

Dalam jangka pendek, bisnis syariah tetap mendukung bisnis inti bank yaitu mendukung program sejuta rumah. Penguatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan model leveraging yang memanfaatkan *network* induk untuk efisiensi dan efektifitas. Strategi

bisnis syariah akan diarahkan pada produktivitas office chanelling seluruh kantor cabang khususnya bidang dana dan layanan. Sedangkan penerapan konsep leveraging (penggunaan jaringan Konvensional untuk transaksi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta jasa) dimulai tahun 2016 dengan uji coba produk tertentu. Dari sisi perbaikan bisnis proses, unit syariah di tahun 2016 mengembangkan strategi initiatif untuk mendukung perkembangan bisnis sebagai berikut :

1. Standarisasi pelaporan MIS syariah yang akurat dan tepat waktu.
2. Menyediakan aplikasi *delivery channel* seperti mobile banking, internet banking dll.
3. Pengembangan sistem informasi nasabah dengan menyediakan aplikasi SMS *gateway*.
4. Pengembangan layanan syariah dengan menyediakan aplikasi sistem syariah di kantor wilayah/kantor cabang konvensional.
5. Pengembangan payment point.
6. Pengembangan jaringan ATM (Master C card dan Alto).
7. Penyediaan SDB bagi nasabah.
8. Penyediaan *wealth management*.
9. Penyediaan i-Collection.
10. Aplikasi undian / hadiah bagi nasabah.

MEMPERKUAT PERMODALAN

Untuk mendukung penyaluran KPR dalam rangka program sejuta rumah, dibutuhkan permodalan yang besar dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Target jangka pendek dan menengah permodalan tahun 2016 – 2018, adalah memelihara minimum sebesar 14% - 15,5% yang mengacu pada PBI No. 15/12/PBI/2013 dengan fokus pada isu sebagai berikut :

1. Dengan adanya Program Sejuta Rumah untuk Rakyat maka kapasitas penyaluran KPR oleh Perseroan akan mengalami peningkatan secara signifikan.
2. Peningkatan penyaluran KPR tersebut harus didukung dengan kecukupan ketersediaan modal agar tidak menyebabkan penurunan posisi CAR Perseroan.
3. Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013 mengenai GWM-LDR Bank yang memiliki LDR di atas ambang batas atas (saat ini LDR max 92%) maka harus memelihara CAR minimal 14 % atau akan dikenakan disinsentif penambahan GWM.
4. POJK No. 11/POJK. 03/2016 mengenai KPMM bank umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 mengenai kewajiban pembentukan countercyclical buffer , POJK No. 46/POJK.03/2015 mengenai SIB dan capital surcharge, disebutkan bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 jenis yaitu capital conservation buffer, countercyclical buffer, capital surcharge).
5. Peraturan OJK No.11/POJK.03/2015 & Peraturan OJK No.12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah mengatur mengenai relaksasi perhitungan ATMR yaitu sebesar 20% untuk KPR Subsidi dan 35% untuk kredit beragun rumah tinggal lainnya yang berlaku selama 2 tahun.

Strategi yang dilakukan oleh Perseroan terkait penguatan modal adalah :

1. Meningkatkan profitabilitas,
2. Revaluasi aset sesuai arahan Kementerian BUMN,
3. Meningkatkan sekuritisasi KPR,
4. Mengusulkan skema deviden policy yang mendukung bank fokus perumahan,
5. Penerbitan subdebt komersial,
6. Mengusulkan konversi dana FLPP yang sebelumnya dicatat di giro menjadi pinjaman subordinasi.

BIDANG HUMAN CAPITAL

Dalam menunjang pengembangan bisnis diperlukan *people transformation* melalui tema dan strategi yang berkelanjutan dan didukung oleh penyelarasan implementasi *human capital management system* sesuai *best practice*. Untuk itu strategi pengembangan *human capital* Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun budaya perusahaan baru, meningkatkan peran leaders dalam proses pengelolaan Human Capital (Culture&Leadership).
2. Membangun kebanggaan bersikap laku professional dan mengurangi pegawai yang menghambat budaya organisasi menjadi organisasi yang pintar.
3. Memahami dan mempraktekkan SLA standar dunia (*Strategic & Tactical HC Practices*)

MEMPERKUAT IT DAN DIGITAL BANKING

Teknologi informasi (IT) akan diarahkan untuk mendukung strategi Perseroan sebagai bank fokus perumahan serta memperluas dan meningkatkan aktivitas operasional perbankan yang berbasis IT. Penggunaan IT dalam aktivitas operasional bank akan diperluas dan ditingkatkan khususnya untuk peningkatan akuisisi nasabah, otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk, serta memberikan kemudahan layanan yang efisien kepada nasabah. Untuk itu diperlukan sinergi antara strategi bisnis dengan kehandalan IT. Strategi utama yang dilakukan yaitu :

1. Memperkuat IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui otomatisasi proses bisnis, sentralisasi proses, sistem informasi, inovasi produk dan layanan berbasis digital banking
2. Peningkatan produktifitas delivery channel baik jaringan kantor maupun e channel.

PENINGKATAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Tujuan utama penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan adalah terciptanya etika bisnis yang dilaksanakan oleh setiap insan Perseroan dalam bekerja dan berperilaku yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Perseroan menyadari dan memahami pentingnya pengembangan dan peningkatan implementasi GCG sebagai salah satu langkah dalam mencapai visi sebagai leading bankin housing finance. Demi mencapai visi tersebut, Perseroan melakukan penguatan internal terkait 4 (empat) pilar implementasi GCG yaitu: *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Hal tersebut akan dijalankan melalui 4 (empat) fase atau tahapan perbaikan hingga mencapai *Governance Excellence* di akhir tahun 2017 (lihat gambar/ilustrasi). Empat fase peningkatan hingga tahun 2017 tersebut terdiri dari serangkaian inisiatif strategis yang telah mempertimbangkan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator perbankan, rekomendasi dan standar internasional pelaksanaan GCG dari lembaga terpercaya untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN *Scorecard* dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) oleh OJK, serta diskusi internal yang melibatkan seluruh elemen Perseroan, sebagai berikut :

1. Fase I (2014) *Building the Foundation*, Melakukan persiapan dengan menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen kunci dalam implementasi GCG.
2. Fase II (2015) *Developing the Key Elements*, Melakukan evaluasi dan penyempurnaan elemen-elemen yang telah dibangun/dibentuk dalam fase sebelumnya.
3. Fase III (2016) *Strengthening the System* , Melakukan *continuous improvement* terhadap sistem pelaksanaan GCG yang sudah berjalan.
4. Fase IV (2017) *Governance Excellence*, Perseroan menjadi salah satu bank terbaik dalam pelaksanaan GCG dan dapat menjadi role model

dalam peningkatan pelaksanaan GCG bagi perbankan dan perusahaan lain.

PENINGKATAN RISK MANAGEMENT

Strategi risk management Perseroan akan diarahkan pada :

1. Peningkatan kerangka kerja manajemen risiko.
2. Peningkatan peran risk management untuk mendukung kegiatan bisnis dan operasional bank.

Adapun program kerja yang akan dikembangkan untuk mendukung strategi adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko.
2. Implementasi ICAAP dan monitoring *capital conservation buffer* mulai tahun 2016.
3. Inisiasi proyek *Internal Credit Rating* (ICR).
4. Mengembangkan *operational risk management tool* yaitu *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) serta aplikasi monitoring risiko likuiditas.
5. Mengembangkan kerangka *Enterprise Risk Management System* (ERMS).
6. Melanjutkan penerapan ISO 9001:2008 di Risk Management Division (RMD) secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar layanan mutu RMD kepada seluruh *stakeholders*.

PENINGKATAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka melakukan peningkatan fungsi kepatuhan bank, hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
2. Peningkatan upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
3. Peningkatan efektifitas kepatuhan dalam memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peningkatan efektifitas kepatuhan dalam memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN (*DELIVERY CHANNEL*)

Optimalisasi delivery channel dalam mendukung bisnis dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam channel dengan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi jaringan kantor (*outlet*) dengan fokus bisnis sesuai potensi wilayah.
2. Meningkatkan *e-channel* sebagai media utama transaksi nasabah dan penggunaan *outlet* untuk fungsi sales, *service* dan *advisory*.

PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

BUY BACK SAHAM DAN *BUY BACK OBLIGASI*

Buy back share dan *buy back obligasi* merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau *obligasi* subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau *obligasi* subordinasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai dengan Desember tahun 2016, Perseroan tidak melakukan *buy back share* dan *buy back obligasi* subordinasi, dengan penjelasan sesuai ketentuan BI/OJK, sebagaimana tabel berikut ini:

Penjelasan Kebijakan Buy Back Obligasi	Jumlah Buy Back Obligasi (jutaan Rp)	Harga Buy Back	Peningkatan Laba dari hasil Buy Back Obligasi (jutaan Rp)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Selama tahun 2016, telah terdapat proses penyediaan dana kepada pihak terkait yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak terkait	1	20 miliar
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	0	0
	b. Group	128	15.564 miliar

Selama Periode Januari s/d Desember 2016, Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Direktur Kepatuhan melalui satuan kerja kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada BI setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN / ATAU POLITIK

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Selama tahun 2016, pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dikemas Perseroan dilakukan melalui berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara garis besar, biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas CSR, sebagai berikut.

Tabel Pemberian Dana Kegiatan Sosial

Bidang Kegiatan	Tahun 2016 (Juta Rp)
Ekonomi	753,03
Seni Budaya	199,20
Olahraga	94,95
Pendidikan	409,32
Kesehatan	54,67
Sarana dan Prasarana	2.250,93
Keagamaan	564,01
Pelestarian Alam	44,95
Total	**4.371,06**

Penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas program CSR Perseroan disajikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan tahun 2016.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2016 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PENGUNGKAPAN INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRASI OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Selama tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan telah mematuhi ketentuan terkait baik yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI 15/15/2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum maupun ketentuan di bidang pasar modal dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-412/Bl/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Perseroan telah memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Board Manual. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik. Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).

Pada periode 2016, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut.

Tabel Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penyedia Dana	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan				
Nihil						

Halaman ini sengaja di kosongkan

Bank BTN
PROGRAM CSR BANK BTN
BANTUAN UNTUK YAYASAN
DAN SANTUNAN ANAK YATIM
YAYASAN YATIM AL MUBAROKAH
Jakarta, 22 Juni 2016

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam rangka memegang komitmen untuk menjadi bank terdepan dalam pembiayaan perumahan, Perseroan turut berkontribusi untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PERSEROAN SECARA KONSISTEN MELAKSANAKAN KEGIATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN SEKALIGUS APRESIASI KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN DAN DUKUNGAN ATAS PROSES BISNIS PERSEROAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memegang komitmen untuk menjadi bank terdepan dalam pembiayaan perumahan, Perseroan memandang penting bahwa keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk menjadikan bisnis Perseroan terus berlanjut. Sebagai perusahaan yang bergerak disektor keuangan, Perseroan turut berperan sebagai agen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Melalui CSR, dalam menjalankan putaran roda bisnis, Perseroan senantiasa berupaya menciptakan suasana kegiatan usaha yang harmonis dengan masyarakat luas dan ramah lingkungan. Dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, Perseroan diharapkan dapat menjadi bank yang dicintai masyarakat luas. Dengan demikian, Perseroan dapat berperan serta dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis yang merupakan kondisi ideal bagi keberlangsungan dunia usaha.

Sejalan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan turut berpartisipasi dalam mendorong tercapainya pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) Perseroan secara konsisten menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif. Inisiatif yang telah dilakukan Perseroan yaitu melalui penerapan *green finance product* (produk-produk Perseroan

yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola). *Green finance product* ditujukan untuk memberikan pembiayaan bagi perusahaan/debitur yang menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan hidup. Dalam setiap aktivitas pembiayaan selama ini, Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip berkelanjutan. Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit ramah lingkungan dengan tidak mengucurkan kredit kepada nasabah yang tidak menyertakan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain dalam penyaluran pembiayaan, Perseroan juga menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan sebagai bentuk komitmen untuk meminimalkan kerusakan lingkungan serta mematuhi ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perseroan meyakini bahwa melalui pengembangan *green finance product* pada akhirnya dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan.

Sebagai perwujudan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan juga telah menerbitkan laporan keberlanjutan yang merupakan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perseroan mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.0 dengan tingkat kesesuaian "*Core*" termasuk G4 *Financial Services Sector Disclosures*. Laporan Keberlanjutan 2016 ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan kinerja keberlanjutan Perseroan dalam melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan.

B. DUKUNGAN PERSEROAN DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Sebagai kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000, Pemerintah Indonesia mendorong dunia bisnis agar ikut serta berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu fungsinya sebagai "agen pembangunan", Perseroan secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai program yang dilakukan diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan program kewirausahaan masyarakat, menciptakan sistem ketenagakerjaan yang layak serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang merata. Pelaksanaan program tersebut merupakan perwujudan langkah nyata Perseroan dalam mengatasi isu-isu keberlanjutan baik dari dimensi ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*), maupun dimensi sosial (*people*).

Peran Perseroan dalam *Sustainable Development Goals*

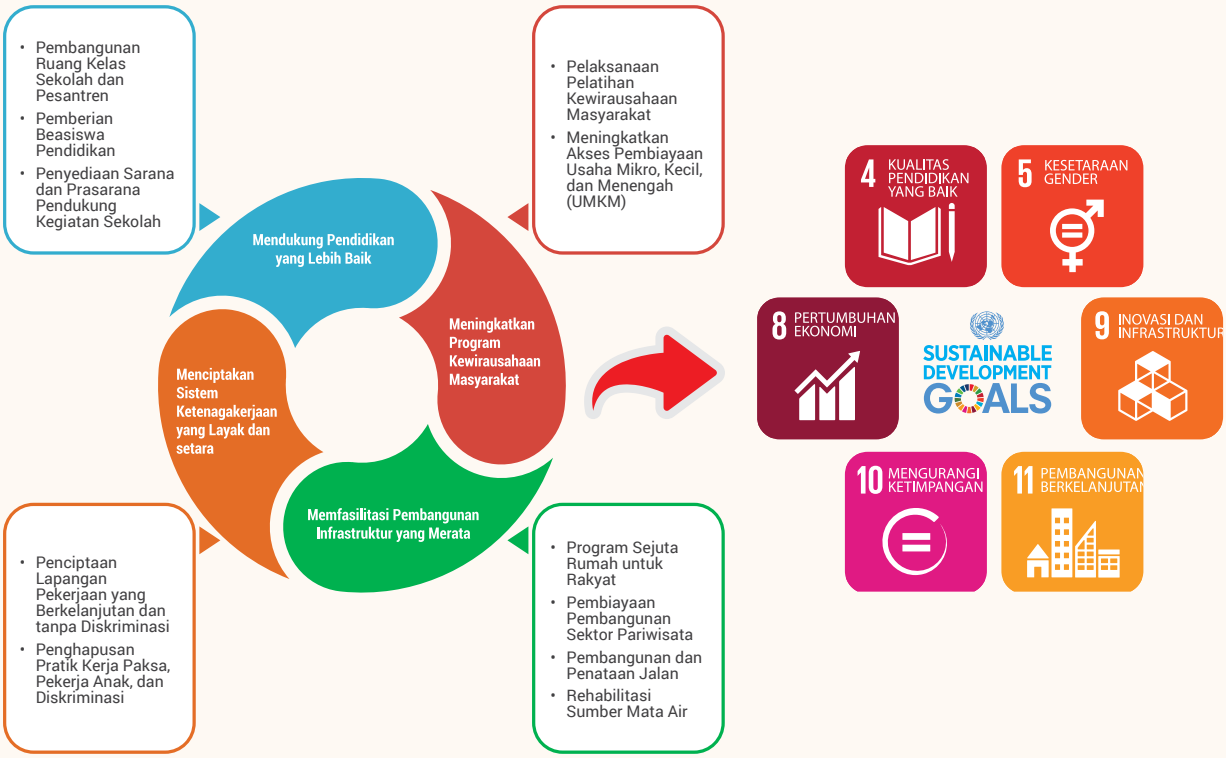

KALEIDOSKOP CSR PERSEROAN TAHUN 2016

JANUARI

Bangun Generasi Bangsa Melalui Sekolah Percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

FEBRUARI

Bantuan Rehabilitasi Gedung Rumah Susun Cipinang Besar Selatan.

Rehabilitasi Fasilitas Umum Perumahan Tanah Mas Semarang.

MARET

Peluncuran *E-Toll* Himbara Dengan Menteri BUMN.

APRIL

Penyerahan Bibit Umbi, Padi, dan Babi Untuk 5 Kabupaten Perbatasan Di Papua Oleh Menteri Perdagangan disaksikan oleh Menteri BUMN dan Direktur Utama Perseroan.

MEI

Sinergi Perseroan dengan PT Taspen Dalam Fasilitas KPR Untuk PNS atau Para Pensiunan PNS.

JUNI

Pemberian Bantuan Untuk Anak Yatim Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Di Kantor Pusat Perseroan.

JULI

Perseroan Ikut Mendukung Program Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

AGUSTUS

Bantuan Air Bersih di Kepulauan Morotai, Maluku Utara.

Pasar Murah BUMN Hadir Untuk Negeri di Ternate, Maluku Utara.

Siswa Mengenai Nusantara di Ternate, Maluku Utara.

SEPTEMBER

Partisipasi Perseroan dalam tanggap darurat atas bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut.

OKTOBER

E-retribusi Pasar Gede dan Pasar Ngudi Rejeki, Solo.

Rekor Muri Penabung Terbanyak Simpel.

Kerjasama Perseroan - SBM ITB Untuk Mencetak Developer Muda.

NOVEMBER

Peresmian Shelter Kuliner Taman Sriwedari Solo.

BTN Tour De Borobudur Ke 16.

DESEMBER

Rumah Kreatif Bitung – Manado.

KEBIJAKAN DAN BIDANG KEGIATAN CSR

A. KEBIJAKAN CSR

Dalam pelaksanaan program CSR, Perseroan mengacu pada pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 34 tanggal 11 Agustus 2008;
5. Peraturan Direksi Nomor 17/PD/DPKK/1203 tanggal 15 Desember 2003 tentang Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/HCLD/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Usaha Kecil;
7. Surat Edaran Direksi Nomor 8/DIR/HCLD/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/HCLD/2010 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Usaha Kecil.
8. Peraturan Direksi No. 29/PD/DSP/2008, Tentang Corporate Social Responsibility PT Bank Tabungan Negara (Persero).

B. VISI DAN MISI CSR

VISI

"Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan khususnya di lingkungan perumahan/pemukiman yang menjadi *core business* Perseroan".

MISI

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
- Mengembangkan nilai dan budaya Perseroan
- Membentuk citra Perseroan yang positif di mata publik
- Meningkatkan kerjasama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasionalnya Kantor Perseroan

Untuk mencapai Visi dan Misi CSR tersebut, Perseroan telah menyusun program CSR yang sejalan dengan prinsip 3P (*people, profit, planet*), berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada *stakeholders* maupun komunitas sekitar, serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. STRUKTUR PENGELOLA CSR

Sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, Perseroan telah membentuk unit yang secara khusus menangani kegiatan CSR, yaitu Unit Community Development Program yang berada di bawah Corporate Secretary Division. Berikut struktur pengelola CSR Perseroan tahun 2016:

Struktur Pengelola CSR

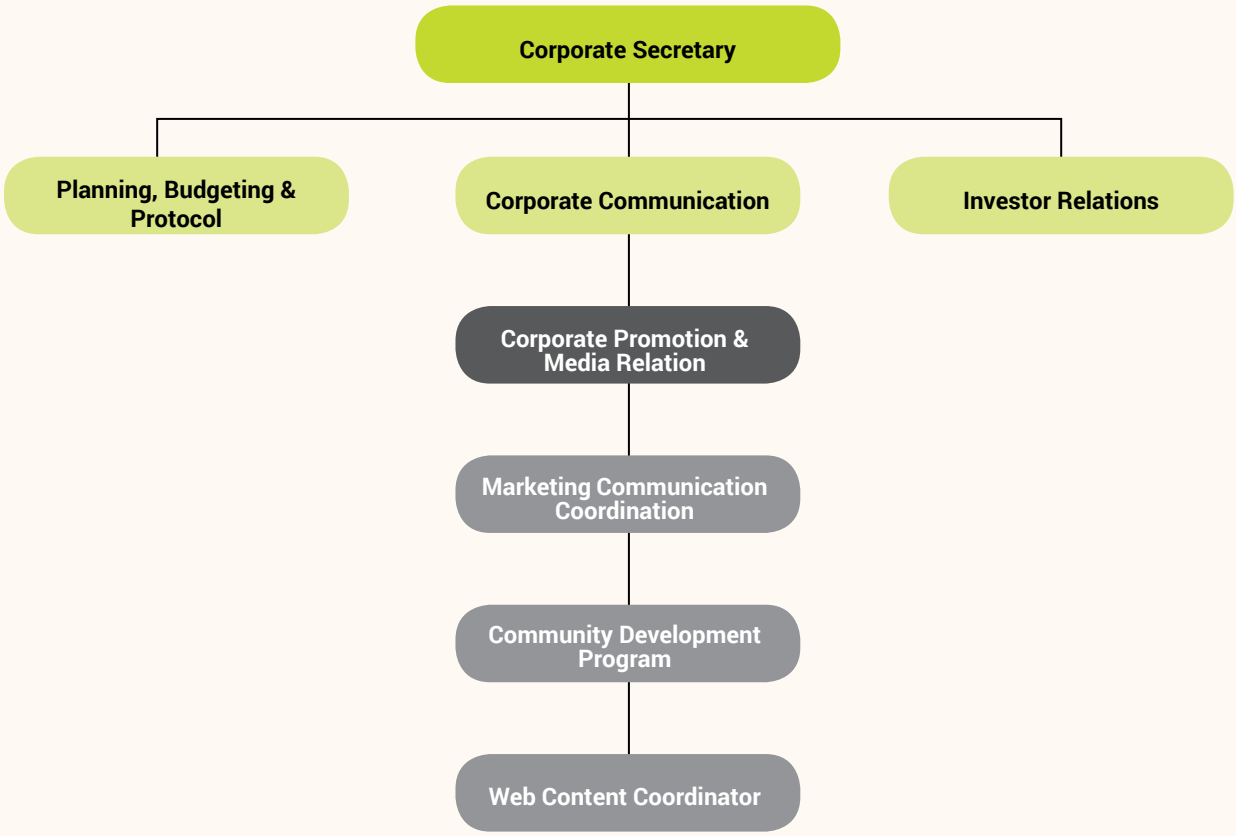

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, Corporate Secretary Division dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan :

1. Pihak Internal Perseroan, yaitu Kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia atau unit kerja lainnya; dan
2. Pihak Eksternal Perseroan / Pihak Ketiga, yang terdiri dari :
   - Pemerintah
   - Perguruan Tinggi
   - Lembaga Swadaya Masyarakat
   - Badan Sosial
   - Media Massa
   - Lembaga lain yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan CSR Perseroan.

D. BIDANG KEGIATAN CSR

Sesuai dengan Visi dan Misi Pelaksanaan CSR, Perseroan memiliki program CSR yang menyasar ke berbagai bidang meliputi pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, keagamaan, pengembangan kesejahteraan sosial ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, serta hal-hal yang bersifat insidentil. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan CSR Perseroan yaitu Peraturan Direksi Nomor: 29/PD/DSP/2008 tentang *Corporate Sosial Responsibility* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Program yang dijalankan juga selalu berorientasi membawa manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Secara garis besar Program CSR Perseroan diwujudkan menjadi 4 bidang utama yaitu sebagai berikut:

ANGGARAN CSR

Program CSR disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dan diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran CSR yang memperhatikan asas kepatuhan dan kewajaran. Dalam pelaksanaannya, sumber dana untuk aktivitas program CSR Perseroan berasal dari anggaran dana yang telah ditetapkan di RKAP Perseroan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Selama tahun 2016 Perseroan telah menyalurkan dana terkait tanggung jawab sosial sebesar Rp4.371.057.756.

Selain kegiatan CSR, sebagai bank BUMN, Perseroan juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sesuai Pasal 8 ayat 1 butir a dan b Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 12 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara, "Sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berasal dari penyisihan sebagian laba bersih dan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya." Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 tanggal 12 April 2016, Perseroan hanya mengalokasikan Dana untuk Program Bina Lingkungan Tahun 2016 sebesar Rp14,8 miliar yang terealisasi sampai dengan tahun 2015 menjadi beban Perseroan. Sementara itu, dana Program Kemitraan tahun 2016, bersumber dari sisa dana tahun buku 2015, penerimaan dari jasa administrasi dan jasa giro dari dana Program Kemitraan yang ditempatkan serta sumber lain yang sah.

Selama tahun 2016 Perseroan telah menyalurkan bantuan Program Kemitraan kepada 43 Mitra Binaan dengan nilai penyaluran sebesar Rp1.779.500.000 dan penyaluran Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan sebesar Rp13.153.136.795 melalui berbagai kegiatan bantuan diantaranya pendidikan dan pelatihan, prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, peningkatan kesehatan dan sosial masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel Penyaluran Dana Program CSR Tahun 2014-2016

Bidang Kegiatan	Penyaluran (Rp juta)		
	2014	2015	2016
Ekonomi	1.438,70	2.425,39	753,03
Seni Budaya	24,50	49,65	199,20
Olahraga	45	49,22	94,95
Pendidikan	655,70	1.942,68	409,32
Kesehatan	78,99	387,07	54,67
Sarana dan Prasarana	3.393,64	4.123,94	2.250,93
Keagaman	396	1.314	564,01
Pelestarian Alam	239,1	473,33	44,95
Total	**6.271,63**	**10.765,28**	**4.371,06**

Grafik Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Penyaluran

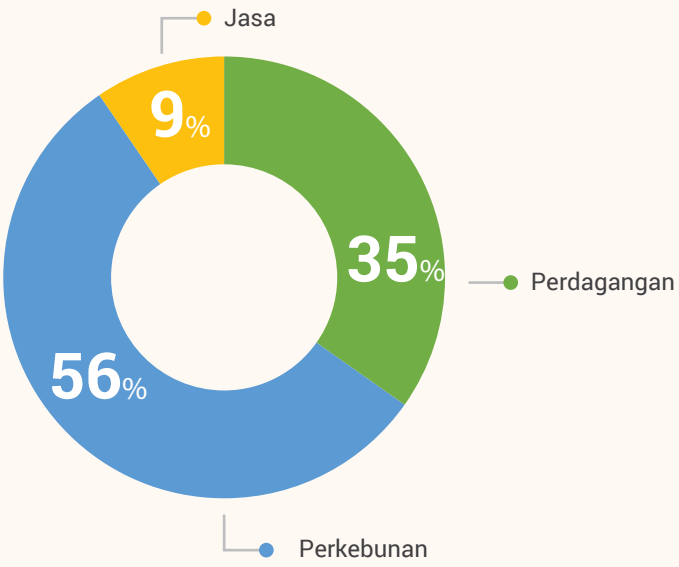

Grafik Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Penyaluran

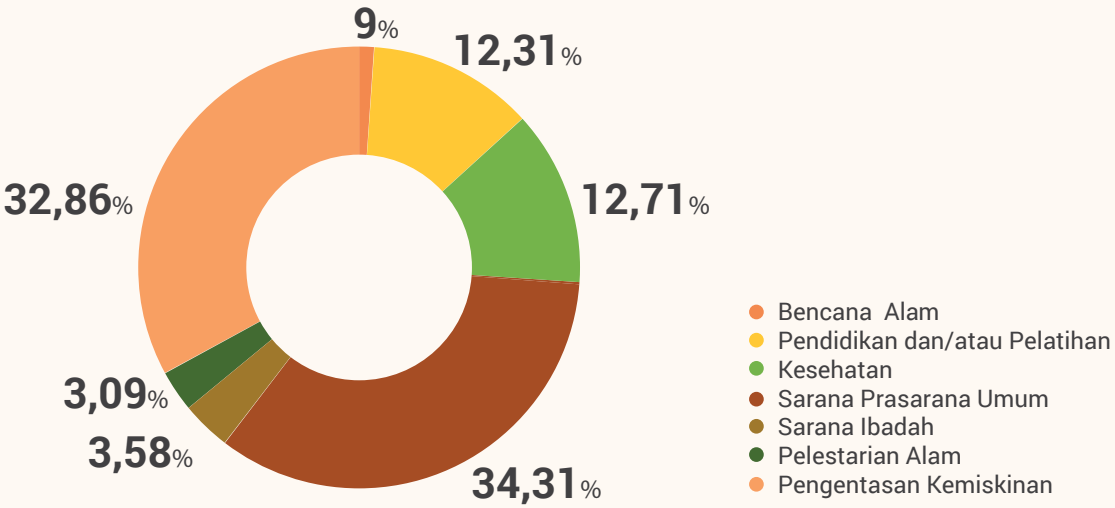

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERSEROAN SENANTIASA BERPARTISIPASI DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN KEGIATAN OPERASIONAL RAMAH LINGKUNGAN. KETAATAN PADA ATURAN INI MENUNJUKKAN KOMITMEN YANG TINGGI SEKALIGUS UPAYA SUNGGUH-SUNGGUH DARI PERSEROAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG DILAKUKAN SELARAS DENGAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS LINGKUNGAN SEKALIGUS MEMBERI MANFAAT POSITIF OPTIMAL BAGI MASYARAKAT.

A. KEBIJAKAN

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup juga diaplikasikan pada Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan yaitu Surat Edaran Direksi Nomor 336 / DIRICMLD/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Direksi Nomor 17/DIR/CMLD/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal *Standard Operating Procedure Commercial Loan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam persyaratan kredit Perseroan mempersyaratkan adanya dokumen Upaya Kelayakan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Bank terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

B.RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

Rencana kegiatan Perseroan terkait pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sesuai dengan strategi-strategi terkait lingkungan yang sejalan dengan roadmap keuangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti penerapan penyaluran kredit ramah lingkungan, strategi kegiatan operasional ramah lingkungan, serta penerapan program go green. Program-program yang dijalankan Perseroan ditahun 2016 dilakukan sebagai bentuk partisipasi Perseroan dalam mendorong tercapainya *sustainable finance.*

C. KEGIATAN CSR TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 DAN DAMPAK KUANTITATIF

Sepanjang tahun 2016, Perseroan secara konsisten menjalankan berbagai program ramah lingkungan. Melalui program yang telah dijalankan Perseroan, dapat dilihat dampak kuantitaif serta inisiatif strategis yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari kegiatan operasional yang dijalankan oleh Perseroan.

Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan

Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit ramah lingkungan. Kepedulian Perseroan terhadap kelestarian lingkungan terus ditingkatkan sejalan dengan kebijakan *sustainable finance* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan secara konsisten menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif. Dalam setiap aktivitas pembiayaan selama ini, Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip berkelanjutan. Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit ramah lingkungan dengan tidak mengucurkan kredit kepada nasabah yang tidak menyertakan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setelah itu terhadap nasabah yang sudah menyertakan hasil AMDAL-pun, Perseroan akan tetap melakukan pengecekan ke lapangan sebagai upaya validasi.

Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan

Perseroan turut berpartisipasi dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global melalui pengelolaan operasional yang ramah lingkungan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan Perseroan terhadap tanggung jawab sosial Perseroan dalam menjaga kualitas lingkungan. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Perseroan antara lain:

Program *Green Office*

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Perseroan menerapkan program *green office* yang merupakan bentuk nyata kontribusi Perseroan dalam mengelola kantor dengan prinsip ramah lingkungan melalui penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan seperti penghematan penggunaan air, kertas, listrik dan upaya pengelolaan sampah dengan pemilahan dan daur ulang.

1. **Meminimalkan Penggunaan Kertas (Paperless)**
   Dalam kegiatan operasional, Perseroan menggunakan kertas sebagai material penting untuk kegiatan surat-menyurat, pembuatan rekening, dan kegiatan penunjang operasional lainnya. Perseroan menyadari bahwa penggunaan kertas yang berlebihan secara terus menerus akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan seperti penggundulan hutan. Dengan isu tersebut, Perseroan melakukan inisiatif untuk menghemat penggunaan kertas, yaitu:
   - Menggunakan kembali kertas bekas;
   - Mengefektifkan penagihan melalui telepon atau secara langsung yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi yang mendukung aplikasi *mobile, paperless, historical record,* dan *parameterized;*
   - Menggunakan metode cetak 2-sided;
   - Memberikan edukasi kepada nasabah terkait transaksi melalui *Electronic Channel;*
   - Melakukan peningkatan layanan *Electronic Channel* sebagai inisiatif penghematan kertas.

   Perseroan juga melakukan peningkatan layanan *Electronic Channel* sebagai inisiatif penghematan kertas. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah transaksi layanan *Electronic Channel* pada tahun 2016, dimana transaksi dengan ATM dan KiosK meningkat sebesar 12,86%, *Cash Deposit Machine* (CDM) meningkat sebesar 14,81%, *Internet Banking* meningkat sebesar 217,58% dan *Mobile Banking* meningkat sebesar 113,50%.

2. **Penghematan Energi**
   Jenis energi yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan adalah listrik yang merupakan pasokan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada tahun 2016, penggunaan energi listrik di Kantor Pusat Perseroan sebesar 6.846.700 kWh atau setara dengan 24.648,12 GJ yang mengalami penurunan 16,58% dari tahun 2015 yaitu sebesar 8.207.160 kWh atau setara dengan 29.545,78 GJ.

Satuan	2014	2015	2016
kWh	7.727.400	8.207.160	6.846.700
gigajoule	27.818,64	29.545,78	24.648,12

   Selama tahun 2016, Perseroan melakukan berbagai inisiatif efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi sumbangan Perseroan terhadap emisi gas rumah kaca. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan antara lain:
   - Memberikan informasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya mematikan lampu ruangan dan peralatan elektronik lainnya selepas jam kerja;
   - Mengganti mesin pendingin/pengatur suhu ruangan *refrigeran sintetis freon R-22* dengan *refrigeran* yang lebih ramah lingkungan seperti *R-32, musicool 22,* atau *R134a;*
   - Mengganti lampu konvensional dengan lampu *Light Emitting Diode* (LED);
   - Mengurangi intensitas rapat secara tatap muka dan memperbanyak rapat melalui telekonferensi. Hal ini akan memangkas penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk transportasi para peserta rapat;
   - Melakukan peremajaan kendaraan sehingga lebih ramah lingkungan;
   - Anjuran untuk pegawai agar menggunakan kendaraan umum menuju kantor.

Selain itu, Perseroan juga mewajibkan kendaraan operasional untuk menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan kendaraan operasional BUMN menggunakan BBM non-subsidi. Melalui memo nomor 1836/M/PGSD/GS/XI/2013 tanggal 6 November 2013, Divisi Procurement and General Service Division menyampaikan memo ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah mengenai larangan penggunaan bahan bakar minyak tertentu berupa bensin (gasoline) RON 88 untuk kendaraan operasional Perseroan.

3. **Manajemen Penggunaan Air**

Perseroan menggunakan air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan air tanah. Penggunaan air tanah lebih bersifat sebagai cadangan apabila pasokan air dari PDAM kurang atau tidak mencukupi kebutuhan. Selama tahun 2016, volume penggunaan air di Kantor Pusat Perseroan sebesar 68.236 m3 yang mengalami kenaikan 1,76% dari tahun 2015 yaitu sebesar 67.055 m3. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan penggunaan air di masjid. Walaupun terjadi kenaikan dalam penggunaan air, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan kembali air daur ulang untuk berbagai keperluan, seperti penyiraman tanaman. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan konsumsi air bersih, biaya perawatan, dan biaya pembuangan air. Perseroan juga secara rutin melakukan pengontrolan saluran air dan kran sehingga apabila terjadi kebocoran bisa segera ditangani.

Program Pengelolaan Sampah

Salah satu upaya Perseroan dalam penataan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan pemilahan sampah dari sumber. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan tercampurnya limbah B3 (beracun) pada sampah organik maupun non organik serta memetakan potensi pelaksanaan pemanfaatan kembali sampah non organik.

Pengelolaan Limbah

Perseroan senantiasa berusaha melakukan pengelolaan limbah baik limbah Non B3 (tidak beracun) maupun limbah B3 (beracun) melalui pengelolaan dengan pihak ketiga yaitu pengelola gedung. Perseroan secara rutin setiap tiga bulan sekali melakukan pengukuran terkait kualitas air dari pengolahan air limbah, sehingga air yang dibuang dipastikan sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga tidak mencemari lingkungan. Pada tanggal 14-23 September 2016, Perseroan kembali melakukan pengukuran air limbah di Kantor Pusat Perseroan dengan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Pengukuran Mutu Pengolahan Air Limbah Kantor Pusat Perseroan Tahun 2016

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu	Metoda
pH	-	6-9	7.5	SNI 06-6989.11-2004
Organik (KMnO4)	mg/L	85	43.29	SNI 06-6989.22-2004
Zat Padat Tersuspensi	mg/L	50	44.0	Spektrophotometer
Ammonia	mg/L	10	1.72	No 41/IKM
Minyak dan Lemak	mg/L	10	<1.13	Spektrophotometer
Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	2	0.11	SNI 06-6989.51:2005
COD (Dichromat)	mg/L	80	83.10	SNI 6989.73:2009
BOD (20oC, 5 hari)	mg/L	50	12.45	SNI 6989.72:2009

Komitmen Perseroan dalam mengelola kelestarian lingkungan juga dibuktikan dengan adanya alokasi biaya khusus untuk pengelolaan lingkungan yaitu biaya pengelolaan limbah. Pada tahun 2016, biaya pengelolaan limbah yang dikeluarkan Perseroan sebesar Rp100 juta.

Program Penghijauan

Dalam rangka menjaga pelestarian alam di Indonesia, khususnya di sekitar wilayah kerja Perseroan, Perseroan mewujudkan program pelestarian alam melalui Hijau BTN. Pada umumnya kegiatan Hijau BTN meliputi kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon di sekitar wilayah kerja Perseroan. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya kepada perumahan yang dibangun dan dibiayai melalui fasilitas KPR, Perseroan melakukan rehabilitasi dan perbaikan atas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di Perumahan Tanah Mas, yang merupakan perumahan yang pertama kali di akad kreditkan oleh Perseroan yang berlokasi di Semarang.

D. MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Perseroan selalu terbuka jika ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Bank. Pengaduan masalah lingkungan tersebut disampaikan kepada Perseroan dengan menyampaikan pengaduan terkait lingkungan sekitar Menara BTN melalui surat resmi. Selama tahun 2016, Perseroan tidak mendapat denda atau sanksi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

E. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Sampai dengan tahun 2016, Perseroan belum menerima penghargaan dan sertifikasi terkait lingkungan hidup.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA

KEBERHASILAN DAN PERKEMBANGAN PERSEROAN SALAH SATUNYA DISEBABKAN OLEH ANDIL DAN DEDIKASI PARA PEGAWAI YANG SENANTIASA SETIA MEMBANGUN PERSEROAN MENJADI SEMAKIN LEBIH BAIK. PERSEROAN TERUS BERKOMITMEN UNTUK MENGEMBANGKAN KUALITAS DAN POTENSI PEGAWAI SERTA MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI SECARA ADIL TANPA ADANYA PRAKTIK DISKRIMINASI.

A. KEBIJAKAN

Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki kebijaan khusus terkait pengelolaan SDM yaitu melalui Peraturan Direksi Nomor 29/DIR/CMO/2011 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen *Human Capital* (PKMHC) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PKMHC tersebut dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali guna menjamin efektifitas peraturan terhadap pengelolaan SDM Perseroan.

B.RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

Perseroan menjadikan pegawai sebagai salah satu pondasi kuat bisnis perbankan dalam mendapatkan kepercayaan nasabah. Untuk itu perencanaan program CSR terkait pegawai, disusun sesuai dengan arah dan strategi Perseroan dalam pengelolaan SDM. Fokus program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016 selain meningkatkan keunggulan kompetitif, Perseroan juga senantiasa berupaya untuk mengembangkan *human capital* yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.

C. KEGIATAN CSR TERKAIT KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016 DAN DAMPAK KUANTITATIF

Sepanjang tahun 2016 bentuk kegiatan Perseroan terkait tanggung jawab kepada pegawai adalah melalui kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pengembangan kompetensi,

perlindungan terhadap pegawai (hubungan industrial), kesejahteraan pegawai serta keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini dijalankan dalam rangka mewujudkan partisipasi dan dukungan pegawai terhadap kegiatan Perseroan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan pegawai.

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk terus berkembang. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pegawai tanpa membedakan *gender*. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan. Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, *gender*, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan perekrutan pegawai baru sebanyak 1.362 orang dengan tingkat rekrutmen sebesar 15,91% dari jumlah total pegawai tetap Perseroan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 28,49% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.060 orang.

Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan *skill* dan kinerja pegawai, Perseroan merealisasikan program pengembangan kompetensi dengan kesempatan yang sama dan terbuka bagi seluruh pegawai. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan terbagi dalam tiga kelompok program, yaitu *Core Banking Academy, New Entry Academy,* dan *Strategic Initiative*. Selama tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan 454 Program Pelatihan dan Pendidikan yang diikuti oleh 18.343 peserta dengan total anggaran SDM terkait pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar Rp128.420.000.000 meningkat sebesar 0,2% dibanding tahun 2015 sebesar Rp105.993.657.000.

Uraian lebih rinci terkait pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Sub Bab Manajemen Sumber Daya Manusia.

Sistem Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Pegawai

Dalam rangka penilaian kinerja dan pengembangan karir pegawai, Perseroan telah mengembangkan performance management dengan menggunakan *Human Capital Information System* (HCIS). Penilaian kinerja pegawai dilakukan satu kali dalam setiap tahun untuk kinerja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Target Perseroan didistribusikan ke seluruh Unit Kerja dan selanjutnya diturunkan kepada masing-masing pegawai berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai yang dituangkan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Pada tahun 2016, seluruh pegawai Perseroan diseluruh level jabatan baik perempuan maupun laki-laki menerima penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut, Perseroan melakukan rotasi, promosi, serta rotasi dan promosi terhadap 4.406 pegawai.

Perlindungan terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)

Perseroan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara Perseroan dan pegawai yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Dalam operasionalnya Perseroan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM Perseroan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yaitu forum komunikasi dan Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial Perseroan yang anggotanya terdiri dari Pemangku Jabatan dan Serikat Pekerja Bank BTN (SPBTN).

Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak dan kewajiban Perseroan dan pegawai guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Perseroan secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban pegawai ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai. Pada tahun 2016, seluruh

pegawai tetap Perseroan (100%) telah terlindungi hak-haknya oleh PKB.

Remunerasi Pegawai

Perseroan memberikan remunerasi kepada setiap pegawai berdasarkan *merit system* yaitu dengan mengedepankan kinerja, kompetensi, dan integritas pegawai berupa gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem remunerasi Perseroan telah mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mematuhi konvensi *International Labour Organization* (ILO) tentang Kesetaraan Remunerasi, dimana besaran gaji pegawai baru Perseroan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	18.85 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.11 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2.70 : 1

Sepanjang tahun 2015, tingkat pergantian (*turnover*) pegawai yaitu sebesar 4,96% yang disebabkan oleh 107 pegawai memasuki masa pensiun, 17 pegawai mengajukan pensiun dini, 17 pegawai meninggal dunia, 297 pegawai mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dan 27 orang terkena PHK karena sebab-sebab lain.

Tabel *Turnover* Karyawan Tahun 2014-2016

Tahun	% Turnover
2014	3,04%
2015	4,24%
2016	4,96%

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Perseroan menyediakan saluran pengaduan bagi pegawai dalam berhubungan dengan Perseroan. Penyelesaian pengaduan pegawai merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan dibidang perlindungan pegawai dalam rangka menjamin hak-hak dalam berhubungan dengan Perseroan.

Terdapat beberapa cara mengirimkan laporan terkait dengan yang diduga terlibat dengan pelanggaran yang terjadi. Mekanisme penyampaian keluhan pegawai dilakukan sebagai berikut:

a. Apabila terlapor adalah pegawai Perseroan, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran ditujukan langsung kepada tim *Whistle Blowing System* dengan alamat :
   - Tim *Whistle Blowing System* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

     PO BOX *Whistle Blowing System* (WBS) BTN Jakarta
   - Email: wbs.btn@btn.co.id
   - SMS/Handphone: 081311434343

     Laporan dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan media lainnya oleh Pelapor/*Whistle Blower.*

b. Apabila terlapor adalah anggota Tim *Whistle Blower System*, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama.

c. Apabila terlapor adalah anggota Direksi atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Dewan Komisaris.

d. Apabila terlapor adalah anggota Dewan Komisaris atau keluarganya, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung Direktur Utama.

Selama tahun 2016, terdapat 1 (satu) pengaduan praktik ketenagakerjaan terkait perkara di Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan telah selesai pada bulan Desember 2016.

D. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Selain aspek sumber daya manusia, Perseroan juga senantiasa meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan, produktivitas pegawai akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan di lingkungan Perseroan. Perseroan telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 2 yang menegaskan bahwa untuk melindungi keselamatan pegawai guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Aturan mengenai kesehatan kerja juga dituangkan dalam Kebijakan tentang jaminan dan fasilitas kesehatan pegawai yaitu Surat Edaran Direksi nomor 43/DIR/CMO/2011, tanggal 28 November 2011 pada indeks 184/P/HC-REW/2011 tentang Bantuan Pengobatan.

Program Kesehatan

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menjaga kesehatan pegawai, Perseroan juga memberikan fasilitas kesehatan yang meliputi fasilitas *Medical Check Up* secara berkala dan fasilitas pengobatan seperti jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit dan rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kacamata, alat bantu dengar, pemeriksaan laboratorium, serta pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap. Selain memberikan fasilitas kesehatan kepada pegawai, Perseroan juga memberikan fasilitas poliklinik dan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan jasa medis atau kedokteran kepada pegawai dan keluarganya. Perseroan juga telah mengikutsertakan pegawai dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti *Apar, Smoke Detector, Diesel Pump,* dan Tangga Darurat. Perseroan juga melakukan inspeksi keselamatan kebakaran terhadap alat-alat kebakaran tersebut. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki rencana situasi/evakuasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang pegawai dan setiap lantai gedung sehingga seluruh pegawai teredukasi dengan baik. Sampai dengan tahun 2016, Perseroan telah mengikutsertakan pegawai dalam sertifikasi pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Seluruh pegawai juga telah diikut sertakan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi pegawai terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah memasuki tahap permohonan kajian ke Divisi terkait. Di dalam kebijakan tersebut mengatur terkait *Standard Operational Procedure* (SOP) SMK3 dan Kebijakan Khusus K3 Perseroan. Tujuan dari penerapan SMK3 adalah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi serta untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Selama tahun 2016, Perseroan telah mengelola keselamatan dan kesehatan kerja pegawai secara baik dan optimal. Tercatat, selama periode pelaporan tidak ada pegawai Perseroan yang dalam kegiatannya kerja sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit akibat kerja tertentu (*zero accident*).

E. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Upaya sertifikasi ini mendorong Perseroan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan selamat bagi pegawai Perseroan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN DIWUJUDKAN MELALUI KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SERTA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* YANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERSEROAN SEKALIGUS MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERADA DI LINGKUNGAN SEKITAR MAUPUN DI LUAR WILAYAH OPERASIONAL

A. KEBIJAKAN

Kebijakan Perseroan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

Sebagai Perseroan yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan bertekad untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, salah satunya melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016, program yang dijalankan oleh Perseroan

difokuskan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang secara konsisten dijalankan oleh Perseroan.

C. KEGIATAN CSR TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2016 DAN DAMPAK KEGIATAN

Berbagai program kegiatan terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan sebagai wujud partisipasi dan dukungan Perseroan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungan Perseroan menjadi lebih baik. Selama tahun 2016, Perseroan telah merealisasikan berbagai program terkait peningkatan kesejahteraan dan potensi masyarakat antara lain:

Penggunaan Tenaga Kerja dan Pemasok Lokal

Untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, tenaga kerja yang digunakan oleh Perseroan seluruhnya berasal dari lokal. Selain itu, Perseroan juga senantiasa melakukan kerjasama dengan pemasok barang dan jasa sebagai mitra kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama dengan perusahaan bidang konstruksi sebagai pendukung dalam terwujudnya Program Sejuta Rumah. Dalam pemilihan pemasok sesuai dengan konteks keberlanjutan, Perseroan memaksimalkan pemilihan pemasok lokal yaitu pemasok yang berasal dari Indonesia. Hal ini selain untuk menekan biaya operasional, juga bertujuan untuk mendukung kemajuan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Edukasi Kepada Masyarakat

Perseroan berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi perbankan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang selama ini memiliki kendala keterbatasan pada akses perbankan maupun literasi keuangan. Selama tahun 2016, program edukasi masyarakat yang telah dilakukan Perseroan antara lain:

1. Melakukan edukasi literasi keuangan melalui program Simolek (Mobil Edukasi Keuangan), yaitu program edukasi literasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi terkait investasi yang aman, memperkenalkan produk - produk perbankan, dan mengajarkan masyarakat untuk gemar menabung.
2. Optimalisasi Mobil Kas Keliling, dilakukan dengan mendatangi perumahan, lembaga, dan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menabung.
3. Revitalisasi KLKK (Kantor Layanan Setara Kantor Kas) dengan menempatkan *customer services* di loket kantor pos untuk melayani nasabah maupun calon nasabah yang berada di pelosok daerah.

Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi

Dalam rangka penegakan penyelenggaraan perbankan yang bersih dan transparan, Perseroan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan praktik *fraud*, korupsi, dan pencucian uang. Pelaksanaan penerapan anti *fraud* di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi Nomor: 22/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang *Standard Operating Procedure* Strategi Anti *Fraud* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Strategi Anti Fraud memiliki 4 (empat) pilar yaitu (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta (4) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Program yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan *fraud* dan korupsi dilakukan melalui Program Sosialisasi Peningkatan *awareness* kejadian *Fraud* di lingkungan kerja yaitu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* perihal kebijakan Strategi Anti *Fraud*, korupsi dan pencucian uang, serta Penerapan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini juga telah disosialisasikan Perseroan kepada nasabah maupun masyarakat melalui

pemasangan banner tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang Perseroan.

Pelatihan Anti Korupsi

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan berbagai program awareness terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perseroan diantaranya yaitu: (1) PIN Tolak Gratifikasi yang digunakan oleh seluruh insan Perseroan; (2) Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi kepada perwakilan MVP seluruh unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang; (3) Penerbitan Buku Saku Program Pengendalian Gratifikasi; dan (4) Penyampaian Surat kepada Mitra Kerja/*Stakeholder* Perseroan kantor Pusat maupun kantor cabang. Adapun sosialisasi program pengendalian gratifikasi dilakukan Perseroan untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, fraud maupun gratifikasi.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan

Melalui program kemitraan, Perseroan turut mendukung perkembangan dan peningkatan kompetensi usaha kecil. Pemberian bantuan dana pinjaman terutama ditujukan kepada usaha kecil yang mempunyai komoditas sebagai produk unggulan daerah, komoditas yang berpeluang atau berorientasi ekspor, komoditas yang dapat menyerap banyak tenaga kerja padat karya, dan komoditas yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

Selama tahun 2016 Perseroan telah menyalurkan bantuan Program Kemitraan kepada 43 Mitra Binaan dengan nilai penyaluran sebesar Rp1.779.500.000.

Tabel Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan Tahun 2016

No	Wilayah Penyaluran	Jumlah Mitra Binaan	Nilai Penyaluran
1	Solo	13	618.000.000
2	Denpasar	30	1.161.500.000
Jumlah		**43**	**1.779.500.000**

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang dilakukan Perseroan ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah Perseroan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Bantuan Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan sebesar Rp13.153.136.795 melalui berbagai kegiatan bantuan diantaranya pendidikan dan pelatihan, prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, peningkatan kesehatan dan sosial masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2016

No	Wilayah Penyaluran	Nilai Penyaluran Tahun 2016
1	Wilayah I	6.128.831.544
2	Wilayah II	1.860.401.800
3	Wilayah III	100.000.000
4	Wilayah IV	5.063.903.451
Total		**13.153.136.795**

Program *Corporate Social Responsibility*

Selain melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), Perseroan tetap melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dalam implementasinya, berbagai kegiatan yang Perseroan laksanakan untuk pengembangan sosial dan kemasyarakatan termasuk di dalamnya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Sepanjang tahun 2016, realisasi kegiatan CSR Perseroan, selain dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga dilaksanakan melalui Program Lingkungan Harmoni BTN. Program ini memiliki tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat secara terpadu melalui beberapa pelatihan dan/atau pendidikan serta pendampingan kepada masyarakat sebagai dasar pengembangan program yang terintegrasi. Program Lingkungan Harmoni BTN dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan utama, yaitu:

Sejahtera BTN

Dalam rangka melanjutkan Program BUMN Hadir untuk Negeri yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua, pada tahun 2016 Perseroan kembali melanjutkan program dimaksud untuk mendistribusikan bibit ubi jalar sebanyak 2000 kg yang diperuntukan kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan Perseroan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Leni Jaya, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Puncak Jaya) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Religi BTN

Dalam rangka memperingati Nuzulul Qur'an 1437 H, Perseroan berbagi kebahagian bersama-sama dengan 1000 orang anak yatim piatu untuk buka puasa bersama dengan keluarga besar Perseroan dan mitra kerja yang dilaksanakan di seluruh Cabang Perseroan sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim dan yayasan.

Hijau BTN

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan khususnya kepada perumahan yang dibangun dan dibiayai melalui fasilitas KPR BTN, Perseroan melakukan rehabilitasi dan perbaikan atas fasilitas umum dan sosial yang berlokasi di Perumahan Tanah Mas, Semarang. Perumahan tersebut merupakan lokasi pertama yang dilakukan pembiayaan dan akad kredit oleh Perseroan.

Bugar BTN

Fokus bidang bugar BTN terkait dengan bidang olahraga, seperti penyediaan fasilitas olahraga bagi masyarakat sekitar berikut sarana dan prasarana penunjangnya. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan khususnya kepada perumahan yang dibangun dan dibiayai melalui fasilitas KPR BTN, Perseroan juga melakukan rehabilitasi fasilitas olahraga yang berada di fasilitas umum dan sosial yang berlokasi di Perumahan Tanah Mas, Semarang.

Sehat BTN

Sehat BTN merupakan realisasi program harmoni lingkungan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Dalam program ini Perseroan menyalurkan dana untuk renovasi prasarana kesehatan masyarakat, memberikan obat-obatan, serta penyediaan fasilitas

kesehatan. Sebagai bagian dari Program BUMN Hadir untuk Negeri, Perseroan bersama-sama dengan PT. Asabri (Persero) dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembuatan sarana MCK dan air bersih yang berlokasi di Pulau Kolorai dan Pulau Dodola, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat yang berlokasi di salah satu pulau terluar di Indonesia.

Cerdas BTN

Cerdas BTN merupakan program harmoni lingkungan yang berfokus pada pendidikan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pengetahuan, serta keterampilan mengenai kewirausahaan serta sosialisasi program berbasis masyarakat yang sedang dijalankan Perseroan. Guna merealisasikan kegiatan tersebut, Perseroan melaksanakan program Siswa Mengenal Nusantara yang merupakan bagian dari Program BUMN Hadir untuk Negeri. Program ini memberikan kesempatan kepada 20 orang siswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu di Kota Ternate, dimana 2 (dua) orang diantaranya merupakan siswa difabel untuk mengenal budaya, adat istiadat, kegiatan UMKM serta sistem pendidikan di provinsi lain, khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Bersih BTN

Bersih BTN merupakan program yang dilaksanakan Perseroan dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat. Perseroan bersama dengan 5 (lima) BUMN lain melakukan sinergi untuk pengembangan pariwisata khususnya Desa Wisata Pinge yang berlokasi di Provinsi Bali guna mendukung sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor utama pendukung perekonomian Indonesia.

Peduli BTN

Pada umumnya pelaksanaan program peduli BTN berkaitan dengan bantuan sosial bencana alam. Sebagai bentuk kepedulian atas musibah bencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten di wilayah Indonesia, Perseroan turut berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan guna membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Tahun 2016 Perseroan berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Garut, Aceh dan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan BTN

Program harmoni lingkungan BTN juga melakukan program kemitraan berupa Kemitraan BTN. Kegiatan tidak jauh beda dengan PKBL, perbedaannya hanya pada pelaksana program. Kemitraan BTN dinaungi dan dilaksanakan langsung oleh internal Perusahaan dalam hal ini Divisi CSR.

D. BIAYA YANG DIKELUARKAN

Selama tahun 2016, Perseroan telah mengeluarkan dana terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan sosial yang disalurkan melalui berbagai kegiatan. Berikut rincian dana yang telah disalurkan oleh Perseroan:

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Ekonomi	20 Januari 2016	Sharing biaya dalam penyelenggaraan buka puasa bersama anak yatim dengan himbara di Makassar dengan Koordinator Bank BNI	264.529.004
	20 Januari 2016	Sharing biaya dalam penyelenggaraan buka puasa bersama anak yatim dengan himbara di Medan dengan Koordinator Bank Mandiri	223.910.017
	18 Mei 2016	Kegiatan santunan dhuafa dan khitanan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dilaksanakan oleh Bazis Perseroan.	50.000.000
	9 Mei 2016	Biaya penyediaan 450 kg bibit padi dan 170 paket murah Sinergi BUMN ke Kabupaten Wamena Provinsi Papua dalam rangka kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri	67.294.067
	25 Mei 2016	Penyerahan bibit padi ke Kabupaten Wamena dalam kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri	111.686.470
	17 Juni 2016	Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Majelis Dzikir Sholawat Tjakraboeana Djatireja di Bandung	15.000.000
	17 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Tasikmalaya	10.000.000
	22 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Jember	10.000.000
	23 Juni 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa yang dilaksanakan oleh Kamerad	25.000.000
	23 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Madiun	10.000.000
	28 Juni 2016	Pemberian bantuan untuk yayasan. santunan anak yatim. bantuan transportasi dan pendamping dalam rangka buka puasa bersama anak yatim	75.000.000
	30 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Bandarlampung	10.000.000
	30 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Palangkaraya	10.000.000
	30 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Ambon	10.000.000
	30 Juni 2016	Pemberian bantuan santunan kepada anak yatim dalam rangka safari ramadhan Direksi di Kantor Cabang Tanjungpinang	10.000.000
	28 Juli 2016	Pelaksanaan site visit dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara	19.819.750
	23 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada penanggulangan bencana dan kegiaitan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh	115.000.000
	30 Desember 2016	Biaya transportasi dalam rangka penyaluran bantuan dalam tanggap darurat bencana banjir yang berlokasi di Kabupaten Bima. Nusa Tenggara Barat	9.947.000

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Seni Budaya	6 Januari 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan pelestarian seni dan budaya untuk mendukung pelaksanaan Merti Bumi (Nyangku dan Panjalu) yang dilaksanakan di Dusun Cimendung. Ds. Panjalu Kec. Ciamis Jawa Barat	40.000.000
	20 April 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan pentas seni dan budaya dan jalan santai *Season Two* 2016 dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dilaksanakan oleh Karang Taruna RW 08/02 Kel. Petojo Utara Jakarta Pusat	5.000.000
	5 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan pelestarian Seni dan Budaya Indonesia berupa dukungan bagi Kesultanan Ternate untuk mengikuti Festival Keraton Nusantara Tahun 2016 di Pangkalan Bun. Kalimantan Tengah	80.000.000
	25 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan seni dan budaya untuk mendukung Pagelaran Seni Tradisi Ketoprak yang dilaksanakan oleh Komunitas Senior Editor dan Masyarakat Keuangan	15.000.000
	25 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana penunjang pendidikan berupa 5 unit komputer untuk dipergunakan di laboratorium komputer pada Sekolah Pembangunan Utan Kayu Jakarta Timur	11.500.000
	26 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan ruang kelas baru untuk menunjang sarana dan prasarana belajar santri yang ada di Pondok Pesantren Salavi Plumbon	10.000.000
	26 Oktober 2016	Biaya peninjauan lokasi Bedah Rumah Veteran di Tobelo dan Halmahera Utara	1.266.500
	14 November 2016	Partisipasi Perseroan pada Festival Seni dan Budaya Nyangku dan Festival Budaya Panjalu sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya Indonesia	40.000.000
	8 November 2016	Partisipasi Perseroan pada atlit disabilitas yang mengikuti Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) bulan Oktober 2016 di Bandung. Jawa Barat	25.000.000
	16 November 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana pendidikan dalam rangka pembukaan BTN Syariah Banda Aceh	25.000.000
	17 November 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan sarana dan prasarana untuk perbaikan ruang kelas pada Yayasan Cakra Buana yang beralamat di Dusun Sinoman Rt 01/08. Ds Ganjaresik. Kec. Wado. Kab. Sumedang	20.000.000
	30 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada pelestarian peninggalan benda-benda sejarah perang dunia II yang berlokasi di Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara	19.200.000
Olahraga	5 April 2016	Partisipasi Perseroan pada perbaikan sarana olahraga yang berada di SDK Pelita Kasih. Pondok Bambu Jakarta Timur	2.200.000
	6 April 2016	Pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan renovasi sarana olahraga dan pembuatan taman di Jalan Tambak Mas Raya Perum Tanah Mas Semarang	115.588.440

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Olahraga	20 Mei 2016	Partisipasi Perseroan pada perbaikan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada SDN Utan Kayu Selatan 25 Pagi yang berlokasi di Galur Sari Timur. Kel. Utan Kayu Selatan. Kec. Matraman Jakarta Timur	5.000.000
	30 Mei 2016	Pembayaran termin II atas pekerjaan renovasi sarana olahraga dan pembuatan taman di Jalan Tambak Mas Raya Perum Tanah Mas Semarang	115.588.440
	23 Juni 2016	Biaya penyediaan perlengkapan sekolah untuk keperluan santunan anak yatim dalam rangka buka puasa bersama Perseroan tanggal 22 Juni 2016	12.750.000
	30 Juni 2016	Pembayaran termin II atas pekerjaan renovasi sarana olahraga dan pembuatan taman di Jalan Tambak Mas Raya Perum Tanah Mas Semarang	115.588.440
	23 Desember 2016	Partisipasi Perseroan dalam mendukung atlit dan seniman difabel yang berprestasi yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Porseni BUMN Tahun 2016	50.000.000
Pendidikan	14 Januari 2016	Biaya peliputan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara 2016 di Provinsi Papua oleh TV Papua dan Cepos Edisi 12 Januari 2016	800.000
	15 Januari 2016	Biaya penyediaan sarana dan prasaran pendukung untuk kegiatan Program Siswa Mengenal Nusantara 2016 di Provinsi Kalimantan Timur	300.000
	26 Januari 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana meubeleur untuk mendukung sarana belajar dan mengajar pada Yayasan Pendidikan Islam Al Karomah di Bogor	25.000.000
	2 Februari 2016	Tagihan pertama atas jasa kompilasi dalam pembuatan laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2015	27.500.000
	2 Februari 2016	Pembayaran Jasa event organizer dalam rangka pelaksanaan Program Siswa Mengenal Nusantara 2015 bagi Siswa dari Nusa Tenggara Barat di Provinsi Papua tanggal 09 - 16 Januari 2016	445.000.000
	3 Februari 2016	Beasiswa bagi 10 orang mahasiswa USU periode Juli - Desember 2015	30.000.000
	4 Februari 2016	Pembuatan atribut berupa tas dan topi bagi siswa dari NTB dan Papua dalam rangka pelaksanaan acara Program Siswa Mengenal Nusantara 2015 di Provinsi Papua	12.300.000
	15 Februari 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka Peresmian Program Sekolah Percontohan Perseroan di SDN Clumprit Yogyakarta tanggal 29 Januari 2016	23.172.500
	18 Februari 2016	Biaya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka seremoni penerimaan dan pelepasan siswa SMN dari NTB dan Jayapura ke Kaltim tanggal 11 Januari 2016	13.305.349
	25 Februari 2016	Pembuatan atribut berupa tsirt bagi siswa dari NTB dan Papua dalam rangka pelaksanaan acara Program Siswa Mengenal Nusantara 2015 di Provinsi Papua	11.800.000

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pendidikan	26 Februari 2016	Partisipasi Perseroan pada renovasi TPQ Al-Aziziyyah yang berlokasi di Jl. Kotalintang GG Jawa No. 223. Kabupaten Aceh Tamiang	20.000.000
	29 Februari 2016	Biaya akomodasi untuk siswa-siswa peserta SMN 2015 beserta pendamping serta veteran dalam rangka testimoni inagurasi Program Hadir untuk Negeri 2015	18.629.996
	15 Maret 2016	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka testimoni dan inagurasi Program Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah Veteran di Provinsi Papua tanggal 19 Februari 2016	38.380.000
	14 April 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan ruang kelas baru pada Sekolah MA Noer Fadillah yang berlokasi di Ds Akkor. Kec. Palegaan. Kab. Pamekasan dan pekerjaan lantai yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sekar Anom yang berlokasi di Kec. Pengantenan. Kab. Pamekasan	39.000.000
	19 April 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana Ruang Perpustakaan berupa meja dan kursi bagi siswa serta meja dan kursi bagi guru untuk MI Muhajirin yang berlokasi di Pogot. Kenjeran Surabaya	21.000.000
	11 Mei 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelatihan kerja guna meningkatkan kewirausahaan masyarakat di Kel. Rembangan Kota Surabaya	20.100.000
	25 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana penunjang pendidikan berupa 5 unit komputer untuk dipergunakan di laboratorium komputer pada Sekolah Pembangunan Utan Kayu Jakarta Timur	11.500.000
	26 Oktober 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan ruang kelas baru untuk menunjang sarana dan prasarana belajar santri yang ada di Pondok Pesantren Salavi Plumbon	10.000.000
	23 November 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SDN Utan Kayu Jakarta Timur	11.500.000
	23 November 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan sarana dan prasarana untuk perbaikan ruang kelas pada Yayasan Al-Ghaniyyah Salafiyah yang beralamat di Dusun Karangsari. Kec. Lewigoong. Kab. Garut	15.000.000
	30 November 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa 1 ruang kelas baru dan 2 ruang serbaguna untuk menunjang kegiatan PAUD	10.000.000
	2 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana pendidikan dalam rangka pembukaan BTN Syariah Banda Aceh	25.000.000
	23 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah SDI Al Abrar yang berlokasi di Bendungan Hilir Kodya Jakarta Pusat	5.000.000
	31 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan Yayasan Al Falah yang berlokasi di Dusun Be Regih. Ds Payudan Karangsokon. Kec. Guluk Kabupaten Sumenep Jawa Timur	20.000.000

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Sarana dan Prasarana	12 Januari 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelepasan Program Siswa Mengenal Nusantara 2016 ke Provinsi Kalimantan Timur	31.500.000
	14 Januari 2016	Biaya penyediaan sarana transportasi bagi 17 orang siswa beserta 3 orang pendamping dari Provinsi Papua menuju Provinsi Kalimantan Timur dalam Program Siswa Mengenal Nusantara 2015	210.366.000
	25 Januari 2016	Pembuatan penyediaan sarana dan prasara untuk mendukung pelaksanaan serah terima bantuan kepada Pengurus Mesjid Nurul Iman di Konawe Sulawesi Tenggara	100.000
	19 Februari 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Gedung Majelis Ta'lim Joko Kendil yang berada di Ds Sukolilan. Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa Tengah	50.000.000
	2 September 2016	Publikasi kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara di harian koran jakarta	15.000.000
	2 September 2016	Publikasi kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara di harian Suara Karya	15.000.000
	5 September 2016	Publikasi kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara di harian Indo Pos	30.000.000
	5 September 2016	Publikasi berita dalam rangka kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016	77.242.280
	5 September 2016	Publikasi kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Maluku Utara di harian Media Indonesia	50.000.000
	21 September 2016	Pembayaran tahap I (80%)atas pekerjaan perencanaan renovasi gedung rusun Cipinang Besar Selatan	79.800.000
	21 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung (konsumsi dan rangkaian bunga) dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara Perseroan tanggal 12 September 2016	45.960.000
	29 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara Perseroan tanggal 12 September 2016	5.000.000
	29 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara Perseroan tanggal 12 September 2016	46.045.455
	30 September 2016	Partisipasi Perseroan pada tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Garut	50.000.000
	26 Oktober 2016	Biaya peninjauan lokasi Bedah Rumah Veteran di Tobelo dan Halmahera Utara	1.266.500
	20 Desember 2016	Biaya pelaksanaan *site visit* atas lokasi pembangunan sarana MCK dan Air Bersih yang berlokasi di Pulau Kolorai. Pulau Dodola dan Kabupaten Oba dalam rangka Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2016	14.800.000

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Keagamaan	19 Januari 2016	Partisipasi Perseroan dalam pembangunan Masjid Nurul Ikhlas di Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Pengurus Mesjid Nurul Iman di Konawe Sulawesi Tenggara	20.000.000
	27 Januari 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Pondok Pesantren Darunna'im di Kota Pontianak	50.000.000
	19 Februari 2016	Partisipasi Perseroan pada renovasi Musholla Al Muttaqin yang berlokasi di Des Pangereman. Kec. Ketapang Kabupaten Sampang	19.000.000
	22 Februari 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Mesjid Baiturrahman yang berlokasi di Jl. Musyawarah No.5A Ragunan Jakarta Selatan	20.000.000
	31 Maret 2016	Partisipasi Perseroan pada renovasi Mesjid Nurul Iman yang berlokasi di Ds Tj Karang. Ds Kota Jawa. Kec. Punduh Pedada. Kab. Pesawaran Kota Bandarlampung untuk perbaikan kubah. perbaikan pagar dan renovasi tempat wudhu	20.000.000
	31 Maret 2016	Partisipasi Perseroan pada rehabilitasi sarana dan prasarana Mesjid Nurul Iman yang berlokasi di Dsn 1 Plimpang Makmur. Ds Danaulancang. Tapung Hulu Kab Kampar berupa perbaikan kubah. perbaikan pagar dan renovasi tempat wudhu	19.000.000
	8 April 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Mesjid Al Muttaqiem yang berlokasi Jl. Mayor Marzuki RT 06 Kel. Paal Lima. Kec. Kota Baru Jambi	19.000.000
	21 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara BTN tanggal 12 September 2016	45.960.000
	29 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara BTN tanggal 12 September 2016	5.000.000
	29 September 2016	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka acara Idul Adha 1437 H di Halaman Belakang Gedung Menara BTN tanggal 12 September 2016	46.045.455
	8 September 2016	Partisipasi Perseroan pada pembangunan Musholla Al Ishlah yang berlokasi di Perumahan Bukit Waringin. Bojong Gede Kabupaten Bogor	10.000.000
	15 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapekris Perseroan berupa pemberian bantuan kepada Rumah Singgah Bantar Gebang dalam rangka Perayaan Natal Bersama tanggal 19 Desember 2016	25.000.000
	16 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapekris Perseroan berupa pemberian bantuan kepada Rumah Harapan Valencia dalam rangka Perayaan Natal Bersama tanggal 19 Desember 2016	25.000.000
	20 Desember 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi	250.000.000

Bidang Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
Kesehatan	7 April 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan khitanan massal bagi anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu yang dilaksanakan oleh Bhakti Parahyangan pada di Desa Kubang. Kec. Sukaresmi Cianjur Jawa Barat	19.164.000
	27 Juni 2016	Partisipasi Perseroan pada penyediaan kursi roda dan kaki palsu dalam rangka peresmian KCS Banda Aceh tanggal 20 Juni 2016	35.000.000
	28 Juni 2016	Pembelian obat-obatan dalam rangka pelaksanaan Safari Ramadhan Direksi ke Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 20 Juni 2016	508.000
	28 November 2016	Biaya peresmian Shelter Kuliner bagi PKL di Kota Solo tanggal 18 November 2016	46.993.000
	30 November 2016	Biaya pelaksanaan site visit atas lokasi pemohon CSR yang berada di Penajam. Tanah Grogot Kab Paser	4.313.800
Pelestarian Alam	22 April 2016	Partisipasi Perseroan pada rehabilitasi sumber mata air yang dilaksanakan oleh Ketua Kontak Tani Andalan dan Nelayan (KTNA) yang berlokasi di Desa Umbul Jogodayoh. Umbul Genengan. Kec. Kalikotes Solo	15.000.000
	17 Mei 2016	Partisipasi Perseroan pada kegiatan penghijauan lingkungan melalui penanaman bibit pohon trembesi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Perencanaan Daerah	10.000.000

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK DAN NASABAH

"PERSEROAN MENYADARI BAHWA FOKUS MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA NASABAH MERUPAKAN KUNCI BAGI SEBUAH HUBUNGAN NASABAH YANG KUAT. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK TANGGUNG JAWAB PERSEROAN UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK NASABAH DALAM BERINTERAKSI DENGAN PERSEROAN. LANGKAH TERSEBUT TIDAK HANYA SELARAS DENGAN BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERSEROAN, NAMUN JUGA PENTING UNTUK MENGEMBANGKAN BISNIS YANG BERKELANJUTAN."

A. KEBIJAKAN

Perseroan memahami bahwa nasabah merupakan *stakeholders* yang menjadi ujung tombak dunia perbankan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk selalu memberikan layanan terbaik melebihi harapan nasabah, menyediakan produk-produk yang sesuai kebutuhan serta memperkuat proses penanganan keluhan, mengutamakan perlindungan nasabah dengan menerapkan prinsip transparansi, kerahasiaan, dan keamanan data atau informasi nasabah. Dengan mewujudkan komitmen tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

Perseroan terus berkomitmen menciptakan keunggulan kompetitif dengan membangun kepercayaan nasabah melalui berbagai program yang dapat meningkatkan hubungan dengan nasabah. Fokus kegiatan Perseroan yaitu memberikan kepuasan kepada nasabah dengan meningkatkan layanan kepada nasabah antara lain dengan adanya perlindungan bagi nasabah, pengembangan pelayanan dan edukasi nasabah.

C. KEGIATAN CSR TERKAIT PRODUK DAN NASABAH TAHUN 2016 DAN DAMPAK KEGIATAN

Perwujudan tanggung jawab sosial terhadap nasabah adalah bagian penting dalam kegiatan bisnis Perseroan guna menjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Perseroan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah, dan terus berupaya untuk melindungi tak hanya asset keuangan milik nasabah, tetapi juga kerahasiaan data pribadi nasabah. Selain itu, sepanjang tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan berbagai program untuk menarik minat masyarakat, menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah, yang meliputi:

Program Peningkatan Loyalitas Nasabah

Program ini dimaksudkan agar harapan nasabah dapat terpenuhi sehingga mereka semakin loyal dan dapat mereferensikan Perseroan untuk menjadi salah satu Bank pilihan masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kepuasan nasabah diantaranya senantiasa mengembangkan inovasi produk dan meningkatkan kualitas layanan produk.

Akses Informasi Produk

Dalam rangka mempermudah pelayanan dan akses kepada nasabah, Perseroan telah membuat dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa Perseroan telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank,
2. Menyampaikan informasi tersebut kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan
3. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*)
4. Informasi mengenai karakteristik Produk Bank dimaksud meliputi:
   - Nama produk
   - Jenis produk
   - Manfaat dan risiko yang melekat pada produk
   - Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank
   - Biaya-biaya yang melekat pada produk
   - Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
   - Jangka waktu berlakunya produk
   - Penerbit (*issuer/originator*) produk Bank
5. Memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk yang terkait dengan produk Bank dan penghimpunan dana
6. Memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik produk Perseroan.
7. mencantumkan informasi mengenai karakteristik produk bank yang letak dan atau bentuknya terlihat dan atau terbaca secara jelas dan atau mudah dimengerti.
8. menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas dan mempublikasikannya melalui wesite Perseroan yaitu www.btn.co.id yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat luas.

Program Edukasi Nasabah

Salah satu tanggung jawab Perseroan sebagai pelaku industri perbankan adalah menjamin bahwa setiap nasabah dan masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat dan benar mengenai produk dan layanan jasa bank. Melalui program edukasi nasabah, para nasabah Perseroan diinformasikan sebaik mungkin mengenai produk dan layanan jasa bank, sehingga mereka dapat mengetahui dan mengakses produk dan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka.

C. KESELAMATAN DAN KESEHATAN NASABAH

Sebagai bank pembiayaan perumahaan, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjaga Keselamatan dan Kesehatan Nasabah. Salah satu upaya Perseroan dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Nasabah yaitu melalui pembiayaan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan sesuai standar minimal sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). Perseroan bekerja sama dengan pengembang dan kontraktor dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Dalam menjalin kerja sama, Perseroan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, dan *fairness* sehinggaKeselamatan dan Kesehatan Nasabah dapat terjaga. Selain itu, Perseroan juga menjamin keselamatan nasabah dengan menjaga kerahasiaan/privasi data nasabah.

Kerahasiaan Data Nasabah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan nasabah yang mengacu pada ketentuan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Terkait kebijakan kerahasiaan Nasabah.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan keamanan informasi guna menjamin kelancaran bisnis dan menciptakan aktivitas operasional dengan lebih baik, aman, lancar dan *auditabe* serta menjaga citra bank sebagai bank terpercaya, Perusahaan juga telah memiliki kebijakan khusus berupa Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/ICTD/2016 perihal Pedoman Keamanan Informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam kebijakan ini menetapkan prasyarat untuk memastikan bahwa semua informasi rahasia dan sensitif dilindungi dari virus komputer sehingga dapat meminimalkan dan kerusakan akibat infiltrasi virus komputer. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan untuk menjaga data nasabah diantaranya yaitu menginstalasi semua *software* yang telah disetujui dan memperbaharuinya secara berkala, memberikan pelatihan keamanan TI kepada user yang menggunakan sumber daya TI, menerapkan manajemen /standarisasi *password* untuk menjamin akses terhadap informasi yang dilindungi.

Mekanisme Pengaduan Nasabah

Mengacu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah, Perseroan melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan nasabah melalui pusat pengaduan nasabah. Perseroan memegang teguh prinsip transparansi dalam upaya menjaga hubungan baik, umpan balik, dan masukan dari para *stakeholder* sangat diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan telah mengembangkan Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) yang dapat memantau penyelesaian pengaduan secara menyeluruh.

SPN merupakan sistem berbasis *web* yang dapat memudahkan pemantauan terhadap status penyelesaian pengaduan sekaligus memberikan kepastian bagi para nasabah tentang jangka waktu yang dibutuhkan Perseroan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Dengan menggunakan sistem yang *online* dan terpadu, para nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan dan mengecek status pengaduan di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Selain itu dengan adanya SPN *online* dan berbasis *web* serta terpadu tersebut, mekanisme penanganan keluhan menjadi lebih terstruktur dan dapat dimonitor dengan baik.

Berikut tahapan penanganan keluhan nasabah dari masuknya keluhan hingga tahap evaluasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Mekanisme Pelayanan Pengaduan Nasabah

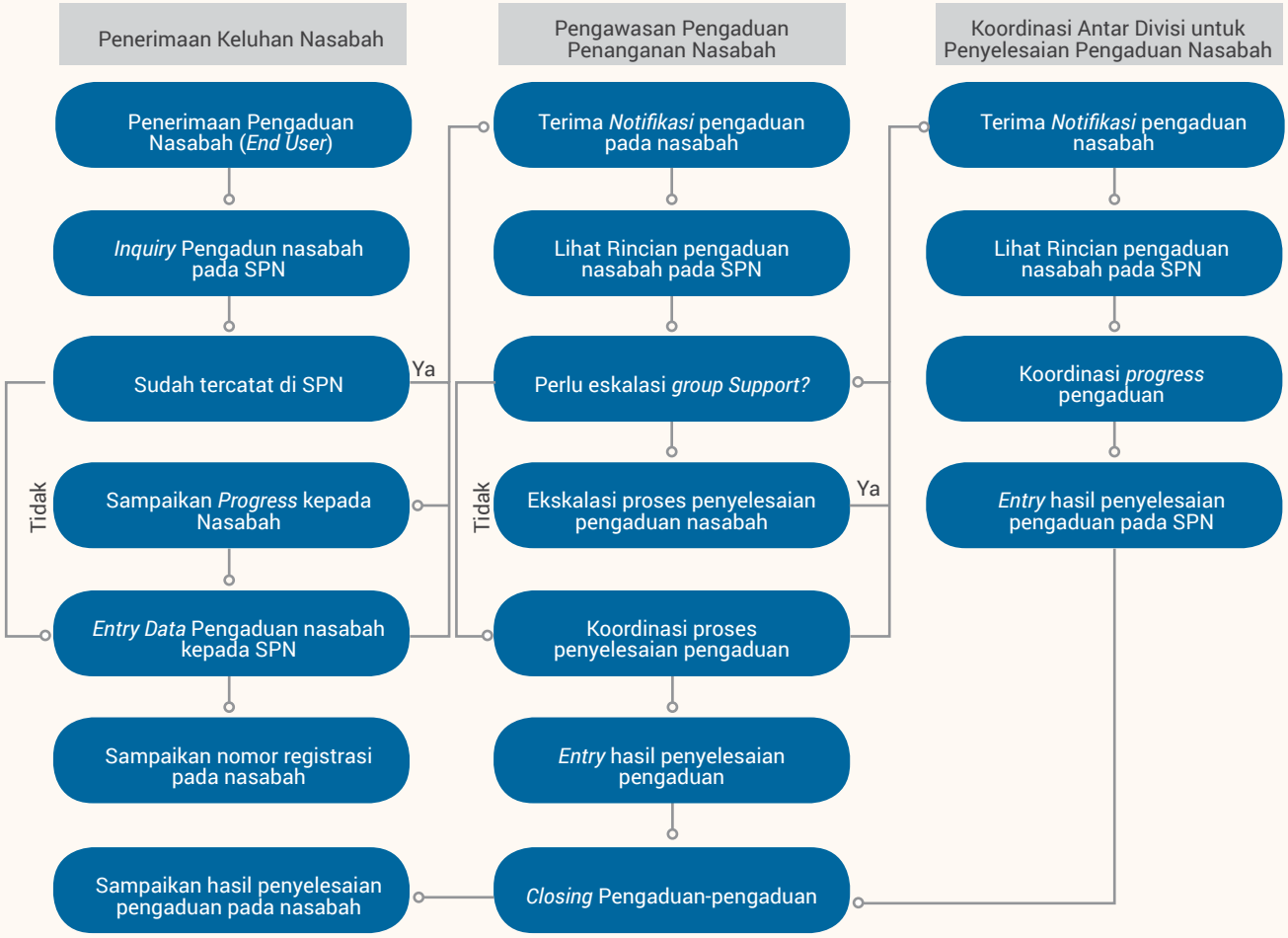

Pusat pengaduan nasabah dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain:

Kantor Pusat
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp: (021) 6336789
Fax: (021) 6336719
Contact Center dengan nomor 1500 286
Email *Contact Center*: btncontactcenter@btn.co.id

Selama tahun 2016, Perseroan mendapatkan aduan/keluhan dari nasabah sebanyak 40.795 keluhan terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, sistem pembayaran, dan produk lainnya. Dari sejumlah pengaduan tersebut telah diselesaikan sebanyak 36.858 keluhan atau 90,35%. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perseroan terhadap keluhan tersebut antara lain:

1. Melakukan verifikasi secara mendalam dengan berkoordinasi bersama kantor cabang, divisi dan pihak lain terkait seperti: *provider* jaringan, *developer*, notaris, dan lainnya
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah terkait proses penyelesaian pengaduan
3. Melakukan *monitoring* atas pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*) penyelesaian pengaduan
4. Melakukan perbaikan pada sistem prosedur dan peningakatan pemahaman pegawai serta memberikan informasi kepada nasabah agar permasalahan yang masuk dalam bentuk keluhan nasabah agar permasalahan yang masuk dalam bentuk keluhan nasabah tidak terulang.

Melalui pusat pengaduan yang disediakan, Perseroan telah memberikan respon yang cepat atas keluhan yang masuk dan menyelesaikan keluhan tersebut dengan baik.

D. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Pelayanan yang baik kepada nasabah telah mengantarkan Perseroan menerima berbagai penghargaan dan sertifikasi. Selama tahun 2016, Perseroan menerima penghargaan sebagai berikut:

Tabel Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2016

No	Jenis Penghargaan/Serifikasi	Penyelenggara
1	Peringkat 6 *Bank Service Excellence Monitoring* 2016	Marketing Research Indonesia
2	*The Best Champion of Bandung WOW Service Excellence Award* Tahun 2016 *Category*: *Conventional* Bank (BUKU III) Kantor Cabang Bandung	MarkPlus
3	*The Best Champion of Medan Service Excellence Award* Tahun 2016 *Category: Conventional* Bank (BUKU III) Kantor Cabang Medan	MarkPlus
4	Bronze Medal in *The Best Contact Centre Operation*	ICCA
5	Bronze Medal in *The Best Business Contribution*	ICCA
6	Silver Medal in *The Reguler Agent Category*	ICCA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
as of December 31, 2016
and for the year then ended
with independent auditors' report

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : *We, the undersigned :*

Nama	**Maryono**	*Name*
Alamat Kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office Address*
Alamat Domisili	Jl. Kartika Pinang SG 2-3 RT 014 RW 016 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	*Residential Address*
Nomor Telepon	021-6346764	*Telephone*
Jabatan	Direktur Utama / *President Director*	*Title*
Nama	**Iman Nugroho Soeko**	*Name*
Alamat Kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office Address*
Alamat Domisili	Jl. Brawijaya IV/1 RT 002 RW 002 Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	*Residential Address*
Nomor Telepon	021-6346762	*Telephone*
Jabatan	Direktur / *Director*	*Title*

Menyatakan bahwa : *Declare that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk;*
2. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;*
4. *We are responsible for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya *This is our declaration, which has been made truthfully.*

Jakarta, 10 Februari 2017 / February 10, 2017
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of Board of Directors*

METERAI TEMPEL 6000

Maryono
Direktur Utama/*President Director*

Iman Nugroho Soeko
Direktur/*Director*

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

Halaman/*Page*

Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 5	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	6 - 7	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	8 - 9	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	10 - 12	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	13 - 208	*Notes to the Financial Statements*

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-2935/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-2935/PSS/2017

The Stockholders, the Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2935/PSS/2017 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report: RPC-2935/PSS/2017 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as of December 31, 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/*Public Accountant Registration No. AP.1008*

10 Februari 2017/*February 10, 2017*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2015	
ASET				***ASSETS***
KAS	1.006.682	2a,2d,4	1.181.219	***CASH***
GIRO PADA BANK INDONESIA	10.697.378	2a,2d,2f,5	10.986.351	***CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2c,2d		***CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga	305.830	2e,2f,6,41	163.015	*Third parties*
Pihak berelasi	16.958		39.918	*Related parties*
	322.788		202.933	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.482)		(1.572)	*Allowance for impairment losses*
	321.306		201.361	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2c,2d 2e,2g,7,41		***PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS***
Pihak ketiga	17.581.082		7.679.477	*Third parties*
Pihak berelasi	268		160.000	*Related parties*
	17.581.350		7.839.477	
EFEK-EFEK		2a,2c,2d, 2e,2h,8,41		***SECURITIES***
Pihak ketiga				*Third parties*
Nilai wajar melalui laba rugi	548.521		-	*Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual	2.371.633		1.420.835	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	267.175		297.503	*Held-to-maturity*
	3.187.329		1.718.338	
Pihak berelasi				*Related parties*
Tersedia untuk dijual	967.810		40.217	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	31.002		61.007	*Held-to-maturity*
	998.812		101.224	
	4.186.141		1.819.562	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.441)		(12.001)	*Allowance for impairment losses*
	4.171.700		1.807.561	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2015	
OBLIGASI PEMERINTAH		2c,2d,2e		***GOVERNMENT BONDS***
Nilai wajar melalui laba rugi	1.130.579	2h,9,41	19.267	*Fair value through profit -or-loss*
Tersedia untuk dijual	5.076.450		5.111.280	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.036.610		3.100.361	*Held-to-maturity*
	9.243.639		8.230.908	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2c,2d,2e,2i, 2j,10,41		***LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES***
Kredit yang diberikan				*Loans*
Pihak ketiga	148.100.848		126.329.080	*Third parties*
Pihak berelasi	2.121.112		1.403.078	*Related parties*
	150.221.960		127.732.158	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.724.935)		(1.725.724)	*Allowance for impairment losses*
	148.497.025		126.006.434	
Pembiayaan/piutang syariah				*Sharia financing/receivables*
Pihak ketiga	14.224.095		11.222.909	*Third parties*
Pihak berelasi	326		737	*Related parties*
	14.224.421		11.223.646	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(391.099)		(324.854)	*Allowance for impairment losses*
	13.833.322		10.898.792	
	162.330.347		136.905.226	
ASET TETAP		2k, 2l,11,32		***PREMISES AND EQUIPMENT***
Biaya perolehan/Nilai wajar	6.557.332		3.237.287	*Cost/Fair value*
Akumulasi penyusutan	(1.897.953)		(1.683.886)	*Accumulated depreciation*
	4.659.379		1.553.401	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	1.864.829	12	1.548.489	***INTEREST RECEIVABLE***
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	102.791	2ab,36	-	***DEFERRED TAX ASSETS - Net***
ASET LAIN-LAIN	2.189.078	2l,2m,2ai,13	1.553.599	***OTHER ASSETS***
TOTAL ASET	**214.168.479**		**171.807.592**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	2.081.886	2d,2n,14	1.960.789	***LIABILITIES DUE IMMEDIATELY***
SIMPANAN DARI NASABAH		2c,2d,2o,41		***DEPOSITS FROM CUSTOMERS***
Giro		15		*Demand deposits*
Pihak ketiga	8.335.736		6.876.412	*Third parties*
Pihak berelasi	34.307.944		22.275.748	*Related parties*
	42.643.680		29.152.160	
Giro *Wadiah*		15		*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga	1.577.075		900.382	*Third parties*
Pihak berelasi	1.625.300		1.315.901	*Related parties*
	3.202.375		2.216.283	
	45.846.055		31.368.443	
Tabungan		16		*Savings deposits*
Pihak ketiga	32.388.545		29.354.799	*Third parties*
Pihak berelasi	388.290		47.935	*Related parties*
	32.776.835		29.402.734	
Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*		16		*Wadiah and Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga	2.046.975		1.351.009	*Third parties*
Pihak berelasi	2.398		3.938	*Related parties*
	2.049.373		1.354.947	
	34.826.208		30.757.681	
Deposito berjangka		17		*Time deposits*
Pihak ketiga	26.310.843		24.192.631	*Third parties*
Pihak berelasi	43.226.110		33.856.609	*Related parties*
	69.536.953		58.049.240	
Deposito berjangka *Mudharabah*		17		*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	5.637.175		3.488.339	*Third parties*
Pihak berelasi	4.141.326		4.044.967	*Related parties*
	9.778.501		7.533.306	
	79.315.454		65.582.546	
Total simpanan dari nasabah	159.987.717		127.708.670	*Total deposits from customers*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ ***December 31,* 2016**	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember/** ***December 31,* 2015**	
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2c,2d,2p,		***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Pihak ketiga	3.152.735	18,41	1.569.714	*Third parties*
Pihak berelasi	500.000		151.484	*Related parties*
	3.652.735		1.721.198	
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI		2c,2d,2q, 9,19,41		***SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS***
Pihak ketiga	1.385.000		2.135.091	*Third parties*
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	14.919.910	1c,2d,2r, 20	12.492.202	***SECURITIES ISSUED***
PINJAMAN YANG DITERIMA		2c,2d,2s,		***FUND BORROWINGS***
Pihak ketiga	2.999.695	21,41	1.998.175	*Third parties*
Pihak berelasi	1.999.921		5.728.553	*Related parties*
	4.999.616		7.726.728	
PINJAMAN SUBORDINASI		2c,2d,2t		***SUBORDINATED LOAN***
Pihak berelasi	2.999.118	22,41	-	*Related parties*
	2.999.118		-	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	382.551	23	357.364	***INTEREST PAYABLE***
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - Neto	-	2ab,36	9.566	***DEFERRED TAX LIABILITIES*** - *Net*
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	4.629.410	2z,25	3.835.877	***EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**195.037.943**		**157.947.485**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 31 Desember 2016 and 2015				*Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of Desember 31, 2016 and 2015, respectively*
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015				*Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of Desember 31, 2016 and December 31, 2015 respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 10.582.345.000 Saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.582.344.999 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2015	5.295.000	2u,26a	5.291.173	*Issued and fully paid capital 10,590,000,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,589,999,999 shares of series B) as of December 31, 2016 and 10,582,345,000 shares (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,582,344,999 shares of series B) as of December 31, 2015*
Tambahan modal disetor	2.054.454	26b	2.046.598	*Additonal paid-in capital*
Opsi Saham	-	27	2.690	*Stock Options*
Kerugian neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(115.567)	2h,8,9	(133.690)	*Net unrealized loss on available-for-sale securities and Government bonds, net of deferred tax*
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti – setelah pajak tangguhan	(78.546)	2z	(106.144)	*Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax*
Surplus Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2k,11	-	*Revaluation Surplus of Fixed Assets*
Saldo laba*)				*Retained Earnings*)
Telah ditentukan penggunaannya	6.232.559		4.751.833	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2.775.645	2b,2v	2.007.647	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**19.130.536**		**13.860.107**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**214.168.479**		**171.807.592**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31,2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				*Interest Income and Income from Profit Sharing*
Bunga	16.501.472	2w,28	14.455.136	*Interest*
Bagi hasil secara syariah	637.347	2y	511.073	*Income from sharia*
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	17.138.819		14.966.209	*Total Interest Income and Income from Profit Sharing*
Beban Bunga dan Bonus				*Interest and Bonus Expenses*
Bunga	(8.870.675)	2w,29	(8.073.584)	*Interest*
Beban pendanaan lainnya	(90.952)		(70.383)	*Other financing expenses*
Bonus	(13.647)	2y	(11.166)	*Bonus*
Total Beban Bunga dan Bonus	(8.975.274)		(8.155.133)	*Total Interest and Bonus Expenses*
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	8.163.545		6.811.076	*Interest Income and Income from Profit Sharing - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya				*Other Operating Income*
Pungutan administrasi dan Denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	591.244		533.688	*Administration fees and penalties on deposits and loans*
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	178.427		210.996	*Income from recovery of loans written-off*
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	218.091	2h,8	147.558	*Gain on sale of securities - net*
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	54.430	2h,9	19.495	*Gain on sale of government bonds - net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	6.443	2h,8	-	*Unrealized gain on changes in fair value of securities - net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	3.507	2h,9	-	*Unrealized gain on changes in fair value of Government Bonds - net*
Lain-lain	230.680	30	194.789	*Others*
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1.282.822		1.106.526	*Total Other Operating Income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(707.531)	2e,2l,31	(901.008)	*Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets*
Pembalikan (beban) estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	2l,2ag,24	7.198	*Reversal of impairment losses on commitments and contingencies*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Beban Operasional Lainnya				*Other Operating Expenses*
Umum dan administrasi	(2.465.706)	32	(2.151.266)	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan karyawan	(2.121.653)	2z,33,38	(1.929.346)	*Salaries and employee benefits*
Premi program penjaminan Pemerintah	(285.344)	40	(229.549)	*Premium on Government's guarantee program*
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	2h,9	(193)	*Unrealized loss on changes in fair value of Government Bonds- net*
Lain-lain	(513.901)	34	(179.833)	*Others*
Total Beban Operasional Lainnya	(5.386.604)		(4.490.187)	*Total Other Operating Expenses*
LABA OPERASIONAL	**3.352.232**		**2.533.605**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	(22.148)	35	8.281	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.330.084		2.541.886	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK	(711.179)	2ab,36	(690.979)	***TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**2.618.905**		**1.850.907**	***INCOME FOR THE YEAR***
Pendapatan Komprehensif Lain:				***Other Comprehensive Income***
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Revaluasi aset tetap	3.042.739	2k, 11	-	*Revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	36.797	2z, 38	5.476	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(84.947)		(1.369)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that may be reclassified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	24.164	2h,8,9	(58.236)	*Unrealized net gain (loss) on changes in value of available-for-sale securities and government bonds -*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(6.041)		14.559	*Income tax related to items that may be reclassified to profit or loss*
Total laba komprehensif tahun berjalan – setelah pajak	**5.631.617**		**1.811.337**	***Total Comprehensive Income for the year – net of tax***
LABA PER SAHAM				***EARNINGS PER SHARE***
Dasar (nilai penuh)	247	2ad,27,46	175	*Basic (full amount)*
Dilusian (nilai penuh)	247		175	*Diluted (full amount)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Opsi Saham/ *Stock Option*	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - Neto/ *Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds – Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Fixed Assets*	Saldo Laba/*Retained Earnings* *)		Ekuitas Neto/ *Net Equity*	
								Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2014		**5.283.848**	**2.028.136**	**9.483**	**(90.013)**	**(110.251)**	**-**	**3.859.360**	**1.267.538**	**12.248.101**	***Balance as of December 31, 2014***
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK 102 (Revisi 2013)		-	-	-	-	-	-	-	4.794	4.794	*Impact of adjustment on the implementation of PSAK 102 (Revised 2013)*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015 setelah penyesuaian		**5.283.848**	**2.028.136**	**9.483**	**(90.013)**	**(110.251)**	**-**	**3.859.360**	**1.272.332**	**12.252.895**	***Balance as of January 1, 2015 after adjustment***
Total laba komprehensif tahun berjalan	2h,8,9	-	-	-	(43.677)	4.107	-	-	1.850.907	1.811.337	*Total comprehensive income for the year*
Pembagian laba	26c										*Distribution of income*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(223.119)	(223.119)	*Dividends*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	-	-	-	892.473	(892.473)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Eksekusi opsi saham	26a,26b,27	7.325	18.462	(6.793)	-	-	-	-	-	18.994	*Stock options exercised*
Saldo per 31 Desember 2015		**5.291.173**	**2.046.598**	**2.690**	**(133.690)**	**(106.144)**	**-**	**4.751.833**	**2.007.647**	**13.860.107**	***Balance as of December 31, 2015***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Opsi Saham/ *Stock Option*	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - Neto/ *Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds – Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Fixed Assets*	Saldo Laba/*Retained Earnings* *)		Ekuitas Neto/ *Net Equity*	
								Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2015		**5.291.173**	**2.046.598**	**2.690**	**(133.690)**	**(106.144)**	**-**	**4.751.833**	**2.007.647**	**13.860.107**	***Balance as of December 31, 2015***
Total laba komprehensif tahun berjalan	2h,8,9	-	-	-	18.123	27.598	2.966.991	-	2.618.905	5.631.617	*Total comprehensive income for the year*
Pembagian laba	26c										*Distribution of income*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(370.181)	(370.181)	*Dividends*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	-	-	-	1.480.726	(1.480.726)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Eksekusi opsi saham	26a,26b,27	3.827	7.856	(2.690)	-	-	-	-	-	8.993	*Stock options exercised*
Saldo per 31 Desember 2016		**5.295.000**	**2.054.454**	**-**	**(115.567)**	**(78.546)**	**2.966.991**	**6.232.559**	**2.775.645**	**19.130.536**	***Balance as of December 31, 2016***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga dan bagi hasil	16.822.384		14.603.342	*Interest and profit sharing*
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	197.916		227.272	*Recoveries from loan debts written-off*
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(8.950.086)		(8.119.236)	*Interest and bonus, fees and commissions paid*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(938.172)		(647.413)	*Corporate income tax paid*
Beban operasional lainnya - neto	(4.051.884)		(3.448.993)	*Other operating expenses - net*
Pendapatan bukan operasional lainnya - neto	(22.148)		8.281	*Other non-operating Income (expense) - net*
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	3.058.010		2.623.253	*Cash receipts before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(542.078)		-	*Fair value through profit or loss securities*
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	(1.107.805)		572.465	*Fair value through profit or loss government bonds*
Pembiayaan/piutang syariah	(3.063.288)		(1.657.894)	*Sharia/financing receivables*
Kredit yang diberikan	(23.086.511)		(21.816.707)	*Loans*
Aset lain-lain	(414.285)		(349.149)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	224.818		(21.579)	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customer*
Giro	13.491.520		7.150.960	*Demand deposits*
Giro *Wadiah*	986.092		794.865	*Wadiah demand deposits*
Tabungan	3.374.101		4.171.998	*Savings deposits*
Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*	694.426		417.769	*Wadiah and Mudharabah savings deposits*
Deposito berjangka	11.487.713		7.557.956	*Time deposits*
Deposito berjangka *Mudharabah*	2.245.195		1.144.445	*Mudharabah time deposits*
Simpanan dari bank lain	1.931.537		541.929	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain	504.480		577.268	*Other liabilities*
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**9.783.925**		**1.707.579**	***Net Cash Provided by Operating Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan (saat jatuh tempo) dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	80.326		92.019	*Proceeds (at maturity) from held-to-maturity securities*
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	(20.000)		(6.003)	*Purchase of held-to-maturity securities*
Pembelian aset tetap	(285.604)	11	(262.524)	*Acquisitions of premises and equipment*
Penurunan (pendapatan) efek-efek tersedia untuk dijual	(1.880.992)		3.399.053	*Decrease (income) available -for-sale securities*
Penurunan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual	61.595		873.070	*Decrease in available for-sale government bonds*
Penerimaan dari obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	135.785		-	*Proceeds from maturity of held-to-maturity of government bonds*
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	(65.252)		(1.451.880)	*Purchase of held-to-maturity government bonds*
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(1.974.142)**		**2.643.735**	***Net Cash provided by (used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	3.430.667		3.990.008	*Proceeds from issuance of securities*
Pembayaran biaya emisi dari surat-surat berharga yang diterbitkan	(2.959)		(5.218)	*Payment of issuance cost from securities issued*
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(1.000.000)		-	*Payment of matured securities issued*
Penerimaan dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-		2.772.233	*Proceeds from securities sold under repurchase agreements*
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(750.091)		(4.454.745)	*Payments of matured securities sold under repurchase agreements*
Eksekusi opsi saham karyawan	8.993		18.994	*Employee stock option exercise*
Pembayaran dividen	(370.181)	26c	(223.119)	*Payments of dividends*
(Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima	(2.727.112)		728.515	*(Payment of) proceeds from fund borrowings*
Penerimaan pinjaman subordinasi	2.999.118		-	*Proceeds from subordinated loans*
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**1.588.435**		**2.826.668**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**9.398.218**		**7.177.982**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**20.209.980**		**13.031.998**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**29.608.198**		**20.209.980**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				*The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:*
Kas	1.006.682	2a,4	1.181.219	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	2f,5	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	322.788	2f,6	202.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	17.581.350	2g,7	7.839.477	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total	**29.608.198**		**20.209.980**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH 01.02. tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H. and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam akta notaris No. 11 tanggal 8 Desember 2015 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03-0986454 tanggal 8 Desember 2015.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank memiliki 88 kantor cabang (termasuk 23 kantor cabang syariah), 279 kantor cabang pembantu (termasuk 36 kantor cabang pembantu syariah), 483 kantor kas (termasuk 6 Kantor Kas Syariah), dan 2.951 SOPP (*System on-line Payment Point*/Kantor Pos *on-line*) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 244 kantor cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 486 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.951 SOPP (*System on-line Payment Point*/Kantor Pos *on-line*) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The last amendment was documented under notarial deed No. 11 dated December 8, 2015 of Notary Fathiah Helmi, S.H. regarding Board of Directors and Commissioners. This amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No.AHU-AH.01.03-0986454 dated December 8, 2015.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2016, the Bank has 88 branch offices (including 23 sharia branch offices), 279 sub-branch offices (including 36 sharia sub-branch offices), 483 cash offices (including 6 sharia cash offices), and 2,951 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2015, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 244 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch offices), 486 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,951 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with apar value (full Rupiah) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 21 (twenty-one) series of bonds and 1 series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2016, with the details as follows:

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Obligasi BTN I/ *BTN Bonds I*	50.000	5 tahun/*years*	25 Juli/ *July 25, 1994*)*	18,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN II/ *BTN Bonds II*	50.000	5 tahun/*years*	1 Juni/ *June 1,1995*)*	16,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN III/ *BTN Bonds III*	50.000	5 tahun/*years*	11 November/ *November 11, 1996*)*	20,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IV/ *BTN Bonds IV*	100.000	5 tahun/*years*	23 Januari,/ *January 23, 1996*)*	17,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN V/ *BTN Bonds V*	150.000	5 tahun/*years*	31 Juli/ *July 31,1998*)*	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VI/ *BTN Bonds VI*	350.000	5 tahun/*years*	21 Desember/ *December 21, 2000*)*	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VII/ *BTN Bonds VII*	200.000	5 tahun/*years*	22 Juli/ *July 22, 2001*)*	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VIII/ *BTN Bonds VIII*	400.000	5 tahun/*years*	18 Juli/ *July 18, 2002*)*	14,15% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IX/ *BTN Bonds IX*	750.000	5 tahun/*years*	2 Oktober/ *October 2, 2008*)*	12,50% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN X/ *BTN Bonds X*	750.000	5 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2009*)*	12,20% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XI/ *BTN Bonds XI*	750.000	5 tahun/*years*	6 Juli/ *July 6, 2010*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XII/ *BTN Bonds XII*	1.000.000	10 tahun/*years*	19 September/ *September 19, 2016*)*	12,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII A/ *BTN Bonds XIII A*	300.000	3 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2012*)*	11,75% tetap/ *fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 21 (twenty-one) series of bonds and 1 series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to Desember 31, 2016, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Obligasi BTN XIII B/ *BTN Bonds XIII B*	300.000	4 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2013*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII C/ *BTN Bonds XIII C*	900.000	5 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2014*)*	12,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIV/ *BTN Bonds XIV*	1.650.000	10 tahun/*years*	11 Juni/ *June 11, 2020*	10,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XV/ *BTN Bonds XV*	1.300.000	10 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2021*	9,50% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ *Shelf Registration Bonds I Phase I BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	5 Juni/ *June 5, 2022*	7,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ *Shelf Registration Bonds I Phase II BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	27 Maret/ *March 27, 2023*	7,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ *Shelf Registration Bonds II Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	900.000	3 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2018*	9,63% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	500.000	5 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2020*	9,88% tetap/ *fixed*
Seri C/*C Series*	800.000	7 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2022*	10,00% tetap/ *fixed*
Seri D/*D Series*	800.000	10 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2025*	10,50% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ *Shelf Registration Bonds II Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	1.347.000	3 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2019*	8,20% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.653.000	5 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2021*	8,75% tetap/ *fixed*
Obligasi Subordinasi BTN I/ *Subordinated Bonds BTN I*	250.000	10 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2014**)*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ *12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.
**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*
**) *The Bank has exercised the call options on May 25, 2009*

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/ DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman letter No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) (lanjutan)

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti sdolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 12 April 2016, dengan berita acara No. 41 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016		***December 31, 2016***
Komisaris Utama/Independen	I Wayan Agus Mertayasa	*President/Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Kamaruddin Sjam	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Arie Coerniadi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Lucky Fathul Aziz H.*	*Independent Commissioner*
Komisaris	Sumiyati	*Commissioner*
Komisaris	Maurin Sitorus	*Commissioner*
Komisaris	Iman Sugema**	*Commissioner*

* Dialihkan menjadi Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan berita acara No. 1 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahunan Bank tanggal 2 September 2015 yang berita acaranya dibuat oleh Dina Chozie, S.H., C.N., No. 1, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015		***December 31, 2015***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah*	*President/Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Kamaruddin Sjam	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Arie Coerniadi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Catherinawati Hadiman	*Independent Commissioner*
Komisaris	Sumiyati**	*Commissioner*
Komisaris	Fajar Harry Sampurno***	*Commissioner*
Komisaris	Lucky Fathul Aziz H.	*Commissioner*

* Mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui surat yang disampaikan kepada Menteri BUMN tanggal 9 Oktober 2015.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan berita acara No. 1 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 2 September 2015 dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Februari 2016.

*** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 12 April 2016 sebagaimana tercantum berita acara No. 41 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.,

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on April 12, 2016, as stated under the notarial No. 41 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

* *Become the Independent Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, previously as the Commissioner, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholder stated under the notarial No. 1 by notary Fathiah Helmi, S.H., dated January 7, 2016 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.*

** *Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated April 12, 2016 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test and in compliance with the prevailing laws and regulations.*

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on September 2, 2015, as recorded under the notarial No. 1 signed by Dina Chozie, S.H., C.N., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

* *Resignation of president and independent commissioner was based on the letter to the ministry of state owned companies (BUMN) on October 9, 2015.*

** *Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting stated under the notarial No. 1 by notary Fathiah Helmi, S.H., dated September 2, 2015 and effective since February 22, 2016.*

*** *Honorably discharged at the annual general meeting of shareholder dated April 12, 2016, as stated under the notarial act No. 41 by notary Fathiah Helmi, S.H.,*

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 12 April 2016, dengan berita acara No. 50 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on April 12, 2016, as stated under the notarial No. 50 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

31 Desember 2016		***December 31, 2016***
Direktur Utama	Maryono	*President Director*
Direktur	Mansyur Syamsuri Nasution	*Director*
Direktur	Iman Nugroho Soeko	*Director*
Direktur	Adi Setianto	*Director*
Direktur	Sulis Usdoko	*Director*
Direktur	Oni Febriarto Rahardjo	*Director*
Direktur	Handayani	*Director*
Direktur	Catur Budi Harto	*Director*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Bank tanggal 24 Maret 2015, dengan berita acara No. 50 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on March 24, 2015, as stated under the notarial No. 50 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

31 Desember 2015		***December 31, 2015***
Direktur Utama	Maryono	*President Director*
Direktur	Irman Alvian Zahiruddin	*Director*
Direktur	Mansyur Syamsuri Nasution	*Director*
Direktur	Iman Nugroho Soeko	*Director*
Direktur	Adi Setianto	*Director*
Direktur	Sis Apik Wijayanto	*Director*
Direktur	Sulis Usdoko	*Director*
Direktur	Oni Febriarto Rahardjo	*Director*

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp20.785 dan Rp16.292 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 41b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp52.767 dan Rp37.216 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 41b).

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp20,785 and Rp16,292 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively (Note 41b). Salaries and other compensation benefits paid to Directors of the Bank amounted to Rp52,767 and Rp37,216 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively (Note 41b).

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 12 April 2016 dan 24 Maret 2015, Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp35.215 dan Rp23.449 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun berjalan yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan 10 Juni 2015.

During the Bank's Stockholders' General Meetings held on April 12, 2016 and March 24, 2015, the Bank distributed tantiem to the Directors and Commissioners amounting to Rp35,215 and Rp23,449, respectively, which were allocated from current year income and paid on June 29, 2016 and June10, 2015, respectively.

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember 2016		
Sekretaris Perusahaan	Eko Waluyo	
Kepala Divisi Audit Internal	Adi Suharto Atmadja*	

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 235/DIR/2016 tanggal 7 Juni 2016 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 01 April 2016.

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015		
Sekretaris Perusahaan	Eko Waluyo	
Kepala Divisi Audit Internal	Dadang Eka Jatnika	

Susunan Dewan Pengawas *Syariah* Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.379/DIR/2015 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016 dan 2015		
Ketua	Ahmad Nazri Adlani	
Anggota	Mohamad Hidayat	
Anggota	Muhammad Syakir Sula	

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.38/DIR/2016 tanggal 22 Januari 2016 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No.8/KOM/BTN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016		
Ketua	Kamaruddin Sjam***	
Anggota	I Wayan Agus Mertayasa****	
Anggota	Sumiyati****	
Anggota	Maurin Sitorus*	
Anggota	Waldy Gutama	
Anggota	Sondang Gayatri	
Anggota	Rachmat Supratman**	

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 474/DIR/ 2016 tanggal 1 November 2016 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 1 November 2016.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 474/DIR/ 2016 tangal 1 November 2016 dan efektif sebagai anggota Komite Audit Bank tanggal 8 November 2016.

*** Diangkat sebagai Ketua Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 9 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 161/DIR/2016 tanggal 25 April 2016

**** Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 161/DIR/2016 tanggal 25 April 2016

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows: (continued)

December 31, 2016		
Corporate Secretary	Eko Waluyo	
Head of Internal Audit Division	Adi Suharto Atmadja*	

* *Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.235/DIR/2016 dated June 7, 2016 and Head of Internal Audit Division since April 01, 2016.*

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2015		
Corporate Secretary	Eko Waluyo	
Head of Internal Audit Division	Dadang Eka Jatnika	

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.379/DIR/2015 are as follows:

December 31, 2016 and 2015		
Chairman	Ahmad Nazri Adlani	
Member	Mohamad Hidayat	
Member	Muhammad Syakir Sula	

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2016, based on the Board of Directors' Decision Letter No.38/DIR/2016 dated January 22, 2016 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No.8/KOM/BTN/I/ 2016 dated January 20, 2016) are as follows:

December 31, 2016		
Chairman	Kamaruddin Sjam***	
Member	I Wayan Agus Mertayasa****	
Member	Sumiyati****	
Member	Maurin Sitorus*	
Member	Waldy Gutama	
Member	Sondang Gayatri	
Member	Rachmat Supratman**	

* *Appointed as a member of the Bank's Audit Comitte PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No.474/DIR/2016 dated November 1, 2016 and effective since November 1, 2016.*

** *Appointed as a member of the Bank's Audit Comitte PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Director's Decision Letter No.474/DIR/2016 dated November 1, 2016 and effective since November 8, 2016*

*** *Appointed as the Chairman of Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk effective since September 9th, 2016 based on the Board of Director's Decision Letter No. 161/DIR/2016 dated April 25, 2016*

**** *Appointed as the member of Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk effective since April 25, 2016 based on the Board of Director's Decision Letter No. 161/DIR/2016 dated April 25, 2016*

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 507/DIR/2015, tanggal 4 September 2015 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No.85/KOM/BTN/XI/2015 tanggal 2 September 2015) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015		
Ketua	Kamaruddin Sjam	
Anggota	Chatherinawati Hadiman*	
Anggota	Sondang Gayatri	
Anggota	Waldy Gutama	
Anggota	Deddy Effendi Ridwan**	

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana tercantum berita acara No. 1 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.
** Mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan ditetapkan dalam Surat Dewan Komisaris No.106/KOM/BTN/IX/2016 tanggal 29 September 2016.

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 8.561 dan 8.186 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2015, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 507/DIR/2015 dated September 4, 2015 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 85/KOM/BTN/XI/2015 dated September 2, 2015) are as follows:

December 31, 2015		
Chairman	Kamaruddin Sjam	
Member	Chatherinawati Hadiman*	
Member	Sondang Gayatri	
Member	Waldy Gutama	
Member	Deddy Effendi Ridwan**	

* *Honorably discharged at the extraordinary general meeting of shareholder dated January 7, 2016, as stated under the notarial act No. 1 by notary Fathiah Helmi, SH.*
** *Resignation as a member the Bank's Audit Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and approved by Letter of Board of Commissioners No.106/KOM/BTN/IX/2016 date September 29, 2016.*

Based on Bank's internal regulation, scope of the Bank's key management consist of board of commissioners, audit committee, board of directors, regional office head, division head, and branch manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2016 and 2015 of 8,561 and 8,186 employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the years ended December 31, 2016 and 2015 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan Bank cabang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The financial statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia branches have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2013) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 on "Accounting for Musyarakah" and SFAS 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No.110 on "Accounting for Sukuk" and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) issued by Bank Indonesia andIndonesian Institute of Accountants(IAI).

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from istishna and the profit sharing from the mudharabah and musyarakah financing and the statement of cash flow. The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The presentations currency used in the financial statement is the Indonesian Rupiah, which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasikan menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

a) suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;

d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

a) a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (ii) has significant influence over the Bank or (iii) has joint control over the Bank;

b) an entity which is a member of the same group as the Bank;

c) an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;

d) a member of key management personnel of the Bank;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika (lanjutan):

e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);

f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);

g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 41 tersebut.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan penyajian dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

The Bank considers the following as its related parties (continued):

e) a close family member of the person described in clause (a) or (d);

f) an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e);

g) an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 regarding "The affiliate transactions and conflict of interest of certain transactions", at the time the transaction were made. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 41 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 41.

d. Financial assets and liabilities

Effective since January 1, 2015, the Bank's implemented SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". The Implementation of this SFAS does not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation". The Implementation of this SFAS does not cause signficant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar.

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". The implementation of this SFAS does not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Effective since January 1, 2015, The Bank's implemented SFAS No. 68, "Fair Value Measurement". The implementation of this SFAS defines fair value, establishes in a statement, a framework for measuring fair value and requires disclosures concerning fair value measurements.

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, Government bonds, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of current liabilities, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

(i) Classification

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- *Financial assets at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;*
- *Loans and receivables;*
- *Held-to-maturity investments;*
- *Available-for-sale investments.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking.*

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition are designated as available-for-sale investments; or*
- *those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available-for-sale.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif yang dapat dikuotasikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and comprehensive income.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value plus/less, for those financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut (lanjutan):

- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
   - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
   - Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met (continued):

- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.*

(iii) Subsequent measurement

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
   - *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
   - *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

- dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when (continued):

- *Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statements of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual, serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar, diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement profit or loss and other comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale, except financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognized, net of tax, in equity, until the financial assets are derecognized or impaired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(vi) Reclassification of financial assets

Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss, if the initial recognition of financial instruments is determined by Bank as measured at fair value through profit or loss.

The Bank can not classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceeding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications:

a. are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;

b. occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

c. are attributable to an isolated event, that is beyond the Bank's control, is non-recurring, and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:
- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Fair value measurement (continued)

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 45)

(ix) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(x) Aset keuangan sukuk

Sejak 1 Januari 2016, saat pengakuan awal, Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2016, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Fair value measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 45).

(ix) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(x) *Sukuk Financial Asset*

Since January 1, 2016, at initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk ijarah and mudharabah either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Before January 1, 2016, at initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk either measured at cost or fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

After the initial recognition, investment in ijarah sukuk and mudharabah sukuk is measured as follows:

a. Measured at cost
- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income
- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

b. Measured at fair value through other comprehensive income (continued)

- *Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.*

e. Allowance for impairment losses on financial assets

On each statement of financial position reporting date, Bank assesses whether there is an objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrate that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows (continued):

b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;

c. the creditor, for economic or legal reasons relating to the financial difficulties of the debtor, provides relief (concession) to the debtor that the creditor would not otherwise consider;

d. it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;

e. the loss of an active market for that financial asset due to financial difficulties; or
f. observable data has indicated that there is measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the decrease can not be identified to the individual financial assets in the portfolio, including:

   1. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

   2. national or local economic condition related to defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of events and identification of loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months and for specific cases, it may need longer period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Loans which individually have significant value with objective evidence of impairment;*
2. *Restructured loans which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective assessment if one of the following criteria is met:

1. *Loans which individually have significant value with no objective evidence of impairment;*
2. *Loans which individually have insignificant value;*
3. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond dibawah Rp5.000.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (historical loss experience). Aset keuangan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode *roll rate* analisis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Bank menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default (LGD).*

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of current and special mention, and have never been restructured; or (b) Loans with credit limit below Rp5,000.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets are collectively assessment on the basis of historical loss experience. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the roll rate analysis method, which is a statistical model analysis method to collectively assess allowance for impairment losses on loans. Under this method, the Bank uses 3 (three) years of historical data to compute for the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. If loans and receivables or held-to-maturity securities and Government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure impairment loss is the current effective interest rate specified in the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collaterised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

As a practical guidance, the Bank may measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable.

Impairment losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized and the recovery is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available - for - sale, Bank assesses on each statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan obligasi Pemerintah yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang terpulihkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available - for - sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of profit or loss and other comprehensive income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale securities and Government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss previously recognized must be recovered and the recovery is recognized in the year it occurred.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's colletibility), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The amount of reversal is recognized in the current period statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan kembali pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017.

Unit Usaha Syariah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year.

In compliance with Bank Indonesia (OJK), Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Commercial Banks" which is valid until August 24, 2017.

Sharia Business Unit implement (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective on January 1, 2015 and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.12/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which is valid until August 24, 2017. Assessment prior to January 1, 2015 is using PBI No.13/13/PBI/ 2011 dated March 24, 2011 regarding "Asset Quality Rating for Sharia Bank and Sharia Business Units".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK) adalah sebagai berikut:

a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;

b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;

c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;

d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan

e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation (OJK) is as follows:

a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;

b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;

c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;

d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and

e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified under loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka dan *interbank call money*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, NCD, dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum.

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit and interbank call money.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

h. Securities and Government Bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, NCDs, and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds that are issued by the Government for general bank recapitalization.

Sharia securities are classified as held-to-maturity investments and securities available-for-sale.

Securities and Government bonds are initially measured at fair value. Subsequently, securities and Government bonds are accounted for depending on their classification as held-to-maturity, available-for-sale or fair value through profit or loss.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. Held-to-maturity securities and Government bonds are carried at amortized cost using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut (lanjutan):

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government Bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows (continued):

The Bank does not classify securities and Government bonds as held-to-maturity financial assets if the bank has, during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity securities or Government bonds prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2014) applicable in the relevant period.

2. Securities and Government bonds which are classified under available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale securities and Government bonds are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value.

   Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from securities and Government bonds is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. (lanjutan)

Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government Bonds (continued)

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value. (continued)

Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.

Securities and Government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the statement of financial position date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and Government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and Government bonds.

i. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified under loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

j. Pembiayaan/piutang syariah

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *rahn*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (KPR)

The Bank sold its KPR to third parties.

In relation with the, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to Bank Indonesia regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005.

j. Sharia financing/receivables

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from murabahah transactions, istishna transactions and rahn transactions, for financing consist of mudharabah and musyarakah financing.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, Musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

k. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. Istishna receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Rahn is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (benefits) in return which are recognized on an accrual basis.

k. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

(i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
(ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	*Office furniture and fixtures, and motor vehicles*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Premises and equipment (continued)

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification, and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Premises and equipment (continued)

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" of and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognised in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognised in profit or loss.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), ”Penurunan Nilai Aset”. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “rugi penurunan nilai”.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2d).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of non-financial assets

Effective on January 1, 2015, Bank implemented SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or Cash Generating Unit (CGU)’s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “impairment losses”.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS 68, "Fair Value Measurements" (Note 2d).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

n. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

o. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

n. Current liabilities

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

o. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing from the Bank's revenue for the use of funds in accordance with the agreed nisbah. Wadiah and Mudharabah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Simpanan (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di muka. Pemegang deposito hanya bisa menarik deposito tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

p. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Deposits (continued)

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits represent third party placements in which the profit sharing is in accordance with the nisbah as determined and agreed in advance. Depositors are entitled to withdraw the funds at specific dates in accordance with agreements between the depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method, except for sharia deposits and temporary syirkah fund which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

p. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

r. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah Obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

s. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, Pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Securities sold under repurchase agreements

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method. Securities sold under agreements to repurchase are classified as other financial liabilities measured at amortized cost.

r. Securities issued

Securities issued by Bank consist of Bonds and Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

s. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

u. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

v. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

w. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Subordinated Loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

u. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

v. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

w. Interest income and expense

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

x. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

y. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, marjin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *Istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Interest income and expense (continued)

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

x. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

y. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

z. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

z. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:
(i) Actuarial gain and losses.
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot* Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalamlaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of December 31, 2016 and 2015, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	2016	2015	
1 Dolar Amerika Serikat	13.472,50	13.785,00	*1 United States Dollar*
1 Dolar Australia	9.723,11	10.083,73	*1 Australia Dollar*
1 Poundsterling Inggris	16.555,01	20.439,02	*1 British Poundsterling*
1 Euro Eropa	14.175,77	15.056,67	*1 European Euro*
1 Yen Jepang	115,07	114,52	*1 Japanese Yen*
1 Ringgit Malaysia	3.003,23	3.210,67	*1 Malaysian Ringgit*
1 Dolar Hongkong	1.737,34	1.778,70	*1 Hongkong Dollar*
1 Saudi Riyal	3.581,84	3.672,48	*1 Saudi Riyal*
1 Renminbi	1.939,19	2.122,85	*1 Renminbi*
1 Dolar Singapura	9.311,93	9.758,95	*1 Singapore Dollar*

ab. Pajak penghasilan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

ab. Income tax

Effective from January 1, 2015, Bank adopted SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statement.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Pajak penghasilan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

ac. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

ac. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pelaporan segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas (lanjutan):

b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ad. Laba per saham dasar dan dilusian

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa seluruh opsi saham karyawan dieksekusi pada harga yang telah ditentukan pada saat penerbitan opsi saham tersebut.

ae. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Segment reporting (continued)

An operating segment is a component of an entity (continued):

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ad. Basic and diluted earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

Diluted earnings per share is computed after making the necessary adjustments to the weighted average number of common shares outstanding assuming full execise of employee stock options at the time of the issuance using the determined exercise price.

ae. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (Binomial-tree option pricing model).

ag. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011 dan POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

ah. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Stock Options

The Bank has granted stock options to Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the Binomial-tree option pricing model.

ag. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011 and POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable statement of financial accounting standards.

ah. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (Reconditioning costs) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

aj. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

- Amandemen PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ai. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals acquired in settlement of loans (included as part of "Other Assets") are recognized at net realizable values or loan carrying amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. The excess in loan balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible losses on loans in the current year. The difference between the value of the collateral and the proceeds from sale thereof is recognized as a gain or loss at the time of sale of the collateral.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

Reconditioning costs arising after foreclosure capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

aj. Changes in accounting policy and disclosures

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2016, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows:

- *Amendment SFAS 16, "Acceptable amortization and depreciation method of fixed assets", added explanation for indication of technical or commercial obsolescence of an asset. Amendment SFAS 16 clarified that depreciation using income cash flow method is no longer viable.*

- *Amendment SFAS 24 (Revised 2013) "Employee Benefit: Defined Contribution Plans", simplify the accounting method for defined contribution plans for workers and third parties' contribution that does not rely on the total number of service years, for instance contribution plans that is measured using percentage of salary.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aj. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu (lanjutan):

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi", menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", mengklarifikasi definisi kondisi *vesting* dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Changes in accounting policy and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2016, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows (continued):

- *SFAS 5 (Improvement 2015), "Operating Segments", added short disclosure on combined operating segment and economic indicators that have similar characteristics.*
- *SFAS 7 (Improvement 2015), "Related Party Disclosure", added criteria of related parties and clarify disclosure for payables that are given to the management entity.*
- *SFAS 16 (Improvement 2015), "Property, Plant and Equipment", have clarified in paragraph 35 relating revaluation model, that when an entity uses revaluation model, carrying amount of assets are presented in the revaluated value.*
- *SFAS 25 (Improvement 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", given editorial correction to SFAS 25 paragraph 27 about limitation in applying retrospective application.*
- *SFAS 53 (Improvement 2015), "Share-Based Payment", clarify definition of vesting conditions and separately define performance and service condition.*
- *SFAS 68 (Improvement 2015), "Fair Value Measurement", clarified that portfolio exception, for companies that allow fair value measurement of asset group or liability group as net value, is to be applied for the whole contract (including non-financial contract) in the scope of SFAS 55.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aj. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu (lanjutan):

- PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk.

Dampak terhadap laporan keuangan atas penerapan standar akuntansi tersebut diatas telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan yang relevan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Changes in accounting policy and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2016, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows (continued):

- *SFAS 110 (Revised 2015), "Sukuk Accounting", regulate recognition, measurement, presentation and disclosure or sukuk ijarah and sukuk mudharabah transaction, both as either buyer or seller.*

The impact on the financial statements of the adoption of the accounting standards mentioned above has been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements:

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajamen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements: (continued)

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities would therefore be measured at fair value and not at amortized cost.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating allowance for impairment losses made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance for losses required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) significant negative industry or economic trends.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31,* 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah		998.981		1.179.438	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Singapura	418.290	3.895	12.459	122	*Singapore Dollar*
Dolar Amerika Serikat	235.020	3.166	86.954	1.199	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	68.132	246	12.802	47	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Australia	23.030	224	27.300	275	*Australian Dollar*
Euro Eropa	5.625	80	5.500	83	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	2.912	48	160	3	*Great Britain Pound Sterling*
Renminbi	12.405	24	4.705	10	*Renminbi*
Ringgit Malaysia	5.078	15	6.473	21	*Malaysia Ringgit*
Yen Jepang	21.000	2	171.000	20	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	110	1	610	1	*Hong Kong Dollar*
		7.701		1.781	
Total		**1.006.682**		**1.181.219**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp187.839 dan Rp229.030, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp187,839 and Rp229,030, as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31,* 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah		10.693.013		10.981.885	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	324.000	4.365	324.000	4.466	*United States Dollar*
Total		**10.697.378**		**10.986.351**	***Total***

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp814.251 dan Rp641.467 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp814,251 and Rp641,467 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The minimum reserve requirement ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Konvensional			*Conventional*
Rupiah			*Rupiah*
Utama	6,72%	7,95%	*Primary*
Sekunder	6,45%	5,21%	*Secondary*
Dolar Amerika Serikat	8,47%	8,08%	*United States Dollar*

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2016	2015	
Syariah			*Sharia*
Rupiah	5,08%	5,04%	*Rupiah*

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional". Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5% dan 7,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

Rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 5% dan 1%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2016 and 2015 are as follows (continued):

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2016 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, regarding "Third Amendment to Bank Indonesia regulation No. 15/15/PBI/2013 on GWM of Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banking". The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2015 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015, regarding "Second Amendment to Bank Indonesia regulation No. 15/15/PBI/2013 on GWM of Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banking".

As of December 31, 2016 and 2015, based on the above Bank Indonesia regulations, Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 6.5% and 7.5%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 8%, respectively. Secondary GWM amounting to 4% in Rupiah, respectively.

The calculation of the GWM ratios based on sharia principle as of Desember 31, 2016 and 2015 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013, regarding "Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banks and Sharia Business Units".

As of December 31, 2016 and 2015, based on the above Bank Indonesia regulations, based on sharia principle, Bank is required to maintain GWM both in Rupiah and in foreign currencies of 5% and 1%, respectively.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 44).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 44).

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/*December 31*, 2016		31 Desember/*December 31*, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah		117.971		77.075	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	14.113.945	190.150	7.508.600	103.506	*United States Dollar*
Singapura Dollar	724.533	6.747	149.388	1.458	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	53.957.234	6.209	80.546.495	9.224	*Japanese Yen*
Euro Eropa	104.380	1.480	753.866	11.351	*European Euro*
Renminbi	119.338	231	150.255	319	*Renminbi*
		204.817		125.858	
Total		322.788		202.933	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.482)		(1.572)	*Less allowance for impairment losses*
Neto		**321.306**		**201.361**	***Net***

b. Berdasarkan bank / *b. By bank*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	81.885	29.403	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	26.038	36.574	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.171	1.583	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Standard Chartered Bank, Jakarta	2.432	4.142	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Citibank N.A., Jakarta	925	925	*Citibank N.A., Jakarta*
Lainnya	397	161	*Others*
	116.848	72.788	
Pihak Berelasi (Catatan 41)			*Related Parties (Note 41)*
PT Bank Syariah Mandiri	800	486	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	287	348	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21	2.577	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15	876	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	1.123	4.287	

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan bank (lanjutan) / *b. By bank (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Standard Chartered Bank, Jakarta	143.773	63.608	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
PT Bank Central Asia Tbk	30.319	6.909	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	6.747	1.458	*PT Bank DBS Indonesia*
Citibank N.A., Jakarta	6.432	6.582	*Citibank N.A., Jakarta*
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.480	1.572	*Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam*
PT Bank ICBC Indonesia	231	319	*PT Bank ICBC Indonesia*
Deutsche Bank AG	-	9.779	*Deutsche Bank AG*
	188.982	90.227	
Pihak Berelasi (Catatan 41)			*Related Parties (Note 41)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.078	13.203	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.757	22.428	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	15.835	35.631	
Total	322.788	202.933	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.482)	(1.572)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**321.306**	**201.361**	***Net***

Bank memiliki giro pada bank lain yang merupakan pihak-pihak berelasi sebesar Rp16.958 dan Rp39.918, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has current accounts with other banks which represent related parties amounting to Rp16,958 and Rp39,918, respectively.

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp800 dan Rp486, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp800 and Rp486, as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

c. *Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Rupiah	0,25%	0,63%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,01%	0,01%	*Foreign currencies*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Lancar	321.308	201.361	*Current*
Macet	1.480	1.572	*Loss*
Total	322.788	202.933	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.482)	(1.572)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**321.306**	**201.361**	***Net***

e. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Saldo awal tahun	1.572	1.571	*Balance at beginning of year*
(Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 31)	(90)	1	*(Reversal of) provision for impairment losses during the year (Note 31)*
Saldo akhir tahun	**1.482**	**1.572**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 44.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. Collectibility

As of December 31, 2016 and 2015, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

e. As of December 31, 2016 and 2015, there are no current accounts with other banks which are used as collateral.

f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 44.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Based on currency and type

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Deposit Facility			*Deposit Facility*
Bank Indonesia	15.046.082	6.596.977	*Bank Indonesia*
Deposit Facility Syariah			*Deposit Facility Sharia*
Bank Indonesia	2.535.000	932.500	*Bank Indonesia*
Deposito berjangka *Mudharabah*			*Mudharabah time deposits*
PT Bank Muamalat Tbk	-	150.000	*PT Bank Muamalat Tbk*
	17.581.082	7.679.477	
Pihak Berelasi (Catatan 41)			*Related Parties (Note 41)*
Tabungan			*Savings Deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	268	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka *Mudharabah*			*Mudharabah time deposits*
PT Bank BRISyariah	-	150.000	*PT Bank BRISyariah*
Interbank call money			*Interbank call money*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	10.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	268	160.000	
Total	**17.581.350**	**7.839.477**	***Total***

Terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan pihak-pihak berelasi sebesar Rp268 dan Rp160.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

As of December 31, 2016 and 2015, placements with Bank Indonesia and other banks which are related parties of the Bank amounted to Rp268 and Rp160,000, respectively.

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp2.535.000 dan Rp1.232.500, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

As of December 31, 2016 and 2015, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp2,535,000 and Rp1,232,500, respectively.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

b. Based on Remaining Period Until Maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
≤ 1 bulan	17.581.350	7.839.477	*≤ 1 month*
Total	**17.581.350**	**7.839.477**	***Total***

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*	
	2016	**2015**
Rupiah	5,89%	6,27%

Rupiah

d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan sebagai lancar.

d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2016 and 2015 are classified as current.

e. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

e. Management believes that no allowance for impairment losses is necesarry as of December 31, 2016 and 2015, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.

f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 44.

f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 44.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

8. SECURITIES

a. Based on currency, type and issuer

	31 Desember/ *December 31,* 2016	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	548.521	-	*Deposits Certificates of Bank Indonesia*
Tersedia untuk dijual			*Available-for-sale*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Sertifikat Bank Indonesia	1.179.355	815.977	*Bank Indonesia Certificates*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	294.876	294.714	*Deposits Certificates of Bank Indonesia*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. *SECURITIES (continued)*

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			*Available-for-sale (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Pihak Ketiga (lanjutan)			*Third Parties (continued)*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank CIMB Niaga Tbk			*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Tahap I Seri A 2016	89.107	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2011	-	9.911	*Phase I Series B 2011*
PT Bank OCBC NISP Tbk			*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Tahap I Seri A 2016	49.793	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2016	49.474	-	*Phase I Series B 2016*
Tahap II Seri C 2015	46.998	46.454	*Phase II Series C 2015*
Tahap I Seri C 2013	-	29.911	*Phase I Series C 2013*
Tahap II Seri A 2015	-	9.992	*Phase II Series A 2015*
PT Bank UOB Indonesia			*PT Bank UOB Indonesia*
Tahap II Seri A 2016	29.665	-	*Phase II Series A 2016*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Tahap II Seri B 2012	19.911	-	*Phase II Series B 2012*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)			*PT BPD Sulawesi Selatan and Barat (Sulselbar)*
Sukuk Mudharabah II 2016	15.452	-	*Sukuk Mudharabah II 2016*
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)			*PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)*
Sukuk Mudharabah II 2015	10.303	-	*Sukuk Mudharabah II 2015*
PT Berlian Laju Tanker Tbk			*PT Berlian Laju Tanker Tbk*
Seri III 2007	5.018	5.018	*Series III 2007*
Negotiable Certificate of Deposits			*Negotiable Certificate of Deposits*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk			*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
Seri A 2016	73.080	-	*Series A 2016*
PT Bank CIMB Niaga Tbk			*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Tahap II 2016	49.170	-	*Phase II 2016*
PT Bank KEB Hana Indonesia			*PT KEB Hana Bank Indonesia*
Tahap I Seri A 2016	24.105	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2016	23.570	-	*Phase I Series B 2016*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia			*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
Tahap II Seri A 2016	24.575	-	*Phase II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	24.003	-	*Phase II Series B 2016*
Tahap II Seri C 2016	23.625	-	*Phase II Series C 2016*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Tahap IIA 2015	-	24.433	*Phase IIA 2015*
PT Commonwealth Bank			*PT Commonwealth Bank*
Tahap VA 2015	-	24.848	*Phase VA 2015*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
Tahap II 2016	100.000	-	*Phases II 2016*
Reksadana			*Mutual Funds*
Reksadana EMCO Terproteksi	82.553	82.577	*Protected EMCO Mutual Funds*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. *SECURITIES (continued)*

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			*Available-for-sale (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Pihak Ketiga (lanjutan)			*Third Parties (continued)*
Efek Beragun Aset			*Asset Backed Securities*
EBA - SP - BTN02			*EBA - SP - BTN02*
Kelas B	80.000	-	*Class B*
KIK EBA BTN 04			*KIK EBA BTN 04*
Kelas B	60.000	60.000	*Class B*
EBA - SP - BTN01			*EBA - SP - BTN01*
Kelas B	17.000	17.000	*Class B*
	2.371.633	1.420.835	
Pihak Berelasi (Catatan 41)			*Related Parties (Note 41)*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap II Seri A 2016	100.150	-	*Phase II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	101.669	-	*Phase II Series B 2016*
Tahap I Seri A 2016	99.074	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap III Seri B 2016	99.554	-	*Phase III Series B 2016*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Tahap I 2016 Seri A	24.323	-	*Phase I Series A 2016*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Tahap I 2014 Seri C	20.163	20.017	*Phase I Series C 2014*
PT Pupuk Indonesia (Persero)			*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
Tahun 2014 Seri A	20.137	20.200	*Year 2014 Series A*
Negotiable Certificate of Deposits			*Negotiable Certificate of Deposits*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Seri E 2016	120.312	-	*Series E 2016*
Seri F 2016	82.600	-	*Series F 2016*
Tahap II Seri A 2016	94.030	-	*Phases II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	13.558	-	*Phases II Series B 2016*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Seri 2A 2016	92.570	-	*Series 2A 2016*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap I 2016	99.670	-	*Phase I 2016*
	967.810	40.217	
	3.339.443	1.461.052	

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. *SECURITIES (continued)*

a. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Held-to-maturity*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Obligasi			*Bonds*
PT Berlian Laju Tanker Tbk			*PT Berlian Laju Tanker Tbk*
Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000	*Sukuk Ijarah 2007*
PT UOB Indonesia			*PT UOB Indonesia*
Tahap I Seri A 2015	-	8.002	*Phase I Series A 2015*
Efek Beragunan Aset			*Asset Backed Securities*
KIK EBA BTN 05			*KIK EBA BTN 05*
Kelas B	120.000	120.000	*Class B*
KIK EBA BTN 03			*KIK EBA BTN 03*
Kelas B	60.000	60.000	*Class B*
KIK EBA BTN 02			*KIK EBA BTN 02*
Kelas B	42.200	42.200	*Class B*
KIK EBA BTN 01			*KIK EBA BTN 01*
Kelas B	21.274	45.000	*Class B*
EBA-SP -BTN 02			*EBA - SP -BTN02*
Kelas A1	20.000	-	*Class A1*
KIK EBA BTN 05			*KIK EBA BTN 05*
Kelas A1	1.701	3.331	*Class A1*
KIK EBA II			*KIK EBA II*
Kelas B	-	16.538	*Class B*
KIK EBA I			*KIK EBA I*
Kelas B	-	432	*Class B*
	267.175	297.503	
Pihak Berelasi (Catatan 41)			*Related Parties (Note 41)*
Obligasi			*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Sukuk Ijarah II 2007	28.002	28.007	*Sukuk Ijarah II 2007*
Sukuk Ijarah IV 2010	3.000	3.000	*Sukuk Ijarah IV 2010*
Syariah *Ijarah* I 2006	-	30.000	*Syariah Ijarah I 2006*
	31.002	61.007	
	298.177	358.510	
Total	4.186.141	1.819.562	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.441)	(12.001)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.171.700**	**1.807.561**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*	*Issuer*
Rupiah				*Rupiah*
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ *Bank Indonesia Certificates, Deposits Certificates Of Bank Indonesia*	< 1 tahun/ *< 1 year*	5,60% s.d 6,75%, dan 6,75% s.d 6,95% untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015/ *5.60% to 6.75% and 6.75% to 6.95% for years ended December 31, 2016 and 2015, respectively*	*Bank Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk				*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Tahap I Seri C 2013	Obligasi/*Bonds*	19 Februari/ *February 19, 2016*	7,40% tetap/ *fixed*	*Phase I Series C 2013*
Tahap II Seri A 2015	Obligasi/*Bonds*	20 Februari/ *February 20, 2016*	9,00% tetap/ *fixed*	*Phase II Series A 2015*
Tahap II Seri C 2015	Obligasi/*Bonds*	10 Februari/ *February 10, 2018*	9,80% tetap/ *fixed*	*Phase II Series C 2015*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	21 Mei/ *May 21, 2017*	7,50% tetap/ *fixed*	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	11 Mei/ *May 11, 2018*	8,00% tetap/ *fixed*	*Phase I Series B 2016*
PT Bank CIMB Niaga Tbk				*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Tahap I Seri B 2011	Obligasi/*Bonds*	23 Desember/ *December 23, 2016*	8,30% tetap/ *fixed*	*Phase I Series B 2011*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	13 November/ *November 13, 2017*	7,25% tetap/ *fixed*	*Phase I Series A 2016*
Tahap II 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	16 Maret/ *March 16, 2017*	7,80% tetap/ *fixed*	*Phase II 2016*
PT Berlian Laju Tanker Tbk				*PT Berlian Laju Tanker Tbk*
Seri III 2007	Obligasi/*Bonds*	5 Juli/ *July 5, 2012*	10,35% tetap/ *fixed*	*Series III 2007*
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/*Bonds*	7 Mei/ *May 7, 2012*	10,30%	*Sukuk Ijarah 2007*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Tahap IIA 2015	*Negotiable Certificate of Deposits*	23 Maret/ *March 23, 2016*	8,70% tetap/ *fixed*	*Phase IIA 2015*
Tahap II Seri B 2012	*Obligasi/Bonds*	31 Oktober/ *October 31, 2017*	8,00% tetap/ *fixed*	*Phase II Series B 2012*
PT Commonwealth Bank Tahap VA 2015	*Negotiable Certificate of Deposits*	19 Januari/ *January 19, 2016*	8,75% tetap/ *fixed*	*PT Commonwealth Bank Phase VA 2015*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Seri A 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	8 Mei/ *May 8, 2017*	7,30% tetap/ *fixed*	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Series A 2016*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia				*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
Tahap II Seri A 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	22 Maret/ *March 22, 2017*	7,50% tetap/ *fixed*	*Phase II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	11 Juli/ *July 11, 2017*	7,66% tetap/ *fixed*	*Phase II Series B 2016*
Tahap II Seri C 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	22 September/ *September 22, 2017*	7,76% tetap/ *fixed*	*Phase II Series C 2016*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk				*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
Tahap II 2016	*Medium Term Notes*	8 Januari/ *January 8, 2018*	9,00% tetap/ *fixed*	*Phase II 2016*
PT Bank KEB Hana Indonesia				*PT KEB Hana Bank Indonesia*
Tahap I Seri A 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	12 Juni/ *June 12, 2017*	7,81% tetap/ *fixed*	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	20 September/ *September 20, 2017*	7,93% tetap/ *fixed*	*Phase I Series B 2016*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*	*Issuer*
Rupiah (lanjutan)				*Rupiah (continued)*
PT Bank Negara Indonesia Tbk				*PT Bank Negara Indonesia Tbk*
Tahap II Seri A 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	2 Oktober/ *October 2, 2017*	7,20% tetap/ *fixed*	*Phases II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	26 Maret/ *March 26, 2018*	7,60% tetap/ *fixed*	*Phases II Series B 2016*
Seri E 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	15 Juni/ *June 15, 2018*	8,25% tetap/ *fixed*	*Series E 2016*
Seri F 2016	*Negotiable Certificate of Deposits*	14 Juni/ *June 14, 2019*	8,40% tetap/ *fixed*	*Series F 2016*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia				*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/*Bonds*	5 Juni/ *June 5, 2017*	9,25% tetap/ *fixed*	*Phase I Series C 2014*
PT Pupuk Indonesia (Persero)				*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
Tahun 2014 Seri A	Obligasi/*Bonds*	8 Juli/ *July 8, 2017*	9,63% tetap/ *fixed*	*Year 2014 Series A*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap I 2016	*Medium Term Notes*	21 September/ *September 21, 2017*	7,40% tetap/ *fixed*	*Phase I 2016*
Tahap II Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	8 Februari/ *February 8, 2017*	8,50% tetap/ *fixed*	*Phase II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	4 Februari/ *February 4, 2019*	9,25% tetap/ *fixed*	*Phase II Series B 2016*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	6 Desember/ *December 6, 2017*	7,25% tetap/ *fixed*	*Phase I Series A 2016*
Tahap III Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	25 Mei/ *May 25, 2019*	8,20% tetap/ *fixed*	*Phase III Series B 2016*
PT Bank UOB Indonesia				*PT Bank UOB Indonesia*
Tahap II Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	5 Desember/ *December 5, 2017*	7,20% tetap/ *fixed*	*Phase II Series A 2016*
PT Bank UOB Indonesia				*PT Bank UOB Indonesia*
Tahap I Seri A 2015	Obligasi/*Bonds*	11 April/ *April 11, 2016*	8,60% tetap/ *fixed*	*Phase I Series A 2015*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)				*PT BPD Sulawesi Selatan and Barat (Sulselbar)*
Sukuk Mudharabah II 2016	Obligasi/*Bonds*	15 Juli/ *July 15, 2021*	9,35% tetap/ *fixed*	*Sukuk Mudharabah II 2016*
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)				*PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)*
Sukuk Mudharabah II 2015	Obligasi/*Bonds*	8 Januari/ *January 8, 2021*	10,99% tetap/ *fixed*	*Sukuk Mudharabah II 2015*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Syariah *Ijarah* I 2006	Obligasi/*Bonds*	21 Juni/ *June 21, 2016*	13,60%	*Syariah Ijarah I 2006*
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/*Bonds*	10 Juli/ *July 10, 2017*	10,40%	*Sukuk Ijarah II 2007*
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/*Bonds*	12 Januari/ *January 12, 2020*	12,55%	*Sukuk Ijarah IV 2010*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit / *Issuer*	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*
Rupiah (lanjutan) / *Rupiah (continued)*			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*			
Tahap I 2016 Seri A / *Phase I Series A 2016*	Obligasi/*Bonds*	30 September/ *September 30, 2021*	7,95% tetap/ *fixed*
Seri 2A 2016 / *Series 2A 2016*	*Negotiable Certificate of Deposits*	21 Desember/ *December 21, 2017*	7,55% tetap/ *fixed*
EBA - SP – BTN02 Kelas B / *EBA - SP – BTN02 Class B*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	7 Juni/ *June 7, 2027*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
EBA - SP – BTN02 Kelas A1 / *EBA – SP – BTN02 Class A1*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	7 Juni/ *June 7, 2027*	8,15%
KIK – EBA BTN 05 Kelas A1 / *KIK – EBA BTN 05 Class A1*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	7 September/ *September 7, 2025*	10,00%
EBA - SP - BTN01 Kelas B / *EBA - SP - BTN 01 Class B*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	7 Maret/ *March 7, 2022*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
KIK – EBA BTN 05 Kelas B / *KIK – EBA BTN 05 Class B*	Efek Beragunan Aset / *Asset Backed Securities*	7 September/ *September 7, 2025*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
KIK – EBA BTN 04 Kelas B / *KIK - EBA BTN 04 Class B*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	26 Februari/ *February 26, 2022*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
KIK – EBA BTN 03 Kelas B / *KIK – EBA BTN 03 Class B*	Efek Beragunan Aset/ *Asset Backed Securities*	7 Januari/ *January 7, 2023*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
KIK – EBA BTN 02 Kelas B / *KIK - EBA BTN 02 Class B*	Efek Beragunan Aset / *Asset Backed Securities*	27 Februari/ *February 27, 2021*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*
KIK – EBA BTN 01 Kelas B / *KIK - EBA BTN 01 Class B*	Efek Beragunan Aset / *Asset Backed Securities*	27 September/ *September 27, 2019*	Arus kas tidak tetap/ *Variable cash flows*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / 8. SECURITIES (continued)

c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo) / *c. Remaining period to maturity (held-to-maturity securities)*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
≤ 1 tahun	28.002	38.002	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 5 tahun	66.474	92.977	*> 1 year ≤ 5 years*
> 5 tahun ≤ 10 tahun	181.701	225.531	*> 5 years ≤ 10 years*
> 10 tahun	22.000	2.000	*> 10 years*
	298.177	**358.510**	

d. Peringkat / *d. Rating*

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Penerbit	Jenis/ *Type*	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	*Issuer*
PT Bank OCBC NISP Tbk				*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Tahap I Seri C 2013	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA	*Phase I Series C 2013*
Tahap II Seri C 2015	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	*Phase II Series C 2015*
Tahap II Seri A 2015	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA	*Phase II Series A 2015*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap I Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase I Series B 2016*
PT Bank CIMB Niaga Tbk				*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Tahap I Seri B 2011	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA	*Phase I Series B 2011*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase I Series A 2016*
PT Bank UOB Indonesia				*PT Bank UOB Indonesia*
Tahap I Seri A 2015	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA	*Phase I Series A 2015*
Tahap II Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase II Series A 2016*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Tahap II Seri B 2012	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase II Series B 2012*
PT Berlian Laju Tanker Tbk				*PT Berlian Laju Tanker Tbk*
Seri III 2007	Obligasi/*Bonds*	idD	idD	*Series III 2007*
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/*Bonds*	idD (Sy)	idD (Sy)	*Sukuk Ijarah 2007*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia				*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	*Phase I Series C 2014*
PT Pupuk Indonesia (Persero)				*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
Tahun 2014 Seri A	Obligasi/*Bonds*	AAA(idn)	AAA(idn)	*Year 2014 Series A*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap II Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase II Series A 2016*
Tahap II Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase II Series B 2016*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase I Series A 2016*
Tahap III Seri B 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase III Series B 2016*
Tahap I 2016	*Medium Term Notes*	idAAA	-	*Phase I 2016*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Tahap I Seri A 2016	Obligasi/*Bonds*	idAAA	-	*Phase I Series A 2016*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Syariah *Ijarah* I 2006	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA(Sy)	*Syariah Ijarah I 2006*
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/*Bonds*	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Ijarah II 2007*
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/*Bonds*	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Ijarah IV 2010*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar)				*PT BPD Sulawesi Selatan and Barat (Sulselbar)*
Sukuk Mudharabah II 2016	Obligasi/*Bonds*	idA+(sy)	-	*Sukuk Mudharabah II 2016*
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)				*PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)*
Sukuk Mudharabah II 2015	Obligasi/*Bonds*	idA(sy)	-	*Sukuk Mudharabah II 2015*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk				*PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk*
Tahap II 2016	*Medium Term Notes*	idAA-	-	*Phase II 2016*
KIK - EBA				*Securities KIK EBA*
BTN 05 - KPR BTN Kelas A1	Efek Beragun Aset-KPR/*Residential*	idAAA	idAAA	*BTN 05 - KPR BTN Class A1*
EBA - SP -BTN 02 KPR BTN Kelas A1	Efek Beragun Aset-KPR/*Residential*	idAAA	-	*EBA - SP - BTN 02 KPR BTN Class A1*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

e. Kolektibilitas / *e. Collectibility*

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut: / *The collectibility of securities are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Lancar	4.121.506	1.750.424	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	39.940	42.089	*Special Mention*
Kurang Lancar	2.614	2.578	*Substandard*
Diragukan	3.401	3.669	*Doubtful*
Macet	18.680	20.802	*Loss*
Total	4.186.141	1.819.562	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.441)	(12.001)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.171.700**	**1.807.561**	***Net***

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut: / *f. The movements in the allowance for impairment losses on securities are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Saldo awal tahun	12.001	9.402	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 31)	2.440	2.599	*Provision for impairment losses during the year (Note 31)*
Saldo akhir tahun	**14.441**	**12.001**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai. / *Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.*

g. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp218.091 dan Rp147.558, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. / *g. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp218,091 and Rp147,558, for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of securities - net".*

h. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari kenaikan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp6.443 dan RpNihil, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang disajikan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek-neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. / *h. The Bank unrealized gain - net from the increase in value of fair value through profit or loss securities amounting to Rp6,443 and RpNil, for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Unrealized gain on changes in fair value of securities - net".*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing berkisar dari 82,60% sampai dengan 103,03% dan 94,52% sampai dengan 101,00%.

j. Bank mengakui kerugian yang belum direalisasi bersih sebesar Rp3.586 dan Rp1.675 dari perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015 dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam laporan posisi keuangan.

k. Mutasi kerugian efek-efek tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Saldo awal tahun	(1.675)	5.689	*Balance at beginning of year*
Rugi yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(7.167)	(4.726)	*Unrealized loss recognized in equity*
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	4.619	(5.093)	*Amount realized to profit or loss*
Efek pajak	637	2.455	*Tax effect*
Saldo akhir tahun	**(3.586)**	**(1.675)**	***Balance at end of year***

l. Terdapat investasi surat - surat berharga dengan pihak - pihak berelasi sebesar Rp998.812 dan Rp101.224, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 44.

8. SECURITIES (continued)

i. As of December 31, 2016 and 2015, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and available for sale range from 82.60% to 103.03% and range from 94.52% to 101.00%, respectively.

j. The Bank recognized unrealized loss - net of Rp3,586 and Rp1,675 from the changes in fair values of available-for-sale securities as of December 31, 2016 and 2015, which are presented as "unrealized gain on available-for-sale securities and government bonds - net" in the statement of financial position.

k. Movements in unrealized loss on available-for-sale securities are as follows:

l. As of December 31, 2016 and 2015, investments in securities with related parties amounted to Rp998,812 and Rp101,224, respectively.

m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 44.

9. OBLIGASI PEMERINTAH / *9. GOVERNMENT BONDS*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. Based on currency and type*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Pihak berelasi			***Related party***
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
SR 0008	18.426	-	*SR 0008*
FR 0059	18.877	-	*FR 0059*
FR 0069	10.065	9.724	*FR 0069*
FR 0068	10.055	-	*FR 0068*
FR 0061	9.751	-	*FR 0061*
SR 0007	5.515	1.514	*SR 0007*
ORI 13	4.650	-	*ORI 13*
SR 0006	1.470	1.203	*SR 0006*
ORI 11	1.105	20	*ORI 11*
ORI 12	726	-	*ORI 12*
	80.640	12.461	
Zero Coupon Bonds			*Zero Coupon Bonds*
SPN 03170307	989.431	-	*SPN 03170307*
SPN 03170209	19.874	-	*SPN 03170209*
	1.009.305	-	
	1.089.945	12.461	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2027	27.079	-	*INDON 2027*
INDON 2022	13.555	-	*INDON 2022*
INDON 2026	-	6.806	*INDON 2026*
	40.634	6.806	
	1.130.579	19.267	
Tersedia untuk dijual			*Available-for-sale*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
ORI 013	292.989	-	*ORI 013*
FR 0064	253.494	235.542	*FR 0064*
FR 0065	126.927	117.854	*FR 0065*
FR 0062	65.478	60.778	*FR 0062*
FR 0059	42.372	-	*FR 0059*
FR 0073	20.917	-	*FR 0073*
FR 0053	20.507	-	*FR 0053*
FR 0056	20.534	-	*FR 0056*
FR 0070	10.197	-	*FR 0070*
	853.415	414.174	
Zero Coupon Bonds			*Zero Coupon Bonds*
SPN 12170302	257.443	-	*SPN 12170302*
SPN 12170106	194.934	-	*SPN 12170106*
SPN 12170804	192.488	-	*SPN 12170804*
SPN 12170203	49.745	-	*SPN 12170203*
SPN 12160805	-	68.554	*SPN 12160805*
SPN 12161015	-	188.948	*SPN 12161015*
	694.610	257.502	

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / 9. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *a. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			*Available-for-sale (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga mengambang			*Variable interest rate*
VR 0031	1.092.756	1.092.263	*VR 0031*
VR 0028	799.476	798.793	*VR 0028*
VR 0029	701.436	710.248	*VR 0029*
VR 0027	555.199	549.045	*VR 0027*
VR 0026	379.558	374.261	*VR 0026*
VR 0022	-	26.901	*VR 0022*
VR 0023	-	888.093	*VR 0023*
	3.528.425	4.439.604	
	5.076.450	5.111.280	
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Held-to-maturity*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
ORI 012	607.283	607.461	*ORI 012*
FR 0063	284.449	279.240	*FR 0063*
FR 0053	246.867	246.327	*FR 0053*
FR 0056	214.487	214.125	*FR 0056*
FR 0070	124.530	124.018	*FR 0070*
FR 0034	68.116	69.532	*FR 0034*
FR 0066	34.548	33.584	*FR 0066*
FR 0069	12.511	12.328	*FR 0069*
ORI 011	199	198	*ORI 011*
FR 0055	-	139.817	*FR 0055*
	1.592.990	1.726.630	
Tingkat Bunga mengambang			*Variable interest rate*
VR 0031	1.123.563	1.123.210	*VR 0031*
VR 0029	199.789	199.725	*VR 0029*
Surat Berharga Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
IFR 0002	50.029	50.047	*IFR 0002*
Sukuk Negara			*Sukuk Negara*
SR 0007	555	551	*SR 0007*
SR 0006	245	198	*SR 0006*
	1.374.181	1.373.731	
	2.967.171	3.100.361	
Valas			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2017	13.602	-	*INDON 2017*
INDOIS 2018	28.073	-	*INDOIS 2018*
INDOIS 2021	27.764	-	*INDOIS 2021*
	69.439	-	
	3.036.610	3.100.361	
Total	**9.243.639**	**8.230.908**	***Total***

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
ORI 011	15 Oktober/ *October 15*, 2017	8,50% tetap/ *fixed*	*ORI 011*
ORI 012	15 Oktober/ *October 15*, 2018	9,00% tetap/ *fixed*	*ORI 012*
ORI 013	15 Oktober/ *October 15*, 2019	6,60% tetap/ *fixed*	*ORI 013*
SR 0006	5 Maret/ *March 5*, 2017	8,75% tetap/ *fixed*	*SR 0006*
SR 0007	11 Maret/ *March 11*, 2018	8,25% tetap/ *fixed*	*SR 0007*
SR 0008	10 Maret/ *March 10*, 2019	8,30% tetap/ *fixed*	*SR 0008*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0061	15 Mei/ *May 15*, 2022	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0061*
FR 0068	15 Maret/ *March 15*, 2034	8,37% tetap/ *fixed*	*FR 0068*
FR 0069	15 April/ *April 15*, 2019	7,87% tetap/ *fixed*	*FR 0069*
SPN	Beragam/ *Various*	Beragam/ *Various*	*SPN*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
INDON 2022	8 Januari/ *January 8*, 2022	3,70% tetap/ *fixed*	*INDON 2022*
INDON 2026	8 Januari/ *January 8*, 2026	4,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2026*
INDON 2027	8 Januari/ *January 8*, 2027	4,35% tetap/ *fixed*	*INDON 2027*
Tersedia untuk dijual			*Available-for-sale*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
ORI 013	15 Oktober/ *October 15, 2019*	6,6% tetap/ *fixed*	*ORI 013*
FR 0053	15 Juli/ *July 15*, 2021	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0053*
FR 0056	15 September/ *September 15*, 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0062	15 April/ *April 15*, 2042	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0062*
FR 0064	15 Mei/ *May 15*, 2028	6,13% tetap/ *fixed*	*FR 0064*
FR 0065	15 Mei/ *May 15*, 2033	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0065*
FR 0070	15 Maret/ *March 15*, 2024	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
SPN	Beragam/ *Various*	Beragam/ *Various*	*SPN*
VR 0022	25 Maret/ *March 25*, 2016	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0022*
VR 0023	25 Oktober/ *October 25*, 2016	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0023*
VR 0026	25 Januari/ *January 25*, 2018	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0026*
VR 0027	25 Juli/ *July 25*, 2018	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0027*
VR 0028	25 Agustus/ *August 25*, 2018	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0028*
VR 0029	25 Agustus/ *August 25*, 2019	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0029*
VR 0031	25 Juli/ *July 25*, 2020	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0031*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Held-to-maturity*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0053	15 Juli/ *July 15, 2021*	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0053*
FR 0055	15 September/ *September 15, 2016*	7,37% tetap/ *fixed*	*FR 0055*
FR 0063	15 Mei/ *May 15*, 2023	5,63% tetap/ *fixed*	*FR 0063*
FR 0034	15 Juni/ *June 15*, 2021	12,8% tetap/ *fixed*	*FR 0034*
FR 0056	15 September/ *September 15*, 2026	8,37% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0066	15 Mei/ *May 15, 2018*	5,25% tetap/ *fixed*	*FR 0066*
FR 0069	15 April/ *April 15*, 2019	7,87% tetap/ *fixed*	*FR 0069*
FR 0070	15 Maret/ *March 15*, 2024	8,37% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
ORI 011	15 Oktober/ *October 15*, 2017	8,5% tetap/ *fixed*	*ORI 011*
ORI 012	15 Oktober/ *October 15, 2018*	9% tetap/ *fixed*	*ORI 012*
Tingkat bunga mengambang			*Variable interest rate*
VR 0029	25 Agustus/ *August 25*, 2019	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0029*
VR 0031	25 Juli/ *July 25*, 2020	SPN 3 bulan/ *months*	*VR 0031*
Surat berharga Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
IFR 0002	15 Agustus/ *August 15*, 2018	11,95% tetap/ *fixed*	*IFR 0002*
Sukuk Negara			*Sukuk Negara*
SR 0006	5 Maret/ *March 5*, 2017	8,75% tetap/ *fixed*	*SR 0006*
SR 0007	11 Maret/ *March 11*, 2018	8,25% tetap/ *fixed*	*SR 0007*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2017	9 Maret/ *March 9*, 2017	6,88% tetap/ *fixed*	*INDON 2017*
INDOIS 2018	21 November/ *November 21*, 2018	4,00% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2018*
INDOIS 2021	29 Maret/ *March 29*, 2021	3,40% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2021*

Obligasi pemerintah (tersedia untuk dijual) sejumlah nominal Rp1.570.000 dan Rp2.502.315, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19).

As of December 31, 2016 and 2015, government bonds (available-for-sale) with nominal amounts of Rp1,570,000 and Rp2,502,315, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 19).

Pembayaran kupon obligasi pemerintah dengan tingkat bunga tetap dan variabel masing-masing dibayarkan tiap semester dan triwulanan.

Coupon payments of government bonds with fixed and variable interest rates are payable semi-annualy and quarterly, respectively.

Obligasi pemerintah syariah seri SR dan seri IFR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

SR series and IFR series sharia povernment bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" berkisar dari 77,26% sampai dengan 104,59% dan 71,71% sampai dengan 100,20% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and available for sale ranging from 77.26% to 104.59% and 71.71% to 100.20% of nominal amounts as of December 31, 2016 and 2015 respectively.

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp111.981 dan Rp132.015, yang disajikan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi atas obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Mutasi kerugian obligasi pemerintah tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp111,981 and Rp132,015, respectively, which are presented as "Unrealized losses on available-for-sale government bonds net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

Movements in unrealized loss on available-for-sale government bonds are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Saldo awal tahun	(132.015)	(95.702)	*Balance at beginning of year*
Laba (Rugi) yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	17.821	(53.637)	*Unrealized gain (loss) recognized in equity*
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	8.891	5.220	*Amount realized to profit or loss*
Efek pajak	(6.678)	12.104	*Tax effect*
Saldo akhir tahun	**(111.981)**	**(132.015)**	***Balance at end of year***

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp 54.430 dan Rp19.495, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah-neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp54,430 and Rp19,495 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of government bonds- net".

Bank mengakui keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp3.507 dan Rp193 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah-neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

The Bank recognized unrealized gain (loss)-net from the change in fair value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rp3,507 and Rp193 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively, which is presented in the statements of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from change in fair value of government bonds - net".

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai *underlying* obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2016 and 2015, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Konvensional			*Conventional*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	108.473.513	91.051.510	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	11.048.739	10.867.610	*Non-housing loan*
	119.522.252	101.919.120	
Modal kerja	24.993.038	21.286.580	*Working capital*
Investasi	4.239.938	3.715.351	*Investment*
Sindikasi	78.801	79.268	*Syndicated*
Direksi dan karyawan			*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.311.095	697.361	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	76.836	34.478	*Related parties -*
	150.221.960	127.732.158	
Syariah			*Sharia*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	9.485.871	6.754.551	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	368.405	459.259	*Non-housing loan*
	9.854.276	7.213.810	
Modal kerja	3.755.961	3.386.033	*Working capital*
Investasi	613.858	623.066	*Investment*
Direksi dan karyawan			*Directors and employees*
- Pihak yang berelasi	326	737	*Related parties -*
	14.224.421	11.223.646	
Total	164.446.381	138.955.804	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.116.034)	(2.050.578)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**162.330.347**	**136.905.226**	***Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi / *b. Economic Sector*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Konvensional			*Conventional*
Perumahan	139.656.263	118.460.879	*Property*
Konstruksi	4.018.020	2.533.759	*Construction*
Jasa usaha	2.491.346	1.123.045	*Business service*
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.684.382	2.197.360	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	892.096	805.490	*Social service*
Manufaktur	202.443	280.410	*Manufacturing*
Pertambangan	200.941	132.932	*Mining*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	173.478	199.490	*Transportation, warehousing, and communication*
Pertanian	82.488	129.049	*Farming*
Listrik, gas dan air	37.981	25.562	*Electricity, gas and water*
Lain-lain*)	782.522	1.844.182	*Other*)*
	150.221.960	127.732.158	
Syariah			*Sharia*
Perumahan	9.485.914	6.754.873	*Property*
Jasa usaha	2.348.097	2.595.790	*Business service*
Konstruksi	2.390.410	1.872.983	*Construction*
	14.224.421	11.223.646	
Total	164.446.381	138.955.804	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.116.034)	(2.050.578)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**162.330.347**	**136.905.226**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) *Consists of household and other economic sectors*

c. Kolektibilitas / *c. Collectibility*

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31*, 2015		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Konvensional					*Conventional*
Individual	563.544	370.072	604.209	291.427	*Individual*
Kolektif					*Collective*
Lancar	129.939.825	9.993	106.696.332	17.497	*Current*
Dalam perhatian khusus	15.633.457	12.713	16.245.459	16.015	*Special mention*
Kurang lancar	218.410	1.756	219.943	1.113	*Substandard*
Diragukan	312.162	5.652	330.050	5.446	*Doubtful*
Macet	3.554.562	1.324.749	3.636.165	1.394.226	*Loss*
	150.221.960	1.724.935	127.732.158	1.725.724	
Syariah					*Sharia*
Lancar	12.946.390	166.971	10.103.098	42.107	*Current*
Dalam perhatian khusus	1.134.820	174.510	934.086	146.148	*Special mention*
Kurang lancar	36.745	6.670	30.548	21.092	*Substandard*
Diragukan	15.560	1.284	20.402	9.221	*Doubtful*
Macet	90.906	41.664	135.512	106.286	*Loss*
	14.224.421	391.099	11.223.646	324.854	
Total	**164.446.381**	**2.116.034**	**138.955.804**	**2.050.578**	***Total***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Konvensional			*Conventional*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	4.272	8.926	*Housing Loan*
Non-kepemilikan rumah	420.922	852.983	*Non-housing loan*
	425.194	861.909	
Modal Kerja	1.585.383	461.901	*Working capital*
Investasi	110.535	79.268	*Investment*
	2.121.112	**1.403.078**	
Syariah			*Sharia*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	43	322	*Housing Loan*
Non- kepemilikan rumah	283	415	*Non-housing loan*
	326	737	
Total	**2.121.438**	**1.403.815**	***Total***

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Konvensional			*Conventional*
≤ 1 tahun	1.812.580	1.153.268	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.926.387	1.434.046	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	16.490.235	16.931.081	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	129.992.758	108.213.763	*> 5 years*
	150.221.960	127.732.158	
Syariah			*Sharia*
≤ 1 tahun	137.540	177.005	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.552.346	1.375.449	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.756.627	2.718.634	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	9.777.908	6.952.558	*> 5 years*
	14.224.421	11.223.646	
Total	164.446.381	138.955.804	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.116.034)	(2.050.578)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**162.330.347**	**136.905.226**	***Net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Konvensional			*Conventional*
≤ 1 tahun	10.431.543	9.425.319	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	7.357.219	6.561.167	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	18.520.767	16.098.193	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	113.912.431	95.647.479	*> 5 years*
	150.221.960	127.732.158	
Syariah			*Sharia*
≤ 1 tahun	2.316.243	1.768.368	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.403.582	1.456.412	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.745.688	1.825.610	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	8.758.908	6.173.256	*> 5 years*
	14.224.421	11.223.646	
Total	164.446.381	138.955.804	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.116.034)	(2.050.578)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**162.330.347**	**136.905.226**	***Net***

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Piutang *Murabahah*	9.079.308	6.634.592	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Mudharabah*	1.013.242	1.243.282	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *Musyarakah*	3.154.014	2.510.012	*Musyarakah financing*
Piutang *Istishna*	780.494	563.720	*Istishna receivables*
Pinjaman *qardh*	197.363	272.040	*Funds of qardh*
Total	14.224.421	11.223.646	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(391.099)	(324.854)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**13.833.322**	**10.898.792**	***Net***

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumer sebesar 12,68% dan 12,65% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 12,36% dan 12,02% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 12.68% and 12.65% for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 12.36% and 12.02% for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

iii. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit yang berkaitan dengan perumahan. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, KPR masing-masing sebesar Rp595.025 dan Rp2.620.279 telah dijadikan jaminan pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi).

iv. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 15, 16 dan 17).

v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 21 tanggal 11 November 2015 dan Akta Cessie No. 52 tanggal 27 November 2015.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp200.000 yang terdiri dari 6.347 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal cut-off final (2 November 2015). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR telah dialihkan kepada pembeli.

vi. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 19 tanggal 10 Oktober 2016 dan Akta Cessie No. 40 tanggal 31 Oktober 2016.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari 11.280 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal cut-off final (10 Oktober 2016). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR telah dialihkan kepada pembeli.

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

iii. Consumer loans consist of housing loans and other housing-related loans. As of December 31, 2016 and 2015, housing loans amounted to Rp595,025 and Rp2,620,279, respectively, are used as collateral for loans obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related party).

iv. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 15, 16 and 17).

v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 21 dated November 11, 2015 and Deed of Cessie No. 52 dated November 27, 2015.

The principal amount of KPR sold is amounted to Rp200,000 which consists of 6,347 debtors with selling price same as principal amount of KPR as of final cut off date (November 2, 2015). This sale qualified for derecognition as the risk and rewards of ownership over the KPR were transferred to the buyer.

vi. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 19 dated October 10, 2016 and Deed of Cessie No. 40 dated October 31, 2016.

The principal amount of KPR sold is amounted to Rp1,000,000 which consists of 11,280 debtors with selling price same as principal amount of KPR as of final cut off date (October 10, 2016). This sale qualified for derecognition as the risk and rewards of ownership over the KPR were transferred to the buyer.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

vii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar 5,89% dan 4,95%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp224.398 dan Rp94.580 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 13).

viii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.121.438 dan Rp1.403.815 (Catatan 41). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar 1,29% dan 1,01%.

ix. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

vii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 5.89% and 4.95%, for the year ended December 31, 2016 and 2015, with term ranging from 1 to 15 years. The loans are settled through monthly payroll deductions. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp224,398 and Rp94,580 as of December 31, 2016 and 2015 (Note 13).

viii. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp2,121,438 and Rp1,403,815, respectively (Note 41). As of December 31, 2016 and 2015, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 1.29% and 1.01%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

ix. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2016*	**31 Desember/ *December 31, 2015***	
Saldo awal tahun	2.050.578	1.570.183	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 31)	705.188	898.718	*Provision for impairment losses during the year (Note 31)*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	19.489	16.276	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(659.221)	(434.599)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**2.116.034**	**2.050.578**	***Balance at the end of year***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

x. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp391.099 dan Rp324.854, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

xi. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (credit limit) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xii. Dalam laporan Bank ke OJK disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

xiii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode gross dan net) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

x. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp391,099 and Rp324,854, respectively.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

xi. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

xii. Based on the report submitted by the Bank to OJK as of December 31, 2016 and 2015, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

xiii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xiii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode gross dan net) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut: (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xiii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table: (continued)

Kolektibilitas	31 Desember/*December 31, 2016*		31 Desember/*December 31*, 2015		*Collectibility*
	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	
Kurang Lancar	223.246	36.745	219.944	30.548	*Substandard*
Diragukan	317.326	15.560	338.138	20.402	*Doubtful*
Macet	3.992.461	90.906	4.008.666	135.512	*Loss*
	4.533.033	143.211	4.566.748	186.462	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(1.586.586)	(49.618)	(1.683.153)	(136.598)	*Allowance for impairment losses for NPL/NPF*
	2.946.447	**93.593**	**2.883.595**	**49.864**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	**150.221.960**	**14.224.421**	**127.732.158**	**11.223.646**	*Loans and sharia financing/ receivables*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - *Gross* (Gross NPL/NPF)	3,02%	1,01%	3,58%	1,66%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah – Neto (Neto NPL/NPF)	1,96%	0,66%	2,26%	0,44%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)*

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/ pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

Rasio NPL/NPF *Gross* (total konvensional dan syariah) adalah 2,84% dan 3,42% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 1,85% dan 2,11% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 2.84% and 3.42% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 1.85% and 2.11% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xiv. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xiv. Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Konvensional			*Conventional*
Perumahan	3.471.625	3.440.965	*Property*
Konstruksi	310.859	350.980	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	372.193	280.382	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa Usaha	90.271	133.286	*Business service*
Manufaktur	61.973	70.169	*Manufacturing*
Pertanian	47.561	63.184	*Farming*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	46.269	54.454	*Transportation, warehousing, and communication*
Pertambangan	23.462	43.965	*Mining*
Jasa-jasa sosial	35.383	35.167	*Social service*
Listrik, gas dan air	94	120	*Electricity, gas and water*
Lain-lain*)	73.343	94.076	*Other*)*
	4.533.033	4.566.748	
Syariah			*Sharia*
Jasa usaha	78.662	103.105	*Business service*
Perumahan	49.152	55.301	*Property*
Konstruksi	15.397	28.056	*Construction*
	143.211	186.462	
Total	4.676.244	4.753.210	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.636.204)	(1.819.751)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**3.040.040**	**2.933.459**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

**) Consists of household and other economic sectors*

xv. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai kredit *non-performing* terhadap total kredit *non-performing* adalah 34,99% dan 38,28% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

xv. The ratio of NPL's allowance for impairment losses to total NPL share 34.99% and 38.28% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

xvi. Rasio kredit *non-performing* terhadap total aset keuangan adalah 2,23% dan 2,79% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

xvi. The ratio of NPLs to total financial assets are 2.23% and 2.79% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

xvii. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,34% dan 0,79% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

xvii. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.34% and 0.79% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xviii. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 6,00% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

xix. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xviii. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2016 and 2015, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 6.00% for each, respectively, of the total syndicated loans.

xix. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/*December 31, 2016*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doutbful*	Macet/ *Loss*	Total	
Perumahan	2.292.992	3.872.882	64.973	60.827	402.404	6.694.078	*Property*
Konstruksi	483.044	196.403	330	5.164	23.335	708.276	*Construction*
Jasa usaha	227.768	189.202	13.400	723	6.597	437.690	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	113.993	164.594	2.646	21	66.046	347.300	*Trading, restaurant and hotel*
Listrik, gas dan air	11.599	-	-	-	-	11.599	*Electricity, gas and water*
Pertambangan	197	23.578	-	-	4.765	28.540	*Mining*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	45.618	9.529	-	-	2.277	57.424	*Transportation, warehousing and communication*
Jasa-jasa sosial	32.258	30.901	-	-	5.026	68.185	*Social services*
Pertanian	2.314	437	-	-	1.941	4.692	*Farming*
Manufaktur	4.908	4.599	-	85	1.236	10.828	*Manufacturing*
Lain-lain*)	5.905	4.609	107	323	2.019	12.963	*Other*)*
Total	**3.220.596**	**4.496.734**	**81.456**	**67.143**	**515.646**	**8.381.575**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2015

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doutbful*	Macet/ *Loss*	Total	
Perumahan	874.401	1.985.540	57.754	22.169	326.739	3.266.603	*Property*
Konstruksi	338.012	126.081	-	-	18.878	482.971	*Construction*
Jasa usaha	101.488	122.413	38	6.619	4.851	235.409	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	54.761	34.722	-	-	17.765	107.248	*Trading, restaurant and hotel*
Listrik, gas dan air	3.713	-	-	-	-	3.713	*Electricity, gas and water*
Pertambangan	-	-	-	-	14.364	14.364	*Mining*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3.106	3.105	-	-	-	6.211	*Transportation, warehousing and communication*
Jasa-jasa sosial	12.836	17.063	-	-	8	29.907	*Social services*
Pertanian	113	-	13	-	1.941	2.067	*Farming*
Manufaktur	5.680	3.394	-	-	290	9.364	*Manufacturing*
Lain-lain*)	1.120	3.713	326	10	2.347	7.516	*Other*)*
Total	**1.395.230**	**2.296.031**	**58.131**	**28.798**	**387.183**	**4.165.373**	***Total***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) *Consists of household and other economic sectors*

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG *SYARIAH* (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xx. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank memiliki saldo kredit yang dihapusbukukan masing-masing sebesar Rp1.713.935 dan Rp1.252.630. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit tersebut. Ikhtisar mutasi kredit hapus buku adalah sebagai berikut:

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xx. The Bank has loans written-off as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp1,713,935 and Rp1,252,630, respectively. The Bank continues to pursue these loans for collection. The summary of the movements of the loans written-off is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2016*	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Saldo awal tahun	1.252.630	1.045.303	*Balance at beginning of year*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	659.221	434.599	*Write-off during the current year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(197.916)	(227.272)	*Recovery of loans written-off*
Saldo akhir tahun	**1.713.935**	**1.252.630**	***Balance at the end of year***

xxi. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.407.281 dan Rp2.583.369, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

xxi. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Bank Indonesia amounted to Rp3,407,281 and Rp2,583,369 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 44.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality financial assets are disclosed in Note 44.

11. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

11. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

	31 Desember/*December 31*, 2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan*)/ Reklasifikasi/ *Additions*)/ Reclassifications*	Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya/nilai wajar					*Cost/fair value*
Tanah	537.559	3.042.845	543	3.579.861	*Land*
Bangunan	1.051.747	125.856	3.089	1.174.514	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.575.241	180.832	4.666	1.751.407	*Office furniture, fixtures and motor vehicle*
	3.164.547	3.349.533	8.298	6.505.782	
Aset dalam penyelesaian	72.740	88.464	109.654	51.550	*Constructions in progress*
	3.237.287	3.437.997	117.952	6.557.332	

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)*

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan*)/ Reklasifikasi/ *Additions*)/ Reclassifications*	Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Bangunan	392.181	52.444	403	444.222	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.291.705	166.958	4.932	1.453.731	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	1.683.886	219.402	5.335	1.897.953	
Nilai Buku Neto	**1.553.401**			**4.659.379**	***Net Book Value***

*) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi hak atas tanah sebesar Rp3.042.739 yang dibukukan oleh Bank pada tanggal 13 Juni 2016

*) *Included in additions of premises and equipment is gain on revaluation of landrights amounted to Rp3,042,739, recorded by Bank on June 13, 2016*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2015				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ Reklasifikasi/ *Additions/ Reclassifications*	Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya					*Cost*
Tanah	537.974	286	701	537.559	*Land*
Bangunan	991.617	60.698	568	1.051.747	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.448.684	151.407	24.850	1.575.241	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	2.978.275	212.391	26.119	3.164.547	
Aset dalam penyelesaian	22.607	54.797	4.664	72.740	*Constructions in progress*
	3.000.882	267.188	30.783	3.237.287	
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Bangunan	341.596	50.653	68	392.181	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.170.903	145.705	24.903	1.291.705	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	1.512.499	196.358	24.971	1.683.886	
Nilai Buku Neto	**1.488.383**			**1.553.401**	***Net Book Value***

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp219.402 dan Rp196.358 (Catatan 32).

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp219,402 and Rp196,358, for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively (Note 32).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp100.824 dan Rp352.749 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (tidak diaudit).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp100,824 and Rp352,749 as of December 31, 2016 and 2015 respectively (unaudited).

11. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian nilai wajar bangunan yang dimiliki oleh Bank menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena dianggap sebagai estimasi penggunaan tertinggi dan terbaik untuk mencerminkan nilai wajar. NJOP bangunan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing bernilai Rp491.438 dan Rp491.857.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.049.722 dan Rp2.495.418.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berkisar antara 60,00% sampai dengan 75,00%.

Pada tanggal 13 April 2016, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dari model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Valuation of buildings owned by Bank are using taxable value, because it is considered as the highest and best use estimation to reflect the fair value. Taxable value of buildings owned by Bank on December 31, 2016 and 2015 is amounted to Rp491,438 and Rp491,857, respectively.

Landrights is consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp2,049,722 and Rp2,495,418, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2016 and 2015 is approximately 60.00% to 75.00%.

On April 13, 2016, the Bank changed its accounting policy of land from cost model to revaluation model.

The valuations of land are performed by the external independent appraisers KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan. Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards, based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 13 April 2016 untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Information on the revaluation of land as at April 13, 2016 performed by Bank are as follows:

	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation*	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) Revaluation*	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	*Land*

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Fixed Asset Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounted to Rp3,042,739.

Penilaian kembali tanah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Revaluation of land for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.580.298.

If land is recorded on historical cost basis, the amount as of December 31, 2016, would be Rp3,580,298.

12. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

12. INTERESTS RECEIVABLE

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Kredit yang diberikan	1.760.054	1.443.799	*Loans*
Obligasi pemerintah	82.076	94.426	*Government bonds*
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	22.699	10.264	*Securities and placement with other Banks*
Total	**1.864.829**	**1.548.489**	***Total***

13. ASET LAIN-LAIN / *13. OTHER ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Tagihan kepada pihak ketiga	1.237.495	643.671	*Third party receivables*
Biaya dibayar di muka	545.949	457.543	*Prepaid expenses*
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 10g)	224.398	94.580	*Deferred expense for employee loan (Note 10g)*
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591	*Foreclosed collateral*
Uang muka pajak (Catatan 36)	10.652	210.261	*Prepaid taxes (Note 36)*
Aset *Istishna* dalam penyelesaian	812	2.800	*Istishna assets in progress*
Lainnya	92.181	67.153	*Others*
Total	**2.189.078**	**1.553.599**	***Total***

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia, tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, penagihan angsuran KPR dan tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama dan PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, receiving KPR's installments and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama and receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

14. LIABILITAS SEGERA / *14. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Kewajiban kepada pihak ketiga	1.778.551	1.571.802	*Third party payables*
Hutang pajak			*Taxes payable*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 29 (Catatan 36)	95.756	242.013	*Article 29 (Note 36)*
Pasal 4 (2)	80.730	80.272	*Article (4) 2*
Pasal 25	46.861	-	*Article 25*
Pajak pertambahan nilai	18.679	7.647	*Value added tax*
Pasal 21	17.236	28.244	*Article 21*
Bagi hasil yang belum dibagikan	23.347	16.665	*Undistributed profit sharing*
Deposito berjangka jatuh tempo	9.578	7.066	*Matured time deposits*
Bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah	5.960	4.415	*Interest on time deposits not collected by customers*
Lainnya	5.188	2.665	*Others*
Total	**2.081.886**	**1.960.789**	***Total***

15. GIRO

Akun ini terdiri dari:

15. DEMAND DEPOSITS

This account consists of:

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31*, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Pihak ketiga					*Third parties*
Rupiah		9.903.788		7.762.708	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	669.693	9.023	1.021.828	14.086	*United States Dollar*
		9.912.811		**7.776.794**	
Pihak berelasi (Catatan 41)					*Related parties (Note 41)*
Rupiah		35.932.912		23.591.426	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	24.642	332	16.170	223	*United States Dollar*
		35.933.244		**23.591.649**	
Total		**45.846.055**		**31.368.443**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp3.202.375 dan Rp2.216.283

As of December 31, 2016 and 2015, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounted to Rp3,202,375 and Rp2,216,283.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro Rupiah adalah sebesar 1,48% dan 2,40% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro Dollar Amerika Serikat adalah sebesar 0,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 1.48% and 2.40% for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 0.00% for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil (Catatan 10).

Demand deposits amounted to Nil as of December 31, 2016 and 2015, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 10).

16. TABUNGAN / *16. SAVINGS DEPOSITS*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan Batara	32.776.835	29.402.734	*Batara savings deposits*
Tabungan Batara *Mudharabah*	1.481.581	886.138	*Batara Mudharabah savings deposits*
Tabungan Batara *Wadiah*	567.792	468.809	*Batara Wadiah savings deposits*
Total	**34.826.208**	**30.757.681**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp2.049.373 dan Rp1.354.947.

As of December 31, 2016 and 2015, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp2,049,373 and Rp1,354,947.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan sebesar 4,22% dan 4,08% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The average annual interest rates for savings deposits are 4.22% dan 4.08%, for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp776.397 dan Rp322.799 (Catatan 10).

Savings deposits amounted to Rp776,397 and Rp322,799 as of December 31, 2016 and 2015, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

Tabungan Batara dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp388.290 dan Rp47.935 (Catatan 41).

As of December 31, 2016 and 2015, Batara savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp388,290 and Rp47,935, respectively (Note 41).

Tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.398 dan Rp3.938 (Catatan 41).

Wadiah and mudharabah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp2,398 and Rp3,938, respectively (Note 41).

17. DEPOSITO BERJANGKA / *17. TIME DEPOSITS*

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	6,01%	6,19%	*1 month*
3 bulan	6,24%	6,75%	*3 months*
6 bulan	6,09%	6,73%	*6 months*
12 bulan	6,35%	6,91%	*12 months*
24 bulan	6,94%	7,09%	*24 months*
Dolar Amerika Serikat	0,05%	0,05%	*United States Dollar*

17. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan) / *17. TIME DEPOSITS (continued)*

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu / *The details of time deposits by currency and contract period are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31*, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah					*Rupiah*
1 bulan		39.388.714		34.442.582	*1 month*
3 bulan		20.861.506		14.792.331	*3 months*
6 bulan		3.911.356		3.600.883	*6 months*
12 bulan		2.105.831		4.258.867	*12 months*
24 bulan		12.818.774		8.454.624	*24 months*
		79.086.181		65.549.287	
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
1 bulan	16.077.340	216.603	2.357.930	32.504	*1 month*
3 bulan	931.872	12.555	26.246	362	*3 months*
12 bulan	8.538	115	28.538	393	*12 months*
		229.273		33.259	
Total		**79.315.454**		**65.582.546**	***Total***

c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo / *Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	47.544.580	40.000.459	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	14.158.242	10.854.665	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	4.299.991	4.809.151	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	696.716	7.334.495	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan	12.386.652	2.550.517	*> 12 months ≤ 24 months*
	79.086.181	65.549.287	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	216.603	32.504	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.555	362	*> 1 month ≤ 3 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	115	393	*> 6 months ≤ 12 months*
	229.273	33.259	
Total	**79.315.454**	**65.582.546**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp9.778.501 dan Rp7.533.306.

As of December 31, 2016 and 2015, time deposits based on sharia banking principles amounted to Rp9,778,501 and Rp7,533,306, respectively.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.323.948 dan Rp1.143.680 (Catatan 10).

As of December 31, 2016 and 2015, time deposits amounted to Rp1,323,948 and Rp1,143,680, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

17. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp43.226.110 dan Rp33.856.609 (Catatan 41).

Deposito berjangka *Mudharabah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp4.141.326 dan Rp4.044.967 (Catatan 41).

17. TIME DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp43,226,110 and Rp33,856,609, respectively (Note 41).

As of December 31, 2016 and 2015, Mudharabah time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp4,141,326 and Rp4,044,967, respectively (Note 41).

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Giro	2,13%	1,51%	*Demand Deposit*
Deposito	6,00%	9,09%	*Time Deposits*
Inter-bank call money	4,70%	5,44%	*Inter-bank call money*

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	≤ 1 bulan/ *month*	**> 1 - 3 bulan/ *months***	**> 3 - 6 bulan/ *months***	**> 6 - 12 bulan/ *months***	**Total**	
Rupiah						*Rupiah*
Deposito	2.834.850	-	53.218	400	2.888.468	*Time deposits*
Giro	11.972	-	-	-	11.972	*Demand deposits*
Tabungan	2.295	-	-	-	2.295	*Savings deposits*
Inter-bank call money	750.000	-	-	-	750.000	*Inter-bank call money*
Total	**3.599.117**	**-**	**53.218**	**400**	**3.652.735**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2015					
	≤ 1 bulan/ *month*	**> 1 - 3 bulan/ *months***	**> 3 - 6 bulan/ *months***	**> 6 - 12 bulan/ *months***	**Total**	
Rupiah						*Rupiah*
Deposito	881.527	547.342	250	400	1.429.519	*Time deposits*
Giro	14.016	-	-	-	14.016	*Demand deposits*
Tabungan	2.663	-	-	-	2.663	*Savings deposits*
Inter-bank call money	275.000	-	-	-	275.000	*Inter-bank call money*
Total	**1.173.206**	**547.342**	**250**	**400**	**1.721.198**	***Total***

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp151.484 (Catatan 41).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan (Catatan 10).

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to Rp500,000 and Rp151,484 (Note 41).

As of December 31, 2016 and 2015, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral (Note 10).

19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

19. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

The details of securities sold under repurchase agreements are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2016

Nasabah/ *Customer*	Jenis Surat Berharga/ *Type of Securities*	Suku Bunga/ *Interest rate*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Commencement Date*	Tanggal Pembelian Kembali/ *Repurchase Date*	Harga Pembelian Kembali/ *Repurchase Price*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expense*	*Nilai* Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak ketiga/*Third parties*								
Deutsche Bank	VR0031	SPN + 1,25%	575.000	14 Januari/ *January 14, 2011*	22 Juli/ *July 20,* 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	SPN + 1,40%	500.000	18 Januari/ *January 18, 2011*	23 Juli/ *July 23,* 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	SPN + 0,95%	495.000	2 Maret/ *March 2,* 2011	23 Juli/ *July* 23, 2018	450.000	-	450.000
Total			**1.570.000**			**1.385.000**	**-**	**1.385.000**

31 Desember/*December 31,* 2015

Nasabah/ *Customer*	Jenis Surat Berharga/ *Type of Securities*	Suku Bunga/ *Interest rate*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Commencement Date*	Tanggal Pembelian Kembali/ *Repurchase Date*	Harga Pembelian Kembali/ *Repurchase Price*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expense*	*Nilai* Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak ketiga/*Third parties*								
Deutsche Bank	VR0031	SPN + 1,25%	575.000	14 Januari/ *January 14, 2011*	22 Juli/ *July 20,* 2020	500.000	-	500.000
Standard Chartered Bank	VR0031	SPN + 1,40%	500.000	18 Januari/ *January 18, 2011*	23 Juli/ *July 23,* 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	SPN + 0,95%	495.000	2 Maret/ *March 2,* 2011	23 Juli/ *July* 23, 2018	450.000	-	450.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0023	8,15%	900.000	25 September/ *September 25,* 2015	26 September/ *September 26,* 2016	724.091	-	724.091
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0027	8,15%	32.315	29 September/ *September 29,* 2015	26 September/ *September 26,* 2016	26.000	-	26.000
Total			**2.502.315**			**2.135.091**	**-**	**2.135.091**

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil (Catatan 41).

As of December 31, 2016 and 2015, securities sold under repurchase agreement with related parties amounted to nil, respectively (Note 41).

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *20. SECURITIES ISSUED*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.735 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	2.997.265	-	*Shelf Registration Bonds II Phase II Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,735 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.849 dan Rp4.794 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	2.996.151	2.995.206	*Shelf Registration Bonds II Phase I Net of unamortized issuance cost amounted to Rp3,849 and Rp4,794 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.704 dan Rp1.927 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.998.296	1.998.073	*Shelf Registration Bonds I Phase II Net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,704 and Rp1,927 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.524 dan Rp2.137 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.997.476	1.997.863	*Shelf Registration Bonds I Phase I Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,524 and Rp2,137 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Obligasi BTN XV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.006 dan Rp1.990 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.297.994	1.298.010	*BTN Bonds XV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,006 and Rp1,990 as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Obligasi BTN XIV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.767 dan Rp2.175 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.648.233	1.647.825	*BTN Bonds XIV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,767 and Rp2,175 as of December 31, 2016 and and 2015, respectively*
Obligasi BTN XII setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp383 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015	-	999.617	*BTN Bonds XII Net of unamortized issuance cost amounted to RpNil and Rp383 as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively*
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi diskonto masing-masing sebesar Rp61.505 dan Rp59.391 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.984.495	1.555.608	*Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Net of discounts amounted to Rp61,505 and Rp59,391 as of December 31 2016, and 2015, respectively*
Total	**14.919.910**	**12.492.202**	***Total***

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi

i. Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II Tahun 2016 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,20% dan 8,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2021. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II tahun 2016 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-297/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds

i. Shelf Registration Bonds II Phase II

The Bank issued Shelf Registration Bonds II Phase II of 2016 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.20%, and 8.75%, payable every three months for Shelf Registration Bonds II Phase II Series A and Series B, respectively, and will mature on August 30, 2019 and August 30, 2021, respectively. The issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II of 2016 became effective based on Letter No. S-297/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Commisioner Board of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2016, Shelf Registration Bonds II Phase II are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds II Phase II is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

ii. Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

ii. Shelf Registration Bonds II Phase I

The Bank issued Shelf Registration Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Shelf Registration Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Shelf Registration Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Commisioner Board of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2016 and 2015, Shelf Registration Bonds II Phase I are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. Shelf Registration Bonds I Phase II

The Bank issued Shelf Registration Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Shelf Registration Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2016, Shelf Registration Bonds I Phase II were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2015, Shelf Registration Bonds I Phase II were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

iv. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I Tahap I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iv. Shelf Registration Bonds I Phase I

The Bank issued Shelf Registration Bonds I Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on June 5, 2022. The issuance of Shelf Registration Bonds I Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2016, Shelf Registration Bonds I BTN Phase I were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2015, Shelf Registration Bonds I BTN Phase I were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

v. Obligasi BTN XV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun 2011 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XV adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

v. BTN Bonds XV

The Bank issued BTN Bonds XV of 2011 with a total nominal value of Rp1,300,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 9.50%, payable every three months and are due on June 28, 2021. The issuance of BTN Bonds XV of 2011 became effective based on Letter No. S-6928/BL/2011 dated June 21, 2011 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2016, BTN Bonds XV were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2015, BTN Bonds XV were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XV is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

vi. Obligasi BTN XIV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempopada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

vi. BTN Bonds XIV

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 10.25%, payable every three months and are due on June 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated June 3, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2016, BTN Bonds XIV are rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2015, BTN Bonds XIV are rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

vii. Obligasi BTN XII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII Tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi BTN XII telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

vii. BTN Bonds XII

The Bank issued BTN Bonds XII of 2006 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Surabaya Stock Exchange (BES) (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). The bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 12.75%, payable every three months. These bonds has mature on September 19, 2016. The issuance of BTN Bonds XII of 2006 became effective based on Letter No. S-1844/BL/2006 dated September 8, 2006 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditors' rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2015, BTN Bonds XII are rated idAA, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank CIMB Niaga Tbk.

As of December 31, 2016, BTN Bonds XII has been redeemed by the Bank on the maturity date.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Membagikan dividen kepada para pemegang saham, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp2.810 dan Rp2.839 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to perform the following:

- *Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.*
- *Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfill its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*
- *Distribute dividends to stockholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.*

For year ended December 31, 2016 and 2015, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp2,810 dan Rp2,839, respectively, recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has complied with the existing terms and conditions of the above trusteeship agreements.

For year ended December 31, 2016 and 2015, coupon payments to all bond holders have been made by the Bank on the respective interest payment due dates.

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits*

Pada tanggal 5 Desember 2014, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) I Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp625.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp280.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67%.

- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp45.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 November 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,59%.

- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 89,43%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp280.000, Seri B dengan nilai nominal Rp45.000 dan Seri C dengan nilai nominal Rp300.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 17 Februari 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) II tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2015.

Pada tanggal 26 Februari 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) I Tahap II dengan nilai pokok sebesar Rp1.005.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp470.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67%.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits

On December 5, 2014, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase I with principal value amounted to Rp625,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp280,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 6 (six) months period and has matured on June 4, 2015. The NCD were issued at 95.67%.*

- *B Series: NCD principal value amounted to Rp45,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 12 (twelve) months period and has matured on November 27, 2015. The NCD were issued at 91.59%.*

- *C Series: NCD principal value amounted to Rp300,000 with a fixed interest rate of 9.50% per annum, for 15 (fifteen) months period and has matured on February 26, 2016. The NCD were issued at 89.43%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase I Series A with a total nominal value of Rp280,000, Series B with a total nominal value Rp45,000 and Series C with a total nominal value Rp300,000, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

On February 17, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Phase I with principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 5 (five) months period and has matured on July 15, 2015.

On February 26, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase II with principal value amounted to Rp1,005,000 within 4 (four) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp470,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 6 (six) months period and has matured on August 26, 2015. The NCD were issued at 95.67%.*

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits* (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) I Tahap II dengan nilai pokok sebesar Rp1.005.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut: (lanjutan)

- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp85.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,59%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp10.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 89,43%.
- Seri D: Nilai pokok NCD sebesar Rp440.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% per tahun, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 87,32%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp470.000, Seri B dengan nilai nominal Rp85.000, Seri C dengan nilai nominal Rp10.000, dan Seri D dengan nilai nominal Rp440.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 30 April 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) II Tahap II dengan nilai pokok sebesar Rp1.110.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp330.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,74%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp620.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,57%.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits (continued)

On February 26, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase II with principal value amounted to Rp1,005,000 within 4 (four) series as follows: (continued)

- *B Series: NCD principal value amounted to Rp85,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 12 (twelve) months period and has matured on Febuary 18, 2016. The NCD were issued at 91.59%.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp10,000 with a fixed interest rate of 9.50% per annum, for 15 (fifteen) months period and has matured on May 19, 2016. The NCD were issued at 89.43%.*
- *D Series: NCD principal value amounted to Rp440,000 with a fixed interest rate of 9.70% per annum, for 18 (eighteen) months period and has matured on August 18, 2016. The NCD were issued at 87.32%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) I Phase II Series A with a total nominal value of Rp470,000, Series B with a total nominal value of Rp85,000, Series C with a total nominal value of Rp10,000, and Series D with a total nominal value of Rp440,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.

On April 30, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Phases II with principal value amounted to Rp1,110,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp330,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, for 6 (six) months period and has matured on October 30, 2015. The NCD were issued at 95.74%.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp620,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 12 (twelve) months period and has matured on May 2, 2016. The NCD were issued at 91.57%.*

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits (lanjutan)*

Pada tanggal 30 April 2015, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) II Tahap II dengan nilai pokok sebesar Rp1.110.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut: (lanjutan)

- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 87,62%.

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp330.000, Seri B dengan nilai nominal Rp620.000, dan Seri C dengan nominal Rp160.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 9 Juni 2016, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp740.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 9 September 2016.

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp1.115.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp440.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,19% per tahun, untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan telah jatuh tempo pada tanggal 3 November 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,23%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp275.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,47% per tahun, untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,40%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp400.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 92,58%.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits (continued)

On April 30, 2015, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Phases II with principal value amounted to Rp1,110,000 within 3 (three) series as follows: (continued)

- *C Series: NCD principal value amounted to Rp160,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 18 (eighteen) months period and has matured on October 31, 2016. The NCD were issued at 87.62%.*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) II Phase II Series A with a total nominal value of Rp330,000, Series B with a total nominal value of Rp620,000, an Series C with a total nominal value of Rp160,000 has been redeemed by the Bank on the maturity date.

On June 9, 2016, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase I 2016 with principal value amounted to Rp740,000 with a fixed interest rate of 6.85% per annum, for 3 (three) months period and has matured on September 9, 2016.

On August 5, 2016, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase II year 2016 with principal value amounted to Rp1,115,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp440,000 with a fixed interest rate of 7.19% per annum, for 90 (ninety) days period and has matured on November 3, 2016. The NCD were issued at 98.23%.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp275,000 with a fixed interest rate of 7.47% per annum, for 180 (one hundred and eighty) days period and will mature on February 1, 2017. The NCD were issued at 96.40%.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp400,000 with a fixed interest rate of 7.80% per annum, for 370 (three hundred and seventy) days period and will mature on August 10, 2017. The NCD were issued at 92.58%.*

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

b. *Negotiable Certificate of Deposits (lanjutan)*

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp440.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 30 November 2016, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp371.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp20.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,04% per tahun, untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,27%.

- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp351.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,26% per tahun, untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,50%.

Pada tanggal 29 Desember 2016, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap IV Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp315.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,10%.

- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp185.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,74% per tahun, untuk jangka waktu 186 (seratus delapan puluh enam) dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2017. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,15%.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) Tahap V Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,73% per tahun, untuk jangka waktu 185 (seratus delapan puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2017.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits (continued)

Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phasel I Series A with a total nominal value of Rp440,000, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

On November 30, 2016, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase III year 2016 with principal value amounted to Rp371,000 within 2 (two) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp20,000 with a fixed interest rate of 7.04% per annum, for 90 (ninety) days period and will mature on February 28, 2017. The NCD were issued at 98.27%.*

- *B Series: NCD principal value amounted to Rp351,000 with a fixed interest rate of 7.26% per annum, for 180 (one hundred and eighty) days period and will mature on May 29, 2017. The NCD were issued at 96.50%.*

On December 29, 2016, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase IV year 2016 with principal value amounted to Rp500,000 within 2 (two) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp315,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum, for 90 (ninety) days period and will mature on March 29, 2017. The NCD were issued at 98.10%.*

- *B Series: NCD principal value amounted to Rp185,000 with a fixed interest rate of 7.74% per annum, for 186 (one hundred and eighty six) days period and will mature on July 3, 2017. The NCD were issued at 96.15%.*

On December 30, 2016, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase V year 2016 with principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 7.73% per annum, for 185 (one hundred and eighty five) days period and will mature on July 3, 2017.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA / *21. FUND BORROWINGS*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Bank Central Asia Tbk	1.999.695	999.802	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	1.000.000	998.373	*PT Bank ICBC Indonesia*
	2.999.695	1.998.175	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.999.921	5.199.340	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia Rekening Dana Investasi	-	29.425	*Government of the Republic of Indonesia Investment Funds Account*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	499.788	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
	1.999.921	5.728.553	
Total	**4.999.616**	**7.726.728**	***Total***

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam perubahan atas Perjanjian Kredit No. 347/Add-KCK/2016 tanggal 7 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank memperoleh 2 (dua) fasilitas pinjaman sebagai berikut:

a. Pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun yang memiliki bunga tetap sebesar 7,60% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2017.

b. Pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun yang memiliki bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2017.

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the amendment of loan agreement No. 347/Add-KCK/2016 dated December 7, 2016. Based on the agreement, the Bank received 2 (two) loan facilities as follow:

a. Loan with plafond amounting to Rp1 trilion with fixed interest rate of 7.60% per annum and will mature on June 28, 2017.

b. Loan with plafond amounting to Rp1 trilion with fixed interest rate of 7.75% per annum and will mature on June 28, 2017.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank ICBC Indonesia yang ditujukan untuk pembiayaan proyek pemerintah "Program Satu Juta Rumah".

Berdasarkan perjanjian kredit no. 070/ICBC/TCT/BLF/IX/2015 tanggal 16 September 2015, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp 1 triliun. Jangka waktu perjanjian pinjaman adalah sampai dengan tanggal 16 September 2018.

Sesuai dengan perjanjian tersebut, jumlah maksimum untuk setiap penarikan adalah sebesar Rp250 miliar dengan suku bunga variabel yang akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulanan dan pinjaman akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tahun 2015, Bank telah melakukan 4 (empat) kali penarikan pinjaman dengan jumlah sebesar Rp1 triliun dengan bunga variabel awal sebesar 9% per tahun yang akan ditinjau ulang setiap 3 (tiga) bulanan. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Bank pada saat jatuh tempo di tahun 2016.

Pada bulan Desember 2016, Bank kembali melakukan 4 (empat) kali penarikan pinjaman dengan jumlah sebesar Rp1 triliun dengan bunga variabel awal sebesar 8% per tahun yang akan ditinjau ulang setiap 3 (tiga) bulanan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2017.

21. FUND BORROWINGS (continued)

b. Loan from PT Bank ICBC Indonesia

This account represents loan facility obtained from ICBC Bankwhich is intended to finance Housing Loans (KPR) without collateral from government named "Program Satu Juta Rumah".

Based on loan agreement no. 070/ICBC/TCT/BLF/IX/2015 dated September 16, 2015, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion. The maturity of loan agreement is on September 16, 2018.

Based on the agreement, the maximum amount for each withdrawal is amounting to Rp250 billion with variable interest rate subject for review every 3 (three) months and the loan will mature in 12 (twelve) months after the date of withdrawal.

In year 2015, the Bank has initiated 4 (four) loan withdrawals amounting to Rp1 trillion, with initial variable interest rate of 9% per annum which will be reviewed every 3 (three) months. The loan was fully paid by the Bank at maturity date in 2016.

In 2016, the Bank has initiated again 4 (four) loan withdrawals amounting to Rp1 trilion with initial variable interest rate of 8% per annum which will be reviewed every 3 (three) months. The loan will mature on December 28, 2017.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap III Tahun 2012

  Berdasarkan perjanjian nomor 022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 tanggal 2 Maret 2012, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,36% dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2017.

  Bank telah melakukan pelunasan dipercepat atas pinjaman tersebut pada tanggal 20 Juni 2016.

- Pinjaman SMF Tahap V Tahun 2012

  Berdasarkan perjanjian nomor 016/PP/SMF-BTN/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,85% dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan dipercepat atas pinjaman tersebut pada tanggal 20 Juni 2016.

- Pinjaman SMF Tahap VI Tahun 2012

  Berdasarkan perjanjian nomor 035/PP/SMF-BTN/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017.

- Pinjaman SMF Tahap VII Tahun 2013

  Berdasarkan perjanjian nomor 012/PP/SMF-BTN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,60% dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018.

  Bank telah melakukan pelunasan dipercepat atas pinjaman tersebut pada tanggal 20 Juni 2016.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- *SMF Loan Phases III Year 2012*

  Based on loan agreement no. 022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 dated March 2, 2012, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.36% and will mature on February 20, 2017.

  The Bank fully paid (early payment) the loan on June 20, 2016.

- *SMF Loan Phases V Year 2012*

  Based on loan agreement no. 016/PP/SMF-BTN/VI/2012 dated June 29, 2012, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.85% and will mature on June 20, 2022.

  The Bank fully paid (early payment) the loan on June 20, 2016.

- *SMF Loan Phases VI Year 2012*

  Based on loan agreement no. 035/PP/SMF-BTN/XII/2012 dated December 14, 2012, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.75% and will mature on December 14, 2017.

- *SMF Loan Phases VII Year 2013*

  Based on loan agreement no. 012/PP/SMF-BTN/VI/2013 dated June 24, 2013, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.60% and will mature on June 20, 2018.

  The Bank fully paid (early payment) the loan on June 20, 2016.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF Tahap V Tahun 2013

  Berdasarkan perjanjian dengan SMF tanggal 28 Juni 2013, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,50%.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2016.

- Pinjaman SMF Tahap XI Tahun 2015

  Berdasarkan perjanjian dengan SMF tanggal 1 Juni 2015, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,90%.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016.

- Pinjaman SMF Tahap XII Tahun 2015

  Berdasarkan perjanjian dengan SMF tanggal 21 September 2015, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,50%.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 21 September 2016.

- Pinjaman SMF Tahap XIII Tahun 2015

  Berdasarkan perjanjian nomor 032/PP/SMF-BTN/XI/2015 tanggal 9 November 2015, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp700 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,50%.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 9 November 2016.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreement with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Phases V Year 2013*

  Based on loan agreement with SMF dated June 28, 2013, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.50%.

  The Bank fully paid the loan at maturity date on June 20, 2016.

- *SMF Loan Phases XI Year 2015*

  Based on loan agreement with SMF dated June 1, 2015, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion with fixed interest rate of 8.90%.

  The Bank fully paid the loan at maturity date on May 28, 2016.

- *SMF Loan Phases XII Year 2015*

  Based on loan agreement with SMF dated September 21, 2015, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 8.50%.

  The Bank fully paid the loan at maturity date on September 21, 2016.

- *SMF Loan Phases XIII Year 2015*

  Based on loan agreement no. 032/PP/SMF-BTN/XI/2015 dated November 9, 2015, the Bank received loan with plafond amounting to Rp700 billion with fixed interest rate of 8.50%.

  The Bank fully paid the loan at maturity date on November 9, 2016.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF Tahap XIV Tahun 2016

  Berdasarkan perjanjian nomor 088/PP/SMF-BTN/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 9,15% dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2017.

- Pinjaman SMF Tahap XVII Tahun 2016

  Berdasarkan perjanjian nomor 042/PP/SMF-BTN/IX/2016 tanggal 26 September 2016, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2017.

d. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank BNI (Persero) Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank tanpa menggunakan agunan.

Berdasarkan perjanjian dengan BNI, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp500 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,90% per tahun.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2016.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.999.921 dan Rp5.728.553 (Catatan 41).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreement with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Phases XIV Year 2016*

  Based on loan agreement no. 088/PP/SMF-BTN/II/2016 dated February 19, 2016, the Bank received loan with plafond amounting to Rp1 trillion with fixed interest rate of 9.15% and will mature on February 19, 2017.

- *SMF Loan Phases XVII Year 2016*

  Based on loan agreement no. 042/PP/SMF-BTN/IX/2016 dated September 26, 2016, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 7.75% and will mature on September 26, 2017.

d. Loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

This account represents loan facility obtained from PT Bank BNI (Persero) Tbk which is intended to finance Housing Loans (KPR) without colateral.

Based on loan agreement with BNI, the Bank received loan with plafond amounting to Rp500 billion with fixed interest rate of 8.90% per annum.

The Bank fully paid the loan at maturity date on June 1, 2016.

e. Related parties transactions

As of December 31, 2016 and 2015, fund borrowings received from related parties amounted to Rp1,999,921 and Rp5,728,553, respectively (Note 41).

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

22. PINJAMAN SUBORDINASI / 22. SUBORDINATED LOAN

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2.999.118	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 9,00% dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan pencairan. Pencairan tahap ke-1 pada 30 Mei 2016 sebesar Rp1.500.000 dan tahap ke-2 pada 20 Juni 2016 sebesar Rp1.500.000. Jangka waktu Pinjaman Subordinasi adalah 5 tahun (60 bulan) yang akan jatuh tempo masing-masing pada 30 Mei 2021 dan 20 Juni 2021.

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 9.00% is done in 2 (two) steps credit disbursement. The first disbursement is done on May 30, 2016 in the amount of Rp1,500,000 and the second disbursement is on June 20, 2016 in the amount of Rp.1,500,000. The time period of the subordinated loan is 5 years (60 months) that will mature on May 30, 2021 and June 20, 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

As of December 31, 2016, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

23. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / 23. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Deposito berjangka	228.346	224.298	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	114.724	97.008	Securities issued
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	18.048	20.304	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	11.686	14.741	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	8.250	-	Subordinated loan
Simpanan dari bank lain	1.497	1.013	Deposits from other Banks
Total	**382.551**	**357.364**	***Total***

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI / 24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali transaksi berdasarkan prinsip syariah penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia (BI).

Bank assessed commitment and contingency transaction which have credit risk individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists, except transaction based on sharia principles, assessment was performed using a collectability guidance of Bank Indonesia (BI).

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sesuai BI pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar nihil.

The minimum estimated losses on commitments and contingencies based on BI amounted to nil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31*, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Lancar					*Current*
Rupiah					*Rupiah*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 37)		2.435.320		1.075.991	*Guarantees issued (Note 37)*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		713.441		577.291	*Unused loan facility (committed)*
		3.148.761		1.653.282	
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 37)					*Guarantees issued (Note 37)*
Dolar Amerika Serikat	21.739.051	292.879	27.857.144	384.010	*United States Dollar*
Dolar Singapura	209.648	1.952	-	-	*Singapore Dollar*
Yen Jepang		-	581.000	67	*Japanese Yen*
		294.831		384.077	
		3.443.592		**2.037.359**	
Dalam Perhatian Khusus					*Special mention*
Rupiah					*Rupiah*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		55.410		40.560	*Unused loan facility (committed)*
Total		**3.499.002**		**2.077.919**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik masing-masing sebesar RpNihil dan Rp8.350.

As of December 31, 2016 and 2015, there are transaction with related parties for unused loan facility amounted to RpNil and Rp8,350.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp568.502 dan Rp50.041

As of December 31, 2016 and 2015, guarantees issued from related parties amounted to Rp568,502 and Rp50,041, respectively.

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The changes in the estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2016*	31 Desember/ *December 31, 2015*	
Saldo awal tahun	-	7.198	*Balance at beginning of year*
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan	-	(7.198)	*Reversal during the year*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi yang perlu dibentuk oleh manajemen.

Based on management's judgment, there is no provision for estimated losses on commitments and contingencies should be provided by management.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 44.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 44.

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN / *25. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefits liabilities*
Bonus dan tantiem	382.646	371.871	*Bonuses and tantiem*
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 38b)	169.793	145.800	*Long term employee benefits (Note 38b)*
	552.439	517.671	
Liabilitas lain-lain			*Other liabilities*
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	3.694.385	3.248.879	*Developers' security deposits (liabilities to third party)*
Lainnya	382.586	69.327	*Others*
	4.076.971	3.318.206	
Total	**4.629.410**	**3.835.877**	***Total***

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which was not yet distributed at the end of the year.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation in the Bank.

26. EKUITAS / *26. EQUITY*

a. Modal Saham / *Capital Stock*

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2016				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)*	Jumlah nilai saham/ *Total value of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0,00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	*Government*
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	*Maryono (President Director)**
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	*Mansyur S. Nasution (Director)**

* Termasuk dalam program MESOP

* *Includes shares arising from the MESOP Programs*

26. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31, 2016*				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership***	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (lanjutan)					***Issued and Fully Paid Capital (continued)***
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.235.526.500	500	2.117.763	40,00%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**10.590.000.000**		**5.295.000**	**100,00%**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2015				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0,00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,04%	*Government*
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	*Maryono (President Director)**
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	4.922.650	500	2.461	0,05%	*Irman A Zahiruddin (Director)**
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	*Mansyur S. Nasution (Director)**
Sis Apik Wijayanto (Direktur)*	100.000	500	50	0,00%	*Sis Apik Wijayanto (Director)**
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.222.848.850	500	2.111.425	39,91%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**10.582.345.000**		**5.291.173**	**100,00%**	***Total***

* Termasuk dalam program MESOP

* *Includes shares arising from the MESOP Programs*

26. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

2016

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 pada tahun 2016 (Catatan 27), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 7.655.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah Penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 7.655.000 lembar saham atau sejumlah Rp3.827.

2015

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8, dan MESOP III tahap 5 dan 6, pada tahun 2015 (Catatan 27), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 14.649.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah Penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 14.649.000 lembar saham atau sejumlah Rp7.325.

b. Tambahan modal disetor - Neto

Pada tahun 2016, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7, tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp7.856 yang berasal dari pembelian 7.655.000 lembar saham MESOP III.

26. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

2016

With the exercise of the purchased stock options during phase 7 of MESOP III in 2016 (Note 27), the Bank issued 7,655,000 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and fully paid capital of the Bank by 7,655,000 shares or amounted to Rp3,827, respectively.

2015

With the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015 (Note 27), the Bank issued 14,649,000 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the issued and fully paid capital of the Bank by 14,649,000 shares or amounted to Rp7,325, respectively.

b. Additional paid-in capital - Net

In 2016, with the exercise of purchase stock options of MESOP III phases 7, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp7,856, as a result of the conversion of 7,655,000 of MESOP III.

26. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor – Neto (lanjutan)

Pada tahun 2015, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8, dan MESOP III tahap 5 dan 6, tahun 2015 (Catatan 27), tambahan modal disetor meningkat sebesar Rp18.462, yang berasal dari pembelian 14.582.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (rupiah penuh) per lembar untuk MESOP II dan 67.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (rupiah penuh) per lembar untuk MESOP III.

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2015

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
a. dividen sebesar Rp370.181
b. laba ditahan Rp1.480.726

Penggunaan Laba Tahun 2014

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
a. dividen sebesar Rp223.119
b. laba ditahan Rp892.473

27. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

26. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital – Net (continued)

In 2015, with the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015 (Note 27), the Bank's additional paid-in capital increased by Rp18,462 as a result of the conversion of 14,582,000 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II and 67,000 shares at an exercise price of Rp1,098.36 (full Rupiah) per share for MESOP III.

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2015

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2015 are as follow
a. dividends amounted to Rp370,181
b. retained earnings amounted to Rp1,480,726

Profit Distribution for Year 2014

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2014 are as follow
a. dividends amounted to Rp223,119
b. retained earnings amounted to Rp892,473

27. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, the shareholders approved the stock ownership of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and grant of option right to Management and Employees under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, subject to the following terms:

a. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares and a maximum of 4% of the issued and fully paid-up capital for the MESOP program.

27. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

b. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.

c. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.

d. Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.

e. Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.

f. Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

MESOP Tahap I

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap I adalah 145.234.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp855 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 29 Januari 2010. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2011.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap pertama yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2010 adalah sebesar Rp422,05 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 22 September 2010 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial.

27. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

b. Participants of the MESA and MESOP programs are registered employees as of December 31, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee.

c. Stock price discount in the MESA program amounted to 20% with a lockup period of six months. The discount will be charged as the Bank's expense.

d. The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years from the date of issuance with one year vesting period, which is the period the option is not exercisable.

e. MESA and MESOP stock allocations to management and employees is 5%:95% and should be implemented by considering equality, fairness, work achievement, work position, rights and obligation concept.

f. The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners to be reported to the stockholders and must comply with prevailing regulations.

MESOP Stage I

The number of shares, which will be issued during Stage I stock option is 145,234,500 shares with execution price of Rp855 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 29, 2010. The option has vesting period of one year until February 1, 2011.

The Bank determined that the execution period begins in 2011 until 2014 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option which was distributed on January 29, 2010 amounted to Rp422.05 (full Rupiah) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated September 22, 2010, using the Binomial option pricing model.

27. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

27. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

MESOP Tahap I (lanjutan)

MESOP Stage I (continued)

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

The fair value of the option is estimated using the following assumptions: (continued)

Suku bunga bebas risiko	7,8%	*Risk free rate*
Ekspektasi periode opsi	5 tahun/*years*	*Expected option period*
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham	50%	*Expected volatility rate*
Ekspektasi dividen yang dihasilkan	2%	*Expected dividend yield*
Tingkat pengunduran diri karyawan	1%	*Empoyee resignation rate*

MESOP Tahap II

MESOP Stage II

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap II adalah 108.925.000 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.297,44 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2011. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2012.

The number of shares, which will be issued during Stage II stock option is 108,925,000 shares with execution price of Rp1,297.44 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2011. The option has vesting period of one year until February 1, 2012.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

The Bank determined that the execution period begins in 2012 until 2015 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

Nilai wajar dari opsi saham tahap kedua yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp463,87 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial.

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2011 amounted to Rp463.87 (Rupiah full amount) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated October 12, 2011, using the Binomial option pricing model.

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

Suku bunga bebas risiko	7,975%	*Risk free rate*
Ekspektasi periode opsi	5 tahun/*years*	*Expected option period*
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham	50%	*Expected volatility rate*
Ekspektasi dividen yang dihasilkan	2%	*Expected dividend yield*
Tingkat pengunduran diri karyawan	1%	*Empoyee resignation rate*

MESOP Tahap III

MESOP Stage III

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham tahap III adalah 108.925.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.098,36 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2012. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2013.

The number of shares, which will be issued during Stage III, is 108,925,500 shares with execution price at Rp1,098.36 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2012. The option has vesting period of one year until February 1, 2013.

27. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

MESOP Tahap III (lanjutan)

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 adalah sebesar Rp427,93 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 28 Juni 2012 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial.

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

27. *MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)*

MESOP Stage III (continued)

The Bank determined that the execution period begins in 2013 until 2016 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2012, amounted to Rp427.93 (full Rupiah) per share, based on the valuation report by PT Towers Watson dated June 28, 2012, using the Binomial option pricing model.

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

Suku bunga bebas risiko	5,023%	*Risk free rate*
Ekspektasi periode opsi	5 tahun/*years*	*Expected option period*
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham	50%	*Expected volatility rate*
Ekspektasi dividen yang dihasilkan	2%	*Expected dividend yield*
Tingkat pengunduran diri karyawan	1%	*Employee resignation rate*

Harga rata-rata tertimbang saham adalah Rp1.676 dan Rp1.139 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2016 dan 2015.

The weighted average shares price is Rp1,676 and Rp1,139 for the year ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

Ringkasan MESOP dan mutasi selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The summary of the MESOP and its movements during the year ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2016*			
	Jumlah Opsi/*Number of Options*			
	MESOP Tahap I/ *Stage I*	**MESOP Tahap II/ *Stage II***	**MESOP Tahap III/ *Stage III***	
Opsi pada awal tahun	-	-	7.655.000	*Options outstanding at beginning of the year*
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	-	-	(7.655.000)	*Options exercised during the year*
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	**-**	**-**	**-**	***Options that can be exercised at end of the year***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Jumlah Opsi/*Number of Options*			
	MESOP Tahap I/ *Stage I*	**MESOP Tahap II/ *Stage II***	**MESOP Tahap III/ *Stage III***	
Opsi pada awal tahun	-	14.582.000	7.722.000	*Options outstanding at beginning of the year*
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	-	(14.582.000)	(67.000)	*Options exercised during the year*
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	**-**	**-**	**7.655.000**	***Options that can be exercised at end of the year***

28. PENDAPATAN BUNGA / *28. INTEREST INCOME*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Kredit yang diberikan dan piutang			***Loans and receivables***
Kredit yang diberikan	15.458.359	13.523.274	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	37.913	58.935	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.548	3.496	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	159.686	116.020	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	725	*Securities purchase under resale agreements*
Nilai wajar melalui Laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Obligasi pemerintah	15.141	5.914	*Government bonds*
Efek-efek	1.448	360	*Securities*
Tersedia untuk dijual			***Available-for-sale***
Obligasi pemerintah	340.620	382.072	*Government bonds*
Efek-efek	202.740	166.888	*Securities*
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Obligasi pemerintah	202.174	99.939	*Government bonds*
Efek-efek	81.843	97.513	*Securities*
Total	**16.501.472**	**14.455.136**	***Total***

29. BEBAN BUNGA / *29. INTEREST EXPENSE*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Deposito berjangka	4.960.884	4.794.544	*Time deposits*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.189.959	1.056.483	*Securities issued*
Tabungan	1.156.645	1.028.097	*Savings deposits*
Pinjaman yang diterima	566.644	517.087	*Fund borrowings*
Giro	517.040	300.984	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	181.797	154.607	*Deposits from other banks*
Pinjaman Subordinasi	150.868	-	*Subordinated Loan*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	146.838	221.782	*Securities sold under repurchase agreements*
Total	**8.870.675**	**8.073.584**	***Total***

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

30. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended 31 December*		
	2016	**2015**	
Jasa perbankan	114.807	87.549	*Bank services*
Jasa penagihan - *payment points*	7.599	5.252	*Collection services - payment points*
Lainnya	108.274	101.988	*Others*
Total	**230.680**	**194.789**	***Total***

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari *servicing fee*, provisi atas Garansi Bank yang diterbitkan, dan komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual.

Others consist mainly of servicing fees, provision from Guarantee Issued and commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers.

31. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

31. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan10)	705.188	898.718	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 10)*
Efek-efek (Catatan 8)	2.440	2.599	*Securities (Note 8)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(90)	1	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Properti terbengkalai	(7)	(310)	*Abandoned properties*
Total	**707.531**	**901.008**	***Total***

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Perbaikan dan pemeliharaan	723.567	568.877	*Repairs and maintenance*
Sewa	423.403	348.166	*Rent*
Promosi	401.474	416.690	*Promotion*
Listrik, air dan komunikasi	235.774	220.006	*Electricity, water and telecommunications*
Penyusutan (Catatan 11)	219.402	196.358	*Depreciation (Note 11)*
Beban kantor	188.080	156.780	*Office expenses*

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)

This account consists of: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Transportasi	107.601	99.620	*Transportation*
Outsourcing	61.033	73.394	*Outsourcing*
Jasa profesional	50.843	25.796	*Professional fees*
Lainnya	54.529	45.579	*Others*
Total	**2.465.706**	**2.151.266**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi sekuritisasi aset, dan premi asuransi untuk gedung, kas dalam perjalanan serta kas dalam khasanah.

Others consist mainly of securitization asset administration expense and insurance premium on the building, cash in transit and cash in vault.

33. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

33. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Gaji dan upah			*Salaries and wages*
Rutin	1.229.115	1.014.614	*Recurring*
Tidak rutin	706.998	688.849	*Non-recurring*
Pelatihan dan pengembangan	136.377	106.012	*Training and development*
Lainnya	49.163	119.871	*Others*
Total	**2.121.653**	**1.929.346**	***Total***

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

34. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

34. OTHER OPERATING EXPENSES – OTHERS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Imbalan atas jasa penagihan	71.387	66.697	*Fees for collection services*
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	35.699	30.936	*Loss on bad debt settlement*
Lainnya	406.815	82.200	*Others*
Total	**513.901**	**179.833**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, serta beban cadangan atas potensi risiko operasional (Catatan 49c).

Others consist mainly of representation and entertainment expense, and provision for potential operational risk (Note 49c).

35. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

35. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Pendapatan sewa gedung	165	212	*Building rental income equipment*
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(22.313)	8.069	*Other income (expense) - net*
Total	**(22.148)**	**8.281**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban denda administrasi dan beban bina lingkungan.

Others consist mainly of administration penalty expense and community development expense.

36. PERPAJAKAN

36. TAXATION

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Laba sebelum beban pajak	3.330.084	2.541.886	*Income before tax expense*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	514.112	350.540	*Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Penyisihan untuk imbalan kerja	9.108	19.507	*Provision for employee benefits*
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(10.144)	6.764	*Decrease (increase) in fair value of trading securities*
Kompensasi Berbasis Saham (MESOP)	(2.688)	(6.793)	*Employee stock option (MESOP)*
	510.388	370.018	
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Kenikmatan karyawan	182.461	138.999	*Employee welfare*
Beban kantor	26.457	27.472	*Office expense*
Sewa	47.850	23.127	*Rent*
Sumbangan	13.957	-	*Donations*
Perbaikan dan pemeliharaan	6.218	4.371	*Repairs and maintenance*
Dana sosial dan representasi	54.906	3.937	*Social funds and representation*
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.696	2.069	*Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes*
Lain	19.026	22.266	*Others*
Pendapatan sewa tarif final	(165)	(212)	*Rent income subject to final tax*
	353.406	222.029	
Taksiran penghasilan kena pajak	**4.193.878**	**3.133.933**	***Estimated taxable income***

36. PERPAJAKAN (lanjutan) / *36. TAXATION (continued)*

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Beban pajak penghasilan	838.776	783.483	*Income tax expense*
Pajak penghasilan Pasal 25	(743.020)	(541.470)	*Income tax - Article 25*
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 14)	95.756	242.013	*Corporate income tax payable (Note 14)*

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Bank kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal laporan ini, Bank belum melaporkan SPT tahun 2016 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Estimated taxable income in 2015 are consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax that reported by Bank to Tax Office (KPP). As of date of this report, Bank has not yet reported the 2016 Tax Return to the Tax Office.

b. Rincian pendapatan (beban) pajak tangguhan - neto dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

b. The details of deferred tax benefit (expense)-net computed by computing the effect of temporary differences on tax rate are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Pembentukan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	128.528	87.635	*Provision for allowance for impairment losses on financial and non-financial assets*
Penyisihan untuk imbalan kerja	2.277	4.877	*Provision for employee benefits*
Kenaikan (penurunan) nilai wajar efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(2.536)	1.691	*Increase (decrease) in fair value of trading securities*
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	(672)	(1.699)	*Employee stock option (MESOP)*
Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan - Neto	**127.597**	**92.504**	***Deferred Tax benefit (expense) - Net***

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

36. TAXATION (continued)

c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - dampak dari laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain			***Deferred tax assets (liabilities) - effect from statement of profit or loss and other comprehensive income***
Penyisihan untuk imbalan kerja	39.534	37.257	*Provision for employee benefits*
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	-	672	*Employee stock options (MESOP)*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	1.040	(127.488)	*Allowance for impairment losses on financial and non-financial assets*
(Kenaikan) penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(2.488)	48	*(Increase) decrease in fair value of trading securities*
	38.086	(89.511)	
Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan - efek dari ekuitas			***Deferred Tax Assets (Liabilities) - effect from equity***
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	38.522	44.563	*Unrealized loss in fair value of available for sale securities and government bonds*
Pengukuran kembali imbalan pasti	26.183	35.382	*Remeasurement of defined benefit obligation*
	64.705	79.945	
Aset/(Liabilitas) Pajak Tangguhan - Neto	**102.791**	**(9.566)**	***Deferred Tax Assets/ (Liabilities) - Net***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi Bank terhadap penghasilan atas manfaat pajak masa mendatang yang timbul dari perbedaan temporer akan dapat diakui di masa mendatang.

As of December 31, 2016 and 2015, management believes that the Bank's estimates of future taxable income indicate that the future income tax benefits arising from the temporary differences will be realized in the future.

d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016 and 2015, are as follows:

36. PERPAJAKAN (lanjutan) / *36. TAXATION (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal / *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Laba sebelum beban pajak	3.330.084	2.541.886	*Income before tax expense*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(666.017)	(635.472)	*Tax expense at the applicable tax rate*
Beda tetap	(70.681)	(55.507)	*Permanent differences*
Selisih Tarif Pajak	25.519	-	*Tax Tariff Difference*
Beban pajak	**(711.179)**	**(690.979)**	***Tax expense***

Pemeriksaan tahun pajak 2012 / *Assessment for fiscal year 2012*

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	**Denda/ *Penalty (Rp)***	
Tahun 2012			***Year 2012***
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92	*TAL Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92	*TAL Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91	*TAL Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81	*TAL Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103	*TAL Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94	*TAL Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99	*TAL Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118	*TAL Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114	*TAL Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110	*TAL Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120	*TAL Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146	*TAL Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14*
Total	**2.624**	**1.260**	***Total***

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884 (Catatan 13).

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter (TAL) of Tax Underpayment amounted to Rp3,884 (Note 13).

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses banding tersebut masih dalam proses.

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No.SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

36. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, The Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. As of date of this report, appeal process is still in process.

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result conducted to the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	Denda/ *Penalty (Rp)*	
Tahun 2013			***Year 2013***
SKPKB PPh Pasal 21			*TAL Article 21*
No.00001/243/13/511/16	64	30	*No.00001/243/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 23			*TAL Article 23*
No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1	*No.00060/203/13/511/16*
Total	**64,2**	**30,1**	**Total**

	Pokok/ *Principal (Rp)*	Denda/ *Penalty (Rp)*	
Tahun 2013			***Year 2013***
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00012/240/13/511/16	381	183	*No.00012/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00013/240/13/511/16	381	183	*No.00013/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00014/240/13/511/16	381	183	*No.00014/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00015/240/13/511/16	381	183	*No.00015/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00016/240/13/511/16	381	183	*No.00016/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00017/240/13/511/16	381	183	*No.00017/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00018/240/13/511/16	381	183	*No.00018/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00019/240/13/511/16	381	183	*No.00019/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00020/240/13/511/16	381	183	*No.00020/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00021/240/13/511/16	381	183	*No.00021/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00022/240/13/511/16	381	183	*No.00022/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*TAL Article 4 (2)*
No.00023/240/13/511/16	381	183	*No.00023/240/13/511/16*
Total	**4.572**	**2.196**	***Total***

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 13) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut.

Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 (2) tersebut di atas. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses keberatan masih dalam proses.

Pajak atas penilaian kembali aset tetap

Bank berdasarkan surat No.1195/S/DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan estimasi atas kenaikan nilai wajar tanah, Bank telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp40.035 pada tanggal 10 Desember 2015 (Catatan 13).

Kemudian berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Bank telah menyampaikan surat No.473/S/DIR/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal tambahan dokumen terkait proses penilaian kembali aset tetap dimana pada tanggal 20 Mei 2016, Bank telah melunasi sisa pembayaran pajak sebesar Rp35.713. Kemudian Kantor Pajak telah menerbitkan surat Keputusan DJP No.KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016 mengenai persetujuan atas permohonan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Bank.

36. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment. The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since Bank has agreed with the said TAL. However, in regard to the payment of the TAL of Article 4 (2) amounted to Rp6,768 has been charged as prepaid tax (Note 13) since Bank has not agreed with the said TAL.

On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 (2). As of date of this report, tax objection is still in process.

Tax for revaluation of fixed assets

The Bank based on the letter No. 1195/S/DIR/XII/2015 on December 8, 2015 have submitted an application regarding "revaluation of fixed assets for tax purposes on 2016 by tax payer that have not revalued fixed assets".

Based on the regulation No.191/PMK/010/2015 on October 15, 2015, from the Ministry of Finance, applications that are submitted up to December 31, 2015 will receive special treatment in the form of final tax rate of 3%. In connection with the estimated increase in fair value of land, the Bank have made tax payment amounting to Rp40,035 on December 10, 2015 (Note 13).

Based on the revaluation report issued Public Appraisal Company, the Bank has reported a letter No.473/S/DIR/V/2016 dated May 23, 2016 regarding additional data for assets revaluation, in which on May 20, 2016, the Bank has paid the remaining tax of Rp35,713. Furthermore, The Tax Office has issued a Decision Letter No.KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016 that has granted the the Bank's request for assets revaluation.

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

Surat Tagihan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak No. 90005/106/14/093/15 tanggal 29 Desember 2015, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp166.342 serta sanksi administrasi sebesar Rp26.615, sehubungan dengan koreksi atas saldo Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) minimum Bank Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa atas surat tagihan pajak tersebut tidak tepat dan perlakuannya di Bank sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 5 Januari 2016, Bank mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut. Untuk memenuhi syarat pembatalan STP tersebut, pada tanggal 30 Desember 2015 Bank telah membayar deposit sebesar Rp166.342 dan dicatat dalam akun aset lain-lain sebagai uang muka pajak (Catatan 13). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.00254/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 24 Februari 2016, Kantor Pajak telah mengabulkan permohonan Bank dan membatalkan STP tersebut serta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp166.342 kepada Bank pada bulan April 2016.

36. TAXATION (continued)

Tax Income Invoice Letter for fiscal year 2014

The Tax Office based on the tax invoice letter No. 90005/106/14/093/15 on December 29, 2015, have determined a deficit in income tax for 2014 amounting to Rp166,342 and administration fine amounting to Rp26,615, in relation to correction of provision of losses (PPAP). Management believes that the tax collection letter is not right and the Bank treatment is in accordance with the applicable tax legislation.

On January 5, 2016, Bank has submitted an appeal for the tax invoice. To qualify for the requirement in revoking the tax bill, on December 30, 2015 Bank have to pay a deposit amounting to Rp166,342 and it was recorded in other assets as prepaid taxes (Note 13). Based on Decision Letter No.KEP.00254/NKEB/WPJ.19/2016 dated February 24, 2016, the Tax Office has granted the Bank's appeal and revoked the Tax Collection Letter and accordingly paid back the tax overpayment of Rp166,342 to the Bank on April 2016.

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas Komitmen			*Commitments payable*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	16.446.763	13.209.613	*Unused loan facility commitments*
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan Kontinjensi			*Contingent receivables*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.954.131	1.908.418	*Interest income on non-performing assets*
Liabilitas Kontinjensi			*Contingent payables*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 24)	(2.730.151)	(1.460.068)	*Guarantees issued (Note 24)*
Kontinjensi - neto	**(776.020)**	**448.350**	***Contingencies - net***

38. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti ("Program Pensiun") dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 2,57% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 8,93%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 25 Januari 2017 dan 11 Januari 2016 dari aktuaris independen Bestama Aktuaria.

38. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan ("Pension Plan") and the right to pension benefits is given based on the established conditions which are stated in the regulations with consideration to the yearly gratuity factor over the working period and income on the Pension Fund. The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

Defined contribution plan

The Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within one year from the normal pension age (56 years old).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 2.57% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 8.93%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2016 and 2015 is based on the actuarial reports dated January 25, 2017 and January 11, 2016, of Bestama Aktuaria, an independent actuary.

38. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

38. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

	31 Desember/ *Desember 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	*Basic pensionable annual salary increase rate*
Tingkat mortalita (kematian)	GAM-1971	GAM-1971	*Mortality rate*
Tingkat cacat	1,00%	1,00%	*Disability rate*
Tingkat Diskonto			*Discount rate*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya - Penghargaan Masa Kerja	8,10%	8,90%	*Other long-term benefits - Gratuity*
Program Pesangon Pensiun - Selisih DPLK	8,40%	9,10%	*Retirement severance program - Difference from DPLK*
Masa Persiapan Pensiun	8,00%	8,80%	*Retirement Preparation Period*
Program Pensiun Imbalan Pasti	7,80%	8,80%	*Deferred Benefit Pension Plan*
Program Kesejahteraan	7,80%	8,80%	*Welfare Program*

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja

a. *Employee benefits expense*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	Program Lainnya/ *Other Benefits*	Total	
Biaya jasa kini	28.458	37.251	65.709	*Current service cost*
Iuran peserta	(7.362)	(7.575)	(14.937)	*Contribution from participant*
Beban (pendapatan) bunga neto	(564)	11.607	11.043	*Net interest (income) cost*
Kerugian aktuaria	-	8.735	8.735	*Actuarial loss*
Biaya Jasa Lalu	54.141	28.950	83.091	*Past service cost*
Beban imbalan kerja - neto	**74.673**	**78.968**	**153.641**	***Employee benefits expense - net***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	Program Lainnya/ *Other Benefits*	Total	
Biaya jasa kini	27.259	34.250	61.509	*Current service cost*
Iuran peserta	(7.570)	(7.767)	(15.337)	*Contribution from participant*
Beban (pendapatan) bunga neto	(591)	8.456	7.865	*Net interest (income) cost*
Kerugian aktuaria	-	22.635	22.635	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	45.458	-	45.458	*Past service cost*
Beban imbalan kerja - neto	**64.556**	**57.574**	**122.130**	***Employee benefits expense - net***

38. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *38. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja / *b. Movements of liabilities for employee benefits*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	-	145.800	145.800	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	74.673	78.969	153.642	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(40.750)	3.953	(36.797)	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran manfaat aktual	(33.923)	(58.929)	(92.852)	*Actual benefit paid*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 25)	**-**	**169.793**	**169.793**	***Balance liabilities at end of year (Note 25)***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	-	118.548	118.548	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	64.556	57.574	122.130	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(30.083)	24.607	(5.476)	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran manfaat aktual	(34.473)	(54.929)	(89.402)	*Actual benefit paid*
Saldo kewajiban pada akhir periode (Catatan 25)	-	**145.800**	**145.800**	***Balance liabilities at end of period (Note 25)***

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	1.198.417	709.589	1.908.006	*Balance at beginning of year*
Biaya jasa kini	28.458	37.251	65.709	*Current service cost*
Beban bunga	103.175	60.844	164.019	*Interest cost*
Biaya Jasa Lalu	54.141	28.950	83.091	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(80.398)	(75.040)	(155.438)	*Benefits paid*
Kerugian aktuaria	94.683	104.171	198.854	*Actuarial loss*
Saldo pada akhir tahun	**1.398.476**	**865.765**	**2.264.241**	***Balance at end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	1.148.605	753.888	1.902.493	*Balance at beginning of year*
Biaya jasa kini	27.259	34.250	61.509	*Current service cost*
Beban bunga	90.186	58.458	148.644	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	45.458	-	45.458	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(69.808)	(67.509)	(137.317)	*Benefits paid*
(Keuntungan) kerugian aktuaria	(43.283)	(69.498)	(112.781)	*Actuarial (gain) loss*
Saldo pada akhir tahun	**1.198.417**	**709.589**	**1.908.006**	***Balance at end of year***

38. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *38. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: / *d. The movements in the fair value of plan assets are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	1.497.692	670.720	2.168.412	*Balance at beginning of year*
Hasil pengembangan aset program	131.548	77.980	209.528	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	33.923	29.241	63.164	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	7.362	7.575	14.937	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(80.398)	(45.352)	(125.750)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**1.590.127**	**740.164**	**2.330.291**	***Balance at end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	1.437.731	642.870	2.080.601	*Balance at beginning of year*
Hasil pengembangan aset program	87.726	32.662	120.388	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	34.473	26.985	61.458	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	7.570	7.767	15.337	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(69.808)	(39.564)	(109.372)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**1.497.692**	**670.720**	**2.168.412**	***Balance at end of year***

e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto / *e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities*

	31 Desember/*December 31, 2016*			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	113.202	28.324	141.526	*Balance at beginning of year*
Kerugian aktuaris	94.683	95.435	190.118	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(1.472)	(19.332)	(20.804)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(133.961)	(72.150)	(206.111)	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**72.452**	**32.277**	**104.729**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo pada awal tahun	143.285	3.717	147.002	*Balance at beginning of year*
(Keuntungan) aktuaris	(43.283)	(92.133)	(135.416)	*Actuary (gain)*
Imbal hasil atas aset program	26.182	17.935	44.117	*Return on plan asset*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	(12.982)	98.805	85.823	*Change in effect of the assetceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir periode	**113.202**	**28.324**	**141.526**	***Balance at the end of period***

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan bank terdiri dari Surat Berharga Negara, Obligasi, Deposito Berjangka dan Saham. / *f. The asset program's investment portfolio that placed in the form of bank's financial instruments consist of government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.*

39. PELAPORAN SEGMEN / *39. SEGMENT REPORTING*

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha:

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember 2016/*December 31, 2016*				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	16.501.472	637.347	-	17.138.819	*Segment income*
Beban segmen	(8.961.627)	(13.647)	-	(8.975.274)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	7.539.845	623.700	-	8.163.545	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	1.241.506	41.316	-	1.282.822	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(598.296)	(109.235)	-	(707.531)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Beban operasional lainnya	(5.132.653)	(253.951)	-	(5.386.604)	*Other operating expenses*
Laba operasional	3.050.402	301.830	-	3.352.232	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(97.741)	75.593	-	(22.148)	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak	(711.179)	-	-	(711.179)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	**2.241.482**	**377.423**	**-**	**2.618.905**	***Income for the year***
Total aset	**198.269.727**	**18.125.394**	**(2.226.642)**	**214.168.479**	***Total assets***
Total liabilitas	**181.405.570**	**15.859.015**	**(2.226.642)**	**195.037.943**	***Total liabilities***

	31 Desember 2015/*December 31, 2015*				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	14.455.136	511.073	-	14.966.209	*Segment income*
Beban segmen	(8.143.967)	(11.166)	-	(8.155.133)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	6.311.169	499.907	-	6.811.076	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	1.070.040	36.486	-	1.106.526	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(718.428)	(182.580)	-	(901.008)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	7.198	-	7.198	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Beban operasional lainnya	(4.278.836)	(211.351)	-	(4.490.187)	*Other operating expenses*
Laba operasional	2.383.945	149.660	-	2.533.605	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(102.389)	110.670	-	8.281	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak	(690.979)	-	-	(690.979)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	**1.590.577**	**260.330**	**-**	**1.850.907**	***Income for the year***
Total aset	**159.835.661**	**13.268.941**	**(1.297.010)**	**171.807.592**	***Total assets***
Total liabilitas	**147.534.993**	**11.709.502**	**(1.297.010)**	**157.947.485**	***Total liabilities***

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta (angka penuh).

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million (full amount).

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar (angka penuh) dari semula Rp100 juta (angka penuh), efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 6,25% dan 7,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 0,75% dan 1,25% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp285.344 dan Rp229.549.

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion (full amount), from the previous Rp100 million (full amount), effective on the date stated above.

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2016 and 2015 were 6.25% and 7.50%, respectively, for deposits in Rupiah and 0.75% and 1.25% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp285,344 and Rp229,549 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015:

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Type of relationship*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Nature of related party transactions*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek/*Securities*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain dan Garansi yang diterbitkan / *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Deposits from Other Banks and Guarantees issued*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015 (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek dan Simpanan dari Bank Lain/ *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Deposits from Other Banks*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Efek-efek, Simpanan dari Bank Lain, dan Pinjaman yang Diterima / *Current accounts with other banks, Securities, Deposits from Other Banks, and Fund Borrowings*
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain dan Garansi yang diterbitkan / *Current accounts with other banks and Guarantees issued*
PT BRISyariah	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and other banks*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan / *Securities and Guarantees issued*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek dan Garansi yang diterbitkan/ *Securities and Guarantees issued*
Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Permodalan Nasional Madani	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ *Ownership of majority shares through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*	Pinjaman yang diterima, Obligasi Pemerintah dan Garansi yang diterbitkan / *Fund borrowings, Government Bonds and Guarantees issued*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015 (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi/ *Fund borrowings and Subordinated Loan*
PT PP Pracetak (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT HK Realtindo	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Jasamarga Bali Tol	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Inhutani IV (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Adhi Persada Properti	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Amarta Karya	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015 (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Hutama Karya	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan / *Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT PP Properti	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT PPA Finance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Barata Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Sucofindo (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Angkasa Pura (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015 (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Timah (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Pindad (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Antam (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat RI/ *Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2016 dan 2015 (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2016 and 2015 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
Manajemen Kunci/ Key Management	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ *Control on company's activities*	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah dan Simpanan dari Nasabah/ *Loans and sharia financing/receivables and Deposit from Customers*

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ ***December 31,* 2016**	**31 Desember/** ***December 31*, 2015**	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 6)	16.958	39.918	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	268	160.000	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Efek-efek (Catatan 8)	998.812	101.224	*Securities (Note 8)*
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	9.243.639	8.230.908	*Government bonds (Note 9)*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah* (Catatan 10)	2.037.903	1.355.393	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 10)*
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	**12.297.580**	**9.887.443**	***Total assets to related parties***
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(877)	(336)	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	**12.296.703**	**9.887.107**	***Total assets from related parties - net***
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	**5,74%**	**5,75%**	***Percentage of total assets from related parties to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 15,16 dan 17)	83.630.966	61.498.158	*Deposits from customers (Notes 15,16, and 17)*
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	500.000	151.484	*Deposits from other banks (Note 18)*
Pinjaman yang diterima (Catatan 21)	1.999.921	5.728.553	*Fund borrowings (Note 21)*
Pinjaman Subordinasi (Catatan 22)	2.999.118	-	*Subordinated Loan (Note 22)*
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	**89.130.005**	**67.378.195**	***Total liabilities to related parties***
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	**45,70%**	**42,66%**	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	Tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			***Interest income and income from profit sharing***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	22.332	5.757	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	42.454	17.079	*Securities*
Obligasi pemerintah	568.417	494.136	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah*	69.460	59.949	*Loans and sharia financing/ receivables*
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	**702.663**	**576.921**	***Total interest income and income from profit sharing from related parties***
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**4,09%**	**3,85%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***
Beban bunga dan bonus			***Interest and bonus expenses***
Simpanan dari nasabah	3.392.776	2.954.635	*Deposits from customers*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	6.560	*Securities sold under repurchase agreements*
Pinjaman yang diterima	357.222	392.863	*Fund borrowings*
Pinjaman Subordinasi	150.750	-	*Subordinated Loan*
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	**3.900.748**	**3.354.058**	***Total interest and bonus expenses from related parties***
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	**43,46%**	**41,13%**	***Percentage to total interest and bonus expense***

	31 Desember/ *December 31,* 2016	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 24)			***Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 24)***
Garansi yang diterbitkan	568.502	50.041	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (commited)	-	8.350	*Unused loan facility (committed)*
Total Komitmen dan Kontinjensi Rekening Administratif dari pihak berelasi	**568.502**	**58.391**	***Total Commitments and Contingencies in Administrative Accounts from related parties***
Presentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	**16,25%**	**2,81%**	***Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts***

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci:

b. Transactions with key management personnel:

	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 10)	83.535	48.422	*Loan and sharia financing/receivables (Note 10)*
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	-	-	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dari manajemen kunci	**83.535**	**48.422**	***Total loan and sharia financing/ receivabless from key management personnel***
Persentase terhadap total aset	**0,04%**	**0,03%**	***Percentage to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 15,16 dan 17)	60.402	46.940	*Deposits from customers (Notes 15,16, and 17)*
Kompensasi karyawan kunci (Catatan 38)	115.320	95.304	*Compensation of key employees (Notes 38)*
Total liabilitas dari manajemen kunci	**175.722**	**142.244**	***Total liabilities from key management personnel***
Persentase terhadap total liabilitas	**0,09%**	**0,09%**	***Percentage to total liabilities***

	Tahun yang berakhir pada tanggal *31 Desember/Year Ended December 31*		
	2016	**2015**	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			***Interest income and income from profit sharing***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah*	3.757	3.948	*Loans and sharia financing/ receivables*
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**0,02%**	**0,03%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***
Beban bunga dan bonus			***Interest and bonus expenses***
Simpanan dari nasabah	2.172	1.548	*Deposits from customers*
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	**0,02%**	**0,02%**	***Percentage to total interest and bonus expense***

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan):

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transactions with key management personnel (continued):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31		
	2016	2015	
Beban gaji dan tunjangan:			***Salaries and employee benefits:***
Direksi (Catatan 1f)	52.767	37.216	*Board of Directors (Note 1f)*
Dewan Komisaris (Catatan 1f)	20.785	16.292	*Board of Commissioners (Note 1f)*
Karyawan Kunci	86.922	146.123	*Key Employees*
Total	**160.474**	**199.631**	***Total***
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	**7,56%**	**10,35%**	***Percentage to total salaries and employee benefits***

42. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

42. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/ PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Aset/ ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/** ***Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position Administrative accounts*
Dolar Amerika Serikat	585.126	544.433	40.693	*United States Dollar*
Euro Eropa	80	-	80	*European Euro*
Yen Jepang	6.211	8	6.203	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	48	-	48	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Singapura	10.642	-	10.642	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	224	-	224	*Australian Dollar*
Renminbi	255	-	255	Renminbi
Ringgit Malaysia	15	-	15	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	246	-	246	*Saudi Riyal*
			58.406	
Modal (Catatan 43)			**20.219.637**	***Capital (Note 43)***
Rasio PDN			**0,29%**	***NOP ratio***

42. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

42. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Net Open Position (continued)

The Bank's NOP as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2015			
	Aset/ ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/** ***Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan				*Statement of financial position*
Rekening administratif				*Administrative accounts*
Dolar Amerika Serikat	663.008	442.226	220.782	*United States Dollar*
Euro Eropa	9.876	191	9.685	*EuropeanEuro*
Yen Jepang	9.244	-	9.244	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	3	-	3	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Singapura	1.579	-	1.579	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	275	-	275	*Australian Dollar*
Renminbi	329	-	329	*Renminbi*
Dolar Hongkong	1	-	1	*Hongkong Dollar*
Ringgit Malaysia	21	13	8	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	47	-	47	*Saudi Riyal*
			241.953	
Modal (Catatan 43)			**13.893.026**	***Capital (Note 43)***
Rasio PDN			**1,74%**	***NOP ratio***

43. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

CAR pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti (modal inti utama/Common Equity Tier 1 dan modal inti tambahan) dan modal pelengkap.

43. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2016 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 on date September 22, 2016 concerning of Change regulation No. 11/POJK.03/2016 on date January 29, 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

CAR on December 31, 2015 was calculated based on Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 concerning of the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks Banks where capital for credit risk consist of core capital (main core capital main / Common Equity Tier 1 capital and additional core capital) and supplementary capital.

43. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Sejak tanggal 21 Agustus 2015, Bank telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa bobot risiko kredit beragunan rumah tinggal paling rendah sebesar 35% untuk kredit konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal (KPR) atau apartemen (KPA) atau kredit konsumsi dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen dengan syarat tertentu, atau paling rendah sebesar 20% untuk KPR yang merupakan program Pemerintah Indonesia dengan syarat tertentu.

Selain itu, bobot risiko kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu *low to moderate dan satisfactory*, maka CAR minimum per 31 Desember 2016 dan 2015 ditetapkan masing-masing sebesar 9%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

43. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

Since August 21, 2015, the Bank has implemented Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 11/POJK.03/2015 concerning prudential provisions in the Framework of the National Economic Stimulus for Commercial Banks.

The regulation stipulates that the weight of risk for credit backed residences is on minimum of 35% for consumer credit in relation with the possession of house (KPR) or an apartment (KPA) or consumer loan with collateral such as house or apartment with certain conditions, or at least by 20% for a mortgage which is a program of the Government of Indonesia with certain conditions.

In addition, the risk weight of credit to Small Medium Enterprise (SME) is guaranteed by a guarantee institution or BUMD credit insurance status of enterprises is set at 50% as long as it is fulfilling the requirement throughout meet the requirements set.

Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 is valid up to August 21, 2017.

Based on the risk profile as of December 31, 2016 and 2015, respectively, which are both low to moderate and satisfactory, the minimum CAR for December 31, 2016 and 2015, by 9% to less, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the practical accounting rules differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia for the capital adequacy ratio.

43. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

43. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

Perhitungan CAR Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2016 and 2015 follows:

		31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Modal Inti	a	16.443.159	12.171.623	*Core Capital*
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	b	3.776.478	1.721.403	*Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)*
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	c	-	-	*Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk*
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	**20.219.637**	**13.893.026**	***Total Core Capital and Supplementary Capital***
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	e=c+d	20.219.637	13.893.026	*Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk*
Penyertaan	f	-	-	*Investment*
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	g=d-f	20.219.637	13.893.026	*Total Capital for Credit Risk*
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	h=e-f	20.219.637	13.893.026	*Total Capital for Credit Risk and Market Risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	i	86.188.782	70.474.182	*Risk Weighted Assets Credit Risk*
ATMR untuk Risiko Pasar	j	343.820	222.737	*Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk*
ATMR untuk risiko operasional	k	12.899.251	11.185.168	*Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk*
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	l=i+k	99.088.033	81.659.350	*Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Operational Risk*
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	m=i+j+k	99.431.853	81.882.087	*(RWA) for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	n=g/l	20,41%	17,01%	*CAR for Credit Risk and Operational Risk*
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	o=h/m	20,34%	16,97%	*CAR for Credit Risk Operational Risk and Market Risk*
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	*Minimum CAR*

44. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI *rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional. Penggunaan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk risiko kredit dan setiap triwulan untuk risiko likuiditas. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. Saat ini, *stress test* yang dilakukan oleh bank difokuskan pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar (termasuk di dalamnya risiko suku bunga) dan risiko likuiditas.

44. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portofolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SE BI No.13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by Using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been doing the calculation of minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SE BI No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Basic Indicator Approach (BIA) and the Standardized Model for market risk are in accordance with SE BI No. 9/33/DPNP dated December 18, 2007 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks, which was changed with SE BI No. 14/21/DPNP dated July 18, 2012.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario as set forth in the Risk Management Policy Manual (RMPM), which is being carried out at least once a year for credit risk and quarterly for liquidity risk. In addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole, the Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau catastrophy. Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) guna meningkatkan fungsi *risk control system minimal* 1 (satu) tahun sekali. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan rencana implementasi Basel III Bank telah melakukan persiapan penerapan kerangka kerja Basel III dan terlibat di dalam *working group* masing-masing jenis risiko di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

44. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. The Bank also conducts a review of the RMPM at least once a year in order to improve the function of the risk control system. Henceforth, with regard to the implementation of Basel III, the Bank has a plan to implement the Basel III framework by involving in each types of risk working group in coordination with the Financial Services Authority.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the RMPM, if necessary.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Strategic Director*. Struktur organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Risk Officer Coordination (ROC) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Risk Officer dalam melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Bank. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko, ROC dibantu oleh *Risk Superintendent* (RS) pada tingkat Divisi, *Regional Risk Superintendent* (RRS) pada tingkat Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer* (BRO) di Kantor Cabang di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination* (ROC) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division* (RMD).

RS dan RRS merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dan Kantor Wilayah (*Regional Office*) dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi dan Kantor Wilayah dimana RS dan RSS bertugas. BRO adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Division

Risk Management Division (RMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Risk, Compliance & Strategic Director. The organizational structure of the RMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department and Risk Officer Coordination Department.

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. Credit Risk Management Department is responsible for credit risk management, while Operational Risk Management Department is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputational risk and legal risk. The Department Head is assisted by Policy & Procedure Unit and Assessment & Measurement Unit.

Risk Officer Coordination (ROC) has a responsiblity in coordinating and supervising the Risk Officer during monitoring the implementation of risk management in the Bank. In performing risk monitoring functions, ROC assisted by the Risk Superintendent (RS) at the Division level, the Regional Risk Superintendent (RRS) at the level of the Regional Office and Branch Risk Officer (BRO) in the Branch Office under the coordination of Risk Coordination Officer (ROC) which is directly responsible to the Head of Risk Management Division (RMD).

RS and RRS is directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management in the Division and Regional Office, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the Division and Regional office where the RS and RSS is assigned. The BRO is also directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management at branch offices, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the branch office where the BRO is assigned.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, RMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Selanjutnya berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank triwulan IV tahun 2015 dan 2014 berada pada peringkat low to moderate, yang tercermin dari tingkat risiko inheren moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank,industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Policies and Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with PBI No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on Risk Management for Commercial Banks, RMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on PBI No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 and SE BI No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

In general, the Bank's composite risk profile during the fourth quarter of 2015 and 2014 is low to moderate, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD, RS, RRS dan BRO untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (non-housing related).

(i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by RMD, RS, RRS, and BRO to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

(i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya: (lanjutan)

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

a) *Physical collateral,* berupa tanah dan bangunan.

b) *Financial collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.

c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (coverage ratio).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (first way out) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation: (continued)

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

a) Physical collateral, such as land and buildings.

b) Financial collateral, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.

c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

44. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2016 and 2015. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/*December 31,* 2016

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others***)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	-	-	-	-	10.697.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	316.097	72	5.376	852	391	322.788	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17.581.350	-	-	-	-	17.581.350	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	4.186.141	-	-	-	-	4.186.141	*Securities*
Obligasi Pemerintah	9.243.639	-	-	-	-	9.243.639	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	49.123.438	30.275.261	18.619.391	19.941.294	117.959.384	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.614.168	3.912.525	1.412.244	2.478.207	11.417.144	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	16.055.004	6.448.540	2.824.257	3.421.198	28.748.999	*Working capital*
Investasi	-	2.479.524	1.500.348	238.852	635.072	4.853.796	*Investment*
Sindikasi	-	78.801	-	-	-	78.801	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	628.853	341.231	161.678	179.333	1.311.095	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	44.620	16.553	9.108	6.881	77.162	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	104.775	704.366	454.542	254.797	346.349	1.864.829	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.194.703	19.326	6.268	7.228	9.970	1.237.495	*Other assets*)*
Total kotor	**43.324.083**	**72.748.172**	**42.960.644**	**23.528.407**	**27.018.695**	**209.580.001**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2.131.957)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**207.448.044**	***Net***

31 Desember/*December 31,* 2015

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others***)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	-	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	199.985	72	1.975	540	361	202.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.539.477	300.000	-	-	-	7.839.477	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.819.562	-	-	-	-	1.819.562	*Securities*
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	-	-	8.230.908	*Government bonds*

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third party receivables
**) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/*December 31,* 2015

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others***)*	Total	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	41.164.962	25.203.000	15.009.077	16.429.022	97.806.061	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.516.193	3.854.528	1.443.926	2.512.222	11.326.869	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	12.829.364	5.728.241	2.847.855	3.267.153	24.672.613	*Working capital*
Investasi	-	2.037.214	1.225.868	332.962	742.373	4.338.417	*Investment*
Sindikasi	-	79.268	-	-	-	79.268	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	319.742	181.765	96.983	98.871	697.361	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	19.694	7.377	3.512	4.632	35.215	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	104.690	593.297	372.654	205.139	272.709	1.548.489	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	608.346	9.683	17.895	2.816	4.931	643.671	*Other assets*)*
Total kotor	**29.489.319**	**60.869.489**	**36.593.303**	**19.942.810**	**23.332.274**	**170.227.195**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2.064.151)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**168.163.044**	***Net***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third party receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2016

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others*)*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	566.221	105.844	20.614	76.172	768.851	*Unused loan facilities* **)
Garansi yang diterbitkan	-	2.547.725	106.995	50.726	24.705	2.730.151	*Guarantees issued*
Total	**-**	**3.113.946**	**212.839**	**71.340**	**100.877**	**3.499.002**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2015

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others*)*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	412.026	101.576	81.348	22.901	617.851	*Unused loan facilities* **)
Garansi yang diterbitkan	-	1.149.330	218.680	32.070	59.988	1.460.068	*Guarantees issued*
Total	**-**	**1.561.356**	**320.256**	**113.418**	**82.889**	**2.077.919**	***Total***

*) Lain-lain Terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua*
**) *Only for committed unused loan facility*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

44. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2016 and 2015:

	31 Desember/*December 31,* 2016						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	-	-	-	-	10.697.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	322.788	-	-	-	322.788	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17.581.082	268	-	-	-	17.581.350	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2.022.752	1.580.341	524.891	58.157	-	4.186.141	*Securities*
Obligasi Pemerintah	9.243.639	-	-	-	-	9.243.639	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	508.601	488.645	29.287.941	134.161.194	164.446.381	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan akan diterima	82.716	13.707	8.785	399.385	1.360.236	1.864.829	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	353.939	206.181	5.293	507.560	164.522	1.237.495	*Other assets*)*
Total kotor	**39.981.506**	**2.631.886**	**1.027.614**	**30.253.043**	**135.685.952**	**209.580.001**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2.131.957)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**207.448.044**	***Net***

	31 Desember/*December 31,* 2015						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	-	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	202.933	-	-	-	202.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.529.477	310.000	-	-	-	7.839.477	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.110.691	153.551	467.095	88.225	-	1.819.562	*Securities*
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	-	-	8.230.908	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	14.358	464.489	26.427.249	112.049.708	138.955.804	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan akan diterima	94.426	2.522	7.909	239.483	1.204.149	1.548.489	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.675	180.685	-	370.760	90.551	643.671	*Other assets*)*
Total kotor	**27.953.528**	**864.049**	**939.493**	**27.125.717**	**113.344.408**	**170.227.195**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(2.064.151)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**168.163.044**	***Net***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

44. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2016 and 2015, are as follows :

	31 Desember/*December 31,* 2016						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*)*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	16.283	-	752.568	768.851	*Unused loan facilities***)*
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.730.151	-	2.730.151	*Guarantees issued*
Total	**-**	**-**	**16.283**	**2.730.151**	**752.568**	**3.499.002**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2015						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*)*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	200	549.015	68.636	617.851	*Unused loan facilities***)*
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	1.460.068	-	1.460.068	*Guarantees issued*
Total	**-**	**-**	**200**	**2.009.083**	**68.636**	**2.077.919**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
**) *Only for committed unused loan facility*

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Current Accounts with Other Banks

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
Rupiah	117.971	-	117.971	*Rupiah*
Mata Uang Asing	203.337	1.480	204.817	*Foreign currencies*
Total	**321.308**	**1.480**	**322.788**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.482)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**321.306**	***Net***

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

1. Current Accounts with Other Banks (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	77.075	-	77.075	*Rupiah*
Mata Uang Asing	124.286	1.572	125.858	*Foreign currencies*
Total	**201.361**	**1.572**	**202.933**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.572)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**201.361**	***Net***

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

   Per 31 Desember 2016 dan 2015, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

2. Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2016 and 2015, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Efek-efek

3. Securities

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Sertifikat Bank Indonesia	1.179.355	-	1.179.355	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	843.397	-	843.397	*Deposits Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	806.775	7.018	813.793	*Bonds*
Negotiable certificate of deposits	645.198	-	645.198	*Negotiable certificate of deposits*
Reksadana	82.553	-	82.553	*Mutual Fund*
Medium Term Notes	199.670	-	199.670	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	422.175	-	422.175	*Residential Mortgage-Backed Securities*
Total	**4.179.123**	**7.018**	**4.186.141**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(14.441)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**4.171.700**	***Net***

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Efek-efek (lanjutan)

3. Securities (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2015			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Sertifikat Bank Indonesia	815.977	-	815.977	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	294.714	-	294.714	*Deposits Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	205.494	7.018	212.512	*Bonds*
Negotiable certificate of deposits	49.281	-	49.281	*Negotiable certificate of deposits*
Reksadana	82.577	-	82.577	*Mutual Fund*
Efek Beragunan Aset	364.501	-	364.501	*Residential Mortgage-Backed Securities*
Total	**1.812.544**	**7.018**	**1.819.562**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(12.001)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**1.807.561**	***Net***

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2016 dan 2015, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

4. Administrative account

As of December 31, 2016 and 2015, these administrative account items are not impaired individually as well as collectively.

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Per 31 Desember 2016 dan 2015, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 55 dan Peraturan Bank Indonesia (POJK).

5. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2016 and 2015, these financial assets are impaired subject to individual and collective impairment according to SFAS No. 55 and Bank Indonesia regulations (POJK).

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (lanjutan)

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

5. Loans and sharia financing/receivables (continued)

Loans and sharia financing/receivables, as of December 31, 2016 and 2015, are summarized as follows:

31 Desember/*December 31,* 2016

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Perumahan	109.285.897	22.639.567	17.013.930	202.783	149.142.177	*Property*
Konstruksi	5.285.070	345.898	733.849	43.613	6.408.430	*Construction*
Jasa-jasa dunia usaha	3.825.560	152.475	861.408	-	4.839.443	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	555.530	234.821	682.485	211.546	1.684.382	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa-jasa sosial	716.810	57.155	92.977	25.154	892.096	*Social services*
Manufaktur	98.968	25.228	54.447	23.800	202.443	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	66.204	14.070	69.648	23.556	173.478	*Transportation, warehousing and communications*
Pertanian	15.799	11.365	28.530	26.794	82.488	*Farming*
Pertambangan	124.843	19.931	49.869	6.298	200.941	*Mining*
Listrik, gas dan air	22.383	15.283	315	-	37.981	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	589.827	63.734	128.961	-	782.522	*Others*
Total	**120.586.891**	**23.579.527**	**19.716.419**	**563.544**	**164.446.381**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(2.116.034)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**162.330.347**	***Net***

31 Desember/*December 31,* 2015

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Perumahan	83.932.421	23.388.014	17.604.110	291.207	125.215.752	*Property*
Konstruksi	1.674.084	1.966.805	718.635	47.218	4.406.742	*Construction*
Jasa-jasa dunia usaha	801.800	2.260.256	620.141	36.638	3.718.835	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	1.142.663	332.576	586.853	135.268	2.197.360	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa-jasa sosial	619.218	88.559	67.299	30.414	805.490	*Social services*
Manufaktur	165.583	27.691	68.001	19.135	280.410	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	70.045	45.514	78.993	4.938	199.490	*Transportation, warehousing and communications*
Pertanian	28.994	16.181	57.080	26.794	129.049	*Farming*
Pertambangan	50.899	14.744	56.597	10.692	132.932	*Mining*
Listrik, gas dan air	8.507	8.059	8.996	-	25.562	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	1.589.898	64.319	188.060	1.905	1.844.182	*Others*
Total	**90.084.112**	**28.212.718**	**20.054.765**	**604.209**	**138.955.804**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(2.050.578)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**136.905.226**	***Net***

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

(iv) *The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):*

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat Tinggi/ *High Grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Efek	548.521	-	-	-	548.521	*Securities*
Obligasi Pemerintah	1.130.579	-	-	-	1.130.579	*Government bonds*
Tersedia untuk dijual						***Available for sale***
Efek	3.334.425	-	-	5.018	3.339.443	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.076.450	-	-		5.076.450	*Government bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo						***Held to maturity***
Efek	296.177	-	-	2.000	298.177	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.036.610	-	-	-	3.036.610	*Government bonds*
Kredit dan piutang						***Loans and receivables***
Giro pada bank Indonesia	10.697.378	-	-	-	10.697.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	321.308	-	-	1.480	322.788	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17.581.350	-	-	-	17.581.350	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	85.081.655	19.695.034	13.182.695	-	117.959.384	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	8.574.432	1.499.758	1.342.954	-	11.417.144	*Non-housing loan*
Modal kerja	22.436.645	1.912.886	4.113.642	285.826	28.748.999	*Working capital*
Investasi	3.035.062	468.580	1.072.436	277.718	4.853.796	*Investment*
Sindikasi	78.801	-	-	-	78.801	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.303.244	3.159	4.692	-	1.311.095	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	77.052	110	-	-	77.162	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	1.864.829	-	-	-	1.864.829	*Interests receivable*
Aset lain-lain*)	-	1.237.495	-	-	1.237.495	*Other assets*)
Total	**164.474.518**	**24.817.022**	**19.716.419**	**572.042**	**209.580.001**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(2.131.957)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**207.448.044**	***Net***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) *Consists of third party receivables*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

44. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2015					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat Tinggi/ *High Grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Efek	-	-	-	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	19.267	-	-	-	19.267	*Government bonds*
Tersedia untuk dijual						***Available for sale***
Efek	1.456.034	-	-	5.018	1.461.052	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.111.280	-	-	-	5.111.280	*Government bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo						***Held to maturity***
Efek	356.510	-	-	2.000	358.510	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.100.361	-	-	-	3.100.361	*Government bonds*
Kredit dan piutang						***Loans and receivables***
Giro pada bank Indonesia	10.986.351	-	-	-	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	201.361	-	-	1.572	202.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	-					*Placements with Bank Indonesia*
dan bank lain	7.839.477	-	-	-	7.839.477	*and other banks*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	62.410.332	20.841.981	14.553.748	-	97.806.061	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	8.174.434	1.557.484	1.594.951	-	11.326.869	*Non-housing loan*
Modal kerja	16.482.663	4.771.745	3.030.203	388.002	24.672.613	*Working capital*
Investasi	2.226.486	1.024.694	871.030	216.207	4.338.417	*Investment*
Sindikasi	79.268	-	-	-	79.268	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	678.559	13.969	4.833	-	697.361	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	32.370	2.845	-	-	35.215	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	-	-	-	1.548.489	*Interests receivable*
Aset lain-lain*)	-	643.671	-	-	643.671	*Other assets*)
Total	**120.703.242**	**28.856.389**	**20.054.765**	**612.799**	**170.227.195**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(2.064.151)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**168.163.044**	***Net***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) *Consists of third party receivables*

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

The credit quality are defined as follows:

Tingkat tinggi

High grade

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat tinggi (lanjutan)

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi, memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.

(c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih, akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality are defined as follows (continued):

High grade (continued)

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan, borrowers with high degree of stability and diversity, has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time, very strong debt service capacity and has conservative statement of financial position ratios.

(c) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over, smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market, volatility of earnings and overall performance, debt service capacity is adequate.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel dibawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat standar (lanjutan)

(c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

(v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebagai berikut:

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below show the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality are defined as follows (continued):

Standard grade (continued)

(c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

(v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2016 and 2015, follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	**91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days***	**121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days***	**lebih dari 180 hari/ *More than 180 days***	**Total**	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	10.767.222	139.870	224.602	2.051.001	13.182.695	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	1.001.546	20.370	32.446	288.592	1.342.954	*Non housing loan*
Modal kerja	3.018.762	49.469	43.271	1.002.140	4.113.642	*Working capital*
Investasi	840.907	21.212	12.099	198.218	1.072.436	*Investment*
Direktur dan karyawan	1.512	186	92	2.902	4.692	*Directors and employees*
Total	**15.629.949**	**231.107**	**312.510**	**3.542.853**	**19.716.419**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(1.569.473)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**18.146.946**	*Net*

	31 Desember/*December 31,* 2015					
	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	**91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days***	**121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days***	**lebih dari 180 hari/ *More than 180 days***	**Total**	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	11.680.597	138.699	258.851	2.475.601	14.553.748	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	1.230.320	21.976	25.866	316.789	1.594.951	*Non housing loan*
Modal kerja	1.874.952	10.339	27.976	1.116.936	3.030.203	*Working capital*
Investasi	259.020	40.400	66.119	505.491	871.030	*Investment*
Direktur dan karyawan	1.970	327	251	2.285	4.833	*Directors and employees*
Total	**15.046.859**	**211.741**	**379.063**	**4.417.102**	**20.054.765**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(1.698.558)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**18.356.207**	*Net*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016						
	Konsumsi/*Consumer*						
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	Non-kepemilikan rumah/*Non-Housing Loan*	Modal Kerja/ *Working Capital*	Investasi/ *Investment*	Sindikasi/ *Syndicated*	Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employess*	
Saldo awal tahun	696.724	73.316	1.024.521	255.125	36	856	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	198.191	99.660	262.116	143.785	(5)	1.441	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	6.696	26	10.278	2.489	-	-	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(178.478)	(73.052)	(278.610)	(128.796)	-	(285)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**723.133**	**99.950**	**1.018.305**	**272.603**	**31**	**2.012**	***Balance at end of year***
Penurunan nilai individual	-	-	197.391	172.681	-	-	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	723.133	99.950	820.914	99.922	31	2.012	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	285.826	277.718	-	-	*Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses*

	31 Desember/*December 31,* 2015						
	Konsumsi/*Consumer*						
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	Non-kepemilikan rumah/*Non-Housing Loan*	Modal Kerja/ *Working Capital*	Investasi/ *Investment*	Sindikasi/ *Syndicated*	Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employess*	
Saldo awal tahun	776.922	74.860	602.307	115.946	12	136	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	100.794	3.997	595.583	197.600	24	720	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	1.867	232	12.463	1.714	-	-	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(182.859)	(5.773)	(185.832)	(60.135)	-	-	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**696.724**	**73.316**	**1.024.521**	**255.125**	**36**	**856**	***Balance at end of year***
Penurunan nilai individual	-	-	204.135	87.292	-	-	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	696.724	73.316	820.386	167.833	36	856	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	388.002	216.207	-	-	*Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division (*IAD) dan *Risk Management Division* (RMD).

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

a. inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or

b. inability to generate cash flows from funding, interbank transactions and fund borrowings.

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the BOC and BOD who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Risk Management Division (RMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus kas, dan *stress testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are liquidity ratio, maturity profile, cash flow projection, and stress testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

	31 Desember/*December 31,* 2016						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	1.006.682	-	1.006.682	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	-	10.697.378	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	321.306	(1.482)	322.788	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17.581.350	-	17.581.350	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	4.171.700	(14.441)	3.887.964	-	28.002	270.175	*Securities*
Obligasi Pemerintah	9.243.639	-	194.934	1.331.812	193.792	7.523.101	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	162.330.347	(2.116.034)	2.880.401	4.544.817	5.322.568	151.698.595	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	1.864.829	-	1.864.829	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.237.495	-	1.237.495	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**208.454.726**	**(2.131.957)**	**39.673.821**	**5.876.629**	**5.544.362**	**159.491.871**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	1.817.436	-	1.817.436	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	159.987.717	-	107.130.144	18.691.730	1.744.598	32.421.245	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	3.652.735	-	3.599.117	53.218	400	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	-	-	-	-	1.385.000	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang diterbitkan	14.919.910	-	-	932.111	1.052.384	12.935.415	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	4.999.616	-	-	3.000.000	1.999.616		*Fund borrowings*
Pinjaman subordinasi	2.999.118	-	-	-	-	2.999.118	*Subordinated Loans*
Bunga yang masih harus dibayar	382.551	-	382.551	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	3.209.034	-	3.209.034	-	-	-	*Other liabilities****)*
Total	**193.353.117**	**-**	**116.138.282**	**22.677.059**	**4.796.998**	**49.740.778**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**15.101.609**	**(2.131.957)**	**(76.464.461)**	**(16.800.430)**	**747.364**	**109.751.093**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/*December 31,* 2015

	Total	Lainnya/ *Others *)*	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month*	> 1 - 6 Bulan/ *Months*	> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months*	> 12 Bulan/ *>12 Months*	
ASET							***ASSETS***
Kas	1.181.219	-	1.181.219	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	10.986.351	-	10.986.351	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	201.361	(1.572)	202.933	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.839.477	-	7.839.477	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.807.561	(12.001)	1.461.052	38.002	-	320.508	*Securities*
Obligasi Pemerintah	8.230.908	-	-	26.901	1.285.412	6.918.595	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	136.905.226	(2.050.578)	2.858.707	4.183.498	4.151.482	127.762.117	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	1.548.489	-	1.548.489	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	643.671	-	643.671	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**169.344.263**	**(2.064.151)**	**26.721.899**	**4.248.401**	**5.436.894**	**135.001.220**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	1.599.948	-	1.599.948	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	127.708.670	-	102.159.451	15.663.814	7.334.495	2.550.910	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.721.198	-	1.173.206	547.592	400	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.135.091	-	-	-	750.091	1.385.000	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang diterbitkan	12.492.202	-	-	996.844	1.558.806	9.936.552	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	7.726.728	-	-	1.506.968	4.217.679	2.002.081	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	357.364	-	357.364	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	2.698.574	-	2.698.574	-	-	-	*Other liabilities****)*
Total	**156.439.775**	**-**	**107.988.543**	**18.715.218**	**13.861.471**	**15.874.543**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**12.904.488**	**(2.064.151)**	**(81.266.644)**	**(14.466.817)**	**(8.424.577)**	**119.126.677**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga) (tidak diaudit):

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest) (unaudited):

31 Desember/*December 31, 2016*

	Total	*On demand*	≤ 1 Bulan/ *Month*	> 1 - 6 Bulan/ *Months*	> 6 - 12 Bulan/ *Months*	> 12 Bulan/ *Months*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera *)	1.817.436	-	1.817.436	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	84.276.338	-	49.424.453	19.860.828	1.853.716	13.137.341	*Time deposits*
Tabungan	35.987.091	35.987.091	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	46.372.502	26.084.959	-	-	-	20.287.543	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	3.834.533	14.977	3.819.556	-	-	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.685.908	-	24.139	24.139	48.277	1.589.353	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang diterbitkan	16.964.841	-	75.000	1.301.858	1.666.858	13.921.125	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5.187.396	-	33.750	3.118.250	2.035.396	-	*Fund borrowings*
Pinjaman Subordinasi	2.242.500	-	22.500	112.500	135.000	1.972.500	*Subordinated Loan*
Bunga yang masih harus dibayar	382.551	-	382.551	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	3.209.034	-	3.209.034	-	-	-	*Other liabilities**)*
Total	**201.960.130**	**62.087.027**	**58.808.419**	**24.417.575**	**5.739.247**	**50.907.862**	***Total***

31 Desember/*December 31, 2015*

	Total	*On demand*	≤ 1 Bulan/ *Month*	> 1 - 6 Bulan/ *Months*	> 6 - 12 Bulan/ *Months*	> 12 Bulan/ *Months*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera *)	1.599.948	-	1.599.948	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	70.377.470	-	42.958.433	16.807.274	7.871.941	2.739.822	*Time deposits*
Tabungan	31.782.416	31.782.416	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	31.677.230	31.677.230	-	-	-	-	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	1.875.804	18.271	1.857.533	-	-	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.715.612	-	40.981	55.924	817.110	1.801.597	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang diterbitkan	18.529.189	-	75.000	1.458.063	2.131.188	14.864.938	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	8.243.816	-	-	1.606.821	4.499.032	2.137.963	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	357.364	-	357.364	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	2.698.574	-	2.698.574	-	-	-	*Other liabilities**)*
Total	**169.857.423**	**63.477.917**	**49.587.833**	**19.928.082**	**15.319.271**	**21.544.320**	***Total***

*) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

*) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

**) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

44. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Market Risk (continued)

In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2016 and 2015:

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December*, 2015		
Aset	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	***Assets***
Giro pada bank lain	0,25%	0,01%	0,63%	0,01%	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	5,89%	-	6,27%	-	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-efek	5,71%	-	6,70%	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Tingkat bunga tetap	7,84%	4,26%	7,29%	4,21%	*Fixed interest rate*
Tingkat bunga Mengambang	5,72%	-	5,96%	-	*Variable interest rate*
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah	12,52%	-	12,35%	-	*Loans and sharia financing/ receivables*
Liabilitas					***Liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	1,48%	0,00%	2,40%	0,00%	*Demand deposits*
Tabungan	4,22%	-	4,08%	-	*Savings deposits*
Deposito Berjangka	6,33%	0,05%	6,73%	0,05%	*Time deposits*
Simpanan dari Bank lain					*Deposits from other banks*
Giro	2,13%	-	1,51%	-	*Demand deposits*
Deposito Berjangka	6,00%	-	9,09%	-	*Time deposits*
Inter-bank call money	4,70%	-	5,44%	-	*Inter-bank call money*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,31%	-	8,17%	-	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang yang diterbitkan	9,18%	-	9,36%	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima					*Fund Borrowings*
Kredit Likuditas Bank Indonesia	-	-	0,42%	-	*Bank Indonesia Liquidity Loans*
Rekening Dana Investasi	-	-	5,51%	-	*Investment funds account*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited):

31 Desember/*December 31,* 2016

	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun/ More than 1 year*	Suku bunga *tetap/ Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/*syariah Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	1.006.682	1.006.682	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	9.883.127	-	-	-	814.251	10.697.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	321.988	-	-	-	800	322.788	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	15.046.350	2.535.000	17.581.350	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	400.474	-	-	3.670.112	115.555	4.186.141	*Securities*
Obligasi Pemerintah	6.051.796	-	-	3.141.015	50.828	9.243.639	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan *syariah*	2.572.610	7.145.191	83.246.893	57.257.266	14.224.421	164.446.381	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	1.864.829	1.864.829	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.237.495	1.237.495	*Other assets*)*
Total aset keuangan	19.229.995	7.145.191	83.246.893	79.114.743	21.849.861	210.586.683	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.817.436	1.817.436	*Liabilities due immediately**)*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	22.586.453	-	-	20.057.227	3.202.375	45.846.055	*Demand deposits*
Tabungan	32.191.649	-	-	585.186	2.049.373	34.826.208	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	69.536.953	9.778.501	79.315.454	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	755.420	-	-	2.888.468	8.847	3.652.735	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	14.919.910	-	14.919.910	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	-	-	-	-	1.385.000	*Securities sold under repurchase agreements*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	4.999.616	-	4.999.616	*Fund Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	2.999.118	-	2.999.118	*Subordinated Loan*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	382.551	382.551	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	3.209.034	3.209.034	*Other liabilities***)*
Total liabilitas keuangan	56.918.522	-	-	115.986.478	20.448.117	193.353.117	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(37.688.527)**	**7.145.191**	**83.246.893**	**(36.871.735)**	**1.401.744**	**17.233.566**	***Gross interest repricing gap***

31 Desember/*December 31,* 2015

	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun/ More than 1 year*	Suku bunga *tetap/ Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/*syariah Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	1.181.219	1.181.219	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	10.344.884	-	-	-	641.467	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	202.447	-	-	-	486	202.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	6.606.977	1.232.500	7.839.477	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	361.170	-	-	1.312.808	145.584	1.819.562	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.781.806	-	-	2.398.306	50.796	8.230.908	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan *syariah*	2.709.044	5.895.548	85.407.272	33.720.294	11.223.646	138.955.804	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	1.548.489	1.548.489	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	643.671	643.671	*Other assets*)*
Total aset keuangan	19.399.351	5.895.548	85.407.272	44.038.385	16.667.858	171.408.414	*Total financial assets*

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit): (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited): (continued)

	31 Desember/December 31, 2015						
	Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total	
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.599.948	1.599.948	*Liabilities due immediately**)*
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	29.152.160	-	-	-	2.216.283	31.368.443	*Demand deposits*
Tabungan	28.953.249	-	-	449.485	1.354.947	30.757.681	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	58.049.240	7.533.306	65.582.546	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	14.917	-	-	1.704.519	1.762	1.721.198	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	12.492.202	-	12.492.202	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	-	-	750.091	-	2.135.091	*Securities sold under repurchase agreements*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	7.726.728	-	7.726.728	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	357.364	357.364	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	2.698.574	2.698.574	*Other liabilities***)*
Total liabilitas keuangan	59.505.326	-	-	81.172.265	15.762.184	156.439.775	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(40.105.975)**	**5.895.548**	**85.407.272**	**(37.133.880)**	**905.674**	**14.968.639**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2016 and 2015. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed rate available-for-sale financial assets as of December 31, 2016 and 2015 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2016 and 2015:

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	**Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of Comprehensive Income***	**Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity***	
Rupiah	+125	(3.391)	(80.241)	*Rupiah*
	+50	(1.404)	(27.276)	
	-50	1.473	28.819	
	-125	3.822	90.250	
Dolar Amerika Serikat	+125	10.228	-	*United States Dollar*
	+50	4.091	-	
	-50	(4.091)	-	
	-125	(10.228)	-	

	31 Desember/*December 31*, 2015			
	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	**Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of Comprehensive Income***	**Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity***	
Rupiah	+50	(139)	(19.407)	*Rupiah*
	-50	142	20.588	
	+125	(344)	(46.491)	
	-125	359	53.894	
Dolar Amerika Serikat	+50	(264)	-	*United States Dollar*
	-50	*277*	-	
	+125	(638)	-	
	-125	717	-	

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *44. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Pasar (lanjutan) / *Market Risk (continued)*

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) / *i. Interest rate risk (continued)*

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga variable (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2016 and 2015:

	31 Desember/*December 31,* 2016		
	Perubahan basis poin/ *Change in basis point*	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of comprehensive income***	
Rupiah	±125	±3.606	*Rupiah*
	±50	±1.439	

	31 Desember/*December 31*, 2015		
	Perubahan basis poin/ *Change in basis point*	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of comprehensive income***	
Rupiah	±50	±121.211	*Rupiah*
	±125	±303.027	

ii. Risiko Nilai Tukar / *ii. Exchange rate risk*

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit).

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited).

	31 Desember/*December 31,* 2016		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ *Percentage change in foreign currency rate*	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±136	*United States Dollar*
	±0,35%	±156	

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / 44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan) / Market Risk (continued)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan) / ii. Exchange rate risk (continued)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2015		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ *Percentage change in foreign currency rate*	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ *Impact to Statement of comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0,30% ±0,35%	±266 ±311	*United States Dollar*

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2016 and 2015, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional / Operational Risk

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi *Internal Audit* melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Risk Management Division* (RMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara *online* melalui media *web* (web based*).*

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperolah, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan atau regulasi yang mendukung dan kelemahan perjanjian atau perikatan. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan *Risk Management Division* dan *Legal Division* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the RMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

Legal Risk

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in policy or regulation and weak agreement or engagement. At the same time, each division together with Risk Management Division and Legal Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted together by Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum (lanjutan)

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (disclosure requirement), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assesment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai corporate secretary bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk (continued)

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparties.

Reputational Risk

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (NES) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

Corporate Social Responsibility is not focused only on charity, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP).

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategy and Performance Management Division* (SPMD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh SPMD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Perfomance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang me*review* strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko stratejik, *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, *CMPD* menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke *RMD* dan RMC untuk di*review*.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategy and Performance Management Division (SPMD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by SPMD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Strategy & Performance Management Division (SPMD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMPD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMPD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by RMD and RMC.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan *monitoring* terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke RMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk merevieu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern. BRO memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Internal Access Management Standards (AIMS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMPD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to RMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, RMD and CMPD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits. BRO ensures that the branch offices have completed the findings/results of the related audit.

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2016 and 2015 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December 31,* 2015		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Kas	1.006.682	1.006.682	1.181.219	1.181.219	*Cash*
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	548.521	548.521	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	1.130.579	1.130.579	19.267	19.267	*Government bonds*

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini (lanjutan).

45. *FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2016 and 2015 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates (continued).

	31 Desember/*December 31, 2016*		31 Desember/*December 31,* 2015		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan (lanjutan)					*Financial Assets (continued)*
Tersedia untuk dijual					*Available for sale*
Efek-efek	3.332.913	3.332.913	1.455.444	1.455.444	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.076.450	5.076.450	5.111.280	5.111.280	*Government bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Efek-efek	290.266	293.138	352.117	355.439	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.036.610	3.029.076	3.100.361	3.034.778	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loans and Receivable*
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	10.697.378	10.986.351	10.986.351	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	321.306	321.306	201.361	201.361	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	17.581.350	17.581.350	7.839.477	7.839.477	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer					*Consumer*
Pemilikan rumah	117.236.251	116.280.103	97.109.337	97.007.902	*Housing loan*
Non-kepemilikan Rumah	11.317.194	11.317.194	11.253.553	11.253.553	*Non-housing loan*
Modal kerja	27.730.694	27.730.694	23.648.092	23.648.092	*Working capital*
Investasi	4.581.193	4.581.193	4.083.292	4.083.292	*Investment*
Sindikasi	78.770	78.770	79.232	79.232	*Syndicated*
Direksi dan karyawan	1.386.245	1.386.245	731.720	731.720	*Directors and employees*
Bunga yang masih akan diterima	1.864.829	1.864.829	1.548.489	1.548.489	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.237.495	1.237.495	643.671	643.671	*Other assets*)*
Total aset keuangan	**208.454.726**	**207.493.916**	**169.344.263**	**169.180.567**	***Total financial assets***
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Liabilitas segera**)	1.817.436	1.817.436	1.599.948	1.599.948	*Current liabilities**)*
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	45.846.055	45.846.055	31.368.443	31.368.443	*Demand deposits*
Tabungan	34.826.208	34.826.208	30.757.681	30.757.681	*Savings deposits*
Deposito Berjangka	79.315.454	79.315.454	65.582.546	65.582.546	*Time deposits*
Simpanan dari Bank Lain					*Deposits from other banks*
Giro	11.972	11.972	14.016	14.016	*Demand deposits*
Tabungan	2.295	2.295	2.663	2.663	*Savings deposits*
Deposito Berjangka	2.888.468	2.888.468	1.429.519	1.429.519	*Time deposits*
Interbank call money	750.000	750.000	275.000	275.000	*Interbank call money*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000	2.135.091	2.135.091	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang Diterbitkan	14.919.910	15.103.367	12.492.202	12.654.578	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	4.999.616	4.999.616	7.726.728	7.726.728	*Fund Borrowings*
Pinjaman Subordinasi	2.999.118	2.999.118	-	-	*Subordinated Loan*
Bunga yang masih harus dibayar	382.551	382.551	357.364	357.364	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	3.209.034	3.209.034	2.698.574	2.698.574	*Other liabilities***)*
Total liabilitas keuangan	**193.353.117**	**193.536.574**	**156.439.775**	**156.602.151**	***Total financial liablities***

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.*

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;

(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;

(iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;

(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;

(iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

	31 Desember/*December 31*, 2016				
	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	548.521	548.521	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	1.130.579	1.130.579	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.679.100	1.679.100	-	-	*Total fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual					*Available-for-sale*
Efek-efek	3.332.913	3.332.913	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.076.450	5.076.450	-	-	*Government bonds*
Total tersedia untuk dijual	8.409.363	8.409.363	-	-	*Total available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held-to-maturities*
Efek-efek	293.138	293.138	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.029.076	3.029.076	-	-	*Government bonds*
Total dimiliki hingga jatuh tempo	3.322.214	3.322.214	-	-	*Total held-to-maturities*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	161.374.199	-	160.810.655	563.544	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Surat berharga yang Diterbitkan	15.103.367	-	15.103.367	-	*Securities issued*

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2015				
	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Obligasi Pemerintah	19.267	19.267	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	19.267	19.267	-	-	*Total fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual					*Available-for-sale*
Efek-efek	1.455.444	1.455.444	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	5.111.280	5.111.280	-	-	*Government bonds*
Total tersedia untuk dijual	6.566.724	6.566.724	-	-	*Total available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held-to-maturities*
Efek-efek	355.439	355.439	-	-	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.034.778	3.034.778	-	-	*Government bonds*
Total dimiliki hingga jatuh tempo	3.390.217	3.390.217	-	-	*Total held-to-maturities*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	136.803.791	-	136.199.582	604.209	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Surat berharga yang Diterbitkan	12.654.578	-	12.654.578	-	*Securities issued*

a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker) /pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

45. *FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Securities and Government Bonds

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued and fund borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

46. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut:

46. *EARNINGS PER SHARE*

The reconciliation of the factors used in calculating the basic and diluted earnings per share, for the year ended December 31, 2016 and 2015, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2016		
(i) Laba tahun berjalan	2.618.905	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.588.715.811	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	247	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*
(iv) Dampak dilusi dari		(c)	*Effects of dillution from: (iv)*
MESOP I	-		*MESOP I*
MESOP II	-		*MESOP II*
MESOP III	442.623		*MESOP III*
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.589.158.434	(d = b + c)	*Weighted average number of shares outstanding after dillution (v)*
(vi) Laba per saham dilusian	247	(a/d)	*Diluted earnings per share (vi)*

46. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut (lanjutan):

46. EARNINGS PER SHARE (continued)

The reconciliation of the factors used in calculating the basic and diluted earnings per share, for the year ended December 31, 2016 and 2015, are as follows (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2015		
(i) Laba tahun berjalan	1.850.907	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.573.170.280	(b)	*Weighted average (ii) number of shares outstanding*
(iii) Laba per saham dasar	175	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*
(iv) Dampak dilusi dari		(c)	*Effects of dillution from: (iv)*
MESOP I	-		*MESOP I*
MESOP II	-		*MESOP II*
MESOP III	277.751		*MESOP III*
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.573.448.031	(d = b + c)	*Weighted average number of (v) shares outstanding after dillution*
(vi) Laba per saham dilusian	175	(a/d)	*Diluted earnings per share (vi)*

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2016:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:

a. Amandemen PSAK 1, ”Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen PSAK 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amendment) sebagai berikut: PSAK 3 ”Laporan Keuangan Interim”, PSAK 5 ”Segmen Operasi”, PSAK 60 ”Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, dan PSAK 62 ”Kontrak Asuransi”.

47. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the Several Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2016:

Effective on or after January 1, 2017:

a. Amendment SFAS 1, “Presentation of Financial Statements”, have given clarification regarding materiality, hierarchy flexibility, systematic notes for financial statements and identification of significant accounting policy. Amendment SFAS 1 have impacted other SFAS (consequential amendment) such as: SFAS 3 “Interim Financial Reporting”, SFAS 5 “Operating Segments”, SFAS 60 “Financial Instruments: Disclosures”, and SFAS 62 “Insurance Contract”.

48. INFORMASI TAMBAHAN

a. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (non-performing ratio) masing-masing adalah sebesar 2,64% dan 3,20%.

b. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 60,24% dan 77,35%.

c. Baru-baru ini Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional sebesar Rp258,5 miliar pada tahun 2016.

49. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2017.

48. ADDITIONAL INFORMATION

a. As of December 31, 2016 and 2015, the Bank's non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio) are 2.64% and 3.20%, respectively.

b. As of December 31, 2016 and 2015, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 55 (Revised 2014) to minimum allowance for impairment losses based on Bank Indonesia regulation is 60.24% and 77.35%, respectively.

c. Recently, the Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation therefore the definite amount of pontential loss from this case still can not be determine yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses amounting to Rp258.5 billion in year 2016.

49. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue on February 10, 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan

REFERENSI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
I. Umum			
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.		√
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.		√
3	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√
4	Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/ atau keterangan yang jelas	Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi) kotor; 3. Laba (rugi); 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 5. Total laba (rugi) komprehensif 6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 7. Laba (rugi) per saham 8. Jumlah aset 9. Jumlah liabilitas 10. Jumlah ekuitas 11. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 12. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset 13. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas 14. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan 15. Rasio lancar 16. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 17. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset 18. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya	20-29

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
2.	Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	166
3	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split)*, penggabungan saham (*reversestock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan Informasi memuat antara lain:	1. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi 2. Rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham 3. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi 4. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi	168
4	Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut		NA
5	Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakantindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut		NA

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
III. Laporan kepada Pemegang Saham			
1	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris;dan 5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	44-50
2	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain a. Kebijakan strategis, b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan dan langkah-langkah penyelesaiannya; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	64-82
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembara tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	92 - 93

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
IV. Profil Perusahaan			
1.	Profil Perusahaan	Memuat antara lain: Nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan.	97
2.	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: Tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada) dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan**: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	98-101
3	Kegiatan Usaha	Mencakup antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	107-108 109-121
4.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Struktur Organisasi perusahaan dalam bentuk bagan meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	128-129
5.	Visi dan Misi Perusahaan.	Uraian mengenai antara lain: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan.	102
6.	Identitas Dewan Komisaris	Uraian meliputi antara lain: antara lain: 1. Nama; 2. Riwayat jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) 8. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada) 9. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS.	52-58

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
7.	Identitas Direksi	Uraian meliputi antara lain: 1. Nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan 2. Riwayat jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk; 7. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; 8. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS 9. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) 10. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada)	84-91
8	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya		49; 423-424; 435-436 82; 424-425; 463-464

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
9.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing- masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing- masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	134-143
10.	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku.	Uraian meliputi antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% dan persentase kepemilikannya. 3. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. **Catatan**: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung,agar diungkapkan.	122-126
11	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram		122-126

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
12.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 5. Informasi mengenai alamat Entitas Anak	143
13.	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV)	143
14.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/ atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. **Catatan**: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	167
15.	Kronologi penerbitan dan/ atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku: dan 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; 5. Nilai penawaran efek lainnya;dan 6. Peringkat efek.	170-171
16.	Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat pemeringkat efek.	155

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
17.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	36-40
18.	Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat antara lain: 1. Nama dana alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. **Catatan**:apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan	144-154
19	Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	156-158
20	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. **Catatan**: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	52-58; 84-91; 500; 509-510; 519-520; 565; 586-587

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen Perusahaan			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas	196-223
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan table), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas.	231-246
3.	Bahasan dan analisis tentang kemmpuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	247-249
4.	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*)	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure); dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal .	253-255

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. **Catatan**: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	315-317
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	318
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dcapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi): dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	342-345

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setalah tanggal pelaporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal pelaporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan**: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	324
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	224-226
10.	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	187-195
11.	Uraian mengenai kebijakan deviden dan jmlah deviden kas per saham dan jumlah deviden per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian deviden; 2. Total deviden yang dibagikan; 3. Jumlah deviden kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran deviden kas untuk masing-masing tahun. **Catatan**: apabila tidak ada pembagian deviden, agar diungkapkan alasannya	176; 313-314
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. **Catatan**: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan	319
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS /RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	320-321

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
14.	Informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha,akuisisi atau restrukturisasi utang/modal	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan 3. Sumber dana. **Catatan**: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	325
15.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukan transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. **Catatan**: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	327-333
16.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. **Catatan**: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	334-338
17.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. **Catatan**: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	339-341

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
18.	Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. **Catatan**: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.	227-230
VI.	**Good Corporate Governance (GCG)**		
1.	Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan ; 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan; 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 6. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)	434-460
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	436-437
3.	Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. 7. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada).	461-534
4.	*Assessment* terhadap Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 3. Pihak yang melakukan *assessment*.	460 & 486-487

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
5.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. **Catatan**: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	383-402
6.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). **Catatan**: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan	540-550
7.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	445-455

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
8.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. **Catatan**: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	438-439; 468-469
9.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pegang Sahm Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya;dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. **Catatan**: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	52-58; 437-438 84-89; 468
10.	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja anggota Komite Audit; 3. Independensi anggota Komite Audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan anggota Komite Audit; 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit.	490-501
11.	Komite/ Nominasi dan Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	501-513

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
12.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi anggota komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	514-522
13.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan; dan 4. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.	564-574
14.	Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	580-593
15.	Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya	Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.	407-433
16.	Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. **Catatan**: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	625-628

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
17.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan pada tahun buku; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko pada tahun buku;; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	607-624
18.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.	575-579
19.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 3. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	677-681
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 3. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.	682-686

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
21.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 3. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain 4. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	687-698
22.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 3. Kegiatan yang dilakukan dan dampak dari kegiatan tersebut; terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	699-703
23.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; 4. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 5. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). **Catatan**: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	642-643
24.	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	651-652

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
25.	Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Upaya penegakan dan Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan; dan 6. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. **Catatan**: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	629-632
26	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. **Catatan**: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	635-641
27.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya	535-539
VII. Informasi Keuangan			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	707
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		709-710

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	709-710
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca); 2. Laporan laba rugi komprehensif; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; dan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	711-918
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	716-717
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	720-722
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	733-779
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	869-877

No	Kriteria	Penjelasan	Halaman
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	856-862
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	816-819
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	867
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	881-916
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbits; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	707

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bank BTN
Sahabat Keluarga Indonesia

LAPORAN TAHUNAN 2016

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp. 62-21 6336789, 63322666
Fax. 62-21 6346704
www.btn.co.id
Contact Center: 1500286